

PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM (Isu-Isu Kontemporer Tentang Konsep, Kebijakan Dan Implementasi)

by Buku Abdurrahmansyah

Submission date: 09-Aug-2022 02:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 1880585897

File name: Buku_Perbandingan_Pendidikan_Islam.pdf (20.04M)

Word count: 149605

Character count: 967322

PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM

(ISU-ISU KONTEMPORER TENTANG KONSEP,
KEBIJAKAN, DAN IMPLEMENTASI)



Penulis
Dr. Abdurrahmansyah, M. Ag., dkk

Dr. Abdurrahmansyah, M. Ag., dkk

**PERBANDINGAN
PENDIDIKAN ISLAM
(Isu-Isu Kontemporer Tentang Konsep, Kebijakan
Dan Implementasi)**



Jl. Kebun Bunga No. 2 Rt. 39 Rw. 13 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang
0821755772235  Penerbit Anugrah Jaya  Penerbit Anugrah Jaya
Website: <http://penerbitanugrahjaya.com> Email: anugrahjaya810@gmail.com

PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM

(Isu-Isu Kontemporer Tentang Konsep, Kebijakan Dan Implementasi)

Penulis : **Dr. Abdurrahmansyah, M. Ag., dkk.**
Editor : Dewi Ardila, S.E
Desainer Isi : Tim Kreatif Anugrah Jaya
ISBN : 978-623-6721-46-9
Ukuran Buku : B5, 18,2 cm x 25,7cm
Hal : 378 + viii

Diterbitkan dan dicetak oleh:

CV. Penerbit Anugrah Jaya

Anggota IKAPI No. 017/SMS/19

Jl. Kebun Bunga No. 1-3 RT. 39 RW 13 Kel. Kebun Bunga

Website: <http://penerbitanugrahjaya.com>

Telepon/Fax: 082175577235

Palembang – Indonesia 30126

Email: anugrahjaya810@gmail.com

Cetakan 1, April 2021

Dilarang keras menyalin, menjiplak, memperbanyak, atau memfotokopi baik sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Anugrah Jaya.

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



KATA PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed.

Puji syukur kehadiran Allah Swt., yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas, pembinaan dan pengembangan serta proses pembelajaran pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan dan keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Saudara Ketua Program Studi S2 PAI FITK beserta Sekertaris, dosen pembimbing dan jajaran yang telah melakukan trobosan dan hal- hal yang tidak lazim dalam kegiatan belajar mengajar di kampus. Selama ini saya merasa bahwa setelah program perkuliahan dan penilaian, berakhir sudah kegiatan KBM. Namun kali ini saya melihat ada hal yang berbeda, karena yang dibahas dan dipelajari di ruang kuliah dapat terdokumentasi dengan baik, dalam bentuk buku rujukan, *Perbandingan Pendidikan Islam*.

Perbandingan merupakan lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktik pendidikan sebagaimana terdapat pada berbagai negara. Dengan demikian maka studi perbandingan pendidikan ini adalah mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau aspek dari ssystem pendidikan, untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada dari kedua hal tersebut. Pendidikan Islam merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia, agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah dan sekaligus tugas khalifah Allah tercapai sebaik mungkin.

Kendati demikian umumnya proses perbandingan dalam pendidikan lebih ditujukan pada upaya mengetahui dengan jelas dan objektif terhadap berbagai aspek diantaranya dasar falsafah pendidikan di suatu negara, aspek kurikulum, kebijakan, sistem pendidikan, persiapan pendidikan bagi guru, anggaran pendidikan, sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan, ekonomi pendidikan, letak geografis pendidikan, psikologi pendidikan, statistik, sastra, geografi politik, dan hubungan internasional pendidikan di suatu negara berjalan dengan baik.

Kedua istilah tersebut, perbandingan maupun pendidikan Islam telah dibahas dengan baik dalam buku ini. Untuk itu saya menyampaikan selamat atas terbitnya buku Perbandingan Pendidikan Islam ini, seraya berharap kepada para dosen dan mahasiswa S2 PAI untuk menjadikan karya ini, khususnya kepada para penyusun – sebagai pengalaman awal untuk melahirkan karya-karya berikutnya. Semoga Allah Swt., meridhoi usaha dan pengabdian kita semua, *Aamiin Yaa Rabbalalamin*.

Palembang, 17 Februari 2021
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Raden Fatah
Palembang,

Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed.
NIP. 196509271991031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI.....	v
PERBANDINGAN PENDIDIKAN KONTEMPORER	1
BAB I SISTEM PENDIDIKAN DI FINLANDIA	31
BAB II SISTEM PENDIDIKAN DI THAILAND	59
BAB III SISTEM PENDIDIKAN DI JERMAN.....	83
BAB IV SISTEM PENDIDIKAN DI PAKISTAN	101
BAB V SISTEM PENDIDIKAN DI IRAK	131
BAB VI SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA	153
BAB VII SISTEM PENDIDIKAN DI MESIR	179
BAB VIII SISTEM PENDIDIKAN DI AUSTRALIA	203
BAB IX SISTEM PENDIDIKAN DI SINGAPURA	227
BAB X SISTEM PENDIDIKAN DI PRANCIS.....	251
BAB XI SISTEM PENDIDIKAN DI INGGRIS.....	261
BAB XII SISTEM PENDIDIKAN DI CINA	293
BAB XIII SISTEM PENDIDIKAN DI SAUDI ARABIA.....	319
BAB XIV SISTEM PENDIDIKAN DI KOREA SELATAN	337
BAB XV SISTEM PENDIDIKAN DI BRUNEI DARUSSALAM	351
BAB XVI SISTEM PENDIDIKAN DI BELANDA	367
BAB XVII SISTEM PENDIDIKAN DI AMERIKA SERIKAT	391
BAB XVIII SISTEM PENDIDIKAN DI JEPANG	423
DAFTAR PUTAKA	447
PROFIL PENULIS	454

BABI
**PERBANDINGAN PENDIDIKAN KONTEMPORER:
SEBUAH PENDEKATAN DAN PENGALAMAN UNTUK
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

Abdurrahmansyah

abdurrahmansyah73@radenfatah.ac.id

A. PENDAHULUAN

Studi perbandingan pendidikan sampai saat ini terus mengalami perkembangan baik dari aspek konten, cakupan studinya maupun aspek metodologi. Kajian perbandingan perbandingan sudah sangat berkembang melalui pendekatan multidisipliner terutama pada 50 tahun terakhir. Dengan demikian dari sisi scope atau wilayah konten kajian ini sangat berkembang dan semakin banyak menarik minat pada ilmuan di seluruh dunia (Cowen & Kazamias, 2009). Menariknya studi perbandingan pendidikan karena, sangat berpotensi untuk memahami berbagai persoalan dan kondisi nyata dari fenomena pendidikan di berbagai negara dalam berbagai isu dan aspek pendidikan. Bahkan studi perbandingan pendidikan dapat membongkar semua aspek pendidikan di sebuah negara mulai dari sejarah awal sampai masa kontemporer. Seorang ilmuwan bidang *comparative education*, Boadfoot T (1978), justru menegaskan bahwa kajian perbandingan pendidikan dapat menjadi pertimbangan bagi sebuah negara untuk melakukan reproduksi pendidikan, sosial, dan budaya.

Di era globalisasi, kajian perbandingan pendidikan banyak dikembangkan terutama untuk meningkatkan upaya saling tukar informasi mengenai model dan paradigma pengembangan sektor ekonomi global. Isu mengenai ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*) sangat aktual dan terus diperbincangkan di berbagai forum dunia. Isu-isu ekonomi sebagai bagian dari konten yang dikaji dalam ilmu perbandingan pendidikan berpeluang untuk menumbuhkan kemajuan ekonomi sebuah bangsa di tengah-tengah tantangan globalisasi yang selalu berorientasi pada profit, industrialisasi, orientasi pasar, dan daya saing (Dale, 2005). Persoalan tenaga kerja yang menjadi isu penting ekonomi, pada dasarnya berhubungan dengan isu pendidikan, karena tenaga terampil dan isu mengenai kompetensi dan *skill* tenaga kerja adalah diskursus penting dalam pengembangan orientasi pendidikan modern.

Dengan berkembangnya studi perbandingan pendidikan ini, Spolton L (1968) sejak lama mengemukakan bahwa studi bidang ini dapat didekati dengan berbagai pendekatan dan lintas keilmuan. Karena sifatnya yang sangat unik, konteks pendidikan pada sebuah negara tentu tidak serta merta diklaim sebagai sama dengan negara lain. Berbagai aspek pendidikan yang dikaji pada sebuah negara tetap memiliki keunikannya sehingga belum tentu dapat diterapkan atau diadopsi oleh negara lain. Karena itu, aspek yang penting dipahami dalam perbandingan pendidikan ini adalah pengenalan terhadap konteks geografi masing-masing negara (Brook, 2018). Bahwa konten yang dipelajari melalui studi perbandingan bisa

sama, namun aplikasi dan problem implementasinya bisa sangat berbeda. Hal ini sangat tergantung pada konteks politik, geografi, ekonomi, falsafah, budaya, dan konteks sosiologis masyarakat tertentu. Namun demikian, bagaimanapun studi perbandingan pendidikan telah membantu untuk menjelaskan posisi pembangunan pendidikan pada sebuah negara dan melihat peluang pengembangannya sesuai dengan tantangan dan tuntutan perkembangan zaman yang terus berubah.

Mengacu Noah (1984) dalam sebuah artikel berjudul *The Use and Abuse of Comparative Education*, mengingatkan berbagai kalangan untuk melihat bidang kajian perbandingan secara utuh dan objektif. Bahwa hasil kajian perbandingan pendidikan akan mengidentifikasi secara apa adanya atau secara otentik dari konteks pendidikan yang diteliti. Oleh karena itu, sangat mungkin hasil kajian dan temuan-temuan akademik mengenai pendidikan pada sebuah negara dijadikan bahan untuk pengembangan dan bahkan bisa jadi sebagai bahan untuk tujuan-tujuan negatif. Dalam era perdagangan bebas (*free trade*) yang melibatkan sektor pendidikan, maka data yang terkait dengan kondisi pendidikan pada sebuah negara akan mungkin dikooptasi dan dimanipulasi untuk kepentingan tertentu yang tidak menguntungkan secara luas. Perang kepentingan berbagai negara atas negara lain, dan ekspektasi negara lain untuk menguasai dan berinvestasi di negara tertentu sangat mungkin mengacu dan didapatkan dari data dan temuan riset dalam bidang perbandingan pendidikan ini. Kemajuan yang ditawarkan modernitas dengan akses yang sangat cepat dalam mendapatkan informasi dan data melalui sistem open data (*open data system*) cenderung menimbulkan imperialisme baru dalam dunia pendidikan (Tikly, 2004). Menurut Carter, *comparative education* merupakan studi yang fokus untuk membandingkan teori dan praktek di negara-negara yang bertujuan untuk memperluas pandangan dan pengetahuan di luar batas negaranya (Djuwairiyah & Muqit, 2017).

Bidang pendidikan sangat efektif untuk mendukung program pengembangan gagasan-gagasan baru yang sangat mungkin sudah ditunggangi oleh kelompok kepentingan tertentu. Bangsa Eropa dan Amerika sangat gencar mendorong keterbukaan akses negara-negara menuju pergaulan yang saling melengkapi. Pada tataran inilah, menurut Tikly (2004) peluang untuk menguasai negara-negara yang belum maju bagi kepentingan negara-negara maju. Namun demikian, melalui kajian perbandingan pendidikan sangat mungkin untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dan fakta negative dari berbagai program dan kebijakan global yang merugikan negara lain, untuk selanjutnya membangun wacana kontradiktif untuk menolak imperialisme dan mendukung isu anti imperialisme melalui pendidikan. Dengan demikian, studi perbandingan pendidikan pada tataran tertentu dapat berfungsi untuk mengontrol perang wacana dalam isu politik internasional.

Secara akademik, menurut Cambridge & Thomson (2004) studi perbandingan pendidikan lebih diorientasikan untuk membangun keterbukaan pandangan dunia mengenai aspek pendidikan di negara-negara masing-masing. Tidak boleh ada negara yang mengisolasi diri dengan cara menutup akses informasi dan investasi negara lain. Karena itu, pengembangan program pendidikan internasional yang ada pada setiap negara adalah untuk mendorong munculnya

internasionalisme dan globalisasi. Setiap negara harus menyadari bahwa keberadaannya adalah sebagai bagian dari negara lain. Proses menuju globalisasi dan internasionalisasi adalah dengan cara membuat kebijakan luar negeri yang mendorong perkembangan program internasionalisasi melalui pembukaan akses terhadap sumber daya asing, sambil mempersiapkan sumber daya dalam negeri untuk mampu berkompetisi di dunia internasional. Di Indonesia, program dan kebijakan internasionalisasi ini dapat dilihat dari kolaborasi riset internasional, tukar menukar pelajar internasional, dan mendorong kerjasama pendidikan luar negeri secara saling menguntungkan.

Mengacu pada penelitian Packham, Miller, Pickernell, & Thomas (2010), bahwa konsep pendidikan *interpreneurship* yang akhir-akhir ini banyak dikembangkan pada semua negara di dunia adalah hasil dari kajian interkonaktif antara aspek ekonomi dan pendidikan. Dunia pendidikan harus mengembangkan sebuah gagasan baru yakni membantu peserta didik untuk melihat peluang ekonomi dan mampu mengembangkannya dalam bentuk kegiatan usaha yang produktif. Lembaga pendidikan tidak bisa lagi berkuat pada dimensi akademik dengan mempertahankan kurikulum *subject academic* semata, tetapi perlu melihat peluang pengembangan aspek lain pada konsep kurikulum teknologis yang berorientasi pada penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan konsep pendidikan berbasis *interpreneurship* di berbagai negara bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara di tengah era perdagangan bebas. Karena itu, lembaga pendidikan perlu melihat setting sosial, kultur, dan gender untuk mengembangkan konsep pendidikan *interpreneurship* untuk selanjutnya mempertimbangkan peluang kerjasama pendidikan dengan negara-negara lain. Melatih pelajar bidang teknik di universitas luar negeri menjadi program populer di berbagai negara.

Namun, berkembangnya program pendidikan *interpreneurship* sebagai dampak positif dari keberhasilan pendidikan kewirausahaan di berbagai negara, ternyata menimbulkan persoalan baru. Di China misalnya, karena keberhasilan investasi dan meningkatnya daya saing ekonomi melalui keterserapan tenaga kerja terdidik, maka sekitar 10 persen penduduk China melakukan migrasi ke kota untuk melayani kebutuhan tenaga kerja di sektor ekonomi yang terkonsentrasi di kota-kota. Akibatnya adalah banyak sekali desa yang ditinggalkan sehingga mengancam pengembangan sektor pertanian yang berdampak pada ketersediaan sumber pangan nasional yang dapat menurun. Dalam pada itu, tercatat sekitar 19,8 juta anak-anak berpindah tempat tinggal sebagai konsekwensi kepindahan orang tua mereka, yang juga menimbulkan problem adaptasi dan terabaikannya pendidikan anak-anak, kesehatan, dan layanan dasar lainnya (Tan, 2010). Di sinilah, pentingnya sebuah negara melakukan studi komprehensif mengenai kebijakan pembangunan yang didasarkan pada studi perbandingan pendidikan, sehingga kebijakan pendidikan di bidang teknologi yang berbasis di kota diimbangi dengan pendidikan bidang pertanian dan agroindustri yang berpusat di pedesaan. Beberapa negara berhasil mengorganisasikan berbagai kebijakan sehingga mampu menyelaraskan program pendidikan dan pengembangan ekonomi secara *complemented* dan terpadu. Isu ini

juga dialami oleh beberapa negara yang sedang mengalami konflik dan berimbas pada negara-negara tetangga yang harus membantu pendidikan para pengungsi (Dryden, 2016).

Program untuk pendidikan internasional saat ini mengalami progress yang signifikan di berbagai negara dan banyak menarik para sarjana untuk melakukan riset perbandingan pendidikan mengenai implementasinya di beberapa negara. Tema-tema yang dibahas para peneliti terkait dengan pendidikan internasional ini di antaranya adalah isu mengenai pendidikan komparatif dan internasional, internasionalisasi pendidikan tinggi, sekolah internasional, penelitian internasional tentang pengajaran dan pendidikan guru, internasionalisasi pendidikan K-12, dan globalisasi. Studi diarahkan pada berbagai pendekatan kajian yakni pendekatan historis dan perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya global (Dolby & Rahman, 2008). Dengan demikian, aspek pendidikan yang penting ditelusuri di setiap negara adalah penjelasan mengenai sejarah pendidikan, filsafat pendidikan, kebijakan kurikulum, kebijakan tentang rekrutmen dan gaji guru, pendidikan guru, penyediaan fasilitas pendidikan, sistem pendidikan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, pembiayaan pendidikan, peserta didik, dan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai proses pembelajaran, pelatihan guru, dan seterusnya. Semua aspek pendidikan yang ada dan terkait dengan penerapan pendidikan dengan sendirinya menjadi bagian yang perlu dikaji dan dijelaskan dalam studi perbandingan pendidikan.

Pada era postmodern substansi konten, metodologi, dan cara pandang dalam melihat studi perbandingan pendidikan pasti akan mengalami perubahan dan bergeseran. Isu-isu tak terduga yang melanda dunia akan terus terjadi dan dengan sendirinya menjadi isu penting untuk dianalisis melalui bidang ilmu perbandingan pendidikan (Paulston, 1999). Sebagai contoh pandemi Covid-19 yang secara massif dialami seluruh dunia memaksa semua negara untuk mengubah cara pandang pembelajaran dan manajemen pendidikan sekolah. Penutupan sekolah dan mengalihkan proses belajar dari rumah tentu memiliki dampak yang berbeda di berbagai negara. Sekolah-sekolah modern yang telah terbiasa dengan pola pembelajaran berbasis internet tentu tidak terlalu berdampak seperti yang dialami sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil yang kesulitan akses internet. Perubahan-perubahan ini akan terus berlanjut dan memberikan peluang baru bagi kajian perbandingan pendidikan. Alternatif referensi ilmiah untuk mengakomodasi perkembangan pendekatan dan metode penelitian perbandingan pendidikan menjadi sangat penting (Epstein, 2014).

Tujuan besar dari studi perbandingan pendidikan adalah untuk memberikan kesadaran kepada seluruh dunia untuk memiliki cara pandang luas dalam melihat ketersediaan layanan pendidikan kepada warga negara sebagai hak mereka. Keterbatasan layanan pendidikan yang dialami sebuah negara dapat dipelajari dari negara lain mengenai bagaimana cara mengatasi sebuah persoalan pendidikan. Sehingga seperti yang dikemukakan Gerord & Smith (2004) isu mengenai *equity in education systems* menjadi tema penting yang harus terus diperbincangkan dalam konteks perbandingan pendidikan. Hasil studi perbandingan pendidikan akan selalu

menawarkan fakta mengenai kesenjangan pendidikan di berbagai negara. Negara maju akan berbeda persoalan dan solusi pendidikannya dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Namun negara-negara berkembang memiliki peluang untuk menjadi negara modern dan maju, dengan mengacu pada standar-standar yang digunakan oleh negara-negara maju dari sisi pengelolaan pendidikan.

Dengan demikian, posisi studi perbandingan pendidikan sangat penting bagi kalangan perguruan tinggi untuk dipelajari mengenai teori, konsep, metodologi, konten dan kontribusi kajian perbandingan pendidikan sebagai upaya memahami problem dan menemukan solusi pendidikan yang relevan.

B. STUDI PERBANDINGAN PENDIDIKAN: TEORI DAN KONSEP

Terminologi perbandingan pendidikan yang dalam literatur berbahasa Inggris disebut dengan istilah "*Comparative Education*". Istilah tersebut menunjukkan suatu makna sebagai suatu studi komparatif atau studi perbandingan tentang pendidikan, atau suatu studi tentang pendidikan dengan menggunakan pendekatan dan metode perbandingan, yang sebenarnya berasal dari istilah lengkap yakni "*a comparative study of education*" (Maunah, 2011). Secara definitif, studi mengenai perbandingan pendidikan memiliki orientasi kajian yang bersifat komprehensif. Menurut Arifin (1994) setidaknya terdapat tiga pemahaman akademik mengenai definisi ilmu perbandingan agama, yaitu: pertama, ilmu perbandingan pendidikan adalah studi tentang sistem pendidikan dan pengajaran beserta problematika-problematikanya dalam negara-negara yang berbeda. Masing-masing sistem dan problematika tersebut diusut sampai kepada sebab-sebab sebenarnya yang berada dibalik sistem dan problematika tersebut. Kedua, ilmu perbandingan pendidikan dapat juga diartikan sebagai studi tentang sistem pendidikan dan pengajaran di sebuah negara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, ilmu perbandingan pendidikan juga diartikan sebagai studi tentang teori-teori kependidikan dan pengajaran serta bagaimana pengalaman atau penerapannya di negara-negara yang berbeda itu dengan membandingkan antara teori-teori tersebut sehingga diketahui persamaan dan perbedaannya serta mengembalikan kepada latar belakang sumber yang mempengaruhinya. Dengan demikian, studi perbandingan pendidikan merupakan kajian tentang semua hal yang terkait dengan problem kebijakan, teoritik, implementasi pendidikan di beberapa negara, sehingga dapat diketahui konteks pendidikan tersebut dari sisi persamaan dan perbedaannya.

Perbandingan pendidikan sebagai wilayah kajian (*field of study*) memiliki karakteristik sesuai dengan sifatnya yang mengandung unsur membandingkan (*to compare*). Secara umum karakteristik ilmu perbandingan pendidikan memiliki ciri-ciri berikut: 1) ilmiah. Sebagai bidang keilmuan, ilmu perbandingan pendidikan mempunyai kelengkapan umum seperti mempunyai objek forma dan objek materia yang menjadi sasaran penelitian, memiliki sudut pandang dan ruang lingkup (*scope*), serta memiliki metodologi. Objek forma ilmu perbandingan pendidikan adalah seperangkat sistem, teori, dan praktik pendidikan, sedangkan objek materianya adalah masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang mencakup permasalahan yang sangat luas, masalah hidup dan tingkah laku

kehidupan manusia. 2) kultural. Ciri kultural menunjukkan bahwa ilmu perbandingan pendidikan termasuk ke dalam bidang kajian ilmu-ilmu kebudayaan atau humaniora. 3) humanistik. Bahwa ilmu perbandingan pendidikan sarat dengan nuansa kemanusiaan dan isu-isu lingkungan. 4) komprehensif. Ilmu perbandingan pendidikan pada dasarnya melingkupi khazanah kajian yang sangat luas karena berupaya untuk menjelaskan semua aspek dalam pendidikan mulai dari aspek filosofis, sejarah, politik, budaya, sains, dan kemanusiaan.

Cakupan atau ruang lingkup studi perbandingan pendidikan tidak saja terkait dengan unsur-unsur pendidikan seperti kurikulum, organisasi sekolah, manajemen pembelajaran, administrasi pendidikan, metode, dan jadwal sekolah semata-mata, tetapi merambah unsur-unsur lain seperti kaitannya dengan sejarah pendidikan, dasar-dasar falsafah pendidikan, kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlaku pada sebuah negara. Isu kajian perbandingan pendidikan bisa menyentuh model pengelolaan pendidikan pada sebuah negara seperti model desentralisasi, sentralisasi, dan seterusnya. Bisa juga sasaran studi yang menyangkut aspek konsep atau kebijakan yang kontroversi yang diterapkan di sebuah negara, namun di beberapa negara lain justru menolaknya, seperti kebijakan ujian nasional yang diterapkan di Indonesia justru tidak dikenal di beberapa negara karena keputusan untuk menilai hasil belajar siswa berada pada kewenangan guru dan sekolah sehingga tidak ditentukan oleh soal-soal ujian nasional.

Menurut George Psacharopoulos (2011) negara-negara dengan tingkat kemajuan ekonomi masing-masing, akan memiliki problem, tantangan, dan solusi pendidikan secara berbeda-beda. Bahkan cara pandang mengenai kondisi, problem, tantangan, dan solusi pendidikan ini akan sangat berbeda dari seseorang yang melakukan kajian sesuai dengan basis aliran keilmuan yang dianutnya. Bagi Psacharopoulos, seorang relativist akan berbeda narasi dengan seorang *hologeistik*. Demikian juga penganut *neopositivistik* akan berbeda dengan penganut *pre-theoretical* atau *neo-Marxist*. Terdapat banyak cara pandang keilmuan dalam melihat fenomena pendidikan pada sebuah negara seperti penganut *epistemocentric*, *structural functionalist*, *metascientific*, *ethnomethodological*, *paradigmatic*, *a cultural imperialist*, *evolutionary*, *new realist*, *benevolent ethnocentricist*, *melioristic*, *phenomenologist*, *determinist*, *aducologist*, dan *morphogenetic*. Aliran-aliran tersebut memiliki sudut pandang dalam melihat pendidikan, sehingga akan mempengaruhi analisis dan keputusan masing-masing. Karena itu, ketika membaca narasi mengenai analisis perbandingan pendidikan yang dikemukakan seseorang ilmuwan, akan lebih baik kita mengetahui posisi pandangan keilmuannya sehingga dapat memahami pandangan-pandangan mereka dengan baik.

Dalam buku *Theories and Methods in Comparative Education* yang ditulis Schriewer & Holmes (2018) menjelaskan betapa perdebatan mengenai metodologi dalam ilmu perbandingan pendidikan sangat tajam dan berkembang pesat seiring meluasnya minat para ilmuwan terhadap riset-riset perbandingan pendidikan di berbagai negara. Para sarjana Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Serikat sejauh ini mempublikasikan hasil penelitian mereka dengan mengedepankan pendekatan *metascientific* yang terus dikembangkan dengan mengarah pada analisis sosio

historis pendidikan. Konteks pendidikan yang sangat dekat dengan *setting* budaya masing-masing negara perlu dijelaskan melalui pendekatan sosio historis ini. Pendekatan epistemologis masih menarik minat para peneliti tetapi dengan pengembangan dan perluasan cakupannya, terutama untuk konten pendidikan yang bersifat komparatif substantif.

Menurut Sidong Guo (2017), perkembangan metodologi dalam ilmu perbandingan pendidikan ini sudah muncul semenjak istilah pendidikan komparatif pada tahun 1817 oleh sarjana Prancis. Pada perkembangan berikutnya, para sarjana dan profesional yang gemerlap telah mencoba upaya tak henti-hentinya untuk membangun teori dan pendekatan mereka sendiri, yang masih terus ditingkatkan. Secara umum, proses pengembangan pendidikan komparatif dapat dibagi menjadi tiga tahap: periode referensi metode, periode analisis faktor dan periode metode ilmiah sosial. Ketiga tahapan perkembangan metodologi tersebut akan dijelaskan berikut.

Pertama, Periode Metode Referensi. Masa referensi metode dimulai ketika Julian pertama kali mendirikan pendidikan komparatif dan memanfaatkan metode referensi hingga akhir tahun 1990-an. Latar belakangnya adalah revolusi dan reformasi sistem nasional. Selain itu, baik negara Eropa maupun Amerika Serikat mulai menyadari pentingnya pendidikan dan berinisiatif untuk belajar dari orang lain dalam hal pendidikan. Misalnya, mereka menugaskan orang untuk pergi ke luar negeri dalam tur penyelidikan untuk memperkenalkan pengalaman tingkat lanjut, yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut, kami dapat memajukan perkembangan pendidikan dan meningkatkan integrasi semua bangsa. Namun, ada juga yang cacat. Misalnya, orang mungkin mengabaikan relasi batin, menyalin secara mekanis dengan mengabaikan kondisi tertentu. Jadi, ada serangkaian kesalahan tak terduga dan efek negatif yang sangat menyolok.

Kedua, Periode Analisis Faktor. Periode analisis faktor adalah periode kedua pendidikan komparatif dari awal abad ke-20 hingga akhir Perang Dunia II. Selama periode ini, metode analisis faktor menjadi pendekatan penelitian utama dan pelopornya adalah Sadler dari Inggris. Dari sudut pandangnya, kegiatan setelah sekolah lebih penting daripada kegiatan sekolah bahkan ia didorong untuk membatasi kegiatan sekolah. Oleh karena itu, untuk memahami pendidikan di luar negeri, kita harus mengunjungi keluarga untuk menemukan kebenaran di balik pendidikan. Mengacu Kandel dengan melanjutkan dan mengembangkan poin Sadler dan pertama kali menguraikan teori dasar dan pendekatan pendidikan komparatif. Menurutnya, metodologi dibentuk berdasarkan sasaran. Untuk mencapai target tersebut, dan harus mempelajari kebenaran di balik sistem pendidikan, termasuk sejarah, sikap dan kepentingan masyarakat, teori politik dan nasionalisme etnis lainnya. Hans berkontribusi dalam memperdalam dan menyempurnakan analisis faktor. Metode ini berkembang dan sangat populer dan banyak digunakan dalam memahami fenomena pendidikan melalui pendekatan perbandingan. Pendidikan komparatif harus terlebih dahulu menjernihkan latar belakang sejarah penelitiannya, kemudian melakukan perbandingan dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan pendidikan negara lain untuk membahas solusi

pendidikan, terutama tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi pendidikan. Faktor-faktor tersebut menurutnya antara lain faktor alam, faktor agama, dan faktor sekuler yang relevan. Hanya ketika kita menggali lebih dalam faktor-faktor tersebut kita dapat sepenuhnya memainkan fungsi pendidikan.

Ketiga, Periode Metode Ilmiah Sosial. Masa metode ilmiah sosial merupakan tahapan ketiga dalam sejarah pendidikan komparatif dan sejak akhir Perang Dunia II hingga sekarang, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menekankan ciri-ciri ilmiah dan empiris. Selama periode ini, tahun 1950-an, 1960-an adalah dua dekade yang mengalami perkembangan pesat. Pada masa itu, revolusi ilmu pengetahuan memberikan dampak yang mendasar pada kehidupan sosial dan produksi dan persaingan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan sangat ketat sementara berbagai negara melakukan reformasi dengan derajat yang berbeda. Dalam situasi ini, kegiatan akademik pendidikan komparatif sangat aktif, yang dikembangkan dan diperkaya secara luar biasa. Perbandingan empat langkah Bereday, pendekatan masalah Holmes, Metode Analisis Kuantitatif Noah & Eckstein, studi wawasan pendidikan Edmund King semuanya dikemukakan pada saat itu. Kemunculan dan penerapan metode penelitian yang beragam tersebut ditingkatkan baik secara mendalam dan luas. Setelah memasuki tahun 1970-an, pendidikan komparatif melambat. Pada tahun 1980-an, pendidikan komparatif dilakukan refleksi yang mendalam dan setelah 1990-an, pendidikan internasional secara resmi memperkenalkan pendidikan komparatif dan berbagai metode ilmiah diadopsi. Namun, pendidikan komparatif dihadapkan pada dilema krisis identitas disiplin yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Lebih lanjut Guo (2017) menjelaskan bahwa secara metodologis para peneliti bidang perbandingan pendidikan telah secara berimbang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan kondisi pendidikan di berbagai negara. Mereka biasa memperhatikan latar belakang penelitian tentang sistem pendidikan, menyoroti faktor alam, faktor politik, faktor sosial dan faktor etnis. Kemudian mereka mulai memperhatikan ide-ide pendidikan lanjutan dari negara lain. Saat ini, proses pengajaran berdasarkan pandangan global menjadi fokus utama para sarjana dan profesional. Misalnya, beberapa ilmuan menyarankan untuk mengadopsi metode perbandingan isi untuk mempelajari proses pendidikan. Sehingga penggunaan kombinasi metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dirasakan penting untuk digunakan. Penelitian kualitatif sering kali mengadopsi metode induksi dengan alasan memperhatikan latar belakang yang diadopsi pada tahap awal. Ini terutama memperhatikan hubungan timbal balik semua negara atau proses pembangunan satu negara mengenai filsafat, prinsip moral, sejarah, ekonomi, kemanusiaan, bahasa dan masyarakat. Selain itu, juga menggabungkan isi dan lain-lain untuk membentuk keutuhan sehingga dapat menelaah hakikatnya.

Sementara itu, penelitian kuantitatif sering digunakan setelah perkembangan sains dan teknologi ketika negara-negara lebih sering bertukar ide dan ketika organisasi profesional pendidikan komparatif muncul. Alhasil, pendataan usia, rasio partisipasi kasar, total investasi, dan seterusnya menjadi lebih mudah dan pada saat yang sama untuk meningkatkan hasil penelitian, juga diperlukan

penelitian kualitatif. Namun, sebagian besar faktor pendidikan tidak dapat dihitung karena kompleksitasnya. Terlebih lagi, struktur pendidikan di seluruh dunia dengan perbedaan besar dan melonjaknya masyarakat mulai meragukan hasil penelitian yang hanya diuji dengan metode penelitian kuantitatif. Setelah melihat kelebihan dan kekurangan pada masing-masing metode penelitian bidang perbandingan dengan ruang lingkup dan konten yang sangat luas maka pada 1980-an, pendidikan komparatif mulai mengintegrasikan metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

Fenomena global mengenai pendidikan dunia yang semakin kompleks, kontekstual, dan bahkan kacau merupakan setting penelitian yang menjadi tantangan para peneliti perbandingan pendidikan, sekaligus anugerah karena menyajikan belantara wilayah dan fokus penelitian yang sangat kaya ((Lechner & Boli, 2005). Para peneliti seringkali menyukai konteks budaya dan situasi pendidikan di beberapa negara dengan keunikannya masing-masing. Ada kecenderungan di antara beberapa sarjana pendidikan komparatif untuk mendekati globalisasi dari perspektif yang lebih kritis melalui cara pandang post-modern, yang sering kali tidak menekankan atau justru mengabaikan pencarian struktur dan pola yang diterapkan pada negeri tertentu (Paulston, 2000, 2009). Namun, semua kecenderungan ini menunjukkan perlunya terus memahami proses pelebagaan struktur, harapan, dan hasil pendidikan; terutama cara budaya di negeri yang bersangkutan mengkontekstualisasikan sistem pendidikan mereka. Terlepas dari beberapa agenda ideologis dari para peneliti pendidikan komparatif, teori-teori yang digunakan untuk secara langsung menjawab fenomena pelebagaan pendidikan memiliki keunggulan komparatif yang jelas ketika proses pelebagaan dipertanyakan. Namun, ada beberapa kebingungan di antara para sarjana pendidikan komparatif tentang bagaimana teori kelembagaan membingkai penelitian pendidikan komparatif. Tolbert dan Zucker (1994) mengamati bahwa pendekatan kelembagaan seringkali justru tidak terlalu dilembagakan.

Mengingat berbagai variasi teori neo-institusional yang diterbitkan dalam literatur teoritis dan penelitian di berbagai disiplin ilmu sosial (Tolbert & Zucker, 1996), sulit untuk menunjukkan hanya satu perspektif kelembagaan yang relevan dengan penelitian pendidikan komparatif (Scott, 2005). Mengingat variasi dalam pendekatan kelembagaan yang mungkin dilakukan ini, maka tidak mengherankan jika muncul pertanyaan tentang bagaimana teori neo-kelebagaan diterapkan pada penelitian pendidikan komparatif. Sementara penelitian lain telah menjelaskan variasi dalam neo-institusionalisme politik dan sosiologis (Jepperson, 2002; Lecours, 2005), beberapa peneliti yang mengkritik teori neo-institusional dalam penelitian pendidikan komparatif mengakui tradisi teoritis memiliki sejarah dan kontribusi dalam penelitian perbandingan pendidikan.

Teori neo-institusional seperti yang telah diterapkan untuk sebagian besar penelitian pendidikan komparatif berbeda dari pendekatan yang lebih berorientasi pada kekuasaan karena ia meremehkan konflik kepentingan dalam lingkungan dan hasil pendidikan dan sebaliknya berfokus pada irasionalitas di tingkat makro, bukan pada sektor lokal, institusi, dan lingkungan (Schofer, Hironaka, Frank, &

Longhofer, 2012). Ini adalah kerangka kerja yang unik dan berpotensi berguna dalam penelitian pendidikan komparatif karena banyak pengaruh dan tindakan yang menyusun kebijakan nasional dan praktik lokal ditemukan di ruang transnasional di mana ideologi sosial, politik, dan ekonomi menyebar ke seluruh dunia melalui organisasi pembangunan dan agenda multilateral. Penjelasan singkat tentang poin-poin ini, yang awalnya dirangkum oleh Powell dan DiMaggio (1991), menunjukkan bahwa teori neo-institusional adalah pendekatan yang bermanfaat dan melengkapi konflik yang dominan secara historis dan perspektif yang berorientasi pada kekuasaan (Wiseman & Baker, 2006, Astiz, 2011).

Secara teoritik dan konsep dalam ilmu perbandingan pendidikan, era globalisasi memang masih menjadi lapangan kajian yang sangat menarik bagi penelitian pendidikan komparatif tetapi juga merupakan proses yang dinamis dan multifaset yang tidak dapat dijelaskan secara monolitik dalam konstruksi sempit kekuasaan dan konflik, atau secara eksklusif menggunakan alasan-alasan agensi dan relativisme budaya (Astiz, Wiseman, & Baker, 2002). Globalisasi memiliki banyak bentuk di banyak lembaga yang berbeda, tetapi penekanan khusus dalam pendidikan adalah pada kekuatan globalisasi yang mentransformasikan baik secara ekonomi maupun kelembagaan. Ini tidak berarti bahwa kekuatan transformatif globalisasi dalam pendidikan adalah tanpa konflik atau perlawanan.

Alexander, Wiseman, Astiz, & Baker (2013), menegaskan bahwa dalam konteks teoritik, konseptual, dan metodologis para peneliti bidang perbandingan pendidikan menghadapi tantangan yang cukup besar untuk melihat semua fenomena pendidikan di berbagai negara secara objektif. Berbagai teori baru yang muncul dan tawaran metode baru harus diapresiasi secara ilmiah karena setiap teori dan metode memiliki konteksnya tersendiri dan yang pasti telah melalui proses analisis dan uji akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Bidang ilmu perbandingan pendidikan merupakan bidang kajian yang hidup dan sangat berkembang di masa depan. Efek globalisasi yang dicirikan oleh abstraksi tingkat makro, suatu proses pelembagaan yang dikontekstualisasikan oleh hubungan antara institusi pendidikan dan lingkungan non-lokalnya yang sering kali mengarah pada norma dan struktur yang memiliki kesamaan dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Tantangannya bagi para peneliti pendidikan komparatif adalah mengkaji bukti dan menyeimbangkan retorika tersebut sehingga globalisasi dan dampaknya terhadap pendidikan dapat dipahami semaksimal mungkin.

C. BERBAGAI PENDEKATAN DALAM STUDI PERBANDINGAN PENDIDIKAN

Ilmu perbandingan pendidikan atau pendidikan komparatif adalah bidang dinamis yang dihidupkan oleh perbedaan pandangan teoritis dan metodologis tentang apa artinya 'membandingkan' dua atau lebih sekolah atau masyarakat, namun disatukan oleh keyakinan bahwa sistem dan praktik pendidikan itu sendiri dapat ditingkatkan dengan mengevaluasi metodologi pendidikan. Awalnya secara sederhana fokus kajian perbandingan pendidikan lebih melihat aspek-aspek pendidikan seperti cara mengajar guru, lingkungan sekolah, struktur kurikulum,

dan suasana belajar para siswa. Seiring perkembangan, kajian perbandingan pendidikan meluas seperti sekarang ini dengan berbagai perdebatan dalam aspek konten, metode, teknik analisis, dan temuan-temuan unik yang membutuhkan penjelasan akademik dengan berbagai konstelasinya. Studi perbandingan pendidikan selanjutnya berhasil merambah berbagai konteks negara dengan latar belakang sejarah dan kondisi politiknya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan apresiasi atas keragaman perspektif dan praktik seputar pendidikan komparatif dan cara kekuatan global dan lokal membentuk persekolahan di seluruh dunia (Brehm, 2015).

Jacob & Cheng (2005) ketika melakukan pemetaan paradigma dan teori studi perbandingan pendidikan menawarkan sebuah pendekatan riset dengan apa yang disebutnya dengan *Comparative, International, and Development Education* (CIDE). Menurut mereka sejumlah paradigma teoritis menyediakan ruang jaringan untuk ketiga komponen tersebut yaitu penelitian komparatif, internasional, dan pengembangan pendidikan. Pendekatan ini ditawarkan mengingat kurangnya ketiga aspek tersebut dianalisis secara berkaitan melalui dasar teoritis yang kuat, sehingga penelitian yang biasa lebih berkomitmen ke satu bidang penelitian ilmiah sehingga justru menjadi kelemahan utama pada kerja-kerja riset perbandingan yang dilakukan. Paradigma teoritis yang dianut sering kali menyediakan arena debat pengetahuan di mana bidang akademik berinteraksi dan saling melengkapi. Dalam perspektif alternatif dari kritik ini, perlu diperhatikan bahwa kekuatan dari pendekatan CIDE terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan beberapa perspektif teoritis yang menawarkan peneliti berbagai analisis *metatheoretical* yang lebih memberikan kontribusi yang baik. Dengan demikian, pendekatan CIDE memungkinkan para pengajar dan peneliti untuk belajar dan mewakili sistem pendidikan global dan lokal yang semakin kompleks.

Secara teoritik, pendekatan CIDE mengandung dua unsur penting yaitu: pertama, perbandingan pendidikan yang terdiri atas analisis sistem dan masalah pendidikan yang meliputi banyak aspek seperti konteks sosial-politik, ekonomi, budaya, ideologis, dan konteks lainnya. Pendidikan komparatif mewacanakan perspektif etnosentris dan mendukung pemahaman faktor-faktor, yang mendasari persamaan dan perbedaan dalam pendidikan di berbagai negara. Pendidikan komparatif bukan hanya transplantasi oleh satu negara seperti sistem sekolah yang berlaku di negara lain. Tetapi setiap negara memiliki keunikan masing-masing dan mengembangkan progress pendidikan sesuai dengan basis keunikan tersebut tanpa mengadopsi daei negara lain secara serratus persen. Kedua, unsur pendidikan internasional, yang mengandung analisis terhadap berbagai macam hubungan seperti intelektual, budaya, dan pendidikan. Unsur pendidikan internasional ini mengacu pada berbagai metode kerjasama internasional, pemahaman, dan pertukaran seperti pertukaran guru dan siswa, bantuan ke negara-negara terbelakang, dan pengajaran tentang sistem pendidikan asing. Proyek atau program pendidikan internasional juga bisa menyebabkan kesalahpahaman internasional, niat buruk, kebencian, dan bahkan perang. Pakar pendidikan internasional tertarik dengan propaganda dan diseminasi berbagai jenis ide politik di luar negeri.

Analisis politik pendidikan global seringkali mencurigai proyek kerjasama pendidikan internasional sebagai bagian dari upaya menguasai asset pendidikan sebuah negara (Jacob & Sheng, 2005).

Padahal kerjasama internasional di era globalisasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan pada sebuah negara. Pada konteks pengembangan jaringan kerjasama internasional ini, pengalaman China di abad ke-21 dengan penggunaan teknologi sebagai basis pengembangan pendidikan di China justru menerapkan kebijakan pintu terbuka. Yuan (2003) menegaskan bahwa sejak 1980-an, situasi pendidikan komparatif dunia telah berubah, sehingga memaksa China untuk berkembang dan membuat kemajuan besar dalam penelitian pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif di China sebagian besar telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir ketika China mengadopsi Kebijakan Pintu Terbuka. Di milenium baru, China fokus untuk melakukan penelitian tentang prinsip-prinsip pengembangan pendidikan internasional serta mengacu pada pengalaman negara-negara asing untuk mempromosikan perkembangan pendidikan di China. Secara spesifik China saat ini lebih fokus pada pembangunan teori lokalisasi dan meningkatkan komunikasi dan kerjasama internasional. Langkah China ini dianggap sangat berani karena memungkinkan akses terbuka antar negara, namun menjanjikan progress yang sangat luar biasa yakni mengungguli negara-negara maju di Eropa dan Amerika.

Kasus China dapat dijadikan tolak ukur atas keberanian atau tepatnya kesungguhan dalam mengembangkan pendidikan dalam negeri melalui pengembangan studi perbandingan pendidikan yang kuat. Perubahan-perubahan penting pada sebuah negara biasanya dipicu oleh kerjasama penelitian perbandingan pendidikan yang kemudian dapat menghasilkan temuan-temuan baru dalam bidang pendidikan. Seperti dikemukakan Carnoy (2018) bahwa selama lima puluh tahun terakhir, pendekatan teoritis baru untuk pendidikan komparatif dan internasional telah mengubah wajah studi perbandingan pendidikan sebagai bidang akademik yang penting. Carnoy menegaskan bahwa pendidikan komparatif sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi dan politik. Kecenderungan perkembangan wacana global mengenai isu feminisme, teori organisasi dan evaluasi dampak dan isu-isu terbaru lainnya penting diapresiasi untuk kemudian dikembangkan menjadi paradigma baru dalam melihat konteks perkembangan pendidikan di berbagai negara.

Dalam teori pengaruh (*the affect theory*) yang dijelaskan Epstein (2019), di era globalisasi seperti saat ini, penjelasan mengenai konteks pendidikan di setiap negara perlu menegaskan pola interaksi global antar bangsa dengan menentukan asumsi internasional mengenai kepastian batas geografis; pengertian sederhana tentang kewarganegaraan dan identitas; gagasan tetap tentang waktu, ruang dan pergerakan, dan perbedaan yang jelas antara mode produksi dan konsumsi ekonomi. Irving Epstein berpendapat bahwa lembaga pendidikan konvensional dan kebijakan yang mendukungnya cenderung mengabaikan kecemasan tersebut dengan menegaskan kepercayaan pada modernisme pendidikan dengan mengesampingkan kemungkinan lain. Dalam teori pengaruh untuk kajian pada

tema pendidikan komparatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara organisasi pendidikan, budaya, dan sosial yang tujuannya bertentangan satu sama lain tetapi kehadirannya menunjukkan hilangnya kepercayaan pada otoritas sekolah umum. Sering kali sekolah atau lembaga pendidikan tidak lagi memperdulikan tujuannya menyelenggarakan pendidikan karena alumni tidak diorientasikan sebagaimana pada tujuan pendidikan. Gejala ini kemudian memunculkan gagasan baru di setiap negara untuk mendirikan sekolah yang lebih konsisten. Di Indonesia gejala ini tampak pada maraknya sekolah-sekolah terpadu yang dianggap lebih realistis dan konsisten dibandingkan dengan sekolah umum lainnya. Kecenderungan seperti ini ada pada setiap negara, termasuk di Malaysia.

Sejauh ini ada sejumlah pendekatan metodologis yang digunakan oleh para sarjana dalam pendekatan mereka terhadap studi pendidikan komparatif. Penting untuk dicatat bahwa metodologi dalam pendidikan komparatif, seperti dalam disiplin ilmu pendidikan lainnya, ditentukan oleh tujuan penelitian. Seperti ilmu sosial lainnya, pendidikan komparatif telah dipelajari pada waktu yang berbeda perkembangannya dengan pendekatan metodologis yang berbeda. Melihat dari dekat berbagai fase perkembangan tersebut mengungkapkan bahwa, setiap fase telah menghasilkan jenis pekerjaan yang berbeda, yang terutama bergantung pada pandangan dan motif dominan studi pendidikan komparatif. Dimulai dengan narasi sederhana pendidikan di luar negeri selama fase Travellers Tales, pendekatan metodologis pendidikan komparatif telah berkembang secara bertahap menjadi aplikasi terkini dari metode ilmu sosial yang canggih dan kompleks, yang dalam banyak kasus didasarkan pada empiris. Dengan jumlah pelanggan yang besar yang timbul dari sifat multi-disiplinernya, para sarjana pendidikan komparatif belum dapat menyetujui satu metode studi yang diterima secara universal. Pandangan ini menghasilkan banyak perdebatan dan opini tentang metode apa yang paling cocok untuk digunakan.

Penting diketahui bahwa pendekatan metodologis yang digunakan dalam pendidikan komparatif dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Di bawah pendekatan tradisional memiliki metode deskriptif statistik dan pendekatan historis. Sedangkan pendekatan modern kami memiliki pendekatan sosiologis, analitis dan sintetik. Berikut dijelaskan beberapa metode dan pendekatan yang biasa digunakan untuk menganalisis dalam studi perbandingan pendidikan.

Pertama, metode Statistik dalam pendekatan kuantitatif. Metode ini menekankan pada pengumpulan, interpretasi, verifikasi dan perbandingan data dalam pendidikan dengan menggunakan grafik statistik atau analitik kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi peminjaman informasi atau pelajaran yang berguna dari luar negeri. Dalam metode ini berbagai jenis data pendidikan dikumpulkan tentang suatu negara. Misalnya, data tentang jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu, pengeluaran mereka, persentase kelulusan dan kegagalan pada berbagai jenjang pendidikan, pengeluaran untuk gaji guru, gedung sekolah dan barang-barang lainnya semuanya dikumpulkan dan sama. dibandingkan dengan data identik dari negara lain. Dengan demikian, kemajuan

atau penurunan pendidikan di negara mana pun dianalisis secara statistik. Meskipun metode ini masih digunakan sampai sekarang, metode ini dihadapkan pada beberapa kekurangan yaitu, bahwa data statistik yang tidak dapat diandalkan, terutama ketidakakuratan pencatatan lokal, yang dikumpulkan oleh pejabat yang mungkin melebih-lebihkan angka untuk menyembunyikan kekurangannya. Umumnya, pengumpulan data tidak dilakukan dengan hati-hati. Akibatnya, banyak data yang dihimpun dari mereka itu adalah data palsu atau tidak akurat. Selain itu, ada juga ketidaktepatan istilah non-standar tertentu, ketika diterapkan dalam konteks nasional yang berbeda. Dalam banyak kasus, istilah yang digunakan tidak berkonotasi dengan pengertian yang sama. Oleh karena itu analisis statistik mereka dipalsukan. Terdapat juga masalah kelayakan interpretasi data tanpa memperhatikan pengaruh dan nilai sosial dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan. Dengan demikian, melalui metode statistik kita tidak dapat memahami karakteristik pendidikan yang mungkin timbul akibat situasi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama suatu negara. Oleh karena itu, verifikasi data dalam studi internasional tidak selalu memungkinkan karena kendala biaya dan perjalanan. Ternyata penggunaan metode statistik sangat terbatas.

Kedua, metode deskriptif. Metode ini digunakan pada abad ke-19 karena tujuan utama dalam pendidikan komparatif adalah untuk memasukkan poin-poin baik dari negara lain. Oleh karena itu, pendekatan ini membutuhkan penjelasan rinci tentang urusan pendidikan di negara lain. Begitu banyak peneliti pendidikan komparatif menyajikan laporan deskriptif rinci tentang sistem pendidikan negara-negara yang mereka kunjungi. Di antara mereka adalah Marc Antoine Jullien de Paris, sepupu Victor, Horace Man, Henry Bernard dan Mathew Arnold. John Griscom dari Amerika Serikat (1918-19) mengunjungi Inggris Raya, Perancis, dan Belanda, Swiss dan Italia dan menulis buku berjudul "Setahun di Eropa ", ia menjelaskan sistem pendidikan mereka secara rinci. Dari laporannya, sebuah upaya dilakukan di USA untuk memasukkan beberapa karakteristik mengagumkan dari sistem pendidikan yang terdapat dalam bukunya. Sepupu Victor dari Perancis pada tahun (1831) menerbitkan laporan tentang sistem pendidikan Perancis. Beberapa karakteristik pendidikan Rusia yang ia gambarkan dalam laporannya ditiru di Inggris Raya dan Prancis. Namun, dia tidak membuat studi banding sistem pendidikan negara lain dalam laporannya. Artinya, laporannya hanya dapat dievaluasi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem pendidikan negara lain.

Mathew Arnold dari Inggris Raya dan Horace Man dari A.S. juga melakukan beberapa pekerjaan di bidang pendekatan metode deskriptif. M. Arnold mempelajari sistem pendidikan Perancis dan Jerman dan menerbitkan laporan tentang Perancis pada tahun 1859 dan tentang Jerman pada tahun 1865. Dalam uraiannya, ia menarik perhatian para pembacanya pada faktor-faktor yang membedakan sistem pendidikan suatu negeri dengan negeri lain. . Metode Arnold juga diikuti oleh Sir Michael Sadler dan Paul Monroe. Dari pandangan mereka, studi tentang pendidikan komparatif menjadi lebih terorganisir. Selain itu, Horace Man mengunjungi Jerman, Irlandia, Inggris Raya, Prancis, dan Belanda. Pada

tahun 1843, dia menerbitkan laporan tentang sistem pendidikan negara-negara tersebut. Dia menunjukkan karakteristik khusus dari sistem pendidikan yang telah dia pelajari dan secara khusus menunjukkan elemen khusus yang harus ditiru oleh orang lain. Ia juga memperhatikan evaluasi karakteristik pendidikan dan utilitasnya. Sebagai hasil karyanya, kemudian pendidik juga memperhatikan evaluasi dan kegunaan karakteristik sistem pendidikan negara lain.

Henry Bernard menerbitkan tiga puluh satu volume "*The American Journal of Education*" antara tahun 1856-1881. Dalam volume ini, dia menjelaskan sistem pendidikan di berbagai negara bagian A.S. dan banyak negara asing lainnya. Ia menafsirkan latar belakang sejarah dari setiap sistem pendidikan yang ia gambarkan. Michael Sadler di pihaknya menekankan poin bahwa kita harus mempelajari semua faktor nasional tersebut, yang mempengaruhi sistem pendidikan suatu negara dan bertanggung jawab atas perkembangan dan penurunannya. Baginya, ia menganggap studi pendidikan komparatif berguna bagi seseorang untuk memahami sistem pendidikannya sendiri. Jadi, kita dapat berargumen di sini bahwa, pada abad ke-19 hanya orang yang mampu memahami pendidikan komparatif adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem pendidikan di negaranya sendiri. Beberapa contoh ini, adalah akun, yang menunjukkan metode deskriptif pendidikan komparatif dan sebagai metode, dan dianjurkan oleh para pendidik yang tertarik untuk mempromosikan dan mempopulerkan studi pendidikan komparatif.

Ketiga, pendekatan sejarah. pendekatan sejarah adalah cara menyajikan data secara kronologis sesuai dengan data kesejarahan mengenai tema yang diteliti. Penting untuk dicatat bahwa, penggunaan metode sejarah tidak hanya untuk mengetahui masa lalu untuk memahami masa kini dengan lebih baik, tetapi agar dapat memperbaiki masa depan dengan mengisyaratkan faktor-faktor yang mungkin lebih berguna. Dalam pendekatan ini dapat diketahui semua faktor geografis, sosial, ras, politik, agama dan bahasa yang mempengaruhi sistem pendidikan suatu negara. Sarjana seperti Nicholas Hans, Isaac Kandel, Schneider dan Michael Sadler dikenal karena mempopulerkan metode ini. Mereka pada dasarnya sepakat bahwa peminjaman budaya yang selektif dimungkinkan dan juga menekankan bahwa kebijakan dan praktik pendidikan memiliki sebab dan akibat yang ditemukan dalam pengalaman sejarah unik setiap masyarakat, yang oleh manusia Horace disebut sebagai karakter nasional. Sebagian besar sarjana ini menyarankan pengembangan ilmu pendidikan komparatif di mana seseorang dapat digunakan untuk menemukan penyebab universal atau penentu praktik pendidikan dan juga untuk menetapkan istilah pendidikan. Meskipun para ahli perbandingan pendidikan menganjurkan pendekatan ini, namun tidak menawarkan prosedur pasti yang harus diikuti, secara umum disepakati bahwa tiga hal, yakni: 1) Seseorang harus mempelajari setiap sistem nasional secara terpisah dalam konteks historisnya, dengan memperhatikan perbedaan dalam terminologi dan metode pengumpulan dan pengklasifikasian data. 2) Seseorang juga harus menganalisis kekuatan, dan faktor yang bertanggung jawab atas perbedaan yang dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu alam, agama, sosial-ekonomi dan politik. 3) Seseorang juga

harus mengadopsi hanya ide dan praktik yang paling mendekati dan dapat disesuaikan dengan konteks sejarah negara penerima.

Pendekatan sejarah diidentifikasi memiliki kelemahan di antaranya bahwa data pada satu studi mungkin tidak dapat diandalkan karena dalam pengumpulan data yang sama, kehati-hatian seringkali tidak diamati. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh mungkin tidak terlalu berguna. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa materi sejarah tentang sistem pendidikan di berbagai negara pada umumnya tidak dapat diandalkan. Hal ini pada gilirannya membatasi kegunaan data historis. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut agar data lebih dapat diandalkan. Selain itu, para sejarawan umumnya tidak memihak dalam catatan mereka. Dalam kebanyakan kasus, mereka ingin menyembunyikan elemen yang tidak diinginkan tentang sejarah negara mereka sendiri dan melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan negara lain dengan beberapa prasangka yang dipaksakan. Dalam skenario ini kebenaran tidak diketahui, sehingga tidak dapat mencapai kesimpulan yang benar dengan menggunakan pendekatan ini.

Keempat, pendekatan analitik. Pendekatan ini menyatukan hubungan yang ada antara sistem pendidikan suatu negara dengan kondisi sosial, politik dan ekonominya. Dalam studi perbandingan harus menggunakan analisis. Ini karena melalui analisis seseorang dapat memisahkan berbagai elemen dan memahami pentingnya masing-masing secara mandiri. Metode analitis dianggap berguna hanya jika organisasi sosial dan pendidikan dibandingkan. Oleh karena itu, metode analisis mengikuti empat aspek utama analisis, yaitu: 1) Pengumpulan data pendidikan di mana semua informasi pendidikan dikumpulkan melalui metode deskriptif dan statistik dan ini menjadi dasar untuk metode analisis. 2) Interpretasi data terkait Ini melibatkan interpretasi data sosial, politik, ekonomi dan sejarah yang diperlukan untuk memahami persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam sistem pendidikan di berbagai negara. 3) Menentukan standar untuk perbandingan dengan cara membandingkan sistem pendidikan secara adil, sehingga perlu melakukannya dengan standar tertentu. Standar ini akan membantu membandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem pendidikan. Metode analisis seringkali merumuskan standar-standar ini. Misalnya, filosofi politik, tujuan pendidikan dan metode pengendalian pendidikan adalah contoh standar yang baik, untuk perbandingan. Berdasarkan standar inilah seseorang dapat menganalisis dan memahami persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem pendidikan di berbagai negara. 4) Interpretasi dan kesimpulan. Melalui tiga aspek tahapan analisis di atas selanjutnya dilakukan interpretasi data dan membuat kesimpulan berdasarkan perbandingan beberapa sistem pendidikan di berbagai negara.

Kelemahan pendekatan analitik ini di antaranya bahwa tidak semua unsur dapat dijangkau secara total dari sistem pendidikan pada sebuah negara. Pendekatan ini juga cenderung mengabaikan kesamaan yang ada dalam sistem pendidikan meskipun terdapat perbedaan dalam sistem pendidikan di berbagai negara.

Kelima, pendekatan sintesis. Pendekatan ini telah banyak diadvokasi oleh Edmond King seorang peneliti pendidikan komparatif terkenal dalam tulisannya "*The World Perspective in Education*". Dalam pendekatan ini, studi tentang pendidikan komparatif dari sudut pandang internasional dianggap sangat penting. Dalam hal ini pendekatan berbasis masalah pendidikan dipertimbangkan dan dipelajari dalam bingkai internasional. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa, ketika mempelajari masalah pendidikan di berbagai negara, maka akan menemukan beberapa kebenaran universal dalam perbedaan yang melekat dengan alasan utamanya adalah bahwa ada banyak kesamaan dalam kebutuhan dan aspirasi masyarakat dunia. Misalnya organisasi seperti UNESCO telah banyak berkontribusi terhadap kesadaran ini. Perlu dicatat bahwa, metode sintesis belum sepenuhnya berkembang, karena masih dalam tahap pengembangan dan para peneliti pendidikan komparatif perlu mengembangkannya lebih lanjut. Namun upaya untuk menggunakannya sebagai pendekatan studi banding masih signifikan dalam pendidikan komparatif.

Keenam, pendekatan ilmiah (*scientific*). Pendekatan ilmiah muncul dalam fase perkembangan pendidikan komparatif saat ini dari tahun 1960-an. Namun selama periode ini perdebatan metodologis yang intens terhadap pendekatan ilmiah ini muncul pada aspek kelayakan mengandalkan metode tertentu sebagai kontradiksi dari pendekatan multi-dimensi. Kelayakan negara-bangsa sebagai kerangka penelitian yang dominan sebagai lawan dari analisis sistem intra-nasional, regional, kontinental dan internasional. Pendekatan ilmiah memiliki ketergantungan yang berlebihan pada analisis kuantitatif yang bersifat statistik sebagai lawan dari penelitian kualitatif dan deskriptif. Hasil perdebatan metodologis ini memuncak pada pendekatan baru untuk studi pendidikan komparatif. Beberapa sarjana telah terlibat dalam mengembangkan pendekatan baru untuk studi pendidikan komparatif, dengan mengingat sifat dinamis dari disiplin keilmuan tersebut. Kebanyakan ahli telah berusaha mengembangkan ilmu pendidikan komparatif yang pada akhirnya akan menempatkan pendidikan komparatif dalam rumpun ilmu-ilmu sosial.

Ketujuh, pendekatan studi wilayah sistematis. Pendekatan ini dikembangkan dan dipopulerkan oleh G.Z.F. Beredy dalam bukunya "*The Comparative Method in Education*" (1964). Dia menggunakan pendekatan interdisipliner untuk secara sistematis mensurvei dan menganalisis pendidikan di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan dan persamaan sebelum meminjam dan membuat prediksi. Sebuah studi harus memahami persamaan dan perbedaan di antara sistem pendidikan yang berbeda dan dimungkinkan untuk mencari bantuan dari bidang studi lain seperti Sejarah, Sosiologi dan Filsafat. Faktanya, fakta pendidikan begitu terjalin dalam matriks ilmu sosial lain sehingga pendidikan komparatif tidak dapat dipelajari secara terpisah.

Kedelapan, pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan ini dikembangkan dan dipopulerkan oleh Brian Holmes pada (1964) dalam karyanya yang berjudul "*Problems in Education: A Comparative Approach*". Holmes meminjam ide-ide John Dewey, seorang pendidik Amerika yang terkenal berdasarkan lima tahap

pemikiran reflektif atau kritis yang diterapkan Brian pada studi pendidikan komparatif untuk memecahkan masalah pendidikan. Tahapannya adalah identifikasi masalah, analisis masalah, solusi masalah yang diusulkan, spesifikasi konteks, perbandingan dan kesimpulan. Menurut Brian Holmes, dalam menghadapi situasi bermasalah, solusi yang mungkin muncul harus diidentifikasi. Jika direnungkan lebih lanjut, masalah dirumuskan dengan lebih baik.

Dari beberapa pendekatan dalam studi perbandingan pendidikan, pendekatan *scientific* banyak mendapat perhatian para ahli dan peneliti setelah dipopulerkan oleh Harold Noah dan Marc Eckstein pada tahun 1960, ketika mereka menulis buku berjudul "*Toward, a Science of Comparative Education*". Dalam pendekatan ini, secara sistematis prosedur dan tahapan yang penting dilakukan adalah identifikasi masalah dan tinjauan literatur; definisi konsep sentral, istilah dan indikator; pemilihan atau pengambilan sampel unit studi atau kasus yang akan dipelajari; pengumpulan data; analisis dan manipulasi data; interpretasi pencarian data; dan menarik kesimpulan dan rekomendasi.

Dalam implementasinya, pendidikan komparatif menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda dalam studinya. Misalnya, beberapa sarjana pada tahun 1980-an seperti Robert Arnove, Edmond King dan Philip Altbach juga menulis tentang metodologi dalam pendidikan komparatif. Mereka mempertanyakan beberapa asumsi yang menjadi dasar metode ilmiah yang dikembangkan sebelumnya. Namun, alih-alih merekomendasikan metode tertentu untuk studi pendidikan komparatif, mereka mengusulkan pendekatan kombinasi metode (eklektik). Bagi mereka, mereka berpendapat bahwa metode yang akan digunakan harus sangat ditentukan oleh tujuan dan desain masing-masing studi. Sebagian ahli skeptis tentang kemungkinan mengembangkan ilmu pasti yang akan memungkinkan prediksi yang akurat seperti yang disarankan oleh para sarjana pendekatan metode ilmiah seperti Noah dan Eckstein. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa debat metodologis terus berlanjut hingga saat ini, yang merupakan tanda dari terus berkembang dan berkembangnya disiplin dinamis yang berkaitan dengan bidang pendidikan yang sama-sama terus berubah dan kompleks, yaitu studi tentang disiplin pendidikan komparatif.

D. KONTRIBUSI STUDI PERBANDINGAN PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Dalam batasan tertentu, hasil studi perbandingan pendidikan akan lebih terlihat manfaatnya jika didukung oleh kebijakan politik pendidikan di sebuah negara. Sebagai perbandingan misalnya, pendidikan Islam di Malaysia cenderung lebih monolitik dibandingkan dengan di Indonesia. Terlepas dari ikatan geografis dan budaya yang erat, Indonesia dan Malaysia memiliki pendidikan Islam yang sangat berbeda, dengan pendidikan Islam di Indonesia yang relatif terdesentralisasi dan beragam diskursif, sedangkan di Malaysia terpusat dan dibatasi secara diskursif. Sifat dari sistem pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia dan berbagai pendekatan yang diambil oleh negara-negara tersebut dalam mengelola sistem tersebut. Negara pasca-kolonial di Malaysia lebih berhasil dalam

memusatkan kendali atas pendidikan Islam, dan lebih mementingkan mempromosikan ortodoksi restriktif, dibandingkan dengan negara pasca-kolonial di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor: susunan ideologis lembaga negara yang mengawasi pendidikan Islam; pola-pola Islamisasi sosial yang telah menimbulkan respon yang berbeda dari negara; dan kontrol sumber daya oleh pemerintah pusat yang mempengaruhi hubungan pusat-pinggiran. Hubungan negara, masyarakat dan sejarah institusionalisme, menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut di atas dapat membantu negara untuk meminimalkan pengaruh dari masyarakat dan menggunakan dominasinya, dalam hal ini dengan sentralisasi kontrol atas pendidikan Islam. Secara khusus, *landscape* pendidikan Islam yang sangat berbeda di Malaysia dan Indonesia akan menarik bagi para akademisi di bidang Studi Asia Tenggara, Pendidikan Asia, dan Pendidikan Perbandingan (Tayeb, 2018).

Kajian perbandingan pendidikan di berbagai negara dengan kriteria atau standar tertentu dapat menjadi tolok ukur untuk melakukan perbaikan dan reformasi sistem pendidikan di negara-negara Islam. Jika melihat data yang diekspose oleh PISA (*Programme for International Student Assessment*) sebagai lembaga internasional di bawah koordinasi OECD (*Organisation for Economic Co-operation Development*) yang terdiri atas berbagai negara-negara dunia yang setiap tahun mempublikasikan hasil survey tentang peringkat kualitas pendidikan dalam kemampuan bidang *Reading, Mathematics and Science Knowledge and Skills to meet real-life challenges*. Melalui hasil survei kualitas pendidikan seperti ini negara-negara Islam dapat melihat posisi kebijakan pendidikan, program, dan politik pendidikan yang diterapkan, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan politik pendidikan baru sebagai respon terhadap hasil survei peringkat kualitas pendidikan.

Survei yang dilakukan PISA dengan menggunakan indikator efisiensi yang menghubungkan variabel hasil dengan variabel sumber daya yang digunakan dalam produksi layanan pendidikan. Alumni atau keluaran pendidikan dengan berbagai prestasi dan tingkat keterserapannya di berbagai sektor ekonomi dan dunia usaha di berbagai negara didata dan dianggap sebagai indikator dan variabel hasil pendidikan. Sementara itu, data mengenai konstruk yang menangkap kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan yang digunakan dianggap sebagai variabel sumber daya. Demikian pula, variabel lingkungan dari setiap sistem pendidikan dimasukkan dalam model evaluasi efisiensi. Dari data hasil survei yang dilakukan PISA ini selanjutnya dapat diketahui posisi sebuah negara. Thieme, Gimenez, & Prior (2012) dalam sebuah analisisnya mengenai hasil survei PISA tahun 2016 dapat menyimpulkan bahwa negara-negara Eropa ternyata menyimpan masalah manajemen yang lemah. Termasuk negara Amerika, terutama Amerika Latin diindikasikan memiliki sumber daya yang lemah. Negara-negara Asia dengan tingkat heterogenitas yang tinggi seperti Korea Selatan dan Macao-China cenderung dikelompokkan sebagai negara yang mengupayakan sistem pengelolaan pendidikan yang lebih optimal. Sedangkan negara dengan masalah manajerial adalah Hong Kong, China-Taipei, Jepang dan Israel. Negara-negara dengan

tantangan utamanya berupa lemahnya ketersediaan sumber daya adalah Yordania dan Kyrgyzstan. Untuk negara-negara seperti Turkey, Thailand, dan Indonesia, diindikasikan sebagai negara yang memiliki masalah utama pendidikan yang rumit dalam jangka panjang karena menyangkut kondisi struktural yang bersifat sosial-ekonomi dan budaya.

Isu mengenai *human capital* (modal insani) menjadi sangat penting sebagai indikator kemajuan sebuah negara. Analisis mengenai strategi pembangunan *human capital* di antaranya menentukan posisi kemajuan ekonomi pendidikan suatu negara. Sebuah studi yang dilakukan Garavan et al. (2012) terhadap Brazil, Rusia, India, dan China mengenai strategi pembangunan *human capital* dengan menggunakan analisis berbasis perbandingan indeks makro *human capital* dan inovasi ekonomi dan tinjauan akademis terkait dan publikasi pemerintah, menunjukkan bahwa dalam hal kapasitas sumber daya manusia saat ini, Rusia dan Brasil lebih unggul dari China dan India. Namun, selama dekade terakhir, pemerintah kedua negara terakhir telah memulai program nasional pengembangan *human capital* yang mengesankan, yang mencakup investasi yang signifikan dan peraturan pemerintah yang ditargetkan di bidang-bidang seperti pendidikan dasar dan menengah, pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan pendidikan tinggi, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Rusia dan Brasil telah menargetkan program di beberapa bidang di atas, tetapi tidak memiliki strategi jangka panjang yang komprehensif, yang mencakup semua bidang di atas dan upaya koordinasi dari berbagai lembaga dan daerah pemilihan.

Berdasarkan analisis perbandingan seperti yang dilakukan di atas, selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas cakupan analisis dengan memasukkan negara berkembang lain yang berkembang pesat misalnya Meksiko, Indonesia, dan Turki. Artikel tersebut untuk pertama kalinya memberikan perbandingan indeks dan strategi pengembangan sumber daya manusia dari empat negara berkembang terbesar. Tolak ukur kajian perbandingan ini adalah kombinasi dari analisis indeks tingkat makro dengan analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan dan literatur akademis. Kajian semacam ini, bagi Indonesia sangat penting untuk menyadari posisi indeks *human capital* dan strategi pengembangannya melalui program-program pendidikan di tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Strategi pengembangan *human capital* sangat penting karena akan menentukan arah kualitas pendidikan. Dalam temuan hasil survei PISA (*Programme for International Student Assessment*) dan TIMSS (*Trends in Mathematics and Science Study*) misalnya, terdapat beberapa kesenjangan materi pelajaran Sains dan Matematika yang dipelajari oleh peserta didik di Indonesia dengan peserta didik negeri-negeri lain. Beberapa materi pelajaran sains yang diajarkan pada peserta didik di negara-negara lain justru tidak diajarkan pada peserta didik di Indonesia. Fakta ini, tentu berkaitan erat dengan kualitas sumber daya pengajar dan kurikulum pendidikan.

Kesenjangan kurikulum pendidikan di Indonesia dan negara lain ini, telah diungkapkan oleh Sugandi & Delice (2014), ketika melakukan penelitian perbandingan berjudul *Comparison of Turkish and Indonesian Secondary*

Mathematics Curricula; Reflection of the Paradigms. Riset ini bertujuan untuk membandingkan kurikulum matematika sekolah menengah di Turki dan Indonesia sehubungan dengan paradigma yang ada di dalamnya. Turki dan Indonesia merupakan negara yang masing-masing memiliki negara tetangga yang sangat kompetitif seperti Jerman, Belanda, Perancis dan Singapura, Malaysia, China, dan Jepang. Negeri-negara tetangga ini sejak awal dan terus menerus selalu menunjukkan komitmen kemajuan untuk melakukan beberapa perubahan dalam sistem pendidikannya. Dengan membandingkan dokumen kurikulum dan buku teks pelajaran Matematika yang diajarkan di Turkey dan Indonesia, ditemukan bahwa Turki dan Indonesia telah mengalami transformasi paradigma yang dimulai dari *behaviourist* kemudian berubah menjadi konstruktivis masing-masing sejak tahun 2005 dan 2007.

Namun kecenderungan penerapan paradigma konstruktivistik di Indonesia tidak menjadi fenomena umum secara nasional. Kesenjangan praktik pendidikan antar daerah di Indonesia lebih buruk dibandingkan di Turkey yang diuntungkan oleh kondisi geografis yang mudah diakses. Persoalan kurikulum di Indonesia juga terletak pada aspek kesiapan terhadap kebijakan dan situasi terkait. Banyak kasus mengenai kebijakan kurikulum tidak disosialisasikan dengan baik, ditambah lagi kemampuan metodologis guru yang sebagian besar masih minimal. Data mengenai skor nilai UKG (Uji Kompetensi Guru) di Indonesia masih cukup rendah dan membutuhkan peningkatan yang serius. Meskipun demikian, modal demografi Indonesia dan Turkey dalam beberapa aspek dapat dikolaborasikan sehingga data kajian komparatif kedua negara ini dapat dilanjutkan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan di masing-masing negara. Isu mengenai kesamaan ideologis keagamaan setidaknya menjadi modal dasar untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan Islam di kedua negara.

Isu tentang pendidikan Islam di Indonesia seringkali dikaitkan dengan fenomena perkembangan madrasah dan pesantren. Dalam sejarah politik pendidikan Islam di Indonesia, kebijakan pendidikan nasional sangat berpihak kepada kepentingan perkembangan pendidikan Islam. Posisi peserta didik di madrasah disamakan kedudukannya dengan peserta didik di sekolah umum. Alumni madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi umum bahkan sekarang alumni Madrasah Aliyah mampu bersaing dengan alumni SMA untuk mendapatkan tempat duduk di fakultas sains dan fakultas kedokteran. Posisi kesetaraan ini sebuah capaian sangat penting untuk perkembangan pendidikan Islam di masa depan.

Hashim et al. (2011) dalam sebuah penelitiannya tentang perbandingan pendidikan Islam di Indonesia dan beberapa negara muslim berjudul *Traditional Islamic Education in Asia and Africa: A Comparative Study of Malaysia's Pondok, Indonesia's Pesantren and Nigeria's Traditional Madrasah*, mengemukakan perkembangan positif dari pengelolaan pendidikan Islam tradisional di Indonesia, Malaysia, dan Nigeria. Bahwa dunia muslim telah menyaksikan munculnya beberapa institut dan universitas berbasis Islam dalam tiga dekade terakhir, sejalan dengan beberapa rekomendasi Konferensi Dunia Pendidikan Muslim. Konversi

IAIN menjadi UIN sepertinya menjadi indikator perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Perkembangan tersebut sangat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam terutama berkaitan dengan kontribusi beberapa lulusan dari lembaga dan universitas Islam tersebut kepada beasiswa Islam. Mahasiswa Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan akses untuk melanjutkan pendidikan di negara muslim seperti Sudan, Mesir, Marocco, Syiria, dan seterusnya. Beasiswa dan bantuan pendidikan juga disediakan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memfasilitasi proses pendidikan para alumni madrasah dan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Namun, menurut Hashim, sistem pendidikan Islam tradisional di tingkat pra-universitas belum banyak dipengaruhi oleh perkembangan tersebut. Beberapa madrasah swasta di daerah-daerah di Indonesia masih kesulitan dari sisi finansial dan pembiayaan operasional, meskipun kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi dan bantuan telah lama diberjalan. Jumlah madrasah secara kuantitas sangat banyak menjadi problem distribusi anggaran. Selain itu, tampilan manajemen madrasah yang buruk juga menghambat kemajuan perkembangan madrasah di daerah-daerah. Fenomena ini juga terjadi di Negeria dan Malaysia.

Studi perbandingan pondok Malaysia, pesantren Indonesia dan sistem madrasah tradisional Nigeria, menunjukkan bahwa untuk Malaysia dan Indonesia, telah menawarkan beberapa praktik terbaik dalam pendidikan Islam tradisional, yang dapat digunakan sebagai standar dalam meningkatkan implementasi pendidikan tradisional di Nigeria. Dari sisi jumlah lembaga pendidikan Islam tradisional, Indonesia mengungguli Malaysia dan Nigeria. Beberapa masalah-masalah penting seperti kepemilikan sekolah, struktur sekolah, kurikulum, persyaratan dan kualifikasi guru, metode pengajaran, evaluasi prosedur, kesejahteraan dan gaji guru, status sosial ekonomi guru, sekolah dan tantangan pendidikan tinggi dalam menghadapi urbanisasi, serta rekomendasi praktis untuk reformasi, ketiga negara ini membutuhkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan secara modern. Madrasah dan pesantren di Indonesia terlihat sangat maju dari sisi penerimaan modernitas sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan Islam. Inovasi dan praktik pembelajaran terbaru secara cepat diakses oleh para guru pesantren dan madrasah di Indonesia meskipun dengan segala keterbatasannya (Hashim et al., 2014).

Pematangan intelektual cukup semarak di Indonesia. Dibandingkan dengan dinamika pergolakan dan benturan pemikiran di Malaysia, Brunai Darussalam, Thailand Selatan, dan negara-negara muslim lainnya, nampaknya Indonesia menjadi tempat persemaian yang subur bagi berkembangnya tradisi berpikir kritis di kalangan para intelektual muslim. Dengan keberadaan dua organisasi sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, selain organisasi lain seperti Persis, al-Washliyah, Nahdhatul Wathan di NTB, dan lain lain, masyarakat Islam Indonesia sudah terbiasa untuk mendengar dan melihat perbedaan tanpa canggung dan harus panik. Dinamika pemikiran ini tentu saja tidak akan terlihat di negara-negara muslim lainnya. Tradisi dan dinamika intelektual ini tentu menjadi modal dasar untuk membangun peradaban besar di masa depan.

Azra, Dijk, & Kaptein (2010) sejak lama merekam dinamika perkembangan intelektual Islam di Indonesia. Bahkan dikatakan bahwa sejak abad ke-20 dan seterusnya adalah periode perubahan politik, sosial dan ekonomi yang luar biasa di Indonesia. Perubahan-perubahan ini berkontribusi pada diversifikasi lanskap keagamaan dan akibatnya, otoritas keagamaan didistribusikan kembali ke sejumlah aktor yang semakin banyak. Meskipun banyak umat Islam di Indonesia tetap menganggap ulama, ulama tradisional, sebagai sumber utama pedoman agama, otoritas keagamaan menjadi semakin tersebar dan dibedakan dari waktu ke waktu. Sumbangan-sumbangan pemikiran yang bernas semuanya berhubungan dengan topik otoritas keagamaan yang memiliki banyak segi dan multidimensi dan bertujuan untuk saling melengkapi. Beberapa isu besar yang harus dicermati dan sekaligus mendapat respon yang cepat dari kalangan terpelajar muslim di Indonesia adalah sekitar perbedaan dan perubahan peran ulama, kebangkitan dan peran organisasi Islam, perkembangan pendidikan Islam, seperti madrasah, dan penyebaran ide-ide Salafi di Indonesia kontemporer.

Ide-ide Salafi yang dikemukakan Azra, Dijk, & Kaptein di atas, tentu saja harus dipahami sebagai munculnya gejala kontra kebudayaan yang harus diantisipasi secara bijaksana. Dalam beberapa waktu terakhir, pesantren Indonesia semakin dideskripsikan sebagai penggerak radikalisme dan militansi kekerasan, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara beberapa pesantren di negara ini dan beberapa pelaku kekerasan baru-baru ini, seperti pemboman tahun 2002 di Kuta, Bali. Bahkan dalam terbitan September 2003, misalnya, *Journal of Asian Affairs* menyatakan, "Seperti madrasah Pakistan, terdapat seluruh sistem pendidikan, 'pesantren', yang independen dari pemerintah dan menyediakan tanah subur bagi kaum Islamis untuk mendidik anak-anak orang miskin dalam pembentukan Islam radikal. Di Indonesia, Pondok Pesantren al-Mukmin di Ngruki, yang dekat dengan kota Solo Jawa Tengah, telah disebutkan berulang kali di pers internasional dan juga terlibat dalam laporan *International Crisis Group* (ICG) sebagai pusat jaringan militan Muslim di Indonesia yang diduga terkait dengan al-Qaeda (Pohl, 2006).

Realitas pesantren yang diidentifikasi secara salah sebagai persemaian bibit radikalisme tentu menjadi stigma bagi muslim Indonesia. Fenomena madrasah di Pakistan yang disinyalir sebagai lahan subur untuk mendidik para radikalist, tentu saja tidak bisa disamakan dengan konteks pesantren yang dalam sejarahnya lahir dari kultur nusantara dan ikut melahirkan *nation state* ini. Tradisi Islam di Indonesia adalah unik dan sejak awal kedatangannya di nusantara telah berdialog dengan berbagai budaya di negeri ini, sehingga membentuk tradisi sosial keagamaan dan pola artikulasi semangat beragama yang berbeda-beda di kalangan masyarakat etnis di Indonesia sendiri, terlebih dibandingkan dengan artikulasi semangat dan tradisi beragama di negara-negara lain. Bahkan keberadaan pesantren dengan segala keunikannya merupakan khas nusantara yang tidak ditemukan di negara lain. Bahkan Aslam, Othman & Rosili (2016) menegaskan radikalisme yang disinyalir berkembang di komunitas muslim negara-negara seperti Thailand, Singapore, dan Indonesia dapat dikikis melalui paham keislaman moderat yang

sebenarnya telah diajarkan di kalangan pesantren di Indonesia. Namun, solusi ini belum tentu dimiliki oleh muslim Singapore dan Thailand.

Stigma negative pesantren sebagai tempat menumbuhkan paham radikal harus dihilangkan dengan menyibukkan kalangan madrasah dan pesantren dengan konsep dan program pengembangan institusi ini dengan berbagai inovasi dan produk pemikiran baru yang lebih mencerahkan. Sehingga pesantren dan madrasah harus mengubah sudut pandang dunia Barat tentang pendidikan Islam yang menjadi solusi berbagai problem kemanusiaan dan sains. Menurut Ali (2019) perkembangan terkini yang bisa dikatakan sebagai *state of the art* dari isu-isu aktual terkini mengenai kurikulum pendidikan Islam di Indonesia adalah tentang perkembangan integrasi agama dan sains di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Perguruan tinggi yang dimaksud adalah berupa pesantren khusus mahasiswa yang banyak dikembangkan di berbagai daerah. Dengan demikian, kurikulum pesantren tidak lagi mengambil bentuk model organisasi konten kurikulum terpisah (*separated subject curriculum*), tetapi sudah mulai dikembangkan desain organisasi konten yang mengacu pada konsep *integrated subject curriculum* atau kurikulum terpadu. Pemaduan sains dan agama di Indonesia adalah isu yang sejak lama muncul dan terus dikembangkan sampai saat ini. Progress perkembangan pola pikir pendidikan Islam seperti ini tidak akan terlihat pada tradisi pendidikan Islam tradisional di negara lain. Jika pengembangan model kurikulum integrasi ini berhasil, maka dapat dikatakan sebagai capaian terbesar dan terbaru dari proses berpikir panjang untuk mengatasi kesenjangan dikotomi keilmuan yang berdampak buruk bagi pengembangan keilmuan Islam modern.

Susanto (2015) menegaskan bahwa secara spesifik pendidikan Islam di Asia Tenggara memiliki substansi yang beragam. Dalam beberapa isu penting pendidikan seperti kurikulum, perkembangan institusi madrasah, dan pendanaan pendidikan Islam, konteks Indonesia, Malaysia, dan Singapore, dan Thailand memiliki perbedaan yang cukup besar. Perkembangan pendidikan Islam mengalami kemajuan yang pesat di Indonesia. Indonesia menerapkan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran budaya di sekolah dan universitas negeri. Di Malaysia, pendidikan Islam mengalami banyak kemajuan sejak tahun 1956 misalnya. Pendidikan Islam diajarkan di sekolah nasional dan juga di Malaysia juga dibentuk jurusan pendidikan agama yang menangani setiap mata pelajaran agama di sekolah. Di Thailand, khususnya di beberapa daerah seperti Pattani, Setul, Yala, dan Narathiwat, pendidikan Islam dengan pesantren dan madrasah menjadi tulang punggung identitas Islam dan perjuangan Islam melawan pemerintah pusat. Sedangkan pendidikan Islam di Singapura mengalami kondisi yang berbeda. Masih adanya ketidakjelasan tujuan antara pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, belum ada universitas Islam, tidak ada kurikulum standar, tidak ada pusat penyelenggara pendidikan Islam, dan kurangnya dana dan status ekonomi guru agama. Mayoritas etnis China yang mendominasi Singapore nampaknya menyulitkan untuk mengembangkan pendidikan Islam di negara ini. Meskipun secara teknologi, pendidikan sekuler di Singapore sangat maju dan mampu bersaing dengan negara-negara di Eropa.

Problem teknologi pendidikan Islam di Indonesia nampaknya masih menjadi persoalan. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, tidak dibatasi waktu dan tempat. Pembelajaran dengan online system harus menjadi perhatian penyelenggaraan pendidikan Islam. Hal ini didasari atas fakta bahwa masyarakat muslim sekarang ini membutuhkan dan menuntut pelayanan pendidikan berkualitas. Salah satu solusi yang dapat diberikan adalah tersedianya instrumen dan infrastruktur teknologi yang memungkinkan pendidikan diselenggarakan dengan baik dan bermutu dalam bentuk sistem informasi manajemen pendidikan Islam. Sebagai perbandingan, penelitian Marcus Powell dirujuk untuk memaparkan pengalaman Bangladesh, Mozambik, Ghana, dan Nigeria dalam penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang menunjukkan beberapa fakta penting yang dapat dijadikan pelajaran sehingga sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Penelitian Powell tentu saja tidak melihat kasus penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia, sehingga tidak dapat membandingkannya dengan kasus di Ghana, Mozambik, Bangladesh, dan Nigeria.

Negara-negara muslim dunia saat ini tentu saja sedang menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa ideologi Islam sebagai agama tidak menjadi ancaman bagi kehidupan. Perkembangan teknologi informasi ternyata telah berkontribusi menyebarkan pandangan radikal secara cepat di berbagai kalangan, termasuk pelajar, pendidik, dan perguruan tinggi. Isu radikalisme Islam dan teroris sungguh telah merepotkan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Politik pendidikan Islam yang dijalankan melalui Kementerian Agama cenderung mencurigai kurikulum pendidikan agama sebagai celah masuk dan berkembangnya paham radikal di sekolah. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 183 tahun 2019 tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di Madrasah serta KMA Nomor 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Kebijakan kurikulum melalui KMA ini selanjutnya dipertegas dengan menghapuskan frasa jihad dan khilafah dalam pelajaran Fikih dan pelajaran PAI di sekolah.

Kebijakan penghapusan konten jihad pada kurikulum sekolah dan madrasah ini menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Pertimbangan politik kurikulum seperti ini lebih mengutamakan arus besar pengajaran Islam yang mengacu pada konsep moderasi beragama. Karena itu, konsep kurikulum moderasi penting dilakukan penguatan melalui kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran agama di sekolah. Dengan demikian, problem pendidikan Islam di Indonesia semakin menunjukkan kompleksitasnya yang tidak ringan untuk didiskusikan dan dicarikan solusi penyelesaiannya. Problem dan tantangan global, nasional, dan lokal akan terus bergulir. Termasuk persoalan dan tantangan kurikulum pendidikan nasional yang masih disinyalir belum mampu beradaptasi dengan standar internasional yang ditetapkan oleh skor PISA. Sejak mengikuti PISA pada tahun 2000, Indonesia terus menempati peringkat yang lebih rendah. Pada 2015,

Indonesia menduduki peringkat 65 dari 69 negara peserta. Hal ini berdampak pada citra Indonesia di mata dunia internasional karena Indonesia dinilai belum berhasil memberikan pendidikan yang berkualitas dengan standar internasional.

Perkembangan global dan nasional menjadi penting untuk dianalisis secara komprehensif dalam kerangka memperkuat politik pendidikan dan kebijakan kurikulum pendidikan nasional, termasuk penguatan pendidikan Islam. Di sinilah posisi penting studi perbandingan pendidikan dalam rangka melihat peluang dan tantangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa depan.

E. PENUTUP

Perbandingan pendidikan sebagai bidang dan wilayah studi sejak awal sampai saat ini telah berkembang dan memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep dan kualitas pendidikan nasional di berbagai negara. Di Indonesia, perbandingan pendidikan telah membantu negara untuk menentukan prioritas kebijakan pendidikan nasional. Kajian perbandingan pendidikan bagi politik pendidikan Islam di Indonesia dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai analisis kependidikan yang dihadapi umat Islam dalam membangun konsep pendidikan Islam. Orientasi pendidikan Islam perlu terus dipikirkan dengan menemukan berbagai peluang pengembangan pendidikan Islam di tengah-tengah *trend* dan perkembangan internasional.

Analisis dan kajian mendalam mengenai berbagai problem pendidikan Islam dengan berbagai aspek dan wilayah kajiannya perlu terus dilakukan melalui *research* perbandingan pendidikan sehingga paradigma pendidikan Islam dapat menemukan otentisitas dan aktualitas yang seiring dengan kebutuhan manusia modern dengan ciri penerimaan terhadap perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi yang semakin modern dan efektif harus menjadi pertimbangan mendasar bagi penguatan konsep pendidikan Islam di era digital modern.

REFERENSI

- Pratiwi, I. (2019). Efek Program Pisa Terhadap Kurikulum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i1.1157>
- Bjork, C. (2004). Decentralisation in education, institutional culture and teacher autonomy in Indonesia. *International Review of Education*, 50(3-4), 245-262. <https://doi.org/10.1007/s11159-004-2622-6>
- Susanto, P. (2015). Perbandingan Pendidikan Islam di Asia Tenggara. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.41.71-93>
- Mohammad Aslam, M. M., Othman, I. B., & Rosili, N. A. K. (2016). De-Radicalization Programs in South-East Asia: A Comparative Study of Rehabilitation Programs in Malaysia, Thailand, Indonesia &

- Singapore. *Journal of Education and Social Sciences*, 4(June), 154–160. Retrieved from http://jesoc.com/wp-content/uploads/2016/06/KC4_81.pdf
- Pohl, Florian. (2006). Islamic Education and Civil Society: Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia. *Comparative Education Review*, 50(3), 389. <https://doi.org/10.2307/4091408>
- Ali, N. (2019). Integrative Curriculum Of Religion And Science At Special Pesantren For University Students. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 20(1), 95–122. <https://doi.org/10.18860/ua.v20i1.6353>
- Azra, A., van Dijk, K., & Kaptein, N. J. G. (2010). *Varieties of religious authority: Changes and chall. in 20th century Indonesian Islam. Varieties of Religious Authority: Changes and Chall. in 20th Century Indonesian Islam* (pp. 1–211). Institute of Southeast Asian Studies.
- Bahri, M. Z. (2014). Teaching religions in Indonesian Islamic higher education: From Comparative Religion to Religious Studies. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 4(2), 155–188. <https://doi.org/10.18326/ijims.v4i2.155-188>
- Hashim, R., Rufai, S. A., Roslan, M., & Nor, M. (2011). Traditional Islamic Education in Asia and Africa: A Comparative Study of Malaysia's Pondok, Indonesia's Pesantren and Nigeria's Traditional Madrasah. *World Journal of Islamic History and Civilization*, 1(2), 94–107.
- Sugandi, B., & Delice, A. (2014). Comparison of Turkish and Indonesian Secondary Mathematics Curricula; Reflection of the Paradigms. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 152, 540–545. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.240>
- Garavan, T. N., Ardichvili, A., Zavyalova, E., & Minina, V. (2012). Human capital development: Comparative analysis of BRICs. *European Journal of Training and Development*, 36(2–3), 213–233. <https://doi.org/10.1108/03090591211204724>
- Thieme, C., Giménez, V., & Prior, D. (2012). A comparative analysis of the efficiency of national education systems. *Asia Pacific Education Review*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s12564-011-9177-6>
- Tayeb, A. (2018). *Islamic Education in Indonesia and Malaysia. Islamic Education in Indonesia and Malaysia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351116862>
- Componote.com. Methodological Approaches In Comparative Education., <http://camponotes.blogspot.com/2013/01/methodological-approaches-in.html>

- Epstein, Irving. (2019). *Affect Theory and Comparative Education Discourse: Essays on Fear and Loathing in Response to Global Educational Policy and Practice*. <https://www.bloomsbury.com/uk/affect-theory-and-comparative-education-discourse-9781350043602/>
- Carnoy, M. (2018). *Transforming Comparative Education: Fifty Years of Theory Building at Stanford*. Stanford University Press. <https://lemanncenter.stanford.edu/paper/transforming-comparative-education-fifty-years-theory-building-stanford>
- Yuan, Gu Ming. (2003). The Mission of Comparative Education In China In The Era of The Knowledge Economy. *Journal of Policy Futures in Education*, Volume 1, Number 2, 2003. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/pfie.2003.1.2.3>
- Jacob, W. James & Sheng Yao Chen. (2005). Mapping Paradigms And Theories In Comparative, International, and Development Education (CIDE) Research Background And Foundation Theorists of CIDE. https://www.academia.edu/26739565/Mapping_Paradigms_And_Theories_In_Comparative_International_And_Development_Education_Cide_Research_Background_And_Foundation_Theorists_Of_Cide
- Brehm, Will. (2015). Introduction to Comparative Education: Theories, Perspectives, Histories. <http://www.willbrehm.com/wp-content/uploads/2018/08/Brehm-Intro-to-CIE-share.pdf>
- Alexander W. Wiseman M. Fernanda Astiz David P. Baker. (2013). Globalization And Comparative Education Research: Misconceptions And Applications Of Neo-Institutional Theory. *Journal of Supranational Policies of Education*, ISSN 2340-6720 www.jospoe-gipes.com
- Schriewer, Jurgen & Brian Holmes. (2018). *Theories and Methods in Comparative Education*. <https://www.peterlang.com/view/title/32804>
- Psacharopoulos, G. (1990). Comparative Education: From Theory to Practice, or Are You A: \neo.* or B:*. ist? *Comparative Education Review*, 34(3), 369–380. <https://doi.org/10.1086/446952>
- Crossley, M. (1999). Reconceptualising comparative and international education. *Compare*, 29(3), 249–267. <https://doi.org/10.1080/0305792990290305>
- Gorard, S., & Smith, E. (2004). An international comparison of equity in education systems. *Comparative Education*, 40(1), 15–28. <https://doi.org/10.1080/0305006042000184863>
- Binti Maunah, (2011). *Perbandingan Pendidikan Islam*, Yogyakarta; Teras.

- Arifin, H. M., (1994). *Ilmu Perbandingan Pendidikan*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press.
- Agustiar Syah Nur. (2012). *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Jakarta: Lubuk Agung.
- Djuwairiyah, Hj. D., & Muqit, Abd. (2017). Perbandingan Pendidikan Islam. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 11(2), 291–306. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v11i2.185>
- Epstein, E. H. (2014). Comparative education research: approaches and methods. *Asia Pacific Journal of Education*, 34(2), 252–255. <https://doi.org/10.1080/02188791.2014.888699>
- Paulston, R. G. (1999). Mapping comparative education after postmodernity. *Comparative Education Review*, 43(4), 438–463. <https://doi.org/10.1086/447579>
- Dryden-Peterson, S. (2016). Refugee Education. *Educational Researcher*, 45(9), 473–482. <https://doi.org/10.3102/0013189x16683398>
- Dolby, N., & Rahman, A. (2008). Research in international education. *Review of Educational Research*, 78(3), 676–726. <https://doi.org/10.3102/0034654308320291>
- Tan, G. (2010). Current Issues in Comparative Education. *Current Issues in Comparative Education*, 12(2), 31–40. Retrieved from http://www.tc.columbia.edu/CICE/Issues/12.02/PDFs/12_02_Complete_Issue.pdf#page=31
- Packham, G., Jones, P., Miller, C., Pickernell, D., & Thomas, B. (2010). Attitudes towards entrepreneurship education: A comparative analysis. *Education + Training*, 52(8–9), 568–586. <https://doi.org/10.1108/00400911011088926>
- Cambridge, J., & Thompson, J. (2004). Internationalism and globalization as contexts for international education. *Compare*, 34(2), 161–175. <https://doi.org/10.1080/0305792042000213994>
- Tikly, L. (2004). Education and the new imperialism. *Comparative Education*, 40(2), 173–198. <https://doi.org/10.1080/0305006042000231347>
- Noah, H. J. (1984). The Use and Abuse of Comparative Education. *Comparative Education Review*, 28(4), 550–562. <https://doi.org/10.1086/446467>
- Brock, C. (2018). Comparative education and the geographical factor. In *Contemporary Issues in Comparative Education: A Festschrift in Honour of Professor Emeritus Vernon Mallinson* (Vol. 19, pp. 148–176). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781351004428-11>

- Spolton, L. (1968). Methodology in Comparative Education. *Comparative Education*, 4(2), 109–115. <https://doi.org/10.1080/0305006680040204>
- Dale, R. (2005). Globalisation, knowledge economy and comparative education. *Comparative Education*, 41(2), 117–149. <https://doi.org/10.1080/03050060500150906>
- Cowen, Robert & Andreas M. Kazamias. (2009). *International Handbook of Comparative Education*. (2009). *International Handbook of Comparative Education*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6403-6>
- Broadfoot, T.(1978). Reproduction in Education, Society and Culture. *Comparative Education*. <https://doi.org/10.1080/0305006780140109>

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN DI FINLANDIA

Achmad Zulfi

achmadzulfi40@gmail.com

A. RASIONAL

Finlandia merupakan salah satu negara Eropa Utara yang memiliki tradisi pendidikan berkualitas tinggi di dunia. Finlandia berada di peringkat pertama untuk *Human Capital Index* berdasarkan *The Human Capital Report 2015* yang dikeluarkan *World Economic Forum*. Sistem pendidikan yang telah teruji selama 150 tahun membuktikan bahwa kemajuan sistem pendidikan koheren dengan kemajuan ekonomi serta ilmu pengetahuan. Pada makalah ini akan ditampilkan tentang:

- a. Prinsip dan kebijakan pendidikan Finlandia
- b. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Finlandia
- c. Dampak sistem dan kebijakan pendidikan dan ekonomi Finlandia

1. Prinsip-prinsip Fundamental dan Kebijakan Pendidikan Finlandia.

Pendidikan merupakan hak asasi yang utama bagi seluruh warga Negara Finlandia. Tujuan utama dari kebijakan pendidikan Finlandia adalah untuk memastikan bahwa seluruh warga negaranya mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama tanpa memandang perbedaan umur, domisili, kondisi finansial, gender maupun bahasa.

Pertama, setiap provinsi di Finlandia memberikan jaminan penuh bagi setiap warga (termasuk pendatang) untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis; setiap provinsi juga menerapkan *compulsory education*. Kedua, pejabat berwenang juga memastikan jaminan pendidikan yang sama bagi setiap penduduk untuk mendapatkan pendidikan khusus berdasarkan kemampuan fisik dan psikologisnya serta yang berkebutuhan khusus untuk berkembang bagi yang memiliki kendala ekonomi di luar pendidikan dasar.

Pejabat berwenang berkewajiban menyediakan pendidikan yang dibutuhkan bagi setiap penduduk Finlandia termasuk yang menggunakan bahasa Swedia untuk mendapatkan hak yang sama. Pendidikan yang diberikan menggunakan bahasa pengantar berdasarkan *mother language* masing-masing. Penggunaan bahasa pengantar diatur dengan UU berdasarkan jenjang pendidikan. Khusus untuk Provinsi Aland yang seluruh penduduknya berbahasa Swedia memiliki UU Pendidikan sendiri.

Kebijakan pembangunan pendidikan Finlandia adalah *life long education*. Prinsip pendidikan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap penduduk memiliki ketrampilan dan kesempatan belajar yang sama untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dengan lingkungan yang beragam sepanjang hayat. Berdasarkan sudut pandang tersebut, kebijakan bidang pendidikan terintegrasi dengan kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan

pelatihan. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan dengan tujuan pemerintah untuk pemerataan pendidikan dan tingkat pendidikan bagi seluruh penduduk.

Kunci kebijakan pendidikan Finlandia adalah kualitas, efisiensi, kesetaraan dan global. Hal ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan penduduknya. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan tersebut. Disamping itu kebijakan pendidikan Finlandia sejalan dengan strategi kebijakan Uni Eropa 2020.

Keputusan tentang muatan undang-undang tentang pendidikan dan penelitian yang dibuat oleh pihak legislatif berdasarkan usulan pemerintah. Pemerintah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu.

Government programme merupakan sebuah *action plan* yang disepakati dari seluruh stakeholder pendidikan, sebagai pemangku kebijakan. Dalam *action plan* tersebut disepakati bahwa daya saing tenaga kerja memerlukan sistem pendidikan yang *well-functioning*. Sistem pendidikan komprehensif yang terbaik di dunia akan diperkuat untuk menjamin bahwa keuntungan yang sama bagi setiap penduduk. Sistem pendidikan Finlandia bertujuan untuk menjadikan penduduknya memiliki keahlian profesional yang tinggi, dalam bidang pendidikan tinggi maupun penelitian, melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi.

Jaminan pendidikan bagi pemuda merupakan bagian jaminan dari pemerintah bagi pemuda untuk melanjutkan pendidikan atau pelatihan setelah menempuh pendidikan dasar. Program-program keterampilan secara berkala diberikan kepada mereka. Hal ini bertujuan agar pemuda yang berusia kurang dari 30 tahun tidak hanya mendapatkan pendidikan dasar, akan tetapi juga memiliki *vocational qualification* yang dibutuhkan dunia kerja. Program ini diberlakukan sejak tahun 2013 sebagai bentuk kesetaraan dalam pendidikan.

2. Sistem Pendidikan dan Penelitian Finlandia

Kunci penting dari perencanaan pengembangan pendidikan memperkenalkan kesetaraan pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi perbedaan antara sekolah, misalnya dengan mengembangkan sistem pembiayaan. Rencana Pembangunan Pendidikan dan Penelitian mempromosikan kesetaraan dan menjadi dokumen penting dari kebijakan pendidikan dan penelitian Finlandia. Rencana pembangunan diadopsi oleh pemerintah setiap empat tahun, dan mengarahkan pelaksanaan tujuan kebijakan pendidikan dan penelitian dalam pembuatan Program Pemerintah. Rencana Pembangunan mencakup semua bentuk pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi serta penelitian yang dilakukan di universitas dan politeknik. Tujuan utama dari Rencana Pembangunan meliputi:

- a. Mempromosikan kesetaraan dalam pendidikan,
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan dan;
- c. Mendukung belajar sepanjang hayat

Salah satu prinsip dasar kebijakan pendidikan Finlandia adalah bahwa semua penduduk harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi. Kesempatan pendidikan yang sama harus tersedia untuk semua. Fokus pada periode 2011-2016 adalah pada pengentasan kemiskinan, ketimpangan sosial ekonomi, menstabilkan perekonomian masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan dan daya saing warga terlepas dari etnis asal, usia, domisili dan tingkat sosial mereka.

B. PRE-PRIMARY DAN PENDIDIKAN DASAR

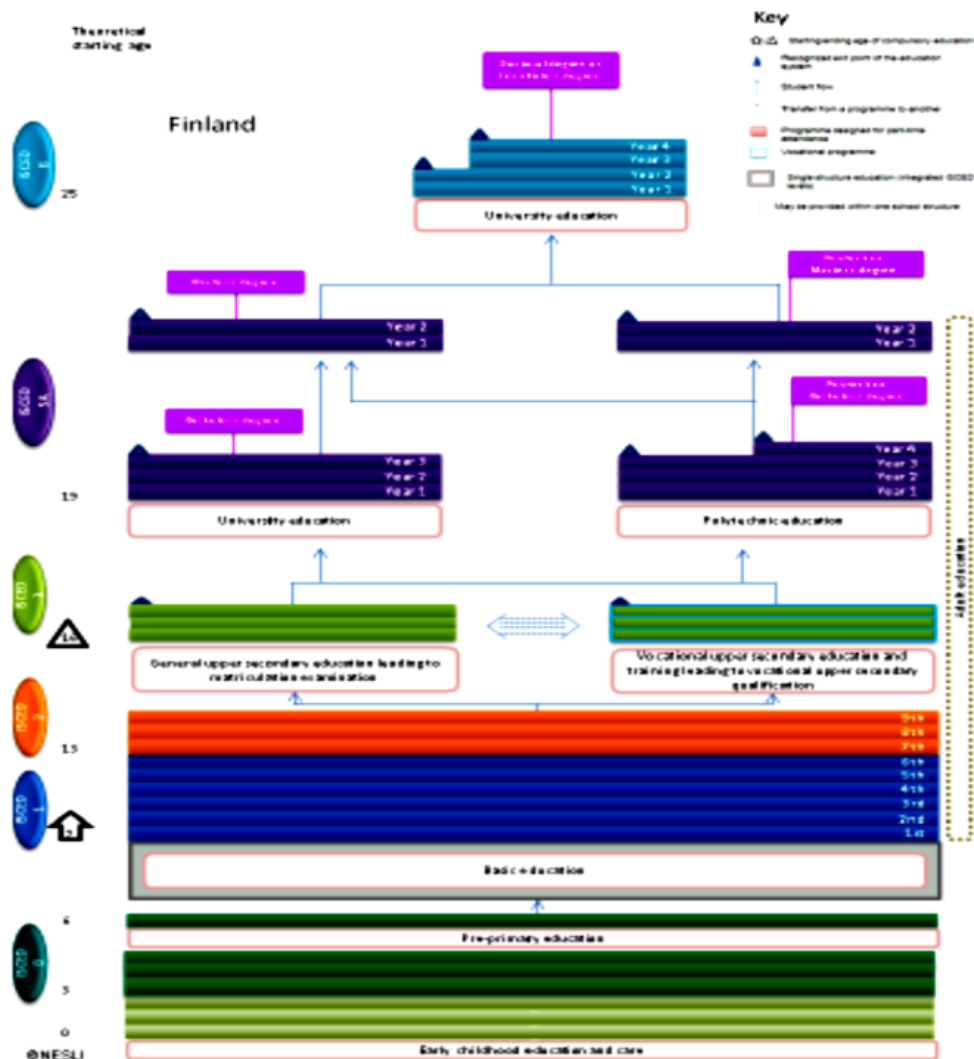
Pre-primary Education

Pre-primary education adalah pendidikan wajib yang diberikan ketika anak telah berusia 6 tahun. *Pre-primary* disediakan di pusat-pusat penitipan dan di sekolah-sekolah. Pada pendidikan *pre-primary* anak-anak akan mendapatkan keterampilan dasar, pengetahuan dan kemampuan belajar yang berbeda dengan pendidikan anak usia dini dan disesuaikan dengan usia dan kemampuan mereka. Pada fase ini belajar melalui bermain sangat penting.

Wajib belajar dimulai ketika seorang anak berusia tujuh tahun. Selama satu tahun sebelum *compulsory education* dimulai, anak dapat berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini. Pemerintah setempat dapat memberikan pendidikan anak usia dini di sekolah-sekolah, pusat penitipan anak, dan rumah penitipan keluarga atau di tempat-tempat lain yang sesuai. Partisipasi dalam pendidikan anak usia dini adalah sukarela tetapi pemerintah kota wajib menyediakan pendidikan anak usia dini. Anak usia 6-7 tahun yang masuk pendidikan usia dini tercatat 99,4% pada tahun 2009, sedangkan sekitar 70% anak-anak tersebut juga mengikuti pendidikan di tempat penitipan (*day care*).

Tujuan dari pendidikan anak usia dini adalah bahwa anak tersebut meningkatkan kemampuan belajar untuk belajar keterampilan dan positif citra diri, memperoleh keterampilan dasar, pengetahuan dan kemampuan dari daerah *different* pembelajaran sesuai dengan usia dan kemampuan mereka.

ANNEX A: STRUCTURE OF FINLAND'S EDUCATION SYSTEM



Gambar 2.1 Struktur Sistem Pendidikan di Finlandia Pendidikan Dasar

Wajib belajar dimulai ketika seorang anak berulang tahun yang ketujuh, kecuali bagi anak membutuhkan pendidikan kebutuhan khusus. Ruang lingkup silabus dasar pendidikan adalah sembilan tahun, dan hampir semua anak menyelesaikan pendidikan dengan menghadiri sekolah yang komprehensif. Pendidikan dasar diberikan secara gratis. Demikian pula dengan buku teks dan bahan ajar lainnya dan siswa mendapatkan makanan gratis setiap hari. Di samping itu, disediakan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan secara gratis pula. Bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah (lebih dari 5 km) atau perjalanan dianggap berbahaya berhak mendapatkan layanan transportasi secara gratis. Jika waktu perjalanan harian melebihi tiga jam, murid

berhak untuk menggunakan tempat tidur dan menginap di asrama. Pemerintah setempat menetapkan tempat sekolah untuk setiap murid berdasarkan jarak dengan rumah mereka, namun orang tua bebas memilih sekolah yang komprehensif sesuai dengan preferensi mereka, dengan beberapa pembatasan.

Pendidikan dasar Finlandia menggunakan struktur tunggal, yaitu tidak ada pembagian pendidikan dasar dan menengah pertama. Pembelajaran biasanya diberikan oleh guru kelas yang sama untuk sebagian besar mata pelajaran dalam enam tahun-kelas pertama dan oleh guru mata pelajaran dalam tiga tahun terakhir. Tahun ajaran terdiri 190 hari antara pertengahan Agustus dan awal Juni. Sekolah dilaksanakan lima hari seminggu, dan jumlah minimum pelajaran per minggu bervariasi 19-30 jam pelajaran, tergantung pada tingkat dan jumlah mata pelajaran opsional diambil. Jadwal kegiatan harian dan mingguan diputuskan oleh masing-masing sekolah. Di samping itu, terdapat otonomi daerah tentang hari libur tambahan.

Tujuan pendidikan dasar Finlandia adalah untuk mendukung pertumbuhan kemanusiaan siswa dan rasa tanggung jawab pada masyarakat dan untuk menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dengan dalam kehidupan mereka. Pendidikan harus mempromosikan pembelajaran dan kesetaraan dalam masyarakat serta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan guna perkembangan mereka di kemudian hari. Pendidikan juga bertujuan menjamin kesetaraan dalam pendidikan di seluruh negeri.

Pemikiran yang dianut pendidikan di Finlandia adalah bahwa potensi masing-masing siswa harus dimaksimalkan. Karena itu bimbingan pendidikan dipandang sebagai penting. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk mendukung, membantu dan membimbing siswa dan mahasiswa sehingga mereka semua dapat melakukan sebaik mungkin dalam studi mereka dan mampu membuat keputusan yang benar dan tepat mengenai pendidikan dan karir mereka.

Bimbingan dan konseling dipandang sebagai pekerjaan semua tenaga kependidikan. Dengan demikian guru dituntut untuk membimbing anak-anak dan remaja sebagai individu dan membantu mereka untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Peserta didik juga harus merasakan kesuksesan dan kebahagiaan dalam pembelajaran. Saat ini semua siswa memiliki hak untuk mendapatkan dukungan pendidikan. Dukungan ini dapat berupa remedial atau dukungan untuk siswa berkebutuhan khusus.

Pendidikan anak dengan kebutuhan khusus umumnya disediakan bersamaan dengan pendidikan umum (*pendidikan inklusi*). Kebijakan pendidikan di Finlandia adalah memberikan pendidikan kebutuhan khusus terutama dalam pendidikan umum. Jika siswa tidak dapat belajar dalam kelompok pembelajaran biasa, maka yang bersangkutan berhak mengikuti pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan ini sedapat mungkin disediakan di sekolah reguler. Semua siswa usia sekolah wajib memiliki hak untuk memperoleh dukungan pendidikan berkualitas tinggi serta bimbingan dan dukungan. Dukungan intensif harus diberikan kepada siswa yang membutuhkan penanganan khusus agar mampu belajar dengan baik. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah yang ada menjadi

lebih serius atau meluas. Jika anak-anak tersebut tidak dapat secara pendidikan umum secara memadai, mereka harus diberi dukungan khusus. Tujuan utama dari dukungan khusus ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama dengan yang lain dapat menyelesaikan pendidikan wajib dan berhak untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atas. Dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus juga disediakan dalam pendidikan menengah atas. Dalam pendidikan kejuruan dan pelatihan, siswa membutuhkan yang pendidikan kebutuhan khusus disediakan dengan secara individu. Dalam perencanaan ditetapkan rincian kualifikasi lulusan, persyaratan tertentu yang diobservasi dan langkah-langkah dukungan yang diberikan bagi siswa.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung golongan minoritas dan para imigran, adalah penggunaan dua bahasa resmi, yaitu Finlandia dan Swedia. Sekitar lima persen dari siswa di pendidikan menengah dasar dan atas mengikuti pendidikan di sekolah yang menggunakan pengantar bahasa Swedia. Kedua kelompok memiliki lembaga bahasa sendiri termasuk di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu ada lembaga pendidikan di mana semua atau setidaknya beberapa instruksi yang diberikan dalam bahasa asing, yang paling umum dalam bahasa Inggris.

Pemerintah lokal juga diminta untuk menyelenggarakan pendidikan dalam bahasa Sami di Provinsi Lapland. Pelestarian bahasa diambil untuk memastikan kesempatan pendidikan bagi penduduk Roma dan golongan minoritas lainnya serta untuk penduduk yang menggunakan bahasa isyarat. Institusi pendidikan dapat misalnya mengajukan dana tambahan untuk mengatur instruksi dalam bahasa nasional resmi untuk Roma, Sami dan anak-anak migran dan untuk proses pembelajaran menggunakan bahasa ibu siswa. Institusi pendidikan juga menyelenggarakan pendidikan persiapan bagi imigran untuk memungkinkan mereka untuk memasuki pendidikan menengah dasar atau menengah atas.

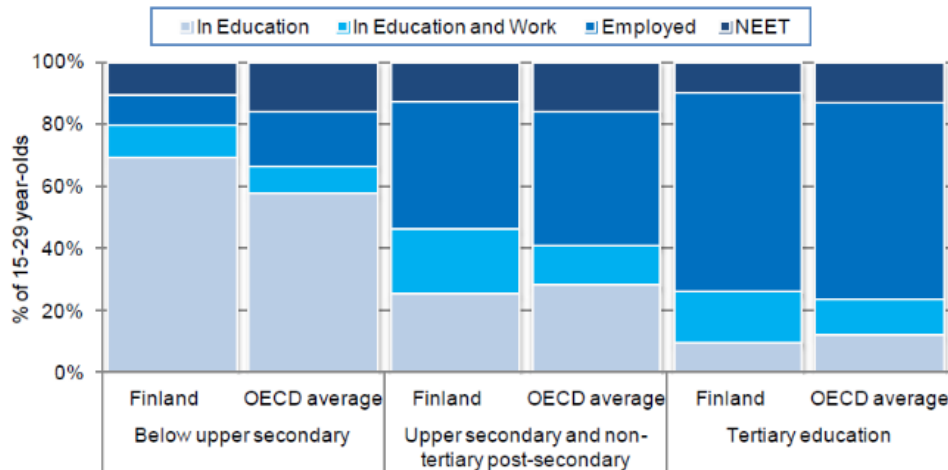
Lifelong Education

Sistem pendidikan Finlandia berlangsung sepanjang hayat. Peserta didik selalu dapat melanjutkan studi mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, apapun pilihan mereka. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengembangkan sistem yang mengakui hasil belajar sebelumnya untuk menghindari tumpang tindih yang tidak perlu dalam melanjutkan studi. Finlandia memiliki sejarah panjang tentang partisipasi dan promosi pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan menengah atas mulai diberlakukan pada tahun 1889. Pendidikan bagi orang dewasa sangat populer, hal ini dibuktikan dari tingkat partisipasi yang tinggi secara statistik internasional.

Tujuan utama dari kebijakan pendidikan orang dewasa adalah menjamin ketersediaan dan kompetensi angkatan kerja, memberikan kesempatan pendidikan bagi seluruh populasi orang dewasa dan memperkuat kohesi sosial dan ekuitas. Tujuan tersebut harus mendukung upaya untuk memperpanjang usia kerja produktif, meningkatkan produktivitas, menciptakan kondisi untuk belajar sepanjang hayat dan meningkatkan multikulturalisme. Lembaga pendidikan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk orang dewasa

pada semua tingkat pendidikan. Upaya telah dilakukan untuk membuat ketentuan sefleksibel mungkin agar memungkinkan orang dewasa untuk belajar bersama dengan pekerjaan. Pendidikan orang dewasa terdiri pendidikan dan pelatihan yang mengarah pemberian gelar atau sertifikat. Mereka mengikuti kurikulum inti dan kualifikasi persyaratan nasional.

Figure 4. Percentage of 15-29 year-olds in education and not in education, by educational attainment and work status, 2011



NEET: Neither Employed, nor in Education and Training

Source: OECD (2013), *Education at a Glance 2013: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, <http://dx.doi.org/10.1787/eaq-2013-en>.

Gambar 2.2 Persentase Usia 15-29 Tahun dalam Pendidikan dan tidak dalam Pendidikan

3. Otonomi Sistem Pendidikan di Finlandia

Pendidikan di Finlandia menjadi tanggungan pemerintah mulai dari *pre-primary* sampai pendidikan tinggi. Untuk *pre-primary* dan pendidikan dasar, buku teks, makan sehari-hari dan transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah disediakan secara gratis. Sedangkan pada pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tinggi, siswa atau orang tua mereka membeli buku teks sendiri. Pada pendidikan tingkat menengah siswa memiliki hak untuk mendapatkan makanan secara gratis dan sedangkan untuk pendidikan tinggi disubsidi oleh negara.

Pendidikan orang dewasa adalah satu-satunya bentuk pendidikan yang mungkin memerlukan pembayaran. Untuk memastikan peluang untuk belajar untuk semua orang di sana adalah sistem yang dikembangkan dengan baik hibah penelitian dan pinjaman. bantuan keuangan dapat diberikan untuk studi penuh waktu di sebuah sekolah menengah atas, lembaga kejuruan atau lembaga pendidikan tinggi. Pendidikan *pre-primary* sampai pendidikan tinggi di Finlandia gratis, terutama menggunakan sumber dana pemerintah.

Kebanyakan institusi pendidikan menengah atas, dasar dan umum didanai oleh pemerintah negara bagian dan lokal. Pemerintah kota menerima dana sesuai dengan formula yang menyeimbangkan proporsi penduduk dan status sosial ekonomi mereka memutuskan secara demokratis bagaimana mendistribusikan dana di daerah yang berbeda, termasuk pendidikan. Lembaga swasta juga menerima dana publik (dengan pendaftaran dari 5% atau kurang dari primer dan siswa menengah dan 18% siswa menengah atas). Dana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar termasuk dalam transfer layanan dasar dari pemerintah pusat untuk kota, dan pemerintah kota dapat memutuskan bagaimana dana yang dialokasikan.

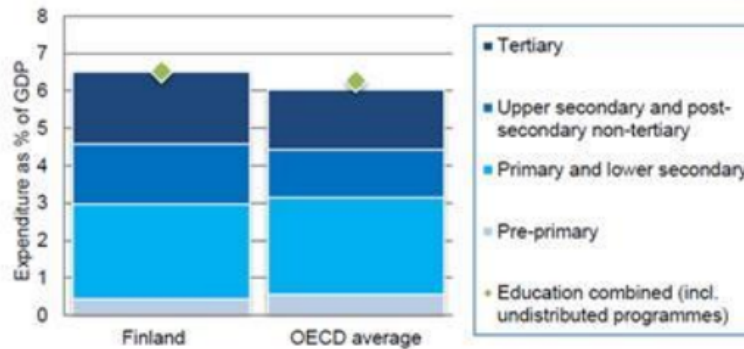
Pendanaan untuk pendidikan menengah atas dan VET tersedia berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah dan biaya satuan per siswa. Untuk **pendidikan tinggi**, tidak ada biaya kuliah. Universitas menerima dana dari pemerintah pusat dan juga melakukan penggalangan dana eksternal. Dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas setuju pada target operasional dan kualitatif yang memberikan dasar untuk sumber daya yang dibutuhkan. Politeknik didanai oleh pemerintah dan lokal dan juga memiliki sumber dana dari luar. Pendanaan inti yang disediakan oleh pemerintah berdasarkan biaya satuan per siswa, pendanaan proyek dan pendanaan berbasis kinerja.

Untuk memastikan semua orang memiliki kesempatan pendidikan, **bantuan keuangan mahasiswa** dirancang untuk menguntungkan sebagian besar siswa. Bantuan keuangan termasuk terutama dana hibah studi dan suplemen perumahan. Beasiswa dan / atau hibah lainnya untuk rumah tangga berjumlah 14,9% dari pengeluaran publik untuk pendidikan tersier, di atas OECD rata-rata 11,4%. Lebih dari setengah dari siswa nasional dalam program gelar pertama dalam tersier- pendidikan tipe A (54%), mendapatkan beasiswa dan / atau hibah. Kebanyakan institusi yang menyediakan pendidikan tingkat menengah dasar dan atas dikelola oleh pemerintah daerah atau kota. Tanggung jawab untuk pendanaan pendidikan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Investasi Finlandia di lembaga pendidikan mirip dengan rata-rata OECD. Pengeluaran pada lembaga pendidikan di semua tingkatan adalah 6,5% dari PDB, sedikit di atas rata-rata OECD 6,3%. Antara tahun 2005 sampai 2010, Finlandia meningkatkan pengeluaran sebesar 0,5 poin persentase (sedikit di atas rata-rata OECD 0,4 poin persentase). Hampir semua pengeluaran lembaga pendidikan adalah dari sumber-sumber pemerintah (97,6%, dibandingkan dengan rata-rata OECD dari

83,6% pada tahun 2010). Penggunaan dana keluarga sangat kecil pada semua tingkat pendidikan (kecuali di tingkat pre-primary di mana itu dilakukan untuk 9,9% dari pengeluaran), dan itu merupakan 4,1% dari pengeluaran di tingkat tersier.

Figure 8. Expenditure on educational institutions as a percentage of GDP, by level of education, 2010



Source: OECD (2013), *Education at a Glance 2013: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, <http://dx.doi.org/10.1787/eag-2013-en>.

Gambar 2.3 Pengeluaran untuk lembaga pendidikan sebagai persentase dari PDB

Finlandia menyediakan anggaran pendidikan per mahasiswa reguler yang relatif lebih besar dibanding negara-negara OECD lainnya dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, tetapi relatif kurang per siswa di tingkat pendidikan lainnya. **Pengeluaran tahunan per siswa** atas semua tingkatan (dari SD sampai pendidikan tinggi, termasuk kegiatan R & D) adalah USD 10.157, atau di atas negara-negara OECD yang rata-rata USD 9.313. Dari tahun 2005 sampai 2010, pengeluaran per siswa meningkat sebesar 12% pendidikan primer, sekunder dan pasca-sekunder pendidikan non-tercier (dibandingkan dengan OECD rata-rata 17%), sedangkan pendaftaran tetap sama. Pada pendidikan tinggi, pengeluaran per mahasiswa meningkat 18% (dibandingkan dengan OECD rata-rata 8%) sedangkan pendaftaran sedikit menurun sebesar 1% (dibandingkan dengan OECD rata-rata 13%).

Pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar merupakan bagian dari pelayanan dasar pemerintah daerah/kota yang menerima dana dari pemerintah pusat. Transfer dana dari pemerintah pusat bagi wajib belajar didasarkan pada jumlah tahun anak usia 6-15 tahun yang tinggal di daerah/kota dan anggaran khusus dari pemerintah daerah/kota. Pemerintah daerah/kota dapat memutuskan sendiri bagaimana mengalokasikan dana ini. Transfer pemerintah wajib untuk layanan dasar kota adalah sekitar sepertiga dari anggaran biaya pendidikan.

Dana untuk pendidikan menengah atas dan pendidikan kejuruan serta pelatihan didasarkan pada jumlah siswa yang dilaporkan oleh sekolah menggunakan satuan biaya yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pendanaan politeknik pemerintah mengalokasikan sumber daya dalam bentuk pendanaan inti, yang didasarkan pada biaya satuan per mahasiswa, pendanaan proyek dan pendanaan berbasis kinerja. Misalnya jumlah lulusan menjadi acuan pendanaan berbasis kinerja. Politeknik juga memiliki

sumber dana dari swasta. Lembaga pelatihan vokasional maupun politeknik penyedia pendidikan didorong untuk meningkatkan hasil mereka melalui pendanaan berbasis performa.

Universitas di Finlandia merupakan institusi independen di bawah hukum negara atau yayasan yang berbadan hukum. Setiap universitas dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan target operasional dan kualitatif setiap tiga tahun untuk setiap universitas dan mendapatkan sumber daya manusia atau angkatan kerja yang diperlukan. Dalam perjanjian tersebut juga mendefinisikan bagaimana target tersebut akan dipantau dan dievaluasi. Universitas menerima dana dari pemerintah pusat, tetapi mereka juga diharapkan untuk meningkatkan pendanaan dari pihak eksternal.

Peran Sentral Pemerintah daerah dan Institusi Pendidikan

Administrasi pendidikan nasional diselenggarakan pada dua lembaga. Kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping itu terdapat sebuah lembaga nasional, *Finnish National Board of Education*, bertanggung jawab untuk memantau implementasi kebijakan agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Lembaga tersebut memiliki garis konsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan tujuan pendidikan, konten dan metode pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan *pre-primary*, pendidikan dasar, pendidikan menengah atas dan pendidikan orang dewasa. Kebijakan pendidikan tingkat lokal adalah tanggung jawab pemerintah daerah/kota. Kebijakan tersebut meliputi keputusan alokasi anggaran, kurikulum lokal, penerimaan staf sekolah baik guru maupun tenaga administrasi. Badan ini membuat keputusan tentang alokasi dana, kurikulum lokal, rekrutmen personil. Pemerintah daerah/kota juga memiliki otonomi untuk mendelegasikan kekuasaan membuat keputusan bagi sekolah-sekolah. Biasanya para kepala sekolah direkrut dari sekolah mereka.

Otonomi pendidikan yang besar di semua jenjang pendidikan

Institusi pendidikan bertanggung jawab untuk pengaturan proses pembelajaran beserta efektivitas dan kualitas pendidikannya. Tidak ada peraturan yang mengatur ukuran kelas dan institusi pendidikan dan sekolah bebas untuk menentukan jumlah siswa dan rombongan belajar. Pemerintah daerah/kota dapat menentukan bentuk-bentuk otonomi yang dapat dilakukan oleh sekolah. Kemudian sekolah-sekolah memiliki hak untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan sekolah, sepanjang tidak melanggar aturan. Dalam banyak kasus pengelolaan pendidikan misalnya anggaran, akuisisi dan perekrutan adalah tanggung jawab sekolah.

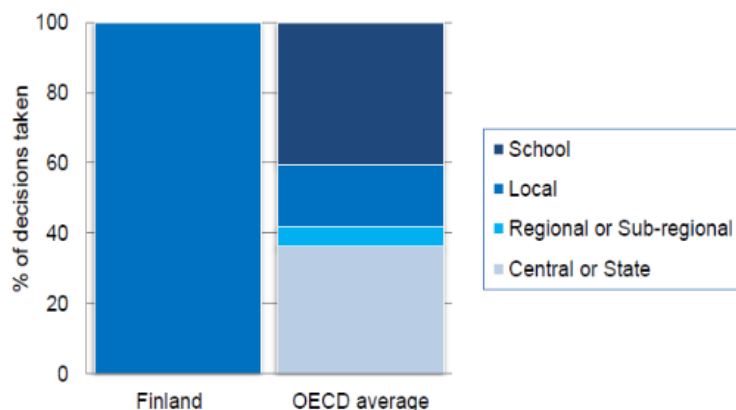
Figure 2.1 Distribution of authority within the education sector in 1972, 1980 and 2005

	1972	1980	2005
Time allocation in curriculum	NBGE	Cab	Cab
Curriculum	NBGE	NBGE	NBE/SB
Class-size	Cab	Cab	Mun
Establishing:			
Primary school	NBGE	Mun	Mun
Lower secondary school	NBGE	MoE	Mun
Upper-secondary school	NBGE	MoE	Mun
Vocational school	MoE	MoE	MoE
Hiring teachers	Mun/NBGE	Mun/NBGE/NBVE/MoE	Mun
Teacher qualification	Cab	Cab	Cab
Textbook control	NBGE	NBGE/NBVE	SB
State funding	NBGE	NBGE/NBVE	MoE
Budget allocations to schools	NBGE	NBGE/NBVE	Mun

Cab = Cabinet of Ministers
 MoE = Ministry of Education
 NBGE = National Board of General Education
 NBVE = National Board of Vocational Education
 NBE = National Board of Education
 Mun = Municipality
 SB = School or School Board

Gambar 2.4 Distribusi Kewenangan dalam Sektor Pendidikan pada Tahun 1972,1980 Dan 2005

Figure 7. Percentage of decisions taken in public lower secondary schools at each level of government, 2010



Note: For Finland, local level includes both local and school levels.

Source: OECD (2012), *Education at a Glance 2012: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, <http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en>.

Gambar 2.5 Persentase Keputusan yang Diambil Di Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Setiap Tingkat Pemerintahan, 2010

Guru memiliki otonomi pedagogis

Guru dapat memutuskan sendiri model/strategi/metode pembelajaran serta buku pelajaran dan media pembelajaran yang tepat bagi siswa. Politeknik dan universitas menikmati otonomi yang luas. Jaminan kualitas didasarkan pada kemudi yaitu guru dan dosen bukannya dinas pendidikan.

Di Finlandia fungsi pengawasan sekolah dihapuskan di awal 1990-an. Pengawasan pada masa lalu adalah untuk kepentingan informasi, pendukung dan pendanaan. Kegiatan institusi pendidikan dipandu oleh tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang serta kurikulum inti dan kualifikasi persyaratan nasional. Sistem ini bergantung pada kemampuan guru dan tenaga administrasi.

Evaluasi diri sekolah dan institusi pendidikan mendapatkan perhatian penting dalam evaluasi pendidikan. Evaluasi nasional hasil belajar yang dilakukan secara teratur, sehingga ada tes setiap tahun baik dalam bahasa ibu dan sastra atau matematika. Disamping itu, mata pelajaran lain dievaluasi sesuai dengan rencana evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak hanya mata pelajaran akademis dievaluasi tetapi juga subyek seperti seni dan kerajinan dan tema lintas-kurikuler. Dari perspektif sekolah, evaluasi tidak bisa dilakukan dengan baik karena hanya berbasis sampel. Institusi pendidikan menerima hasil evaluasi diri untuk kepentingan mereka menentukan tujuan pembangunan institusinya. Tujuan utama dari evaluasi hasil belajar tingkat nasional melihat ketercapaian sebagaimana dalam kurikulum dan kualifikasi persyaratan inti. Hasil belajar tidak digunakan untuk menentukan peringkat sekolah.

Dalam pendidikan tinggi politeknik dan universitas bertanggung jawab untuk evaluasi operasi dan hasil mereka sendiri. Dalam hal ini mereka didukung oleh badan nasional yang bertanggung jawab dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Untuk pendidikan anak usia dini mendukung pengembangan dan pembelajaran anak-anak. Sedangkan pendidikan anak usia dini dan penitipan anak, tujuan pendidikan dan pengajarannya adalah untuk mendukung pertumbuhan anak yang seimbang, melalui proses pengembangan dan pembelajaran. Setiap anak memiliki hak subjektif untuk mengikuti pendidikan anak usia dini. Hal ini dapat berlangsung di taman kanak-kanak atau kelompok penitipan keluarga kecil di rumah-rumah pribadi. Biaya pendidikan didasarkan pada pendapatan orangtua.

Kurikulum Inti Nasional dan Muatan Lokal

Pertama dan terpenting, kurikulum di Finlandia dianggap dokumen pedagogis yang menggambarkan tujuan belajar dan silabus subjek serta proses pembelajaran. Oleh karena itu kurikulum bertujuan merinci langkah-langkah yang paling penting bagi sekolah untuk menentukan tujuan pendidikannya.. Tetapi kurikulum juga merupakan instrumen penting dari kebijakan pendidikan, terutama ketika sistem sekolah sedang menjalani reformasi struktural yang komprehensif.

Kurikulum inti nasional untuk pendidikan dasar ditentukan oleh *Finnish National Board of Education*. Kurikulum ini berisi tujuan dan isi inti pelajaran yang berbeda, serta prinsip-prinsip penilaian murid, pendidikan kebutuhan khusus,

pupil welfare dan layanan bimbingan pendidikan. Prinsip-prinsip lingkungan belajar yang baik, pendekatan serta konsep pembelajaran juga dibahas dalam kurikulum inti. Kurikulum inti nasional diperbarui kira-kira setiap sepuluh tahun.

Institusi pendidikan menyusun kurikulum sendiri berdasarkan kerangka kurikulum inti nasional. Jadi ada ruang untuk kekhususan lokal atau regional. Semua kurikulum lokal harus, mendefinisikan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang mendasari, serta pendidikan dan pengajaran tujuan umum. Dalam kurikulum tersebut juga tersedia program pembelajaran berbasis bahasa ibu siswa dan muatan lokal. Selanjutnya, di dalam kurikulum tersebut memuat kerjasama dengan orangtua dan pembelajaran bagi murid yang membutuhkan dukungan khusus atau dari golongan minoritas atau menggunakan bahasa lain.

Penilaian dan Evaluasi Pendidikan

Di Finlandia jenis penilaian utama siswa adalah penilaian berkelanjutan (*continuous assessment*) selama pendidikan dan ujian akhir. Penilaian berkelanjutan bertujuan membimbing dan membantu siswa dalam proses belajar mereka. Setiap siswa menerima laporan minimal sekali setiap tahun dari sekolah. Tidak ada ujian nasional untuk siswa pada pendidikan dasar di Finlandia. Sebaliknya, guru bertanggung jawab untuk melakukan penilaian berdasarkan *respective subjects* masing-masing siswa sesuai dengan yang tertulis dalam kurikulum. Guru yang juga memberikan nilai pada ijazah kelulusan, yang diberikan pada akhir tahun 9 oleh guru.

Atas dasar penilaian ini siswa akan memilih untuk jenjang studi lebih lanjut. Oleh karena itu, kurikulum inti nasional berisi pedoman penilaian dalam semua mata pelajaran umum. Salah satu tugas pendidikan dasar adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa melakukan *self-assessment*. Tujuan pendidikan dasar adalah untuk mendukung pertumbuhan keterampilan pengetahuan diri dan belajar dan untuk membantu para siswa untuk belajar untuk menyadari kemajuan dan proses belajar mereka.

Pendidikan didanai oleh pemerintah

4. Sistem dan Reformasi Pendidikan Guru

Dalam masyarakat Finlandia, profesi guru merupakan posisi yang terhormat dan mendapat apresiasi yang tinggi (Simola, 2005). Secara tradisional, orang tua telah percaya bahwa guru merupakan profesional yang tahu apa yang terbaik untuk anak-anak mereka. Oleh karena itu guru memiliki kemandirian yang cukup di dalam kelas dalam hal memilih metode pedagogis yang sesuai. Sehingga, sekolah dasar khususnya cukup independen dalam merancang kurikulum mereka, pengaturan proses pembelajaran, dan penggunaan dana publik. Ini berarti bahwa pekerjaan guru dianggap independen, profesi status tinggi yang menarik beberapa lulusan sekolah menengah terbaik. Guru SD dan kepala sekolah menyadari kebutuhan untuk pendidikan guru yang lebih luas, bahkan sebelum reformasi sekolah komprehensif berlangsung pada tahun 1967. Sejak tahun 1967, guru bisa mengambil kursus pedagogi pada musim panas di sekolah

komprehensif, termasuk reformasi dan tantangan serta implikasi sosial dari hasil kursus yang diikuti. Kursus pembelajaran matematika dan bahasa asing terbukti sangat populer, tapi keikutsertaan mereka bersifat sukarela.

Ketika reformasi pendidikan dimulai pada tahun 1972, guru telah menyetujui dalam kontrak kerja akan melakukan pelatihan selama tiga hari setiap tahun. Undang-undang Pendidikan mengamanatkan guru mendapatkan dua hari pelatihan setiap tahun dalam tiga tahun pertama mengajar. Dengan demikian, selama tiga tahun masa kerja pertama pada sekolah komprehensif, guru wajib pelatihan mengikuti pelatihan lima hari setiap tahun. Sebuah lembaga instruktur di tingkat nasional dibentuk untuk mengelola pelatihan tersebut, dipimpin oleh seorang instruktur tingkat nasional, yang diberikan kewenangan untuk mengelola pelatihan ini. Setiap provinsi memiliki kelompok instruktur pedagogik sendiri, dan sekolah memiliki mentor untuk membantu guru untuk beradaptasi dengan budaya baru sekolah.

Bagi guru, *in-service training* saja tidak akan cukup untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi sekolah secara komprehensif. Sekolah-sekolah memerlukan guru yang terlatih baik dan sehingga tingkat pelatihan guru harus diperbanyak. Pelatihan bagi guru harus mempromosikan kesetaraan antara kelompok guru yang berbeda dan mendorong kerja sama dalam keterampilan bangunan serta peningkatan peluang untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Yang termasuk meningkatkan interaksi antara guru di sekolah-sekolah umum dan kejuruan. Akhirnya, sistem pendidikan terpadu diperlukan kesempatan yang lebih luas bagi guru untuk maju secara profesional.

Pada tahun 1965, Departemen Pendidikan membentuk komisi untuk memetakan reformasi pendidikan guru. Pedoman diusulkan oleh sebuah komite ahli yang membentuk dasar untuk sistem pelatihan yang berkembang setelah beberapa tahun kemudian.

Di antara rekomendasi komite tersebut antara lain:

- a. Semua pendidikan guru harus didasarkan pada pemeriksaan *Matriculation Examination*, ujian akhir nasional sekolah menengah atas umum
- b. Pelatihan bagi semua guru harus berlangsung setidaknya tiga tahun dan menghasilkan minimal gelar sarjana
- c. Guru Kelas dan guru mata pelajaran harus diberikan pelatihan pedagogis di lembaga pendidikan yang sama.
- d. Status seorang guru tidak harus ditentukan oleh tingkat kelas mereka mengajar, dengan usia murid mereka atau dengan mata pelajaran yang diajarkan. Gaji didasarkan gelar mereka dan bukan institusi tempat bekerja
- e. Guru lebih berperan sebagai penasihat dan pemandu belajar dari pada seorang penyampai informasi seperti dosen.
- f. Kualitas dan kuantitas pelatihan guru di sekolah harus ditingkatkan.
- g. Kesesuaian Seorang guru dengan profesi perlu diperiksa.

h. Pendidikan Guru harus mencakup studi umum, studi subjek, penelitian pedagogi, dan pelatihan di sekolah-sekolah. Studi subjek kelas guru dibagi menjadi tingkat umum dan khusus.

Reformasi pendidikan Finlandia berjalan cepat. Pada tahun 1968, guru kelas memulai program pelatihan tiga-tahun berdasarkan Ujian Matrikulasi. Guru sekolah dasar berusia diberi kesempatan untuk belajar untuk mendapatkan gelar sarjana dan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogis mereka.

Tahap reformasi pendidikan berikutnya menentukan langkah perubahan terhadap pendidikan akademik dan pelatihan guru. Pada tahun 1971, Undang-undang Pendidikan membentuk organisasi baru untuk pelatihan guru. Tujuh universitas meluncurkan unit pelatihan guru. Unit kedelapan didirikan di universitas berbahasa Swedia, sementara empat universitas lain memiliki afiliasi pelatihan guru. Ketersediaan pelatihan guru di 12 lokasi mencerminkan kebijakan regional yang kuat dari tahun 1970 yang bertujuan untuk memastikan pasokan guru di wilayah pedesaan bagian timur dan utara Finlandia. Departemen Pendidikan ditugaskan untuk mengawasi pelatihan guru. Universitas mempertahankan otonomi mereka tetapi memberikan masukan kepada Dewan Nasional Pendidikan Umum, yang bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program pendidikan baru bagi guru.

Reformasi lebih lanjut melibatkan isi pelatihan guru berkembang pada 1974-1975 universitas umum. Berdasarkan rekomendasi dari pemerintah yang ditunjuk oleh komite pendidikan nasional dan gelar *Master of Science* menjadi dasar untuk dapat menjadi guru tetap. Pelatihan mencakup sejumlah program pendidikan dan pelatihan bagi guru kelas, guru mata pelajaran, dan pakar pendidikan. Untuk mendapatkan gelar tersebut guru harus mengambil 160 kredit (SKS), dengan satu kredit sebesar 40 jam (satu minggu) studi. Reformasi Gelar dibuat akhir tahun 1978, dan pelatihan sesuai dengan rencana baru dimulai pada tahun 1979. Sejak pertengahan 1980-an, pendidikan umum Finlandia telah didukung oleh guru yang sangat terlatih dan mendapatkan pendidikan akademik yang ketat.

Semua guru sekolah dasar harus memiliki gelar master pendidikan dari salah satu universitas di Finlandia (atau Eropa) agar dapat menjadi guru secara permanen. Ini berarti pendidikan guru sekolah dasar dikonversi dari program tiga tahun di perguruan tinggi guru menjadi lima tahun di akhir 1970-an. Kebanyakan guru SD saat ini memiliki gelar master pendidikan. Semua guru sekolah pasca pendidikan dasar wajib memiliki baik gelar sarjana atau master. Sebagian besar guru di sekolah dasar merupakan individu yang sangat terdidik dan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan profesional mereka. Reformasi kurikulum telah membuat sekolah dasar menjadi tempat bermain dan belajar yang dikombinasikan dengan pendekatan pedagogik alternatif untuk membantu anak-anak menguasai pengetahuan akademik dan keterampilan dasar. Oleh karena itu banyak sekolah dasar telah menjadi pembelajaran bekerjasama dengan masyarakat yang peduli daripada sekedar lembaga pembelajaran semata yang mempersiapkan siswa untuk tingkat berikutnya sekolah.

Hanya sekitar 10 persen dari sekitar 5.000 pelamar yang diterima setiap tahun untuk Fakultas Pendidikan di universitas Finlandia . Ini berarti bahwa universitas departemen-pendidikan guru dapat memilih dari beberapa siswa terbaik di negara itu pada saat ujian masuk. Seperti disebutkan di atas, semua guru di Finlandia perlu gelar master untuk memenuhi syarat untuk pekerjaan mengajar permanen. Sesekali terjadi argumen tentang apakah guru SD perlu gelar master atau tidak. Namun demikian, meskipun tekanan untuk mengurangi waktu belajar dan meningkatkan efisiensi internal pendidikan pasca-sekolah menengah, persiapan guru tetap di universitas.

Untuk sekolah dasar, keputusan ini telah memiliki beberapa konsekuensi positif baik bagi guru dan masyarakat pada umumnya. Salah satu faktor penting adalah bahwa gelar master dalam pendidikan tidak hanya memenuhi syarat seseorang untuk mengajar sekolah tetapi membuka pintu untuk pekerjaan di administrasi publik atau di sektor swasta. Memang, lulusan muda dengan gelar master dalam mengajar sekolah dasar yang banyak dicari oleh departemen sumber daya manusia dalam bisnis dan industri. Yang paling penting, bagaimanapun, jaminan gelar master akses ke studi pasca-sarjana yang telah dibuat tersedia secara luas di sebagian besar universitas Finlandia saat ini. Guru sekolah dasar yang bergabung dengan pasar tenaga kerja setelah lulus tidak merasa bahwa karir profesionalnya terbatas hanya untuk pekerjaan sekolah dasar. Banyak guru, terutama di sekolah dasar, merebut kesempatan untuk melanjutkan studi akademis mereka. Selama dekade terakhir terjadi kenaikan jumlah kepala sekolah dan guru yang memperoleh gelar Ph.D. dalam pendidikan.

5. Reformasi Pendidikan Finlandia

Untuk memahami keadaan pendidikan saat ini di Finlandia, secara tradisional masyarakat Finlandia menekankan pentingnya menempatkan pendidikan sebagai syarat utama untuk kelangsungan hidup dan perkembangan bangsa. Sebagai bangsa dengan penduduk lebih dari 5 juta orang yang tinggal di iklim Arktik yang keras dan berbicara bahasa yang unik, Finlandia telah lama melihat pendidikan sebagai kunci untuk kesejahteraan individu dan kesejahteraan nasional. Meskipun pendidikan saat ini dari semua warga negara dipandang sebagai tanggung jawab negara dan pemerintah daerah (kota), kesempatan pendidikan bagi muda dan tua dihargai dan dihargai oleh sebagian besar masyarakat. Untuk negara dengan sumber daya alam yang terbatas, pendidikan telah menjadi pintu untuk pertumbuhan ekonomi, kohesi sosial, dan peluang lebih lanjut dalam kehidupan.

Pendidikan menjadi perhatian bersama antara pemerintah, orang tua, pengusaha, dan masyarakat pada umumnya. Setiap keluarga harus mendapatkan pendidikan sekolah yang baik di dekatnya telah sehingga orang tua tidak perlu khawatir tentang kualitas pendidikan anak-anak mereka. Biasanya, pertemuan orang tua-sekolah seperti mengumpulkan penonton besar di Finlandia, karena adanya kepercayaan yang kuat dalam kemampuan sekolah untuk mengelola

pendidikan dan sedikit kekhawatiran tentang apakah anak-anak akan dianiaya atau diganggu di sekolah.

Ada kesepakatan tidak tertulis antara rumah dan sekolah yang orang tua terutama bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai mereka sendiri, dan bahwa guru bertanggung jawab atas pendidikan akademik dan sosial. Koordinasi pembagian kerja telah diperkuat secara signifikan sejak pertengahan 1990-an, ketika otonomi sekolah meningkat dan pandangan orang tua yang diperlukan dalam membentuk profil dan misi dasar sekolah. Namun demikian, dalam banyak kasus komunikasi antara orang tua dan guru tetap terbuka dan konstruktif.

Ketika reformasi sekolah komprehensif dimulai pada awal tahun 1970-an, tujuan dasar adalah untuk menjamin semua anak kesempatan yang sama untuk pendidikan dasar sembilan tahun tanpa memandang status sosial ekonomi orang tua mereka. Pendidikan adalah gratis, dengan kurikulum sekolah yang komprehensif yang diajarkan dengan banyak cara yang sama di seluruh negeri. Kesenjangan antar wilayah dikurangi dengan meluncurkan reformasi di bagian termiskin di negeri ini, pertama dari utara dan kemudian Finlandia timur. Siswa yang mendapatkan grade tinggi (7-9) bisa melanjutkan pendidikan *upper-secondary general school* and *higher-level vocational institutions*

Reformasi pendidikan adalah proses evolusi, dan untuk mengevaluasi hasilnya adalah sulit. Pada akhir tahun 1980-an, Finlandia melakukan perubahan struktural yang mempengaruhi struktur pendidikan dan kurikulum. Tujuan utama dari reformasi sekolah yang komprehensif adalah untuk memperkuat kesetaraan pendidikan dan sosial. Kebanyakan dari semua, pembuat kebijakan berusaha untuk mencapai kesetaraan regional dan sosial, tetapi di negara dua bahasa resmi, itu juga penting untuk mengamankan kepentingan minoritas linguistik, anak-anak berbahasa Swedia. Untuk mencapai tujuan tersebut, struktur sekolah yang komprehensif harus berubah dari sistem paralel untuk satu kesatuan. Layanan sekolah yang komprehensif juga harus secara bersamaan memastikan dan diperluas ke daerah-daerah terpencil.

Keputusan Pemerintah pada tahun 1974, tentang pengembangan pendidikan pasca-wajib belajar dengan menaikkan peringkat pendidikan kejuruan dan membuka kesempatan pendidikan kejuruan untuk menambah jumlah siswa. Hal ini diperlukan menciptakan sebuah *compulsory school* yang akan memberikan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pendidikan lebih lanjut bagi lulusannya. Fokus reformasi pendidikan beralih dari reformasi struktural untuk pengembangan kurikulum menjadi peningkatan kualitas pendidikan dengan selalu memperhitungkan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesetaraan, dan pembangunan demokrasi masyarakat Finlandia. Tujuan ini dapat dicapai dan jumlah siswa yang mendaftar di sekolah atas-menengah mulai menanjak dengan cepat.

Pada bulan Mei 1974, Perdana Menteri menyetujui rencana untuk mengembangkan sebuah sistem pendidikan yang berlangsung dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Kebijakan Keputusan signifikan dalam hal

besar lain: itu menggeser fokus selama satu dekade reformasi dari sekolah-sekolah yang komprehensif untuk pendidikan menengah atas (*upper secondary education*).

Poin utama Keputusan Kebijakan Pendidikan tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan kejuruan akan dikembangkan menjadi jalur pendidikan kompetitif yang mengarah ke pendidikan yang lebih tinggi. Namun, kebutuhan tenaga kerja menjadi prioritas pertama.
- b. Siswa yang telah lulus dari pendidikan dasar harus memiliki kompetensi yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas baik umum maupun kejuruan.
- c. Jika pendidikan dasar tidak memberikan kompetensi umum yang cukup untuk pendidikan kejuruan tingkat perguruan tinggi, masalah ini akan diselesaikan dengan meningkatkan tingkat kinerja pendidikan sekolah.
- d. *Upper-secondary vocational education* akan diatur berdasarkan kemampuan awal dan minat dan siswa, kemudian disiapkan bentuk pelatihan dan tingkat ketrampilan yang harus dilalui.
- e. Sekolah menengah atas umum akan memberikan pendidikan umum tiga tahun. Setelah menyelesaikan tahun pertama mereka untuk materi pelajaran yang umum, siswa dapat memilih untuk melanjutkan kependidikan umum atau pendidikan kejuruan.
- f. Seluruh fakultas di universitas serta politeknik menggunakan *Matriculation Examination* sebagai persyaratan masuk mereka; harus disediakan kuota untuk lulusan dari pendidikan kejuruan.
- g. Pendidikan di lembaga pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi harus dikembangkan agar siswa maju melalui jalur kejuruan dan umum akan dapat memperoleh gelar sarjana mereka pada sekitar usia yang sama.

Lama waktu penyelesaian studi *Upper-secondary vocational programs* adalah 2 sampai 3 tahun. Sedangkan di tingkat pendidikan tinggi berkisar dari 3 sampai 5 tahun. Untuk mahasiswa yang telah lolos matrikulasi, jangka waktu pendidikan di *Upper-secondary vocational programs* adalah 12 bulan sampai 2 tahun dan 2 sampai 3,5 tahun di tingkat pendidikan tinggi.

6. Dampak Resesi Ekonomi terhadap Sistem Pendidikan

Pada awal 1990-an, ekonomi Finlandia mengalami penurunan secara drastis. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu, pecahnya negara Uni Soviet yang berdampak pada penurunan nilai ekspor dan liberalisasi pasar modal yang telah menyebabkan tingginya nilai inflasi.

Resesi dunia berdampak negatif bagi Finlandia. Setelah mengalami pertumbuhan nol pada tahun 1990, PDB Finlandia menyusut 12 persen dari tahun 1991 hingga 1993. Tingkat pengangguran melonjak. Pada tahun 1990, hanya 3 persen dari 2,5 juta pekerja tidak memiliki pekerjaan. Pada tahun 1994, 18 persen dari tenaga kerja terpaksa menganggur. Meskipun pemerintah telah meluncurkan langkah-langkah penghematan yang keras pada tahun 1991, utang nasional melonjak tujuh kali lipat dari tahun 1989, mencapai 67 persen dari PDB pada tahun 1995.

Setelah Finlandia pulih dari resesi, krisis ekonomi meninggalkan jejak dalam ekonomi dan masyarakat. Tingkat pengangguran yang melonjak dari 3 persen menjadi 18 persen di tahun pertama tahun 1990-an, tetap tinggi untuk hingga akhir dekade. Tingkat pengangguran masih sekitar 7 persen, dan terus menciptakan masalah bagi masyarakat. Selain itu, pertumbuhan utang publik yang tinggi menyebabkan kewajiban pemerintah harus membayar pengembalian pinjaman yang besar pula, yang pada gilirannya, menyebabkan penghematan anggaran terus berjalan termasuk anggaran pendidikan.

Salah satu kunci keberhasilan Finlandia mengatasi resesi ekonomi dengan cepat adalah kerjasama yang solid antara sektor swasta dan pemerintah selama tahun 1990-an. Konsekuensi dari resesi ekonomi adalah penyesuaian struktural termasuk pengangguran yang relatif tinggi dan keengganan perusahaan dan lembaga-lembaga publik untuk mempekerjakan staf baru. share Pendidikan PDB telah menurun sejak tahun 1991, terutama karena ekonomi telah diperluas. Pada tahun itu, pendidikan menyumbang 6,1 persen dari PDB. Pada tahun 2001, saham merosot ke 5,8 persen.

Sistem subsidi negara mengalami perombakan total pada awal 1990-an. Pemberian subsidi didasarkan pada jumlah siswa, bukan kebutuhan sekolah. Institusi pendidikan kejuruan sebelumnya telah melakukan antisipasi dengan meningkatkan jumlah siswa dan untuk menggunakan kelas secara efisien. Dengan demikian, sistem pendidikan kejuruan mampu mengakomodasi peningkatan jumlah siswa tanpa harus meningkatkan total belanja. Biaya pendidikan didasarkan pada rata-rata pengeluaran riil siswa sesuai jenjang pendidikan. Subsidi biaya mencakup semua tingkat pendidikan: prasekolah, sekolah dasar, sekolah umum menengah atas, dan kejuruan dan pendidikan politeknik. Setiap semester musim gugur dan musim semi, satu hari disisihkan untuk *headcount*, dan untuk mengkompilasi statistik jumlah siswa dan mahasiswa. Pemerintah pusat mengeluarkan anggaran sebesar 53% dari total subsidi, sedangkan pemerintah daerah/kota sebesar 43 persen. .

Pada tahun 2000-2005, para otoritas kebijakan pendidikan di Finlandia menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Dari tahun 2002 hingga 2005, 2 persen dari total belanja pendidikan anggaran pendidikan kejuruan dialihkan ke sekolah-sekolah yang telah menunjukkan peningkatan pada indikator seperti kerja lulusan mereka, penempatan lulusan di tingkat berikutnya pendidikan, angka putus sekolah, proporsi guru yang berkualitas, dan investasi dalam pelatihan staf. Sistem ini kemudian diadopsi secara permanen pada tahun 2006.

Sistem pendidikan Finlandia berbeda secara signifikan dari mainstream negara-negara OECD. Pemerintah pusat menyusun kurikulum inti pendidikan nasional, tetapi sekolah dan guru bebas menentukan cara terbaik untuk memberikan pembelajaran, sampai ke pilihan buku teks dan penciptaan metode pembelajaran. Guru juga menciptakan cara-cara mereka sendiri untuk mengukur kemajuan siswa, dan penilaian pembelajaran berorientasi merupakan bagian integral dari kehidupan sekolah sehari-hari. Otonomi Sekolah dan guru umumnya dilihat sebagai faktor yang positif mempengaruhi kinerja kualitas tinggi dari sekolah dan seluruh sistem

pendidikan. Sistem akuntabilitas fleksibel yang dianut juga mempromosikan penggunaan strategi alternatif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas (Berry & Sahlberg, 2006). Kecuali untuk *Matriculation Examination* tingkat Nasional, sebuah ujian paralel dengan 4-7 tes subjek harus diambil setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, siswa Finlandia tidak mengenal istilah tidak lulus.. Sebagian besar lulusan melanjutkan pendidikan umum atau kejuruan selama tiga tahun, dan bila prestasinya baik dapat melanjutkan studi di tingkat universitas.

Sekolah di Finlandia memberlakukan waktu belajar yang lebih pendek dan memberikan PR bagi siswa lebih sedikit dibanding negara-negara lain. Sebagian besar siswa memulai pendidikan dasar usia 7 tahun. Sejak tahun 2001, seluruh anak usia 6 tahun telah mendapatkan pendidikan *pre-school* secara gratis. Sehingga Finlandia telah menjadi trend internasional dalam mendukung keberhasilan pendidikan usia dini.

7. Sistem Pendidikan dan Ekonomi yang koheren dan kompetitif

Keberhasilan sistem pendidikan harus dilihat dalam konteks keberhasilan sistem lain dalam masyarakat, misalnya kesehatan, lingkungan, aturan hukum, tata kelola, ekonomi, dan teknologi. Sekolah adalah salah satu bagian dari negara kesejahteraan demokratis yang berfungsi dengan baik. Upaya untuk menjelaskan keberhasilan sistem pendidikan Finlandia harus diletakkan dalam konteks yang lebih luas dari fungsi keseluruhan lembaga tersebut dalam masyarakat sipil yang demokratis. Schleicher menulis bahwa, "Salah satu unsur keberhasilan Finlandia adalah kapasitas pembuat kebijakan untuk mengejar reformasi" (Schleicher 2006: 9). Para ekonom telah tertarik untuk mencari tahu mengapa Finlandia telah mampu menjadi ekonomi paling kompetitif di dunia sejak tahun 1990.

Perkembangan sistem ekonomi dan pendidikan Finlandia sejak 1980-an memberikan gambaran kesuksesan pengelolaan kebijakan publik mereka. Sejak terjadinya resesi ekonomi yang serius dari awal 1990-an, Finlandia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Negara ini telah mengalami penurunan ekonomi yang parah ditandai dengan krisis perbankan yang parah. Tingkat pengangguran meledak dari 4 persen menjadi 18 persen dan utang publik melonjak menjadi lebih dari 60 persen dari PDB, menempatkan Finlandia berada di jurang kehancuran (Routti & Yla-Anttila, 2006). Untuk memulihkan ekonomi Finlandia, pemerintah harus melakukan diversifikasi struktur ekspor dan mendorong inovasi bisnis.

Reformasi ekonomi mendorong munculnya *new knowledge-based industries* dan mengadopsi *knowledge-economy concepts* di seluruh masyarakat. Selama dekade 1995-2004, Finlandia menjadi negara ekonomi paling kompetitif di dunia sebanyak tiga kali dalam empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini berhasil meningkatkan *human capital* pada tingkat yang sangat tinggi, meluasnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan lembaga pendidikan dan penelitian yang telah didesain ulang untuk mendorong inovasi penelitian dan pengembangan yang mutakhir. Finlandia juga dikenal

menempati peringkat tinggi dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pelaksanaan kebijakan lingkungan secara global. Indikasi lain yang penting bahwa masyarakat Finlandia dan infrastruktur negara yang berfungsi dengan baik. Sehingga Finlandia juga menempati urutan pertama pada daftar Transparency International negara paling bersih dari korupsi.

Finlandia juga menjadi bukti nyata peningkatan dalam pendidikan secara terukur selama periode waktu yang sama. Pada awal 1990-an, sistem pendidikan sangat tidak menonjol secara internasional kecuali dua hal. Pertama, Finlandia menjadi negara dengan minat baca terbaik selama satu dekade (1980-1990) dalam studi literasi IEA. Kedua, menurut indikator pendidikan OECD, Finlandia memiliki deviasi terkecil dalam kinerja siswa antar sekolah. Dengan kata lain, sistem sekolah sangat homogen dalam hal hasil pendidikan. Namun, dalam penilaian siswa internasional lainnya, terutama dalam matematika dan ilmu pengetahuan alam, peringkat Finlandia berada dekat dengan rata-rata atau di bawah.

Terdapat fenomena yang menarik dalam kebijakan pembangunan pendidikan dan ekonomi Finlandia yang paralel selama periode pertumbuhan 1990. Pertama, pendidikan dan pembangunan ekonomi telah didasarkan pada visi jangka panjang prospek masa depan dan kebutuhan semua stakeholder masyarakat (Sahlberg, 2006; Routti & Yla-Anttila, 2006). Visi ini muncul dari konsensus yang luas antara pemerintah, sektor swasta, serikat buruh, dan pendidik. Keberlanjutan kebijakan tersebut didukung oleh lembaga-lembaga tertentu, seperti *Committee of the Future, the Parliamentary Education Committee*, dan beberapa pusat studi yang dibentuk bersama oleh pengusaha industri, administrasi sektor publik, dan serikat buruh.

Kedua, kebijakan pembangunan pendidikan dan ekonomi diarahkan oleh *contemporary integrated policies*. Kebijakan pendidikan telah diartikulasikan melalui rencana pembangunan lima tahun yang mencakup seluruh sektor pendidikan dan penelitian. Rencana ini telah membentuk sebuah jembatan mandat politik antara pemerintah lama dan yang baru terpilih, sehingga menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepemimpinan politik di bidang pendidikan yang berkelanjutan. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi juga telah terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki sektor industri dan pendidikan.

Ketiga, baik sektor pendidikan dan ekonomi telah mengadopsi model akuntabilitas yang fleksibel dan terdesentralisasi. Dalam pembangunan pendidikan, Finlandia tidak pernah mengikuti tren reformasi global dalam memperkenalkan struktur penilaian dan pengujian untuk sekolah dan guru. Akuntabilitas sekolah di Finlandia, tersebar di seluruh sistem dan didasarkan *development-oriented external* dan evaluasi diri. Mekanisme penilaian yang fleksibel- bahkan dikreasikan oleh sering dibuat oleh guru dan *no high-stakes standardized tests* digunakan kecuali Matriculation Examination yang diberlakukan bagi siswa pada akhir sekolah menengah atas. Pembangunan ekonomi juga telah didorong

untuk melakukan akuntabilitas internal dan kolektif, manajemen organisasi, dan kepemimpinan.

Keempat, kebijakan pembangunan pendidikan dan ekonomi sangat bergantung pada kepercayaan lembaga-lembaga publik yang menjadi *leading partners* dalam perencanaan dan pengaturan kebijakan. Lembaga-lembaga publik berintegritas tinggi, penghormatan terhadap budaya hukum yang mendalam, dan korupsi yang hampir tidak ada, semua itu telah mempromosikan konsensus penciptaan mekanisme pembangunan yang penting dalam membawa sektor publik dan swasta bersama-sama untuk mengembangkan kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan ekonomi. Prinsip-prinsip pengembangan kebijakan dan reformasi secara tradisional dibangun atas keahlian *local players*, yang memiliki pengalaman, pandangan atau visi, dan kemampuan memungkinkan mereka untuk menunjukkan membangun masa depan dengan cara yang terbaik.

Fleksibilitas menjadi *common denominator* lain antara pembangunan pendidikan dan ekonomi di Finlandia. Sistem pendidikan mengalami transformasi besar di awal 1990-an ketika sebagian besar peraturan negara dihapuskan dan jalur untuk kesempatan pendidikan diperluas secara dramatis. Misalnya, prasekolah menjadi tersedia untuk semua anak, mobilitas horisontal dalam pendidikan menengah atas ditingkatkan, 29 politeknik baru didirikan, dan volume pendidikan orang dewasa meningkat. Demikian pula, sektor swasta mengalami deregulasi dan standar yang lebih fleksibel yang diperkenalkan untuk mendorong jejaring antar perusahaan, universitas, dan lembaga penelitian publik.

Sejarah politik dan ekonomi Finlandia ditandai dengan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Prinsip tripartit ini secara tradisional juga telah dikaitkan pendidikan untuk kepentingan pengusaha dan konfederasi buruh, mulai dari membuat keputusan kebijakan untuk melaksanakan reformasi serta mendukung perubahan di sekolah-sekolah dan ruang kelas. Ketiga pihak ini telah bekerja sama erat untuk menjamin pendidikan yang baik dan bermakna bagi semua warga negara sejak 1960-an. *Confederation of Finnish Industries* terus berperan aktif dalam memberikan informasi, mengambil bagian dalam dialog kebijakan nasional, dan membimbing para anggotanya dalam menempatkan dan membuat keputusan dalam praktek pembangunan secara bersama-sama.

Prinsip-prinsip utama kebijakan pendidikan Finlandia belum berubah sejak reformasi pendidikan jangka panjang pertama dimulai pada akhir 1960-an. Meskipun Finlandia memiliki sistem multi partai dan pemerintah koalisi yang biasanya terdiri dari 3-6 partai politik, pendidikan jarang menjadi rebutan dalam program pemerintah baru. Perselisihan utama yang muncul selama bertahun-tahun semua terkait dengan jadwal dan pilihan, seperti waktu yang diberikan untuk mata pelajaran yang berbeda yang diajarkan di sekolah, atau sejauh mana siswa dan orang tua harus memiliki kebebasan untuk memilih program studi mereka dan peran wajib subyek tertentu dalam kurikulum, yaitu bahasa Swedia dan pendidikan agama. Tapi telah terjadi konsensus yang luas pada peningkatan teknologi, ilmu

lingkungan, dan pendidikan kewirausahaan di sekolah-yang semuanya tampaknya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Kunci untuk memahami pendidikan di Finlandia adalah peran pemerintah daerah dan sekolah dalam manajemen pendidikan dan pengembangan sektor. Sebagian besar sekolah yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah kota. Undang-undang reformasi baru dibuat pemerintah kota dalam mengatur pelayanan publik mereka secara otonom, termasuk pendidikan. Struktur manajemen pendidikan diatur secara ringan dan sederhana.

Departemen Pendidikan bertanggung jawab atas kebijakan, kerangka legislatif, dan pembiayaan pendidikan. Sedangkan Dewan Nasional Pendidikan mengurus kurikulum. Peran kepala sekolah juga telah berubah secara dramatis sejak tahun 1990. Kepala sekolah tidak hanya pemimpin pendidikan dari sekolah mereka tetapi manajer yang bertanggung jawab untuk pembiayaan, personil, dan hasil lembaga mereka. Sebelumnya, kepala sekolah adalah berpengalaman, guru senior yang dipromosikan untuk pelayanan yang baik untuk pendidikan. Kepala sekolah saat ini harus menjadi pemimpin yang berkualitas yang mengerti perkembangan pendidikan dan memiliki keterampilan manajemen yang solid untuk memimpin sebuah sekolah. Pemilihan kepala sekolah baru sering didasarkan pada prosedur yang lebih khas dari sektor swasta, dengan wawancara dan tes psikologi untuk mengkonfirmasi kesesuaian kandidat. Persyaratan atas untuk posisi kepala sekolah adalah pendidikan guru dan pengalaman.

Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa reformasi pendidikan di Finlandia terlalu sering dilakukan dan terlalu sedikit waktu yang diberikan untuk benar-benar menerapkan perubahan. Pada kenyataannya, hanya terjadi dua reformasi pendidikan fundamental sejak tahun 1968. Sejak penerapan sekolah komprehensif selama sembilan tahun yang yang diberlakukan untuk semua anak-anak di Finlandia, pembangunan pendidikan telah dibangun di atas sebuah visi yang disepakati. Visi jangka panjang pendidikan adalah untuk menyediakan kesempatan yang sama bagi semua warga negara menerima pendidikan, tanpa membedakan usia, domisili, situasi sosial ekonomi, jenis kelamin, atau bahasa ibu.

Pembangunan pendidikan berkelanjutan dan *vision-driven* telah memungkinkan pemerintah daerah/kota dan sekolah untuk fokus pada pentingnya proses pembelajaran. Disamping itu sekolah menggunakan pembelajaran kreatif dan bekerjasama dengan organisasi nirlaba yang peduli dalam mengembangkan organisasi sekolah. Ciri khas sekolah-sekolah di Finlandia sejak tahun 1990 adalah kemauan politis untuk mengubah budaya sekolah sebagai syarat untuk setiap perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam proses belajar mengajar.

C. SIMPULAN

Keberhasilan sistem pendidikan Finlandia ditentukan oleh beberapa faktor kunci seperti:

- a. Otonomi pendidikan yang luas bagi pemerintah daerah/kota dan sekolah
- b. Guru yang profesional, kompeten, berdedikasi tinggi dan sangat terdidik

- c. Koherensi antara kebijakan pembangunan pendidikan dan ekonomi
- d. Kultur masyarakat yang sangat sadar pentingnya pendidikan bagi perkembangan diri pribadi dan bangsa
- e. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sistem pendidikan dan kerjasama yang erat dan berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

REFERENSI

Association of Finnish Local and Regional Authorities, Education, Culture and Well-being, <http://www.localfinland.fi/en/authorities/education-culture-wellbeing/Pages/default.aspx>.

Association of Finnish Local and Regional Authorities, Education, Culture and Well-being, <http://www.localfinland.fi/en/authorities/education-culture-wellbeing/Pages/default.aspx>.

Berry, J., and P. Sahlberg. 2006. Accountability affects the use of small group learning in school mathematics. *Nordic Studies in Mathematics Education* 11 (1): 531.

CIEB (n.d.) Center on International Education Benchmarking, "Finland", Center on International Education Benchmarking, Washington, <http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/>.

CIEB (n.d.) Center on International Education Benchmarking, "Finland", Center on International Education Benchmarking, Washington, <http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/>.

European Agency for Development in Special Needs Education (2012), Special needs education within the education system – Finland, European Agency for Development in Special Needs Education, Odense, <http://www.european-agency.org/country-information/finland/national-overview/special-needs-education-within-the-education-system>.

European Agency for Development in Special Needs Education (2012), Special needs education within the education system – Finland, European Agency for Development in Special Needs Education, Odense, <http://www.european-agency.org/country-information/finland/national-overview/special-needs-education-within-the-education-system>.

European Agency for Development in Special Needs Education (n.d.), Country information for Finland, European Agency for Development in Special Needs

Education, Odense, <http://www.european-agency.org/country-information/finland>.

European Agency for Development in Special Needs Education (n.d.), Country information for Finland, European Agency for Development in Special Needs Education, Odense, <http://www.european-agency.org/country-information/finland>.

European Commission (2013), Eurypedia, European Encyclopedia on National Education Systems, "Finland – Overview", <https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Overview>.

European Commission (2013), Eurypedia, European Encyclopedia on National Education Systems, —Finland: Specific Ongoing Reforms and Policy Developments at National Level, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Specific_Ongoing_Reforms_and_Policy_Developments_at_National_Level.

European Commission (2013), Eurypedia, European Encyclopedia on National Education Systems, —Finland: Education in the 2020 Europe Strategy, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Education_in_the_Europe_2020_Strategy

European Commission (2013), Eurypedia, European Encyclopedia on National Education Systems, "Finland – Overview", <https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Overview>.

European Commission (2013), Eurypedia, European Encyclopedia on National Education Systems, —Finland: Specific Ongoing Reforms and Policy Developments at National Level, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Specific_Ongoing_Reforms_and_Policy_Developments_at_National_Level.

European Commission (2013), Eurypedia, European Encyclopedia on National Education Systems, —Finland: Education in the 2020 Europe Strategy, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Education_in_the_Europe_2020_Strategy

Finnish Education Evaluation Council, <http://www.edev.fi/portal/english>.

Finnish National Board of Education (2001), "Core Curriculum Guidelines, Core Curriculum for Pre-School Education 2000", Helsinki, [\[redacted\]](#)

http://www.oph.fi/english/sources_of_information/core_curricula_and_qualification_requirements/pre-school_education.

Finnish National Board of Education (2001), "Core Curriculum Guidelines, Core Curriculum for Pre-School Education 2000", Helsinki, http://www.oph.fi/english/sources_of_information/core_curricula_and_qualification_requirements/pre-school_education.

Finnish National Board of Education (n.d.), "OPS2016 – Renewal of the core curriculum for pre-primary and basic education", Helsinki,

http://www.oph.fi/english/102/0/ops2016_renewal_of_the_core_curriculum_for_pre-primary_and_basic_education.

Finnish National Board of Education (n.d.), "OPS2016 – Renewal of the core curriculum for pre-primary and basic education", Helsinki,

http://www.oph.fi/english/102/0/ops2016_renewal_of_the_core_curriculum_for_pre-primary_and_basic_education.

Finnish National Board of Education (n.d.), "Preparatory Instruction and Guidance for

Vocational Education and Training (*Ammattistartti*)", Helsinki,

http://www.oph.fi/download/132290_brochure_preparatory_instruction_and_guidance.pdf.

Finnish National Board of Education (n.d.), "Preparatory Instruction and Guidance for Vocational Education and Training (*Ammattistartti*)", Helsinki,

http://www.oph.fi/download/132290_brochure_preparatory_instruction_and_guidance.pdf.

Finnish National Board of Education, (2008), —Education in Finland, Helsinki,

http://www.oph.fi/download/124278_education_in_finland.pdf.

Finnish National Board of Education, (2009), —National Core Curriculum for Instruction Preparing Immigrants for Basic Education 2009I, Helsinki,

http://www.oph.fi/download/138886_national_core_curriculum_for_instruction_preparing_for_basic_education_2009.pdf.

Finnish National Board of Education, (2009), —National Core Curriculum for Instruction Preparing Immigrants for Basic Education 2009I, Helsinki,

http://www.oph.fi/download/138886_national_core_curriculum_for_instruction_preparing_for_basic_education_2009.pdf.

Finnish National Board of Education, <http://www.oph.fi/english/education>.

OECD and JRC, —Normalisation, in: *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*, 2008, <http://www.oecd.org/std/42495745.pdf>.

OECD, *The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital*, 2001, <http://www.oecd.org/site/worldforum/33703702.pdf>.

Routti, J., and P. Yla-Anttila. 2006. Finland as a Knowledge Economy. Elements of Success and Lessons Learned. Washington, DC: World Bank.

Sahlberg, P. 2004. Teaching and Globalization. *International Research Journal of Managing*

Global Transitions, 2(1), 65–83.

Sahlberg, P. 2006. Education Reform for Raising Economic Competitiveness. *Journal of*

Educational Change (no pages available).

Simola, H. 2005. The Finnish Miracle of PISA: Historical and Sociological Remarks on

Teaching and Teacher Education. *Comparative Education*, 41(4), 455–470. UNESCO, *Education for All 2000–2015: Achievements and Challenges*, EFA 2015 Global

Monitoring Report, 2015, <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf>.

UNU-IHDP and UNEP, —Part II: Human Capital, in: *Inclusive Wealth Report 2014*.

Measuring Progress Toward Sustainability, 2014, <http://mgiep.unesco.org/wp-content/uploads/2014/12/IWR2014-WEB.pdf>.

World Economic Forum, *Disrupting Unemployment: Business-led Solutions for Action*, 2015, <http://reports.weforum.org/disrupting-unemployment>.

-----, *The Human Capital Report 2015: Employment, Skills and Human Capital Global*

Challenge Insight Report

-----, *Global Gender Gap Report 2014*, 2014, <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014>.

———. *The Human Capital Report, First Edition*, 2013
<http://reports.weforum.org/human-capital-index-2013>.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN DI THAILAND

Dicky Fitriansyah
fitriandicky23@gmail.com

Thailand, Negara yang memiliki penduduk hampir 70 juta jiwa ini, memiliki sistem pendidikan yang mirip seperti yang diterapkan di Indonesia, mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Thailand menerapkan lama belajar 5 (lima) tahun dimana tamatannya setara dengan lulusan diploma 2 tahun di Indonesia, sementara pendidikan vokasi di Indonesia menerapkan lama belajar 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, di Thailand tidak dikenal perguruan tinggi Politeknik seperti di Indonesia. Politeknik di Thailand berperan sebagai Institusi '*long- life learning*' atau Institusi yang memberikan sertifikat bagi keahlian tertentu, seperti mengelas, menjahit dll. Thailand juga menerapkan wajib belajar 9 tahun, seperti di Indonesia, namun pendidikan gratis diberikan sampai tamat sekolah menengah atas.

Penjaminan mutu di jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan melalui ujian Nasional. Akan tetapi, hasil ujian Nasional di Thailand tidak memutuskan seorang siswa lulus atau tidak dari jenjang sekolah tersebut. Kelulusan siswa dari sekolah lebih ditentukan oleh ujian sekolah. Hasil ujian Nasional hanya menunjukkan capaian akademik siswa dari seluruh provinsi, yang dijadikan sebagai acuan kebijakan perbaikan kualitas pendidikan.

Sistem perekrutan guru dilakukan secara tersentralisasi dan terbuka sehingga calon mengetahui syarat-syarat akademik dan non-akademik yang diminta. Ujian saringan penerimaan guru dilakukan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand. Peningkatan kualitas guru dilakukan dengan berbagai program seperti program pendidikan guru 5 tahun dengan beasiswa guna menarik calon-calon guru yang cemerlang dan potensial. Kualifikasi guru minimum harus memiliki gelar sajana dengan lama pendidikan 4 tahun. Pengembangan guru dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari pelatihan dan studi lanjut master bahkan sampai doktor.

Salah satu reformasi pendidikan di Thailand yang menarik adalah pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sejak usia dini melalui program yang disebut *One Tablet Per Child* atau disingkat OTPC. Proyek ambisius ini bertujuan memperkuat siswa-siswa dengan pedagogi mutakhir dan pembelajaran tanpa kendala lokasi, jarak, dan latar belakang ekonomi siswa. Pemerintah Thailand sampai saat ini telah mengeluarkan dana sebesar 3 milyar bath atau setara dengan 96 juta USD untuk membeli sebanyak 900 ribu komputer tablet pada tahun 2012 untuk didistribusikan. Pemerintah Thailand mendistribusikan sebanyak 1.63 juta komputer tablet bagi siswa kelas 1 SD dan siswa kelas 1 SMP di seluruh Thailand.

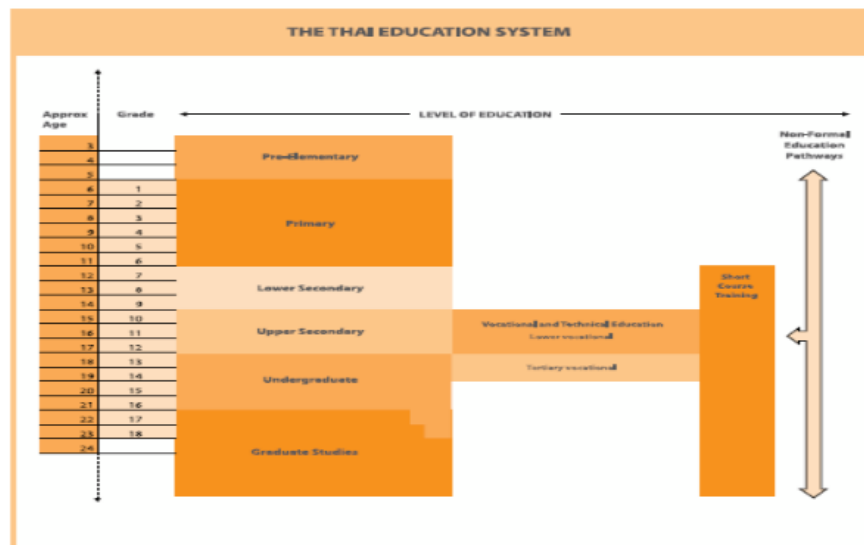
A. LATAR BELAKANG

Thailand merupakan Negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja Rama IX, Raja Bhumibol Adulyadej, sebagai kepala Negara dan Perdana Menteri, saat ini Yingluck Shinawatra, sebagai kepala pemerintahan. Thailand dibagi ke dalam 76 daerah pemerintahan (provinsi) yang dikenal dengan sebutan *changwats* dan 2 (dua) Daerah Khusus Bangkok dan Pattaya. Provinsi selanjutnya dibagi ke dalam sejumlah distrik (setara dengan kabupaten) dan sub-distrik (setara dengan kecamatan). Populasi penduduk Thailand sebagian besar terdiri dari suku Thai dan sejumlah suku minoritas seperti Cina, Akha, Lisu, Karen, Hmong, suku-suku pegunungan di daerah utara Thailand dan Melayu di Thailand selatan.

Sistem pendidikan Thailand saat ini didasarkan pada reformasi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999. Perubahan-perubahan yang signifikan dari reformasi pendidikan ini terletak pada implementasi kebijakan yang seragam, fleksibilitas dari implementasi kebijakan tersebut, desentralisasi, penjaminan mutu, pelatihan peningkatan kualitas guru di seluruh jenjang dan mobilisasi sumber daya. Perubahan-perubahan penting tersebut mencakup:

1. Perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah pertama dan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas.
2. Reformasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat
3. Pendirian Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penilaian Kualitas (*Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA*), yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas eksternal.

Sistem pendidikan Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar, dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Gambar 1.1 menunjukkan struktur pendidikan di Thailand yang secara umum terdiri dari 3 tahun *Anuban* atau taman kanak-kanak, 6 tahun *Prathom* (sekolah dasar), 6 tahun *Mattayom* (sekolah menengah pertama dan atas), pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Thailand menerapkan keharusan bagi anak-anak untuk mulai sekolah di *Prathom* 1 atau kelas 1 sekolah dasar mulai umur 6 tahun. Walaupun tidak ada kewajiban anak-anak untuk ikut



Gambar 3.1 Struktur Pendidikan di Thailand

B. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

Lebih dari 75% anak-anak usia 3-5 tahun mendapatkan pendidikan usia dini. Walaupun pada hakikatnya pendidikan usia dini disediakan oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah dasar Negeri, Kementerian Pendidikan secara aktif mendorong sekolah-sekolah swasta dan pemerintah daerah untuk dapat memainkan peranan yang signifikan untuk ikut terlibat dalam pendidikan usia dini. Oleh karena itu, akhir-akhir ini terlihat banyak sekali pendidikan usia dini yang ditawarkan oleh Institusi pendidikan swasta. Hal ini tampak jelas di Bangkok dan sekitarnya, ditandai dengan tumbuhnya sejumlah lembaga pendidikan dini yang dikelola oleh swasta.

Pendidikan dasar di Thailand dimaksudkan sebagai 12 tahun belajar yang dibagi menjadi 6 tahun sekolah dasar (*Prathom 1-6*), diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah pertama (*Mattayom 1-3*) dan 3 tahun sekolah menengah atas (*Mattayom 4-6*). Sejak tahun 2003, wajib belajar telah diperluas sampai 9 tahun (6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama), namun pendidikan sekolah digratiskan sampai 12 tahun sehingga siswa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan sampai *Mattayom 6*, atau setara dengan tamat SMU.

Secara umum sekolah *Prathom* terpisah dari sekolah *Mattayom*, namun di beberapa tempat di Thailand di jumpai sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan mulai dari *Prathom 1* sampai dengan *Mattayom 6*. Dalam hal sekolah menengah umumnya, pendidikan *Mattayom 1-6* berada di dalam satu sekolah, akan tetapi dapat dijumpai pendidikan *Mattayom* yang dilayani oleh dua sekolah yang terpisah, yaitu sekolah yang melayani *Mattayom 1-3* dan sekolah yang melayani *Mattayom 4-6*.

Kurikulum Nasional memuat 8 mata pelajaran inti yaitu: Bahasa Thai, Matematika, Sains, Ilmu Sosial, Agama dan Budaya, Kesehatan dan Olah raga,

Seni, Karir dan Teknologi, dan Bahasa Asing. Dengan diterapkannya wajib belajar, angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat sekolah dasar cukup tinggi mencapai 98.3% untuk populasi anak berumur 6-11 tahun (2010). Sementara APK untuk sekolah menengah pertama pada tahun 2010 menunjukkan lebih besar dari 90%, namun pada tingkat menengah atas hanya berkisar sebesar 60% (Unesco, 2011).

C. PENDIDIKAN VOKASI DAN TEKNIK

Pendidikan vokasi dan teknik secara formal dilaksanakan dengan tiga tingkatan: tingkat menengah atas (setara dengan SMK di Indonesia) dengan masa studi 3 tahun, tingkat diploma dengan masa studi 2 tahun dan tingkat sarjana dengan masa studi 2 tahun setelah menyelesaikan tingkat diploma. Pendidikan vokasi dan teknik dilaksanakan pada *technical college*, misalnya *Minburi Technical College* dll. Namun saat ini sebagian besar *technical college* di Thailand hanya menawarkan program 5 tahun yang terdiri dari 3 tahun tingkat menengah atas dan 2 tahun diploma, sehingga siswa umumnya menghabiskan masa 5 tahun hingga selesai dari *college* seperti ini.

Hanya segelintir *college* yang menawarkan program tingkat sarjana. Program studi yang ditawarkan di *technical college* dapat dikategorikan menjadi 8 konsentrasi yaitu: perdagangan dan industri, pertanian, ekonomi, bisnis dan pariwisata, seni dan kerajinan, tekstil dan pemasaran. Yang menarik dari pendidikan vokasi di Thailand adalah peluang bagi mereka yang telah bekerja untuk mendapatkan sertifikat keahlian sangat terbuka.

D. PENDIDIKAN TINGGI

Pendidikan tinggi di Thailand dijalankan di Universitas, Institut teknik, sekolah tinggi (*college*) profesi dan teknik dan Universitas pendidikan. Pendidikan tinggi di Thailand dapat dibagi menjadi dua institusi. Yang pertama, Institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, seperti Universitas Negeri dan swasta, Institusi profesi/teknik dan pertanian, dan sekolah tinggi (*college*) pendidikan guru. Yang kedua Institusi-Institusi khusus yang berada di bawah kementerian lain, seperti sekolah tinggi seni Thai klasik yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan, sekolah tinggi keperawatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, dll.

Perubahan-perubahan yang mendasar pada pendidikan tinggi terlihat dari meningkatnya jumlah Universitas swasta dalam beberapa tahun belakangan ini. Dalam hal Universitas Negeri, perubahan terlihat pada:

1. Universitas-Universitas Negeri telah menjadi lebih independen
2. Institusi yang dulunya dikategorikan sebagai Rajabhat (Universitas yang berkonsentrasi menghasilkan guru), sekarang telah berubah menjadi Universitas komprehensif sehingga menawarkan program-program lain selain pendidikan
3. Sebanyak 35 *Rajamangala Institutes of Technology* yang tersebar di seluruh Thailand sekarang dibentuk menjadi 9 Universitas regional, tanpa merubah nama Institusinya. Artinya, setiap regional *Rajamangala Institutes o*

f *Technolo-gy* memiliki beberapa kampus.

Perkembangan lain yang sangat mendasar pada pendidikan tinggi Thailand terlihat dengan lahirnya Universitas riset. Sejak tahun 2009 Komisi Pendidikan Tinggi Thailand telah menetapkan 9 Universitas Negeri sebagai Universitas riset, dalam rangka meningkatkan kualitas Universitas di Thailand terutama dalam bidang riset. Universitas-universitas ini melalui pendanaan riset dari pemerintah Thailand diharapkan dapat memainkan peranan dalam membuat Thailand sebagai pusat pendidikan, riset dan pengembangan ilmu. Universitas-universitas ini mendidik calon peneliti yang berfokus kepada penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan sosial di Thailand. Ke 9 Universitas yang dimaksud adalah *Chulalongkorn University*, *Kasetsart University*, *Chiang Mai University*, *Khon Kaen University*, *Thammasat University*, *Mahidol University*, *Prince of Songkla University*, *Suranaree University of Technology* dan *King Mongkut's University of Technology Thonburi*.

Saat ini lebih dari 2,2 juta mahasiswa belajar di Universitas Negeri dan swasta di Thailand. Angka partisipasi Universitas telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini dari rata-rata 26% menjadi 40%. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena meningkatnya kesempatan kuliah akibat penambahan Universitas swasta. Saat ini ada 78 Universitas Negeri dan 89 Universitas swasta di Thailand.

E. KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR THAILAND

Sejak tahun 2002 Kementerian Pendidikan Thailand telah menerapkan kurikulum pendidikan dasar 2001. *Monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum 2001 selama kurun 6 tahun telah menunjukkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan- kelemahan Kurikulum 2001. Sebagai contoh, Kurikulum 2001 memberikan kesempatan desentralisasi otoritas pendidikan, memberikan kesempatan komunitas lokal dan sekolah untuk berpartisipasi dan memainkan peranan penting untuk mempersiapkan kurikulum sehingga memenuhi keinginan mereka. Namun demikian, hasil evaluasi terhadap kurikulum 2001 ini menunjukkan sejumlah kelemahan yang berkaitan dengan kurikulum itu sendiri, meliputi penerapannya, proses pelaksanaannya, kesulitan guru dan praktisi dalam mempersiapkan kurikulum sekolahnya. Banyak sekolah sangat berambisi membuat konten pembelajaran dan keluaran yang diharapkan namun pada saat ujian dan penilaian tidak sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas anak didik dalam menyerap pengetahuan dasar dan ketrampilan yang diharapkan cukup mengecewakan.

Atas dasar temuan-temuan di atas, Kantor Komisi Pendidikan Dasar (*Office of Basic Education Commission*, OBEC) di bawah supervisi Komisi Pendidikan Dasar mengambil tindakan untuk merevisi Kurikulum Pendidikan Dasar 2001 guna mempersiapkan Kurikulum Inti Pendidikan Dasar 2008. Kurikulum Inti Pendidikan Dasar (KIPD) 2008 dirancang dengan memberikan penekanan kepada kesesuaian. Peningkatan- peningkatan dibuat dalam tujuan dan proses pelaksanaan kurikulum pada tingkat kantor dinas dan sekolah. Asas desentralisasi masih tetap

diutamakan di dalam KIPD 2008, dengan memberikan kesempatan kepada komunitas lokal dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sekolah. Kegiatan belajar-mengajar yang diterapkan untuk seluruh anak didik Thailand pada pendidikan dasar diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas anak didik dalam penguasaan pengetahuan dasar dan kecakapan hidup yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Oleh karena itu mereka harus dibekali dengan semangat untuk mencari pengetahuan guna mengembangkan diri secara berkesinambungan.

F. Visi Kurikulum Inti 2008

Kurikulum Inti pendidikan Dasar 2008 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas seluruh siswa yang merupakan kekuatan utama Negara sehingga mendapatkan pengembangan yang seimbang di seluruh aspek – kekuatan fisik, ilmu pengetahuan dan moralitas. Anak didik diharapkan sadar terhadap komitmen dan tanggung-jawabnya sebagai warga Negara Thailand juga sebagai anggota komunitas dunia. Terikat bentuk pemerintahan demokrasi di bawah konstitusi monarki, anak didik harus dibekali dengan pengetahuan dasar dan ketrampilan-ketrampilan penting dan karakter yang baik bagi studi lanjut, kecakapan hidup dan belajar sepanjang hidup. Oleh karena itu, pendekatan yang berpusat kepada anak didik perlu dilaksanakan, yang berlandaskan pada kenyataan bahwa setiap orang punya kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri untuk mencapai potensi tertinggi masing-masing.

G. Prinsip-prinsip Kurikulum Inti 2008

Prinsip-prinsip yang penting yang mendasari Kurikulum Inti Pendidikan Dasar 2008 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran utama pengembangan kurikulum ini adalah mencapai persatuan Nasional; standar pembelajaran dan tujuan pembelajaran dirancang dengan harapan agar siswa mendapatkan pengetahuan, ketrampilan, karakter dan moral sebagai landasan bagi kebangsaan dan nilai-nilai universal.
2. Kurikulum 2008 ini memberikan peluang pendidikan untuk semua, karena setiap warga Negara berhak memiliki akses yang sama untuk mengenyam pendidikan dengan kualitas tinggi.
3. Kurikulum 2008 ini memberikan peluang desentralisasi otoritas dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan situasi dan kebutuhan setempat.
4. Struktur kurikulum 2008 ini cukup fleksibelitas dalam hal isi, alokasi waktu dan manajemen pembelajaran.
5. Pendekatan yang berpusat kepada siswa (*student-centered*) sangat diharapkan.
6. Kurikulum 2008 ini ditujukan untuk seluruh jenis pendidikan – formal, non-formal dan informal, mencakupi seluruh kelompok target dan memungkinkan perpindahan hasil pembelajaran dan pengalaman.

Sasaran Kurikulum Inti 2008

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar ini bertujuan untuk mengembangkan siswa secara maksimal dalam hal moral, pemahaman, kenyamanan, dan potensi untuk studi lanjut dan menjalani kehidupan. Sasaran-sasaran berikut diharapkan dicapai oleh anak didik setelah menyelesaikan pendidikan dasar:

1. Moralitas, etika, nilai-nilai yang diinginkan, harga diri, disiplin diri, ketaatan terhadap ajaran Buddha atau menurut kepercayaan seseorang dan prinsip-prinsip Ekonomi Kecukupan;
2. Pengetahuan dan keterampilan untuk berkomunikasi, berpikir, memecahkan masalah, keterampilan teknologi *know-how*, dan kecakapan hidup;
3. Kesehatan fisik dan mental yang baik, kebersihan dan preferensi untuk latihan fisik
4. Patriotisme, kesadaran akan tanggung-jawab dan komitmen sebagai warga Negara Thailand dan anggota komunitas dunia, dan kepatuhan terhadap kehidupan demokratis dan bentuk pemerintahan di bawah monarki konstitusional, dan
5. Kesadaran akan perlunya melestarikan budaya Thailand dan kearifan lokal Thailand, perlindungan dan pelestarian lingkungan, dan pola pikir masyarakat dengan dedikasi untuk pelayanan publik untuk perdamaian dan co-eksistensi yang harmonis.

Kompetensi Kunci Siswa

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar bertujuan menanamkan kepada peserta didik lima kompetensi kunci berikut:

1. Kemampuan Komunikasi
2. Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menerima dan mengirimkan informasi, kemampuan dan ketrampilan berbahasa dalam mengungkapkan pikiran, pengetahuan dan pemahaman, perasaan dan pendapat untuk bertukar informasi dan pengalaman, yang akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat; kemampuan negosiasi untuk memecahkan atau mengurangi masalah dan konflik; kemampuan untuk membedakan dan memilih apakah akan menerima atau menghindari informasi melalui penalaran yang tepat dan penilaian yang tepat; dan kemampuan untuk memilih metode komunikasi yang efisien, mengingat kemungkinan efek negatif terhadap diri sendiri dan masyarakat.
3. Kemampuan berfikir Siswa diharapkan memiliki kemampuan berfikir analitis, sintesis, konstruktif, berpikir kritis dan sistematis yang mengarah kepada penelaahan pengetahuan atau informasi guna pengambilan keputusan yang bijaksana bagi dirinya sendiri dan masyarakat.
4. Kemampuan Pemecahan masalah Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mereduksi masalah dan hambatan, berdasarkan alasan yang tepat, prinsip-prinsip moral dan informasi yang akurat; kemampuan

untuk mengapresiasi hubungan dan perubahan-perubahan dalam berbagai situasi sosial; kemampuan mencari dan menerapkan pengetahuan untuk mencegah dan memecahkan permasalahan; dan kemampuan untuk pengambilan keputusan yang bijaksana, dengan mengantisipasi kemungkinan efek negatif terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan.

5. Kemampuan menerapkan kecakapan hidup siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan berbagai proses dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar mandiri; belajar terus menerus, bekerja, dan harmonisasi sosial melalui penguatan hubungan interpersonal yang menyenangkan; kemampuan mereduksi masalah dan konflik melalui cara-cara yang tepat; kemampuan untuk penyesuaian diri untuk mengikuti perubahan sosial dan lingkungan; dan kemampuan untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan yang dapat memberikan efek buruk kepada dirinya sendiri dan juga orang lain.
6. Kemampuan menerapkan teknologi Siswa diharapkan memiliki kemampuan memilih dan menerapkan teknologi yang berbeda; memiliki keterampilan dalam penerapan proses teknologi untuk pengembangan diri sendiri dan masyarakat dalam hal pembelajaran, komunikasi, pekerjaan dan pemecahan masalah melalui cara-cara yang konstruktif, tepat, bersesuaian dan beretika.

Karakter anak didik yang diharapkan

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar berfokus pada pengembangan peserta didik untuk memiliki karakter yang diinginkan seperti berikut ini, sehingga memungkinkan peserta didik menikmati hidup yang selaras antara satu sama lain sebagai warga Negara Thailand dan warga dunia:

1. Cinta kepada bangsa, agama dan Raja
2. Kejujuran dan integritas
3. Kedisiplinan diri
4. Antusiame untuk belajar
5. Kepatuhan terhadap prinsip Filsafat Kemandirian Ekonomi
6. Dedikasi dan komitmen untuk bekerja
7. Menghargai nilai-nilai yang berlaku di Thailand

Standar Pembelajaran

Perhatian terhadap prinsip-prinsip perkembangan kecerdasan otak dan multi intelengensia diperlukan untuk mencapai pengembangan peserta didik yang seimbang . Oleh karena itu, Kurikulum Inti Pendidikan Dasar telah mencanangkan delapan bidang pembelajaran sebagai berikut:

1. Bahasa Thailand
2. Matematika
3. Sains

4. Ilmu Sosial, Agama dan Budaya
5. Pendidikan Jasmani dan kesehatan
6. Seni
7. Okupasi dan Teknologi
8. Bahasa Asing

Untuk setiap bidang pembelajaran, standar baku berperan sebagai target yang ingin dicapai dalam mengembangkan kualitas peserta didik. Selain itu, standar pembelajaran berperan sebagai mekanisme penting dalam memajukan sistem pendidikan secara keseluruhan, karena standar ini memberikan informasi kepada kita tentang isi pelajaran dan metoda pengajaran dan evaluasi. Standar juga berfungsi sebagai instrumen untuk penjaminan mutu dan diadopsi baik sebagai evaluasi penjaminan mutu internal dan maupun eksternal, yang telah dipraktekkan pada layanan pendidikan di tingkat daerah maupun tingkat Nasional. Pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu internal merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai kualitas seperti yang ditentukan dalam standar yang bersangkutan.

Indikator memberikan petunjuk apa saja yang harus diketahui dan yang harus mampu dipraktekkan oleh siswa, termasuk karakter yang diharapkan di setiap jenjang pendidikan. Indikator merefleksikan standar pembelajaran, oleh karena itu indikator dapat dimanfaatkan untuk menetapkan isi, menentukan satuan pembelajaran, dan mengatur kegiatan belajar-mengajar. Indikator juga berperan sebagai kriteria evaluasi agar dapat memverifikasi kualitas siswa.

Indikator Tingkat Kelas menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan peserta didik untuk setiap jenjang pendidikan wajib (Pendidikan Dasar Kelas 1- Pendidikan Menengah Kelas 3, yaitu, Kelas 1 – Kelas 9) *Key Stage* Indikator menentukan tujuan yang harus dicapai untuk pendidikan menengah atas (Pendidikan Menengah Kelas 4-6, yaitu atau Kelas 10-12).

Untuk pemahaman yang sama dan interpretasi yang benar, kurikulum mengatur berbagai kode untuk standar dan indikator, seperti yang terlihat pada Tabel:

Tabel 3.1
Tabel Kode untuk Standar dan Indikator

Sc 1.1 Gr ½	
Sc	Bidang mata pelajaran Sains
1.1	Bidang Pelajaran Pertama, Standar 1
Gr1/2	Indikator 2 untuk Kelas 1
F 2.2 Gr 10-12/3	
F	Bidang mata pelajaran Bahasa Asing
2.2	Bidang Pelajaran kedua, Standar 2
Gr 10-12/3	Indikator 3 untuk pendidikan menengah atas (kelas 4-6 SMA atau kelas 10-12)

Alokasi Waktu Belajar

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar menetapkan kerangka kerja untuk struktur waktu belajar minimal untuk delapan bidang pelajaran dan kegiatan belajar. Lembaga pendidikan dapat meningkatkan alokasi waktu, tergantung pada kesiapan dan prioritas mereka, dengan menyesuaikan menurut konteks dan situasi peserta didik sebagai berikut:

1. Jenjang Sekolah Dasar (Kelas 1-6)
Waktu belajar dialokasikan secara tahunan, dengan kondisi tidak lebih dari lima jam setiap hari.
2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Kelas 1-3 SMP atau Kelas 7-9)
Waktu belajar dialokasikan atas dasar semester; dengan kondisi tidak melebihi enam jam setiap hari, bobot mata pelajaran tentu saja dihitung dalam kredit, kriterianya adalah bahwa 40 jam per semester adalah setara dengan satu kredit (K).
3. Jenjang Sekolah Menengah Atas (Kelas 1-3 SMA atau Kelas 10-12)
Waktu belajar dialokasikan atas dasar semester; dengan kondisi tidak kurang dari enam jam setiap hari, bobot mata pelajaran tentu saja dihitung dalam kredit, kriterianya adalah bahwa 40 jam per semester adalah setara dengan satu kredit (K).

Penetapan Struktur Waktu Belajar dan Waktu Tambahan

Tabel 2.2 menunjukkan alokasi waktu pelajaran untuk Kurikulum Inti Pendidikan Dasar 2008, dan waktu tambahan yang dilakukan oleh sekolah tergantung prioritas dan kesiapan masing-masing sekolah serta total waktu belajar bagi setiap jenjang pendidikan. Berkenaan dengan tambahan waktu yang dapat dilakukan oleh sekolah, untuk sekolah dasar waktu tambahan yang diperlukan dapat disesuaikan namun total waktu belajar harus sesuai seperti yang tertera pada Tabel 2.2 dan siswa harus mendapatkan kualitas yang ditetapkan sesuai standar dan indikator pembelajaran. Untuk sekolah dasar kelas 1-3, waktu belajar tambahan dapat dimasukkan dalam bidang pelajaran bahasa Thailand dan matematika.

Struktur waktu belajar bagi sekolah menengah harus seperti yang ditentukan dan harus memenuhi semua kriteria dan persyaratan kelulusan.

Ujian Nasional Untuk *Prathom -Mattayom*

Thailand menerapkan 2 (dua) Ujian Nasional bagi pendidikan jenjang *Prathom* (SD) sampai dengan *Mattayom* (SMP dan SMA), tergantung pada jenis pendidikannya. Untuk pendidikan formal, maka setiap siswa *Prathom 6*, *Mattayom 3* dan *Mattayom 6* diwajibkan mengikuti *Ordinary National Exam Test* (ONET), sedangkan siswa yang mengikuti pendidikan non-formal yang setara dengan *Mattayom 3* dan *Mattayom 6* diwajibkan mengikuti *Non-formal National Education Test* (N-NET). Selain dua Ujian Nasional di atas, dikenal juga Ujian Nasional *General Aptitude Test* (GAT) dan *Professional and Academic Aptitude Test* (PAT) yang dikhususkan bagi siswa *Mattayom 6*.

ONET bertujuan mengevaluasi kemampuan akademik siswa *Mattayom 3* dan *Mattayom 6* sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Dasar tahun 2001 dan mengevaluasi kemampuan akademik siswa *Prathom 6* sesuai dengan Kurikulum Umum Pendidikan Dasar tahun 2008. Ujian Nasional ONET menguji siswa untuk 8 (delapan) mata pelajaran utama berikut:

1. Bahasa Thai
2. Matematika
3. Sains
4. Ilmu Sosial, Agama dan Budaya
5. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
6. Seni
7. Karir dan Teknologi
8. Bahasa Asing

Berkenaan dengan N-NET, ujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan akademik siswa pendidikan non-formal yang setara dengan *Mattayom 3* (setara dengan Paket B di Indonesia) dan *Mattayom 6* (setara dengan Paket C di Indonesia) sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Non-Formal tahun 2008. Selain mengevaluasi kemampuan akademik, ujian ini juga menilai kemampuan dan ketrampilan siswa guna studi lanjut setelah menyelesaikan pendidikan di setiap tingkatan. Ujian N-NET mengukur kemampuan akademik siswa dengan format pilihan berganda untuk 5 (lima) mata pelajaran utama berikut ini,

1. Keterampilan Belajar
2. Dasar-dasar Pengetahuan Umum
3. Dasar-dasar Pengetahuan Kerja
4. Kecakapan Hidup
5. Perkembangan Sosial

Sejak tahun 2009, di Thailand dilaksanakan ujian Nasional yang dikenal dengan istilah GAT/PAT untuk siswa *Mattayom 6*. Hasil dari ujian GAT/PAT dapat digunakan oleh peserta sebagai salah satu syarat penerimaan Universitas di Thailand, lembaga pendidikan tinggi lainnya, serta untuk melamar kerja jika yang bersangkutan memutuskan tidak meneruskan pendidikan lanjut. Ujian ini dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada bulan Maret dan Oktober.

Ujian Nasional baik ONET maupun NNET dan GAT/PAT dilaksanakan oleh the National *Institute of Educational Testing Services* (NIETS) setahun sekali. NIETS merupakan sebuah organisasi publik independen yang tidak berkaitan secara langsung dengan Kementerian Pendidikan Thailand. Badan ini bertanggung-jawab dalam pembuatan soal, pelaksanaan dan evaluasi ujian Nasional di Thailand. Tabel 3.1 menunjukkan mata pelajaran yang diuji pada ujian Nasional di berbagai tingkatan serta waktu dan bulan pelaksanaannya.

Hasil Ujian Nasional tidak menyatakan seorang siswa lulus atau tidak lulus. Ujian Nasional hanya memberikan hasil yang dicapai oleh seorang siswa.

Kelulusan siswa dinyatakan melalui ujian sekolah (internal), jadi artinya selain ujian Nasional, siswa juga harus mengikuti ujian sekolah yang akan menyatakan siswa tersebut lulus atau tidak lulus dari sekolah tersebut. Bagi siswa yang tidak lulus ujian sekolah, siswa tersebut tidak dapat diterima di sekolah lanjut. Oleh karena itu ada beberapa pilihan bagi siswa yang tidak lulus, antara lain belajar mandiri lalu mengulang lagi ujian sekolah, mengulang satu atau dua semester di kelas yang sama lalu ikut kembali ujian sekolah, sampai yang bersangkutan dinyatakan lulus.

Penerimaan siswa untuk masuk ke jenjang berikutnya, misalnya lulusan *Prathom* (SD) ingin masuk ke *Mattayom*, tidak semata-mata ditentukan dari hasil Ujian Nasional melainkan juga ditentukan oleh hasil ujian sekolah. Antara satu sekolah dengan sekolah lainnya menerapkan kebijakan yang berbeda dalam penerimaan siswa dari jenjang sebelumnya. Setiap sekolah memberikan alokasi penerimaan dengan persentase tertentu bagi calon siswa yang tinggal di daerah sekitar sekolah. Untuk kasus seperti ini penerimaan dilakukan melalui undian tanpa melihat tinggi rendahnya nilai Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah. Sejumlah persentase tertentu diberikan kepada calon siswa yang berasal dari luar daerah di mana sekolah berada. Dalam hal ini, sekolah akan memberikan persyaratan penerimaan berdasarkan nilai Ujian Sekolah dan Ujian Nasional. Masing-masing hasil ujian Nasional dan sekolah diberi bobot guna menentukan nilai yang diterima di sekolah tersebut. Secara umum, bobot yang diberikan lebih tinggi kepada hasil ujian sekolah daripada kepada hasil ujian Nasional.

b. Ujian Masuk Universitas

Bagi siswa *Mattayom 6* (kelas 3 SMA), mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian masuk Universitas sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama semasa masih berada di semester ke 2 di *Mattayom 6*, yaitu pada bulan November dan satu lagi setelah selesai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada bulan Maret. Perlu dicatat hingga saat ini, tahun akademik di Thailand dimulai dari Mei sampai Oktober untuk semester 1 dan November sampai Maret untuk semester 2. Namun dalam dua tahun ke depan, tahun akademik ini akan berubah mengikuti tahun akademik yang berlaku di ASEAN. Ujian masuk Universitas ini dilaksanakan serentak di seluruh Negeri pada hari yang sama dengan soal yang sama. Mata pelajaran yang diuji sama seperti yang diuji pada ujian Nasional sehingga memakan waktu total sekitar 5 (lima) hari.

Ada 2 (dua) sistem yang diterapkan untuk penerimaan mahasiswa ke jenjang Universitas di Thailand. Yang pertama adalah sistem penerimaan melalui Ujian Masuk Nasional. Sistem ini memungkinkan seorang calon melamar sampai 3 (tiga) jurusan di satu atau lebih Universitas, sehingga total yang dipilih adalah tiga jurusan. Calon mengikuti ujian masuk Universitas secara Nasional seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, dengan rata-rata 7 mata pelajaran yang diuji. Nilai dari ujian masuk Nasional ini akan digunakan sebagai landasan untuk penerimaan di jurusan yang dilamar. Setiap jurusan biasanya menerapkan *passing grade* yang berbeda untuk diterima di jurusan masing-masing. Jika jumlah calon

yang memiliki nilai di atas *passing grade* melebihi kuota yang disediakan, maka calon akan dijarang berdasarkan rangking nilai hasil ujian atau kombinasi ujian saringan masuk Nasional dan ujian Nasional *Mattayom 6*. Akan tetapi, lulus dari Ujian Masuk Universitas secara Nasional tidak menjamin calon mahasiswa langsung diterima di Fakultas/Jurusan yang dilamar, melainkan memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk ikut saringan berikutnya, yaitu wawancara di fakultas/jurusan yang dilamar. Sama seperti pada Ujian Nasional di sekolah *Prathom* dan *Mattayom*, Ujian Saringan Masuk Universitas secara Nasional juga dilaksanakan oleh NIETS.

Metode kedua yaitu penerimaan mahasiswa melalui Sistem Penerimaan (*Admission System*). Sejumlah fakultas di sejumlah Universitas di Thailand mulai membuat sistem penerimaan tersendiri tidak melalui system ujian masuk Nasional sejak beberapa tahun yang lalu. Fakultas ini, misalnya *International College* seperti *Mahidol University International College*, hanya meminta hasil nilai Bahasa Inggris dari Ujian Masuk Nasional, lalu calon mahasiswa mengikuti ujian secara langsung di Fakultas tersebut. Kelulusan ditentukan langsung oleh fakultas yang bersangkutan.

4. Standar Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Pembentukan standar pendidikan bertujuan untuk menentukan kualitas tertentu dalam pelayanan pendidikan, seperti kualitas peserta didik yang diinginkan, kurikulum, dan proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas, Institusi pendidikan diharapkan untuk mengembangkan keunggulan dalam domain kegiatan rutin mereka dan tugas-tugas administratif, sehingga kualitas pendidikan akan berkembang. Peningkatan kualitas pendidikan akan bermanfaat secara langsung kepada penerima layanan, termasuk siswa dan orang tua, serta penerima tidak langsung, seperti pengusaha, individu, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan dan dari semua jenis, dua tugas utama yang harus dilakukan adalah pengembangan standar pendidikan dan pengembangan penjaminan mutu. Saat ini ada tiga jenis standar: standar pendidikan Nasional, dan standar penjaminan mutu internal serta penjaminan mutu eksternal.

a. Standar Pendidikan Nasional

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999, Kantor Dewan Pendidikan bertanggung jawab untuk mengusulkan standar pendidikan Nasional. Dengan demikian, susunan standar yang dirumuskan oleh Kantor tersebut melalui kerjasama dengan kantor-kantor yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar, kejuruan, dan pendidikan tinggi serta Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penjaminan Mutu (*Office for National Education Standards and Quality Assessment*, ONESQA). Dengan persetujuan dari Dewan Menteri pada tanggal 26 Desember 2004, lembaga memberikan pendidikan di semua tingkatan diharapkan mematuhi standar pendidikan Nasional, yang terdiri dari tiga kategori:

1. Memenuhi karakteristik rakyat Thailand, baik sebagai warga Negara maupun sebagai anggota masyarakat dunia, terdiri lima indikator: 1) kesehatan fisik dan mental yang baik, 2) pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalani hidup yang bermakna dan pembangunan sosial, 3) keterampilan dalam belajar dan penyesuaian diri ;4) keterampilan sosial, dan 5) kejujuran, pola pikir, dan kesadaran sebagai warga Negara Thailand dan warga Negara dunia.
2. Pedoman bagi penyediaan pendidikan terdiri dari tiga indikator: 1) pengembangan kurikulum dan diversifikasi suasana yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka miliki; 2) Pengembangan tenaga administrasi, guru, dosen, pegawai dan tenaga kependidikan secara sistematis dan efektif, dan 3) menjalankan pengelolaan berbasis sekolah.
3. Pedoman untuk menciptakan masyarakat belajar/masyarakat berpengetahuan terdiri dari tiga indikator: 1) penyediaan layanan akademik dan terjalannya kerjasama antara Institusi pendidikan dengan masyarakat sehingga dapat mengubah Institusi pendidikan menjadi masyarakat belajar/masyarakat berpengetahuan; 2) penelitian dan studi , promosi dan dukungan bagi sumber-sumber dan mekanisme belajar mengajar; dan 3) pengembangan dan pengelolaan ilmu pengetahuan bagi kepentingan semua strata dan komponen masyarakat.

Standar pendidikan Nasional juga berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan mekanisme standar penilaian penjaminan mutu internal dan eksternal. Pada saat ini, semua lembaga terkait telah mengembangkan standar pendidikan yang relevan.

b. Penjaminan Mutu Internal

Sejak tahun 2003, Kementerian Pendidikan Thailand telah menetapkan peraturan menteri yang berkaitan dengan sistem, kriteria, dan metode untuk penjaminan mutu internal bagi Institusi pendidikan dasar dan tinggi. Sebagai dasar bagi penjaminan mutu eksternal, semua Institusi pendidikan diwajibkan mengikuti pedoman standar penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh lembaga mengawasi mereka. Institusi pendidikan juga diharuskan untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari pengendalian, audit, dan penilaian.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya ini, sejumlah kegiatan telah telah dilaksanakan seperti, mengembangkan personil, menerapkan proyek percontohan, menyediakan dukungan keuangan, pelaksanaan, pemantauan, dan pendampinga; dan penyebaran dokumen, media dan peralatan.

c. Penjaminan Mutu Eksternal

Undang-Undang Pendidikan Nasional Thailand yang berlaku efektif mulai tanggal 20 Agustus 1999 mengamanatkan pembentukan Kantor Standar

Pendidikan Nasional dan Penjaminan Mutu (*Office for National Education Standards and Quality Assessment*, ONESQA) yang berperan sebagai Institusi independen yang bertanggungjawab mengevaluasi kualitas pendidikan mulai dari tingkat Nasional sampai kepada tingkat desa. Pengumuman pembukaan kantor ini diterbitkan dalam Lembaran Negara, Vol.117.

Penjaminan mutu terhadap semua Institusi pendidikan dilakukan paling tidak sekali dalam lima tahun. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Institusi – Institusi terkait dan diumumkan secara luas kepada masyarakat umum. Penilaian penjaminan mutu eksternal dilaksanakan menggunakan pendekatan “Model Penilaian Kesepakatan” (“Assessment Model Amicable”) yang dilakukan oleh penilai eksternal terlatih yang direkrut organisasi swasta, profesional atau akademis dengan kualifikasi yang memenuhi syarat sebagai penilai penjamin mutu eksternal. ONESQA mengawasi penilaian penjaminan mutu eksternal naik untuk pendidikan baik dasar maupun pendidikan tinggi yang mencakup standar-standar yang berkaitan dengan prestasi pendidikan (keluaran); input / proses; dan efisiensi dalam administrasi dan kepemimpinan. Standar-standar yang berbeda diterapkan dalam penilaian penjaminan mutu eksternal antara yang diberlakukan pada pendidikan dasar dan pendidikan tinggi.

Pada periode evaluasi putaran pertama, kurun 2001-2005, ONESQA telah melakukan evaluasi penjaminan mutu eksternal terhadap 35,159 sekolah dasar dan menengah. Perlu dicatat disini bahwa penjaminan mutu eksternal pada masa itu adalah sesuatu hal yang baru bagi sekolah-sekolah. Akibatnya 65% dari sekolah yang dievaluasi masuk ke dalam katagori yang tidak dapat memenuhi nilai standar ambang terendah. Putaran kedua dilaksanakan dalam kurun 2006-2010. Pada periode kedua, evaluasi lebih menekankan pada verifikasi standard dan kualitas seluruh sekolah di seluruh Negeri guna meyakini apakah ada perubahan-perubahan yang dilakukan setelah hasil evaluasi putaran pertama. Sampai pertengahan 2010, total sudah sebanyak 39,712 sekolah dasar dan menengah yang dievaluasi oleh ONESQA.

Kerja keras ONESQA untuk mengevaluasi penjaminan mutu eksternal semua sekolah dasar dan menengah mendapat pujian dan pengakuan dari berbagai pihak pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena ONESQA telah mampu melakukan evaluasi terhadap semua sekolah sesuai seperti yang ditargetkan dan sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Selain itu, ONESQA juga dinilai sangat tarnsparan di dalam penilaian dan penyebaran hasil evaluasi kepada publik. Oleh karena itu Pemerintah Thailand telah memanfaatkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh ONESQA sebagai bahan dasar bagi perumusan kebijakan pendidikan Nasional. Konsep kebijakan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Kesepuluh juga menggunakan informasi dan data dari ONESQA. Semua ini menunjukkan keberhasilan ONESQA dalam mengembangkan misinya sebagai Institusi independen untuk mengevaluasi penjaminan mutu eksternal sekolah-sekolah di Thailand.

d. Pengembangan dan Pembinaan Guru

Guru dan tenaga administrasi pendidikan memainkan peranan yang penting dalam reformasi proses pendidikan dan mereka merupakan agen perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan guru dan staf pendukung pendidikan menjadi masalah krusial dalam reformasi pendidikan di Thailand. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan status dan standar profesi guru.

e. Pengembangan Pendidikan Guru

Sama seperti di Negara-Negara lain, Fakultas Pendidikan di Thailand biasanya menawarkan program sarjana 4 tahun. Sejak tahun 2005, sejumlah Fakultas Pendidikan ditugaskan menjalankan program sarjana 5 tahun. Program ini merekrut calon-calon mahasiswa yang pintar dan berbudi baik untuk dipersiapkan menjadi profesi guru. Pada waktu itu, mahasiswa tahun pertama pada program ini diberikan beasiswa sebesar 2,039 USD per orang. Setelah selesai program, yang terdiri dari 3,5 tahun kuliah dan 1,5 tahun praktek mengajar, lulusan diharapkan menerima gaji lebih tinggi dari sarjana biasa. Dosen-dosen pada program ini bekerja sama sangat baik dengan sekolah-sekolah yang akan dilibatkan untuk praktek mahasiswa. Dosen-dosen langsung berperan sebagai mentor selama mahasiswa melakukan praktek mengajar di sekolah-sekolah.

Office of Basic Education Commission (setara dengan Direktorat Pendidikan Dasar) Kementerian Pendidikan Thailand telah mengevaluasi program sarjana 5 tahun untuk mempersiapkan guru dan menyimpulkan bahwa program seperti ini mampu menarik siswa pintar untuk belajar di bidang pendidikan sehingga dapat menghasilkan guru-guru yang berkualitas di masa mendatang. Karena saringan yang cukup ketat, dipastikan bahwa penerima beasiswa merupakan mahasiswa yang sangat potensial untuk menjadi guru yang berkualitas. Oleh karena itu, sejumlah dekan Fakultas Pendidikan mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Guru agar program ini diteruskan.

f. Kualifikasi dan Perekrutan Guru

Gambar 5.1 menunjukkan struktur organisasi Kementerian Pendidikan Thailand. Kantor Komisi Guru Negeri dan Pegawai Sekolah bertanggung-jawab mengevaluasi kebutuhan guru dan merekrut guru secara Nasional setiap tahun. Kantor ini yang akan memberikan ujian seleksi penerimaan guru secara Nasional. Dalam pelaksanaan ujian seleksi penerimaan guru berlaku aturan-aturan berikut yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat:

1. Seluruh proses ujian masuk harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus transparan dan dapat diverifikasi.
2. Ujian harus dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Kantor Komisi Guru Negeri dan Pegawai Sekolah
3. Komite Ujian dapat memutuskan Institusi pendidikan mana yang bertanggung-jawab untuk menyusun soal, mendistribusikan, mengumpulkan dan mengevaluasi jawaban.

4. Pengumuman ujian penerimaan guru harus dilaksanakan ke masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ujian dilaksanakan. Pengumuman harus secara jelas mencantumkan hal-hal berikut:
 1. Posisi dan gaji yang ditawarkan
 2. Jumlah yang akan diterima
 3. Deskripsi Pekerjaan
 4. Kualifikasi umum dan khusus
 5. Prosedur aplikasi, biaya dan jadwal ujian
 6. Dokumen dan identitas yang diperlukan
 7. Kriteria kelulusan
 8. Persyaratan lainnya
6. Waktu penerimaan lamaran tidak boleh kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum ujian dimulai.
7. Jika pelaksanaan ujian harus dilakukan di beberapa wilayah pada hari yang sama, maka setiap pelamar hanya bisa ikut ujian di satu wilayah saja. Jika nama yang bersangkutan muncul di wilayah lain, maka yang bersangkutan akan didiskualifikasi.
8. Seorang pelamar dinyatakan lulus jika peserta mendapatkan nilai lebih dari 60% untuk setiap bagian yang diuji.

Ada sejumlah aturan lainnya yang pada hakikatnya mengarahkan agar pelaksanaan ujian penerimaan guru dilaksanakan secara jujur, terbuka dan transparan. Perlu dicatat bahwa sistem penerimaan guru masih dikendalikan dengan cara sentralisasi, walaupun pelaksanaan ujian dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand.

g. Pelatihan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah

Dengan perubahan paradigma pendidikan dari situasi yang berpusat kepada guru (*teacher-centered*) ke yang berpusat kepada siswa (*learner-centered*), maka seorang guru harus bisa berfungsi sebagai fasilitator sehingga siswa mandiri dalam berfikir, bertindak dan memecahkan masalah dengan tetap mengedepankan nilai-nilai etika dan moral. Berdasarkan reformasi pendidikan sekarang ini, guru-guru Thailand didorong dan didukung untuk mendapatkan pelatihan baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri. Pelatihan-pelatihan berikut merupakan aktifitas yang khusus disiapkan bagi guru dan pegawai sekolah.

1. Pengembangan Program Pendidikan Lima Tahun Pra-Tugas
Program ini menghendaki calon guru menyelesaikan sarjana lima tahun sebelum bertugas menjadi guru atau diterima menjadi guru, yang terdiri dari 4 (empat) tahun kuliah dan 1 (satu) tahun pelatihan mengajar di sekolah yang telah ditentukan. Lulusan dari luar jurusan pendidikan guru yang akan menjadi guru harus mengikuti program bersertifikat 1 tahun sebelum disertifikasi untuk menjadi guru.
2. Pelatihan bagi guru tetap Bahasa Inggris
Sejumlah instansi, termasuk Kantor Komisi Pendidikan Vokasi

melaksanakan aktifitas pelatihan untuk guru Bahasa Inggris di bawah pengawasan instansi tersebut. Sementara pada Kantor Komisi Pendidikan Dasar, guru-guru di bawah direktorat ini dilatih berdasarkan Rencana Strategis Reformasi Proses Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Percepatan Kemampuan Kompetitif Nasional yang telah disetujui oleh Dewan Menteri pada tahun 2006. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2007. Menurut Rencana Strategis ini, Lembaga Bahasa Inggris yang didirikan oleh Kantor Komisi Pendidikan Dasar bertanggung-jawab menetapkan kriteria pelatihan guru Bahasa Inggris melalui kerja sama dengan Institusi lain, terutama dengan *English Resource and Instructional Centres* (ERIC) di seluruh wilayah Thailand dan *British Council* serta *American University Alumni* (AUA), dengan bantuan pendanaan dari Pemerintah.

Aktifitas pelatihan berfokus pada 5 (lima) katagori standar Nasional kemampuan guru Bahasa Inggris yang mencakup kompetensi linguistik, kompetensi komunikasi, pengetahuan teori pengajaran bahasa asing, kemampuan mengorganisasikan pembelajaran konsisten dengan silabus, dan pengembangan profesi berkelanjutan. Lembaga Bahasa Inggris bertujuan melatih seluruh guru Bahasa Inggris di Thailand sampai mereka mencapai

katagori *Advanced Level*. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini bekerja sama dengan dinas pendidikan di seluruh wilayah Thailand. Rata-rata setiap tahun lembaga ini memberikan pelatihan kepada sekitar 30-40 ribu guru bahasa Inggris.

3. Pelatihan Guru Tetap Matematika dan Sains

Institut Promosi Pengajaran Sains dan Teknologi, sebuah lembaga independen di bawah supervisi Kementerian Pendidikan, merupakan salah satu organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengembangan guru, supervisor dan tenaga administrasi dalam bidang sains, matematika dan teknologi informasi.

4. Penyelesaian Sarjana Pendidikan Bagi Guru Tetap.

Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999, sertifikasi profesi mengajar diwajibkan bagi seorang guru tetap dan direktur sekolah dimana untuk mendapatkan sertifikat tersebut calon harus memiliki kualifikasi minimum sarjana dalam bidang pendidikan. Universitas Rajabhat (sejenis Universitas pendidikan di Indonesia) telah melaksanakan program khusus ini bagi guru-guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana sejak tahun 2003. Berdasarkan laporan dari kementerian Pendidikan sejak tahun 2008 seluruh guru di Thailand telah memenuhi kualifikasi minimum sarjana.

5. Program Sertifikat dan Pasca-Sarjana Pendidikan

Guru-guru yang kualifikasi sarjananya bukan dari bidang pendidikan didorong untuk mengikuti program bersertifikat atau pasca sarjana pendidikan.

6. Program bersertifikat bagi Tenaga Administrasi

Tenaga Administrasi Kependidikan harus memiliki sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat ini, seseorang harus memiliki kualifikasi sarjana atau *Post-Graduate Certificate* dalam bidang Administrasi Pendidikan jika sarjananya bukan berasal dari bidang pendidikan. Universitas Pendidikan Rajabhat memiliki program sertifikasi bagi tenaga-tenaga administrasi sekolah. Program ini dilaksanakan di sekolah terkait atau di kota dimana sekolah tersebut berada. Sehingga tenaga-tenaga administrasi dari berbagai sekolah di satu daerah dapat mengikuti program sertifikat ini tanpa harus meninggalkan tempat kerja.

7. Program *Master* bagi tenaga administrasi

Tenaga administrasi pendidikan yang memiliki gelar sarjana didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana dalam bidangnya.

h. Remunerasi dan Promosi

Dalam upaya menarik calon-calon yang berkualifikasi untuk menjadi guru dan mengusahakan agar mereka tetap bertahan, Kementerian Pendidikan telah menetapkan skala penggajian baru. Skala penggajian baru mengatur gaji guru berdasarkan katagori guru dan tingkat promosi mulai dari 1-24. Berdasarkan kualifikasinya guru diklasifikasikan menjadi Asisten Guru, Guru, Guru Ahli, Guru dengan keahlian khusus, Guru Spesialis, dan Spesialis Senior, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.1. Seorang guru baru dengan kualifikasi sarjana dari program pendidikan akan diterima menjadi guru dengan kualifikasi Asisten Guru. Setelah mengikuti pelatihan-pelatihan bersertifikat dan mendapat promosi beberapa tingkat, guru tersebut dapat mengusulkan menjadi katagori Guru dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Jika memenuhi persyaratan dan dinaikkan klasifikasinya maka yang bersangkutan akan mendapatkan kenaikan gaji. Misalnya Asisten Guru yang berada pada tingkat promosi 7 dengan gaji sebesar 16,190 bath mengusulkan untuk menjadi katagori Guru dan diterima, maka yang bersangkutan akan berada pada posisi Guru dengan tingkat promosi 7 dengan gaji 18,690 bath. Demikian seterusnya untuk katagori-katagori yang lain.

Selain gaji, guru juga menerima tunjangan yang besarnya tergantung dari klasifikasi guru. Besaran tunjangan berkisar antara 3,500 sampai dengan 13,000 bath per bulan untuk katagori guru ahli sampai spesialis senior. Sedangkan Asisten Guru dan Guru tidak menerima tunjangan tambahan selain gaji. Promosi gaji didasarkan pada evaluasi kinerja guru, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dimana sekolah itu berada. Evaluasi kinerja guru dilaksanakan 2 kali setahun yaitu selama periode 1 Oktober s/d 31 Maret dan periode 1 April s/d 30 September. Kriteria Promosi Gaji mencakup dua aspek, yaitu sapek capaian akademik dan aspek perilaku dan kinerja. Penilaian terhadap capaian akademik meliputi kualitas, kuantitas, akurasi, ketepatan, kedisiplinan, kemahiran, kerja sama tim, kreatifitas, fleksibilitas dan kemampuan riset. Sedangkan aspek perilaku dan kinerja mencakup penilaian terhadap absensi, kehadiran dalam menjalankan tugas, kehadiran pada upacara-upacara peringatan hari Nasional dan pameran ilmiah.

Calon guru pertama kali diterima di sekolah selalu diangkat dengan katagori Asisten Guru, kecuali bagi guru yang mempunyai pengalaman mengajar.

Tabel 3.2
Gaji Awal Guru Thailand Berdasarkan Kualifikasi Akademik

No	Kualifikasi	Katagori Guru	Gaji per bulan, Bath	
			Tunjangan	Gaji
1	Doktor	Asisten Guru	-	19,100
2	Master	Asisten Guru	-	16,570
3	Master yang disamakan	Asisten Guru	-	15,430
4	Sarjana dari program pendidikan 6 tahun	Asisten Guru	-	15,430
5	Sarjana dari program pendidikan 5 tahun	Asisten Guru	-	12,530
6	Sarjana dari program pendidikan 4 tahun ditambah dengan diploma/pelatihan 1 tahun	Asisten Guru	-	12,530
7	Sarjana dari program pendidikan 4 tahun	Asisten Guru	-	11,920

Seluruh data-data adalah berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan pada Desember 2012. Informasi yang diperoleh menyatakan bahwa akan ada kenaikan gaji guru dalam waktu dekat yang akan diumumkan pada awal tahun 2014.

Selain bentuk promosi gaji dan tunjangan di atas, guru-guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan kualifikasi akademiknya ke jenjang lebih tinggi melalui studi lanjut master atau doktor. Kementerian Pendidikan menyediakan beasiswa bagi guru- guru yang memenuhi syarat untuk melanjutkan studi ke jenjang master dan doktor. Saat ini Thailand mengalami kekurangan guru yang berkualitas dalam bidang sains dan matematika, sehingga perekrutan guru dan penugasan guru ke studi lanjut dalam bidang ini mendapat perhatian besar dari Pemerintah.

5. Pendanaan Pendidikan

Pada tahun 2012, anggaran belanja Pemerintah Thailand sebesar 2,4 triliun Bath atau setara dengan 800 triliun rupiah. Alokasi anggaran terbesar jatuh pada Kementerian Pendidikan yaitu sekitar 19.18% dari seluruh total anggaran belanja pemerintah Thailand. Dengan demikian ada perbedaan mendasar dalam hal persentase alokasi anggaran pendidikan antara Indonesia dan Thailand. Pada anggaran belanja Negara Indonesia dialokasikan sebesar 20% bagi pendidikan, termasuk pendidikan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara h a m p i r 20% alokasi anggaran di Thailand jatuh kepada Kementerian Pendidikan.

a. Pendanaan Sekolah Negeri dan Swasta

Pembiayaan sekolah Negeri seluruhnya berasal dari Pemerintah. Sekolah-sekolah mengusulkan kebutuhan pembiayaan kepada Dinas Pendidikan Wilayah, yang selanjutnya setelah dikompilasi oleh Dinas akan diteruskan Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar atau Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah tergantung jenjang sekolahnya. Setelah Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ini melakukan kompilasi dari seluruh wilayah, usulan diteruskan ke Kementerian Pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.2. Selanjutnya usulan ini disampaikan pada sidang kabinet. Persetujuan besaran usulan anggaran dari setiap kementerian baru akan sah setelah mendapat persetujuan dari parlemen Thailand. Dalam hal ini proses pengusulan anggaran pada hakikatnya sama persis seperti di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pendanaan, pembiayaan seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah Negeri dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah. Dengan demikian siswa dapat menikmati sekolah gratis selama 12 tahun akademik, 6 tahun pada *Prathom*, dan 6 tahun *Mattayom* atau sekolah vokasi. Pemahaman sekolah gratis menyatakan bahwa orang tua sama sekali tidak ditarik biaya apapun untuk kebutuhan anaknya di sekolah. Bahkan d e n g a n biaya sekolah gratis ini, siswa mendapatkan berbagai keuntungan tambahan dari Pemerintah seperti yang akan dijelaskan pada paragraf berikut.

Pada tingkat *Prathom* atau Sekolah Dasar, selain sekolah gratis, selama 6 tahun sekolah, siswa akan mendapatkan susu dan makan siang gratis yang disediakan oleh sekolah melalui pendanaan dari Kementerian Pendidikan. Selain itu, siswa juga akan mendapatkan bantuan buku teks dan alat tulis gratis yang didistribusikan oleh sekolah kepada murid-murid.

Baju seragam, sepatu dan tas biasanya dibelikan terlebih dahulu oleh orang tua, lalu pada akhir semester diganti biayanya oleh sekolah, setelah sekolah menagih kepada Dinas pendidikan Wilayah. Pemerintah membiayai operasional dan pengadaan serta perawatan sekolah mencakup pengadaan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK), buku perpustakaan, perbaikan, pengadaan alat kantor dan laboratorium. Secara sukarela beberapa sekolah meminta kontribusi dari orang tua untuk kegiatan ekstra-kurikuler dan pengadaan guru asing, namun sifatnya tidak memaksa.

Yang menarik pada reformasi pendidikan di Thailand adalah pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sejak usia dini melalui program yang disebut *One Tablet Per Child* atau disingkat OTPC. Proyek ambisius ini bertujuan memperkuat siswa-siswa dengan pedagogi mutakhir dan pembelajaran tanpa kendala lokasi, jarak, dan latar belakang ekonomi siswa. Pemerintah Thailand sampai saat ini telah mengeluarkan dana sebesar 3 milyar bath atau setara dengan 96 juta USD untuk membeli sebanyak 900 ribu komputer tablet untuk keperluan pendidikan.

Dalam pembelian komputer tablet ini, Pemerintah Thailand melakukan perbandingan harga dan spesifikasi teknis dari sejumlah pabrik. Akhirnya Pemerintah memutuskan untuk membeli komputer tablet ini dari sebuah perusahaan Cina seharga 2460 Bath per unit (setara 750 ribu rupiah) dengan sistem operasi Google Android Ice Cream sandwich dan spesifikasi tablet 1 GB RAM, kapasitas penyimpanan 8GB. Harga tersebut telah termasuk materi pendidikan yang dimasukkan ke dalam tablet. Perlu dicatat bahwa komputer tablet ini bukan saja dibagikan kepada siswa-siswa *Prathom 1* sekolah Negeri, tetapi juga kepada siswa-siswa *Prathom 1* di sekolah swasta.

Berkenaan dengan pendanaan sekolah swasta, di Thailand terdapat 3 jenis sekolah swasta, seperti dijabarkan sebagai berikut: A) sekolah swasta yang mendapat 70 persen subsidi dari Pemerintah, dimana sekolah menetapkan SPP tertinggi sesuai dengan yang diatur oleh Pemerintah; B) sekolah swasta yang sama sekali tidak menerima subsidi dari pemerintah, dimana sekolah menentukan besarnya SPP yang ditarik dari siswa dan jelas jauh lebih tinggi dari sekolah yang sebelumnya dan sekolah swasta yang mendapat subsidi 100 persen dari Pemerintah, misalnya sekolah yang didirikan oleh organisasi keagamaan, atau sekolah bagi anak-anak kurang beruntung secara fisik. Tabel 6.1 menunjukkan bentuk kontribusi pemerintah Thailand untuk sekolah swasta yang masing-masing menerima subsidi 70 dan 100 persen.

b. Peran Serta Masyarakat Terhadap Pendidikan

Masyarakat dan orang tua berperan aktif dalam pendidikan baik pada sekolah Negeri maupun sekolah swasta. Di mata hukum Thailand, sekolah dianggap sebagai sebuah badan hukum, karenanya diperlukan komite sekolah.. Komite sekolah di Thailand pada dasarnya mirip dengan komite sekolah di Indonesia. Namun dalam hal komposisi mungkin sedikit berbeda. Komite sekolah di Thailand terdiri dari:

1. Pakar akademik sebagai penasehat
2. Direktur/kepala sekolah
3. Wakil guru
4. Wakil siswa
5. Wakil masyarakat
6. Asosiasi orang tua

Seluruh anggota komite sekolah terlibat dalam berbagai permasalahan

pelaksanaan pendidikan di sekolah. Mereka mengajukan gagasan atau usulan misalnya penambahan guru tertentu. Mereka juga dapat memberikan keputusan, menjalankan pengumpulan dana untuk pengembangan sekolah dan mencari dana dari sumber- sumber selain orang tua demi memajukan sekolah tersebut.

H. PENUTUP

Sistem pendidikan yang diterapkan di Thailand pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia, mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Persamaan ini memberikan peluang yang cukup besar untuk saling berbagi pengalaman dan bekerja sama. Penjaminan mutu pendidikan juga dilakukan melalui ujian Nasional. Namun hasil ujian Nasional di Thailand bukan memberikan lulus atau tidaknya seorang siswa. Kelulusan siswa dari sekolah lebih ditentukan oleh ujian sekolah. Hasil ujian Nasional hanya menunjukkan capaian akademik siswa.

Sistem perekrutan guru dilakukan secara tersentralisasi secara terbuka dimana calon mengetahui syarat-syarat akademik dan non-akademik yang diminta. Ujian saringan penerimaan guru dilakukan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand. Peningkatan kualitas guru dilakukan dengan berbagai program seperti program pendidikan guru 5 tahun dengan beasiswa guna menarik calon-calon guru yang cemerlang. Kualifikasi guru minimum harus memiliki gelar sajana dengan lama pendidikan 4 tahun. Pengembangan guru dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari pelatihan dan studi lanjut master bahkan doktor.

Proses pengusulan dana yang dibutuhkan oleh sebuah sekolah pada hakikatnya sama seperti di Indonesia. APBN Thailand memberikan alokasi mendekati 20 persen kepada Kementerian Pendidikan. Dengan dana yang besar ini memungkinkan sekolah dan siswa mendapat berbagai keuntungan. Sekolah gratis berlaku sampai sekolah menengah atas. Siswa mendapat berbagai bantuan seperti buku teks, alat tulis, susu, makan siang, baju seragam, dll. Dalam upaya memperkenalkan ICT sejak dini, kepada anak kelas 1 SD di Thailand dibagikan komputer tablet, berikut dengan program- program pendidikan.

REFERENSI

- Chantra Tantipongsanuruk (2013), “Personal Communication”
- Ministry of Education (2008a), “ The Basic Education Core Curriculum” Bangkok, Thailand
- Ministry of Education (2008b), “ Towards a Learning Society in Thailand: an Introduction to Education in Thailand” Bangkok, Thailand
- Office of Education Council (2008), Education in Thailand”, Ministry of Education, Bangkok, Thailand
- Office of Education Council (2013), “Curriculum Development of Thai Basic Education”, Ministry of Education, Bangkok, Thailand
- Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA (2010) “Annual Report 2010”, ONESQA, Bangkok, Thailand.
- Siribodhi, T (2011), “Basic Education Curriculum in Thailand: Content and Reform”, SEAMEO Secretariat, Bangkok, Thailand
- Unesco (2011) “Education Profiles”, Unesco Bangkok, <http://www.unescobkk.org/education/resources/resources/education-system-profiles/thailand/basic-education/>

BAB IV

SISTEM PENDIDIKAN DI JERMAN

Ayu Rizki Amaliah
ayurizki239@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Setiap bangsa mengembangkan sistem pendidikan yang dipandang unggul dan mampu menjadi sarana yang ideal bagi pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Saat ini bisa kita lihat beragam sistem pendidikan di dunia, yang seringkali dibangun berdasar prinsip pendidikan yang sama persis, namun tetap kaya dengan perbedaan di berbagai tingkatan kebijakan dan teknis pelaksanaan. Pendidikan telah menjadi sebuah keniscayaan bagi peningkatan kualitas kehidupan baik secara individual maupun kolektif. Keyakinan akan urgensi pendidikan telah mengantarkan peradaban manusia kepada pembentukan sistem pendidikan, yang dipandang sebagai satu hal yang wajib ada dalam sistem kehidupan berbangsa dan berNegara. Dengan penyesuaian terhadap keunikan setiap komunitas yang umumnya terkait dengan nilai, ritual, teladan dan simboll (Habe & Ahiruddin, 2017).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong penggiat pendidikan untuk meninggalkan pola pandang sempit dalam mengembangkan sistem pendidikan. Pendidikan tidak lagi dilihat melalui kaca mata kuda, dimana para pengambil kebijakan di bidang pendidikan hanya terfokus pada sistem pendidikan sendiri. Semakin berkembang kesadaran. bahwa pola pandang egosentris hanya akan menjadikan sistem pendidikan sebuah bangsa rentan terhadap resiko stagnasi pendidikan yang akan menyebabkan perkembangan ke arah yang lebih baik menjadi terhambat akibat tidak adanya upaya *benchmarking* dengan sistem pendidikan yang dikembangkan pihak lain. Tanpa ada bandingan, kerap seseorang terjebak dalam pola pandang “baik sendiri”(Nurkholis, 1970).

Jerman tentunya adalah salah satu Negara yang namanya sudah masyhur di dunia. Bagi kita yang berasal dari Indonesia, nama Jerman biasanya akan mengingatkan kita pada teknologi, Negara maju, sepak bola, dan tentunya sistem pendidikan yang mumpuni. Setiap tahunnya, tidak sedikit orang Indonesia dan juga masyarakat dari Negara lain yang berbondong-bondong ingin ke Jerman. Salah satu alasannya apalagi kalau bukan untuk mencicipi sistem pendidikan di Negara ini.

Hal ini terjadi karena suatu ilmu perbandingan terhadap sistem pendidikan. Akan tetapi, Sebagai suatu ilmu perbandingan pendidikan tidaklah hanya membahas masalah-masalah sistem pendidikan dan pengajaran yang ada pada Negara tersebut, dan tidak hanya membahas tentang pemikiran kependidikan yang ada dalam suatu masyarakat dalam suatu Negara atau tentang teori-teori kependidikan yang diamalkan oleh suatu masyarakat sebagai suatu landasan pembahasan tentang sistem pendidikannya. Bukan ilmu perbandingan pendidikan bila hanya menitik beratkan pembahasan pada perbandingan antara teori-teorii pendidikan yang ada dalam suatu masyarakat.

Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan yang masih membutuhkan banyak pembenahan di berbagai aspek. Meski pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan sistem pendidikan, tak bisa dipungkiri jika masih terdapat beberapa kelemahan di beberapa sisi. Agar revisi sistem pendidikan dalam Negeri dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan contoh referensi sistemnya dari Negara yang lebih maju. Kegiatan membandingkan sistem pendidikan Indonesia dengan Negara maju hendaknya dilakukan agar menjadi bahan intropeksi bagian mana yang perlu diperbaiki. Untuk itu, pembahasan mengenai sistem pendidikan Indonesia dan perbandingannya dengan Negara maju berikut ini layak untuk disimak bersama.

Studi tentang perbandingan pendidikan di setiap Negara menjadi tema yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Pendidikan di setiap Negara berbeda-beda, baik dalam kurikulumnya, dalam pelaksanaannya ataupun dalam hal-hal lainnya. Setiap Negara mempunyai sistem pendidikan masing-masing. Dengan mempelajari perbandingan pendidikan di setiap Negara bisa memberikan banyak pengetahuan mengenai pendidikan mana yang baik dan dapat dijadikan sebagai acuan.

Dalam kesempatan ini peneliti akan mencoba mengkaji banding sistem pendidikan Jerman dengan beberapa catatan dalam sistem pendidikan Indonesia. Negara Jerman dipilih karena keunggulan yang dimiliki dalam sistem pendidikannya. Saat ini, Jerman merupakan salah satu Negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tahun 1970 sistem pendidikan Jerman sudah mampu meraih tujuan-tujuan yang dicanangkan, "hanya" sekitar 25 tahun setelah Jerman rata dengan tanah akibat kekalahan dalam Perang Dunia II. Berbagai keunggulan Jerman di bidang kedokteran, teknologi, sastra, dan seni merupakan keberhasilan sistem pendidikan Jerman yang secara gemilang telah mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada pasca kekalahan Perang Dunia II. Tak aneh bila saat ini Jerman menjadi Negara tujuan bagi banyak mahasiswa internasional, termasuk Amerika Serikat, yang ingin mendapatkan salah satu pendidikan terbaik di dunia (Miera, 2008).

Jika membincang seputar pendidikan khususnya di Jerman, yang terlintas dalam benak pembaca adalah sekolah-sekolah yang sangat teratur dengan disiplin yang sangat ketat dengan setiap aktivitas pendidikan yang diatur hingga hal yang paling kecil sekalipun. Sehingga berita yang beredar di luar negeri adalah suatu sistem pendidikan yang diatur sedemikian hingga yang disesuaikan dengan upaya Nasional secara menyeluruh untuk mencapai supremasi militer. Sedangkan di dalam Negeri, atau di Jerman sendiri, sekolah mendapatkan kepercayaan untuk mengangkat status Negara dari kekalahan menuju kekaisaran yang besar hanya dalam kurun waktu dua generasi. Hal ini menjadikan guru di Jerman adalah seorang pahlawan yang mengukir sejarah.

B. PEMBAHASAN

1. Pendidikan di Negara Jerman

Demografi di Jerman dipantau oleh Badan Statistik Federal Jerman (*Statistisches Bundesamt*). Jumlah penduduk Jerman sampai akhir 2019 tercatat 83,2 juta orang. Pertambahan penduduk berasal dari migrasi. Tanpa migrasi, jumlah penduduk akan menyusut, karena angka kematian masih lebih tinggi dari angka kelahiran. Sampai akhir 2019, total populasi Jerman mencapai 83,2 juta orang, bertambah sekitar 147 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian data terbaru Biro Statistik Federal, Statistisches Bundesamt, yang dirilis Jumat (19/6) di Wiesbaden. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk itu meningkat 0,2 persen (Busse, 2018). Sejak 2011, jumlah penduduk di Jerman terus bertambah. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya terjadi juga penyusutan.

Peningkatan jumlah penduduk pada 2019 terutama berasal dari orang yang bermigrasi ke Jerman. Neraca migrasi menunjukkan angka plus sekitar 300 ribu, artinya jumlah orang yang datang dan menetap di Jerman 300 ribu lebih banyak dari pada yang meninggalkan Jerman. Pada saat yang sama, terjadi sekitar 161 ribu defisit kelahiran di Jerman. Artinya jumlah orang yang meninggal melebihi jumlah kelahiran sebanyak sekitar 161 ribu orang. "Populasi menyusut, jika tidak ada migrasi", kata Nikola Sander dari Pusat Penelitian Populasi, BIB (Hippachschneider, Krause, & Woll, 2007).

Data Biro Statistik Federal juga menunjukkan, jumlah warga asing di Jerman meningkat menjadi 10,4 juta orang, yang merupakan kenaikan 3,1 persen atau sekitar 309 ribu orang dibanding 2018. Proporsi warga asing di Jerman dibandingkan dengan total populasi adalah 12,5 persen. Usia rata-rata penduduk di Jerman menurut statistik adalah 44,5 tahun (Van De Kaa, 1987).

Perkembangan jumlah penduduk di Jerman secara regional berbeda-beda, demikian Biro Statistik Federal di Wiesbaden dalam laporan statistik kependudukan yang terbaru. Kenaikan terbanyak tercatat di Negara bagian Bayern, dengan peningkatan sekitar 48.000 orang, dan Negara bagian Baden Württemberg, dengan peningkatan sekitar 30.900 orang. Kedua Negara bagian itu terletak di Jerman selatan dan merupakan daerah industri terpenting.

Penyusutan penduduk terbanyak terjadi di Negara bagian Sachsen dan Thüringen, keduanya terletak di wilayah bekas Jerman Timur. Secara umum, terjadi arus perpindahan dari kawasan pedesaan ke perkotaan. "Yang bisa menyedot lebih banyak penduduk adalah daerah perkotaan dan wilayah yang memiliki banyak lapangan kerja", kata peneliti kependudukan Nikola Sander. Tapi ada juga pengecualian, yaitu Negara Bagian Brandenburg dekat Berlin, yang mengalami kenaikan jumlah penduduk sekitar 10 ribu orang. Alasannya adalah arus perpindahan dari wilayah Berlin ke kawasan pedesaan di Brandenburg (Van De Kaa, 1987).

Secara geografis Jerman terletak pada tengah-tengah benua Eropa dengan luas wilayah 356.957 kilometer persegi. Jerman berpenduduk 82 juta lebih dan kira-kira 8% diantaranya tidak berkebangsaan Jerman. Warga Negara asing ini mulai berdatangan ke Jerman pada akhir tahun 1950-an ketika Negara-Negara

Eropa selatan mulai merekrut buruh-buruh pekerja tangan. Jumlah yang paling banyak adalah orang Turki, baik yang lahir di Jerman maupun keturunan Turki. Imigran lain masuk ke Jerman sebagai pengungsi karena perang atau karena tekanan ekonomi di Negaranya masing-masing. Jenis migran ketiga adalah dari etnis Jerman sendiri (walaupun tidak semuanya berbahasa Jerman). Oleh karena kesulitan bahasa, baik bagi imigran yang telah lama menetap di Jerman, apalagi mereka yang baru datang, maka hal ini menjadi tantangan bagi sistem pendidikan Jerman (UNESCO - International Bureau of Education, 2007).

Bahasa resmi adalah bahasa Jerman. Bentuk bakunya dikenal sebagai bahasa Jerman Baku (*Hochdeutsch* atau *Standarddeutsch*). Pembaku bahasa ini adalah Martin Luther pada abad ke-16, sehingga ia dikenal pula sebagai "Bapak Bahasa Jerman". Bahasa Jerman Baku dipelajari di sekolah sehingga semua orang Jerman praktis menguasainya. Bahasa ini juga dipakai di Austria, Swiss, Luksemburg, dan Lichtenstein sebagai bahasa pengantar resmi sehingga penduduk Negara-Negara ini dapat saling berkomunikasi dengan baik satu sama lainnya. Bahasa Jerman merupakan bahasa yang paling indah didengar di seluruh Eropa (UNESCO - International Bureau of Education, 2007).

Selain itu, dituturkan pula berbagai dialek lokal; yang terpenting di antaranya adalah dialek Bayern, Alemania (dituturkan di Baden, Swabia, dan berbagai tempat di Swiss), Koeln, Berlin-Brandenburg, serta dialek Saksen. Keberadaan dialek lokal ini semakin terdesak oleh penggunaan bahasa baku (kolokial atau *Umgangssprache*). Bahasa Sachsen Hilir atau Plattdeutsch, yang dituturkan di bagian barat laut, sekarang dianggap sebagai bahasa tersendiri dan merupakan varian dari bahasa Jerman Hilir. Di bagian sudut timur Negara bagian Sachsen terdapat komunitas berbahasa Sorbia yang bukan bahasa Germanik melainkan Slavik. Bahasa minoritas lain adalah bahasa Denmark yang dituturkan di bagian perbatasan dengan Denmark, bahasa Frisia di perbatasan utara dengan Belanda, bahasa Turki sebagai bahasa imigran dari Turki, bahasa Rusia yang dibawa oleh imigran dari kaum Jerman Etnik dari Rusia dan beberapa bahasa kaum imigran minoritas lainnya (Italia, Vietnam, Arab, dan Negara-Negara Balkan). 67% penduduk Jerman mengatakan bahwa mereka dapat berkomunikasi minimal satu bahasa asing dan 27% penduduk mengatakan mereka dapat berkomunikasi dengan 2 bahasa asing lain selain bahasa Jerman (Syamsi, 2007).

Berdasarkan sejarah pendidikan di Jerman berasal dari dua sumber yaitu gereja dan Negara. Sudah menjadi tradisi semenjak awal abad pertengahan bahwa gereja selalu terlibat dalam pendidikan, sedangkan *the lander* (asal mula kekuasaan daerah) selalu pula mengatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pendidikan. Pengumuman resmi wajib belajar pada beberapa daerah semenjak akhir abad ke-17 dapat dianggap sebagai penanda resmi bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Negara. Semenjak itu, pengaruh gereja secara umum mulai berkurang. Maka masalah pendidikan mulai saat itu terletak terutama pada kekuatan politik, para guru, orang tua siswa atau mahasiswa sebagai kelompok

yang langsung terlibat untuk menentukan keadaan pendidikan serta perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan.

Pemerintah Negara bagian (*state*) yang sosial demokrat cenderung untuk menempatkan pendidikan sebagai hak azazi dengan penekanan pada: usaha pendidikan itu atas inisiatif sendiri, persamaan dan tindakan pengimbangan, sementara pihak kristen demokrat konservatif menginginkan tujuan dan kegiatan pendidikan itu bersifat kolektif untuk kepentingan masyarakat seperti penyiapan lulusan yang berkualitas. Maka dalam konstitusi Negara (baru) serta dalam pembukaan undang-undang tentang sekolah khusus dan Universitas ditetapkan tujuan umum pendidikan dengan tekanan pada pengembangan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat (Michallik, 2012).

Politik pendidikan dan formulasi tujuan merupakan topik yang hangat dalam kelompok republik demokrasi. Tahun 1949 pejabat administrasi memoloskan undang-undang mengenai pendirian : "Sekolah Persatuan Demokrasi". Dengan maksud untuk menghalangi monopoli pendidikan kelas masyarakat golongan atas, dan juga menjamin terbukanya kesempatan bagi masyarakat miskin. Lebih dari 2 atau 3 guru-guru yang bertugas di bawah partai sosialis Nasionalis diganti dengan guru-guru yang telah mendapatkan pendidikan jangka pendek. Kecocokan dengan peraturan komunis maka berlangsunglah model soviet seperti prinsip "pengajaran politeknik" dengan tujuan membentuk pribadi sosial (Miera, 2008).

Salah satu faktor yang mampu memberikan implikasi besar bagi perubahan sebuah sistem pendidikan adalah ideologi. Ideologi sebagaimana diungkapkan oleh (LinHuber,1998) merupakan salah satu hal yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam sebuah sistem budaya. Ideologi ini tercermin dalam nilai yang dianut dan dipandang sebagai sebuah pedoman dalam bersikap dan berinteraksi satu sama lain. Sebagai ilustrasi, pendidikan di Indonesia memandang esensial untuk tetap membudayakan kesopanan di atas kebersamaan (*politeness above solidarity*) antara guru dan murid, sehingga budaya memanggil guru dengan sebutan penghormatan seperti bapak/ibu, sikap gestur yang khas dan keengganan mendebat pendapat guru menjadi semacam tradisi yang dipertahankan, sedangkan di Jerman seorang mahasiswa yang merasa sudah dekat dengan seorang dosen boleh memanggil nama dosen tanpa embel-embel, bahkan diperkenankan untuk menyebut dosen dengan nama sapaan akrab, seperti misalnya Dorothea disapa Doro. Format diskusi juga relatif lebih egaliter (Purwanta, 2016).

Untuk memahami perbedaan yang ada antara sistem pendidikan Jerman dan sistem pendidikan Indonesia, akan sangat baik bila kita terlebih dahulu melihat landasan filosofis yang mendasari kedua sistem pendidikan tersebut. Membicarakan sistem pendidikan dari sisi filosofis akan cenderung terkait dengan nilai ideal yang dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan dan pelaksanaan kinerja. Sebagai contoh, Pancasila yang dijadikan landasan filosofis bangsa Indonesia diharapkan menjadi salah satu pedoman hidup dari bangsa yang terdiri atas beragam latar belakang agama dan suku bangsa ini.

Jerman pada masa Perang Dunia II merupakan Negara yang kalah perang. Kondisi ini mempengaruhi mental rakyatnya yang begitu mengidamkan adanya pemimpin yang bisa membawa mereka menuju kejayaan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan Hitler. Setelah berkuasa, Hitler menanamkan keyakinan dan kebanggaan yang *chauvimistik* kepada para pendukungnya. Untuk memperoleh dukungan luas bagi ambisinya menguasai Eropa, Hitler menyetengahkan konsep *Lebensraum* dan keunggulan ras bangsa Jerman, ras Arya (Hammar, 2002). Rasionalisasi fasis ini kemudian melandasi sistem pendidikan Jerman saat itu. Pendidikan diarahkan kepada pembentukan sosok manusia yang unggul dalam berbagai bidang. Dalam bidang keilmuan, pendidikan diarahkan pada penemuan-penemuan ilmiah, utamanya yang bermanfaat bagi pembangunan kekuatan militer Jerman, bidang olahraga bertujuan memunculkan atlet-atlet yang superior seperti juara tinju dunia Max Schmelling. Dalam bidang seni, pembuatan karya seni ditujukan untuk membentuk figur ras Arya yang unggul (Naul, Roland; Dreiskemper, Dennis; Hoffmann, 2011).

Kekalahan mutlak Jerman dalam Perang Dunia II membuat perubahan besar dalam kehidupan bangsa Jerman, termasuk pada perubahan filsafat yang dijadikan landasan bagi pembangunan sistem pendidikan. Berbagai kondisi buruk yang terjadi pasca kekalahan, termasuk terbagi dua Negara Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur, menjadi awal bagi bangsa Jerman untuk mereformulasi ulang landasan falsafi yang dijadikan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Jerman kemudian memandang persatuan (*Einheit*), pembagian kekuasaan agar tidak tertumpuk pada satu orang (*die Macht verteilen*), dan kemampuan untuk membangun sebagai falsafah penting bagi bangsa Jerman yang tengah mengalami kehancuran.

Dalam pandangan ini bisa kita lihat pengaruh filsafat *Eksistensialisme* yang menekankan kemampuan diri sendiri, filsafat *progresivisme* dengan proporsi sains dan perubahan yang terencana, juga pengaruh filsafat *critical pedagogy* dalam upaya memformulasi ulang kebenaran setelah kehancuran akibat ideologi nazi. Beragamnya landasan filsafat sangat mungkin terjadi di Jerman karena sistem Negara yang menganut sistem federal. Dalam sistem ini, Negara bagian mempunyai kewenangan untuk mengatur sistem pendidikannya sendiri. Itulah sebabnya lama masa pendidikan di beberapa Negara bagian berbeda dengan satu sama lain.

Pengaruh dari perubahan landasan filsafat pendidikan ini pada gilirannya berimbas pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan federal maupun pemerintahan Negara bagian dalam bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa kebijakan sistem pendidikan Jerman yang khas (Michallik, 2012).

1. Pemerintah Jerman memandang pendidikan sebagai modal utama untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan keterpurukan ideologi. Untuk itu, pemerintah berusaha menjamin ketercapaian akses pendidikan bagi seluruh warga Negara dengan membebaskan biaya pendidikan dari *Kindergarten* sampai tingkat pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah Jerman juga

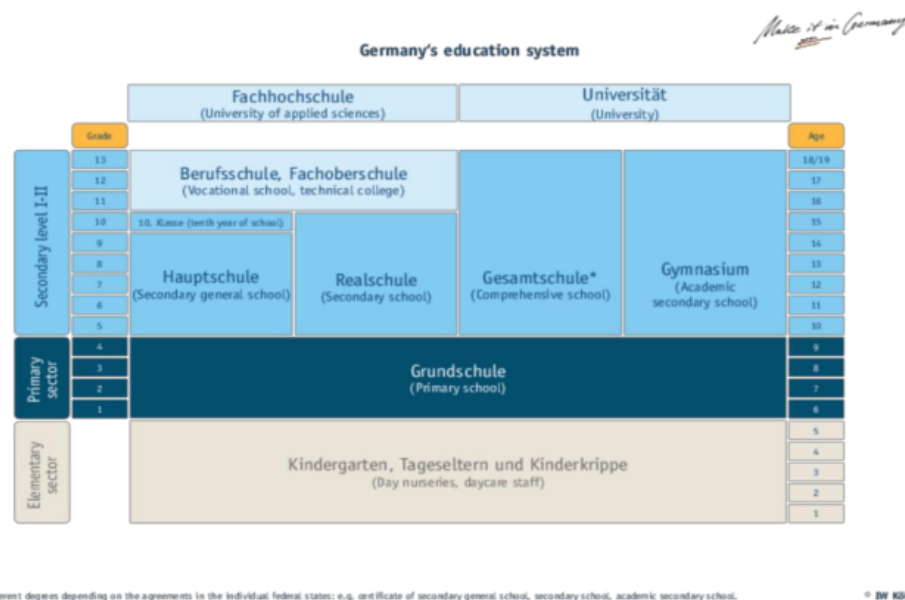
mengalokasikan dana yang relatif besar bagi penyediaan sarana penunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yang baik.

2. Pemerintah federal/pemerintah pusat tidak “memonopoli” kewenangan pengaturan sistem pendidikan secara mutlak. Kewenangan pengaturan sistem pendidikan juga dimiliki oleh pemerintahan Negara bagian. Pembagian kewenangan ini mengarah kepada upaya untuk tidak menumpukkan kekuasaan di satu pundak, sehingga bila sewaktu-waktu terjadi kesalahan atau pengambilan kebijakan pendidikan yang lemah, tidak akan berimbas secara global. Di sisi lain, keuntungan pembagian kewenangan ini memberikan kesempatan bagi pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah, namun untuk menciptakan standarisasi Nasional, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan untuk meregulasi beberapa hal dalam sistem pendidikan Jerman.
3. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang berhasil cukup besar. Dibandingkan dengan Indonesia, partisipasi masyarakat Jerman jauh lebih terlihat. Hal ini mencerminkan pemikulan tanggung jawab bersama dan rasa kesatuan antara pemerintah dengan masyarakatnya.
4. Setelah *Wiedervereinigung* atau penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur, masyarakat Jerman bisa melihat ketimpangan antara dua wilayah ini dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk itu pemerintah berupaya menyeimbangkan kondisi kedua wilayah dengan memberikan alokasi anggaran belanja Negara yang lebih proporsional bagi pembangunan pendidikan di bekas Jerman Timur. Pemerataan kualitas pendidikan di semua wilayah Negeri merupakan kebijakan yang pada gilirannya akan menghilangkan potensi permasalahan di masa depan.
5. Pemerintah Jerman sangat memperhatikan kualifikasi guru. Menjadi guru di Jerman mungkin sama sulitnya untuk menjadi dokter. Relevansi keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, kualitas pengajar dan kesejahteraan yang diperoleh guru merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam pengambilan kebijakan di Jerman. Rasanya orang Jerman akan menjadi sangat prihatin atau bahkan mungkin tidak percaya bila dikatakan bahwa di Indonesia masih ada guru yang *nyambil* menjadi tukang ojek karena kelemahan finansial yang dimilikinya.

Konstitusi federal Jerman telah memberikan kewenangan pengaturan sistem pendidikan kepada Negara bagian. Implikasi dari kebijakan ini adalah adanya otoritas penuh dari pemerintahan Negara bagian untuk menentukan kebijakan sistem pendidikan. Pengaturan masalah pendidikan kemudian dirumuskan melalui lembaga legislatif tingkat Negara bagian. Saat ini, Negara bagian di Jerman memiliki sistem pendidikan yang berbeda, di antaranya perbedaan masa pendidikan. Kondisi ini kemudian mendorong pihak Negara bagian untuk mengadakan satu standarisasi yang berlaku secara Nasional, sehingga pada tahun 1969, sebagian wewenang Negara bagian dalam masalah pendidikan dialihkan ke pemerintahan federal (Nur Syah, 2001). Pendanaan pendidikan dibebankan kepada anggaran belanja Negara bagian dan partisipasi masyarakat

lokal. Pembagiannya meliputi pendanaan biaya personil yang dibebankan kepada Negara bagian dan infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan federal utamanya bertanggung jawab atas pendanaan perluasan institusi pendidikan tinggi, sarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan dan kegiatan penelitian (Michallik, 2012).

Secara falsafi, landasan sistem pendidikan Jerman dengan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Hal ini terjadi karena pendidikan di manapun adalah hal yang dianggap baik. Pendidikan sejak dulu sampai saat ini di manapun dipandang sebagai sesuatu yang mulia (Alwasilah, 2007). Di samping itu, kemiripan dari latar belakang mestinya juga bisa menimbulkan keinginan yang sama. Jerman mengalami kekalahan total karena kekalahan dalam Perang Dunia II, sehingga sempat diduduki oleh kekuatan militer asing dan Indonesia pernah dijajah oleh militer asing. Memang tidak sama antara kekalahan dan penjajahan, namun keduanya melahirkan kondisi mental yang cenderung sama, yaitu adanya ketidaksenangan karena pihak lain mengatur rumah tangga sendiri dan keinginan untuk mandiri atau merdeka.



Gambar 4.1: Germany's Education System

Apabila kita melihat tabel di atas, bandingan antara bagaimana sistem pendidikan yang berjalan di Jerman, memang sedikit tidaknya berbeda dengan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena mau tidak mau memang setiap Negara memiliki sistem pendidikan masing-masing. Maka dari itu tidak heran jikalau keunggulan dan kekurangan sebuah bangsa dapat tercermin dari sistem pendidikan suatu Negara tersebut.

Kalau melihat tabel tersebut, sistem pendidikan di Jerman bisa digolongkan menjadi lima bagian, yaitu (Pleshakova, 2019):

1. Pendidikan anak usia dini (*Kindergarten, Tageseltern, und Kinderkrippe*)

2. Sekolah dasar (*Grundschule*)
3. Sekolah menengah (Termasuk di dalamnya: *Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, dan Gymnasium*)
4. Pendidikan lanjutan (*Universität und Fachhochschule*)

Anak di Jerman memulai sekolahnya sejak dini. Sekitar umur dua minggu hingga tiga tahun, mereka telah mulai masuk pra-sekolah yang diberi nama *Kinderkrippe*. Di *Kinderkrippe*, perkembangan motorik maupun sosialisasi dari anak tersebut bisa dikembangkan lewat suara, warna, atau berbagai permainan, dari permainan itulah sesuatu yang baik bisa dihasilkan atas didikan dan pastinya dapat bermanfaat bagi perkembangannya. Sesuai bobot umurnya, *Kinderkrippe* hanya memberikan waktu maksimal 30 jam bagi anak untuk bersekolah.

Setelah lulus dari *Kinderkrippe*, anak umur tiga hingga enam tahun mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak (*Kindergarten*). Sama seperti di *Kinderkrippe*, anak TK juga belajar sambil bermain. Penilaian yang diberikan oleh pendidik hanya berupa gambaran sifat, kemampuan, dan interaksi anak selama di sekolah. Juga seperti *Kinderkrippe*, maksimal anak rata-rata hanya bersekolah 38 jam per minggu. Meski demikian, *Kinderkrippe* dan *Kindergarten* bukanlah hal yang wajib bagi anak. Mengapa demikian? Karena wajib sekolah dimulai sejak masa sekolah dasar hingga kelas 9. Dengan kata lain, wajib belajar di Jerman berlangsung selama 9 tahun. Meski demikian, masing-masing Negara bagian memiliki peraturan masing-masing sehingga ada juga Negara bagian yang mewajibkan sekolah hingga 12 tahun. Rata-rata total waktu sekolah di Jerman 38,5 jam per minggu. Selain itu, sebagian besar sekolah di Jerman dimulai pukul 8 pagi.

Sekolah dasar di Jerman rata-rata berlangsung selama 4 tahun. Meski berlangsung cukup singkat, anak baru mulai memiliki raport yang berisi angka sejak kelas tiga SD. Di kelas satu dan dua, anak diberi penilaian kualitatif mengenai kemampuan dan sosialisasinya di sekolah. Selain itu, di kelas satu dan dua anak baru mulai mengenal angka dan huruf, serta mulai belajar membaca dan berhitung. Ujian kelulusan sekolah dasar dilakukan di kelas empat. Setelah usil ujian kelulusan akan menjadi penentuan jenis sekolah anak berikutnya. Jenjang pendidikan setelah sekolah dasar terbagi menjadi tiga bagian, yakni *Hauptschule, Realschule, dan Gymnasium*. Pembagian jenjang ini didasarkan pada nilai hasil ujian kelulusan di sekolah dasar.

Haupt dalam bahasa Indonesia berarti utama dan *Schule* artinya sekolah. Sekolah utama atau *Hauptschule* berlangsung hingga kelas 9. Di *Hauptschule*, siswa pada dasarnya mempelajari hal yang dapat dipraktekkan dalam bekerja. Dengan kata lain, sekolah ini adalah sekolah untuk bekerja. *Realschule* adalah jenis sekolah selain *Hauptschule* yang dapat ditempuh anak setelah lulus sekolah dasar. *Realschule* berlangsung hingga kelas 10. Di *Realschule*, siswa mempelajari teori seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dsb dengan bobot tertentu dan tergantung fokus yang mereka pilih. Sekolah lainnya setelah lulus sekolah dasar adalah *Gymnasium*. *Gymnasium* dapat digambarkan semacam SMA karena berlangsung hingga kelas 12. Di *Gymnasium*, siswa juga belajar fisika, kimia, dsb. Bobot teori di *Gymnasium* prosentasenya tinggi. Ujian kelulusan *Gymnasium* bernama *Abitur*.

Dalam abitur, siswa dipersilahkan memilih tiga jenis mata pelajaran yang akan diikuti untuk ujian kelulusan. Abitur bentuknya *essay* dan berlangsung antara tiga hingga empat jam.

Jenis lain yang merupakan gabungan dari tiga jenis sekolah tersebut adalah *Gesamtschule* dan *Realschule Plus*. *Realschule Plus* menggabungkan *Hauptschule* dan *Realschule*. Sedangkan *Gesamtschule* menggabungkan ketiga jenis sekolah tsb. Penggabungan sekolah umumnya didasarkan pada pertimbangan bahwa masih terlalu dini untuk menilai kemampuan siswa pada kelas empat, sehingga dengan sekolah yang digabung, anak memiliki pilihan yang sesuai dengan kemampuan. Hal yang menarik dari konsep ini adalah adanya kemungkinan siswa untuk pindah ke jenis sekolah lain. Jika menurut penilaian guru siswa memiliki kemampuan lebih atau kurang, siswa dapat dipindah ke jenis sekolah yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa tersebut.

Tahap selanjutnya setelah *Hauptschule* dan *Realschule* adalah *Berufsschule*. Karena hampir setiap pekerjaan di Jerman mewajibkan kerja praktek (*ausbildung*) yang rata-rata berlangsung selama dua tahun, maka sebelum ke dunia kerja, siswa bersekolah di *Berufsschule*. *Beruf* yang artinya kerja dan *schule* yang berarti sekolah menawarkan berbagai jenis program mulai dari pekerja teknik, tukang sampah, koki, penjual, guru TK, suster, pemotong rambut, sekretaris, dsb. *Ausbildung* dilaksanakan dengan sistem beberapa hari dalam seminggu bekerja dan beberapa hari dalam seminggu masuk sekolah. Dengan demikian, apapun jenis pekerjaannya, mendapatkan pekerja yang berkualitas merupakan jaminan di Jerman.

Jenis lain yang merupakan gabungan dari tiga jenis sekolah tersebut adalah *Gesamtschule* dan *Realschule Plus*. *Realschule Plus* menggabungkan *Hauptschule* dan *Realschule*. Sedangkan *Gesamtschule* menggabungkan ketiga jenis sekolah tersebut. Penggabungan sekolah umumnya didasarkan pada pertimbangan bahwa masih terlalu dini untuk menilai kemampuan siswa pada kelas empat, sehingga dengan sekolah yang digabung, anak memiliki pilihan yang sesuai dengan kemampuan.

Karena penggolongan jenis pendidikan setelah lulus sekolah dasar, kualitas pendidikan di Jerman kurang lebih sama. Dengan demikian, tidak mengherankan jika ranking sekolah atas sistem akreditasi tidak terdapat dalam sistem pendidikan di Jerman. Meski demikian, tetap ada Universitas atau institut favorit. Akibat terbatasnya jumlah penerimaan mahasiswa di Jerman, calon mahasiswa harus melamar ke perguruan tinggi yang dituju. Syarat seleksi pada dasarnya nilai Abitur. Selain itu, terdapat syarat lain seperti mata pelajaran yang diambil saat Abitur.

Hal yang menarik adalah jarang ada sekolah maupun perguruan tinggi swasta di Jerman. Hal ini mungkin karena pendidikan di Jerman pada dasarnya gratis. Satu-satunya jenjang pendidikan yang mewajibkan pembayaran adalah jenjang perguruan tinggi. Di jenjang ini terdapat iuran semester. Meski demikian, lewat iuran semester mahasiswa dapat mengakses bis, trem, kereta, dan bentuk transportasi publik lainnya. Selain bentuk pendidikan yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat jenis lembaga pendidikan lainnya seperti *Berufsakademie*

dimana lulusan *Berufschule* dapat menempuh pendidikan ke jenjang selanjutnya, atau ada *Volkshochschule* yakni lembaga kursus dari pemerintah daerah yang menyediakan berbagai keterampilan mulai dari komputer, bahasa, dsb. dengan harga sangat terjangkau.

Pada Universitas swasta dan program internasional (MBA) biaya pendidikannya tidak lagi gratis. Pada saat ini lembaga tersebut masih sedikit jumlahnya. Sesungguhnya biaya kuliah di Jerman relatif rendah (hampir berarti tak perlu bayar SPP), baik untuk warga Negara Jerman, ataupun mahasiswa asing. Biasanya mahasiswa hanya perlu membayar uang yang namanya "*Sozialgebühren*". Ini untuk mendapatkan beberapa fasilitas bagi mahasiswa, misal agar bisa makan di MENZA (kantin khusus mahasiswa yang ada di kampus-kampus di Jerman) dengan harga mahasiswa, di beberapa Negara bagian, tiket kereta, bus dan trem tak perlu bayar. *Sozialgebühren* ini sekitar 100 Euro/semester. Sebagai gambaran di Universitas Bremen, kalau kita makan di MENZA, sekali makan dengan tarif mahasiswa hanya membayar 1,3 Euro, tetapi bila kita sebagai pegawai Universitas atau orang luar yang ikut makan, dikenakan biaya 3,5 Euro (Hainm, 1991).

Untuk sistem penilaian atau evaluasi yang dilaksanakan di Jerman, berkisar pada rentang 1-6. Nilai 1 untuk nilai yang terbaik dan 6 untuk nilai yang terburuk. Penilaian berdasarkan ujian tertulis dengan kontribusi ujian lisan lazim dilakukan di semua level pendidikan. Jika dianggap tidak memenuhi standar, siswa dapat diminta untuk mengulang kelas yang sama. Pada umumnya guru merupakan pihak yang paling menentukan dalam penilaian siswa. Pada akhir masa pendidikan menengah, siswa yang dianggap telah memenuhi standar mendapatkan sertifikat atau ijazah. Siswa di Jerman masuk sekolah selama antara 188-208 hari selama satu tahun akademik (Agustus-Juli) menurut aturan masing-masing lander dengan 6 minggu libur selama musim panas dan beberapa hari libur lainnya. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas, pemerintah federal mengatur agar liburan di 16 Negara bagian secara bergantian misalnya pada tahun ini liburan musim panas di Berlin dimulai pada bulan Juni sedangkan di Bavaria pada bulan Juli maka tahun berikutnya akan terjadi sebaliknya. Sekolah berlangsung 5 atau 6 hari seminggu dengan 17-23 jam pelajaran/minggu untuk sekolah dasar, 28-30 jam pelajaran/minggu untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Masing-masing jam pelajaran berlangsung selama 45 menit. Untuk guru, jumlah jam mengajar pertahun adalah 613-959 jam (Pleshakova, 2019).

Menteri-menteri pendidikan Negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu melalui tiga jenis instrumen yaitu, pertama, tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan "grade" dan jenis sekolah, kedua, pedoman kurikulum, ketiga, pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks.

Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah (sering dinyatakan pada Mukadimah suatu Keputusan, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum. Ini diputuskan oleh kementerian Negara bagian dan mencakup silabus, rekomendasi metode mengajar, dan kadang-kadang

juga model rencana pelajaran. Mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai di sekolah-sekolah Jerman tanpa mendapat persetujuan dari menteri Negara bagian.

Keputusan untuk metode mengajar tertentu sepenuhnya diserahkan kepada guru. Dengan semakin menurunnya rasio murid-guru (dari 30 : 1 tahun 1960 menjadi 15 : 1 dalam tahun 1980), makin jelas kecenderungannya bahwa metode mengajar "*techer-centered*" makin di tinggalkan beralih pada bekerja dengan kelompok kecil murid dalam kerangka pendekatan "*student-centered*". Semenjak akhir tahun 1980-an, konsep "pengajaran terbuka" atau "*open instruction*" yang menekankan pada "murid belajar atas dorongan sendiri" semakin berkembang dan semakin populer pada sekolah-sekolah pendidikan dasar dan juga pada sebagian sekolah menengah pertama (Purwanta, 2016).

Kurikulum di Jerman dihubungkan dengan dua hal yaitu didaktik dan *Lehrplan*. Didaktik berhubungan dengan teori-teori pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan dan materi pelajaran sehingga tidak langsung dihubungkan dengan strategi pembelajaran. Meskipun kurikulum merekomendasikan metode mengajar tertentu, guru dipersilahkan mengembangkan sendiri metode pembelajaran yang dirasakan tepat oleh mereka. Namun, dengan semakin kecilnya rasio guru dan siswa di Jerman yang saat ini rata-rata 1:15 maka kecendrungan metode mengajar yang digunakan adalah *student-centered*.

Dinamika dalam pengembangan kurikulum di Jerman menteri-menteri pendidikan Negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan melalui tiga jenis instrumen (Pleshakova, 2019):

- 1) Tabel Yang Menguraikan Jumlah Jam Belajar Per Minggu, Serta Mata Pelajaran Sesuai Dengan "Grade" Dan Jeis Sekolah;
- 2) Pedoman Kurikulum; Dan
- 3) Pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks.

Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum. Ini diputuskan oleh kementerian Negara bagian dan mencakup silabus, rekomendasi metode mengajar (keputusan untuk memakai metode mengajar tertentu sepenuhnya diserahkan kepada guru), dan kadang-kadang juga model rencana pelajaran. Mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai di sekolah-sekolah Jerman tanpa mendapat persetujuan dari kementerian Negara bagian. Sekolah dan guru-guru kemudian dapat bebas memilih dari buku-buku yang sudah ada dalam daftar yang sudah di sahkan.

Hubungan erat Indonesia dan Jerman juga terlihat jelas dalam kebudayaan dan pendidikan. Jerman memiliki reputasi cemerlang sebagai destinasi melanjutkan studi dan melakukan penelitian. Selama bertahun-tahun Jerman telah menjadi salah satu pilihan pertama pelajar Indonesia untuk studi di luar Negeri. Alumni dengan jumlah lebih dari 30,000, termasuk salah satu presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie, membangun jembatan penting dalam hubungan bilateral. Kemitraan Universitas, program studi gelar ganda, dan beasiswa dari Dinas Pertukaran

Akademis Jerman (DAAD) turut memperdalam kerja sama dan menciptakan hubungan yang lestari antara kedua pihak (Syamsi, 2007).

Jerman menjadi satu dari tujuan pendidikan utama bagi mahasiswa dan para ilmuwan Indonesia sejak generasi pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, diperkirakan sebanyak 27.000 pelajar Indonesia telah melanjutkan studi di Jerman. Berdasarkan data laporan diri (LaDi) KBRI Berlin bulan Oktober 2017, saat ini terdapat 6.371 orang mahasiswa Indonesia di Jerman dalam berbagai jenjang mulai dari sekolah bahasa hingga program doktoral

Kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Jerman secara formal didasarkan pada perjanjian tahun 1979. Perjanjian ini mencakup bidang pendidikan, riset dan ilmu pengetahuan serta pengembangan teknologi. Salah satu tindak lanjut perjanjian tersebut adalah kerja sama Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 1988 tentang Initiative Biotechnology Indonesia-Germany .

Goethe-Institut di Jakarta, yang juga memiliki cabang di Bandung dan Surabaya, mempromosikan pertukaran budaya dengan cakupan luas antara kedua Negara melalui program bahasa dan kebudayaannya. Di bawah tajuk “Jerman-Indonesia: Bersama Menuju Masa Depan”, Jerman Fest 2015 merayakan hubungan baik antara kedua Negara. Lebih dari 100.000 pengunjung di Indonesia menghadiri acara Jerman-Indonesia yang memiliki tema beragam, dari kebudayaan, politik, ekonomi, hingga sains (Pratama, 2012).

Bahasa Jerman pun menjadi semakin populer di Indonesia. Pada saat ini, sekitar 200.000 orang Indonesia mempelajari bahasa Jerman, dan lebih dari 14.000 di antaranya terdaftar dalam 28 sekolah mitra di seluruh Indonesia. Kemitraan tersebut dikembangkan dari prakarsa PASCH (Sekolah: Mitra Masa Depan) yang diluncurkan Februari 2008 oleh Menteri Luar Negeri Jerman saat itu dan Presiden Jerman saat ini, Frank-Walter Steinmeier. Prakarsa PASCH dirancang untuk memajukan pendidikan dan pelatihan guru dan murid dengan pandangan untuk meningkatkan peluang pendidikan dan memberikan pengalaman konkret Jerman dalam sekolah-sekolah di Negara lain (Meryam & Usman, 2017).

Deutsche Schule Jakarta merayakan peringatan 60 tahun berdirinya pada 2016. DSJ menawarkan ujian kelulusan berstandar internasional Jerman (Abitur) sebagai sertifikasi kelulusan sekolah, yang membuka kesempatan sangat lebar bagi lulusannya, termasuk untuk melanjutkan studi di Jerman.

2. Pendidikan Di Indonesia

Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang pendidikan di Indonesia yang kita ketahui. Pendidikan di Indonesia didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam proses menjalankan pendidikan di Indonesia, Pancasila merupakan landasan ideologi dasar. Landasan ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum bagi

pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya pendidikan bagi mutu dan kualitas bangsa (KPM, 1988).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pendidikan di Indonesia. Beberapa tugas dari instansi pemerintahan ini meliputi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Tujuan pendidikan menurut UU No. 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa.

Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan Nasional. Sistem pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jika sebelumnya wajib belajar bagi masyarakat Indonesia ditetapkan selama 9 tahun, meliputi 6 tahun untuk sekolah dasar dan 3 tahun untuk sekolah menengah. Namun, kini telah ditingkatkan hingga 12 tahun yang meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas (Habe & Ahiruddin, 2017).



Gambar 4.2: pengembangan kurikulum di Indonesia

Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan/pergantian dari waktu ke waktu, hingga sekarang Indonesia menggunakan kurikulum 2013, yang mana wujud dari perubahan dan revisi dari **KTSP/Kurikulum 2006**. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu yang

disesuaikan dengan keadaan pendidikan sekarang, memperbaiki sarana-prasarana, mengevaluasi kinerja tenaga pendidik dan lainnya (Zulfikar, 2018). Dengan adanya upaya pendidikan di Indonesia dapat lebih baik agar bangsa Indonesia dapat mengimbangi Negara lain terutama Negara-Negara ASEAN.

Tabel 4.1 Perbandingan Pendidikan Jerman Indonesia

No	Permasalahan pendidikan	Perbandingan		Analisis
		Jerman	Indonesia	
	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - untuk membentuk pribadi sosial - mengembangkan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. - Menyiapkan lulusan yang berkualitas - Undang-undang tentang sekolah khusus dan Universitas ditetapkan tujuan umum pendidikan dengan tekanan pada pengembangan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencerdaskan kehidupan bangsa serta pembentukan manusia seutuhnya berdasarkan UUD 1945 bahwa setiap warga Negara berhak menerima pengajaran. - Untul berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 	Setiap Negara memiliki tujuan pendidikan masing-masing yang tujuannya untuk memperbaiki taraf hidup menjadi lebih baik, suatu bangsa dapat dikatakan maju yaitu dapat dinilai dari kualitas pendidikan yang ada di Negara tersebut
	Sistem	Sistem pendidikan di Jerman desentralisasi	Sistem pendidikan di Indonesia adalah sentralisasi, namun dalam penyelenggaraannya satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara desentralisasi.	Kedua Negara tersebut memiliki sistem pendidikan yang sama, yang dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
	Dasar	Jerman bertitik tolak dari nilai-nilai demokrasi yang lebih liberal, yang membiarkan kompetisi individual berkembang secara alamiah.	Indonesai mendasari pendidikan dengan falsafah Pancasila.	Kedua Negara ini memiliki dasar yang berbeda, namun perbedaan dasar tersebut tidak menjadi penghambat untuk setiap Negara yang di anut itu tidak menyimpang aturan pendidikan, maka dapat dikatakan sah-sah saja, demi mewujudkan pendidikan yang semakin lebih baik.

Kurikulum	Menteri-menteri pendidikan Negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu melalui tiga jenis instrumen, yaitu pertama, tabel yang menguraikan jam belajar perminggu serta mata pelajaran sesuai dengan "grade" dan sekolah. Kedua, pedoman kurikulum, ketiga, pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks.	Berdasarkan standar Nasional disesuaikan dengan perkembangan peserta didik dengan kebutuhan lingkungan pendidikan Nasional.	Apabila kita melihat kurikulum di Indonesia sangat baik karena diterapkan disesuaikan dengan keadaan peserta didik, kemudian Negara Jerman juga menggunakan kurikulum dengan baik dan tidak menyimpang dari pendidikan itu sendiri.
Proses	Keputusan untuk metode mengajar tentu sepenuhnya diserahkan kepada guru. Konsep "pengajaran terbuka atau open instruction" yang menekankan pada murid belajar atas dorongan sendiri.	1. Pendidikan formal 2. Nonformal 3. Informal	Proses pendidikan yang diterapkan di Jerman cukup menarik tentunya ini juga dapat digunakan atau diadopsi untuk Indonesia itu sendiri agar dapat membangun pendidikan di Indonesia lebih baik.
Evaluasi	Tidak ada evaluasi Nasional yang dilakukan secara terayut mengenai hasil pendidikan.	Evaluasi pasal 58 Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.	Dalam kegiatan evaluasi Indonesia dapat dikatakan lebih baik dibandingkan Negara Jerman.
Pembinaan	Dengan pengecualian pendidikan tinggi, keuangan pendidikan sepenuhnya berada di tangan lender dan masyarakat	Sumber pendanaan pendidikan di Indonesia berasal dari APBN, APBD ditanggung bersama antara pusat, daerah dan masyarakat.	Dalam masalah administrasi pendidikan, kedua Negara ini memiliki peran yang baik dalam bidang pendidikan, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam masalah administrasi pendidikan.

	setempat. Secara umum, seluruh biaya personil ditanggung oleh pemerintah Negara bagian, dan infra struktur oleh masyarakat		
--	--	--	--

C. PENUTUP

Pendidikan di Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jerman termasuk Negara favorit untuk siswa dan mahasiswa untuk menempuh pendidikan di sana. Karena pendidikannya yang luas dan lebih besar dengan biaya kehidupan yang tidak terlalu mahal dibandingkan dengan Negara lain. Bahkan di Jerman sendiri pendidikannya gratis terkecuali di perguruan tinggi.

Pendidikan di Jerman memiliki sistem yang sangat terintegrasi dan baik, jika dibandingkan dengan Negara-Negara maju lainnya, Jerman menerapkan sistem biaya pendidikan tinggi jauh lebih murah dan bahkan gratis. 90% dari seluruh Universitas di Jerman adalah Universitas Negeri yang dibiayai oleh pajak warga Negara Jerman dan sisanya sebanyak 10% Universitas swasta. Jika dibandingkan dengan Negara Indonesia biaya pendidikan sangatlah amat mahal semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka semakin tinggi pula biaya yang akan dikeluarkan. Karena kemampuan ekonomi Indonesia yang saat ini masih dikategorikan sebagai Negara berkembang, tentu saja menyebabkan banyak penghalang bagi siswa ataupun mahasiswa untuk meneruskan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Busse, R. (2018). *Health System Review*. (April).
- Habe, H., & AHIRUDDIN, A. (2017). Sistem Pendidikan Nasional. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>
- Hainm, B. (1991). *The Educational Structure Of The German School System*.
- Hammar, F. (2002). History Of Modern Genetics In Germany. *Advances In Biochemical Engineering/Biotechnology*. https://doi.org/10.1007/3-540-44604-4_1
- Hippach-Schneider, U., Krause, M., & Woll, C. (2007). *Vet In Germany*. European: Luxembourg: Office For Official Publications Of The European Communities.
- Kpm. (1988). Falsafah Pendidikan Negara. In *Kementrian Pendidikan*. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Meryam, A., & Usman, M. (2017). Keterampilan Menulis Kalimat Sederhana

- Bahasa Jerman Dengan Menggunakan Media Gambar Siswa Kelas Xi Ipa Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar. *Eralingua: Jurnal Pendidikan Bahasa Asing Dan Sastra*. <https://doi.org/10.26858/eralingua.V1i2.4404>
- Michallik, U. (2012). The Education System In The Federal Republic Of Germany. *Standing Conference Of The Ministers Of Education And Germany, Cultural Affairs Of The Länder In The Federal Republic Of*.
- Miera, F. (2008). Country Report On Education: Germany. *Edumigrom*.
- Naul, Roland; Dreiskamper, Dennis; Hoffmann, D. (2011). *Physical And Health Education In Germany*. Retrieved From https://www.uni-muenster.de/Imperia/Md/Content/Sportwissenschaft/Eu-Studies/Gkgk/Physical_And_Health_Education_In_Germany.Pdf
- Nurkholis, N. (1970). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*. <https://doi.org/10.24090/jk.V1i1.530>
- Pleshakova, A. Y. (2019). Germany's Dual Education System: The Assessment By Its Subjects. *Obrazovanie I Nauka*, 21(5), 130–156. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2019-5-131-157>
- Pratama, A. (2012). Difficulties Of Accrual Accounting Implementation In Indonesian Government: A Comparative Study. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2012.08.7162>
- Purwanta, H. (2016). Kajian Perbandingan Historiografi Pendidikan Di Amerika Serikat, Australia, Dan Indonesia. *Paramita: Historical Studies Journal*. <https://doi.org/10.15294/paramita.V25i2.5201>
- Syamsi, I. (2007). Pendidikan Khusus Dalam Kerangka Teori Dan Praktek Sistem Pendidikan Di Negara Jerman. *Dinamika Pendidikan*.
- Unesco - International Bureau Of Education. (2007). *World Data On Education: Germany*. (September), 78. Retrieved From <http://www.ibe.unesco.org/Countries/Wde/2006/Index.html>
- Van De Kaa, D. J. (1987). Europe's Second Demographic Transition. *Population Bulletin*.
- Zulfikar, T. (2018). The Making Of Indonesian Education: An Overview On Empowering Indonesian Teachers. *Journal Of Indonesian Social Sciences And Humanities*, 2(January 2010), 13–39. <https://doi.org/10.14203/jissh.V2i0.19>

BAB V

SISTEM PENDIDIKAN NEGARA DI PAKISTAN

Bayu Sugara

bayusugaraal@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi peradaban sebuah bangsa. Karena itulah, kemajuan sebuah bangsa, sejatinya tidak pernah lepas dari peranan pendidikan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap Negara di dunia. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus di tempatkan pada posisi yang tinggi. Begitu pentingnya pendidikan untuk kemajuan sebuah bangsa, tahun 1972 *The International Commission for Education Development* dari Unesco sudah mengingatkan bangsa-bangsa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan sebuah bangsa, harus dimulai dengan pendidikan sebab pendidikan adalah kunci. Tanpa kunci itu segala usaha akan sia-sia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang membuat Negara-negara maju memberi prioritas tinggi pada pendidikan, mengadakan modernisasi dan penyempurnaan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk meningkatkan anggaran pendidikan secara progresif.

Sistem pendidikan yang diterapkan setiap Negara memang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal seperti faktor sosio-kultural, lingkungan, historis, dan hal-hal lainnya. Dalam menerapkan sistem pendidikan, setiap Negara pasti memiliki pertimbangan selain faktor tersebut yakni tujuan pelaksanaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan penerapan sistem pendidikan yang sesuai akan mengarah pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan cita-cita ideal bangsa. Oleh karena itu penulis akan menguraikan tentang Sistem Pendidikan di Pakistan.

B. PEMBAHASAN

1. Profil Negara Pakistan

Pakistan adalah sebuah Negara yang terletak di Benua Asia, tepatnya di Benua Asia bagian Selatan (Asia Selatan). Negara yang bernama lengkap Republik Islam Pakistan ini memiliki Jumlah penduduk sebanyak 233.500.636 jiwa (2020). Jumlah penduduk yang sebanyak itu menjadikannya Negara yang menempati urutan ke-5 sebagai Negara dengan jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Hampir semua penduduk Pakistan memeluk agama Islam yaitu sebanyak 96,4% dari keseluruhan jumlah penduduknya. Agama Islam juga merupakan agama resmi Negara yang beribukota di Islam abad ini. Nama Pakistan yang dicetuskan Choudhary Rahmat Ali ini memiliki arti sebagai “Tanah yang murni” dalam bahasa Urdu dan Persia. “*Pak*” dalam bahasa Persia memiliki arti “murni” sedangkan “*stan*” dalam bahasa Persia dapat diartikan sebagai Tanah/tempat atau Negeri. Nama Pakistan ini juga merupakan singkatan dari beberapa etnis utama di Pakistan yaitu Punjab, Afgan, KashmIr, Sindh, dan Baluchistan. Choudhary Rahmat Ali

adalah seorang Nasionalis Muslim Punjabi Pakistan yang memperjuangkan pembentukan Negara Pakistan.

Secara Astronomis, Pakistan berada diantara 20° LU – 37° LU dan 66° BT – 75° BT. Pakistan yang memiliki luas wilayah sebesar 796,095 km² ini berbatasan dengan Afganistan dan Iran di sebelah Barat, sedangkan di sebelah Timurnya berbatasan dengan India. Di sebelah Utara, Pakistan berbatasan dengan China dan di sebelah Selatan adalah Laut Arab dan Teluk Oman. Gunung tertinggi kedua di dunia yaitu gunung K2 atau gunung Godwin Austen yang memiliki ketinggian 8.611 meter ini terletak di perbatasan Pakistan dan China.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Pakistan adalah sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer. Dengan sistem pemerintahaan tersebut, Kepala Negara Pakistan adalah seorang Presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh Lembaga Pemilihan Presiden (*Electoral College*) untuk masa jabatan 5 tahun (dapat dipilih kembali). Lembaga Pemilihan Presiden ini terdiri dari anggota senat, majelis Nasional dan majelis Provinsi. Sedangkan Kepala Pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh Majelis Nasional Pakistan setiap 5 tahun sekali.

Di bidang Perekonomian, Pakistan memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar US\$ 1,061 triliun dengan Pendapatan Perkapita sebesar US\$ 5.400,- pada tahun 2017. Industri yang menopang perekonomian Pakistan diantaranya adalah Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri pengolah makanan, Farmasi, bahan-bahan konstruksi, produk-produk kertas dan pupuk. Beberapa komoditas pertanian penting dihasilkan oleh Pakistan diantaranya seperti kapas, gandum, tebu, buah-buahan, sayur-sayuran, telur, susu, sapi dan kambing.

Di hubungan luar negeri, Pakistan merupakan Negara anggota PBB dan lembaga-lembaga dibawahnya seperti FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ILO, IMF, ITU, UNESCO, UNWTO, UPU, WHO, WCO, WIPO, WMO dan WTO. Pakistan juga merupakan anggota Asian Development Bank (ADB), Developing Eight (D-8), Organisation of Islamic Cooperation (OIC) dan Economic Cooperation Organization (ECO).

Pada abad ke-16 masa dinasti Mughal menguasai seluruh wilayah anak benua India dengan rajanya yang pertama bernama Babur, yang merupakan keturunan dari Timur Lenk (1530 M). Hanya saja kejayaan dinasti Mughal hancur bersamaan dengan masuknya Inggris di India. Singkatnya, pada tahun 1757, Serikat Dagang Hindia Timur Inggris menaklukkan dinasti Mughal. Serikat Dagang ini menguasai sebagian besar anak benua India. Tahun 1858 pemerintah Inggris mengambil alih tanggung jawab pemerintahan menyusul pemberontakan tentara asli India yang direkrut pasukan Bengal.

Nasionalisme Pakistan berawal ketika terjadinya pertentangan antara Hindu dan Islam (persoalan Agama). Pertentangan ini terjadi karena umat Islam merasa bahwa mereka diabaikan oleh Kongres Nasional India Bersatu tahun 1885 yang didominasi oleh orang-orang Hindu di dalamnya. Setelah perang dunia I, pihak Islam mulai membuat suatu gerakan dengan membangun konsolidasi internal dalam rangka melepaskan diri dari India, yakni menuntut kemerdekaan.³ Sebagai langkah konkritnya, pada tahun 1857 Syed Ahmed Khan (1817-1898) mendirikan

gerakan Aligarh, dengan tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan kaum Muslim. Namun gerakan ini tidak bertahan lama dan pada akhirnya bubar, serta Inggris kemudian berhasil memperlemah dan menekan kaum Muslim.

Kemudian, beberapa sarjana Muslim India yang pernah belajar di Barat telah mendirikan sebuah organisasi politik yang disebut Liga Muslim India (*India Muslim League*) di Dhaka pada 1906. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan komunitas Muslim India di bidang keagamaan, budaya, politik dan ekonomi. Pada saat yang sama, tokoh Hindu ekstrem membangun gerakan Shuddi dan Sangathan berupaya menghindukan umat Islam secara paksa.

Langkah konkrit selanjutnya, dilakukan oleh seorang penyair dan filsuf besar Islam Muhammad Iqbal pada tahun 1930. Ia mengusulkan untuk membentuk Negara terpisah di sub-kontinen yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Usul tersebut didukung oleh Muhammad Ali Jinnah (seorang pengacara berpendidikan Inggris). Selanjutnya, ketika Liga Muslim dipimpin Muhammad Ali Jinnah, organisasi ini mengusulkan dibentuknya sebuah Negara Muslim yang terpisah dari India di daerah Barat Laut dan Timur Laut India yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara inilah yang pada akhirnya disebut Pakistan.⁴

Rencana pembentukan Negara Islam merdeka yang lepas dari India, mendapat kecaman keras dari Jami'at al-Ulama (Perkumpulan Ulama-ulama India). Menurut mereka, pembentukan Negara Pakistan yang terpisah dari India tidak akan menyelesaikan permasalahan. Alasan tersebut didasarkan pada fakta bahwa di India terdapat banyak umat Islam yang telah lama hidup berdampingan dengan baik. Kaum agama tersebut melakukan persekutuan dengan para tuan tanah. Di bawah pemerintahan Inggris mereka dikukuhkan atas hak kepemilikan tanah mereka, melindungi dari persaingan kepentingan finansial dengan pihak Hindu, bahkan beberapa tanah tambahan diberikan kepada mereka.

Dalam sejarah perkembangan Negara Pakistan, terjadi konflik kepentingan serta perbedaan etnis dan agama yang menyebabkan konflik internal berkepanjangan antara penduduk yang beragama Islam dan Hindu-Budha. Hal ini menyebabkan pertumpahan darah yang sulit untuk dihindari oleh kedua kelompok tersebut.⁵ Pada tahun 1940 Liga Muslim, mendesak para pemuka agama bahwa apapun kepentingan lokal mereka, sebuah Negara Islam yang dijalankan oleh Muslim untuk mempertahankan prinsip-prinsip pola kehidupan muslim, yang mutlak diperlukan.

Dalam rapat tahunan Liga Muslim pada tahun 1940, kaum menyetujui pembentukan Negara, dengan nama Pakistan.⁶ Dengan dasar persetujuan yang jelas ini, Liga Muslim mendapat dukungan yang luar biasa dari umat Islam dan kedudukannya semakin bertambah kuat. Adapun sebaliknya, tokoh-tokoh Muslim yang bernaung di bawah partai Kongres Nasional India kehilangan pengaruhnya, bahkan sebagian mereka meninggalkan partai Kongres tersebut dan kemudian bergabung dengan Liga Muslim. Dengan demikian Ali Jinnah dan Liga Muslim

semakin bertambah kuat, hal ini terlihat dari hasil perolehan suara terbanyak di beberapa daerah dalam pemilihan tahun 1946.

Sebelumnya, Inggris pada tahun 1945 mulai membicarakan kemerdekaan India, namun selalu mengalami kegagalan. Pada akhirnya Inggris memutuskan untuk membentuk pemerintahan sementara yang ditentukan oleh Inggris. Usaha ini ditentang oleh Ali Jinnah, karena penyusunan pemerintahan sementara dilakukan dengan sepihak, sehingga menimbulkan kericuhan. Menurut Ali Jinnah, dengan melihat situasi seperti ini tidak mungkin diadakan sidang Dewan Konstitusi pada bulan Desember 1946. Setahun kemudian keluarlah putusan Inggris untuk menyerahkan kedaulatan kepada dua dewan konstitusi, satu untuk Pakistan dan satu untuk India. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Dewan Konstitusi Pakistan dibuka dengan resmi, dan ke esokan harinya tanggal 15 Agustus 1947 Pakistan lahir sebagai Negara berdaulat bagi umat Islam. *Ali Jinnah* diangkat menjadi Gubernur Jendral dan mendapat gelar *Qaizi „Azam* (pemimpin besar)⁷ dari rakyat Pakistan.

2. Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Negara Pakistan

Negara Pakistan terbentuk akibat pemisahan dari pemerintahan India pada 14 Agustus 1947. Sejak awal abad ke-19, Inggris mulai mendominasi wilayah tersebut. Peristiwa ini berkaitan erat dengan perjuangan kaum muslim di India. Di antara Negara-Negara muslim yang lahir sekitar abad 20, Pakistan merupakan satu-satunya Negara yang didirikan atas nama Islam. Pakistan merupakan Negara demokratis yang aturan politiknya dirancang sesuai sistem demokrasi (Bilal & Malik, 2014: 20).

Negara ini muncul setelah mendapatkan kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Inggris. Keputusan untuk diadakan pemisahan antara Negara India dan Pakistan muncul karena warga Negara Pakistan merasa bahwa mereka memiliki identitas Nasional yang berbeda. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan agama. Sedangkan perbedaan yang kedua yaitu mengenai perbedaan Ideologi mereka sebagai umat muslim. Tujuan utama dari pembentukan Negara otonom Pakistan adalah untuk melindungi hak-hak politik dari populasi warna Negara muslim di Asia Selatan. Pada awal pendirian Negara, Pakistan mengalami berbagai konflik etnis serta kerusuhan yang didasari oleh perbedaan bahasa, pergolakan politik, korupsi, dan kemiskinan (Dean, 2005: 36).

Pakistan merupakan Negara muslim terbesar kedua di dunia yang berbentuk Republik. Mayoritas penduduk Pakistan adalah muslim (97%), dimana 10%-15% diantaranya merupakan syiah Istna Asya'ariyah (dua belas imam). Di Pakistan mayoritas muslimnya merupakan muslim Sunni namun terdapat minoritas muslim dengan sekte syiah Isma'illiyah di wilayah Karachi, wilayah barat laut Gilgit, dan Bohoras. Sekte ini berpusat di Bombay, India. Meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Pakistan, namun sebagian kecil warga menganut agama Kristen, Hindu, dan Persi. Penduduk Pakistan berasal dari lima kelompok etnis yang berbedaya, yakni Punjabi, Sindhi, Pathan, Baluch, serta Muhajir (Imigran berbahasa Urdu dan India sebelum terjadinya perpecahan). Jika ditinjau dari segi mazhab yang dianut, sebagian besar warga Negara Pakistan menganut Mazhab

Hanafi, sedangkan sebagian kecil lainnya merupakan pengikut Mazhab Hambali (Ajid Thohir, 2012: 212).

Bahasa umum yang digunakan oleh penduduk Pakistan adalah bahasa Urdu yang diakibatkan oleh akumulasi etnik dan campuran berbagai budaya terutama Persia, Turki, India, Arab. Pengaruh sufisme semakin mengukuhkan posisi bahasa Urdu sebagai salah satu bahasa populer di kalangan umat Islam Pakistan, terutama dalam mengisi dan mengembangkan kelembutan cita rasanya dalam berbagai karya sastra, yang mencerminkan kualitas dan kepadatan makna secara filosofis dan alegoris dari bahasa tersebut (Sayyid Husain Nasr, 1993: 122).

Untuk memahami dinamika pendidikan kewarganegaraan, perlu memahami konteks ekonomi, sosial, dan budaya di Pakistan. Terdapat keragaman di Negara ini dalam hal agama, kasta, kelas, maupun bahasa. Masyarakat di masing-masing provinsi menggunakan bahasa pergaulan yang berbeda, memakai pakaian yang berbeda, serta memiliki prioritas dan gaya hidup yang berbeda. Budaya Pakistan dipengaruhi oleh budaya masyarakat Islam dengan sistem nilai yang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai Negara Inggris (Bilal & Malik, 2014: 20).

Pendidikan merupakan hak konstitusional semua warga Pakistan, namun tidak ada pendidikan gratis atau wajib di Negara ini. Situasi ini memunculkan dua kecenderungan dalam sistem pendidikan Pakistan. *Pertama*, adalah lahirnya sekolah swasta (bersifat profit) dan sekolah publik (bersifat nonprofit). *Kedua*, kecenderungan sekolah untuk menerapkan sistem matrikulasi. Pemerintah Pakistan tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap pengembangan bidang pendidikan. Sebagai salah satu Negara penting di Asia Selatan, Pakistan masih berkebutakan meningkatkan tingkat melek huruf sebesar 60%. Persentase melek huruf di Pakistan bisa dikatakan sangat rendah jika dibandingkan dengan China, Turki, maupun Negara-Negara lain di kawasan Asia Tengah (Bilal & Malik, 2014: 21).

Setiap Negara tentunya mempunyai sistem pendidikan yang telah dirancang oleh pemerintahnya dengan rancangan yang sekiranya baik dan pantas diterapkan di Negeranya tersebut, terutama sistem pendidikan formal. Seperti halnya sistem pendidikan di tanah air kita yang berawal dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan lanjut tingkat perkuliahan. Dalam artikel ini penulis akan membahas tentang sistem pendidikan di Pakistan.

Ketika Pakistan mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Agustus 1947, pemerintahnya segera mulai merancang dan memperhatikan pendidikan warga Pakistan dengan mengadakan konferensi di kota Karachi pada tanggal 27 November sampai 1 Desember 1947. Dari konferensi tersebut diambil beberapa poin utama yaitu:

- a. Integrasi antara elemen moral, sosial dan kejurusan dalam sistem Pendidikan
- b. Mewajibkan sekolah dasar
- c. Mewajibkan pendidikan jasmani
- d. Mewajibkan latihan militer pada kelas *college*
- e. Pelatihan kemasyarakatan
- f. Problem buta huruf

- g. Problem kapabilitas pengajaran
- h. Teknik dan kejurusan Pendidikan
- i. Pendirian Badan Penasihat Pendidikan
- j. Promosi riset keilmuan
- k. Pendirian badan pelayanan beasiswa

Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Januari 1959 didirikan Komisi Pendidikan Nasional (*The Commission on National Education*) yang diresmikan oleh Presiden Pakistan pada saat itu yaitu Muhammad Ayub Khan. Komisi tersebut sebagai badan yang bertanggung jawab atas segala yang berkaitan dengan pendidikan Pakistan. Sekarang komisi tersebut berubah nama menjadi HEC (*Higher Education Commission*). Dari komisi tersebut dirancang sistem pendidikan yang ada di Pakistan, terutama pendidikan formal.

Komisi Pendidikan Nasional Pakistan berperan dalam merekomendasikan lahan, gedung, furnitur, dan segala segala fasilitas pendidikan termasuk akomodasi untuk para guru.

3. Sistem Pendidikan Negara Pakistan

a. Kurikulum Pendidikan

Pedoman kurikulum pendidikan kewarganegaran di Pakistan terpengaruh oleh ideologi Islam. Sementara tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan bukan hanya menyiapkan warga Negara yang baik, namun juga membentuk warga Negara yang taat Islam (Ahmad, 2008: 104). Sistem kurikulum dibagi menjadi dua sistem, yaitu swasta dan publik. Terdapat kesenjangan antara dua sistem tersebut. Meskipun sekolah swasta diberi hak untuk membuat kurikulum sendiri, namun harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Sekolah yang tidak melaksanakan pedoman kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, akan mendapatkan sanksi dari Dewan Pemerintahan Provinsi (Bilal & Malik, 2014: 24).

Untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional kurikulum di Pakistan dipusatkan pada akuisisi ilmu pengetahuan. Konten utama dalam kurikulum Pakistan adalah pendidikan agama dan ilmu sosial. Konten agama disini lebih menonjol dibandingkan konten kurikulum yang lain. Adapun fokus kurikulum yaitu penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik. Hampir setiap bab dalam buku teks bertujuan untuk mengembangkan sikap saling menghormati. Di kelas tiga misalnya, dikembangkan sikap untuk saling menghormati, kesetaraan martabat manusia, kemandirian, kerja keras, saling ketergantungan antara sesama, kerja sama, pentingnya kepribadian dan jati diri (Ministry of Education, 2002: 2126). Kurikulum mencakup kombinasi dari delapan program termasuk program pilihan (seperti Biologi, Kimia, dan Fisika Komputasi) serta mata pelajaran wajib (seperti Matematika, Bahasa Inggris, Urdu, Islam dan Studi Pakistan).

b. Muatan Kajian PKn

Sebagai sebuah Negara pasca kolonial, Pakistan mengakui peran penting PKn dalam pembentukan warga Negara yang patriotik. Namun, dalam rangka membentuk identitas warga Negara muslim, pemerintah berusaha menghindari transmisi nilai-nilai universal demokrasi seperti kebebasan individu, kesetaraan gender, pemikiran kritis, serta penghormatan terhadap keragaman agama dan budaya. Menurut Iftikhar Ahmad (2004) ada empat aspek yang perlu ditinjau untuk melihat konteks perkembangan PKn di Pakistan: 1) Pakistan merupakan Negara yang militeristik, 2) Pakistan masih dalam keadaan darurat perang dingin, 3) ekstrimisme agama dan, 4) feodalisme.

Ditinjau dari konteks militer, sejarah Pakistan yang silih berganti dari rezim militer dan sipil menyebabkan tujuan utama kurikulum PKn di sekolah-sekolah bergeser dari pembentukan warga Negara yang baik menjadi pembentukan warga Negara yang siap perang. Maraknya konflik dan kerusuhan juga mempengaruhi konten dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di Pakistan. Feodalisme juga menjadi salah satu faktor yang menghalangi transmisi nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum PKn di Pakistan.

Ada kompetisi visi dalam kurikulum PKn antara kaum agamis dan Nasionalis. Adapun visi yang diperjuangkan oleh masing-masing pihak yakni visi teokratis dan visi demokratis-liberal. Pasca serangan terorisme di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, Jendral Musharraf meluncurkan agenda reformasi liberal. Fokus utama usulan reformasi ialah perubahan terhadap konten pendidikan kewarganegaraan (Ahmad, 2004:41). Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan Pakistan adalah menciptakan warga Negara Islam yang Nasionalis. Warga Negara yang taat Islam dan memiliki rasa Nasionalis terhadap Pakistan. Tujuan tersebut berusaha dicapai dengan menghubungkan antara pengembangan sikap patriotik sebagai warga Negara dengan nilai-nilai luhur sebagai pemeluk agama Islam. Islamisasi yang terjadi di Pakistan pada periode tahun 1970-an, telah membentuk identitas Nasional yang identik dengan identitas muslim (Dean, 2004: 9).

Pedoman dari kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Pakistan diwarnai oleh nuansa ajaran Islam yang sangat kental. Pendidikan kewarganegaraan di Pakistan bukan hanya ditujukan untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang baik, namun juga membentuk peserta didik menjadi warga Negara yang taat Islam (Ahmad, 2008: 104). Sebagaimana tercetus istilah dari para agamis bahwa 'warga Negara yang baik adalah Muslim yang taat'. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, Pakistan belum membuat draf mengenai konten pembelajaran PKn secara jelas sebagai bagian dari kurikulum pendidikan Nasional. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan hanya bersifat opsional dan tidak diwajibkan untuk diajarkan pada setiap tingkat pendidikan. Adapun bahasa yang digunakan sebagai media pembelajaran PKn yaitu bahasa Urdu dan bahasa Inggris (Bilal & Malik, 2014: 24).

Pendidikan kewarganegaraan di Pakistan diintegrasikan ke dalam ilmu sosial, sebagai bagian dari ilmu sejarah dan geografi. Nilai-nilai pengembangan masyarakat dan keluarga turut diajarkan melalui ilmu sosial namun pendidikan kewarganegaraan kehilangan konten sebagai mata pelajaran yang bertujuan mengajarkan hak dan tanggung jawab warga Negara serta memahami warga akan perannya dalam pengembangan masyarakat. PKn di Pakistan juga tidak mengajarkan mengenai hak asasi manusia, ilmu politik, maupun isu-isu global sebagaimana seharusnya (Bilal & Malik, 2014: 23).

Terkait dengan pengembangan buku teks, Ahmad (2004) menguraikan bahwa buku teks diterbitkan berdasarkan pedoman kurikulum Nasional dengan penekanan pada ideologi Islam namun konten yang terkandung di dalamnya dinilai tidak sensitif terhadap kaum non-muslim dan perempuan. Tujuan, konsep, konteks, kegiatan, hasil, dan evaluasi pembelajaran PKn juga terintegrasi dalam kurikulum Nasional sebagai studi ilmu sosial. Pengantar kurikulum sebagaimana yang dicantumkan oleh Departemen Pendidikan Pakistan menekankan perkembangan hak-hak sipil dalam masyarakat, konsep mengenai hak dan tanggung jawab warga Negara, keterampilan berpikir kritis dalam kerangka Islam, pemecahan masalah, kemandirian, identitas, dan persatuan Nasional (Dean, 2005:39).

Pemerintah Pakistan baru-baru ini mengumumkan niatnya untuk mereformasi kurikulum IPS. Namun, partai-partai agama yang memiliki visi teokratis menolak dengan gigih upaya reformasi pemerintah. Jika pemerintah Pakistan berhasil mereformasi konten pendidikan kewarganegaraan yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam, dan berhasil memasukkan nilai-nilai demokrasi liberal ke dalam kurikulum ilmu sosial, maka hal ini akan memberikan implikasi untuk pendidikan kewarganegaraan pada umumnya dan pembentukan etos warga pada khususnya (Ahmad, 2004: 42).

1. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan Pakistan

Terjadi konflik dan tarik-ulur kepentingan dalam penyusunan struktur dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Pakistan antara kaum agamis dan kaum Nasionalis. Kaum agamis mengemban visi teokratis sedangkan kaum Nasionalis menjunjung visi liberal-demokratis. Ketidaksepakatan antara kedua perspektif tersebut diakibatkan oleh vitalnya kedudukan agama Islam dalam konstitusi dan ideologi Negara (Ahmad, 2008: 97-98). Partai-partai agama, pihak konservatif, dan militer telah memainkan peran penting dalam mempromosikan ideologi Islam dalam penyusunan kebijakan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Pakistan. Tujuan penyajian Islam sebagai ideologi Negara adalah untuk:

- a. Menyucikan peran politik mereka dalam masyarakat
- b. Melemahkan lawan politik
- c. Menggembelng kekuatan sosial di Pakistan terhadap serangan India dan Barat
- d. Melindungi kepentingan politik (Haque, 1987).

Secara lebih rinci Kurikulum Nasional juga menyajikan tujuan kewarganegaraan sebagai berikut.

- Untuk mengembangkan pemahaman tentang sifat sosial dan pentingnya konsep pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sipil.
- Untuk menekankan tema pembelajaran terkait dengan penumbuhan kreativitas, rasa ingin tahu, pengembangan kemampuan untuk menanya, mengobservasi, dan mengeksplorasi.
- Untuk menciptakan kesadaran tentang hakikat kehidupan sipil dan hubungan antara kewarganegaraan dengan ilmu sosial lainnya.
- Untuk menanamkan rasa syukur yang kuat kepada Allah SWT atas berkat dan hidayah-Nya telah memberikan kemerdekaan pada Pakistan.
- Untuk mempromosikan pemahaman warga Negara tentang ideologi Pakistan dan perjuangan umat muslim untuk membentuk Negara Islam Independen.
- Untuk menanamkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai warga Negara yang baik (*good citizenship*), kemandirian, patriotisme, dan jiwa kepemimpinan.
- Untuk menciptakan integrasi dan rasa persatuan Nasional yang kuat.
- Untuk mempersiapkan siswa sebagai warga Negara masa depan, yang sadar akan peran positif mereka dalam masyarakat Islam pada khususnya dan dunia pada umumnya (Ahmad, 2008: 102).

Paradigma Islam dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan telah dipromosikan di berbagai sekolah. Namun, pengaruh Amerika di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir, membuat arah pendidikan kewarganegaraan juga mulai bergeser ke arah liberal-demokratis. Oleh karena itu, pemerintah sudah memulai melakukan pengkajian ulang terhadap posisi dan kedudukan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum Nasional. Penguatan visi liberal-demokratis telah memicu perdebatan ideologis baru mengenai kedudukan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan kontemporer di Pakistan (Mustafa, 2004).

Para pendukung visi teokratis berusaha untuk mempromosikan didirikannya Negara Islam yang diiringi dengan pengkajian pendidikan kewarganegaraan dalam konteks agama. Dalam visi teokratis, seorang warga Negara yang baik adalah muslim yang mengikuti ajaran agama Islam di kedua domain publik dan swasta. Melalui orientasi teokratisnya, partai-partai Islam di Pakistan berusaha untuk memperkuat diri dengan memperkuat ideologi Islam (Munir, 1979; Sheikh, 1995). Menurut doktrin ini, kurikulum pendidikan kewarganegaraan Nasional harus mencakup pengetahuan dan konten dari *Al-Quran* dan *Hadis* (perkataan Nabi Muhammad) serta memuat nilai-nilai moral Islam untuk membangun karakter siswa (Maududi, 1979; Nayyar, 2003). Menurut sudut pandang kaum teokratis, warga Negara yang baik adalah warga muslim yang baik (Pemerintah Pakistan, 2002).

Sebaliknya, sudut pandang kaum liberal-demokratis mendefinisikan konsep warga Negara yang baik sebagai warga Negara yang rasional dan demokratis, yang hidup dengan cita-cita demokrasi. Kaum liberal demokratis menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dan memandang bahwa akuisisi pengetahuan agama tidak diperlukan untuk mendefinisikan baik atau tidaknya

warga Negara (Nayyar, 2003). Kaum liberal-demokratis menolak visi kaum teokratis untuk membangun bentuk abad pertengahan Negara Islam di Pakistan. Mereka berpendapat bahwa usaha penerapan visi teokratis tidak hanya menghambat kemajuan manusia, namun juga tidak menghormati hak-hak warga non-muslim dan hak-hak wanita yang berstatus sama sebagai seorang warga Negara (Ahmad, 2004: 97).

Pertentangan antara visi teokratis dan liberal demokratis juga dapat dilihat sebagai perbedaan bentuk antara Nasionalisme Islam dan Nasionalisme Pakistan. Nasionalisme Islam pada dasarnya merupakan gerakan Islam radikal yang berusaha mencapai kesatuan politik antara umat muslim di seluruh dunia. Kaum Nasionalis Islam mengusulkan pandangan dunia dualis serta membagi dunia menjadi dua wilayah yaitu: tanah damai (*Dar-al-Islam*) dan tanah perang (*Dar-al-Harb*). Mereka menegaskan bahwa mengobarkan jihad atau perang suci melawan orang-orang kafir atau Negara non-muslim adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran agama Islam. Pandangan dunia teokratis menempatkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dengan memasukkan visi melalui konten dan struktur kurikulum pendidikan ilmu sosial (Ahmad, 2004: 99).

Kurikulum pendidikan kewarganegaraan menjadi area konflik antara para pendukung visi teokratis dan para pendukung visi liberal-demokratis. Mengingat pengaruh negatif yang ditimbulkan dari ekstremisme agama dalam kehidupan perpolitikan Pakistan, maka Jenderal Musharraf meluncurkan agenda reformasi sosial liberal. Jenderal Musharraf berusaha mempromosikan nilai-nilai patriotisme dan gambaran Islam yang lebih damai, baik di dalam maupun di luar Pakistan. Fokus utama dari agenda reformasi ini adalah perubahan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Niat pemerintah untuk mengkaji ulang kurikulum ilmu sosial, memicu hiruk pikuk dari kalangan partai konservatif Islam yang menolak paham demokrasi liberal dan menganggapnya sebagai bagian dari konspirasi Amerika. Mereka melakukan protes dan demonstrasi di jalanan, menuntut pemerintah untuk tidak melakukan intervensi kebijakan mengenai konten dan struktur kurikulum Nasional. Kaum teokratis dan partai-partai Islam menuduh kaum liberal-demokratis, terutama Presiden Jenderal Musharraf, sebagai promotor sekularisme Barat (Pakistan Press International, 2004; Sarwar, 2004).

Meskipun kurikulum Nasional Pakistan berisi ide-ide tentang kewarganegaraan demokratis dan dianggap sebagai sebuah dokumen yang komprehensif, namun konsep demokrasi dan nilai-nilai kewarganegaraan pada kurikulum Pakistan di nilai belum lengkap. Nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan disertakan dalam kurikulum, tetapi konten utama demokrasi dan kewarganegaraan dalam kurikulum tampaknya bersinggungan dengan tujuan utama dari kurikulum Nasional. Buku teks untuk pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Nasional Pakistan (*Muasherati Uloom*) tidak menyebutkan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai demokrasi. Namun buku teks menyebutkannya sebagai “nilai-nilai demokrasi Islam”. Jadi para pembuat kebijakan kurikulum sebenarnya tidak sepenuhnya menolak konsep demokrasi, namun konsep

demokrasi tersebut harus dijalankan sesuai dengan kerangka Islam. Nilai-nilai seperti kebebasan individu, kebebasan beragama, serta kesetaraan gender tidak disertakan dalam kurikulum karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun sosialisasi pendidikan kewarganegaraan pada umumnya terjadi dalam domain afektif. Kurikulum Nasional menekankan pendekatan Islam dalam pembelajaran mengenai tema pemerintahan, Negara, kewarganegaraan, hak dan tanggung jawab. Berikut ini adalah contoh dari tujuan kurikulum dalam domain afektif untuk siswa kelas 9-12:

- Untuk menciptakan rasa cinta terhadap ajaran Islam.
- Untuk mengembangkan bentuk kewarganegaraan Islam yang meliputi berbagai syarat untuk menjadi Negara Islam seutuhnya
- Untuk mendorong kemajuan Negara Islam madani.
- Untuk mempromosikan dorongan dan semangat penerapan ajaran Islam.
- Untuk menunjukkan rasa cinta terhadap ajaran hidup Islam.
- Untuk menunjukkan bukti bahwa pemerintah menghormati dan menjunjung nilai-nilai Islam.
- Untuk mengembangkan rasa cinta pada ideologi Pakistan.
- Untuk meningkatkan rasa cinta dan rasa hormat terhadap hukum tertinggi Allah SWT.
- Untuk menunjukkan keimanan sebagai bagian dari ideologi Pakistan.
- Untuk mempromosikan rasa hormat pada kode etik dan cara hidup Islam (Ahmad, 2008: 103).

Penekanan pendidikan Islam dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan Pakistan menunjukkan bahwa kurikulum Pakistan tidak membuat perbedaan antara pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Mengingat keragaman dalam masyarakat Pakistan, kurikulum ini menuai banyak masalah dan kontroversi, terutama dari kalangan non-muslim.

2. Buku teks

Setelah dilakukan penjabaran tujuan, isi, dan struktur kurikulum ke dalam buku pelajaran oleh dewan buku provinsi, maka sekolah diharuskan untuk menggunakan buku pelajaran dari pemerintah (terkecuali untuk siswa di beberapa sekolah swasta). Jika menganalisis konten pendidikan kewarganegaraan dalam buku teks yang dipakai oleh sekolah-sekolah di Pakistan, terdapat kritikan tajam akan kurangnya ilustrasi dalam buku teks tersebut. Buku pelajaran untuk kelas tujuh misalnya, hanya memiliki 6 ilustrasi dalam buku setebal 107 halaman.

Adapun konsep-konsep utama pendidikan kewarganegaraan yang diulas dalam buku teks antara lain:

- a. Pakistan merupakan Negara demokratis. Pemerintahan tertinggi berasal dari rakyat dan dijalankan oleh perwakilan rakyat di parlemen.
- b. Pakistan adalah Negara Islam. Islam merupakan agama dan ideologi politik Pakistan. Warga Negara yang baik diartikan sebagai warga muslim yang baik. Adapun muslim yang baik adalah orang yang bertaqwa, rajin berdoa,

berpuasa, memberi sedekah kepada orang miskin, dan berbuat baik dalam keluarga maupun masyarakat.

- c. Pentingnya nilai patriotisme. Patriotisme harus diperluas oleh pemerintah yang berkuasa. Patriotisme ini juga harus dipromosikan tidak hanya dalam ruang lingkup Negara Pakistan namun juga diperluas ke Negara-Negara muslim lain.
- d. Pakistan memiliki budaya homogen. Pakistan memiliki rasa kebanggaan karena memiliki satu budaya, satu agama, satu bahasa, dan memiliki cara berpakaian yang sama.
- e. Pemerintah yang berkuasa bertanggung jawab mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan Nasional (Ahmad, 2008: 101).

c. Sistem Pendidikan Nasional

Dinamika sistem pendidikan Nasional di Pakistan tidak dapat dipisahkan dari konflik kepentingan antara pihak yang menginginkan Islam sebagai dasar dan tujuan pendidikan Nasional, dan pihak yang menghendaki nilai-nilai sekuler demokrasi sebagai landasan dan tujuan pendidikan Nasional. Dalam konferensi pendidikan di Pakistan, Fazlur Rahman sebagai utusan Menteri Pendidikan Pakistan, menyatakan bahwa tujuan pendidikan dalam sebuah masyarakat demokratis harus memasukkan berbagai elemen seperti: elemen fisik, sosial politik, dan spiritual. Elemen spiritual merupakan elemen yang paling penting karena elemen spiritual membantu membersihkan pikiran yang tidak manusiawi dan membentuknya menjadi pola pikir humanis (Dean, 2000:86).

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1947, Pakistan mengalami transisi politik setiap sepuluh tahun sekali dan diikuti dengan pengembangan kebijakan pendidikan baru. Setiap kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik dan mempersiapkan warga Negara untuk menjadi warga Negara yang baik. Namun, pertentangan ideologi dan konsepsi kewarganegaraan antara kaum agamis dan kaum liberal menimbulkan kerancuan dan ketidak jelasan arah pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Ideologi pemerintah dan konsepsinya mengenai kewarganegaraan mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan.

1. Konferensi Pendidikan 1947

Setelah kemerdekaan, Pakistan menghadapi berbagai masalah yakni konflik komunal, kerusuhan bahasa, dan kekerasan. Dalam situasi yang diwarnai oleh kegentingan politik, pemerintah dituntut untuk merumuskan target jangka panjang dari pembangunan Nasional. Salah satu target pembangunan jangka panjang Pemerintah Pakistan adalah reorientasi sistem pendidikan kolonial yang sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat serta sejalan dengan sejarah dan budaya Pakistan tanpa mengesampingkan kondisi perkembangan dan modernisasi yang terjadi di seluruh dunia (Ministry of the Education Division, 1947: 5).

Sistem pendidikan pada masa ini dimaksudkan untuk membentuk “Negara demokrasi moderen” dan mendidik warga Negara baik secara fisik, mental, maupun karakter, untuk menjalani kehidupan yang baik bagi diri mereka

sendiri dan meningkatkan martabat kehidupan orang lain. Hal ini dapat diraih dengan penerapan prinsip-prinsip Islam, yaitu: persaudaraan universal manusia, demokrasi sosial, keadilan sosial, kebajikan demokrasi, toleransi, sikap saling tolong menolong, dan sikap mau berkorban bagi kepentingan orang banyak.

Fazlur Rehman, Menteri Pendidikan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan dalam masyarakat demokratis haruslah bersifat holistik. Ia menyarankan penambahan konten materi mengenai pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, pendidikan harus berfungsi untuk memahami warga tentang dinamika politik Pakistan, tidak peduli apa partai yang dianut, agama yang diyakini, maupun wilayah tempat tinggal (Ministry of Education, 1947: 8). Dengan demikian, konferensi pendidikan Pakistan menginginkan sebuah sistem pendidikan yang membekali dan mempersiapkan warga dengan pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk bisa menciptakan masyarakat yang demokratis.

2. Kebijakan Pendidikan Baru 1972-1980

Pendidikan secara radikal berubah arah setelah pemerintahan Bhutto digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 1977. Pemerintah Darurat Militer Jenderal Zia-ul-Haq mengumumkan kebijakan Pendidikan Nasional baru pada tahun 1979. Tujuan kebijakan itu adalah untuk meng-Islamisasi masyarakat, dan pendidikan kewarganegaraan yang ditujukan untuk mengembangkan warga Negara yang taat Islam. Kekhawatiran akan pecahnya provinsi Pakistan Barat dan Pakistan Timur membuat tujuan pendidikan Nasional diarahkan pada peningkatan upaya persatuan Nasional dengan mempromosikan harmonisasi sosial dan kebudayaan Pakistan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah memutuskan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kebijakan ini juga ditindak lanjuti pemerintah dengan pengambilan berbagai kebijakan radikal, diantaranya Nasionalisasi seluruh sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola oleh pihak swasta dan dorongan pada setiap warga Negara untuk dapat berpartisipasi pada level pendidikan dasar. Pemerintah juga mendirikan Biro Kurikulum Nasional untuk merevisi kurikulum pendidikan Nasional. Kurikulum ini diperuntukkan bagi peserta didik di kelas 9 dan 10 dalam rangka menumbuhkan nilai patriotisme dan persatuan Nasional (Ministry of Education, 1972: 6-35).

3. Kebijakan Pendidikan Nasional dan Kurikulum Tahun 1979

Sistem pendidikan Pakistan mengalami perubahan secara radikal pada tahun 1979 di bawah Pemerintahan Darurat Militer yang dipimpin oleh Zia-ul-Haq. Kurikulum di masa ini bertujuan untuk membentuk kembali masyarakat berdasar pada ajaran-ajaran Islam. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di masa ini untuk mengembangkan warga menjadi seorang muslim sejati. Revisi kurikulum menjadi prioritas tertinggi pemerintah Pakistan. Pendidikan Islam

diberikan kepada generasi muda supaya mereka dapat meresapi pemikiran dan ideologi Islam (Ministry of Education, 1979:2).

4. Kebijakan Pendidikan Nasional 1998-2010

Tujuan dari Kebijakan Pendidikan Nasional 1998-2010 serupa dengan kebijakan tahun 1979, yaitu untuk menciptakan “masyarakat Islami” melalui pendidikan yang berfungsi sebagai instrumen untuk pengembangan serta pemenuhan kebutuhan spiritual manusia. Untuk mendukung tujuan ini, pendiri Pakistan dalam Konferensi Pendidikan I, mendefinisikan tujuan pendidikan masa depan warga yaitu untuk membangun kehidupan ekonomi dan karakter generasi muda masa depan sehingga mereka memiliki kehormatan, integritas, tanggung jawab, dan pelayanan tanpa pamrih kepada bangsa (Dean, 2005: 49).

Terdapat dua pendapat yang saling berkontradiksi terkait dengan tujuan pendidikan Pakistan di masa ini. Pendapat pertama memandang bahwa tujuan pendidikan harus sesuai dengan perkembangan Pakistan sebagai Negara demokrasi dan mendefinisikan kewarganegaraan sebagai hal yang eksklusif. Sementara pendapat yang kedua melihat tujuan pendidikan sebagai upaya penciptaan warga Negara yang produktif. Pendapat ini juga menekankan perlunya pengembangan pendidikan karakter untuk mempersiapkan warga Negara yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik.

d. Jenjang Pendidikan dan Sistem Pendidikan di Pakistan

Setiap Negara tentunya mempunyai sistem pendidikan yang telah dirancang oleh pemerintahnya dengan rancangan yang sekiranya baik dan pantas diterapkan di Negaranya tersebut, terutama sistem pendidikan formal. Seperti halnya sistem pendidikan di tanah air kita yang berawal dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan lanjut tingkat perkuliahan.

Ketika Pakistan mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Agustus 1947, pemerintahnya segera mulai merancang dan memperhatikan pendidikan warga Pakistan dengan mengadakan konferensi di kota Karachi pada tanggal 27 November sampai 1 Desember 1947. Dari konferensi tersebut diambil beberapa poin utama yaitu:

1. Integrasi antara elemen moral, sosial dan kejurusan dalam sistem Pendidikan
2. Mewajibkan sekolah dasar
3. Mewajibkan pendidikan jasmani
4. Mewajibkan latihan militer pada kelas *college*
5. Pelatihan kemasyarakatan
6. Problem buta huruf
7. Problem kapabilitas pengajaran
8. Teknik dan kejurusan pendidikan
9. Pendirian Badan Penasihat Pendidikan
10. Promosi riset keilmuan
11. Pendirian badan pelayanan beasiswa

Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Januari 1959 didirikan Komisi Pendidikan Nasional (*The Commission on National Education*) yang diresmikan oleh Presiden Pakistan pada saat itu yaitu Muhammad Ayub Khan. Komisi tersebut sebagai badan yang bertanggung jawab atas segala yang berkaitan dengan pendidikan Pakistan. Sekarang komisi tersebut berubah nama menjadi HEC (*Higher Education Commission*). Dari komisi tersebut dirancang sistem pendidikan yang ada di Pakistan, terutama pendidikan formal.

Komisi Pendidikan Nasional Pakistan berperan dalam merekomendasikan lahan, gedung, furnitur, dan segala segala fasilitas pendidikan termasuk akomodasi untuk para guru. Diadakan pula training untuk para pengajar agar menjadi guru profesional dan persamaan persepsi dalam hal pendidikan dasar.

1) Pre-Pendidikan Dasar (*Primary Education*)

Pre-Pendidikan dasar merupakan jenjang sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, bisa dikatakan tahap persiapan sebelum masuk sekolah dasar. Pre-pendidikan dasar dibagi dalam 3 *stage*; *play group*, *nursery*, dan *kindergarden*. Dalam kurikulumnya mengkolaborasikan antara bermain dan belajar karena peserta didik memulai jenjang ini yaitu ketika usia 3-5 tahun.

2) Pendidikan Dasar (*Primary Education*)

Jenjang pendidikan dasar merupakan tahap wajib belajar bagi seluruh masyarakat Pakistan yang telah dicanangkan oleh menteri pendidikan Pakistan. Masa belajar pada sekolah dasar ini selama 5 tahun. Tujuan utama dalam pembelajaran tahap ini adalah:

- Menjadikan para murid functionally literate (melek huruf)
- Meningkatkan seluruh aspek kepribadian murid
- Mengajarkan pengetahuan dasar
- Meningkatkan kebiasannya dalam industry, integrity, dan curiosity

Dalam hal kurikulum mengadaptasikan pada kemampuan anak didik, yang dimana harus di design untuk meningkatkan kemampuan dasar, selain dari pada itu pendidikan agama juga diajarkan. Metode pengajarannya harus *active-oriented*. Bahasa pengantarnya menggunakan Urdu sebagai bahasa Nasional Pakistan.

3) Pendidikan Menengah (*Secondary Education*)

Setelah selesai pendidikan dasar atau pada kelas 1 sampai 5 siswa dapat melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan menengah dengan 3 tahap. Pertama kelas 6 sampai kelas 8 (*Middle*), kelas 9 sampai kelas 10 (*Secondary*), kelas 11 sampai kelas 12 (*Higher Secondary*).

Dalam pendidikan menengah di Pakistan lebih berorientasi pada pengembangan individual siswa sebagai masyarakat, pekerja dan patriot sebagai pemahaman bagi mereka dalam kehidupan sosial dan kemajuan ekonomi juga pengembangan *scientific*. Maka sudah mulai terjurus mengenai subjek yang dipelajari oleh para murid jenjang ini. Selain bahasa Urdu sebagai bahasa pengantar pengajaran, juga bahasa Inggris pada jenjang ini. Banyak dibentuk berbagai macam organisasi kesiswaan yang melibatkan para siswa pendidikan menengah.

Tabel 5.1
Jenjang Pendidikan Menengah

Jenjang Pendidikan Formal	Jenjang Kelas	Kurikulum	Kurikulum Wajib
<i>Primary</i> /primer	I-V (5 Tahun)	Bahasa Urdu, Inggris, matematika, seni, ilmu Pengetahuan alam, ilmu sosial, Islamiyat dan terkadang studi computer (tergantung ketersediaan laboratorium)	Bahasa Inggris, Urdu, Islamiyat (Studi Keislaman)
<i>Middle</i> /tengah	VI-VIII (3 Tahun)		
<i>High</i> / menengah: jenjang ini ada 3 jenis sekolah, yaitu: 1. Sekolah yang bersifat umum (<i>general</i>) mempersiapkan untuk pendidikan perguruan tinggi 2. Sekolah kejuruan (<i>vocational</i>) 3. Sekolah teknik	IX-X (2 Tahun) <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Kejuruan (<i>vocational</i>) dan Teknik ini program 3 Tahun (Gelar Diploma). • Jurusan: Sipil, Kimia, Arsitektur, Teknik, Listrik, Elektronika, Ilmu Komputer dan masih banyak lagi teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Kejuruan dan Teknik: adaah proses menggabungkan: Fisika, Kimia, Islamiyat (Studi Keislaman), dan Studi Pakistan. 	Islamiyat (Studi Keislaman), dan Studi Pakistan tetap menjadi kurikulum wajib
<i>High secondary Intermediate Colleges</i> (Sekolah persiapan) untuk Perguruan Tinggi	XI-XII (2 Tahun)		Bahasa Inggris, Urdu, Islamiyat dan Studi Pakistan tetap menjadi

4) Pendidikan Atas/Perkuliahan (Higher Education)

Terdapat berbagai macam jurusan dan program yang tersedia pada *stage* pendidikan atas. Contohnya *sociology, economics, journalism, international reallion, business administration*, dan lain-lain. Jenjang pendidikan perkuliahan tergantung pada program yang diambil. Awal mula dan umumnya ada program *bachelor* (BS/BBA) dengan durasi belajar selama 4 tahun, lanjut setelah itu master pogram (MS/Ms.C/MBA) selama 2 tahun dengan syarat tugas akhir menulis tesis, dan setelah itu ada program Ph.D dengan masa studi selama 2-5 tahun dengan syarat tugas akhir menulis disertasi.

Tabel 5.2
Jenjang Pendidikan Atas

Jenjang Pendidikan Formal	Jenjang Kelas	Kurikulum	Kurikulum Wajib
			kurikulum wajib.
Sarjana	XIV / XV (3-4Tahun)		
Master	XVI-XVII (2 Tahun)		Studi Pakistan
Ph.D	XVIII (3 Tahun)		
Total lamanya waktu untuk menumpuh sampai jenjang Doktor.	20-21 Tahun		

e. biaya Pendidikan di Pakistan

Pengeluaran untuk pendidikan sekitar 2% dari PDB Pakistan. Namun, pada tahun 2009 pemerintah menyetujui kebijakan pendidikan Nasional yang baru, yang menetapkan bahwa pengeluaran pendidikan akan ditingkatkan menjadi 7% dari PDB, sebuah gagasan yang pertama kali diusulkan oleh pemerintah Punjab.

Belanja pendidikan di Pakistan sejak 1972, berpendapat bahwa target kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Hal-hal luar biasa apa yang akan terjadi yang akan memungkinkan Pakistan mencapai dalam waktu enam tahun apa yang tidak mampu mereka berikan. dalam enam dekade terakhir Dokumen kebijakan kosong untuk pertanyaan ini dan tidak membahas asumsi yang mendasari target ini. Selama 37 tahun terakhir, belanja publik tertinggi untuk pendidikan adalah 2,80 persen dari PDB pada tahun 1987–88. Pengeluaran publik untuk pendidikan sebagai persentase dari PDB sebenarnya berkurang dalam 16 tahun dan dipertahankan dalam 5 tahun antara 1972–73 dan 2008–09. Dengan demikian, dari total 37 tahun sejak 1972, pengeluaran publik untuk pendidikan sebagai persentase dari PDB menurun atau tetap stagnan selama 21 tahun. Jika tren linier dipertahankan sejak 1972, Pakistan bisa saja menyentuh 4 persen dari PDB jauh sebelum 2015.

f. Gaji Guru

Pakistan menjadi Negara yang paling kurang makmur bagi para guru karena setiap tahunnya tenaga pengajar di sana hanya diberikan kompensasi sekitar Rp. 22 Jutaan. Jika dibagi setiap perbulannya maka gaji guru di Negara Pakistan ini sekitar Rp. 1.833.000 untuk setiap bulannya.

Di sini jika kita membandingkan gaji guru PNS golongan III/a untuk lulusan S1/DIV. Gaji guru PNS di Indonesia golongan III/a saat ini mendapat bayaran sebesar Rp 2.456.700 per bulan. Ini baru gaji pokoknya saja, berarti jika ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya maka akan lebih besar. Lalu ditambah, seperti: tunjangan pangan, tunjangan jabatan umum, tunjangan jabatan

fungsional, dan sebagainya. Jika dijumlahkan gaji pokok PNS golongan III/a beserta dengan gaji tunjangannya adalah sekitar Rp 3.000.000 sampai dengan Rp.3.500.000 per bulan. Kemudian jika guru yang bersangkutan mendapatkan tunjangan Sertifikasi maka akan ditambah lagi gajinya menjadi 5.500.000 sampai dengan Rp 6.000.000 per bulan.

Meskipun ada juga beberapa Sistem Skala Pembayaran lain di Pakistan kecuali Struktur Skala Pembayaran Dasar (BPS) tetapi BPS banyak menggunakan sistem skala pembayaran di Pakistan. Sebagian besar Departemen dan Organisasi Pemerintah mengikuti Sistem BPS. SPS dan timbangan tentara adalah contoh sistem pembayaran lainnya di Pakistan sementara organisasi / perusahaan / industri swasta bebas membuat struktur pembayaran mereka sendiri sementara Pemerintah menetapkan gaji minimum untuk setiap karyawan swasta. Skala BPS direvisi secara teratur setelah beberapa tahun. Ini direvisi pada tahun 2008 dan, setelah tiga tahun, ini sekali lagi direvisi pada tahun 2011 dan sekali lagi, setelah empat tahun, ini sekali lagi direvisi pada tahun 2015, dengan tetap memperhatikan tingkat inflasi di Pakistan.

Gaji Minimum, Gaji Maksimum, Kenaikan Tahunan, dan semua tunjangan lainnya, dsb. Dalam rupee Pakistan Pegawai negeri juga berhak atas berbagai tunjangan lainnya (sesuai peraturan departemen/organisasi mereka dan persyaratan layanan mereka) bersama dengan gaji pokok mereka, sebagai bagian dari Gaji Kotor mereka. Tunjangan ini dapat mencakup Tunjangan Bantuan Ad hoc, Tunjangan Medis, Gaji Khusus, Tunjangan Angkutan, Tunjangan Sewa Rumah dan beberapa tunjangan lain-lain, yang berlaku.

Pemerintah federal dan pemerintah provinsi memiliki sistem pembayaran terpisah yang sangat mirip satu sama lain. Perekrutan dalam layanan dilakukan tanpa memandang jenis kelamin, etnis, ras, perbedaan sektarian. Selain itu, lowongan untuk anggota staf di bidang/departemen/organisasi/kementerian diberikan setelah keputusan resmi legislator di masing-masing parlemen/pemerintah dan masing-masing badan memiliki kekuatan yang berwenang dan peralatan yang dialokasikan yang ditentukan untuk tugas dan pekerjaan resmi. Rekrutmen baik pada tingkatan maupun jabatan dalam pelayanan dan kelompok bervariasi sesuai dengan kualifikasinya. Semua layanan diatur dalam hierarki ketertiban dan pejabat yang melayani dikategorikan dalam berbagai tingkatan/pangkat/golongan/golongan demi kelancaran, transparan, dan teliti pelaksanaan tugas serta dibayar sesuai dengan itu.

g. Ujian Nasional

Pendidikan menengah di Pakistan dimulai di kelas 9 dan berlangsung selama empat tahun. Setelah akhir setiap tahun sekolah, siswa diwajibkan untuk lulus Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Menengah dan Menengah (BISE) daerah.

Setelah menyelesaikan kelas 9, siswa diharapkan mengikuti tes standar di setiap bagian pertama mata pelajaran akademis mereka. Mereka kembali memberikan tes ini dari bagian kedua dari kursus yang sama di akhir kelas 10.

Setelah berhasil menyelesaikan ujian ini, mereka akan diberikan **Sertifikat Sekolah Menengah** (atau SSC). Ini secara lokal disebut '**sertifikat matrikulasi**' atau disingkat 'matrik'. Kurikulum biasanya mencakup kombinasi delapan mata kuliah termasuk mata kuliah pilihan (seperti Biologi, Kimia, Komputer dan Fisika) serta mata pelajaran wajib (seperti Matematika, Bahasa Inggris, Urdu, Studi Islam dan Studi Pakistan).

Siswa kemudian memasuki **perguruan tinggi menengah** dan menyelesaikan kelas 11 dan 12. Setelah menyelesaikan masing-masing dari dua kelas, mereka kembali mengambil tes standar dalam mata pelajaran akademik mereka. Setelah berhasil menyelesaikan ujian ini, siswa akan diberikan **Sertifikat Sekolah Menengah Tinggi** (atau HSSC). Tingkat pendidikan ini juga disebut FSc / FA / ICS atau 'menengah'. Ada banyak aliran yang dapat dipilih siswa untuk kelas 11 dan 12 mereka, seperti pra-medis, pra-teknik, humaniora (atau ilmu sosial), ilmu komputer, dan perdagangan. Setiap aliran terdiri dari tiga mata pelajaran pilihan dan juga tiga mata pelajaran wajib bahasa Inggris, Urdu, Islamiat (hanya kelas 11) dan Studi Pakistan (hanya kelas 12).

h. Perkembangan Pendidikan Islam di Pakistan

Pada masa penjajahan Inggris, penyelenggaraan subjek formal Islamiyat (Pendidikan Agama Islam) bagi siswa Muslim di anak benua India ini tidak diberikan. Sehingga, proses pembelajaran untuk muatan keislaman (pendidikan agama Islam) mutlak menjadi tanggung jawab keluarga. Meskipun tidak dipungkiri, di beberapa wilayah, Madrasah sangat berperan dalam membantu anak-anak untuk membaca al- Quran, pembentukan karakter dianggap tanggung jawab keluarga.

Pasca kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947 dan kemudian diadopsi dari resolusi tujuan pada tahun 1949, pelajaran Islamiyat secara resmi diperkenalkan. Menteri pertama pendidikan Pakistan saat itu Fazlur Rahman, seorang sarjana Islam, dimana ia menganggap bahwa Islamiyat sebagai subjek penting dalam seluruh skema pendidikan holistik. Sistem pendidikan Nasional Pakistan, dirumuskan untuk membentuk kesatuan Nasional Pakistan berdasarkan Islam. Oleh karenanya, setiap keputusan dan kebijakan pendidikan selalu menekankan bahwa sistem pendidikan Nasional menekankan pada sistem pendidikan terpadu.

Islamiyat atau Studi keislaman menjadi pelajaran wajib atau pokok bagi semua pelajar Muslim mulai, hanya saja secara mata pelajaran Islamiyat baru diwajibkan mulai dari kelas III sampai kelas XII, sebagaimana termuat *introduced as compulsory subject from class III to Intermediate classes extending up to graduation in all general and professional institutions as in the past*".

Meskipun demikian, Islamiyat untuk kelas I dan II atau Pendidikan Anak Usia Dini, sudah dintegrasikan dalam mata pelajaran Urdu, dimana penjelasannya: "*for Early Childhood Education (ECE) and classes I to II, it will be integrated in other subjects, including Urdu text book.*", sehingga secara umum, kebijakan pendidikan agama Islam atau Islamiyat sudah dimulai dari sekolah dasar sampai kelas menengah Atas, bahkan dari pendidikan usia dini,

sebagaimana termaktub dalam kebijakan: “*Islamiyat shall be taught as a compulsory subject from Grade I to Grade XII, extending up to graduation level in all general and professional institutions*”.

Dalam hal PAI (Pendidikan Agama Islam atau Islamiyat) di Pakistan masuk di dalamnya pelajaran bahasa Arab, maksudnya materi dari pelajaran Islamiyat tersebut berbahasa Arab dan Urdu dengan serapan abjad Arab. Kemudian, pada perguruan tinggi, Islamiyat diberikan untuk memahami Islam secara rasional. Di samping, Komisi Pendidikan Nasional juga membentuk Lembaga Penelitian Islam yang bertujuan untuk memadukan nilai-nilai fundamental Islam dengan sains modern.

Adapun tujuan dari pelajaran Islamiyat atau PAI tersebut adalah memastikan bahwa semua anak-anak Muslim yang ada untuk belajar memahami, menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam dalam kehidupan mereka dengan tujuan reformasi dan perkembangan masyarakat yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah.

Lebih lanjut, proses pembelajarannya menekankan pada pengembangan sistem pendidikan terpadu, dimana nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip dan tujuan tercermin dalam silabus dari semua disiplin ilmu pada umumnya dan Studi Islam, khususnya. Poin pentingnya termaktub dalam *Ministry of Education Government of Pakistan*, bahwa: *The National Education Policy 1998-2010 currently under implementation stresses upon the development of an integrated educational system in which Islamic values, principles and objectives are reflected in syllabi of all the disciplines, in general and Islamic Studies, in particular.*

Upaya mencapai tujuan tersebut, maka para guru studi keislaman harus dipersiapkan dan memiliki pandangan yang objektif dan memahami jiwa dan metode ilmu pengetahuan moderen, baik ilmu kealaman maupun ilmu sosial serta mampu menerapkannya dan menginterpretasikan Islam. Diharapkan dengan demikian, semua guru disamping harus menguasai tentang Islam dari berbagai seginya, ia juga harus mampu menguasai paling tidak satu cabang ilmu pengetahuan bagik dari sosial, ekonomi, sosiologi, psikologi, politik.

1. Lembaga Pendidikan Islam

Penyelenggaraan pendidikan lembaga pendidikan Islam Pakistan terbagi kepada tiga kategori: (1) *Quranic School*, (2) *Mosque Primary School*, dan (3) *Madrasah*. *Pertama* adalah sekolah dimana anak-anak belajar membaca Al-Quran (baca: belajar iqra’). Tempat biasanya di masjid-masjid atau mushalla di desa. Waktu belajar tidak teratur dengan jelas. Ada yang pagi, siang, dan sore. Guru yang mengajar biasanya berasal dari desa tersebut juga. *Kedua*, sekolah dasar masjid, yaitu masjid dijadikan tempat belajar bagi anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ke atas. Inisiatif ini resmi dilakukan oleh pemerintah *Zia-ul Haq* pada tahun 80-an untuk mengatasi minimnya tempat belajar di pedesaan di sebagian tempat di Pakistan.

Selain belajar al-Quran mereka juga diajarkan oleh imam masjid setempat mata pelajaran bahasa Urdu dan matematika. Hanya saja, pendidikan ini sering terkendala disebabkan para imam jarang yang menguasai bahasa Urdu dan

matematika dengan baik, yang akhirnya kebanyakan sekolah akhirnya gulung tikar. Sekarang jumlah *Mosque Primary School* di seluruh Pakistan kurang lebih 25.000 buah, dan yang terakhir (ketiga) adalah madrasah. Madrasah di Pakistan berbeda dengan pesantren di Indonesia.

Di Indonesia para santri tidak diwajibkan untuk menghafal al-Qur'an seluruhnya, kecuali pesantren tersebut pesantren *hifz al-Qur'an*. Berbeda dengan di Pakistan, madrasah mewajibkan kepada murid-muridnya untuk menghafal al-Qur'an 30 juz sebelum belajar materi-materi lain. Karena al-Qur'an merupakan asas bagi pelajar yang ingin mendalami ilmu agama.

2. Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam di Pakistan di istilahkan dengan Islamiyat atau Studi Ke Islaman (*Islamic Study*). Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa: *The objectives of teaching of Islamiyat shall be to ensure that all Muslim children are provided opportunities to learn understand and apply the fundamental principles of Islam in their lives with the purpose of reformation and development of the society on the principles of the Qura'an and Sunnah.*

Artinya Islamiyat yang diberikan kepada peserta didik bertujuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam dalam kehidupan mereka dengan maksud untuk mereformasi dan pengembangan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah.

Maka dari itu, Islamiyat menjadi pelajaran wajib, sebagaimana termaktub dalam Ministry of Education Government of Pakistan, yaitu, *"Islamiyat shall be taught as a compulsory subject from Grade I to Grade XII, extending up to graduation level in all general and professional institutions"* Dan secara mata pelajaran dilaksanakan mulai kelas III sampai kelas XII. Dan *for Early Childhood Education (ECE) and classes I to II, it will be integrated in other subjects, including Urdu text book."*

Lebih lanjut, terkait dengan muatan materi Islamiyat, untuk melihat contoh muatan kurikulum Islamiyat yang pernah diberlakukan di Pakistan, untuk jejang Sekolah Dasar dari kelas I sampai dengan kelas V dengan sumber kajian dari hasil penelitian UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) terhadap kurikulum dan buku ajar Sekolah Dasar di Pakistan pada tahun 1997.

Tabel 5.3
Muatan Kurikulum Islamiyah

Kelas	Aspek Al-Qur'an	Aspek Aqidah dan Ibadah	Aspek Akhlak	Aspek Tarikh
I	<ul style="list-style-type: none"> - Menghafal abjad Arab (Hijayyah) - Menghafal nama Allah Maha Besar, Yang Maha Pemurah, Pemberian rahmat. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Iman kepada Allah (Pencipta dan satu-satunya dan tidak pemisalan bagi-Nya. - Muhammad Saw adalah yang terakhir dan akhir Nabi Allah. - Al-Qur'an adalah Kitab terakhir dan akhir terungkap dari Allah. - Adab dan Taharat (wudhu) dan kebersihan tubuh dan pakaian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akhlak dan Adab (Bangun pagi, membaca kalimah Tayyebah, Islam salam (Salaam), adab makan dan minum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah Nabi Muhammad (Nama Ayah dan yang menjaganya)
II	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan tanda- tanda vokal (Harakat) dan pembacaan sederhana yang digabungkan. - Menghafal, tauz, QS al-Fatihah dan kalimat syahadah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Allah adalah satu. Dia tidak membutuhkan pada yang lain. Dia yang member berkah, cara syukur, doa. - Muhammad (saw) adalah Nabi terakhir dari Allah. Dia adalah Leader dan Panduan bagi seluruh dunia dan model karakter moral terbaik. - Wahyu dari Al-Qur'an. - Terjemahan dari tasmiah, takbir, kalimah Tayibah dan dorus sharif 	<ul style="list-style-type: none"> - Adab kepada orang tua, orang tua, guru. - Abad pada Buku dan ilmu. - Kejujuran - Meminta izin untuk masuk. - Bersyukur. - Pemaaf 	<ul style="list-style-type: none"> Masa kecil Nabi Muhammad Saw.
III	<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip-prinsip dasar dari al-Quran (hukum bacaan). - Mengulang hafalan dari QS al-Fatehah - Menghafal al-„Ashr, al-Kausar, al-Lahab dan al-Ikhlash. 	<ul style="list-style-type: none"> - Empat nama Malaikat menonjol dan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. - Adab waktu membaca Al Quran. - Shalat, Adab, orientasi dan niat. - Menerjemahkan Tauz, tasbih, tahmid, dan Nabi Adam a.s 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan dengan kerabat, sahabat dan tetangga. - Meminta izin untuk menggunakan sesuatu. - Meninggalkan sifat berbohong, mencuri, memfitnah. - Adab berbicara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Biografi Nabi Saw sampai menerima Wahyu. - Kejujuran dan kebenaran Nabi Suci Saw, Cara beliau berdagang dan kahalalan. - Nabi Saw sebagai suri tauladan.

IV	<ul style="list-style-type: none"> - Membaca al-Qur'an - Menghafal – Aya al-Kursi, al-Mirasa, al-Quraisy, A-Nasr. - Menghafal dan menerjemahkan QS al-Ikhlās 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Allah mencintai kebenaran dan kebajikan. - Manfaat Shalat. - Kesucian al-Qur'an - Kenabian Nuh a.s - Kesucian keluarga Nabi Saw dan keturunannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejujuran, kesederhanaan, ketepatan waktu dalam doa, membantu orang-orang spesial. - Cinta untuk Pakistan. - Penggunaan sumber daya dengan prinsip menjaga berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peristiwa yang terjadi dari awal kenabian sampai hijrah
V	<ul style="list-style-type: none"> - Membaca al-Qur'an - Menghafal QS Al-Ma'una, Al-Kafirun, Al-Falq, An-Naas. - Menghafal dan menerjemahkan QS. Al-Fatihah, Kalimah Syahadat, Surah al-Kausar dan Al-Asr. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehidupan akhirat. - Menaati Nabi Saw dan Allah Swt - Pentingnya Sejarah Nabi Saw - Nabi a.s Ibrahim a.s Musa a.s, Isa a.s - Shalat Jumat dan Shalat Hari Raya - Pentingnya Puasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Menepati janji. - Toleransi, kebaikan dan Pemaaf. - Persaudaraan Islam dan kesetaraan. - Pesatuan Nasional. - Cinta untuk Pakistan dan warganya 	<ul style="list-style-type: none"> - Persaudaraan. - Perang Badar, Uhud, Ahzab. - Gencatan Senjata dari Hudaibiy. - Penaklukan Mekkah. - Ibadah haji terakhir - Wafatnya Nabi Saw.

Penulis lampirkan berupa muatan pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) untuk jenjang Sekolah Dasar di Pakistan. Dari lampiran tersebut dapat ditarik kesimpulan berupa capaian dari pelajaran PAI atau Islamiyat, antara lain:

- a. Aspek al-Qur'an: Adanya ketuntasan belajar al-Qur'an dari menghafal (mengenal), tanda baca, sampai persoalan tajwid. Kemudian, diikuti dengan menghafal dan menerjemahkan asmaul husna, 2 kalimat syahadah, serta surah-surah pendek baik dihafal dan diterjemahkan.
- b. Aspek Aqidah dan Ibadah: Aqidah: muatannya adalah 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah Swt, kitab-Nya, malaikatnya-Nya, rasul-Nya, kehidupan akhirat. Namun, tidak berbicara tentang qada dan qadar. Sedangkan, Ibadah/Fiqh:
- c. Persoalan Adab dan Tahara (wudhu), tasmiah, takbir, kalimah Tayibah adab membaca Al-Quran, shalat, adab, orientasi dan niat, manfaat shalat, shalat jumat dan shalat Hari Raya, serta pentingnya puasa. Sedangkan persoalan zakat dan haji tidak dimuat (disinggung). Namun, ibadah haji terakhir Nabi Saw dalam hal ini nanti dimuat pada aspek tarikh (sejarah).
- d. Aspek Akhlak: Muatan yang ditanam adalah akhlak dan adab (Bangun

pagi, membaca kalimah Toyibah, Islam salam (salaam), adab makan dan minum, kepada orang tua, orang tua, guru, buku dan ilmu, kejujuran, meminta izin untuk masuk, bersyukur, pemaaf, hubungan dengan kerabat, sahabat dan tetangga, meminta izin untuk menggunakan sesuatu, meninggalkan sifat berbohong, mencuri, memfitnah, adab berbicara, kejujuran, kesederhanaan, ketepatan waktu dalam doa, membantu orang-orang spesial, cinta untuk Pakistan, Penggunaan sumber daya dengan prinsip menjaga berkelanjutan, menepati janji, toleransi, kebaikan dan pemaaf, persaudaraan Islam dan kesetaraan, pesatuan Nasional, cinta untuk Pakistan danarganya

- e. Aspek Tarikh: Sejarah Nabi Muhammad Saw (nama ayah dan yang menjaganya) Masa kecil Nabi Muhammad Saw, peristiwa yang terjadi dari awal kenabian sampai hijrah, persaudaraan, perang badar, uhud, ahzab, gencatan senjata dari hudaibiya, penaklukan Makkah, Ibadah haji terakhir dan wafatnya Nabi Saw.

f. Perbandingan Pendidikan Islam di Pakistan dan Indonesia

Pendidikan agama Islam di Pakistan terbagi kepada tiga kategori: a) *Quranic School*, b) *Mosque Primary School*, c) Madrasah. (Uzma Anzar, 2003: 14-15). Pertama adalah sekolah dimana anak-anak belajar membaca Al-quran (baca: belajar iqra'). Tempat biasanya di masjid-masjid atau mushalla desa. Waktu belajar tidak teratur dengan jelas. Ada yang pagi, siang dan sore. Ustadz yang mengajar biasanya berasal dari desa tersebut. Kedua sekolah dasar masjid, yaitu masjid dijadikan tempat belajar bagi anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ke atas. Inisiatif ini resmi dilakukan oleh pemerintah Zia-ul-Haq pada tahun 80an untuk mengatasi minimnya tempat belajar di pedesaan di sebagian tempat di Pakistan. Selain belajar Al-quran mereka juga diajarkan oleh imam masjid setempat mata pelajaran bahasa urdu dan matematika.

Namun pendidikan ini sering terkendala disebabkan para imam jarang yang menguasai bahasa urdu dan matematika dengan baik, yang akhirnya kebanyakan sekolah gulung tikar. Sekarang jumlah *Mosque Primary School* diseluruh Pakistan sekitar 25.000 buah sekolah. Dan yang terakhir adalah madrasah. Madrasah di Pakistan berbeda dengan pesantren di Indonesia. Di Indonesia para santri tidak diwajibkan untuk menghafal Alquran seluruhnya, kecuali pesantren tersebut pesantren hizful Alquran. Berbeda dengan di Pakistan, madrasah mewajibkan kepada murid-muridnya untuk menghafal Al-quran 30 juz sebelum belajar materi-materi lain. Karena al-quran merupakan asas bagi pelajar yang ingin mendalami ilmu agama. Ada lima aliran besar pemikiran (*school of Thought*) di madrasah Pakistan: Deobandi, Barelwi, Ahli Hadith, Salafi dan Syiah. Tiap-tiap aliran pemikiran ini mempunyai metode pembelajaran yang berbeda. Tapi, Deobandi dan Barelwi adalah dua pemikiran yang paling dominan di seluruh madrasah Pakistan. Seperti yang telah disinggung dipendahuluan, bahwa lahirnya madrasah-madrasah di Pakistan tidak lepas dari campur tangan pemerintah dan jaringan International lainnya.

Banyak relevansi sistem pendidikan yang dilaksanakan di Pakistan dengan yang dilakukan di Indonesia. Secara Yuridis formal di Pakistan ada undang-undang yang mengatur tentang wajib belajar bagi anak antara usia 5-16 tahun. Pasal 25 -A Konstitusi Pakistan mewajibkan Negara untuk menyediakan pendidikan berkualitas gratis dan wajib untuk anak-anak dari kelompok usia 5 sampai 16 tahun. "Negara harus menyediakan pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak-anak usia 5-16 tahun dengan cara seperti dapat ditentukan oleh hukum".

Bagi bangsa Indonesia dikenal dengan Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang. Sebagai refleksi dari sistem ini semestinya di Indonesia wajib belajar mengikuti apa yang dilakukan di Pakistan yakni wajib belajar 12 tahun mulai dari tingkat Sekolah Dasar/MI hingga SMA/MA. Demikian pula anggaran pendidikan di Indonesia semestinya mengikuti Pakistan yakni dari semula 20% menjadi 30%.

Peningkatan pendidikan wajib belajar menjadi pendidikan wajib belajar 9 menjadi 12 tahun dengan harapan terwujud pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLTP hingga SMA) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan UU No: 2 tahun 1989 tentang pendidikan Nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional sebagaimana yang tertuang pada pasal 34 sebagai berikut:

1. Setiap warga Negara yang berusia 6 tahun
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di dalam GBHN 1993, dicantumkan bahwa pemerintah harus berupaya untuk memperluas kesempatan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan, maupun pendidikan profesional, melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, maka pada tanggal 2 Mei 1994 pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. lebih lanjut dikemukakan bahwa tahap penting dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan pendidikan wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun.

Pendidikan di Pakistan sangat dipengaruhi oleh agama. Sebagai contoh, sebuah studi guru sains Pakistan menunjukkan bahwa banyak menolak evolusi berdasarkan alasan keagamaan. "Meskipun banyak guru menolak evolusi manusia," semua setuju bahwa 'tidak ada kontradiksi antara ilmu pengetahuan dan

Islam' pada umumnya" Pada aspek ini juga berlaku bagi pendidikan di Indonesia dimana evolusi tidak dapat diterima sebagai sebuah teori Sains karena bertentangan dengan Al qur'an dan Al Hadits.

Kemudian sekarang ini pada lembaga-lembaga pendidikan diprogramkan secara Nasional adanya integrasi Ilmu yakni Ilmu-ilmu umum diintegrasikan dengan ilmu agama mulai dari penerapan kurikulum SD hingga perguruan tinggi. Kenyataan ini juga menunjukkan adanya pengakuan sebagaimana yang terjadi di Pakistan bahwa di Indonesia juga mengakui bahwa tidak ada kontradiksi antara ilmu pengetahuan dengan agama.

Pendidikan agama Islam di Pakistan terbagi kepada tiga kategori yakni: (a) *Quranic School*. (b) *Mosque Primary School*. (c) Madrasah. Pertama adalah sekolah dimana anak-anak belajar membaca Al-quran (baca: belajar iqra'). Tempatnya di masjid-masjid atau mushalla desa. Kategori ini sama dengan TKA/TPA yang terjadi di Indonesia, dimana tempatnya sebagian besar juga dilaksanakan di Masjid dan Mushalla/ langgar.

Yang membedakan adalah Waktu belajar di Indonesia sangat teratur dan terjadwal sementara di Pakistan tidak teratur dengan jelas. Ustadz yang mengajar biasanya juga berasal dari desa tersebut. Kedua, sekolah dasar masjid, yaitu masjid dijadikan tempat belajar bagi anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ke atas. Inisiatif ini resmi dilakukan oleh pemerintah Zia-ul- Haq pada tahun 80an untuk mengatasi minimnya tempat belajar di pedesaan disebagian tempat di Pakistan.

Selain belajar Al-quran mereka juga diajarkan oleh Imam Masjid setempat mata pelajaran bahasa urdu dan matematika. Namun pendidikan ini sering terkendala disebabkan para imam jarang yang menguasai bahasa urdu dan matematika dengan baik, yang akhirnya kebanyakan sekolah gulung tikar.

Untuk pendidikan jenis kedua ini juga berlaku di Indonesia pada tahun delapan puluhan dimana Masjid dan Mushalla juga termasuk tempat menggali pengetahuan agama dan ilmu bahasa arab. Bedanya dengan di Indonesia adalah pada lembaga masjid ini tidak diajarkan matematika. Tergerusnya lembaga pendidikan Masjid di Indonesia bukan karena faktor gurunya akan tetapi sudah tersedianya lembaga pendidikan pondok pesantren yang cukup untuk menampung pembelajaran agama dan ilmu bahasa Arab.

Ketiga, adalah madrasah. Madrasah di Pakistan berbeda dengan pesantren di Indonesia. Di Indonesia para santri tidak diwajibkan untuk menghafal Alquran seluruhnya, kecuali pesantren tersebut pesantren hifzul Alquran.

Bahkan yang paling fundamental dimana lembaga pendidikan Umum mewajibkan tiga mata pelajaran wajib di Pakistan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yakni bahasa Inggris, urdu dan Islamiyat. Ini mengidentifikasi adanya relevansi juga dengan Lembaga lembaga pendidikan di Indonesia sekarang dimana mata pelajaran bahasa Indonesia dan Agama Islam menjadi mata pelajaran wajib yang di- UAN- kan. Sementara Bahasa Inggris baru diwajibkan pada tingkat SMP hingga perguruan tinggi untuk tingkat SD jalan

kearah menjadikan Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran Inggris sudah dilakukan yakni sudah diberikan pada kelas III/SD.

Untuk kurikulum TK tidak ada perbedaan antara Pakistan dan Indonesia. Yakni secara teoritis memang tidak ada tuntutan untuk belajar dan menulis tetapi karena kurikulum SD/MI tidak menganut asas relevansi dan berkesinambungan (kontinuitas, maka pada tatanan praktisnya tetap masih diajarkan kewajiban belajar membaca dan menulis serta berhitung pada tingkat pendidikan TK/RA. Kedepannya semestinya untuk kurikulum TK/RA di Indonesia barangkali lebih berkiblat kepada Australia atau Belanda yang hanya materi ajarnya menekankan kepada materi bermain dan pengenalan terhadap konsep huruf dalam berbahasa dan konsep angka dengan simbol-simbol gambar dalam pembelajaran matematika. Refleksi lainnya yang mungkin dapat dilakukan sehubungan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia adalah adanya perguruan tinggi jurusan teknologi Ruang Angkasa sebagaimana yang telah dilakukan di Pakistan.

C. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

Pakistan adalah sebuah Negara yang terletak di Benua Asia, tepatnya di Benua Asia bagian Selatan (Asia Selatan). Negara yang bernama lengkap Republik Islam Pakistan ini memiliki Jumlah penduduk sebanyak 233.500.636 jiwa (2020). Jumlah penduduk yang sebanyak itu menjadikannya Negara yang menempati urutan ke-5 sebagai Negara dengan jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Hampir semua penduduk Pakistan memeluk agama Islam yaitu sebanyak 96,4% dari keseluruhan jumlah penduduknya. Agama Islam juga merupakan agama resmi Negara yang beribu kota di Islam abad ini.

Negara Pakistan terbentuk akibat pemisahan dari pemerintahan India pada 14 Agustus 1947. Sejak awal abad ke-19, Inggris mulai mendominasi wilayah tersebut. Peristiwa ini berkaitan erat dengan perjuangan kaum muslim di India. Di antara Negara-Negara muslim yang lahir sekitar abad 20, Pakistan merupakan satu-satunya Negara yang didirikan atas nama Islam. Pakistan merupakan Negara demokratis yang aturan politiknya dirancang sesuai sistem demokrasi (Bilal & Malik, 2014: 20).

Ketika Pakistan mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Agustus 1947, pemerintahnya segera mulai merancang dan memperhatikan pendidikan warga Pakistan dengan mengadakan konferensi di kota Karachi pada tanggal 27 November sampai 1 Desember 1947.

Pedoman kurikulum pendidikan kewarganegaran di Pakistan terpengaruh oleh Ideologi Islam. Sementara tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan bukan hanya menyiapkan warga Negara yang baik, namun juga membentuk warga Negara yang taat Islam (Ahmad, 2008: 104). Sistem kurikulum dibagi menjadi dua sistem, yaitu swasta dan publik.

Pada masa penjajahan Inggris, penyelenggaraan subjek formal Islamiyat (Pendidikan Agama Islam) bagi siswa Muslim di anak benua India ini tidak

diberikan. Sehingga, proses pembelajaran untuk muatan keislaman (pendidikan agama Islam) mutlak menjadi tanggung jawab keluarga. Meskipun tidak dipungkiri, di beberapa wilayah, Madrasah sangat berperan dalam membantu anak-anak untuk membaca al- Quran, pembentukan karakter dianggap tanggung jawab keluarga.

D. SARAN

Membandingkan pendidikan Negara sendiri dengan Negara lain, terutama Negara yang pendidikannya lebih maju ataupun belum, disamping dapat menambah wawasan tentang pendidikan yang berlaku di suatu Negara, juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pendidikan di Negara sendiri. Oleh karena itu penulis menyarankan agar pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan di Negeri ini agar tidak malu meniru hal-hal positif dari pendidikan Negara lain untuk diterapkan juga di Negara Indonesia, dengan tetap menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi serta budaya yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Mumtaz. "Pakistan" dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1993.
- Aisyah, Nasionalisme dan Pembentukan Negara Islam Pakistan, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4, No. 2, Makassar: UIN Alauddin, 2014.
- Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam MeLacak Akar-Akar Sejarah Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- [Amin Valliani](#) Teaching Islamiyat, akses <http://www.dawn.com> pada tanggal 23 Januari 2021.
- B. Setiawan dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid. XII, Cet. I; Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- <http://ilmupengetahuanumum.com/10-Negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/> akses tanggal 15 Januari 2021.
- <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-Negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia>. Diakses tanggal 11 Januari 2021.
- <http://unesco.org.pk/education/teachereducation/lessonplan.html>
- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149679_eng
- Ida Mustofa, *Relasi Islam dan Kekuasaan dalam Konteks Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal: Urwatul Wutsqo*, Vol. 4, No.2 Nganjutk: STAI Darussalam, 2015.
- John L. Esposito, *Islam And Development Religion and Sociopolitical Change*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development Ekonomi Pembangunan*, Terj. Haris Munandar dan Puji A.L, Jakarta Erlangga, 2006.
- Ministry of Education Government of Pakistan, *National Education Policy 2017-2025*. Ministry of Education Government of Pakistan: National Education Policy 2009.
- Mu'ammarr Zayn Qadafy, *Peradaban Islam di India-Pakistan*, *Jurnal: Al MURABBI*, Vol. 01, No. 02, Ngawi: STIT Islamiyah, 2014.

Muhammad Nasir, Kurikulum Madrasah: Studi Perbandingan Madrasah di Asia, Jurnal: Nadw, Vol. 9, Nomor 2, Samarinda: IAIN Samarinda, 2015.

Muhammad Qasim (Sekretaris Umum MSM),Merevolusi Sistem Pendidikan,

<http://shafiyatul.com/news/2016/04/15/merevolusi-sistem-pendidikan/>

Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran dan Pemikiran, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.

Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Cet. Ke-7, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

Surawardi, Pendidikan Islam di Pakistan, Jurnal: Manajemen of Education, Vo. I, Banjarmasin: Manajemen Pendidikan Islam, 2015

Taufik Adnan Amal, "Pelajaran Berharga dari Pakistan", dalam Islam Liberal Com, tanggal 21 Januari 2021, [http://Islamlib.com/id/artikel/pelajaran berharga dari Pakistan](http://Islamlib.com/id/artikel/pelajaran%20berharga%20dari%20Pakistan).

Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Surawardi, Pendidikan Islam di Pakistan, Jurnal: Manajemen of Education, Vo. I, Banjarmasin: Manajemen Pendidikan Islam, 2015.

Amin Valliani Teaching Islamiyat, akses <http://www.dawn.com> pada tanggal 23 Januari 2021.

Lys, Candice, (June 2006) "Demonizing the "other": Fundamentalist Pakistani Madrasah and the Construction of Religious Violence", Marburg Journal of Religion: Vol: 11, No. 1.

Farish A. Noor, Yoginder Sikand & Martin Van Bruinessen (eds), 2007 The Madrasah in Asia Political Activism and Transnational Linkages, Amsterdam: University Press.

Musbikin, Imam, 2005Studi Islam Kawasan, Riau: Zanafa Publishing.

Ikram, S. M., tth. Muslim Civilization in India, New York: Colombia Universitas Press.

Ahmad, Ishfaq, (1998-11-21). "CERN and Pakistan: a Personal Perspective". CERN Courier. Retrieved 2021-01-18.

Surawardi, Pendidikan Islam di Pakistan, Jurnal: Manajemen of Education, Vo. I, Banjarmasin: Manajemen Pendidikan Islam, 2015.

Ministry of Education Government of Pakistan, *National Education Policy 2017-2025*.

Ministry of Education Government of Pakistan: *National Education Policy 2009*. <http://unesco.org.pk/education/teachereducation/lessonplan.html>

BAB VI

SISTEM PENDIDIKAN DI IRAK

Alisa Merliana

alisamerliana@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Negara Irak adalah Negara yang berbentuk Republik yang merdeka pada tahun 1958. Pada tahun 1950 Negara ini berpenduduk 5.100.000 orang, 93% penduduknya beragama Islam (4.730.000 orang) dengan rincian kaum sunni 36% (1.850.000 orang) dan kaum syi'iy 57% (2.880.000 orang). Luas Negara Irak 304.000km dengan ibu kotanya Baghdad dan kota-kota termasyhur antara lain Basra, Karbela, dan Mosul. Adapun penghasilan utama di Irak adalah padi-padian, kurma, kapas, kulit, permadani, dan minyak (34.000.000 ton) menurut data tahun 1955.¹

Sistem pendidikan di Irak tidak jauh berbeda dengan sistem-sistem pendidikan yang ada di Negara-negara Timur tengah lainnya, yaitu: (a) tingkat ibtidaiyah lamanya 6 tahun, (b) tingkat mutawssitah lamanya 3 tahun, (c) tingkat tsanawiyah lamanya 2 tahun, (d) tingkat tinggi/universtas, lamanya 4 tahun.

Dekade tahun enam puluhan, dan tujuh puluhan adalah masa dimana kajian ke Islaman merupakan sesuatu yang sangat diminati oleh seseorang dan mempunyai *prestige* cukup baik di kalangan masyarakat di Bagdad. Universitas Bagdad, selain memiliki fakultas-fakultas umum seperti kedokteran, teknik, ekonomi, hukum, juga fakultas Al-'Ulum al- Islamiya atau yang sering disebut sebagai fakultas syari'ah. Fakultas ini mendapat apresiasi cukup tinggi di lingkungan perguruan tinggi di daerah ini. Selain itu, juga terdapat fakultas tarbiyah.

Universitas Bagdad merupakan universitas ternama di Negara Irak. Dalam hal ini pemakalah mengambil rujukan studi Islam dari dua fakultas yang ternama disana, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah.

B. SEJARAH PENDIDIKAN DI IRAK

Masa bani Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut dengan istilah "*The Golden Age*". Pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, maupun peradaban dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendikiawan-cendikiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Pemerintah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu dari tahun 750-1258 M. Pada awalnya pusat pemerintahan di kota Kufah kemudian pindah ke Hira

¹ Mahmud Yunus, *Perbandingan Pendidikan Modern di Negara Islam dan Intisari Pendidikan Barat*, (Jakarta : Al Hidayah, 1968), hlm. 99

lalu ke Abar (Hasyimiyah) dan akhirnya ke Baghdad. Baghdad adalah ibu kota pemerintah bani Abbasiyah yang paling strategis.

Sebenarnya zaman keemasan bani Abbasiyah telah dimulai sejak pemerintahan pengganti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi (775-785 M) dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid. Di masa-masa itu para Khalifah mengembangkan berbagai jenis Kesenian, terutama kesusastraan pada khususnya, kebudayaan pada umumnya.

Dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, madrasah-madrasah dan universitas-universitas yang merupakan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang sangat cepat, merupakan ciri pendidikan Islam pada masa ini²

C. SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI IRAK

Sistem perjenjangan pendidikan di Irak tersusun dalam tiga tingkat, yaitu 6 tahun tingkat sekolah dasar serta 5 tahun sekolah menengah yang terbagi atas dua bagian, yakni 3 tahun pertama untuk sekolah menengah dan 2 tahun berikutnya untuk sekolah menengah lanjutan. Kurikulum pada sekolah lanjutan pertama meliputi mata pelajaran agama, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, olahraga, dan menggambar. Pada sekolah lanjutan tingkat kedua terdapat kursus khusus untuk siswa perempuan tentang pengasuhan anak.

Adapun program pelajaran untuk siswa laki-laki terbagi dalam tiga bagian, yaitu sains, niaga, dan sastra. Pola perjenjangannya adalah 6-3-2 tahun, sementara pendidikan tinggi ditempuh antara 4 sampai 6 tahun. Jadi sistem sekolah di Irak merupakan sistem anak tangga sederhana yang meliputi sekolah dari tingkat pra sekolah sampai universitas. Pendidikan pra sekolah berlangsung selama dua tahun, dengan pendaftaran sejak usia 4 tahun. Jenjang pendidikan ini mendapat sedikit perhatian dari pemerintah. Pada pertengahan tahun 1960-an hanya terdapat 15.000 murid yang terdaftar setiap tahunnya. Departemen pendidikan menangani beberapa masalah yang antara lain sebagai berikut.

1. Pendidikan dasar, yang berlaku untuk semua anak usia sekolah
2. Pendidikan untuk orang dewasa
3. Pendidikan menengah dan kejuruan
4. Pendidikan tinggi

Pendidikan di Irak merupakan panduan dari nilai tradisi Islam dan sekularisasi yang terinspirasi dari nilai Barat, yang sebenarnya hal ini telah diperkenalkan di Irak sejak tahun 1920-an. Sistem pendidikan modernnya sebagian didasarkan pada sistem pendidikan Inggris yang mendapat pengaruh kuat dari Amerika Serikat dalam hal pola kurikulum dan organisasi.

²<http://wartasejarah.blogspot.com/2014/03/sejarah-pendidikan-islam-pada-masa.html> di unduh pada tanggal 14 Januari 2021

Pendidikan di Irak diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Umum No. 57 Tahun 1940. Pendidikan umum di Irak diberikan secara cuma-cuma untuk semua tingkat, biaya seluruhnya ditanggung oleh Negara. Hampir 60 persen anggaran pendidikan dibiayai oleh Menteri Pendidikan dan 40 persennya berasal dari kontribusi Menteri Perencanaan. Sekitar 25 persen APBN-nya disediakan untuk dana pendidikan.³

The Ministry of Higher Education and Scientific Research defines the policy of higher education and supervises the administration and organization of the higher education system. However, both private and public universities in Iraq are autonomous in financial, administrative and technical matters. A number of other ministries such as the Ministry of Labour and Social Affairs, the Ministry of Industry, the Ministry of Defense, the Ministry of Health, the Ministry of Transport and Communications, the Ministry of Agriculture and Irrigation, and the Ministry of Oil, administer vocational training centres in order to produce skilled manpower in various fields of specialization.

D. KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DAN DI IRAK

1. Memahami kebijakan Islam

Konsep kebijakan pendidikan islam merupakan konsep yang sering didiskusikan dan dikaji, tetapi sering kali kurang dipahami makna sesungguhnya. Karena itu, konsep kebijakan dan kebijaksanaan sering kali dipertukarkan antara satu dengan lainnya, sehingga penjelasan singkat sangat diperlukan untuk kedua istilah tersebut dapat digunakan secara tepat sesuai dengan konteksnya, karena kedua nya memiliki makna yang jauh berbeda.

Kebijakan (*policy*), menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang cenderung memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, karena alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan darurat dan sebagainya.⁴

Dari deskripsi tersebut dapat dipahami bahwa kebijaksanaan sering kali dimaknai melanggar sesuatu karena alasan tertentu, sedangkan kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara pada keputusan tentang alternatif terbaik. Menurut Tilaar dan Nugroho lanadasan utama suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia, namun akal merupakan unsur dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan kebijakan.⁵

³ Abd.Rachman Assegaf. *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hal. 89-91

⁴ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordansi guru sampai UU Sisdiknas*, (Jakarta: Rajawali Pres, cet-1, 2013), hlm. 11

⁵ *Ibid*, hlm 11

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik dibidang pendidikan. Ensilopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, Jhon Codd, dan Anne-Marie O'neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan bahkan eksistensi bagi Negara-Negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas utama dalam era globalisasi.⁷

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, karena salah satu tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut hendaknya terus-menerus untuk dibangun sehingga akhirnya akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Fungsi kebijakan dalam pendidikan adalah menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan, dan melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja guru dan siswa.

2. Kebijakan sebelum Kemerdekaan

a) Ordonansi Guru 1905

Kebijakan aktual tentang pendidikan Islam masa kolonial adalah kebijakan pemerintah kolonial yang oleh umat Islam dirasakan sangat menekan adalah ordonansi Guru tahun 1905 yang mewajibkan setiap guru agama islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Ketentuan ini ditetapkan beberap tahun setelah terjadinya peristiwa cilegon tahun 1888. Awalnya adalah KF Holle pada 20 september 1890 menyarankan kepada gubernur jendral agar pendidikan agama Islam diawasi, karena pemberontakan para petani di banten dinilai dimotori oleh para haji dan guru agama, sehingga di Jawa terjadilah perburuan dan pengasingan terhadap guru agama, dan demi penyeragaman dan pengawasannya maka KF Holle menyarankan agar bupati melaporkan daftar guru didaerahnya setiap tahun.⁸

Pada tahun 1905 lahirlah suatu peraturan tentang pendidikan agama Islam yang disebut Ordonansi Guru, dan dinyatakan berlaku untuk Jawa dan Madura sejak 2 November 1905, kecuali Yogya dan Solo.

Dalam praktik, Ordonansi Guru ini bisa dipergunakan untuk pengembangan agama Islam, karena dikaitkan dengan ketertiban dan keagamaan. Organisasi yang mulai melakukan reaksi atas ordonasi guru ini ialah serikat Islam. Walaupun secara terang-terangan tidak menuntut penghapusan ordonansi

⁶ Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 36

⁷ *Ibid*, hlm 36

⁸ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan*,... hlm. 17

guru namun pada tahun 1917 telah menuntut pemerintah untuk mencabut semua peraturan yang menghambat penyebaran agama Islam. Baru pada tahun 1922 dalam kongres Al-Islam 1922 mereka menyarankan barwa ordonansi guru 1905 menghambat kegiatan guru agama Islam dan oleh karenanya secepat mungkin harus dihapus.⁹

b) Ordonasi Guru 1925

Ordonansi guru tahun 1905 yang mewajibkan guru-guru agama Islam untuk minta izin itu, kemudian dinilai kurang efisien, karena laporan tentang guru agama dan aktivitasnya yang secara periodik dilakukan oleh bupati ternyata kurang menyakinkan, disamping situasi politik pada waktu itu dinilai sudah tidak lagi memerlukan pemburuan guru-guru agama. Karena itu pada tahun 1925 dikeluarkan Ordonansi Guru Baru sebagai pengganti yang hanya mewajibkan guru agama untuk memberi tahu, bukan meminta izin. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 juni 1925. Sejak januari 1927 tidak hanya berlaku untuk Jawa dan Madura tetapi juga untuk Aceh, Sumatra Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, dan Lombok kemudian pada tahun 1930 berlaku juga untuk Bengkulu.¹⁰

Reaksi atas Ordonansi Baru ini muncul, baik skala Nasional maupun lokal. Kongres Al-Islam pada tanggal 1-5 Desember 1926 menolak cara pengawasan itu dan menganggap pemberitahuan secara periodik tentang kurikulum, guru-guru agama dan murid sebagai beban berat, terutama karena madrasah dan juga lembaga pendidikan Islam lainnya tidak mempunyai biaya untuk menyelenggarakan administrasi sekolah dengan baik.

c) Ordonansi 1932

Sebagaimana diketahui pada tahun 1930-an Pemerintah kolonial Belanda dilanda krisis ekonomi. Sebagai akibatnya pemerintah Hindia Belanda harus melakukan penghematan dan terpaksa menekan anggaran untuk Departemen Pengajaran. Sehingga dari tahun 1930-1937 sudah dikurangi 53%. Sementara itu tuntutan akan kebutuhan pendidikan pribumi kian meningkat. Sebagai akibatnya sekolah-sekolah partikelir bermunculan. Sebuah keputusan yang antagonis, ketika suatu pihak tuntutan kebutuhan sangat tinggi dipihak lain pemerintah Hindia Belanda membatasi berdirinya sekolah-sekolah swasta dengan pengawasan yang ketat. Setiap orang yang hendak mendirikan lembaga pendidikan harus memberikan maksudnya secara tertulis kepada kepala pemerintah setempat dengan jalan menyebutkan cara pengajaran dan tempat pengajarnya.

Batasan-batasan yang diberikan kepada sekolah-sekolah partikelir ini bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan sekolah liar non pemerintah yang mencapai puncaknya pada tahun 1932. Melalui instruksi sekretaris Negara dan dewan penasihat Hindia Belanda untuk urusan penjajahan C Snouck Hurgronje

⁹ *Ibid*, hlm 20-21

¹⁰ *Ibid*, hm 21

adalah tokoh utamanya, maka dikeluarkanlah *Toezi* Ordonantie Particular Onde rwij tanggal 17 september yang dinyatakan berlaku mulai 1 Oktober 1932.

Menurut ketentuan Ordonansi ini setiap mereka yang ingin memberikan pelajaran di sekolah-sekolah yang tidak sepenuhnya ataupun sebagian dibiayai oleh dana pemerintah harus memperoleh izin dari pemerintah sebelum memulai pekerjaan tersebut. Izin ini harus memenuhi syarat bahwa yang memerintahnya hendaknya dipercaya oleh pemerintah, bahwa ia tidak akan melanggar ketertiban dan keamanan dan ia lulusan sekolah pemerintah atau sekolah swasta yang bersubsidi.¹¹

3. Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru-Sekarang

Arah kebijakan Pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama Bidang Pendidikan 2015-2019 adalah:¹²

- a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD)
- b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- c. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan.
- d. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur.
- f. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama.

a. Kebijakan Tentang Kurikulum Pendidikan Islam

Secara Yuridis ada beberapa landasan hukum terkait kebijakan kurikulum pendidikan Islam Indonesia pasca Orde Baru yaitu amanat UUD 1945, TAP MPR No. 20/MPR/1999 tentang GHBN, UU No.20 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan PP No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai otonom, PP.No. 55 tahun 2007 dan peraturan Menteri Agama No 16/2010 tentang pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.¹³

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan mengenai kurikulum pendidikan Islam di Indonesia pasca Orde Baru juga diatur dalam UU sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 1, 36, 37, dan 38. Pasal 1 ayat 19 dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pasal

¹¹ *Ibid* hlm. 27-28

¹² <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=strategipendis> diakses 17 Desember, 2020

¹³ Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam*, Yogyakarta :Pustaka Belajar, cet-1, 2016 hlm. 268

36, dijelaskan bahwa: (1) pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar Nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. (3) Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam rangka NKRI dengan memperhatikan: peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan Nasional, tuntutan pembangunan daerah dan Nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan Iptek, Agama.¹⁴ Peraturan Menteri Agama no 16/2010 tentang pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah pasal 1 ayat 3 juga menjelaskan “kurikulum Pendidikan Agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Agama yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.

2. Kebijakan Anggaran Pendidikan Islam

Secara Yuridis, anggaran pendidikan di Indonesia, termasuk anggaran pendidikan Islam dijamin oleh UUD 1945, UU Sisdiknas tahun 2003, PP.No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama (Permenag) No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di sekolah.¹⁵

Sementara dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dalam satu bab tersendiri yaitu BAB XIII (Pendanaan Pendidikan) dengan 4 pasal yaitu pasal 46 tentang mengatur tanggung jawab Pendanaan, pasal 47 sumber pendanaan, pasal 48 pengelolaan dana pendidikan, pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan.

3. Kebijakan Kelembagaan Pendidikan Islam

Secara Yuridis, eksistensi lembaga pendidikan eksistensi Lembaga pendidikan Islam telah diatur dalam beberapa kebijakan kelembagaan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan Keagamaan, UU BHP Nomor 9/ 2009 yang kemudian di batalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11-14-21-126-136 tanggal 31 tahun 2010 yang membuat pemerintah mengeluarkan peraturan

¹⁴ *Ibid*, hlm 268-269

¹⁵ *Ibid*, hlm 310

Pemerintah nomor 66 tahun 2010 yang mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.¹⁶

4. Kebijakan Tentang Guru Agama Islam

Berikut ini beberapa kebijakan dan tata aturan terkait guru Agama. Dalam pasal 12 ayat 1 UU Sisdiknas dinyatakan “ setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : (a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Permen Agama no 16/2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah dalam pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa guru pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian pada pasal 13 guru pendidikan agama minimal memiliki kualifikasi akademis strata 1/ Diploma IV, dari program studi pendidikan Agama atau program studi Agama dari perguruan tinggi yang terakreditasi memiliki sertifikat profesi guru Agama.

Selain itu pasal 16 disebutkan bahwa Guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial profesional dan kepemimpinan.¹⁷

5. Kebijakan Pendidikan Islam di Irak

a. Kebijakan pada Masa Kejayaan Islam

Telah diketahui bahwa periode Abbasiyah adalah era baru dan identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dari segi pendidikan, ilmu pengetahuan termasuk *science*, kemajuan peradaban dan kultur pada zaman ini bukan identik sebagai masa keemasan Islam, akan tetapi era ini mengukur dengan kemajuan peradaban dunia. Sejak Khilafah Al-Mansur memerintah, karena dari ancaman luar terutama dari kaum syiah dan rawandiah, maka pusat pemerintahan pindah ke Baghdad. Pindahnya ibu kota negara ini dari Byzantium-damaskus ke sasaniah Baghdad, merupakan kota yang memiliki kebudayaan paling tinggi dan sudah lebih dahulu mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari pada wilayah syam.¹⁸ Kebijakan-kebijakan yang diterapkan ketika masa ini antara lain yaitu:

- a) Banyaknya cendikian yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana para khalifah abbasiyah, misalnya Mansur banyak mengangkat pegawai pemerintah dari cendikiawan-cendikiawan di Persia.
- b) Diakuinya Mazhab Mu'tazilah sebagai mazhab resmi Negara pada masa Al-Ma'mun. Mu'tazilah adalah aliran yang mengajarkan kemerdekaan dan kebebasan berfikir kepada manusia. Aliran ini berkembang pada awal dinasti Abbasiyah yang banyak memajukan kegiatan Intelektual dengan lebih menggunakan rasio baik dalam penerjemahan ilmu-ilmu luar maupun

¹⁶ *Ibid*, hlm 334

¹⁷ *Ibid*, hlm 265-358

¹⁸ Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta : Bagaskara Yogyakarta, cet. Vi, 2015) hlm. 172-173

memadukan dengan ajaran Islam. Inilah faktor jasa mereka memelihara Yunani dan selanjutnya dikembangkan melalui Kairo, dan selanjutnya ditransfer melalui pusat-pusat kegiatan Eropa Barat Daya seperti seville, Cardova, al-Hamra dan sebagainya.¹⁹ Menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing (Yunani, Syiria Ibrani, Persia, India, Mesir, dan lain-lain) ke dalam bahasa Arab. Buku-buku yang diterjemahkan meliputi ilmu kedokteran, mantiq (logika), filsafat, aljabar, pesawat, ilmu ukur, ilmu alam, ilmu kimia, ilmu hewan, dan ilmu falak. Pengetahuan keagamaan seperti fiqih, usul fiqih, hadits, mustalah hadits, tafsir, dan ilmu bahasa semakin berkembang karena di zaman Bani Umayyah usaha ini telah dirintis. Pada masa ini muncul ulama-ulama terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Muslim, Hasan Al Basri, Abu Bakar Ar Razy, dan lain-lain.²⁰

- c) Didirikanya Baitul Hikmah, Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Abbasiyah institusi ini diperluas penggunaannya. Baitul Hikmah, sudah dirintis oleh khalifah Harun al-Rasyid, menjadi pusat segala kegiatan keilmuan. Pada masa Harun al-Rasyid institusi ini bernama khizanah al-Hikmah (Khazanah Kebijaksanaan) yang berfungsi sebagai sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Di lembaga ini baik muslim maupun non muslim bekerja mengalih bahasakan sebagai naskah kuno dan menyusun berbagai penjelasan.²¹
- d) Kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan Islam saat itu, yaitu: pertama, kurikulum pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadits, prinsip-prinsip dasar Matematika dan pelajaran syair. Ada juga yang menambahnya dengan mata pelajaran nahwu dan cerita-cerita. Ada juga kurikulum yang dikembangkan sebatas menghafal Al-Quran dan mengkaji dasar-dasar pokok agama. Kedua, kurikulum pendidikan tinggi. Pada pendidikan tinggi, kurikulum sejalan dengan fase dimana dunia Islam mempersiapkan diri untuk memperdalam masalah agama, menyiarkan dan mempertahankannya. Akan tetapi bukan berarti pada saat itu, yang diajarkan melulu agama, karena ilmu yang erat kaitannya dengan agama seperti bahasa, sejarah, tafsir dan hadis juga diajarkan.²²

b. Kebijakan Pendidikan Irak Sekarang

Karakteristik pendidikan di Irak dapat dikatakan sebagai bentuk lembaga bercorak nasionalistik, dan progresif. Sebagai institusi pendidikan nasionalistik, maksudnya adalah untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme bagi generasi

¹⁹ *Ibid*, hlm 173

²⁰ Zuhairini, Moh Kasiran. Dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: DEPAG. 1985), hlm. 88

²¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2008), hlm 244

²² Zuhairini, Moh Kasiran. Dkk, *Sejarah...* hlm 100

mudah bangsa, untuk menarik kembali tradisi Irak sebagai pusat kemajuan kebudayaan Arab dimasa lampau, dan mendorong masa depannya demi kesejahteraan manusia. Adapun demokratis, maksudnya adalah memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan bagi setiap masyarakat tanpa mengenal kelas dan ras. Sementara itu, progresif maksudnya adalah mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.²³

c. Kebijakan Tentang Kurikulum Pendidikan

Sistem perjenjangan pendidikan di Irak tersusun dalam 3 tingkat, yaitu 6 tahun tingkat sekolah dasar serta 5 tahun sekolah menengah yang terbagi atas dua bagian, yakni 3 tahun pertama untuk sekolah menengah dan 2 tahun berikutnya untuk sekolah menengah lanjutan.

Kurikulum pada sekolah lanjutan pertama meliputi mata pelajaran agama, bahasa arab, bahasa inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, olahraga, dan menggambar. Pada sekolah lanjutan tingkat kedua terdapat kursus khusus untuk siswa perempuan tentang pengasuhan anak. Adapun program pelajaran untuk siswa laki-laki terbagi dalam tiga bagian, yaitu sains, niaga, dan sastra. Pendidikan dasar wajib diikuti dan berlangsung selama 6 tahun, jika muridnya berhasil. Seluruh Irak memberlakukan kurikulum standar meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menyediakan pelatihan pertanian secara praktis di sekolah-sekolah dasar pedesaan. Namun karakter kurikulum yang amat berorientasi tradisional dan banyak waktu pelajaran dikelas yang dihabiskan untuk belajar bahasa arab klasik, kajian Al-qur'an dan Islam, penanaman cara berpikir yang benar, cita-cita tinggi, serta rasa identitas dan kesetiaan bangsa yang kuat.

Pola pengajarannya sebagian besar merepresentasikan fakta yang harus dihafal oleh siswa tanpa daya kritis. Ujian menjadi amat penting. Keberhasilan siswa pada jenjang dasar, juga jenjang lanjutan, hampir seluruhnya ditentukan oleh hasil ujian *Bacaloriat* yang diadakan diseluruh negeri dan dilaksanakan pada akhir sekolah dasar yaitu pada waktu kelas enam.

Meskipun kehidupan konservatif masih tetap bertahan bagi kebanyakan keluarga muslim (terutama di daerah pedesaan) mereka menghindari berkembangnya *co-education* di Irak, kecuali ketika berada ditingkat universitas. Lebih dari sepertiga SD yang ada menerapkan koedukasi. Kebanyakan sekolah ini adalah sekolah perempuan yang terletak di kota besar dengan staf pengajar perempuan, dan disitu sedikit murid laki-laki yang diterima atau sebaliknya sekolah lelaki yang berada di kota, yang terlalu kecil lahanya untuk menampung dua jenis sekolah dasar, atau sekolah tanpa guru perempuan yang menjadi staf pengajar bagi sekolah perempuan. Dengan demikian, dibeberapa daerah koedukasi terjadi karena kondisi "terpaksa".²⁴ Kurikulum pada setiap sekolah menengah dibuat menurut kebutuhan niaga tetapi berbagai upaya

²³ Abd. Rahman Assegaf, *Internasionalisasi Pendidikan*, (Yogyakarta : Gama Media, 2003) hlm. 89

²⁴ *Ibid*, hlm. 91-92

dilakukan untuk memelihara keseimbangan yang baik antara studi teoretis dan aplikasi praktis dalam ilmu pengetahuan. Kurikulum komersial (niaga) meliputi pelatihan *accounting*, hukum dagang, aritmatika, surat menyurat, ekonomi, mengetik dan bahasa Inggris. Dalam hubungannya dengan pelajaran umum kurikulum pertanian sama dengan ekonomi keluarga dan ekonomi industri, yakni bahwa para murid di ketiga jurusan tersebut diberi latar belakang yang kuat dalam mata pelajaran budaya umum, seperti agama, bahasa Arab, bahasa Inggris, pengetahuan umum dan matematika, serta pertolongan pertama dan kesehatan. Mata pelajaran khusus bagi murid pertanian meliputi teori dan praktek produksi tanaman dan hewan, tanah, irigasi, pengolahan sawah dan ekonomi. Pada lulusan sekolah kejuruan menerima sertifikat tanda lulus menengah.

d. Kebijakan Tentang Anggaran Pendidikan

Pada pendidikan di Irak diatur dalam undang-undang pendidikan umum No.57 tahun 1940. Administrasi pendidikannya ditangani dan berada di bawah wewenang secara sentral oleh kementerian pendidikan yang menjadi anggota dewan menteri yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Menteri, meliputi menteri, dan Direktorat Jenderal Menteri dari Dewan Pendidikan melakukan supervisi langsung, pengawasan, dan administrasi semua lembaga pendidikan termasuk beberapa sekolah swasta yang mengikuti ketentuan kurikulum pemerintah, menetapkan kebijakan pendidikan, melakukan review dan menyetujui anggaran; menetapkan sendiri kurikulum dan buku teksnya; serta mengangkat semua tenaga pengajar dan administrasi. Tiap provinsi Irak memiliki direktur pendidikan sendiri yang berhak mengatur urusan administrasi pendidikan secara lokal. Sejak tahun 1968 ada upaya memberikan kewenangan kepada provinsi agar lebih bertanggung jawab dengan jalan pemberian tugas administrasi yang bersifat desentralisasi, khususnya pada jejang pendidikan dasar.

Pendidikan umum di Irak diberikan secara Cuma-cuma untuk semua tingkat, biaya seluruhnya ditanggung oleh Negara. Hampir 60% anggaran pendidikan dibiayai oleh menteri pendidikan dan 40% nya berasal dari kontribusi menteri perencanaan. Sekitar 25% APBN-nya disediakan untuk dana pendidikan.

e. Kebijakan tentang Kelembagaan Pendidikan

Pada tahun 1951 tanggung jawab untuk memimpin sekolah dasar dipindahkan dari Departemen Pendidikan ke pemerintah lokal (tingkat provinsi) di negara tersebut. Langkah desentralisasi pendidikan ini bertujuan untuk memberikan peluang pada daerah agar dapat lebih berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Kementerian pendidikan merasakan bahwa tanggung jawab utamanya adalah memperluas pendidikan dasar sesegera mungkin, mengingat terdapat 40% anak usia sekolah yang masih belum terdaftar. Walaupun pembangunan gedung sekolah baru belum memenuhi kebutuhan bagi pendidikan, lebih dari 1.500 gedung SD telah dibangun sejak tahun 1964. Program pemerintah yang bertujuan untuk memperluas pendidikan dasar telah berhasil. Hal itu telah tampak fakta

bahwa pada pertengahan tahun 1960-an terdapat 85% anak laki-laki dan 38 persen anak perempuan usia sekolah dasar yang telah terdaftar.²⁵

Pendidikan swasta memainkan peran penting, tetapi kian merosok pengaruhnya di Irak dibawah undang-undang Irak, para orang tua dilarang mengirim putra putrinya masuk ke sekolah dasar swasta. Akibatnya lembaga pendidikan swasta di Irak hanya ada pada level menengah atau tinggi. Sekolah swasta Irak dan sekolah asing umumnya mengikuti kurikulum pemerintah dan harus sesuai dengan pengaturan Negara tentang kualifikasi guru, buku teks, dan ujian. Sekolah swasta memberi penekan lebih pada bahasa asing dan berkonsentrasi pada pelajaran bahasa inggris meskipun begitu, bahasa pengantar di semua sekolah dasar dan menengah di irak menggunakan bahasa arab. Adapun bahasa inggris diajarkan sebagai bahasa kedua ditingkat lima hingga sebelas. Setelah perang Arab-Israel pada tahun 1967, sekolah tinggi baghdad yang diselenggarakan oleh kaum Jesuit, yakni sekolah persiapan (*preparatory*) dan universitas al-hikmah di ambil alih oleh pemerinta irak. Sekolah Jesuit pun disingkirkan. Walaupun saat ini dikelola oleh Universitas Baghdad, sekolah-sekolah tersebut tetap menggunakan pengantar bahasa inggris.²⁶

f. Kebijakan Tentang Guru

Agar dapat melatih ribuan guru, dibutuhkan staf sekolah dasar (*primary*), menengah (*intermediante*), dan persiapan (*preparatory*). Itulah sebabnya menteri pendidikan telah membuka sejumlah institut pelatihan guru, lebih dari 30 sekolah menawarkan kuliah 3 tahun bagi lulusan sekolah menengah yang hendak mengajar di sekolah dasar. Lulusan sekolah persiapan juga bisa melengkapi kuliahnya hanya dalam waktu 2 tahun. Kurikulumnya meliputi sejumlah mata pelajaran akademik umum dan kuliah khusus pedagogis.

Di akhir tahun para mahasiswa melakukan latihan mengajar dibawah pengawasan ketat para guru yang berpengalaman. Pelatihan bagi para guru sekolah menengah dilayani di institut tinggi pelatihan guru yang sekarang telah menjadi bagian universitas Baghdad. Para guru sekolah persiapan di rekrut dari kalangan lulusan sekolah tinggi pendidikan dan seklolah tinggi perempuan di baghdad. Akan tetapi, gelar B.A atau B.S, dari sekolah tinggi lain juga dipandang telah memenuhi kualifikasi mengajar di tingkat sekolah persiapan. Sekolah tinggi seni di universitas di Baghdad melatih para guru sekolah dasar, menengah, dan persiapan dalam program 3 tahun. institut tehnik tinggi di Baghdad menyediakan kuliah pelatihan guru selama 4 tahun bagi guru sekolah tehnik dan kejuruan. Pembelajaran tahun kelima dalam pelatihan ini diberikan melalui metode praktik mengajar disekolah-sekolah tersebut, yang bisa di ambil oleh mahasiswa pilihan.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm. 92

²⁶ *Ibid*, hlm. 95

²⁷ *Ibid*, hlm. 95-96

E. UNIVERSITAS BAGHDAD

1. Universitas Baghdad

Pendidikan universitas modern secara resmi telah diatur dalam Undang-Undang No. 60 Tahun 1956 yang di dalamnya juga menrebutkan adanya pendidikan Universitas Baghdad. Universitas ini secara sah berada dalam pengawasan langsung Dewan Menteri, tetapi pada kenyataannya merupakan sementara, yakni struktur administrasinya ditangani oleh Dewan Universitas yang meliputi rektor universitas, pembantu rektor, para dekan sekolah tinggi, sebagian guru besar beserta perwakilan dari Menteri Pendidikan.²⁸ Posisi rektor adalah *independen* secara penuh dan bertanggung jawab dalam urusan akademik, administrasi dan keuangan universitas. Dia menyanggah status kementerian dalam mengatur dan mempresentasikan universitasnya. Universitas tersebut diakui oleh hukum melalui promosi kegiatan penelitian ilmiah dan pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan warisan Negara Islam-Arab. Biaya tunjangan dan universitas seluruhnya ditanggung oleh Negara. Rata-rata program studinya selesai dalam jangka waktu empat tahun, lalu menyanggah gelar B.A atau B.S (*Bachelor of Arts* atau *Bachelor of Science*).

Universitas Bagdad, selain memiliki fakultas-fakultas umum seperti kedokteran, teknik, ekonomi, hukum, juga fakultas keagamaan seperti fakultas adab, Al-'Ulum al-Islamiya atau fakultas syari'ah dan fakultas tarbiyah yang cukup ternama.

Universitas Baghdad didirikan pada tahun 1957. Secara geografis, kota Bagdad dibagi menjadi dua kawasan yang dibelah oleh sungai Tigris (dijlah). Sebelah selatan kota ini adalah Karakh dan sebelah utaranya adalah Rashafa. Pada kawasan Karakh inilah, kampus utama universitas bagdad berlokasi (dan dikenal sebagai kawasan bernama Jadriya) dimana seluruh fakultas, jurusan, dan program studi berada di kampus utama ini. Sedangkan beberapa fakultas seperti Tarbiyah, adab, Al-'Ulum al-Islamiya (syari'ah) dan farmasi, berada diluar kampus utama tersebut (yakni di kawasan Rasafa), namun masih dalam satu kompleks yang sama yang dikenal dengan sebutan Bab Al-Mu'azom. Universitas Bagdad saat ini memiliki sekitar kurang lebih 28 fakultas dengan berbagai disiplin atau bidang spesialisasi.

1) Fakultas Al- 'Ulum al- Islamiya/Fakultas Syari'ah

Fakultas Syari'ah mula-mula namanya Madrasah Abu Hanifah, kemudian diubah menjadi Madrasah Al-Imam A'zham.²⁹ Sesudah itu diubah lagi menjadi Darul Ulum Diniyah. Kemudian menjadi Fakultas Syari'ah, salah satu fakultas dari Universitas Bagdad. Dengan demikian, Fakultas Syari'ah dibawah Kementerian Pengajaran, sedangkan sebelumnya berdiri sendiri di bawah Kantor Urusan Wakaf. Tujuan Fakultas Syari'ah ialah memberikan pelajaran kecerdasan yang teratur pada tingkat tinggi dan ilmu syari'at Islam, bahasa Arab

²⁸ Abd Racman Assegaf, *Internalisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm 96

²⁹ M. Ali Hasan, Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003) hlm 229

dan kesusastraan, sejarah Islam, sejarah agama-agama dan ketuhanan, ilmu-ilmu kemasyarakatan dan pendidikan. Selanjutnya Fakultas Syari'ah mengubah namanya menjadi Fakultas Ilmu Keislaman (Kulliyat Al-'Ulum Al-Islamiya).

Fakultas Syari'ah/Al-'Ulum al-Islamiya memberikan gelar ilmiah Bacalorious kepada mahasiswa yang telah lulus dalam ujian penghabisan dalam ilmu-ilmu tersebut di atas. Belajar pada fakultas Syari'ah adalah dengan Cuma-Cuma, tidak dipungut uang kuliah, bahkan Kementrian Pengajaran menyediakan kampung mahasiswa dengan belanjanya sendiri, serta diberikan makanan, pakaian, kitab-kitab kepada mahasiswa secukupnya, dan selain daripada itu diberi pula uang saku tiap-tiap bulan. Lama pelajaran empat tahun sesudah pelajaran Tsanawiyah. Fakultas ini menyelenggarakan jenjang pendidikan tingkat *undergraduate studies* (S1) dan *graduate studies* (S2 dan S3).

Fakultas Al-'Ulum al-Islamiya saat ini terdiri atas tiga jurusan yaitu jurusan syari'ah (Qism al-Syari'a), jurusan Usul al-Din (Qism al-Din) dan jurusan Bahasa Arab (Qism al-Lughoh al-Arabiya). Jurusan yang terakhir disebutkan memberikan penekanan pada segi nas-nas al-Qur'an dan Hadits serta literatur sastra.³⁰

Daftar Pelajaran Fakultas Syari'ah Universitas Bagdad:

- 1) Tingkat I: Ilmu Al-Qur'an, Hadits, Ahwal Syakhsiyah, Munahi, Nahu, Balaghoh, Arudl, Adab, Tarikh, Mantiq dan Bahasa Inggris
 - 2) Tingkat II: Tafsir, Hadits, Fiqh, Aqaid, Nahu, Balaghoh, Adab, Fiqh Lughah, dan Tarikh
 - 3) Tingkat III: Tafsir, Hadits, Fiqh, Usul Fiqh, Nahu, Adab, Nushush, Ilmu Ketuhanan, Adyan, Sosiologi, Ilmu Jiwa, Filsafat Umum
 - 4) Tingkat IV: Tafsir, Fiqh, Usul Fiqh, Murafa'at, Nahu, Naqd, Filsafat Islam, Pendidikan, Bahasa Persia.
- 2) Fakultas Tarbiyah

Pada tahun 1923 M, diadakan kursus petang hari untuk guru-guru Sekolah Rakyat, untuk mendidik mereka menjadi guru pada sekolah menengah. Kemudian dirubah sistem ini dengan mengadakan sekolah sendiri, pelajaran-pelajarannya diterima dari murid-murid keluaran sekolah menengah dan lama pelajarannya dua tahun. Tetapi sekolah itu ditutup pada tahun 1931 M. kemudian dibuka kembali pada tahun 1935, dan lama pelajarannya dirubah menjadi tiga tahun pada tahun 1939 hingga sekarang.

Dahulu pelajar-pelajarannya putera saja, dan pada tahun 1937 baru mulai menerima pelajar-pelajar puteri. Pada tahun 1959 Darul Mu'allimin al-Aliyah dirubah namanya menjadi fakultas Tarbiyah sebagai salah satu Fakultas dari Universitas Bagdad, sedang rencana pengajarannya tetap seperti sedia kala.³¹ Mahasiswa yang diterima masuk Fakultas Tarbiyah ialah pelajar yang berijazah sekolah Tsanawiyah atau sederajat dengan itu. Begitu juga dapat diterima guru keluaran Mu'allimun Ibtidaiyah, bila ia telah praktek mengajar sekurang-

³⁰ Ismatu Ropi Kusmana, *Belajar Islam di Timur Tengah*, (Departemen Agama RI, 2007) hlm 90

³¹M. Ali Hasan, *Kapita...*hlm. 231

kurangnya setahun lamanya serta mendapat persetujuan dari Kementerian Pengajaran.

Lama belajar pada fakultas Tarbiyah empat tahun dan mahasiswa yang lulus dalam ujian penghabisan diberi gelar *Licence* dalam adab atau ulum. Fakultas tarbiyah terdiri dari beberapa jurusan:

- 1) Jurusan Bahasa Arab
- 2) Jurusan Bahasa-bahasa Asing
- 3) Jurusan Ilmu-ilmu Kemasyarakatan
- 4) Jurusan Ilmu-ilmu Hayat
- 5) Jurusan Kimia
- 6) Jurusan Ilmu Pasti
- 7) Jurusan Ilmu Alam

Ada tiap-tiap jurusan itu diberikan ilmu pendidikan dan ilmu jiwa mulai dari tingkat II s/d tingkat IV, untuk menyiapkan mahasiswa menjadi guru pada sekolah menengah dalam mata pelajaran yang dipelajarinya pada jurusan yang dipilih.

Lain dari pada itu ada lagi jurusan pendidikan dan ilmu jiwa, yaitu untuk terkhusus dalam ilmu pendidikan dan ilmu jiwa, lama belajarnya setahun. Tujuannya membidik mahasiswa untuk menjadi guru ilmu pendidikan dan ilmu jiwa pada sekolah Mu'allimin/Mu'allimat Ibtidaiyah atau menjadi pemeriksa (pemilik di Indonesia) sekolah rakyat atau kepala sekolah menengah. Mahasiswa yang diterima masuk jurusan pendidikan atau ilmu jiwa itu ialah mahasiswa yang telah mendapat gelar *License* pada salah satu jurusan tersebut di atas dan telah berpengalaman praktek mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun, serta menguasai bahasa Inggris sehingga dapat membaca buku-buku bahasa Inggris dalam ilmu yang akan dipelajarinya sebagai sumber yang asli.

2. Kurikulum dan Sitem Evaluasi

Beberapa fakultas di Universitas Bagdad termasuk fakultas Syari'ah menggunakan sistem kurikulum paket tahunan (*nizom thanawi*), bukan sistem kredit smester (SKS).³² Sistem Kredit Smester umumnya hanya digunakan pada program-program eksakta seperti pada Fakultas Kedokteran, Teknik dan MIPA. Konsekuensinya dengan sistem kurikulum paket tahunan ini nilai kumulatif yang diperoleh mahasiswa akan menentukan naik dan tidaknya tingkatan mereka setiap tahun. Untuk terus naik pada tingkatan yang lebih tinggi, mahasiswa harus mencapai nilai kumulatif yang memadahi tiap tahunnya. Urut-urutan bobot nilainya adalah sebagai berikut:

³² Ismatu Ropi Kusmana, *Belajar Islam...hlm . 91*

Tabel 6.1
Urutan Bobot Nilai

No	Bobot Kelulusan	Nilai
1.	Mumtaz/cum laude	90-100 (A)
2.	Jayyid jiddan/very good	80-89 (B+)
3.	Jayyid/good	70-79 (B)
4.	Mutawasit/redeemable pass	60-69 (C+)
5.	Maqbul/redeemable	50-59 (C)
6.	Rashib/fail	Dibawah 50 F

Sedangkan sistem evaluasi yang digunakan di Universitas Bagdad hampir menyerupai sistem evaluasi yang digunakan secara umum di sekolah dasar dan menengah di Indonesia, yaitu terdiri atas tiga tahapan evaluasi: ujian awal tahun (*imtihan al-awwal*), ujian pertengahan tahun (*imtihan al-wusta*), dan ujian akhir tahun (*imtihan al-niha'i*). Lebih lanjut, setiap tahap evaluasi terbagi atas dua jenis ujian yaitu ujian lisan (*imtihan Shafawi*) dan ujian tulisan lisan (*imtihan tahriri*). Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 50 dari setiap mata kuliah, diberi peluang untuk mengikuti ujian ulangan (*daur thani*). Bila mahasiswa masih tetap tidak mampu memperbaiki nilainya, maka ia akan tinggal kelas, meskipun hanya disebabkan oleh satu mata kuliah saja. Bagi mahasiswa yang gagal naik kelas dua kali berturut-turut, maka resiko yang diterima adalah yang bersangkutan akan dikeluarkan dari universitas.

Adapun komposisi materi-materi mata kuliah dalam kurikulum umumnya disesuaikan dengan kurikulum perguruan tinggi yang juga diberlakukan di beberapa Negara lain di kawasan teluk seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait dan Jordan.

3. Staf Pengajar Dosen dan Pola Hubungan dengan Manusia

Fakultas Syari'ah didukung oleh para staf pengajar yang hampir seluruhnya berpendidikan doctor (S3) bahkan sebagian besar telah memperoleh gelar guru besar (*professor*) dalam bidangnya masing-masing.³³ Kebanyakan mereka adalah para alumni berbagai universitas di kota Bagdad dan beberapa universitas mancanegara. Baik dari Negara-negara Arab (khususnya Universitas Al-Azhar) maupun dari Barat seperti Jerman, Inggris dan Amerika. Pada fakultas ini hanya beberapa staf pengajar saja yang bergelar master dan itu pun untuk mata kuliah tertentu seperti pendidikan kebangsaan, bahasa Inggris dan ilmu komputer.

Dosen-dosen pada fakultas ini umumnya mempunyai pengalaman mengajar bukan saja pada Universitas Bagdad. Beberapa dari mereka juga tercatat sebagai tenaga pengajar atau dosen terbang pada beberapa universitas di Negara Arab dan kawasan teluk.

Pola hubungan antara para pendidik dan peserta didik sangat dekat dan kekeluargaan. Para dosen selalu membuka diri dan menyediakan beberapa hari

³³ *Ibid*, hlm. 93

khusus untuk konsultasi bagi para mahasiswa yang biasanya dilakukan diruangan khusus ruangan ataupun di rumah dosen yang bersangkutan.

Dalam rangka meningkatkan mutu para staf pengajar, jaringan (network) antar perguruan tinggi menempati peran yang strategis. Di Universitas Bagdad, hal tersebut merupakan hal yang sudah terlembaga dengan cukup baik. Hal ini bias dilihat dari frekuensi tenaga pengajar di Universitas ini yang juga mengajar di Universitas lain dan sebaliknya.

4. Disiplin dan metodologi pengajaran

Kedisiplinan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan pihak universitas merupakan hal yang sangat penting di Universitas Bagdad. Pelanggaran terhadap peraturan mendapatkan sanksi yang cukup berat. Salah satu contoh disiplin ini adalah peraturan penggunaan baju seragam yang harus dipakai selama di kampus. Pada musim panas mahasiswa diharuskan memakai seragam baju warna putih dengan celana panjang warna abu-abu gelap atau biru gelap atau hitam. Sedangkan bagi mahasiswi, baju terusan (*ghamiz*) yang mereka gunakan harus berwarna agak gelap. Kalaupun mereka menggunakan baju atasan, diharuskan berwarna putih dengan rok yang berwarna gelap. Pada musim dingin para mahasiswa diharuskan menggunakan jas warna abu-abu gelap atau biru gelap atau hitam dengan celana panjang berwarna gelap. Peraturan lainnya yang cukup ketat adalah kehadiran pada ujian akhir tahun. bagi yang tidak hadir maka sanksinya yang paling keras adalah dikeluarkan dari universitas kecuali yang bersangkutan mampu menunjukkan alasan yang cukup masuk akal atau surat keterangan sakit dari dokter.

Metodologi pengajaran yang diterapkan selain dengan menggunakan ceramah (*muhadara*), juga dengan cara diskusi kelas dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Tiap mahasiswa harus mengambil bagian dalam diskusi tersebut yang biasanya dalam bentuk *project paper* yang harus diserahkan ke dosen yang bersangkutan sebelum dimulainya ujian akhir tahun.³⁴

5. Sarana Penunjang Pendidikan dan Ekstra Kulikurel

1) Sarana Penunjang Pendidikan:

a. Perpustakaan

Secara umum, perpustakaan di universitas-universitas Irak bias dikatakan cukup terprogram, maju dan professional dan berjumlah tidak kurang dari 90 perpustakaan. Perpustakaan di universitas Bagdad dengan 1 perpustakaan pusat dan 28 perpustakaan fakultas, merupakan fakultas terlama dan terbesar.

Perpustakaan pusat yang berlokasi di kampus utama diperlengkapi dengan fasilitas dan teknologi cukup baik yang menggunakan sistem peroperasian OPAC, CD ROM, *on-line searching*, akses internet serta memiliki perangkat audio-visual. Manuskrip yang tersimpan pada perpustakaan Universitas Bagdad

³⁴ *Ibid*, hlm. 94

diantaranya merupakan tulisan tangan asli para pengarang dari seluruh pelosok negeri dan sudah diubah dalam bentuk *microform* (*microfiches dan microfilm*).

Sedangkan perpustakaan yang ada pada masing-masing fakultas adalah sebagian perpustakaan pembantu yang fungsinya memberi pelayanan kepada komunitas pemakainya. Masing-masing perpustakaan fakultas hanya berkonsentrasi pada pengembangan koleksi yang relevan dan sesuai dengan karakteristik fakultas bersangkutan. Setiap tahun ajaran baru seluruh mahasiswa akan diberikan pinjaman buku-buku wajib yang berkaitan dengan mata kuliah yang diambil mahasiswa.

b. Laboratorium Komputer dan laboratorium bahasa

Bagi tiap-tiap fakultas di universitas Bagdad difasilitasi dengan laboratorium komputer dan lab bahasa khususnya bagi fakultas sastra jurusan Bahasa Inggris.

c. Beasiswa dan Asrama

Bagi para mahasiswa asing (*ajnabi*), beasiswa yang mereka peroleh biasanya disponsori oleh Kementrian Pendidikan Tinggi Dan Riset Ilmu Pengetahuan. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut para mahasiswa asing dapat langsung mengajukan ke Kementrian tersebut. Ada juga beasiswa yang diperoleh dari hasil Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara pemerintah Irak dengan Negara lain (*Government to government*) atau antara pemerintah Irak dengan organisasi-organisasi non pemerintah.

Mereka yang diterima sebagai pemegang beasiswa akan memperoleh berbagai fasilitas seperti uang saku bulanan, akomodasi, berupa tempat tinggal di asrama dan jaminan kesehatan berobat gratis untuk segala jenis penyakit (baik ringan maupun berat di rumah sakit milik pemerintah) dengan hanya membawa surat keterangan dari pihak universitas.³⁵ Dan bagi semua mahasiswa baik orang arab sendiri ataupun orang asing harus mendaftarkan diri untuk tinggal di asrama mahasiswa (*aqsam dakhili*).

2) Ekstra Kurikuler

Jenis aktivitas ekstra kurikuler yang umumnya dilakukan mahasiswa di Irak antara lain adalah kegiatan layanan pengabdian masyarakat, kegiatan di bidang seni dan budaya, kegiatan olahraga dan rekreasi, atau bekerja menjadi tenaga honorer sebagai advisor.

Di Irak, ada organisasi induk khusus yang menangani berbagai masalah dan aktifitas pelajar, mahasiswa dan pemuda dikenal dengan sebutan Ittihad Talaba wa Shabab al-Watani. Untuk para mahasiswa asing biasanya tergabung dalam organisasi tersendiri yaitu Ittihad Talaba Sahaba. Adapun bagi masing-masing Negara ada juga organisasi kemahasiswaan tersendiri. Mahasiswa asal Indonesia misalnya memiliki satu organisasi yang disebut Ittihad Talaba Indunisiya atau Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) atau Indonesian Student Association.³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 97

³⁶ *Ibid*, hlm. 98

F. PERBANDINGAN PENDIDIKAN IRAK DAN INDONESIA

1. Perbedaan, Persamaan, Kelebihan Dan Kekurangan
 - a. Di Irak, tidak ada pendidikan pra sekolah seperti PAUD maupun TK
 - b. Di Irak pendidikan Tsanawiyah di tempuh selama 2 tahun, sedangkan di Indonesia 3 tahun.³⁷
 - c. Biaya pendidikan di tanggung oleh pemerintah sedangkan di Indonesia tidak semua biaya pendidikan di tanggung oleh pemerintah
 - d. Disiplin dan metodologi pengajaran, apabila ada pelanggaran mengenai cara berpakaian dari para mahasiswa di universitas maka akan di tindak tegas, lain halnya dengan di Indonesia, masih ada toleransi dalam menangani kedisiplinan karena latar belakang budayanya berbeda.
 - e. Kurikulumnya ada sedikit perbedaan mengenai Sistem Kredit Semester di Irak hanya digunakan pada program-program eksakta seperti pada Fakultas Kedokteran, Teknik dan MIPA, sedangkan di Indonesia diterapkan pada semua universitas
2. Persamaan sistem pendidikan di Irak dan Indonesia
 - a. Fasilitas pendidikan pada universitas pada umumnya sama
 - b. Jenjang pendidikan setelah pra sekolah
 - c. Mempunyai Penduduk Mayoritas Islam
3. Kelebihan sistem pendidikan di Irak dan Indonesia
 - a. Adanya fakultas Syari'ah dengan cuma-cuma, tidak dipungut uang kuliah, bahkan Kementerian Pengajaran menyediakan kampung mahasiswa dengan belanjanya sendiri, serta diberikan makanan, pakaian, kitab-kitab kepada mahasiswa secukupnya, dan selain daripada itu diberi pula uang saku tiap-tiap bulan yang tidak dilakukan di negara lain.
 - b. Bagi mahasiswi di Irak cara berpakaian mereka benar-benar disesuaikan dengan ajaran islam sesuai latar belakang budaya islam yang ada Irak dibandingkan dengan cara berpakaian para mahasiswi Islam di Indonesia yang kurang memperhatikan nilai-nilai Islam.
4. Kekurangan sistem pendidikan di Irak dan Indonesia
 - a. Masyarakat Irak terlalu mengutamakan kesukumannya dan kurang menjaga kerukunan sesama warga dan lemahnya rasa nasionalisme pada negaranya, sehingga sering terjadi percekcoakan antar bangsa, dan hal ini akan mengganggu proses belajar bagi anak bangsa, dan akan menyebabkan lemahnya minat belajar pada warganya, dan juga akan mudah di pecah belah oleh bangsa pendatang seperti adanya intervensi Amerika terhadap Irak dn terjadinya perang saudara sesama muslim seperti adanya perang Iran Irak.
 - b. Sedangkan kekurangan pendidikan di Indonesia adalah banyak di temukan adanya sistem pembelajaran yang kurang disiplin dalam melaksanakan pendidikan baik dari pengajar maupun pendidik sehingga kualitas pendidikan menjadi rendah.

³⁷ Abd. Racman Assegaf, MA. *Internalisasi....* Hlm. 96

G. PENUTUP

Sistem pendidikan di Irak tidak jauh berbeda dengan sistem-sistem pendidikan yang ada di Negara Timur Tengah lainnya, yaitu: (a) tingkat Ibtidaiyah lamanya 6 tahun (enam kelas); (b) tingkat Mutawassitah, lamanya tiga tahun; (c) tingkat Tsanawiyah, lamanya dua tahun; dan (d) tingkat tinggi/Universitas, lamanya empat tahun. Pada tingkat Ibtidaiyah dari kelas 1 s/d kelas VI diajarkan Agama 2 jam dalam seminggu. Begitu juga tingkat Mutawassitah dan Tsanawiyah, pada tiap-tiap kelas diajarkan agama 2 jam seminggu.

Kebijakan Pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan pendidikan bahkan eksistensi Negara-Negara dalam persaingan global. Berdasarkan uraian diatas kebijakan pendidikan di Irak dan di Indonesia berupaya untuk membuat pendidikan menjadi lebih berkualitas dan mampu mengikuti persaingan global.

Situasi dan kondisi yang berkembang di suatu Negara merupakan suatu pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan di Negara tersebut. Kebijakan pendidikan di Irak dan Indonesia memiliki banyak perbedaan, hal ini karena setiap Negara menetapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi suatu Negara tersebut. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan kurikulum dan anggaran pendidikan. Di Irak difokuskan untuk pendidikan Dasar karena tujuannya untuk memberantas buta huruf dan Anggaran pendidikan dari pemerintah 25 % dari APBN sedangkan Indonesia 20% dari APBN.

Ada beberapa indikasi kalau pendidikan Irak bisa dibangkitkan kembali. Program Beasiswa Prakarsa Pendidikan Irak (IEI) memberi rakyat Irak harapan itu. Program ini merupakan prakarsa nasional yang bertujuan mengirimkan ribuan mahasiswa Irak untuk belajar di luar negeri di universitas-universitas terpadang di Amerika Serikat dan Inggris.

Universitas Bagdad didirikan pada tahun 1957. Secara geografis, kota Bagdad dibagi menjadi dua kawasan yang dibelah oleh sungai Tigris (dijlah). Universitas Bagdad saat ini memiliki sekitar kurang lebih 28 fakultas dengan berbagai disiplin atau bidang spesialisasi.

Adapun uraian perbandingan pendidikan islam irak dengan indonesia, Sistem pendidikan di Irak berbasis Islam. Ini terbukti dengan adanya jenjang pendidikannya yaitu

1. Tingkat Ibtidaiyah lamanya 6 tahun,
2. Tingkat Mutawssithah lamanya 3 tahun,
3. Tingkat Tsanawiyah lamanya 2 tahun,
4. Tingkat Tinggi/ Universtas, lamanya 4 tahun

Struktur kelembagaan Irak mempunyai:

1. Kurikulum dan Sitem Evaluasi
2. Staf Pengajar Dosen dan Pola Hubungan dengan Manusia
3. Disiplin dan metodologi pengajaran
4. Sarana Penunjang Pendidikan dan Ekstra Kurikuler

DAFTAR PUSTAKA

Assegaf, Abd.Rachman. *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media, 2003

<http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=strategipendis>

Kusmana, Ismatu Ropi. *Belajar Islam di Timur Tengah*. Departemen Agama RI, 2007

Karim, Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta : Bagaskara Yogyakarta, cet. Vi, 2015.

Mahfud, Choirul. *Politik Pendidikan Islam*, Yogyakarta :Pustaka Belajar, cet-1, 2016

Moh Kasiran, Zuhairini. Dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: DEPAG. 1985

M. Ali Hasan, Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003

Nugroho, Riant. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008

Soebahar, Abd. Halim. *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordanasi guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: Rajawali Pres, cet-1, 2013

Yunus, Mahmud. *Perbandingan Pendidikan Modern di Negara Islam dan Intisari Pendidikan Barat*. Jakarta : Al Hidayah, 1968

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2008

BAB VII

SISTEM PENDIDIKAN NEGARA MALAYSIA

Almirta

Almirta12@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi peradaban sebuah bangsa. Karena itulah, kemajuan sebuah bangsa sejatinya tidak pernah lepas dari peranan pendidikan. Semakin berkualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan semakin meningkat pula kualitas peradaban bangsa tersebut. Suatu negara, meskipun memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah dan juga didukung sumber daya modal yang banyak tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah, tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber manusianya. Hal ini hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui penekanan pada pentingnya pendidikan.

Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus di tempatkan pada posisi yang tinggi. Pada tahun 1972 *The International Comission for Education Development* dari UNESCO sudah mengingatkan bangsa-bangsa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan sebuah bangsa, harus dimulai dengan pendidikan sebab pendidikan adalah kunci. Tanpa kunci itu segala usaha akan sia-sia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang membuat negara-negara maju memberi prioritas tinggi pada pendidikan, mengadakan modernisasi dan penyempurnaan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk meningkatkan anggaran pendidikan secara progresif.¹

Sistem pendidikan yang diterapkan setiap negara memang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal seperti faktor sosio-kultural, lingkungan, historis, geografis, ekonomi, politik negara, kehidupan agama, dan hal-hal lainnya. Dalam menerapkan sistem pendidikan, setiap negara pasti memiliki pertimbangan selain faktor tersebut yakni tujuan pelaksanaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan penerapan sistem pendidikan yang sesuai akan mengarah pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan cita-cita ideal bangsa.

Malaysia, sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, baik pemerintah maupun rakyatnya menyadari betul pentingnya pendidikan dalam membangun dan memajukan bangsa. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang Sistem Pendidikan di Malaysia. Kemudian juga penulis secara

¹Rahmi Novalita, 2017, *Perbandingan Pendidikan Negara Belgia Dengan Negara Indonesia* , Jurnal Spasial, [Online], Vol. 7 (3), 12 halaman. Tersedia: <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/spasial> , (21 Desember 2020)

husus akan menguraikan tentang pendidikan Islam di Malaysia, untuk selanjutnya membandingkannya dengan pendidikan Islam di Indonesia.

B. PROFIL NEGARA MALAYSIA

Negara Malaysia memiliki luas wilayah sebesar 329.847 km² yang terpisah menjadi dua kawasan oleh Laut Tiongkok Selatan yaitu Malaysia Barat yang berada di semenanjung Malaysia benua Asia dan Malaysia Timur yang berada di Pulau Kalimantan. Sebagaimana dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 7.1: Peta Negara Malaysia

Berdasarkan peta Malaysia di atas, secara umum dapat diketahui batas wilayah negara Malaysia adalah sebagai berikut:²

Batas wilayah Malaysia Barat:

1. Sebelah Barat Daya: berbatasan dengan Thailand
2. Sebelah Barat-Selatan: dibatasi oleh Selat Malaka
3. Sebelah Tenggara: berbatasan dengan Singapura
4. Sebelah Timur: dibatasi oleh Laut Cina Selatan

Batas wilayah Malaysia Timur:

1. Sebelah Barat hingga Utara: dibatasi oleh Laut Cina Selatan, Brunei Darussalam, dan Laut Sulu
2. Sebelah Timur hingga Utara: dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Indonesia

Malaysia adalah sebuah negara monarki konstitusional federal yang terletak di Asia Tenggara. Ibukota Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya merupakan pusat pemerintahan persekutuan. Kepala Negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong yang digilirkan setiap lima tahun diantara sembilan Sultan Negeri Melayu. Kesembilan Sultan Negeri Melayu yang dapat dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong maupun memilih Yang di-Pertuan Agong adalah Sultan Johor, Sultan Kedah, Sultan Kelantan, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan,

²<https://www.geologinesia.com/2018/01/peta-negara-malaysia.html>

Sultan Pahang, Sultan Perak, Raja Perlis, Sultan Selangor dan Sultan Terengganu. Sedangkan kepala pemerintahan Malaysia adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.³

Jumlah penduduk Malaysia sebanyak 32.652.083 jiwa (estimasi Juli 2020). Penduduk Malaysia mayoritas beragama Islam (61,3%). Selebihnya, Buddha (19,8%), Kristen (9,2%), Hindu (6,3%) dan agama lainnya (3,4%). Bahasa Malaysia yang pada dasarnya berasal dari Bahasa Melayu adalah bahasa resmi negara Malaysia. Suku terbesar di Malaysia adalah Bumiputera (gabungan suku Melayu, Orang Asli, Dayak dan Anak Negeri) yaitu sebanyak 62%. Sedangkan suku lainnya seperti Tionghoa sebanyak 20,6%, India sebanyak 6,2%, dan lainnya 11,2%.⁴

Iklim di negara Malaysia tidak berbeda jauh dengan iklim yang ada di Indonesia. Iklim yang dimaksud yaitu iklim tropis, dengan pengaruh angin musim. Rata-rata suhu udara tahunan tinggi sebab pengaruh laut yang mengelilinginya. Variasi curah hujan di Negara Malaysia, besar. Meskipun semua tempat menerima curah hujan 1500-4500 mm per tahun. Besarnya curah hujan bergantung pada ketinggian dan kemungkinan masing-masing tempat untuk menerima pengaruh angin musim. Di pantai barat Semenanjung Malaya musim hujan berlangsung dari bulan September sampai Desember. Sedangkan, di bagian pantai timur Semenanjung Malaya dan Malaysia Timur mengalami hujan dari bulan Oktober sampai Februari. Lebih jelasnya, Malaysia memiliki iklim laut khatulistiwa dengan hujan yang lebat dan suhu tinggi, dan dipengaruhi oleh pembalikan arah angin sesuai dengan musim. Pengaruh kepulauan, menyebabkan suhu rata-rata Malaysia barat dan timur dapat mencapai 270 celcius dengan perubahan kurang dari 20 celcius.⁵

Di bidang Perekonomian, Malaysia merupakan negara penghasil Karet dan Minyak Sawit Terbesar di dunia. Pendapatan Domestik Bruto Malaysia pada tahun 2017 berdasarkan Paritas Daya Beli adalah sebesar US\$ 933,3 miliar. Sedangkan Pendapatan Perkapita Malaysia adalah sebesar US\$ 29.100,-. Komoditas Agrikultur utama yang dihasilkan oleh Malaysia diantaranya adalah minyak sawit, karet, kakao, beras, dan kayu. Di bidang Perindustrian, beberapa industri penting Malaysia diantaranya seperti pengolah minyak sawit dan karet, perminyakan dan gas bumi, farmasi dan produk-produk elektronika.⁶

Negara Malaysia memiliki dasar negara yang disebut dengan "Rukun Negara". Jika di Indonesia ada Pancasila yang memuat lima sila, maka Rukun Negara Malaysia juga ada lima, yaitu:⁷

1. Kepercayaan Kepada Tuhan
2. Kesetiaan kepada raja dan Negara
3. Keluhuran perlembagaan

³<https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-malaysia/>

⁴https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_my.html

⁵https://www.portal-ilmu.com/2017/07/profil-negara-malaysia_6.html

⁶ *Op. Cit*

⁷<https://www.belajarsosial.com/2016/10/profil-negara-berkembang-malaysia.html>

4. Kedaulatan Undang-undang
5. Kesopanan dan kesusilaan

C. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN NEGARA MALAYSIA

Pendidikan Negara Malaysia telah mengalami evolusi yang sejalan dengan pembangunan dan kemajuan negara ini dan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Inggris.⁸ Evolusi pendidikan Negara Malaysia ini meliputi zaman pra-kemerdekaan (sebelum 1957), zaman pasca merdeka (1957 – 1970), zaman dasar ekonomi baru (1971 -1990), zaman dasar pembangunan negara (1991 – 2000), dan zaman dasar wawasan negara yang berlangsung hingga saat ini. Pada mulanya, pendidikan di Malaysia menggunakan sistem pondok yang dijalankan di madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sekolah ini memiliki kurikulum yang lebih terstruktur, waktu belajar yang terjadwal, sarana dan prasana yang memadai. Tujuan sekolah tersebut ialah untuk melahirkan sumber daya yang bermoral tinggi. Selain sekolah pondok tersebut, adapula *sekolah vernakular* yang menggunakan bahasa ibu dalam sistem pengajarannya. Bahasa yang digunakan di antaranya yaitu Melayu, Cina, dan Tamil.⁹

Pada zaman penjajahan Inggris, pendidikan di Malaysia memiliki ciri-ciri yakni kurikulum yang diterapkan sekolah satu dengan lainnya berbeda, lokasi sekolah bagi setiap kaum terpisah, setiap jenis sekolah khusus mengikuti kaum, bahasa pengantar berbeda-beda seperti Sekolah Cina berbahasa pengantar bahasa Mandarin, dan Sekolah Tamil berbahasa pengantar bahasa Tamil. Pada masa itu, sistem penjajahan tersebut menggunakan '*monitoral system*' di mana guru-guru didatangkan dari Inggris dan adanya peningkatan mutu sekolah. Guru-guru pada saat itu diberi pelatihan kerja profesional dan dikirim ke *Raffles College*.¹⁰

Pemerintah Malaysia pada tahun 2013 meluncurkan **Cetak Biru Pendidikan Malaysia** untuk menentukan arah reformasi pendidikan selama dekade berikutnya dan untuk menanggapi banyaknya tantangan yang dihadapi. Cetak Biru Pendidikan menetapkan sejumlah tujuan besar, seperti:¹¹

1. Akses universal dan pendaftaran penuh semua anak dari pra sekolah hingga sekolah menengah atas pada tahun 2020.
2. Peningkatan nilai siswa pada penilaian internasional seperti PISA ke sepertiga teratas negara peserta dalam waktu 15 tahun.
3. Kurangi hingga setengah dari kesenjangan pencapaian perkotaan-pedesaan, sosial-ekonomi dan gender saat ini pada tahun 2020.

Untuk membantu mencapai tujuan ini, Cetak Biru Pendidikan Malaysia mengidentifikasi sejumlah reformasi yang perlu dilaksanakan, di antaranya:

1. Meningkatkan wajib belajar dari enam menjadi 11 tahun.

⁸Maunah, B, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 133

⁹<http://www.berkuliaah.com/2014/10/perbandingan-pendidikan-di-indonesia.html>

¹⁰*Ibid*

¹¹<https://wenr.wes.org/2014/12/education-in-malaysia>

2. Pengenalan Kurikulum Standar Sekolah Menengah atau Kurikulum Standar Sekolah Menengah (KSSM) dan revisi Kurikulum Standar Sekolah Dasar atau Kurikulum Standar Sekolah Rendah (KSSR) pada tahun 2017 dengan penekanan lebih pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan seperti berpikir kreatif, inovasi, pemecahan masalah dan kepemimpinan.
3. Pengenalan standar pembelajaran yang jelas sehingga siswa dan orang tua memahami kemajuan yang diharapkan dalam setiap tahun bersekolah.
4. Pengenalan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dalam ujian kelulusan sekolah (SPM) mulai 2016, dan bahasa tambahan pada tahun 2025.
5. Meningkatkan standar masuk untuk calon guru mulai tahun 2013, mewajibkan mereka berada di antara 30 persen lulusan terbaik.
6. Definisi tolok ukur kinerja yang jelas ("aspirasi sistem") yang akan membantu mengukur kemajuan reformasi dengan tinjauan tahunan.

Sekarang ini pendidikan di Malaysia terus bergerak maju. Kunci utama keberhasilan pendidikan di Malaysia menurut Aslindah, sebagaimana dikutip Khairiyah, disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:¹²

1. Bersedia belajar dari negara yang lebih maju,
2. Alokasi anggaran pendidikan yang cukup memadai, dan
3. Membuat perencanaan pendidikan jangka panjang yang sistematis dijalankan dengan konsekuen.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa perhatian besar negara Malaysia terhadap pendidikan; melalui kesadaran dan kesediaan belajar dari negara yang lebih maju, didukung oleh kesediaan pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk anggaran pendidikan, dan konsistensi dalam menjalankan regulasi pendidikan adalah faktor penting terhadap perkembangan dan kemandirian pendidikan di Malaysia.

D. SISTEM PENDIDIKAN NEGARA MALAYSIA

1. Kurikulum Pendidikan Secara Umum

Sistem pendidikan di Malaysia berdasarkan pada falsafah pendidikan kebangsaan. Tujuan pendidikannya adalah untuk menciptakan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.¹³

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum kebangsaan, yaitu memadukan penguasaan ilmu pengetahuan, kerohanian, nasionalisme dan patriotisme, dan sikap dan tindakan yang terpuji. Bahasa utama yang digunakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah bahasa

¹²Khairiyah, H, 2020, Deskripsi Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Di Malaysia, Jurnal : Al-Lisan, Jurnal Bahasa, Vol. 5 (1) 20 halaman. [Online]. Tersedia: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/al>

¹³*Ibid*

Melayu dan Inggris. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah meliputi pendidikan Umum dan pendidikan Agama. Pendidikan umum sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan negeri Inggris. Sejak tahun 1982, pemerintah Malaysia menerapkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah yang disebut KBSM menggantikan kurikulum lama sekolah menengah (KLSM) yang masih digunakan sampai sekarang dengan terus melakukan revisi-revisi perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Kurikulum di Malaysia mengalami perubahan yang bukan hanya berkaitan dengan sistem politik, tetapi dilihat juga dari ideologi, pedagogi, keperluan masyarakat dan perkembangan teknologi. Ideologi berkaitan dengan menteri, ketua pengarah dan pemimpin politik. Sementara, pedagogi berkaitan dengan sistem pembelajaran di kelas.¹⁴

Pendidikan di Malaysia bersifat wajib bagi anak-anak usia sekolah, yaitu antara usia 6 sampai dengan 17 tahun. Pendidikan dimulai dari pra sekolah, sekolah dasar (rendah) dan sekolah menengah, kemudian sekolah tinggi. Pendidikan pra sekolah tidak ada aturan yang tetap pada saat anak memulai pendidikan pra sekolah, secara umum anak-anak masuk pra sekolah mulai usia 3-6 tahun. Pendidikan pra sekolah biasanya berlangsung selama 2 tahun, pendidikan ini dilaksanakan sebelum anak-anak masuk ke sekolah dasar.

Malaysia menerapkan pendidikan rendah/dasar selama 6 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Kemudian dilanjutkan pendidikan menengah selama 5 tahun. Pendidikan menengah ini terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan menengah rendah dilaksanakan selama 3 tahun, dimulai dari tingkatan I sampai tingkatan III, setelah itu siswa melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu sekolah menengah tinggi. Pada tingkatan ini siswa menempuh pendidikan selama 2 tahun, yang terdiri dari tingkatan IV dan V. Dengan demikian pengelolaan sekolah menengah rendah dan sekolah menengah tinggi menjadi satu kesatuan manajemen, sehingga guru dapat memantau proses perkembangan anak baik secara psikologis maupun perkembangan intelektual.

Menurut Nur'aeni, bahwa sejak tahun 1982, pendidikan sekolah menengah di Malaysia menggunakan kurikulum bersepadu sekolah menengah (KBSM). Kurikulum yang dikembangkan di Malaysia adalah kurikulum yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*) dan pendekatan *konstruktivistik*. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi kegiatan pembelajaran bukan penyampai pengetahuan, sumber belajar bukan hanya berasal dari guru dan buku teks, tetapi siswa didorong agar dapat memanfaatkan lingkungannya sebagai sumber belajar. Pendekatan *konstruktivistik* ini membantu siswa membangun sendiri makna pengetahuan yang diperolehnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa. Perubahan kurikulum mengacu kepada usaha memperbaiki program pembelajaran untuk meningkatkan keberhasilan murid dalam mencapai enam aspirasi yaitu pengetahuan, kemahiran

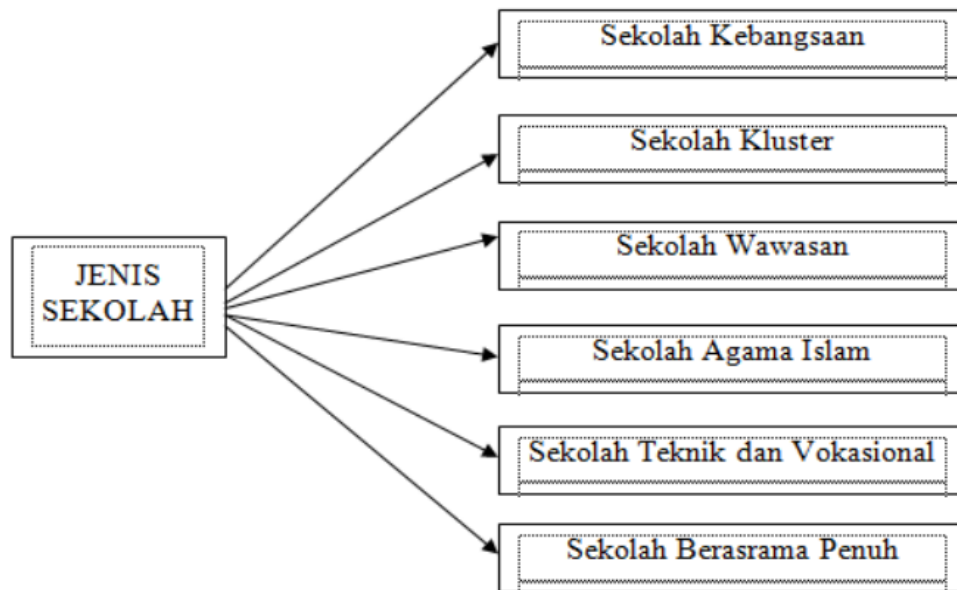
¹⁴Don, Yahya, . *Kepimpinan pendidikan di Malaysia*. (Malaysia: PTS Professional, 2007), hlm 7

berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwi bahasa, etika dan kerohanian serta identitas nasional seperti yang dituangkan dalam Peran Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.¹⁵

2. Jenis dan Jenjang Pendidikan

a. Jenis Sekolah

Untuk mengenal jenis-jenis sekolah di Malaysia dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 7.2: Jenis Sekolah di Malaysia

Berikut penjelasan tentang jenis sekolah di Malaysia sebagaimana pada gambar di atas:¹⁶

- 1) Sekolah Kebangsaan
Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah.
- 2) Sekolah Kluster
Suatu nama yang diberikan kepada sekolah yang dikenal cemerlang, baik dari aspek manajemennya maupun dari outputnya.
- 3) Sekolah Wawasan
Sekolah Wawasan menggunakan bahasa Ibu, sekolah ini berorientasi untuk mengembangkan keakraban antar kaum dalam berinteraksi.

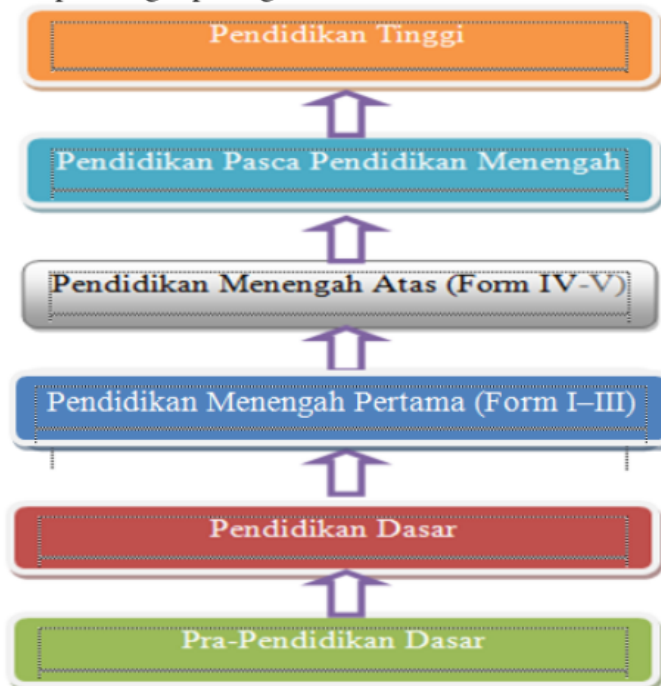
¹⁵file:///C:/Users/User/Downloads/1049-Article%20Text-3678-2-10-20200925.pdf

¹⁶Andi Aslindah, 2015, "Pendidikan Islam di Malaysia; Jenis, Jenjang, Kebijakan, dan Tujuan Pendidikan", *Jurnal Lentera Pendidikan* [Online], vol. 8 (1), 11 halaman . Tersedia: http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/677, (22 Desember 2020)

- 4) Sekolah Agama Islam
Sekolah Agama Islam seperti sekolah pondok, madrasah, dan sekolah agama Islam lain
- 5) Sekolah Teknik dan Vokasional
Sekolah ini memberi peluang kepada murid yang mempunyai keahlian dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara.
- 6) Sekolah Berasrama Penuh
Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) dan Sekolah Berasrama Penuh atau *Residential School* juga dikenal sebagai sekolah-sekolah sains (*science schools*). Sekolah-sekolah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon-calon elit Malaysia tetapi kemudian diperluas sebagai sekolah untuk menjaga Malaysia dengan cara menerima siswa dengan kemampuan akademik dan bakat-bakat olah raga serta kepemimpinan yang menonjol. Sekolah tersebut dijadikan sebagai model setelah Sekolah Asrama Inggris (*British Boarding School*).

b. Jenjang Pendidikan

Untuk memahami tentang jenjang atau tingkatan pendidikan di Malaysia dapat diligat pada gambar berikut:



Gambar 7.3: Jenjang atau Tingkatan Pendidikan di Malaysia

Berikut penjelasan singkat mengenai jenjang atau tingkatan pendidikan di Negara Malaysia berdasarkan gambar di atas:¹⁷

1) Pra-Pendidikan Dasar

Pendidikan di Malaysia dimulai dari pendidikan prasekolah yang disediakan oleh beberapa instansi pemerintah, badan swasta, dan lembaga-lembaga sukarela dan diikuti oleh anak didik berusia 4-6 tahun.

2) Pendidikan Dasar

Umumnya lama pendidikan dasar di Malaysia sama dengan di Indonesia yaitu 6 tahun jenjang pendidikan. Pada akhir tahun ke enam, pelajar akan mengikuti UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) Pendidikan dasar adalah wajib bagi semua anak-anak antara usia 7 - 12 tahun.

3) Pendidikan Menengah Pertama (Form I-III)

Pendidikan menengah terbagi menjadi 2 siklus: menengah bawah, berlangsung 3 tahun yang disebut Form I-III, dan menengah atas, berlangsung 2 tahun yang disebut Form IV-V. Siswa sekolah dasar nasional langsung melanjutkan ke Form I. Adapun siswa dari sekolah tipe-nasional (Cina dan Tamil) mengikuti kelas transisi 1 tahun untuk mendapatkan bekal bahasa Melayu yang memadai, kecuali bagi siswa yang mendapatkan nilai yang memuaskan pada Tes Penilaian Primer dapat langsung mengikuti Form I. Di akhir tahun pendidikan menengah pertama, siswa menjalani Ujian Penilaian Menengah Pertama (*Lower Secondary Assessment Examination*).

4) Pendidikan Menengah Atas (Form IV-V)

Pada tingkat menengah atas, siswa dapat memilih salah satu di antara dua program yang ditawarkan: akademis dan teknik (kejuruan). Di akhir tahun, pendidikan siswa di bidang akademi menjalani ujian *Malaysia Certificate of Education* (MCE) yaitu sertifikat pendidikan Malaysia.

5) Pendidikan Pasca Pendidikan Menengah atau Pra-Universitas

Pra-Universitas merupakan pendidikan lanjutan setelah pendidikan sekolah menengah di mana pelajar dipersiapkan untuk memasuki universitas, seperti Tingkatan Enam (Form 6). Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa dapat memilih untuk mengejar 1 sampai 2 tahun pendidikan pasca pendidikan menengah untuk mendapatkan Form VI. Pendidikan Matrikulasi dan Pendidikan Luar. Ujian Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) diadakan sebagai syarat penerimaan pendidikan Pra-Universitas ini. Pendidikan matrikulasi dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan masuk khusus dari universitas tertentu. Adapun Form VI ditujukan untuk memenuhi persyaratan dari semua universitas.

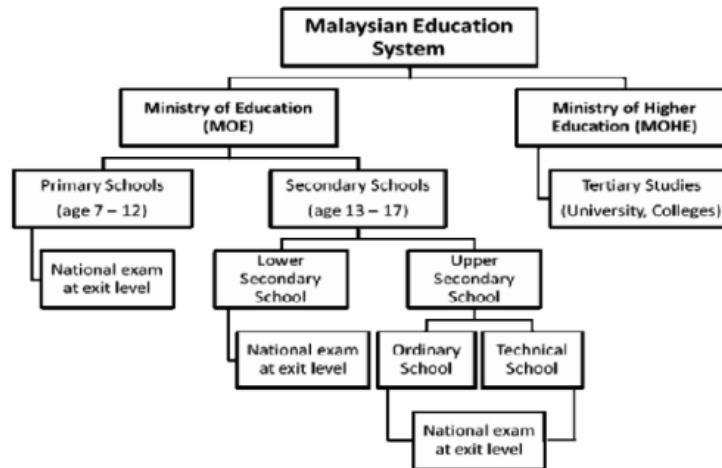
6) Pendidikan Tinggi

Siswa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sertifikasi Sekolah Tinggi

¹⁷ *Ibid*

Malaysia (di Indonesia dikenal sebagai SPMB atau UMPTN) yang diselenggarakan oleh Dewan Ujian Malaysia. Lembaga pendidikan tinggi mencakup universitas, akademi, dan politeknik. Pada tingkat sarjana pendidikan ditempuh selama 3-4 tahun

Berdasarkan paparan-paparan di atas, dapat dikemukakan bagan yang mencerminkan sistem pendidikan di Malaysia sebagai berikut.¹⁸



Gambar 7.4: Sistem Pendidikan Malaysia

3. Pembiayaan Pendidikan di Malaysia

Pemerintah Malaysia telah menganggarkan biaya pendidikan negaranya cukup besar.¹⁹ Untuk biaya pendidikan dasar, orang tua siswa hanya diminta membayar iuran sekolah pada awal tahun pelajaran baru. Besarnya iuran yang dipungut oleh pihak sekolah berkisar antara RM 50 sampai RM 75 (Rp.125.000 – 187.500) per tahun tiap siswa, iuran tersebut khusus untuk kepentingan anak pribadi. Khusus untuk sumbangan PIBG (Persatuan Ibu Bapak dan Guru) hanya dipungut satu bayaran untuk satu keluarga. Keluarga yang menyekolahkan lebih dari satu anak, hanya dikenakan iuran yang sama yaitu RM 25 per keluarga. Dan untuk siswa kelas VI ditambah biaya UPSR sebesar RM 70. Selain itu tidak ada pungutan lain, termasuk pula tidak ada pungutan sumbangan dan pungutan dana pembangunan. Pembangunan dan renovasi gedung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Buku pelajaran yang dipakai siswa relatif tidak berganti setiap tahun. Bila orang tua siswa membeli semua buku pelajaran, harganya berkisar antara RM 80 sampai RM 125 per siswa per tahun. Buku yang telah dibeli anak sulung akan dapat dipakai terus oleh adiknya secara turun temurun. Khusus untuk keluarga dengan pendapatan kurang dari RM 2000 per bulan, dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk peminjaman buku teks yang disediakan dari

¹⁸<https://www.researchgate.net/figure/The-Malaysian-Education-System-fig1228450170>

¹⁹<https://www.antaraneews.com/berita/88161/anggaran-pendidikan-malaysia-mencapai-26-persen>

sekolah. Mulai tahun ajaran 2008 semua siswa sekolah rendah mendapat bantuan peminjaman buku pelajaran dari bantuan pemerintah melalui sekolah masing-masing.

Kebijakan pendidikan lainnya adalah dukungan finansial pemerintah Malaysia melalui *student loan* bagi mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi negeri. Pembayaran pinjaman ini bisa dicicil setelah mahasiswa lulus kuliah dalam jangka 5 hingga 20 tahun. Fasilitas ini juga diberikan bagi mahasiswa yang berminat menuntut ilmu ke luar negeri.²⁰

4. Tenaga Pendidik/Guru

Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki fokus perhatian yang tinggi terhadap bidang pendidikan. Sistem sekolah Malaysia mengalami ekspansi yang sangat besar dan cepat pada dekade 1960-an, yang ditandai dengan banyak dibukanya lembaga pendidikan keguruan dan tingginya rekrutmen guru.²¹

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dapat dimulai dari menciptakan guru yang berkualitas. Pendidikan guru di Malaysia sangat diperhatikan pemerintah. Rekrutmen menjadi mahasiswa di Lembaga keguruan juga tergolong cukup selektif. Mahasiswa lulusan kuliah jurusan Pendidikan dan Keguruan di Malaysia memiliki peluang yang lebih tinggi untuk bisa bekerja di Malaysia dikarenakan para lulusan telah memiliki kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia.

Terdapat beberapa jenjang pendidikan pada jurusan Pendidikan dan Keguruan di Malaysia. Jenjang pendidikan yang dapat dipilih mulai dari diploma, sarjana, magister, doktoral, atau sertifikasi 2 bulan. Banyak perguruan tinggi di Malaysia yang menyediakan Jurusan Pendidikan dan Keguruan seperti Institut Pendidikan Guru (IPG), Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaya Universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan masih banyak lagi. Dari berbagai universitas tersebut menawarkan beberapa pemfokusan (*minor*) jurusan yang bisa ditempuh dalam jurusan pendidikan dan keguruan di Malaysia, di antaranya, Perkembangan anak, Pendidikan Usia Dini, Pendidikan SD, Pendidikan SMP, Pendidikan SMA, Pendidikan Usia Dewasa, Pendidikan Perkebutuhan Khusus, Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Pendidikan Ilmu Sains, Bimbingan dan Konseling, Kurikulum & Instruksi, TESOL dan TESL, dan lain sebagainya.

Untuk menjadi guru di Malaysia kualifikasinya harus sudah S1 (untuk guru SD sampai SMA). Pendidikannya didapatkan di Institut Pendidikan Guru (IPG) bila ingin menjadi guru sekolah dasar (disini disebut sekolah rendah), ataupun di fakultas pendidikan di universitas bila ingin menjadi guru SMP dan SMA (disebut sekolah menengah). Untuk IPG, maka berada dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), sedangkan yang fakultas pendidikan di universitas, induknya adalah Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Kelayakan guru di Malaysia menjadi

²⁰ *Ibid*

²¹ Lee M.N.N.. "Malaysian Teacher Education Into The New Century. In Yin, C. C., King, W. C. and MOK, M.M.C+. *Reform of Teacher Education in the Asia-Pacific in the New Millenium*. (The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2004)

S1 seperti sekarang pun dilakukan secara bertahap dan transformasi perubahan kualifikasi dari lulusan diploma berlangsung mulus sejak era 1990-an dengan program pendidikan lanjutan bagi guru dalam jabatan.

Satu hal yang unik di Malaysia dibandingkan di Indonesia, program studi dan jurusan pendidikan (untuk menghasilkan guru SMP dan SMA) di tingkat universitas semua dikelola oleh universitas negeri (ada di 13 dari 20 universitas negeri di Malaysia). Hal yang rutin terjadi setiap tahunnya sehubungan dengan rekrutmen calon mahasiswa fakultas pendidikan ini adalah, pihak KPM mendata berapa jumlah kekurangan guru perbidang mata pelajaran yang diproyeksikan untuk empat atau lima tahun mendatang (waktu yang dibutuhkan mendidik guru). Bila sudah didapat angka tersebut, untuk guru SMP dan SMA, maka angka kebutuhan guru tersebut diberikan ke KPT. Kemudian oleh KPT angka kebutuhan didistribusikan ke 13 universitas yang mempunyai fakultas pendidikan sesuai dengan program studi/jurusan yang diminta.²²

Guru merupakan angkatan kerja yang memegang peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan Malaysia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan modal manusia bangsa Malaysia. Kebutuhan pengembangan profesional guru di Malaysia diakui sejak tahun 1995 oleh komite khusus Kementerian Pendidikan. Pengembangan keprofesionalan guru diakui sebagai sesuatu yang bermakna dalam meningkatkan keprofesionalan guru dalam mengajar. Beberapa rekomendasi diberikan oleh komite khusus Kementerian Pendidikan Malaysia antara lain:

- a. Guru harus didorong untuk mengikuti kursus" dalam jabatan
- b. Guru harus didorong untuk memajukan pendidikan" mereka
- c. Kesempatan harus diberikan kepada guru untuk" studi kunjungan luar negeri untuk mempelajari arus pengembangan pendidikan
- d. Program induksi diberikan untuk ditujukan pada" tugas dan tanggung jawab baru
- e. Kursus manajemen disediakan bagi guru yang" akan dipromosikan menjadi kepala guru
- f. Ruang staff harus berbasis subjek"
- g. Pusat-pusat pendidikan guru harus memfasilitasi pengembangan profesional guru: itu harus dibangun di lokasi strategis, dilengkapi dengan teknologi modern, didanai penuh dan ditangani secara kecukupan.

Rekomendasi di atas merupakan wujud perhatian besar terhadap guru yang perlu menjadi perhatian dalam proses peningkatan profesionalisme guru, yang diharapkan dan diyakini akan berimbas pada meningkatnya kualitas pendidikan di Malaysia.

²² <https://deceng2.wordpress.com/2012/09/07/cerita-perubahan-pendidikan-guru-di-malaysia/>

5. Gaji Guru

Di Malaysia, profesi guru sangat dihormati dan diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah. Gaji minimum guru di negara Malaysia mencapai 1.200 RM per bulan atau Rp 3.860.220. Sedangkan gaji rata-rata guru di Malaysia bisa mencapai 6.982 RM per bulan atau Rp 22.460.047 per bulan. Di Indonesia guru PNS dibagi menjadi empat golongan, masing-masing golongan akan dibagi-bagi lagi. Saat ini untuk golongan I dibayar 480 ribu sampai dengan 2,5 juta per bulan. Sedangkan untuk golongan tertinggi atau golongan IV dibayar 2,8 juta sampai dengan 5,6 juta per bulan.

Di sini jika kita membandingkan gaji guru PNS golongan III/a untuk lulusan S1/DIV. Gaji guru PNS di Indonesia golongan III/a saat ini mendapat bayaran sebesar Rp 2.456.700 per bulan. Ini baru gaji pokoknya saja, berarti jika ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya maka akan lebih besar. Lalu ditambah, seperti : tunjangan pangan, tunjangan jabatan umum, tunjangan jabatan fungsional, dan sebagainya. Jika dijumlahkan gaji pokok PNS golongan III/a beserta dengan gaji tunjangannya adalah sekitar Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 3.500.000 per bulan. Kemudian jika guru yang bersangkutan mendapatkan tunjangan Sertifikasi maka akan ditambah lagi gajinya menjadi 5.500.000 sampai dengan Rp 6.000.000 per bulan.²³

6. Ujian Nasional

Di Malaysia, ada dua tipe ujian kelulusan, yaitu: Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid tingkat *primary school* dan *Sijil Pelajaran Malaysia* (SPM) untuk murid tingkat *secondary school*. Ujian pada tingkatan *primary school* diperuntukkan bagi siswa tahun keenam, sama dengan di Indonesia. Bedanya, tidak ada SMP dan SMA di Malaysia, melainkan *secondary school* dengan masa belajar sebanyak lima tahun. Meskipun begitu, tetap akan ada dua ujian. Di akhir tingkat ketiga, akan ada ujian bernama *Pentaksiran Tingkatan 3* (PT3). Hasil PT3 tidak menentukan kelulusan, melainkan hanya membagi siswa ke beberapa pengutamaan.

SPM diperuntukkan bagi siswa tahun kelima pada *secondary school*. Ujian kelulusan ini berdasar kepada *General Certificate of Education 'O' Level* dari Inggris. SPM biasanya memakan waktu lebih dari tiga minggu. Tapi, siswa di Malaysia tidak terus-menerus ujian setiap hari, karena setiap hari diujikan pelajaran yang berbeda. Peserta ujian hanya perlu mengikuti ujian berdasarkan pelajaran yang mereka pilih masing-masing.²⁴

Di Malaysia, terdapat dua lembaga yang bertanggung jawab terhadap hasil belajar siswa, yaitu:²⁵

²³ https://info-menarik.net/perbandingan-gaji-guru-pns-tertinggi/#3_Malaysia

²⁴ <https://www.quipper.com/id/blog/un/informasi-un/seperti-apa-sih-ujian-kelulusan-di-negara-tetangga/>

²⁵ <https://primaindisoft.com/blog/ini-perbedaan-ujian-di-indonesia-dengan-di-negara-lainnya-2/#.X-qe3FYzbiU>

- a. *The Malaysia Examination Syndicate* yang mengelola ujian di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- b. *The Malaysia Examination Council* yang mengelola ujian di tingkat sekolah menengah atas.

Kelulusan siswa SD ditentukan berdasarkan Ujian Pelajaran Sekolah Rendah (UPSR/Primary School Evaluation) yang mencakup Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris, serta Matematika dan Sains. Ujian ini sifatnya lebih untuk melihat kelebihan dan kekurangan siswa, serta cara pemerintah mengetahui kualitas pendidikan Malaysia. Karenanya, hasil ujian ini tidak akan menghalangi siswa melanjutkan ke sekolah menengah tingkat pertama.

Ujian bagi siswa SMP diujikan oleh guru di sekolah. Guru dapat menilai apakah seorang siswa sudah layak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA atau harus mengulang di bangku SMP.

Pada tingkat SMA, peserta didik wajib mengikuti *Malaysian Certificate of Education Examination* atau *Sijil Pelajaran Malaysia* (SPM). SPM berlangsung selama lima minggu dimana setiap mata pelajaran terdapat jeda waktu 3-4 hari. Hal ini berbeda dengan Indonesia dimana UN berlangsung selama tiga hari berturut-turut. SPM di Malaysia sangat mirip dengan ujian kenaikan kelas di Indonesia karena terdapat soal-soal esai dan ujian praktikum.²⁶

E. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA

Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Dalam pengertian seluas-luasnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan munculnya Islam itu sendiri. Islam, dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang signifikan, meskipun pada beberapa negara tertentu mengalami fluktuatif, bahkan ada juga yang hampir punah seperti di Spanyol. Penyebaran Islam terjadi dengan berbagai cara, diantaranya adalah orang-orang Islam pergi ke suatu daerah / negara dengan tujuan dakwah. Selain itu, ada juga dengan tujuan berdagang tetapi mendakwah dan berdagang mereka juga melakukan perkawinan, dan yang lebih menarik karena mereka mengawini anak bangsawan, penguasa dan sebagainya. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara di kalangan sejarawan, khususnya aspek kebudayaan, masih belum tersingkap secara sempurna. Sebagaimana di kemukakan Azyumardi Azra, bahwa hal tersebut disebabkan antara lain karena kajian sejarah Islam dengan berbagai aspeknya di Asia Tenggara, baik oleh kalangan asing maupun pribumi belum mampu merumuskan suatu paradigma historis yang dapat dijadikan pegangan bersama yang kadang-kadang sulit dipertemukan satu sama lain.²⁷

Di Malaysia, Islam menjadi agama resmi negara. Masyarakat Muslim di Malaysia sebagian besar berlatar belakang pedesaan dan mayoritas mereka bekerja sebagai petani. Mereka cenderung dalam kehidupan komunitas masyarakat kampung. Warga perkampungan Malaysia masih ada yang menjalankan praktik-

²⁶ *Ibid*

²⁷ Azyumardi Azra, *Islam di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran dalam Azyumardi Azra (Ed.), Perspektif Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta : Yayasan Obor, 1989), hlm. VI-VIII

praktik keagamaan namun meyakini terhadap roh-roh suci, tempat suci, dan meyakini para wali yang dikeramatkan baik di kalangan Muslim maupun non Muslim. Diantara warga Muslim dan non Muslim dapat hidup rukun tanpa ada permusuhan sehingga masyarakat di sana tentram dan damai.

Perkembangan Islam di Malaysia telah membawa peradaban-peradaban baru yang diakui Dunia Islam. Sampai saat ini Muslim Malaysia dikenal sebagai Muslim yang taat beribadahnya, kuat memegang hukum Islam dan juga kehidupan beragamanya yang damai serta mencerminkan keIslaman agamanya baik di perkampungan maupun dalam pemerintahan. Peranan seorang ulama di sana sangat penting baik dalam segi dakwah dan dalam pengelolaan sekolah-sekolah.

Untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia dapat dirinci menjadi tiga periode, yaitu:

1. Masa awal masuknya Islam ke Tanah Melayu sampai dengan datangnya bangsa kolonial.
2. Masa penjajahan kolonial Inggris, dan
3. Masa pasca kemerdekaan sampai sekarang.

Awal mula perkembangan pendidikan Islam masih belum dapat dipastikan, hanya saja dapat diperkirakan bahwa seiring dengan datangnya Islam di tanah Melayu pada abad ke-14 pada saat itu pula pendidikan Islam dimulai. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa Raja Malaka pertama yang bernama Parameswara yang kemudian dikenal sebagai Megat Iskandar Syah setelah memeluk Islam pada tahun 1414 M, maka saat itulah dimulai sistem pendidikan Islam di Tanah Melayu. Masuknya Islam sang raja diikuti oleh para pembesar kerajaan beserta rakyatnya. Dalam upaya memahami kandungan ajaran Islam, raja dan pembesar kerajaan belajar dari para ulama dan pendakwah yang datang ke Malaka. Raja-Raja Malaka yang lain mengikuti jejak Raja Malaka untuk memeluk Islam. Pada saat itu istana kerajaan dijadikan pusat kegiatan pendalaman keilmuan Islam karena begitu cintanya raja beserta rakyat terhadap ajaran Islam.²⁸

Sistem pendidikan Islam pada awalnya berbentuk kelas mengaji al-Qur'an, yang merupakan pelajaran utama pada semua lapisan masyarakat saat itu walaupun tidak berbentuk lembaga formal. Juga diperkenalkan huruf *jawi* untuk memudahkan masyarakat setempat mempejajari huruf-huruf Arab yang menjadi penunjang kemampuan membaca al-Qur'an. Untuk tingkat-tingkat awal, kelas pengajian al-Qur'an dilakukan di rumah guru. Jika jumlah pebelajar semakin banyak, pembelajaran dilakukan di surau dan masjid. Struktur pendidikan dan kurikulumnya ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan mengaji al-Qur'an. Pelajaran-pelajaran selain mempelajari al-Qur'an juga mempelajari ilmu Fiqh, Tauhid, Tafsir, Sejarah, Tasawuf, dan Filsafat Islam. Pada fase itu sistem pendidikan Islam sudah berbentuk pondok.

²⁸Mohd Roslan Mohd Nor dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman, 2008, Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia, Jurnal: Unida Gontor, 20 halaman. [Online]. Tersedia: file:///C:/Users/User/Downloads/547-993-1-PB.pdf

Masa pendudukan bangsa Barat di Tanah Melayu dimulai ketika jatuhnya Kerajaan Malaka, bangsa Melayu memasuki zaman kegelapan, perkembangan bidang ekonomi, politik, kebudayaan, agama, dan pendidikan mengalami hambatan. Penaklukan bangsa Barat ke Tanah Melayu merupakan jalan untuk menghalangi perkembangan dakwah ajaran Islam sekaligus menyebarkan ajaran Kristen kepada penduduk. Sekalipun upaya penjajah untuk menyebarkan ajaran Kristen tidak berhasil.

Pada masa kekuasaan penjajah, kegiatan syiar Islam dan pendidikan Islam menjadi terhambat. Ada yang berpendapat kegiatan dakwah pada saat itu terpaksa dilakukan secara rahasia untuk menghindari ancaman larangan dari pihak penjajah. Puncaknya ketika tahun 1854, sekolah al-Qur'an yang berbentuk pondok mulai diambil alih pemerintah Inggris. Sekolah-sekolah agama diberi bantuan penuh oleh pemerintah tetapi dengan syarat sekolah itu harus memberikan pelajaran membaca menulis dan berhitung disamping mata pelajaran agama dan membaca al-Qur'an. Bangunannya digunakan sebagai sekolah Melayu pada waktu pagi dan mendapat bantuan penuh dari pemerintah Inggris, selanjutnya sekolah al-Qur'an dilaksanakan pada waktu petang di tempat yang sama. Upaya ini dianggap bertujuan untuk menjauhkan pendidikan Islam dari kehidupan masyarakat setempat. Jadi pendidikan pada masa penjajahan diketahui ada dua sistem pendidikan yang berlawanan, sekolah kebangsaan sekuler dan pendidikan Islam. Sekolah kebangsaan sebagai sistem pendidikan yang mendapat dukungan penuh penguasa namun kurang mendapat sambutan dari bangsa Melayu karena dianggap dapat merusak aqidah putra-putrinya. Di sisi lain sistem pendidikan Islam yang berbentuk pondok tidak diakomodasi oleh penguasa namun tetap diminati masyarakat setempat.

Upaya pemerintah Inggris yang membuka sekolah Melayu di pagi hari awal mulanya kurang mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Namun pihak penguasa tidak putus asa, mereka memberikan iming-iming bahwa para lulusan sekolah Melayu nantinya akan dipekerjakan sebagai pegawai, polisi dan sebagainya. Akhirnya pada penghujung tahun 1930-an golongan orang Melayu mulai tertarik untuk mengikuti sekolah di sekolah Melayu dan sekolah Inggris.

Walaupun pihak penjajah dapat mendirikan sekolah Melayu dan menyingkirkan sekolah al-Qur'an di waktu petang, namun masyarakat Melayu tetap mempertahankan asas pendidikan Islam yang menjadi warisan agama dan bangsa. Mereka berhasil mempertahankan institusi tradisional. Sistem pendidikan Islam masih menjadi pilihan utama para pemuda. Bahkan beberapa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ke luar negeri, seperti Pattani, Mekkah, Mesir, dan negara Islam lain.

Lembaga pendidikan Islam semula berbentuk pondok dengan tempat belajar mengajar memanfaatkan masjid, kemudian berkembang menjadi madrasah atau sekolah agama yang dilengkapi bangunan sekolah, asrama, kantor pengurus, dan fasilitas rekreasi. Pembaharuan pandangan dalam memahami dan mempelajari Islam dibawa oleh para pelajar yang baru lulus dari Universitas

Al Azhar, bahwa memahami Islam harus lebih utuh. Gagasan mereka dicetuskan dengan mendirikan madrasah. Salah seorang tokoh yang terlibat dalam usaha mengubah sistem pendidikan yang lebih sistematis adalah Syed Syekh al-Hadi yang di tahun 1906 mendirikan madrasah di Bukit Mertajam, Seberang Prai. Tahun 1907 berdiri Madrasah Iqbal di Singapura, dan Madrasah al-Hadi di Malaka, tahun 1917.

Tahun 1952 diterbitkan Ordonansi Pelajaran 1952 dimana pada pasal 70 diatur pelajaran agama Islam menjadi mata pelajaran di sekolah bantuan pemerintah. Pelajaran Agama Islam terus mendapat perhatian utama dalam Laporan Razak tahun 1956 yang mengusulkan agar sekolah-sekolah yang memiliki siswa beragama Islam tidak kurang dari 15 harus melaksanakan pembelajaran agama Islam. Usulan tersebut diterima oleh kerajaan dan dimasukkan dalam pasal 49, Peraturan Kerajaan tentang Pendidikan 1957.

Pada masa setelah kemerdekaan, Setelah beberapa tahun Malaysia mengalami kemerdekaan, yakni pada tahun 1960, secara keseluruhan kurikulum di Malaysia berkewajiban untuk memberikan pendidikan agama Islam di setiap sekolah, baik sekolah Islam formal maupun non formal yang siswanya beragama Islam.²⁹ Berdasarkan rekomendasi Laporan Rahman Talib tahun 1960, Undang-undang Pendidikan tahun 1961 mewajibkan sekolah-sekolah bantuan kerajaan menyediakan pendidikan Agama Islam, anggaran belanja untuk pendidikan Islam ditanggung oleh Kementerian Pendidikan. Tahun 1962 diberlakukan ketentuan jam pelajaran pendidikan Agama Islam sebanyak 120 menit seminggu dan diberikan selama sebelas tahun siswa-siswa sekolah. Di Malaysia segala permasalahan Agama Islam ada di bawah pengawasan Yang Dipertuan Agong dan Raja-raja Melayu, bahan pelajaran Pendidikan Islam disetujui oleh Majelis Raja-raja sebelum diterapkan di sekolah-sekolah.

Sebuah komite dibentuk pada tahun 1967 yang terdiri dari wakil Kementerian Pendidikan, perguruan tinggi Islam, dan Sekolah-sekolah Agama Kerajaan Negeri untuk menyusun bahan pelajaran pendidikan Islam. Bahan pelajaran tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 1968. Isi materi pelajaran disesuaikan dengan tahap usia siswa dan kemampuan berfikir mereka. Mata pelajaran pendidikan Islam diperkuat lagi dengan menerapkan program jQAF singkatan dari jawi, al-Qur'an, bahasa Arab, dan fardlu ain, program yang bertujuan memperkuat penguasaan jawi, memastikan siswa khatam al-Qur'an di sekolah rendah, mewajibkan pelajaran Bahasa Arab, dan memantapkan amalan dan penghayatan ibadah. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2005.

F. KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA

Berdasarkan penelusuran dari beberapa sejarah tentang kurikulum pendidikan agama Islam di Malaysia, maka pendidikan agama Islam bagi rakyat Malaysia pernah mendapat peringkat yang pertama dari mata pelajaran

²⁹ *Ibid*

yang paling disenangi oleh rakyat Malaysia sebelum kedatangan kaum penjajah, tetapi setelah datang kaum penjajah maka pendidikan agama Islam mengalami perpaduan dengan kurikulum kaum penjajah dan kemudian berkembangnya teknologi di era informasi saat ini, telah membuat mata pelajaran agama mengalami hambatan bagi guru yang mengajarkan agama kepada anak didiknya di setiap sekolah yang ada di Malaysia masing-masing.³⁰

Dalam penerapan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia tidak berbeda jauh dengan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu kurikulum pendidikan Islam yang mengandung dua kurikulum inti sebagai kerangka dasar operasional pengembangan kurikulum. Pertama, tauhid sebagai unsur pokok yang tidak dapat dirubah. Kedua, perintah membaca ayat-ayat Allah yang meliputi tiga macam ayat, yaitu:³¹

2. Ayat Allah yang berdasarkan wahyu,
3. Ayat Allah yang ada pada diri manusia,
4. Ayat Allah yang terdapat di alam semesta atau di luar dari manusia.

Para ahli pendidikan Islam dalam hal ini memberikan interpretasi-interpretasi tersendiri. Prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam adalah :³²

1. Adanya pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya
2. Prinsip menyeluruh (universal) pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum
3. Keseimbangan yang relative antara tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum
4. Perkaitan dengan bakat, minat, kemampuan-kemampuan dan kebutuhan pelajar dan juga dengan alam sekitar, fisik dan sosial tempat pelajar itu hidup berinteraksi
5. Pemeliharaan atas perbedaan-perbedaan individu diantara pelajar dalam bakatbakat, minat, kemampuan, kebutuhan dan perbedaan lingkungan masyarakat.
6. Penyesuaian dengan perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam kehidupan
7. Pertautan antara mata pelajaran, pengalaman dan aktifitas yang terkandung dalam kurikulum, dan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid dan kebutuhan masyarakat tempat murid itu tinggal.

³⁰Aslan, 2019, Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia, *Jurnal Ta'limuna; Jurnal Pendidikan Islam*, [Online], Vol.8 (1), 17 halaman. Tersedia: <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/talimuna/article/view/238/196>

³¹Susanto,P, 2015, Perbandingan Pendidikan Islam di Asia Tenggara, *Jurnal: Pendidikan Islam: Volume IV (1)*, 23 halaman, Tersedia: <https://core.ac.uk/download/pdf/208326936.pdf>

³²*Ibid*

G. PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA

1. Kesamaan Pendidikan Islam di Malaysia dan di Indonesia

Beberapa kesamaan yang didapat dalam pemahaman konsep dan dinamika perkembangan pendidikan Islam antara Malaysia dan Indonesia adalah sebagai berikut:³³

- a. Kesamaan pengertian pendidikan Islam. Baik di Indonesia maupun Malaysia memiliki konsep yang sama bahwa pendidikan Islam adalah proses pembinaan generasi muda dalam mentransfer pengetahuan dan nilai yang berdasarkan norma Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits untuk mengantarkan peserta didik agar semakin dekat dengan Sang Pencipta alam semesta serta untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b. Masuknya Islam ke dua negara serumpun terjadi pada waktu yang relatif bersamaan yang dibawa oleh para pedagang dari India Selatan Selat Malaka merupakan jalur perdagangan dunia yang cukup sibuk, pertemuan beberapa budaya dan agama terjadi dan singgah di semenanjung Malaya dan Sumatera karena kepentingan perniagaan. Begitu pula masuknya Islam di dua wilayah itu karena persinggahan para pedagang dari Gujarat (catatan: meskipun masih ada teori lain, seperti teori Arab yang mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab).
- c. Awal pendidikan Islam bersamaan dengan masuknya Islam. Baik di Indonesia maupun Malaysia menandai awal pendidikan Islam dimulai ketika Islam masuk ke wilayah setempat. Para penyebar Agama Islam memiliki karakter yang sama ketika memasuki wilayah baru. Mereka menyebarkan Islam dengan cara damai, mengikuti corak kehidupan setempat, tetapi bersifat memperbaiki kebiasaan-kebiasaan lama masyarakat setempat.
- d. Memiliki dualisme sistem pendidikan, pendidikan barat yang sekuler dan pendidikan bumi putera yang Islami. Semangat para pendukung sistem pendidikan Islam mengambil posisi yang berlawanan dengan kepentingan bangsa penjajah. Di Malaysia, bangsa Melayu tidak menanggapi sistem pendidikan yang dikelola penjajah Inggris karena khawatir akan merusak akidah putra-putri mereka. Di Indonesia para santri dan kyai memandang sistem pendidikan yang diselenggarakan bangsa Belanda adalah representasi golongan kafir yang bertentangan dengan Islam. Maka muncul sentimen-sentimen anti penjajah terhadap sistem pendidikan Belanda. Pihak penjajah menyelenggarakan pendidikan di wilayah jajahan bertujuan untuk mempertahankan hegemoninya di tanah jajahan.
- e. Fase perkembangan dakwah dan pendidikan Islam mengalami hambatan oleh penguasa penjajah. Kaum penjajah selain menguasai kekayaan alam negeri jajahan juga bermaksud melakukan penyebaran agama yang

³³Budi Haryanto, 2015, Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal: ADABIYAH; Journal of Islamic Education*, Vol. 1 (1) 18 halaman. [Online]. Tersedia: <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/ajpi/article/view/166/174>

mereka bawa (*mission zending*). Misi mereka berhadapan langsung dengan dakwah Islam yang sedang berkembang. Oleh sebab itu penguasa menjalankan strategi represifnya terhadap para pelaku dakwah Islam. Penjajah Belanda di Indonesia sangat rinci dalam mengawasi gerak dinamika gerakan-gerakan dakwah Islam dengan memetakan lapisan-lapisan sosial masyarakat pribumi non ningrat di kota dan desa-desa. Akibatnya pendidikan Islam pada masa penjajahan termarginalkan di wilayah desa-desa.

- f. Sama-sama mengalami periode pembaharuan pemikiran pendidikan Islam sebagai pengaruh pembaharuan yang terjadi di Mesir pada awal abad kedupuluh. Gagasan pembaharuan pemikiran Islam itu diwujudkan dengan membangun lembaga pendidikan yang sesuai dengan semangat pandangan baru. Di Malaysia ditandai dengan berdirinya Madrasah di Bukit Mertajam, Madrasah Iqbal dan Al-Hadi. Di Indonesia berdiri sekolah-sekolah yang menggabungkan sistem klasikal dan pesantren melalui organisasi masa keagamaan modernis seperti, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan Persis.
- g. Adanya upaya menghapus dualisme dalam sistem pendidikan yang memisahkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Konsep pendidikan yang dianggap ideal bagi kedua negara adalah mengintegrasikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama dalam satu sistem pendidikan yang terpadu, tidak ada pemisahan pendidikan umum yang sekuler dengan pendidikan agama Islam yang terisolasi dan terbelakang. Upaya-upaya itu dilakukan dengan menyusun peraturan-peraturan baru yang mengkomodasikan terintegrasinya dua sistem pendidikan tersebut.
- h. Pemerintah melakukan penyempunaan sistem pendidikan Islam agar sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional masing-masing negara. Kedua negara menilai pendidikan Islam sangat penting karena merupakan agama yang dianut mayoritas, bahkan di Malaysia sebagai agama resmi negara. Maka lulusan dari pendidikan Islam harus menjadi pilar utama penopang kemajuan bangsa, oleh sebab itu diperlukan sistem pendidikan Islam yang berkualitas.

2. Perbedaan Pendidikan Islam di Malaysia dan di Indonesia

Pendidikan Islam di Malaysia dan Pendidikan Islam di Indonesia, disamping memiliki persamaan, juga memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan itu antara lain:³⁴

- a. Di Indonesia semua urusan agama ditangani oleh Kementerian Agama yang membawahi seluruh agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia semua agama memiliki kedudukan yang sama. Hak menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut warga diatur dan dilindungi oleh UUD. Kecuali karena sebab mayoritas, tidak ada agama yang memiliki kedudukan

³⁴*Ibid*

istimewa di Indonesia. Sedangkan di Malaysia, urusan agama Islam langsung di bawah pengawasan Yang Dipertuan Agong, dalam hal ini ditunjuk seorang pejabat Urusan Hal Ehwal Agama Islam sebagai pelaksananya. Hal ini merupakan suatu keistimewaan bagi Agama Islam, sebab urusan keagamaan Islam merupakan urusan negara. Oleh sebab itu negara sangat ketat mengawal segala kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan nilai-nilai Islam. Tetapi sebaliknya, agama-agama selain Islam bukan urusan negara.

- b. Pemerintah kebangsaan memiliki perhatian yang sangat serius terhadap output lulusan sekolah dalam bidang pengetahuan dan kompetensi agamanya. Sehingga menyelenggarakan program j-QAF, suatu program untuk menjembatani kemampuan meng-khatam al-Qur'an bagi calon lulusan sekolah rendah. Program ini mulai diterapkan tahun 2005. Hal ini menunjukkan kepedulian yang besar terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam di Malaysia.
- c. Pendidikan Islam di Indonesia lebih menunjukkan corak yang beragam, hal ini disebabkan oleh wilayah yang tersebar di beberapa pulau dengan karakter kedaerahan setempat.

Sementara Azmil Tayeb, dalam bukunya yang berjudul *Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Saving Souls*, sebagaimana dikutip Detiknews.com memaparkan perbedaan yang signifikan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia. Secara umum, perbedaan tersebut terlihat dalam tiga hal, yakni:³⁵

Pertama, lembaga pendidikan Islam di Indonesia lebih banyak jumlahnya daripada di Malaysia, bahkan jika dirasiokan dengan jumlah populasi muslim di masing-masing negara. Di Indonesia terdapat 47.221 sekolah Islam, baik negeri maupun swasta, yang secara kasar berarti tersedia satu sekolah untuk 4.387 muslim. Sedangkan di Malaysia ada 1.804 sekolah Islam yang berada dalam ruang lingkup sistem pendidikan nasional, atau sekitar satu sekolah untuk 9.616 muslim. Jumlah tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam mensuplai logistik dan dana pendidikan bagi sekolah-sekolah yang tersebar di berbagai pulau dengan keragaman budaya setempat, sehingga sulit untuk mengimplementasikan kurikulum yang terintegrasi dan sulit menuntut pemenuhan visi pendidikan Islam ala pemerintah dari sekolah-sekolah lokal. Sebaliknya, jumlah lembaga pendidikan Islam yang lebih kecil ditambah dengan anggaran pendidikan Islam yang lebih besar memudahkan pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi sekolah-sekolah Islam di Malaysia.

Kedua, kebanyakan sekolah Islam di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh swasta yang biasanya bernaung di bawah yayasan-yayasan bentukan masyarakat atau perseorangan, sedangkan di Malaysia mayoritas sekolah Islam berada langsung di bawah Kementerian Pendidikan atau Majlis Agama Islam Negeri.

³⁵<https://news.detik.com/kolom/d-4725476/membandingkan-sekolah-islam-di-indonesia-dan-malaysia>

Status tersebut memberi peluang bagi sekolah-sekolah Islam di Indonesia untuk beroperasi secara cukup bebas, baik dalam nilai-nilai pendidikan, kurikulum, sistem pengelolaan lembaga dan lain-lain, selama sekolah-sekolah itu tidak secara utuh bergantung kepada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal pendanaan. Di lain pihak, status sekolah-sekolah Islam di Malaysia memberi otoritas pengelolaan yang ketat, baik oleh Kementerian Pendidikan maupun Majelis Agama Islam Negeri. Putrajaya dalam hal ini mengontrol dan mengawasi penuh konten-konten kurikulum pendidikan Islam, penunjukan dan sertifikasi guru, pemilihan buku-buku pelajaran dan lain-lain. Singkatnya, pendidikan Islam di Malaysia lebih tersentralisasi dibanding di Indonesia.

Ketiga, terdapat tingkat perpaduan yang tinggi antar institusi yang menangani pendidikan Islam di Malaysia. Sekalipun Kementerian Pendidikan dan Majelis Agama Islam Negeri memiliki agenda politik yang berbeda dalam beberapa kasus, kedua institusi itu bekerja saling beriringan khususnya dalam hal penentuan kurikulum, supervisi sekolah, pelatihan dan penempatan guru dan sejumlah persoalan operasional lainnya. Sebaliknya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama acapkali tak sejalan dalam nilai dan tujuan umum masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Ketidaksinambungan tersebut tampaknya diperparah oleh campur tangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pendidikan Islam. Meski demikian, Azmil menyatakan bahwa institusi yang tidak padu di Indonesia justru memberi kesulitan buat negara untuk memasukkan ideologinya ke dalam sistem pendidikan Islam secara keseluruhan. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan Malaysia, di mana negara berpadu dan secara efektif membentuk pendidikan Islam sesuai visinya.

H. PENUTUP

Sebagai penutup pembahasan mengenai sistem pendidikan di Malaysia, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama, Malaysia adalah sebuah negara monarki konstitusional federal yang terletak di Asia Tenggara. Ibukota Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya merupakan pusat pemerintahan persekutuan. Kepala Negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong. Sedangkan kepala pemerintahan Malaysia adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui Pemilihan Umum

Kedua, Pendidikan Negara Malaysia telah mengalami evolusi yang sejalan dengan pembangunan dan kemajuan negara ini. Evolusi pendidikan ini dapat dibagi dalam beberapa periode, yakni zaman pra-kemerdekaan (sebelum 1957), zaman pasca merdeka (1957 – 1970), zaman dasar ekonomi baru (1971 -1990), zaman dasar pembangunan negara (1991 – 2000), dan zaman dasar wawasan negara yang berlangsung hingga saat ini.

Ketiga, Falsafah pendidikan Malaysia berdasarkan pada falsafah pendidikan kebangsaan. Tujuan pendidikannya adalah untuk menciptakan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta

memberikan sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum kebangsaan, yaitu memadukan penguasaan ilmu pengetahuan, kerohanian, nasionalisme dan patriotisme, dan sikap dan tindakan yang terpuji. Bahasa utama yang digunakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah bahasa Melayu dan Inggris. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah meliputi pendidikan umum dan pendidikan agama

Kelima, Perkembangan pendidikan Islam di Malaysia dapat dirinci menjadi tiga periode, yaitu: (a). masa awal masuknya Islam ke Tanah Melayu sampai dengan datangnya bangsa kolonial, (b). masa penjajahan kolonial Inggris, dan (c). masa pasca kemerdekaan sampai sekarang.

Keenam, Pendidikan Islam di Malaysia dan Indonesia memiliki beberapa kesamaan sebagai bangsa yang serumpun dan bertetangga, namun demikian terdapat juga beberapa perbedaan yang disebabkan karena perbedaan kondisi dan kebijakan negara masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Aslan, 2019, Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia, *Jurnal Ta'limuna; Jurnal Pendidikan Islam*, [Online], Vol.8 (1), 17 halaman. Terse-

Dia: <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/talimuna/article/view/238/196>

Aslindah, A, 2015, "Pendidikan Islam di Malaysia; Jenis, Jenjang, Kebijakan, dan Tujuan Pendidikan", *Jurnal Lentera Pendidikan* [Online], vol. 8 (1), 11 halaman. Tersedia:

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/677,

Azra, A, 1989, *Islam di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran dalam Azyumardi Azra (Ed.), Perspektif Islam di Asia Tenggara*, Jakarta : Yayasan Obor

Don, Yahya,. *Kepimpinan pendidikan di Malaysia*. (Malaysia: PTS Professional, 2005), hlm 71-74

<file:///C:/Users/User/Downloads/1049-Article%20Text-3678-2-10-20200925.pdf>

Haryanto, B, 2015, Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal: Adabiyah; Journal of Islamic Education*, Vol. 1 (1) 18 halaman. [Online].Tersedia:

<http://ojs.umsida.ac.id/index.php/ajpi/article/view/166/174>

<https://deceng2.wordpress.com/2012/09/07/cerita-perubahan-pendidikan-guru-di-malaysia/>

<https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-malaysia/>

https://info-menarik.net/perbandingan-gaji-guru-pns-tertinggi/#3_Malaysia

<https://news.detik.com/kolom/d-4725476/membandingkan-sekolah-islam-di-indonesia-dan-malaysia>

<https://primaindisoft.com/blog/ini-perbedaan-ujian-di-indonesia-dengan-di-negara-lainnya-2/#.X-qe3FYzbiU>

<https://wenr.wes.org/2014/12/education-in-malaysia>

<https://www.antaranews.com/berita/88161/anggaran-pendidikan-malaysia-mencapai-26-persen>

<https://www.belajarsosial.com/2016/10/profil-negara-berkembang-malaysia.html>

<http://www.berkuliah.com/2014/10/perbandingan-pendidikan-di-indonesia.html>

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_my.html

<https://www.geologinesia.com/2018/01/peta-negara-malaysia.html>

https://www.portal-ilmu.com/2017/07/profil-negara-malaysia_6.html

https://www.researchgate.net/figure/The-Malaysian-Education-System_fig1_228450170

<https://www.quipper.com/id/blog/un/informasi-un/seperti-apa-sih-ujian-kelulusan-di-negara-tetangga/>

<https://zenodo.org/record/3686334#.X9nYjVYzbIU>

Khoiriyah , H, 2020, Deskripsi Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Di Malaysia, *Jurnal : Al-Lisan, Jurnal Bahasa*, Vol. 5 (1) 20 halaman. [Online]. Tersedia: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/al>

Lee M.N.N. 2004. "Malaysian Teacher Education Into The New Century. In Yin, C. C., King, W. C. and MOK, M.M.C+. *Reform of Teacher Education in the Asia-Pacific in the New Millenium*. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Maunah, B, 2011, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras

Mohd Roslan Mohd Nor dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman, 2008, Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia, *Jurnal: Unida Gontor*, 20 halaman. [Online]. Tersedia: <file:///C:/Users/User/Downloads/547-993-1-PB.pdf>

Rahmi Novalita, 2017, Perbandingan Pendidikan Negara Belgia Dengan Negara Indonesia , *Jurnal Spasial*, [Online], Vol. 7 (3), 12 halaman. Tersedia: <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/spasial> , (21 Desember 2020)

Susanto,P, 2015, Perbandingan Pendidikan Islam di Asia Tenggara, *Jurnal: Pendidikan Islam: Volume IV* (1), 23 halaman, Tersedia: <https://core.ac.uk/download/pdf/208326936.pdf>

BAB VIII

SISTEM PENDIDIKAN DI MESIR

Arman

Armanbatumartaoku@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang baik sehingga akan berdampak bagi negara dan bangsa yang lebih maju. Setiap Negara menyelenggarakan pendidikan sebagai upaya untuk membangun bangsa, begitu juga halnya negara mesir.

Republik Arab Mesir, lebih dikenal sebagai Mesir, (bahasa Arab: مصر, Maṣr) adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian Timur Laut dan Semenanjung Sinai di Barat Daya Benua Asia¹.

Negara Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur Tengah yang dikenal dengan peradaban kunonya ada beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya Piramid Giza, Kuil Karnak, Great Sphinx dan Lembah Raja serta Kuil Ramses².

Dalam dunia pendidikan, secara historis, modernisasi pendidikan di Mesir berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kedatangan Napoleon Bonaparte menguasai Mesir sejak tahun 1798 M. Ini merupakan momentum baru bagi sejarah umat Islam, khususnya di Mesir yang menyebabkan bangkitnya kesadaran akan kelemahan dan keterbelakangan mereka. Napoleon Bonaparte di samping membawa pasukan yang kuat, juga membawa para ilmuwan dengan seperangkat peralatan ilmiah untuk mengadakan penelitian pada saat penaklukan Mesir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang dicapai Napoleon Bonaparte yang berkebangsaan Perancis ini, memberikan inspirasi yang kuat bagi para pembaharuan Mesir untuk melakukan modernisasi pendidikan di Mesir yang dianggapnya stagnan.³

Hal inilah yang membuka mata para pemikir-pemikir Islam untuk melakukan perubahan meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang khususnya bidang pendidikan. Upaya pembaharuan dipelopori oleh Muhammad Ali Pasya, kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir lainnya. Ada beberapa tokoh pembaharuan mesir diantaranya: Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Ali Pasha, Al-Tahtawi, Rasyid Ridha⁴.

Pada abad ke-21 ini [Pemerintah Mesir](#) telah memberikan prioritas yang lebih besar untuk memperbaiki sistem pendidikan. Menurut [Human Development](#)

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir>

² <http://repository.uin-suska.ac.id/11890/1/Perkembangan%20Kebudayaan%20Mesir.pdf>

³ STUDIA DIDAKTIKA Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol.10 No.1 Tahun 2016

⁴ JURNAL TARBIYAH, Vol. 24, No. 2, Juli-Desember 2017

Index (HDI), Mesir berada di peringkat 110 dunia dalam HDI, dan 8 dari 53 negara HDI Afrika, pada tahun 2015⁵. Dengan bantuan **Bank Dunia** dan organisasi multilateral lainnya, Mesir bertujuan meningkatkan akses anak usia dini terhadap pengasuhan dan pendidikan serta masuknya **Teknologi Informasi dan Komunikasi** (TIK) di semua jenjang pendidikan, terutama di jenjang perguruan tinggi. Secara umum pendidikan mesir terdiri dari: 1. Sekolah Dasar (Ibtida'i), 2. Sekolah Menengah Pertama (I'dadi), 3. Sekolah Menengah Atas (Tsanawiyah 'Ammah), 4. Pendidikan Tinggi⁶.

Sebelum lebih jauh membahas tentang sistem pendidikan Negara mesir, terlebih dahulu penulis membahas profil singkat Negara mesir.

Profil Negara Mesir



Gambar 8.1 Peta Negara Mesir

Berikut profil Negara mesir:

- Nama Lengkap : Republik Arab Mesir
- Nama Lokal : Jumhuriyat Misr al-Arabiyah
- Bentuk Pemerintahan : Republik Presidensial
- Kepala Negara : Presiden Abdelfattah Said ELSISI (sejak 8 Juni 2014)
- Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri Mostafa MADBOULY (sejak 7 Juni 2018)
- Ibukota : Kairo
- Luas Wilayah : 1.001.450 km²
- Jumlah Penduduk : 104.124.440 jiwa (2020)
- Pertumbuhan Penduduk : 2.28% (2020)

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_Afrika_menurut_Indeks_Pembangunan_Manusia

⁶el-Ghiroh. Vol. XVI, No. 01. Februari 2019

- Angka Kelahiran : 27,2 bayi per 1000 penduduk (2020)
- Bahasa Resmi : Arab
- Etnis : Etnis Mesir (99,7%), etnis lainnya (0,3%)
- Agama : Islam 90%, Kristen 10%
- Mata Uang : Pound Mesir (EGP)
- Hari Kemerdekaan : 28 Februari 1922 (dari Protektorat Inggris)
- Hari Nasional : 23 Juli 1952 (Hari Revolusi)
- Lagu Kebangsaan : “Bilady, Bilady, Bilady” (My Homeland, My Homeland)
- Kode Domain Internet : eg
- Kode Telepon : 20
- Pendapatan Per Kapita : US\$. 12.700,-/177.810.160,-
- Pendapatan Domestik Bruto : US\$. 1,204 triliun/16.856 triliun
- Lokasi : Benua Afrika⁷.

Secara geografis, Negara dengan ibukota Kairo ini dibagi menjadi lima kawasan utama, yaitu Lembah Nil, Delta Nil, Gurun Barat, Gurun Timur, dan Semenanjung Sinai. Untuk letak astronomis Mesir yaitu pada 22 °LU – 31°LU dan 25°BT – 36°BT. Dan secara geografis Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Luas wilayah sebesar 1.001.450 km² dibandingkan dengan luas negara Indonesia yang luasnya 1.906.240 km². Berarti luas negara Mesir lebih sempit dibandingkan dengan luas negara Indonesia. Dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, Sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, Sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah, Sebelah barat berbatasan dengan Libya⁸.

Mesir merupakan Negara berpenduduk terbesar diantara negara-negara Arab lainnya, dengan pertumbuhan populasi rata-rata 2,28% atau 2,3 juta per tahun, dimana jumlah penduduk saat ini 104.124.440 jiwa (2020). Populasi rakyat Mesir, menjadikan Mesir negara ke-15 terbesar di dunia dalam hal jumlah penduduk⁹. Penduduk Negara Mesir terdiri dari suku Hamis, suku Nubia, dan suku Arab. Suku Hamis merupakan suku asli Mesir yang bercirikan kulit putih kehitam-hitaman, suku Nubia berkulit hitam, dan suku Arab berkulit kemerah-merahan. Selain agama Islam, sekitar 10% penduduk Mesir adalah beragama Kristen¹⁰. Kebanyakan penduduk Mesir menetap dipinggiran Sungai Nil dan kawasan delta sungai Nil di dekat laut Mediterania. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Selain itu, sebagian besar daratan di Mesir merupakan bagian dari Gurun Sahara yang jarang dihuni orang. Bahasa Arab merupakan bahasa resmi negara ini, namun penduduk Mesir yang berpendidikan juga mengerti bahasa Inggris dan bahasa Perancis¹¹.

⁷ <https://kemlu.go.id/cairo/en/read/mesir/1900/etc-menu>

⁸ <https://www.geografi.org/2017/08/geografi-negara-mesir.html>

⁹ <https://kemlu.go.id/cairo/id/news>

¹⁰ <https://www.geografi.org/2017/08/geografi-negara-mesir.html>

¹¹ <https://www.republika.co.id/berita/74619/>

Sistem Pemerintahan yang dianut oleh Mesir adalah sistem pemerintahan Republik Presidensial, yaitu sistem pemerintahan dengan kepala negaranya adalah seorang Presiden yang dipilih oleh setiap 4 tahun sekali dan dapat menjabat sebanyak 2 kali periode. Berbeda dengan Republik Presidensial pada umumnya, Kepala pemerintahan di Mesir adalah seorang Perdana Menteri yang diangkat oleh Presiden. Di sisi perekonomian, negara yang menempati sudut timur laut benua Afrika ini memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Per Kapita sebesar 3,601.628 USD pada 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 3,056.886 USD untuk 2019. Data Pdb Per Kapita Mesir diperbarui tahunan, dengan rata-rata 1,507.116 USD dari 1982 sampai 2020. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 3,774.772 USD pada 2015 dan rekor terendah sebesar 750.194 USD pada 1982. Data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend Plus – Table EG.A025: GDP per Capita¹². Pendapatan perkapita Mesir sebesar US\$ 12.700,-/177.800.000,-. Aktivitas Ekonomi terutama sektor agrikultur Mesir banyak terpusat di lembah sungai Nil yang subur. Meskipun didominasi wilayah gurun, namun Mesir mendapatkan berkah dari adanya aliran Sungai Nil yang menyuburkan kawasan lembah dan deltananya. Mesir terkenal sebagai Negara agricultural yang menghasilkan kapas, gandum, kurma, zaitun, berbagai jenis buah - buahan, sayuran, padi, tebu, dan rumput. Selain sebagai petani, masyarakat tradisional Mesir juga banyak yang hidup dari beternak secara nomaden. Jenis hewan ternak yang dikembangkan secara tradisional adalah domba, biri - biri, dan unta, Hal ini salah satu dampak pembangunan bendungan Aswan.

Adapun perikanan dibedakan atas perikanan laut dan perikanan darat, perikanan laut banyak diusahakan di perairan Laut Merah dan perairan Laut Tengah, sedangkan perairan darat banyak diusahakan di sungai Nil dan di kawasan bendungan aswan¹³. Dimesir juga terdapat Terusan Suez yang merupakan jalur air permukaan laut buatan yang terletak di Mesir dan menghubungkan Laut Mediterania dengan Teluk Suez, cabang utara Laut Merah. Terusan atau yang juga disebut dengan kanal ini memiliki panjang 193,30 km (120 mil). Terusan Suez adalah salah satu rute pengiriman yang paling banyak digunakan di dunia, Hal tersebut dapat disaksikan dengan berlalunya ribuan kapal setiap tahun. Pembangunan Terusan Suez ini dilakukan antara 1859 dan 1869 oleh Suez Canal Company, sebagai otoritas yang memiliki dan memelihara saluran air. Keberadaan Terusan Suez memberikan dampak yang signifikan pada perdagangan dunia, meskipun pada tahun-tahun awal, lalu lintas melalui jalur air di bawah ekspektasi/harapan. Adanya masalah keuangan yang disebabkan pembangunan terusan, pada tahun 1875 memungkinkan pemerintah Inggris menjadi pemegang saham utama dengan cara membeli saham yang dimiliki oleh kepentingan Mesir. Keberadaan terusan yang menyediakan rute laut yang lebih pendek ke koloni-koloni dan ladang minyak Teluk Persia menjadi suatu hal yang penting bagi

¹² <https://www.ceicdata.com/id/indicator/egypt/gdp-per-capita>

¹³ <https://ydayuda.files.wordpress.com/2012/11/mesir-2.pdf>

perekonomian Inggris¹⁴. Dalam hubungan luar negeri, Mesir merupakan anggota PBB, OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan Uni Afrika serta anggota lembaga-lembaga Internasional yang berada di bawah PBB. Mesir adalah negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945¹⁵.

B. SEJARAH PENDIDIKAN MESIR

Pendidikan modern diperkenalkan di bawah naungan Ottoman Pasha Muhammad Ali yang memerintah 1805-1848. Dia memulai sistem pendidikan ganda pada saat itu: satu melayani pesan bersekolah di sekolah tradisional (Mansourya) dan yang lain disebut Madrasah untuk pegawai negeri sipil elit.

Mansourya mengajarkan siswa dasar-dasar membaca dan menulis selama menghafal dan melafalkan ayat-ayat Al-quran tanpa penekanan pada eksperimen, pemecahan masalah atau belajar sambil melakukan; sedangkan Madrasah menawarkan pendidikan pedagogis yang lebih modern¹⁶.

Ali Pasha mengirim dua misi siswa yang terorganisir untuk belajar di Paris. Keterlibatan Prancis dalam pendidikan Mesir pada awalnya bukanlah proyek pemerintah, melainkan berkembang menjadi proyek pemerintah pada akhir pemerintahan Pasha. Misi pertama adalah usaha pribadi untuk menjaga semangat ekspedisi Napoleon 1798 tetap hidup melalui imperialisme budaya informal. Pemerintah Prancis terlibat dalam misi pelajar kedua tahun 1844. Itu dimotivasi oleh kepentingan kolonial mereka di Afrika Utara. Pendidikan di Mesir mengalami pergeseran atas kendali Inggris, pada hakekat dan tujuan pendidikannya. Mesir yang sejak awal terkenal dengan peradabannya yang tinggi dan memiliki prestise yang mengagumkan di mata dunia, mulai kehilangan arah. Universitas Al-Azhar yang cukup diperhitungkan di dunia internasional (khususnya Islam) sedikit demi sedikit kehilangan pamornya. Para pemuda Mesir berada dalam kebodohan dan ketertinggalan zaman, meski mereka merupakan mahasiswa Al-Azhar. Penyebab kemerosotan di dunia pendidikan Mesir justru merupakan akibat dari modernisasi yang ditanamkan oleh Inggris. Universitas Al-Azhar dianggap sangat kuno dan kolot, karena hanya menanamkan nilai-nilai Islam yang sudah tidak relevan bagi kehidupan modern¹⁷. Selain itu, kesempatan pendidikan berkurang secara signifikan, anggaran pendidikan dikurangi, lembaga pendidikan banyak yang ditutup, kurikulum difokuskan pada topik kejuruan, biaya sekolah diberlakukan.

C. PENDIDIKAN ISLAM DI MESIR

Pada masa-masa awal, proses pendidikan Islam berlangsung di tempat-tempat yang merupakan pusat ibadah (masjid). Namun karena banyaknya umat Islam yang berminat untuk belajar sedangkan kapasitas masjid tidak lagi

¹⁴<https://kumparan.com/potongan-nostalgia/pembangunan-terusan-suez-sebagai-jalan-pintas-perdagangan-global-1sq8gAFhEYJ/full>

¹⁵<https://kaltim.idntimes.com/news/indonesia/rosa-folia/ini-5-negara-yang-pertama-mengakui-kemerdekaan-indonesia-regional-kaltim/1>

¹⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Egypt

¹⁷ <http://eprints.uny.ac.id/21742/3/BAB%20II.pdf>

mencukupi, juga mengganggu kegiatan orang-orang yang beribadah, akhirnya, institusi pendidikan mulai mengadakan pembenahan- pembenahan untuk mengatasi masalah tersebut.

Pemerintahan Mesir mencanangkan wajib belajar sampai tingkat delapan pada pendidikan dasar. Hal ini terlihat dari rasio warga Negara Mesir yang mendaftar pada pendidikan menengah sampai 67 %, Sisi lain ada 43 % orang dewasa yang tidak mendaftar pada pendidikan menengah, dengan demikian orang dewasa banyak mengalami buta huruf dan didominasi kaum perempuan padahal Mesir termasuk Negara yang mencanangkan pendidikan untuk semua¹⁸.

Mesir merupakan bekas kekuasaan Bani Fathimiyah yang berpaham Syiah, sehingga pendidikan Islam Mesir masa awal bercorak syi'ah. Namun setelah pemerintahan Islam Mesir jatuh ke tangan Salahudin al-Ayubi orientasi pendidikan keilmuan dan keagamaan khususnya al-Azhar dibangun atas paham Ahlu As-Sunnah, yang mengembangkan bervariasi disiplin ilmu mulai dari ilmu-ilmu al-Qur'an, Hadits, Fiqh, Kalâm, Ushûl, Bahasa, Sejarah, Balâghah dan Nahwu.

Pada perkembangannya berikutnya Al-Azhar pun mengeluarkan ijazah bagi para alumninya. Ini diprakarsai oleh syekh Muhammad Mahdi pada tahun 1287 H. Pada tahun 1896 M mulai ada transkrip nilai seperti sekarang, serta mulai dibuka spesialisasi-spesialisasi seperti hukum dan dakwah. Selain itu Al-Azhar juga membuka cabang cabangnya di beberapa propinsi besar di Mesir. Al-Azhar pun kini menjadi Universitas Islam yang tertua, sebagai ibu bagi para penerus estafet perjuangannya baik di Timur maupun di Barat¹⁹.

Al-Azhar merupakan lembaga keilmuan Islam yang besar dan menyebarkan misi dan amanah Islamiyah kepada segenap umat di pelosok-pelosok bumi hingga sampai pada para pencari ilmu dari Nusantara. Selain itu, Pendidikan Mesir sempat mengalami kemunduran pada masa Muhammad Ali (1517-1798 M) , dikarenakan sistem pendidikan yang terpisah sehingga terkesan pengkotakan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Terlebih Al-Azhar dianggap sebagai lembaga Nasional milik Mesir, sehingga seenaknya. Serta sekolah-sekolah yang tadi didirikan berorientasi pada pendidikan Barat, dan jauh dari ruh Islam, karena mengenyampingkan pendidikan Islam.

Awal Pendidikan Islam Modern di Mesir dimulai dari pemerintahan di Mesir pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Kontak kebudayaan antara Mesir dan kebudayaan yang di bawa oleh Napoleon Bonaparte menimbulkan kesadaran umat Islam bahwa mereka telah tertinggal jauh dari Eropa. Pada masa itu dalam rangka memajukan Negara maka dikirimkanlah beberapa mahasiswa ke eropa untuk mempelajari ilmu kemanusiaan dan pemikiran modern. Selain itu, didirikanlah kementrian pendidikan, sekolah militer (1815), sekolah teknik, apoteker, pertanian(1816), dan sekolah kedokteran (1827) dan para pengajarpun di datangkan dari Barat.

¹⁸ Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 13, No. 1, Februari 2018

¹⁹ Suwito, Sejarah Sosial Pendidikan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.165

Kesadaran ini menimbulkan berbagai pergerakan pembaharuan dari kalangan umat Islam, salah satu pelopornya adalah Muhammad Ali Pasha. Setelah Muhammad Ali menjadi penguasa tunggal di Mesir, ia tidak mengalami kesukaran dalam merealisasikan konsep pembaharuannya, terutama di bidang pendidikan.

Pada tahun 1864 M Kantor Administrasi Syeikh Al-Azhar mengeluarkan keputusan tentang materi-materi yang dipelajari di Al-Azhar; Fiqh, Nahwu, Sharf, Ma'âni, Bayân, Badi', Matan Lughah, 'Arûdh, Qâfiyah, Filsafat, Tashawuf, Mantiq, Hisab, Aljabar, Falak, Engineering, Sejarah dan Rasm al-Mushaf. Dan tenaga pengajar adalah para alumni yang telah menamatkan sedikitnya sebelas disiplin ilmu diatas dan lulus seleksi dan ujian yang ditangani majelis yang terdiri dari enam orang yang diketuai syeikh Al-Azhar.

Dengan Paham Sunni Al-Azhar mampu menumbuhkan moderasi dan membuka kanal-kanal pemikiran dalam koridor kesunnian. Paham Sunni dianggap ikon kebangkitan dari keterpurukan, kebodohan dan penindasan kekuasaan dari imprealisme pihak asing Cikal bakal munculnya pemikiran modern diawali dengan pemikiran salah seorang tokoh pembaharu dari mesir yakni Muhammad Abduh.

Adapun pembaharuan yang dilakukan adalah berikut ini: *Pertama*, Pemurnian ajaran Islam dari munculnya bid'ah dan khurafat yang masuk dalam kehidupan beragama umat Islam, *Ke dua*, Pendidikan tinggi Islam terkonsentrasi pada universitas al-Azhar, *Ke tiga*, kewajiban belajar untuk mempelajari sains-sains modern, serta sejarah dan agama Eropa, *Ke empat*, Pembelaan Islam, mempertahankan jati diri Islam, tidak pernah menaruh perhatian pada paham-paham ateis atau anti agama, *Ke lima*, membuka kembali pintu ijtihad²⁰.

D. PENDIDIKAN UMUM DI MESIR

Negara mesir sebelum abad 19 pendidikan lebih ditekankan pada kepentingan teologi dengan mengadakan seminar-seminar di Gereja ataupun di Masjid. Namun sisi lain di desa-desa terselenggara lembaga pendidikan untuk anak-anak dengan menitik beratkan pada membaca dan menulis Arab, belajar aritmatika dan menghafal ayat demi ayat dari firman Tuhan di Kitab Injil ataupun firman Allah yang ada dalam al-Qur'an.

Muhamad Ali pada abad 19 menggagas dan menetapkan sistem pendidikan sekuler dengan mempelajari ilmu teknik dan administrasi pemerintahan serta militer. Gagasan tersebut diteruskan oleh cucunya yaitu Ismail dengan mengembangkan kerjasama pendidikan dengan antar sekolah-sekolah pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi lalu di dukung oleh istrinya dengan mendirikan sekolah perempuan pada tahun 1873²¹.

Pada tahun (1882- 1922), tokoh – tokoh pendidikan berhenti untuk sementara waktu dalam perjuangan perluasan pendidikan karena pada saat itu Mesir sedang dikuasai oleh Inggris. Selanjutnya, kemajuan Mesir mulai kelihatan

²⁰ STUDIA DIDAKTIKA Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol.10 No.1 Tahun 2016 ISSN 1978-8169

²¹ Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 13, No. 1, Februari 2018

dengan menetapkan pendidikan untuk semua (*education for all*) dengan sistem sekuler.

Pada tahun 1952 ketika ada revolusi Mesir, pemerintahan Mesir mengalami kemajuan yang sangat luar biasa dalam bidang pendidikan, salah satunya program pendidikan gratis untuk semuaarganya. Selain itu, meningkatkan anggarannya dari tahun 1952-1953 sebesar 3%, menjadi diatas 5 % pada tahun 1958, belanja untuk pendidikan meningkat sampai 1000%, pada tahun 1952- 1976. Sisi lain warga negaranya meningkat untuk mendaftar sekolah dasar.²²

E. FILSAFAT PENDIDIKAN MESIR

Modernisasi pendidikan di Mesir (2 Juli 1798 M) berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Napoleon Bonaparte. Kedatangan Napoleon ke Negara Mesir tidak hanya dengan pasukan perang, tetapi juga dengan membawa 160 orang diantaranya pakar ilmu pengetahuan, dua set percetakan dengan huruf latin, Arab, Yunani, peralatan eksperimen, membawa teleskop, mikroskop, kamera, dan lain sebagainya, serta seribu orang sipil.

Napoleon juga mendirikan lembaga riset bernama Institut d’Egypte, yang terdiri dari empat departemen, yaitu: ilmu alam, ilmu pasti, ekonomi dan politik, serta ilmu sastra dan kesenian. Lembaga ini bertugas memberikan masukan bagi Napoleon dalam memerintah Mesir. Lembaga ini terbuka untuk umum terutama ilmuwan (ulama’) Islam. Sehingga Ini menjadi moment pertama ilmuwan Islam kontak langsung dengan peradaban Eropa, termasuk Abd al-Rahman al-Jabarti. Baginya perpustakaan yang dibangun oleh Napoleon sangat menakjubkan karena Islam diungkapkan dalam berbagai bahasa dunia²³.

F. POLITIK DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pemerintah Mesir menyatakan bahwa pengembangan secara ilmiah harus dilakukan dalam sistem pendidikan. Oleh sebab itu diputuskan bahwa konsep struktur, fungsi dan manajemen pendidikan semua harus ditinjau ulang. Mesir memprogramkan wajib belajar. Masyarakatnya harus pandai dalam hal baca tulis dan terdidik, harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi masyarakat yang produktif, pendidikan juga harus fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kementerian Pendidikan menyatakan dengan lebih rinci tujuan utama pendidikan adalah: (a) Pendidikan dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi dan persamaan kesempatan serta pembentukan individu-individu yang demokratis. (b) Pendidikan juga dimaksud sebagai pembangunan bangsa secara menyeluruh, yaitu menciptakan hubungan fungsional antara produktivitas pendidikan dan pasar kerja. (c) Pendidikan juga harus diarahkan pada penguatan rasa kepemilikan individu terhadap bangsa, dan penguatan atas budaya dan identitas Arab. (d) Pendidikan harus mampu menggiring masyarakat pada pendidikan sepanjang hayat melalui peningkatan diri dan pendidikan diri sendiri.

²²Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 13, No. 1, Februari 2018

²³Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 13, No. 1, Februari 2018

(e) Pendidikan harus mencakup pengembangan ilmu dan kemampuan tulis baca, berhitung, mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Arab, cipta seni, serta pemahaman atas lingkungan. (f) Pendidikan bertujuan pula sebagai kerangka kerjasama dalam pengembangan kurikulum dan penilaian.

G. KEBIJAKAN PENDIDIKAN MESIR

Kebijakan pendidikan di Mesir dalam menyiapkan lulusan pendidikan yang memiliki daya kompetitif global :

- a. Sebagai negara yang padat penduduk dan memiliki banyak lembaga pendidikan guru, dan siswa, Mesir telah mengembangkan suatu sistem pelatihan guru melalui pelatihan jarak jauh (*distance learning/training*) dengan menggunakan keunggulan teknologi informasi.
- b. Sistem penjenjangan karier guru secara fungsional yang diselenggarakan dapat menciptakan profesionalisme pendidik. Sistem yang diatur mulai dari status guru sebagai *assistant teacher*, *teacher*, *senior teacher*, sampai *master teacher*. Jenjang status guru seperti itu dapat berpengaruh positif terhadap jenjang karier guru dan pembinaan profesi guru yang lebih terstruktur.
- c. Mesir memiliki sistem pembelajaran agama Islam pendidikan Islam yang sangat kuat. Standar untuk pendidikan Islam pun dilakukan dengan standar yang lebih menjamin lulusan pendidikan keagamaan agar memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang kuat. Karena itu, dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan agama, pendidikan Islam di Mesir sering menjadi rujukan negara-negara Islam lainnya. Sebagai misal, sistem pendidikan al-Azhar Cairo terbuka untuk menerima calon mahasiswa dari berbagai lulusan sekolah menengah namun mereka harus lulus seleksi, memiliki ijazah yang diakui setara, dan harus mengikuti matrikulasi bagi mereka yang dianggap belum cukup dapat melanjutkan kuliah²⁴.

H. KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Bermula dari pendidikan dasar pada tahun 1922 yang berjumlah 719 dan awalnya di kedalikan oleh menteri pendidikan dan secara luas oleh dewan-dewan provinsi. Masa belajar sekolah ini selama 4 tahun dan sebagian besar sekolah ini tipe kutab yang telah diambil alih oleh pemerintah pusat dengan sedikit perubahan. Kurikulumnya lebih kurang seperti al-Quran dan beberapa ilmu kesehatan dan hanya sedikit pelajaran keterampilan (*life Skill*)²⁵. Tipe pendidikan yang kedua adalah ibtidaiyah/primary berjumlah 103 yang di tangani oleh meteri pendidikan, masa belajar selama 4 tahun. Sekolah ini lebih baik dari elementeri, sebagian besar pendidiknya cerdas dan terlatih/terampil dari pada sekolah kuttab/elementeri.

Perbedaan sekolah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama adalah pembelajaran bahasa asing, biasanya bahasa Inggris yang mana tidak ada di dalam kurikulum sekolah kutab. Pada tahun 1922 ada 10 sekolah lanjutan, Sejumlah

²⁴ <http://www.antalalai.com/mhd/makalah/pendidikanmesir.php>

²⁵ Ibid, h.114

siswanya mengambil sekolah keterampilan seperti: perdagangan, penjualan, dan pertanian. Selanjutnya, sekolah ibtidaiyah (primary) berjumlah 103 yang di tangani oleh meteri pendidikan. dengan kurikulum yang tidak lebih baik ketimbang dari sekolah kuttab, baik dari segi bangunan, prasarana dan juga guru yang tidak memiliki kualifikasi. Kewajiban sekolah baru harus mengadopsi sistem nilai pendidikan yang diberlakukan pada sekolah-sekolah dengan pembelajaran setengah hari. Pemberlakuan resmi sistem itu berdasarkan pada penggunaan gedung dan guru, dan pada waktu yang sama memberikan pada siswa kesempatan yang luas untuk bekerja atau belajar berdagang pada paruh waktu lainnya.

Dilihat dari penjelasan diatas, Mesir mengemban kontrol secara penuh terhadap pendidikan tanpa harus ada pertimbangan atau nasehat dari pemerintahan inggris, baik langsung maupun tidak langsung. Itulah hal yang sebenarnya untuk menyatakan secara berturut-turut yang dilakukan pemerintah mesir untuk pendidikan selama 30 tahun, sebelum titik mulai revolusi 1952.

Lebih dari tiga sistem pendidikan dasar yang mengilhami berdirinya universitas universitas di Negara Mesir, selain itu kepemilikan universitas dari milik pribadi menjadi milik pemerintah. Kebijakan mesir mengenai sekolah-sekolah itu adalah lebih ringan dari pada kebijakan pendidikan yang ada di Irak dan Jordania. Semua sekolah-sekolah prifat diwajibkan untuk mengajar murid murid merka baik keturunan mesir atau warga Negara lainnya, menggunakan bahasa arab yang sama disekolah-sekolah negeri. Dan sekolah sekolah yang bukan milik pribadi dibiarkan untuk memberikan pelajaran agama kepada siapa saja murid-muridnya sesuai dengan agama bapaknya.

Ada dua lembaga asing untuk pendidikan tinggi di mesir yakni sekolah hukum yang di bangun pada abad 19 yang berafiliasi dengan universitas hukum di paris, kemudian, sekolah amerika di cairo yang di bangun 1920 sebagai sebuah puncak dari usaha misionari.

Pendidikan wajib selama 5 tahun pada pendidikan dasar, dan dapat ditambah ke tingkat pendidikan yang tinggi. Pendidikan adalah gratis pada sekolah-sekolah negeri. Negara mengawasi seluruh kegiatan pendidikan dan menjamin otonomi universitas dan pusat-pusat penelitian dengan catatan bahwa semua kegiatan itu diarahkan pada usaha-usaha keperluan masyarakat dan pada peningkatan produktivitas. Penghapusan buta huruf (iliterasi) merupakan tugas nasioanal, dan Islam adalah pelajaran dasar dalam kurikulum.²⁶

I. KURIKULUM

Kurikulum di ambil bedasarkan konsisi yang ada yang masuk di dalam nya al-quran dan pengajaran keagamaan (ada mata pelajaran alternative bagi murid non muslim), bahas Arab, pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, Geometry terapan, Sejarah, Geografi, Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Dasar. Kesehatan,

²⁶Prof. Drs. H. Agustiar Syah Nur, MA, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, (Bandung: Tim Lubuk Agung, 2001) hlm. 227

menggambar olah raga, kerajinan tangan untuk laki-laki dan ilmu tataboga bagi anak perempuan, kesenian.

Kurikulumnya menekankan pendidikan keagamaan bahasa Arab dan Sejarah serta masuk di dalamnya sains dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Walaupun dalam teorinya murid dalam hal literasi dapat memilih bahasa Jerman Italia Spanyol atau Rusia²⁷.

kurikulum dirancang oleh Tim terdiri dari konsultan, supervisor, para ahli, para profesor pendidikan, dan guru-guru yang berpengalaman. Biasanya ada sebuah panitia untuk setiap mata pelajaran atau kelompok pelajaran, dan ketua-ketua panitia diundang rapat sehingga segala keputusan dapat dikoordinasikan.

Kurikulum yang sudah dihasilkan oleh panitia diserahkan kepada Dewan Pendidikan Pra-universitas yang secara resmi mengesahkannya untuk diimplementasikan. Berdasarkan peraturan, kurikulum dapat diubah dan disesuaikan untuk mengakomodasikan kondisi setempat atau hal-hal khusus.

Selanjutnya, Pusat Penelitian Pendidikan Nasional bertanggung jawab mengumpulkan informasi mengenai materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan mengenai implementasinya di lapangan. Hasil penelitian itu disalurkan ke dewan kesekretariatan, dan apabila diperlukan perubahan, sebuah panitia dibentuk dan disertai tugas untuk mempelajarinya dan merumuskan perubahan-perubahan itu.

Ada berbagai cara untuk terjaminnya relevansi dan diseminasi program baru. Sejumlah besar supervisor, konsultan dari semua level bertemu secara reguler dengan guru-guru guna memberikan bimbingan dan untuk mengumpulkan informasi.

Ada berbagai pusat latihan, sekolah percobaan, dan sekolah percontohan, yang bertujuan untuk pembaharuan kurikulum serta perbaikan metode mengajar. Garis besar kurikulum ditentukan sebuah tim kecil mirip dengan tim yang diterangkan di atas dibentuk untuk menulis buku teks. Buku teks menurut kurikulum tidak persis sama dengan kurikulum yang dilaksanakan. Perbedaannya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi kelas, kurangnya alat peraga dan perlengkapan lainnya, dan kualitas guru. Bertentangan dengan apa yang digariskan dalam kurikulum.

Pada level pendidikan tinggi lebih banyak kebebasan dalam menyusun kurikulum dan dalam pemakaian buku teks. Faktor-faktor seperti kelas yang selalu menjadi bertambah besar, dan kurangnya peralatan fasilitas lainnya cenderung menurunkan standar yang dicapai oleh mahasiswa. Mengandalkan buku dan kuliah kelihatannya semakin dominan di perguruan tinggi.

Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan menggunakan standar pendidikan nasional berdasarkan kebutuhan pengembangan pendidikan di Mesir. Standar nasional ini berlaku untuk semua jenjang dan jenis pendidikan. Namun demikian pada tingkat implementasi kurikulum, kementerian pendidikan Mesir lebih bertanggung jawab untuk pengembangan pendidikan ditingkat secondary education dan tanggungjawab juga sampai pada penyelenggaraan ujian nasional. Sementara

²⁷ Ibid, hh.115-119

itu untuk pengembangan dan implementasi pendidikan pada jenjang pendidikan Pre-School dan Elementary Education menjadi tanggungjawab tingkat distrik, dan pada tingkat Preparatory Education pada tingkat states atau tingkat propinsi.

Untuk pengembangan evaluasi pendidikan NCEEE (National Center For Examination and Education Evaluation) atau pusat pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan yang terletak di al-madina al-munawara sreet, Cairo juga memiliki peranan penting. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang diberi kewenangan yang bersifat otonomi oleh kementrian Pendidikan Mesir yang didirikan untuk menyelenggarakan kebutuhan kajian saintifik untuk kebutuhan pengujian data, evaluasi pendidikan agar kurikulum yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target, membangun karakter siswa dan memproosikan kemampuan, kreativitas dan kecakapan siswa dalam berbagai bidang budaya, ilmu dan teknologi. NCEEE dilengkapi dengan fasilitas komunikasi informasi dengan internet yang konek ke semua departemen yang dioperasikan dengan menggunakan satelit. NCEEE juga mengembangkan sejumlah CD interaktif yang dapat digunakan pada proses pembelajaran siswa dan training guru.

1. Training Guru

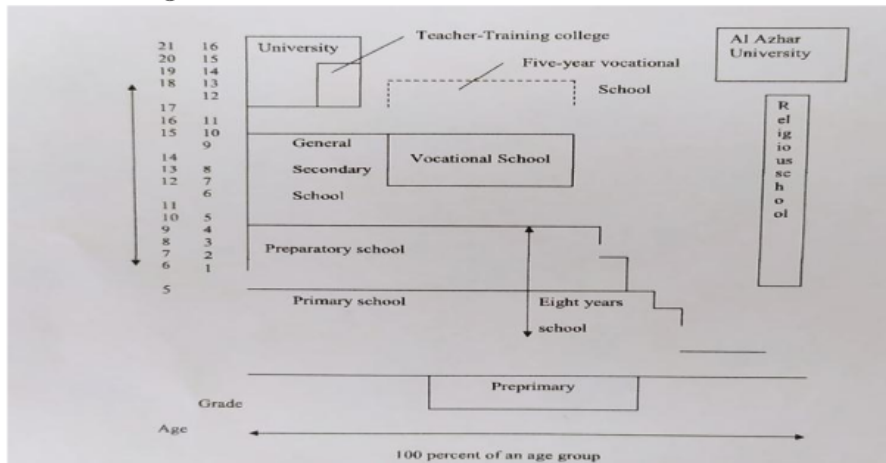
Kementrian pendidikan Mesir telah mengembangkan suatu sistem pelatihan untuk guru-guru pada semua jenjang pendidikan mulai dari guru taman kanak-kanak sampai dengan guru sekolah menengah. Sistem yang dikembangkan berupa training jarak jauh (*distance training*) melalui video coverence yang sekali tayang dapat melibatkan lebih dari 9000 guru di berbagai daerah yang sudah dibangun fasilitas training secara interaktif.

Training model ini diselenggarakan oleh pusat pengembangan teknologi untuk training guru atau yang disebut *tecnology development centre* (TDC) dengan melibatkan sejumlah narasumber dari berbagai perguruan tinggi, TDC sangat berperan dalam menyediakan layanan training untuk guru yang melalui perangkat teknologi yang diciptakan dan mempercepat akses pelatihan dan kuliah bagi guru di daerah terhadap sistem pelatihan yang lebih bermutu dan terkontrol.

Sebagai lembaga Internasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, UNESCO Mesir mengembangkan suatu sistem pelatihan guru untuk mendukung tercapainya sumber daya manusia Mesir yang handal. Training ini diselenggarakan melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang berperan dalam melakukan sertifikasi keahlian guru selepas training.

Pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru yang dilakukan di Mesir lebih mengarah pada pemenuhan standar kompetensi yang tidak hanya untuk memenuhi standar nasional, tetapi juga untuk peningkatan kemampuan standar internasional. Arah kebijakan ini memiliki nilai strategis dalam penyiapan SDM guru yang mampu mengawal pendidikan yang berkualitas di masa mendatang.

2. Struktur dan Jenis Pendidikan



Gambar 8.2 Struktur Pendidikan di Negara Mesir

Sistem pendidikan Mesir sangat sentralistik, dan dibagi menjadi tiga tahap: (a) Pendidikan dasar; terdiri dari tahap primer dan tahap persiapan. Untuk pendidikan dasar berusia 4-14 tahun: taman kanak-kanak (TK) selama dua tahun, lalu diikuti oleh sekolah dasar selama enam tahun, dan sekolah persiapan selama tiga tahun. (b) Pendidikan menengah; sekolah menengah selama tiga tahun, untuk usia 15-17 tahun. (c) Pendidikan pasca pendidikan menengah.

3. Jenjang Pendidikan

1) Pendidikan Dasar. Pendidikan di Mesir wajib dilakukan selama 9 tahun akademik antara usia 6 dan 14 tahun. Selain itu, semua tingkat pendidikan dasar dijalankan oleh sekolah pemerintahan.²⁸

2) Pendidikan Menengah.

Pendidikan menengah terdiri dari tiga lintasan: umum, kejuruan/teknis, dan dual sistem. Pendidikan kejuruan yang mewakili sekolah Kohl I Mubarak. Tahap sekunder umum mencakup 3 tahun pendidikan, sedangkan menengah kejuruan bisa selama 3-5 tahun, dan 3 tahun untuk sistem ganda memasukkan pendidikan ke kejuruan tingkat menengah. Para siswa harus lulus ujian nasional yang diberikan pada akhir tahap sekunder.

3) Pendidikan Tinggi.

Sistem pendidikan tinggi Mesir memiliki sistem yang sangat luas. Sekitar 30% dari semua orang Mesir dalam kelompok usia yang relevan, pergi ke universitas. Menurut *The Economist*, standar pendidikan di universitas publik Mesir “bukan main”. Departemen Pendidikan Tinggi mengawasi tingkat pendidikan tersier. Dalam sistem pendidikan saat ini, ada 11 universitas umum, 51 publik lembaga non-universitas, dan 89 perguruan tinggi swasta.

²⁸ Jurnal PPKn & Hukum Vol. 12 No. 2 Oktober 2017 107

4. Jenis-jenis Pendidikan

a. Sistem Pendidikan Formal

Sistem pendidikan Mesir mempunyai dua struktur parallel: struktur sekuler dan struktur keagamaan Al Azhar. Struktur sekuler diatur oleh Kementrian Urusan Al Azhar. Ini sering juga disebut Kementrian Agama di negara-negara lain. Selain dari kedua struktur ini, ada pula jenis sekolah yang diikuti oleh sejumlah kecil anak. Misalnya, anak-anak cacat masuk ke sekolah-sekolah khusus; bagi yang ingin menjadi militer masuk ke sekolah militer, dan ada pula generasi muda yang meningkatkan sekolahnya dan mendaftar pada program-program non formal yang diselenggarakan oleh berbagai badan atau lembaga.

b. Pendidikan Nonformal

Pendidikan ini dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kelompok-kelompok orang tertentu, apakah itu anak-anak, generasi muda, atau orang dewasa; apakah mereka laki-laki atau perempuan, petani, pedagang, atau pengrajin; apakah mereka dari keluarga orang kaya atau keluarga miskin. Dengan demikian, kebanyakan program lebih dikonsentrasikan pada pendidikan non formal.

c. Sistem Sekolah Sekuler

Pendidikan wajib di Mesir berlaku sampai “grade” 8 dan ini dikenal sebagai pendidikan dasar. Ada pendidikan Taman Kanak-kanak dan “*play group*” yang mendahului pendidikan dasar, tetapi jumlahnya sangat kecil dan kebanyakan berada di kota-kota. Pendidikan dasar ini dibagi menjadi dua jenjang. Jenjang pertama yang dikenal dengan “Sekolah Dasar” mulai dari “*Grade*” 1 sampai “*Grade*” 5, dan jenjang kedua, yang dikenal dengan “Sekolah Persiapan”, mulai dari “*Grade*” 6 sampai “*Grade*” 8.

Setelah mengikuti pendidikan dasar selama delapan tahun, murid-murid punya empat pilihan; tidak bersekolah lagi, memasuki sekolah menengah umum, memasuki sekolah teknik menengah tiga tahun, atau memasuki sekolah teknik lima tahun. Pada sekolah menengah umum, tahun pertama (*Grade* 9) adalah kelas bersama. Pada *Grade* 10 murid harus memilih antara bidang sains dan non sains (IPA vs Non-IPA) untuk *Grade* 10 dan 11.

Selanjutnya, Pendidikan tinggi di Universitas dan Institusi spesialisasi lainnya mengikuti pendidikan akademik umum. Pendidikan pada sebagian lembaga perguruan tinggi berlangsung selama dua, empat atau lima tahun tergantung pada bidang dan program yang dipilih²⁹.

d. Sistem Sekolah Al Azhar

Sistem sekolah Al Azhar hampir sama dengan sistem sekolah sekuler pada tingkat pendidikan dasar. Perbedaannya ialah bahwa pendidikan agama islam lebih mendapat tekanan. Tetapi, untuk mata pelajaran kurikulumnya seperti pada sekolah sistem sekuler. *Grade* 10 dan 11 sama untuk semua murid. Pada

²⁹[https://tulisanterkini.com/artikel/pendidikan/3470-perbandingan-sistem-
pendidikan-indonesia-dan-mesir.html#](https://tulisanterkini.com/artikel/pendidikan/3470-perbandingan-sistem-pendidikan-indonesia-dan-mesir.html#):

akhir *Grade* 11, murid boleh memilih apakah ingin masuk ke sekolah umum dua tahun lagi, atau masuk ke seekolah agama selama dua tahun.

Pada level universitas, fakultas-fakultasnya sama dengan yang ada pada pendidikan sekuler tetapi kurikulumnya lebih menekankan pada keagamaan. Selanjutnya, seluruh pendidikan guru untuk pendidikan keagamaan hanya diselenggarakan dalam lingkungan sistem Al Azhar.

e. Pendidikan Vokasional dan Tehnik

Upaya untuk memperluas pendidikan kejuruan (vokasional) dan pendidikan tehnik dimulai tahun 1950-an. Jumlah sekolah vokasional dan tehnik meningkat dari 134 (dengan 31.800 siswa) dalam tahun 1952 menjadi 460 buah (dengan siswa 115.600) dalam tahun 1960.

Dalam tahun 1988, Mesir memiliki 563 buah sekolah vokasional dan tehnik yang berarti 48,7% dari seluruh sekolah menengah yang ada. Dan Pada tingkat pendidikan tingkat tinggi, dalam tahun 1988, terdapat 34 institut tehnik³⁰. Semenjak tahun 1967, Kementrian Perburuhan menyelenggarakan program-program untuk mendidik orang-orang yang telah menamatkan pendidikan tingkat dasar, dan orang-orang yang putus sekolah formal yang berusia di antara 12 dan 18 tahun.

Mereka dilatih dalam ketrampilan vokasional yang cocok untuk lingkungan dan kemampuannya. Pendidikan ini biasanya diselenggarakan selama sembilan bulan, tujuh bulan di pusat-pusat latihan vokasional, dan dua bulan di tempat-tempat unit produksi. Para peserta latihan kemudian ditempatkan bekerja pada sektor pemerintah atau sektor swasta³¹.

5. Jenis-jenis Sekolah

Secara umum, ada dua jenis sekolah pemerintahan di Mesir, yaitu sekolah Arab dan Eksperimental Language Schools.

a. Sekolah Arab.

Pemerintah menyediakan kurikulum Nasional dalam bahasa Arab. Sebuah kurikulum pemerintah yang memuat bahasa Inggris diajarkan mulai pada tahun ke empat primer, dan bahasa Perancis ditambahkan sebagai bahasa asing ke dua di Pendidikan Menengah.

b. Eksperimental Language Schools.

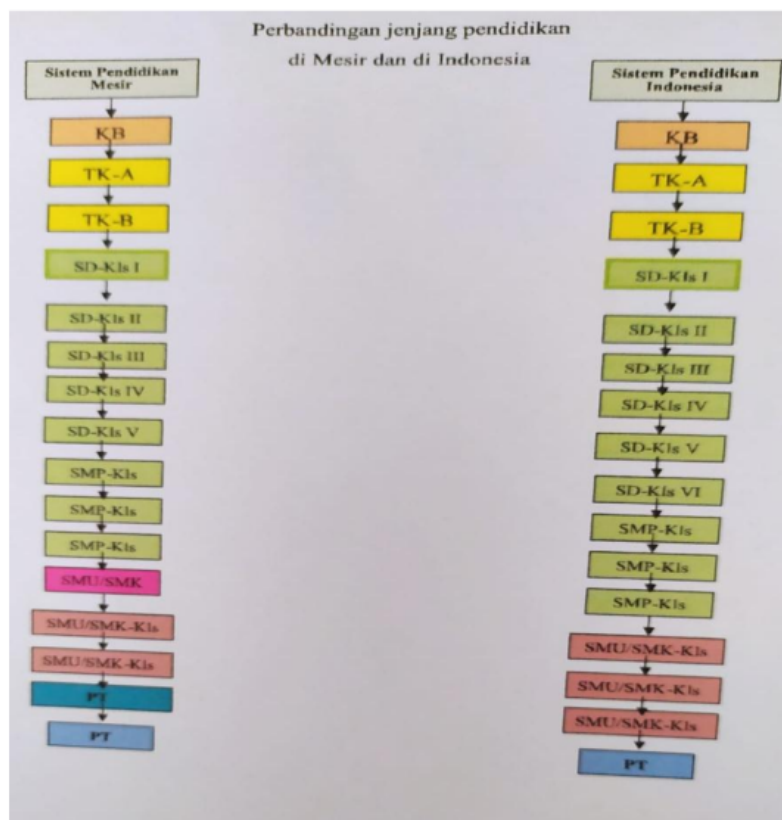
Sekolah ini mengajarkan sebagian besar kurikulum pemerintah (sains, matematika dan komputer) dalam bahasa Inggris, dan menambahkan bahasa Perancis sebagai bahasa asing kedua di Persiapan Pendidikan. *Advanced* kurikulum bahasa Inggris disediakan dalam semua tahap pendidikan

Secara umum, di Mesir terdapat empat jenis sekolah swasta, yaitu:

³⁰Prof. Drs. H. Agustiar Syah Nur, MA, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara* hlm. 229-232

³¹Prof. Drs. H. Agustiar Syah Nur, MA, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Hlm 232-236

- 1) Sekolah Ordinary
Kurikulum mereka sangat mirip dengan sekolah sekolah pemerintah, tetapi sekolah- sekolah swasta lebih memperhatikan siswa terkait dengan kebutuhan pribadi dan fasilitas sekolah.
- 2) Sekolah Bahasa.
Sebagian besar mengajarkan kurikulum pemerintah dalam bahasa Inggris, dan menambahkan Perancis atau Jerman sebagai bahasa asing kedua.
- 3) Sekolah Agama.
Yakni, sekolah yang berorientasi religius sebagaimana sekolah Al-Azhar.
- 4) Sekolah Internasional.
Yakni, sekolah swasta yang mengikuti kurikulum negara lain, seperti Inggris, Amerika, atau Perancis, dan gelar yang diterima dari mereka mendapatkan sertifikasi resmi dari Departemen Pendidikan, untuk dapat memenuhi syarat guna mendaftar ke universitas-universitas Mesir. Banyak sekolah swasta yang menawarkan program pendidikan tambahan, bersama dengan kurikulum nasional, seperti America High School Diploma, sistem IGCSE Inggris, Perancis Baccalauréat, Abitur Jerman, dan International Baccalaureate. Ini adalah jenis sekolah swasta di Mesir.³²



Gambar 8.3 Perbedaan Pendidikan Swasta Dan Negeri

³² Jurnal PPKn & Hukum Vol. 12 No. 2 Oktober 2017

Usia dan Masa belajar Usia siswa yang sekolah di sekolah dasar (SD) yang ada di Indonesia yaitu 6-12 tahun sedangkan di Mesir pada jenjang *Primary school* usianya 6-11 tahun, terdapat perbedaan 1 tahun pada kedua negara ini, hal ini disebabkan di negara Indonesia siswa wajib mengikuti kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD sedangkan di negara Mesir siswa diwajibkan mengikuti *Grade 1* sampai dengan *grade 5*. Di negara Indonesia siswa wajib mengikuti kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD jadi masa sekolah yang harus dilewatinya lebih kurang 6 tahun, sedangkan di negara Mesir siswa diwajibkan mengikuti *Grade 1* sampai dengan *grade 5* maka masa sekolah yang harus dilewatinya lebih kurang 5 tahun. Namun jika apabila mereka tidak lulus pada jenjang tertentu maka mereka harus mengulang dan menambah waktu belajarnya.

Tahun Akademik, Pembiayaan, Waktu belajar, Ekstra kurikuler, Program buta Aksara dan Kurikulum Di Indonesia dimulainya pembelajaran biasanya pada bulan Juli sampai dengan Juni, sedangkan di Mesir mulai pada bulan September sampai Agustus, Sekolah Negeri dibiayai oleh pemerintah Sekolah Swasta hanya mendapat subsidi dan hal ini sama dengan halnya di Negara Mesir. Waktu belajar untuk tingkat SD umumnya jam 07.30 WIB- 12.30 WIB sedang di Mesir jam 09.00 - 15.00 jadi kalau di Indonesia sekitar 6 jam pelajaran dan di Mesir 6 jam juga, hanya berbeda dari segi waktu³³.

Pendanaan

Peningkatan jumlah guru dan sekolah, perbaikan peralatan dan kenaikan harga (termasuk kenaikan gaji) telah menyebabkan kenaikan belanja pendidikan. Pengeluaran untuk pendidikan mencapai E1,186,5 juta pound (UU\$1,163 juta). Ini berarti 8,9% dari keseluruhan pengeluaran pemerintah atau sama dengan 4,1% GNP. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan formal pada tahun 1988 adalah 18,55% dari total pengeluaran untuk masyarakat. Gaji menyerap 80% lebih, sementara pengeluaran lain 20%. Investasi untuk gedung meningkat pada tahun 1980-an dari 7% menjadi 13%. Masih saja tidak cukup gedung-gedung sekolah dan apabila seluruh permintaan dipenuhi, pemerintah harus menyediakan biaya lebih dari E3 miliar pound (UU\$2,94 miliar) pada masa 10 tahun yang akan datang.³⁴

Adapun sistem penggajian guru di Mesir dengan memberikan gaji rata-rata kepada guru USD 185/2.590.000,-/ bulan selain itu penggajian juga berdasarkan mata pelajaran dan pengalaman guru. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

³³ [https://tulisanterkini.com/artikel/pendidikan/3470-perbandingan-sistem-
pendidikan-indonesia-dan-mesir.htm](https://tulisanterkini.com/artikel/pendidikan/3470-perbandingan-sistem-pendidikan-indonesia-dan-mesir.htm)

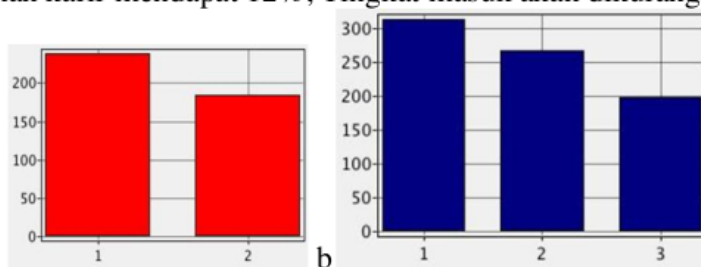
³⁴ Jurnal PPKn & Hukum Vol. 12 No. 2 Oktober 2017 125

Tabel 8.1
Sistem Penggajian Guru di Mesir

Guru	Gaji	Berpengalaman	Pertengahan Karir	Tingkat Masuk
Bahasa Inggris	USD 239/3.346.000,	Gaji tambahan 31%	Mendapat 12%,	Dikurangi 17% .
Matematika	USD USD 231 /3.234.000	Tambahan 29%	Mendapat 8%	Dikurangi 16%
Tutor	USD 209 /2.926.000,	Tambahan 21%	Mendapat 13%,	Dikurangi 10%.
Guru Musik	USD 205 /2.870.000	Tambahan 22%	Mendapat 10%,	Dikurangi 15%.
Guru fisika	USD 224 /3.136.000	Tambahan 25%	Mendapat 14%,	Dikurangi 10%.
Guru Kimia	USD 229 /3.206.000	Tambahan 26%	Mendapat 17%,	Dikurangi 12%.
Guru olahraga	USD 187 /2.618.000,	Tambahan 12%	Mendapat 10%,	Dikurangi 8%.
Guru bahasa Spanyol	USD 220 / 3.080.000	Tambahan 20%	Mendapat 9%,	Dikurangi 14%.
Gaji dosen	365 dollar per-bulan/5,110.000			

Dari table diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

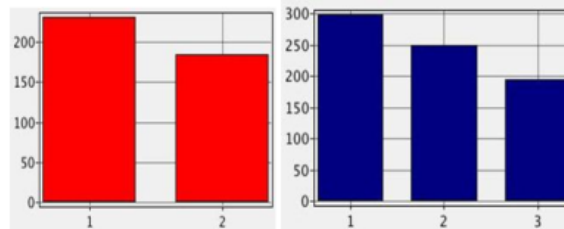
1. Gaji untuk: Guru bahasa Inggris Mesir - USD 239/3.346.000, Gaji rata-rata Mesir - USD 185 selain itu penggajian dipengaruhi oleh pengalaman kerja seperti : Berpengalaman akan mendapatkan gaji tambahan 31% dari gaji pokok, pada Pertengahan karir mendapat 12%, Tingkat masuk akan dikurangi 17% .



Gambar 8.4 Diagram Gaji Guru Bahasa Inggris per Tahun

Merah : Bagan: (1) Gaji - Guru bahasa Inggris (2) Gaji rata-rata – Mesir
Biru: Bagan: (1) Berpengalaman (2) Pertengahan karir (3) Tingkat masuk ³⁵.

2. Gaji untuk: Guru matematika Mesir - USD USD 231 /3.234.000, Gaji rata-rata Mesir - USD 185 selain itu penggajian dipengaruhi oleh pengalaman kerja seperti : Berpengalaman akan mendapatkan gaji tambahan 29% dari gaji pokok, pada Pertengahan karir mendapat 8%, Tingkat masuk akan dikurangi 16% .

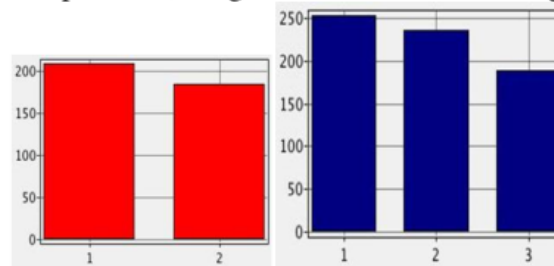


Gambar 8.5 Diagram Gaji Guru Matematika per Tahun

Merah : Bagan: (1) Gaji - Guru matematika (2) Gaji rata-rata – Mesir

Biru : Bagan: (1) Berpengalaman (2) Pertengahan karir (3) Tingkat masuk ³⁶.

3. Gaji untuk: tutor Mesir - USD USD 209 /2.926.000, Gaji rata-rata Mesir - USD 185 selain itu penggajian dipengaruhi oleh pengalaman kerja seperti : Berpengalaman akan mendapatkan gaji tambahan 21% dari gaji pokok, pada Pertengahan karir mendapat 13%, Tingkat masuk akan dikurangi 10%.



Gambar 8.6 Diagram Gaji Tutor per Tahun

Merah:Bagan: (1) Gaji - Tutor (Guru) (2) Gaji rata-rata – Mesir

Biru : Bagan: (1) Berpengalaman (2) Pertengahan karir (3) Tingkat masuk³⁷.

4. Gaji untuk: guru Musik - USD USD 205 /2.870.000, Gaji rata-rata Mesir - USD 185 selain itu penggajian dipengaruhi oleh pengalaman kerja seperti : Berpengalaman akan mendapatkan gaji tambahan 22% dari gaji pokok, pada Pertengahan karir mendapat 10%, Tingkat masuk akan dikurangi 15%.

³⁵

[egypt.html](https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-enlishteacher-egypt.html)

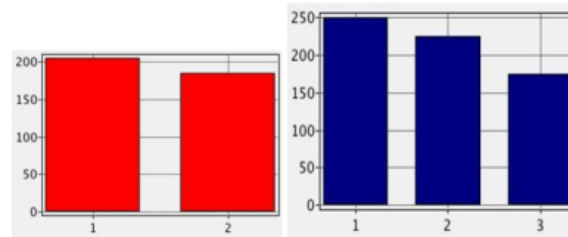
<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-enlishteacher-egypt.html>

³⁶

[egypt.html](https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-mathteacher-egypt.html)

³⁷

<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-tutor-egypt.html>

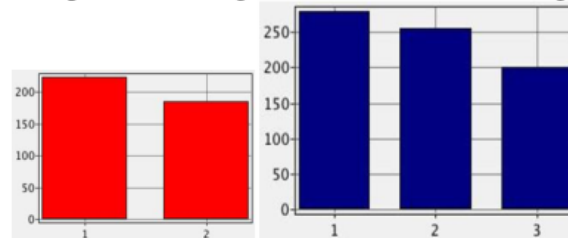


Gambar 8.7 Diagram Gaji Guru Musik per Tahun

Merah : Bagan: (1) Gaji - Guru musik (2) Gaji rata-rata – Mesir.

Biru : Bagan: (1) Berpengalaman (2) Pertengahan karir (3) Tingkat masuk³⁸.

5. Gaji untuk: guru fisika Mesir - USD USD 224 /3.136.000, Gaji rata-rata Mesir - USD 185 selain itu penggajian dipengaruhi oleh pengalaman kerja seperti : Berpengalaman akan mendapatkan gaji tambahan 25% dari gaji pokok, pada Pertengahan karir mendapat 14%, Tingkat masuk akan dikurangi 10%.

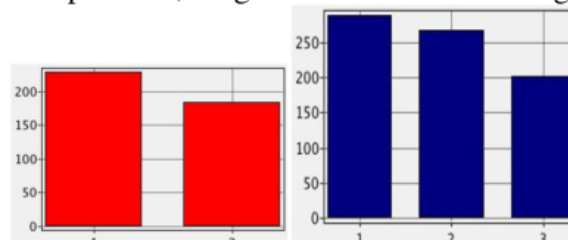


Gambar 8.8 Diagram Gaji Guru Fisika per Tahun

Merah : Bagan: (1) Gaji - Guru fisika (2) Gaji rata-rata – Mesir.

Biru : Bagan: (1) Berpengalaman (2) Pertengahan karir (3) Tingkat masuk³⁹.

6. Gaji untuk: guru Kimia Mesir - USD USD 229 /3.206.000, Gaji rata-rata Mesir - USD 185 selain itu penggajian dipengaruhi oleh pengalaman kerja seperti : Berpengalaman akan mendapatkan gaji tambahan 26% dari gaji pokok, pada Pertengahan karir mendapat 17%, Tingkat masuk akan dikurangi 12%.



Gambar 8.9 Diagram Gaji Guru Kimia per Tahun

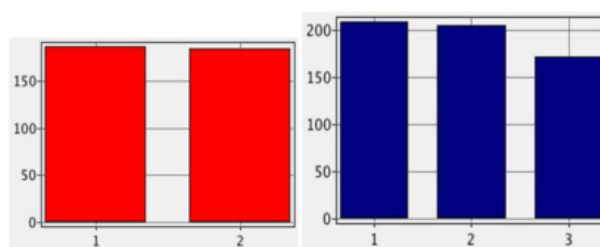
Merah: Bagan: (1) Gaji - Guru kimia (2) Gaji rata-rata – Mesir.

³⁸<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-musicteacher-egypt.html>

³⁹<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-physicsteacher-egypt.html>

Biru : Bagan: (1) Berpengalaman (2) Pertengahan karir (3) Tingkat masuk⁴⁰.

7. Gaji untuk: guru olahraga Mesir - USD 187 /2.618.000, Gaji rata-rata Mesir - USD 185 selain itu penggajian dipengaruhi oleh pengalaman kerja seperti : Berpengalaman akan mendapatkan gaji tambahan 12% dari gaji pokok, pada Pertengahan karir mendapat 10%, Tingkat masuk akan dikurangi 8%.

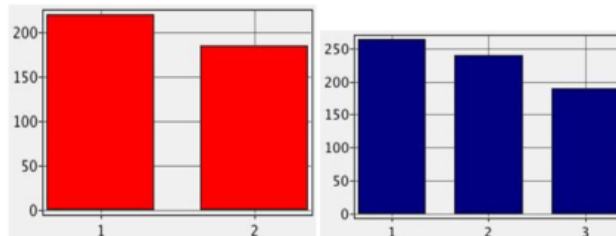


Gambar 8.10 Diagram Gaji Guru Olahraga per Tahun

Merah : Bagan: (1) Gaji - Guru olah raga (2) Gaji rata-rata – Mesir.

Biru : Bagan: (1) Berpengalaman (2) Pertengahan karir (3) Tingkat masuk⁴¹.

8. Gaji untuk: guru bahasa Spanyol Mesir - USD 220 /3.080.000, Gaji rata-rata Mesir - USD 185 selain itu penggajian dipengaruhi oleh pengalaman kerja seperti : Berpengalaman akan mendapatkan gaji tambahan 20% dari gaji pokok, pada Pertengahan karir mendapat 9%, Tingkat masuk akan dikurangi 14%.



Gambar 8.11 Diagram Gaji Guru Bahasa Spanyol per Tahun

Merah : Bagan: (1) Gaji - Guru bahasa Spanyol (2) Gaji rata-rata – Mesir.

Biru: Bagan: (1) Berpengalaman (2) Pertengahan karir (3) Tingkat masuk⁴².

Adapun Gaji dosen di mesir saat ini hanya menerima gaji sebesar 365 dollar per-bulan/5,110.000,-⁴³. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Varkey Gems

⁴⁰<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-chemistryteacher-egypt.html>

⁴¹<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-physicalteacher-egypt.html>

⁴²<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-spanishteacher-egypt.html>

⁴³https://www.erasuslim.com/berita/dunia-islam/dosen-dosen-di-mesir-mogok-ngajar-tuntut-kenaikan-gaji.htm#.X_gnnNgzYdU

Foundation mengenai rerata gaji guru per tahun di sejumlah Negara, dari 21 negara yang di survey mesir Di peringkat 21.guru di negara tersebut memiliki pendapatan senilai USD10.604 atau 12.371.333,- dan 148.456.000 ,-per tahun⁴⁴.

Ujian, Kenaikan Kelas

Sistem ujian di Mesir sangat memengaruhi pemikiran murid, orang tua serta para pejabat pendidikan karena begitu pentingnya hasil ujian itu. Ujian naik kelas ditetapkan pada *Grade* 2, 4, dan 5, dan ujian negara pertama dilaksanakan pada akhir *grade* 8. Murid yang lulus mendapat Sertifikasi Pendidikan Dasar, dan dengan itu dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah skor menentukan jenis sekolah yang akan dimasuki, dan itu sangat penting karena umumnya hanya murid-murid yang mendapat skor tinggi saja yang dapat masuk ke sekolah-sekolah menengah akademik yang diinginkan menuju universitas. Kalau tidak, mereka masuk kesekolah-sekolah teknik atau institut pendidikan lain. Jadi, masa depan anak muda mesir banyak tergantung pada nilai yang diperoleh pada ujian negara.

Hal ini menjadi sangat penting sehingga menjadi persaingan sesama murid sangat ketat. Sama halnya dengan siswa-siswa yang akan menamatkan pendidikan menengah, karena jumlah skor yang diperoleh menentukan fakultas atau universitas mana yang mereka masuki. Ujian yang sangat kompetitif ini membuat siswa harus belajar keras, dan bahkan menimbulkan percontekan dalam berbagai rupa, dan juga mengakibatkan timbul-timbulnya kursus-kursus privat⁴⁵.

J. KESIMPULAN

Sistem pendidikan Mesir sangat sentralistik, dan dibagi menjadi tiga tahap yaitu. Pendidikan Dasar terdiri dari Tahap primer dan tahap persiapan, Pendidikan Menengah dan Pasca Pendidikan Menengah. Jenis pendidikan di negara Mesir terdiri dari pendidikan formal yang meliputi sistem pendidikan sekuler, sistem pendidikan Al Azhar dan sistem pendidikan vocational, dan pendidikan non formal. Jenjang pendidikan di Mesir dan di Indonesia berdasarkan perkembangan usia adalah sama. Perbedaan terdapat pada penekanan pendidikan dasar, di Indonesia 9 tahun meliputi SD dan SMP, sedangkan di Mesir 8 tahun yaitu pada Primary School.

Ujian naik kelas ditetapkan pada *Grade* 2, 4, dan 5, dan ujian negara pertama dilaksanakan pada akhir *grade* 8. Murid yang lulus mendapat Sertifikasi Pendidikan Dasar, dan dengan itu dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Gaji rata rata kepada guru USD 185/2.590.000,-/ bulan selain itu penggajian juga berdasarkan mata pelajaran dan pengalaman guru.

⁴⁴<https://news.okezone.com/read/2013/10/11/373/880322/21-negara-dengan-gaji-guru-paling-wow-2>

⁴⁵<https://tulisanterkini.com/artikel/pendidikan/3470-perbandingan-sistem-pendidikan-indonesia-dan-mesir.htm>

DAFTAR PUSTAKA

Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 13, No. 1, Februari 2018

el-Ghiroh. Vol. XVI, No. 01. Februari 2019

<http://eprints.uny.ac.id/21742/3/BAB%20II.pdf>

https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Egypt

[https://gogoo-tour.com/blog/10-ancient-egyptian-monuments-\(part-ii\)](https://gogoo-tour.com/blog/10-ancient-egyptian-monuments-(part-ii))

https://id.wikipedia.org/wiki/daftar_negaranegara_Afrika_menurut_Indeks_Pemba
ngunan_Manusia

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir>

<https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-mesir-egypt/>

[https://kaltim.idntimes.com/news/indonesia/rosa-folia/ini-5-negara-yang-pertama-
mengakui-](https://kaltim.idntimes.com/news/indonesia/rosa-folia/ini-5-negara-yang-pertama-
mengakui-)

[kemerdekaan-indonesia-regional-kaltim/1](https://kaltim.idntimes.com/news/indonesia/rosa-folia/ini-5-negara-yang-pertama-
mengakui-)

<https://kemlu.go.id/cairo/id/news>

[https://kumparan.com/potongan-nostalgia/pembangunan-terusan-suez-sebagai-
jalan-pintas-perdagangan](https://kumparan.com/potongan-nostalgia/pembangunan-terusan-suez-sebagai-
jalan-pintas-perdagangan)

[-global-1sq8gAFhEYJ/full](https://kumparan.com/potongan-nostalgia/pembangunan-terusan-suez-sebagai-
jalan-pintas-perdagangan)

[https://news.okezone.com/read/2013/10/11/373/880322/21-negara-dengan-gaji-
guru-paling-wow-2](https://news.okezone.com/read/2013/10/11/373/880322/21-negara-dengan-gaji-
guru-paling-wow-2)

[https://tulisanterkini.com/artikel/pendidikan/3470-perbandingan-sistem-
pendidikan-indonesia-dan-mesir.html#:](https://tulisanterkini.com/artikel/pendidikan/3470-perbandingan-sistem-
pendidikan-indonesia-dan-mesir.html#)

<https://www.ceicdata.com/id/indicator/egypt/gdp-per-capita>

[https://www.erasuslim.com/berita/dunia-islam/dosen-dosen-di-mesir-mogok-
ngajar-tuntut-kenaikan-gaji.htm#.X_gnnNgzYdU](https://www.erasuslim.com/berita/dunia-islam/dosen-dosen-di-mesir-mogok-
ngajar-tuntut-kenaikan-gaji.htm#.X_gnnNgzYdU)

<https://www.geografi.org/2017/08/geografi-negara-mesir.html>

[https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-chemistryteacher-
egypt.html](https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-chemistryteacher-
egypt.html)

[https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-englishteacher-
egypt.html](https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-englishteacher-
egypt.html)

<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-mathteacher-egypt.html>

<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-musicteacher-egypt.html>

<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-physicalteacher-egypt.html>

<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-physicsteacher-egypt.html>

<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-spanishteacher-egypt.html>

<https://www.jobandsalaryabroad.com/id/egypt/indonesian-tutor-egypt.html>

<https://www.republika.co.id/berita/74619/>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/pvwj31313/sistem-gaji-di-masa-peradaban-islam>

<https://ydayuda.files.wordpress.com/2012/11/mesir-2.pdf>

Ibid, h.114

Ibid, hh.115-119

Prof. Drs. H. Agustiar Syah Nur, MA, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, (Bandung: Tim Lubuk Agung, 2001) hlm. 227

Prof. Drs. H. Agustiar Syah Nur, MA, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara* hlm. 229-232

STUDIA DIDAKTIKA Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol.10 No.1 Tahun 2016 ISSN 1978-8169

Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.165

BAB IX SISTEM PENDIDIKAN DI AUSTRALIA

Aryatti Lasiyah

Ari.arkysta20@gmail.com

A. GAMBARAN UMUM NEGARA AUSTRALIA

1. Letak Geografis Negara Australia



Gambar 9.1 Peta Negara Australia

Kondisi Geografis Australia, Australia merupakan sebuah negara besar dimana wilayah Australia adalah sebuah benua, dikenal dengan nama benua kering. Luas keseluruhan Australia berupa daratan merupakan campuran gurun dan padang savana dan sedikit hutan sehingga membuat Australia terlihat kering dan tandus pada daerah tengah dan hijau oleh hutan di pesisir benua. Wilayah Australia seluas 7.686.850 kilometer persegi berupa daratan dan luas perairan seluas 58.920 kilometer persegi dimana daratan mendominasi daripada lautan. Wilayah tersebut masuk kedalam top 10 negara terluas di dunia dimana wilayah negara Australia terluas ke - 6 di dunia. Secara astronomis letak Australia diantara 113 BT – 155 BT dan 10 LS – 43 LS.¹ Batas Wilayah Australia Secara geografis letak Australia, terletak dengan batas - batas wilayah sebagai berikut:²

- a. Barat : Samudera Hindia atau disebut dengan Samudera Indonesia
- b. Timur: Laut Koral, Laut Tasman, Samudera Pasifik dan negara New Zealand (lebih condong ke tenggara)

¹ <https://www.belajarsosial.com/2017/10/letak-geografis-australia-dan-pembagian.html> diakses pada 05-Februari-2021, pukul 08.25 WIB

² *Ibid.*,

- c. Utara : Laut Timor (Timor Leste), Laut Arafuru (Indonesia), Papua (Indonesia) dan negara Papua Nugini
- d. Selatan: Samudra Hindia dan Kutub Selatan.

2. Keadaan Demografis Negara Australia

The demografis Australia meliputi statistik dasar, kota terpadat, etnis dan agama. Populasi Australia diperkirakan 25.741.200 pada 2 Februari 2021. Australia adalah negara terpadat ke-52 di dunia dan negara Oseania terpadat. Populasinya terkonsentrasi terutama di daerah perkotaan dan diperkirakan akan melebihi 28 juta pada tahun 2030. Populasi Australia telah tumbuh dari perkiraan populasi antara 300.000 dan 1.000.000 Penduduk Asli Australia pada saat pemukiman Inggris pada tahun 1788 karena banyak gelombang imigrasi selama periode tersebut. Juga karena imigrasi, bagian penduduk Eropa meningkat tajam pada akhir abad ke-18 dan ke-19, tetapi sekarang menurun dalam persentase. Australia memiliki kepadatan penduduk rata-rata 3,4 orang per kilometer persegi dari total luas daratan, yang menjadikannya salah satu negara berpenduduk paling jarang di dunia. Hal ini umumnya dikaitkan dengan geografis semi-gersang dan gurun di sebagian besar pedalaman Negara. Faktor lainnya adalah urbanisasi, dengan 89% penduduknya tinggal di beberapa daerah perkotaan, Australia adalah salah satu negara paling urban di dunia. Angka harapan hidup di Australia pada 2015-2017 adalah 83,2 tahun, termasuk yang tertinggi di dunia.³

B. HISTORIOGRAFI PENDIDIKAN DI AUSTRALIA

Kurikulum Nasional pelajaran sejarah di Australia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemahaman dan pengetahuan tentang peristiwa sejarah (*Historical understanding and knowledge*) serta keterampilan sejarah (*Historical skill*). Pengetahuan dan pemahaman sejarah mulai diajarkan di Taman kanak-kanak sampai kelas 2, para siswa belajar sejarah dengan mengamati cerita dari keluarga mereka dan pusaka komunitas mereka. Di kelas 3 sampai kelas 6, fokusnya diperluas dari sejarah lokal ke regional dan Nasional. Mereka diajarkan tentang kehidupan di Australia sebelum tahun 1.800 pembangunan bangsa Australia dan hubungan Australia dengan berbagai bangsa lain. Dua buah studi yang mendalam pada tahun ini akan mengarahkan para siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik-topik tertentu.⁴

Dari kurikulum yang disusun, wacana yang dikembangkan pelajaran sejarah Australia lebih pada aspek kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap peristiwa sejarah serta keterampilan melakukan penelitian sejarah. Selain unik dari prespektif kurikulum, pelajaran sejarah di Australia juga

³https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_Australia&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search diakses pada 05-februari-2021, pukul 08.45 WIB.

⁴ Purwanta, H. (2016). Kajian perbandingan historiografi pendidikan di Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia. *Paramita: Historical Studies Journal*, 25(2), 154-168.

memiliki ke khasan pada buku teksnya. Berbeda dengan Negara-negara Barat umumnya, Australia mengembangkan buku teks pelajaran sejarah, khusus untuk *secondary level* dengan berbasis kelas. Maksudnya, setiap tingkatan kelas disediakan satu buku teks yang berbeda dengan buku teks dengan tingkatan kelas lainnya.

Ditinjau dari pendekatan yang digunakan dalam menyusun buku teks pelajaran sejarah, secara garis besar para pengarang memilih menggunakan pendekatan naratif modern dengan model penulisan kombinasi antara urutan kejadian dan tema. Pola itu antara lain tampak pada buku teks karangan Robert Darlington yang berjudul *History Alive 10* yang digunakan untuk siswa kelas 10. Fenomena-fenomena historis, baik Nasional maupun InterNasional, yang penting dijadikan judul bab. Untuk membahas setiap tema, setiap bab dibagi ke dalam sub bab, yaitu pengantar, sub bab 1: sumber sejarah yang dapat digunakan untuk mengkaji tema bab, dan dilanjutkan dengan sub bab-sub bab berikutnya yang membahas sub tema secara kronologis.

C. SISTEM PENDIDIKAN DI AUSTRALIA

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem yang berarti “cara, strategi”. Dalam bahasa Inggris, *system* berarti “sistem, susunan, jaringan, cara”. Sistem juga diartikan “suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir.” Selain itu, sistem juga merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.⁵ Definisi tradisional menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, mobil adalah suatu sistem, yang meliputi komponen-komponen seperti roda, rem, kemudi, mesin dan sebagainya. Dalam artian yang luas, mobil sebenarnya adalah suatu sub sistem atau komponen dalam sistem transportasi, di samping alat-alat transportasi lainnya, seperti sepeda, motor, pesawat terbang, dan sebagainya.⁶

Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara atau sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani “*paedagogie*”, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris “*education*” yang berarti pengembangan atau bimbingan.⁷ Selain itu menurut Richey, pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas dari pada proses yang berlangsung di dalam sekolah. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada

⁵ Priyanti, D., & Iriani, S. (2013). Sistem Informasi Data Penduduk Pada Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *IJNS-Indonesian Journal on Networking and Security*, 2(4).

⁶ <http://www.fauzinesia.com/2012/06/pengertian-sistem-pendidikan.html?m=1>
diakses pada 20 desember 2020, pukul 18.00

⁷ PAI, A. (1997). Pendidikan agama islam. *Jurnal*, diakses pada, 18(10), 2018.

dan berkembang.⁸ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.⁹ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar seseorang atau sekelompok orang untuk mendewasakan seseorang dari orang tersebut tidak tau menjadi tau, dari tidak mengerti menjadi mengerti.

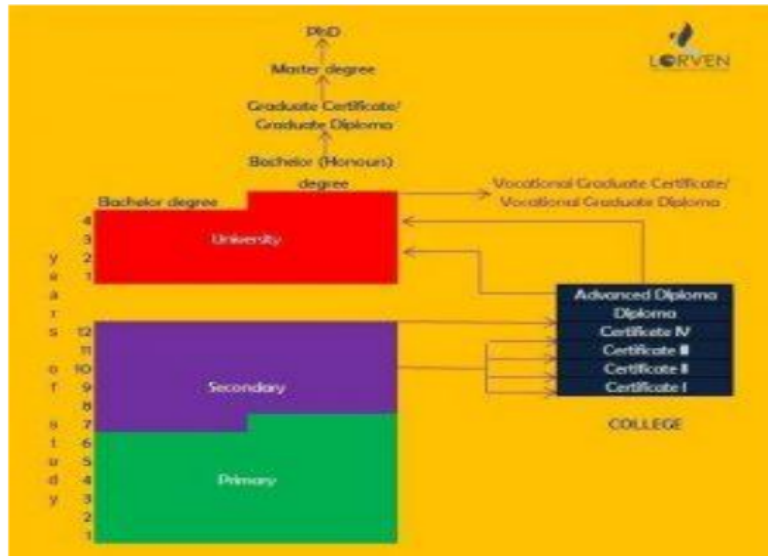
Dalam Undang-undang sistem pendidikan Nasional (Pasal 1 UU RI No. 20 th. 2003) dinyatakan bahwa sistem pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali. Untuk itu diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem. Selanjutnya secara total bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang memiliki kegiatan yang cukup kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Jika menginginkan pendidikan terlaksana secara teratur, berbagai elemen (komponen) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali terlebih dahulu. Untuk itu diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem yang dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Adapun secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama pelakunya.¹⁰

⁸ Anwar, M. (2015). *Filsafat pendidikan*. Kencana.

⁹ Safita, R. (2013). Peranan orang tua dalam memberikan pendidikan seksual pada anak. *Jurnal Edu-Bio*, 4, 35.

¹⁰ Digilib.uinsby.ac.id, diakses pada 21 Desember 2020, pukul 08.00



Gambar 9.2 Struktur Pendidikan di Negara Australia

Sistem pendidikan di Australia adalah tanggung jawab masing-masing negara bagian dan teritori. Akibatnya, setiap yurisdiksi memiliki Undang-Undang Pendidikannya sendiri dan menetapkannya sendiri agenda tentang pendidikan siswa berkebutuhan khusus. Padahal jumlahnya banyak kesamaan antara isi individu. Bertindak pilihan untuk pendidikan siswa sangat bervariasi, karena otonomi pengambilan keputusan di dalam setiap otoritas. Luas geografis benua ini juga sangat mempengaruhi ketersediaan sekolah pilihan dengan banyak anak tidak dapat menghadiri sekolah komunitas lokal tradisional (Forlin, 2005). Meskipun tidak ada mandat hukum federal tentang ketentuan pendidikan untuk siswa penyandang disabilitas, pemerintah terus melakukan review pendidikan di tingkat Nasional dan memberikan saran yang kuat untuk melaksanakan perubahan.¹¹

Sistem pendidikan di Australia berstandar tinggi dan menikmati pengakuan InterNasional. Sekolah adalah wajib di seluruh Australia, yang memberikan sumbangsih pada tingkat melek huruf 99%. Sekolah-sekolah mengembangkan keterampilan dan membangun kepercayaan diri para pelajar, lulusan Universitas Australia unggul pada penelitian dan inovasi terdepan, serta pendidikan kejuruan dan teknik memajukan sektor industri yang sedang berkembang pesat.¹²

Australia juga salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdepan di dunia bagi pelajar InterNasional, termasuk pelatihan bahasa Inggris. Lebih dari 400.000 pelajar dari sekitar 200 negara menerima pendidikan di Australia setiap tahun. Kursus ditawarkan baik di Australia maupun di luar negeri.¹³

¹¹ Forlin, C. (2006). Inclusive education in Australia ten years after Salamanca. *European Journal of Psychology of Education*, 21(3), 265-277.

¹² L. Ingvarson and Chadbourne, (Eds), *Valuing Teachers Work: New Direction In Teacher Apparaisal*, (Melbourne: ACER, 194), Hal. 45

¹³ D'Cruz J and J.Langford (Eds), *Issues in Australian Education*, (Melbourne: Longman Cheshire, 1990), hal. 89

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan yaitu suatu cara atau strategi seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan suasana belajar yang akan mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Berikut adalah sistem pendidikan di Australia:

1. Tinjauan Umum

Pemerintah Negara Bagian dan Teritori Australia memegang peranan penting dalam hal manajemen dan administrasi pendidikan sektor sekolah. Setiap Negara Bagian dan Teritori mempunyai hukum dan peraturan-peraturan terkait mengenai kurikulum, akreditasi program studi, ujian bagi siswa dan penghargaan bagi siswa. Pemerintah Australia memegang peranan kepemimpinan secara Nasional dan bekerjasama dengan Pemerintah Negara-negara Bagian dan Teritori serta pihak-pihak industri dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan sekolah. Pemerintah Australia juga menyediakan subsidi yang cukup penting bagi sekolah-sekolah pemerintah maupun swasta. Di Australia, tahun ajaran adalah dari akhir bulan Januari, atau awal bulan Februari, sampai dengan awal bulan Desember. Kebanyakan Negara Bagian dan Teritori menggunakan sistem tahun ajaran yang mencakup empat triwulan. Tasmania mempunyai sistem tahun ajaran yang terdiri dari tiga kuartalan. Terdapat dua kategori besar sekolah-sekolah Australia. Sekolah-sekolah Negeri beroperasi di bawah tanggung jawab langsung dari Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Sekolah-sekolah Negeri menerima pendanaan inti dari Pemerintah Negara Bagian dan Teritori dan pendanaan tambahan dari Pemerintah Federal. Sekolah-sekolah selain sekolah Negeri menerima pendanaan tambahan dari pemerintah Federal dan pemerintah Negara Bagian/Teritori, dan suatu proporsi pendanaan yang besar dari sumbangan swasta dan biaya-biaya sekolah. Sekolah-sekolah selain dari Sekolah Negeri umumnya mempunyai afiliasi agama atau gaya pengajaran yang khusus dan di Australia sejumlah besar sekolah-sekolah selain Sekolah Negeri adalah sekolah Katolik.¹⁴

2. Jenjang Pendidikan di Australia

Pada dasarnya jenjang pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu:¹⁵

a. Sekolah Dasar (*Primary School*)

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dasar adalah 6-7 tahun. Pada umumnya siswa memasuki pendidikan dasar pada umur 6 atau 7 tahun. Berbeda dengan di Indonesia dimana siswa diharuskan menempuh ulangan-ulangan dan ulangan umum untuk dapat naik ke kelas berikutnya, siswa di sekolah dasar di Australia tidak mengenal ulangan. Mereka secara otomatis naik ke kelas berikutnya sejalan dengan pergantian tahun. Tahun

¹⁴ Shannon Smith, dkk, *Get to know Australian Schools: Mengenal Sekolah-sekolah di Australia* (Jakarta: Kedutaan Besar Australia, Departemen Pendidikan, 2010), hal. 8

¹⁵ Msholihukh. Files. Wordpress. Com/2012/05/bukupanduanaustralia.pdf

pertama di sekolah dasar Australia disebut *Year 1* dan seterusnya hingga *Year 6*. Ada Negara bagian Australia yang menetapkan lama pendidikan dasar adalah 6 tahun (New SouthWales (NSW), Victoria (Vic), Tasmania (Tas), dan Australian Capital Territory (ACT)). Tetapi ada juga yang menetapkan lama pendidikan dasarnya adalah 7 tahun (South Australia (SA), Northern Territory (NT), Queensland (Qld), dan Western Australia (WA)).

b. Sekolah Menengah (Secondary of High School)

Pendidikan menengah atau dikenal sebagai *Secondary Education* di Australia memerlukan waktu antara 5-6 tahun. Tahun pertama di pendidikan menengah disebut *Year 7* dan seterusnya hingga *Year 11*. Jenjang pendidikan menengah berakhir pada *Year 11*. Untuk Negara bagian yang menerapkan pendidikan dasarnya selama 7 tahun, maka pendidikan menengahnya memerlukan waktu selama 5 tahun saja (yaitu di Negara bagian SA, NT, Qld, dan WA). Setelah tahun ke 11 ini, siswa dapat memilih ke arah mana jenjang pendidikan yang ia ingin tempuh. Jika seorang siswa berminat dalam bidang-bidang ilmu yang aplikatif, maka ia dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi yang khusus disiapkan untuk itu. Lembaga pendidikan ini dikenal sebagai *Vocation Education and Training* (VET) atau *Colleges for Technical and Futher Education* (TAFE). Lulusan dari TAFE pada umumnya akan menjadi tenaga teknis.

Jika siswa tersebut berminat kebidang-bidang ilmu yang lebih bersifat teoritis, maka ia akan memasuki perguruan tinggi (*Universitas*). Untuk dapat memasuki Universitas, seorang siswa Australia harus menempuh *Year 12* yang dikenal juga sebagai *Matriculation Year*. Dalam tahun terakhir dari pendidikan menengah ini, para siswa digembleng dengan intensif agar dapat lulus ujian Negara dengan nilai yang memuaskan. Makin tinggi nilai yang diperoleh, maka makin mudah siswa tersebut memilih perguruan tinggi yang ia sukai. Seperti halnya di berbagai Negara, paspor untuk dapat diterima di Universitas favorit adalah nilai ujian *Matriculation* yang setinggi mungkin.

c. Pendidikan Tinggi (Universitas)

Pendidikan tinggi di Australia dapat di bagi menjadi dua jenjang, yakni jenjang sarjana (*undergraduate level*) dan jenjang pascasarjana (*postgraduate level*) untuk memperoleh gelar *Masters* atau *PhD*). Jenjang sarjana dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun dan memperoleh gelar Bachelor, yakni Bachelor of Arts (BA) atau Bachelor of Science (Bsc) tergantung pada bidang ilmu yang ditempuh oleh mahasiswa/i tersebut.

Jika mahasiswa/i tersebut berminat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (ke jenjang pascasarjana), maka ia perlu belajar lagi selama 1 (satu) tahun. Jenjang ini dikenal sebagai *Honours level*, dan gelar yang diperolehnya akan menjadi BA (*Hons*) atau Bsc (*Hons*) sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.

Tingkat kelulusan di jenjang *Honours* ini sangat menentukan bagi kelanjutan pendidikan sang mahasiswa di jenjang pascasarjana. Banyak Universitas di Australia menerima mahasiswa/i untuk program s3 (Doktor)

langsung dari jenjang *Honours*, jika ia mendapatkan *Honours* peringkat 1 atau II-A. Tetapi jika mahasiswa/I tersebut mendapat peringkat II-B, ia diharuskan menempuh jenjang s2 (Masters) terlebih dahulu. Sekarang, Universitas di Australia cenderung menganjurkan para mahasiswa/I pascasarjana untuk menempuh jenjang s2 terlebih dahulu sebelum menempuh jenjang s3. Jika kemajuan yang dicapai oleh sang mahasiswa/i tersebut sangat baik pada tahap-tahap akhir di jenjang s2, maka ia diperkenankan untuk mengalihkan programnya ke jenjang s3. Bagi mahasiswa yang mendapat peringkat Honours III, ia tidak diperkenankan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lama pendidikan untuk jenjang s2 adalah 1-2,5 tahun, sedangkan untuk jenjang s3 diperlukan waktu 3-3,5 tahun.

Pendidikan tingkat s2 dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu dengan mengikuti perkuliahan saja (dikenal sebagai *Masters by Coursework*) yang memerlukan waktu antara 12-18 bulan; atau melalui penelitian (*Masters by Research*) yang memerlukan waktu antara 1,5-2,5 tahun atau kombinasi dari keduanya (*Masters by Coursework & Research*) yang memerlukan waktu sekitar 2 tahun. Sering calon mahasiswa/I pasca dari Negara lain yang tidak mengenal sistem pendidikan di Australia agak bingung jika ditanya dengan cara apa ia akan menempuh jenjang s2nya. Jika calon mahasiswa/I s2 tersebut dikemudian hari bermaksud untuk mengambil program s3, maka sang calon sangat dianjurkan untuk mengambil program *Masters by Research* atau *masters by coursework and research*.

Perguruan tinggi di Australia tidak mau menerima mahasiswa program s3 jika orang tersebut memperoleh *Masters by Coursework*. Dasar pertimbangannya adalah karena semua di Australia ditempuh melalui penelitian (*by Research*). Sistem ini berbeda dengan sistem pendidikan di Amerika Serikat misalnya, dimana sebagian dari program s3 di Amerika harus mengikuti perkuliahan.

Demikian sistem pendidikan di Australia, sedangkan sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan Nasional. Sistem pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jika sebelumnya wajib belajar bagi masyarakat Indonesia ditetapkan selama 9 tahun, meliputi 6 tahun untuk sekolah dasar, dan 3 tahun untuk sekolah menengah. Namun, kini telah ditingkatkan hingga 12 tahun yang meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas. Sistem pendidikan Nasional bertujuan untuk mendidik dan memberikan pengetahuan secara akademis, keterampilan, hingga perilaku. Terdapat beberapa sistem pendidikan di Indonesia yang telah diberlakukan, yang mana telah memberikan dampak bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Sistem pendidikan tersebut meliputi:

- a. Sistem pendidikan di Indonesia dengan Orientasi Nilai
Sistem ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut memiliki tanggung jawab, tenggang rasa,

kejujuran, dan kedisiplinan. Sistem ini diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Pengaplikasian sistem pendidikan di Indonesia dengan orientasi nilai dapat dilihat dari pemberian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN)

b. Sistem pendidikan di Indonesia dengan Sistem Terbuka

Melalui sistem ini diharapkan peserta didik dapat bekerja sama dengan teman sekelas dengan mendemonstrasikan nilai inovasi dan kreativitas. Melalui sistem terbuka, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, inisiatif, dan bertanggung jawab dalam mengatur proses belajar mengajarnya sendiri.

c. Sistem pendidikan di Indonesia secara beragam

Sistem ini dibentuk untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia terdiri dari suku, bahasa, budaya yang berbeda-beda. Dengan landasan tersebut, sistem pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pada suatu komunitas. Melalui sistem ini pula, terdapat jenis instansi pendidikan yang beragam. Mulai dari pendidikan formal, informal, dan non-formal.

Sedangkan jenjang pendidikan di Indonesia di mulai dari PAUD selama 1 tahun, Taman Kanak-kanak selama 1 tahun, Sekolah Dasar selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas selama 3 tahun, Program Sarjana selama 4 tahun, program pascasarjana selama 2 tahun, program Doktor selama 4 tahun.

Dari uraian di atas dapat kita bandingkan bahwa secara umum pendidikan di Indonesia dan di Australia sama-sama di pegang oleh pemerintah, akan tetapi lamanya pendidikan pada jenjang sekolah menengah di Indonesia sama dengan di Australia yaitu sekitar 3-5 tahun, selain itu, perbedaan lainnya ada pada lamanya pendidikan di perguruan tinggi. Jika di tingkat sarjana di Indonesia, lamanya yaitu 4 tahun, di Australia selama 3 tahun, untuk pascasarjannya, di Indonesia memerlukan waktu 2 tahun untuk menyelesaikannya, akan tetapi di Australia hanya butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikan studinya, selanjutnya pada program s3, kita di Indonesia memerlukan waktu 4 tahun, sedangkan di Australia hanya 3-3,5 tahun.

D. TUJUAN PENDIDIKAN

Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk departemen pendidikan Negara bagian, Universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum ini biasanya dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih oleh badan-badan yang relevan. Tujuan pendidikan ini mengisyaratkan perlunya pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Pada level sekolah, tekanan adalah pada pengembangan potensi murid sebaik mungkin.¹⁶

¹⁶<https://www.scribd.com/doc/8583903/Sistem-pendidikan-australia> hal. 4

Pada tingkat pendidikan tinggi, tekanan yang lebih besar diarahkan pada pencapaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan umum ini, berbagai sektor pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang berbeda-beda. Misalnya, Universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor pendidikan teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan kejuruan.

Pada dasarnya, pemerintah federal Australia tidak campur tangan langsung tentang tujuan pendidikan kecuali hanya melalui tujuan umum yang dinyatakan dalam undang-undang, tetapi pemerintah federal menyediakan hampir seluruh dana pendidikan dan memberikan arah pendidikan.

Sedangkan tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan UU No. 20, tahun 2003, tentang pendidikan di upayakan dengan berawal dari manusia apa adanya (aktualisasi) dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya (potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (membangkitkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.¹⁷

Dari uraian tersebut dapat kita lihat bagaimana perbedaan tujuan pendidikan Negara Australia dengan Negara Indonesia. Tujuan pendidikan Negara Australia lebih pada pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan di Indonesia, lebih menitik beratkan pada pengembangan karakteristik peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta mempunyai akhlak baik lainnya.

E. IDEOLOGI DI NEGARA AUSTRALIA

Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Greek yang terdiri atas kata *idea* dan *logia*. *Idea* berasal dari *idein* yang berarti melihat. *Idea* berasal dari *idein* yang berarti melihat. *Idea* dalam *Webster's New Calligate Dictionary* berarti "*something existing in the mind as the result of the formulation of an opinion, a plan or the like*" (sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana). Sedangkan *logis* berasal dari kata *logos* yang berarti *word*. Kata ini berasal dari *legein* yang berarti to speak (berbicara), *logia* berarti science (pengetahuan) atau teori.¹⁸

Sedangkan secara terminologis, istilah ideologi didefinisikan oleh banyak kalangan secara berbeda-beda. Dalam pengertian yang paling umum dan lunak,

¹⁷ Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29-39.

¹⁸ Negara, I. B. D. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Negara.

ideologi adalah pikiran yang terorganisir, yakni nilai, orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi.¹⁹

Ideologi juga dapat diartikan sebagai kumpulan ide atau gagasan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu, secara umum dan beberapa arah filosofis, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat.

Australia sendiri memiliki ideologi politik liberalisme yang merupakan warisan dari para pembawanya yang berasal dari Eropa. Hal itu bisa terlihat dari pola kehidupan sehari-hari penduduknya serta dalam kehidupan pemerintahannya yang menjadikan Australia sebagai sebuah keunikan tersendiri di tengah-tengah budaya dan ideologi yang beranekaragam yang berada di Asia Tenggara khususnya. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berfikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (*private enterprise*) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

Jika Australia menganut ideologi liberalisme, berbeda dengan Indonesia yang berideologi Pancasila. Makna Pancasila sebagai ideologi Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa masyarakat di Negara Australia menganut ideologi liberalisme, sedangkan masyarakat Indonesia menganut ideologi Pancasila.

F. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI AUSTRALIA

Hampir semua guru pra sekolah dan pendidikan dasar serta kebanyakan guru-guru sekolah menengah di didik pada CAE (*Colleges of Advanced Education*). Sejumlah guru-guru sekolah menengah, dan beberapa orang guru

¹⁹ Mubaligh, A (2010). Relasi Bahasa dan Ideologi. *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 5 (2).

²⁰ Setyowati, Rini, and S.Pd Buyung. "1. Perlunya Ideologi bagi suatu Negara a. Pengertian Ideologi." *Pendidikan Pancasila* (2020): 22.

pendidikan dasar mendapatkan pendidikan di Universitas. Semua sistem sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mendapatkan pendidikan dalam jabatan (*inservice education*), termasuk peningkatan kualifikasi atau ijazah dengan menyelesaikan kuliah-kuliah yang disetujui terlebih dahulu.

Guru di Australia di bekali ilmu dan materi. Lisensi mengajarnya di dapat dari kementerian pendidikan di sana. Guru-guru yang ada, dari guru *Kinder Garden* (TK) sampai guru senior *High School* (SMA) memiliki kemampuan yang tinggi untuk selalu mengembangkan diri. Hal itu juga berlaku bagi guru-guru yang ada di daerah-daerah pedalaman atau daerah pinggir.²¹

Di Indonesia, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini, meliputi:

1. Kompetensi pedagogic

Secara umum, kompetensi pedagogis telah dianggap sebagai *ansambel* perilaku atau kapasitas potensial yang memungkinkan perwujudan yang efisien dari suatu kegiatan, atau sebagai standar profesional minimum, sering ditentukan oleh hukum, yang seharusnya profesional mencapai. Dari dua perspektif inilah para ahli teori telah berusaha lebih dan lebih definisi kompleks sehingga terdiri dari beberapa variabel yang akan mengarah pada lebih baik penerapan pendidikan melalui kompetensi.²²

2. Kompetensi kepribadian

Menurut Ahmad Tafsir, kompetensi kepribadian adalah kemampuan seorang guru dan memiliki sifat-sifat pribadi seperti: kasih sayang kepada anak didik, lemah lembut, rendah diri, menghormati ilmu, adil, menyenangkan ijihad, konsekuen perkataan sesuai perbuatan, sederhana.²³

3. Kompetensi professional

Dalam standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 8 ayat 3 butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi professional guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai

²¹ Hasil wawancara dengan Bu Miftaus Sa'diah dalam artikel maritulannisa, <http://mariatulannisa.blogspot.com/2014/01/makalah-perbandingan-pendidikan-sistem.html?m=1>, diakses pada 21 Desember 2020, pukul 09.45 WIB.

²² Suci, A. I., & Mata, L. (2011). Pedagogical competences the key to efficient education. *International online journal of educational sciences*, 3(2), 411-423.

²³ Ma'arif, M. A. (2017). Analisis Konsep Kompetensi Kepribadian Guru PAI Menurut Az-Zarnuji. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 35-60.

tenaga pendidik yang meliputi penguasaan paedagogik, pengetahuan, metodologi, manajemen dan sebagainya yang tercermin dalam kinerja dilingkungan pendidikan.²⁴

4. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial didefinisikan dalam Pasal 28 ayat (3) Bagian I Bab VI Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai suatu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.²⁵

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan paket A, paket B, dan paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar dan tenaga kebersihan. Berikut ini, peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.²⁶

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah,
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah,
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor,
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada kursus dan pelatihan,
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan,
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola kursus dan pelatihan,

²⁴ Dudung, A. (2018). Kompetensi profesional guru. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(1), 9-19.

²⁵ Cahyani, F. D., & Andriani, F. (2014). Hubungan antara Persepsi Siswa Terhadap Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, dan Kompetensi Sosial Guru dengan Motivasi Berprestasi Siswa Akselerasi di SMA Negeri 1 Gresik. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 3(2), 77-88.

²⁶ [Bsnp://bsnp-indonesia.org/standar-pendidikan-dan-tenaga-kependidikan/](https://bsnp-indonesia.org/standar-pendidikan-dan-tenaga-kependidikan/), diakses pada 19 Desember 2020, pukul 20.00 WIB

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi pendidikan pada program paket A, paket B, dan paket C,
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Standar pengelola pendidikan pada program paket A, paket B, dan paket C.

G. MACAM-MACAM BEASISWA KULIAH DI AUSTRALIA DAN GAJAH GURU DI AUSTRALIA

Studi ke Australia tidak harus dengan biaya sendiri. Berikut ini ada beberapa beasiswa yang diberikan baik oleh Universitas, pemerintah Indonesia, maupun pemerintah Australia:²⁷

1. Australia Awards
2. Monash International Merit Scholarships
3. Rotary International Peace Fellowships
4. Endeavour Postgraduate Scholarships
5. Melbourne International Research (MIRS)
6. International Postgraduate Research Scholarship (IPRS)
7. Beasiswa dari Universitas Charles Darwin
8. Beasiswa Oslo Peace dari Australian National University
9. Beasiswa dari Lembaga Lainnya

Selain adanya beasiswa di Australia, mengajar adalah profesi yang sangat terhormat yang dianggap penting bagi masyarakat. Gaji awal seorang guru di Australia adalah sekitar \$ 41,109.00/tahun. Di Australia, gaji dapat berkisar luas antara setiap Negara bagian Australia dan sangat tergantung pada lokasi. Tentu saja, gaji yang lebih tinggi diperoleh atau bagi mereka yang lebih dari gelar empat tahun (s2, s3, dll). Dengan pengalaman bertahun-tahun mengajar, seorang guru secara bertahap akan mendapatkan pengasilan lebih.²⁸

Selain Australia, Negara Indonesia pun mempunyai banyak beasiswa, diantara lain:²⁹

1. Beasiswa dilihat dari cakupan pembiayaan:
 - a. Beasiswa penuh
 - b. Beasiswa parsial
2. Beasiswa dilihat dari sumber pembiayaan:
 - a. Beasiswa dari pemerintah,
 - b. Beasiswa dari pihak swasta,
 - c. Beasiswa dari Negara maju/donor InterNasional
 - d. Beasiswa dari organisasi, yayasan, atau komunitas
 - e. Beasiswa perguruan tinggi

²⁷ Utami, P. (2017). *Lolos Beasiswa Unggulan ke Australia*. Bentang B first.

²⁸ <https://www.serupedia.com/2015/05/5-negara-dengan-gajih-guru-paling-besar.html?m=1>, diakses pada 20 Desember 2020, pukul 09.15 WIB.

²⁹ <https://rencanamu.id/post/persiapan-kuliah/jenis-jenis-beasiswa-yang-perlu-kamu-ketahui>, diakses pada 2-februari-2021, pukul 12.00 WIB

3. Beasiswa menurut bentuk pembiayaan

- a. Beasiswa penghargaan
- b. Beasiswa bantuan,
- c. Beasiswa penelitian,
- d. Beasiswa non akademik,
- e. Beasiswa ikatan dinas

Sedangkan gaji Berdasarkan catatan **detikcom**, ada guru honorer yang hanya dibayar Rp 150.000-200.000 sampai Rp 200.000 300.000 sebulan. Sementara untuk gaji guru pns, mulai dari golongan III (III/a) gaji terendah sebesar Rp 2.579.400, dan tertinggi (III/d) sebesar Rp 4.797.000. Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a) sebesar Rp 3.044.300, dan tertinggi (IV/e) sebesar Rp 5.901.200.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, Indonesia tidak kalah jauh dengan Australia mengenai beasiswa untuk pelajar, akan tetapi untuk gaji guru, Indonesia kalah dengan Negara Australia, Australia menggaji guru dengan gaji yang tinggi.

H. STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN STANDAR ISI DI AUSTRALIA

Suatu kecenderungan pada semua sistem sekolah Negeri di Australia semenjak awal 1970 an adalah pendelegasian tanggung jawab kurikulum kepada sekolah-sekolah. Pada beberapa Negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat, tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal.

Kurikulum' adalah istilah yang diberikan sedikit perhatian, atau setidaknya sedikit profil, dalam pendidikan tinggi di Australia. Entah penggunaan istilah yang berfokus pada 'konten' terbatas diasumsikan, atau istilah tersebut digunakan sebagai kendaraan untuk diskusi tentang masalah kritis dalam pendidikan tinggi, misalnya 'Kurikulum inklusif', 'kurikulum yang berpusat pada peserta didik', 'menginternasionalkan kurikulum'. Namun, istilah tersebut, yang digunakan secara efektif, memiliki potensi yang cukup besar, baik secara konseptual maupun praktis.³¹ Itu bisa menyatukan:

- minat disiplin yang berfokus pada konten,
- inisiatif peningkatan pembelajaran dan pengajaran, dan
- masalah utama dalam pendidikan tinggi seperti
 - o inklusivitas,
 - o InterNasionalisasi,
 - o Cakupan dan arah program studi ke depan, dan
 - o Peran teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan tinggi.

Potensi pemersatu 'kurikulum', didefinisikan secara luas, dapat:

³⁰ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4737094/membandingkan-gaji-guru-ri-dengan-negara-lain-siapa-paling-besar>

³¹ Hicks, O. (2007, July). Curriculum in higher education in Australia—Hello. In *Enhancing Higher Education, Theory and Scholarship, Proceedings of the 30th HERDSA Annual Conference [CD-ROM]* (Vol. 8, No. 11).

- Memposisikan ulang atau membentuk kembali disiplin ilmu dan kursus berbasis disiplin,
- membantu promosi program dan pedagogi lintas disiplin dan lintas disiplin,
- mendefinisikan kembali gagasan unit 'layanan',
- secara tepat menempatkan pembelajaran 'sebelumnya' dan 'berbasis kerja' dalam pendidikan formal, dan
- menanamkan TIK dan peningkatan pengajaran dan pembelajaran generik dalam lingkungan pembelajaran kelembagaan.

Dengan demikian, 'kurikulum' adalah gagasan yang layak untuk dieksplorasi dan dielaborasi dalam konteks pendidikan tinggi. Inisiatif pengembangan pembelajaran dan pengajaran yang ada dan yang akan datang, yang didanai dan didukung melalui organisasi seperti *Carrick Institute for Learning and Teaching in Higher Education* dapat dikontekstualisasikan dalam konstruksi kurikulum. Memanfaatkan inisiatif ini di tingkat institusi dan sekolah atau departemen dapat ditingkatkan melalui keterlibatan di tingkat kurikulum. Kurikulum sebagai konstruksi dapat mengkonsolidasikan inisiatif yang dilakukan hingga saat ini dan menyoroti strategi atau fokus yang koheren untuk penyediaan kesempatan belajar yang lebih berharga dan bermakna di pendidikan tinggi.

Pada Negara bagian yang lain, pejabat-pejabat di pusat menyusun tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci, tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir. Detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Pada kedua *territories, the Australian Capital Territory*, sekolah relatif memiliki otonomi yang lebih luas dan dapat mengembangkan kurikulumnya atas dasar tujuan umum yang telah ditentukan di tingkat sekolah.³²

Terdapat variasi dalam hal tanggung jawab pengembangan kurikulum di setiap Negara bagian, maka terdapat pula perbedaan dalam pengimplementasiannya. Dalam hal kurikulum disusun berdasarkan pedoman dan materi pelajaran dari pusat, pejabat-pejabat senior dari pusat secara teratur mengunjungi sekolah-sekolah antara lain untuk memonitor pelaksanaan kurikulum.

Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pergantian kurikulum belajar yang berlaku. Hingga saat ini, setidaknya sistem pendidikan di Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 10 kali, dimulai dari tahun 1947. Berikut ini dijelaskan secara detail terkait perkembangan pendidikan di Indonesia melalui kurikulum yang sempat berlaku, hingga kurikulum pendidikan yang saat ini diterapkan.³³

³² Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara* (Bandung: Lubuk Agung Bandung, 2011), hal. 66

³³ <https://www.rumah.com/panduan-properti/pendidikan-di-Indonesia-33286>, diakses pada 19 Desember 2020, pukul 20.15 WIB

1. Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947

Ini adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan. Meski dinamakan Rencana Pelajaran 1947, saat itu kurikulum ini lebih dikenal dengan *leer plan* atau rencana pelajaran. Kurikulum ini sarat dengan kepentingan kolonialis, Rencana Pelajaran 1947 disusun dengan menerapkan asas Pancasila. Meski dibentuk pada 1947, situasi politik yang sesekali menghangat akibat perang revolusi, membuat kurikulum ini baru diterapkan pada 1950. Oleh sebab itu, Rencana Pelajaran 1947 juga dikenal sebagai kurikulum 1950.³⁴

Dalam kurikulum yang lahir dari semangat revolusi kemerdekaan ini, hanya mengandung dua hal pokok, yakni daftar mata pelajaran dan jam pengajaran, serta garis-garis besar pengajaran. Rencana pelajaran 1947 memprioritaskan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, ketimbang pendidikan kognitif. Oleh karena itu, muatan pelajaran selalu berhubungan dengan peristiwa keseharian, pengetahuan tentang kesenian dan pendidikan jasmani. Pendidikan tingkat sekolah rakyat (SR) terdapat 16 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama, bahasa Indonesia, budi pekerti, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, dan bahasa daerah.

2. Kurikulum Rentjana Pelajaran Terurai 1952

Pada tahun 1952, Kementerian pendidikan pengajaran dan Kebudayaan menerbitkan buku Pedoman Kurikulum SD yang diberi nama “Rencana Pelajaran Terurai untuk Sekolah Rakyat III dan IV”. Fungsinya untuk membimbing para guru dalam kegiatan mengajar di sekolah terhadap murid sekolah dasar. Organisasi kurikulum yang digunakan adalah *separated subjek curriculum*, sedangkan mata pelajaran yang diuraikan dalam rencana pembelajaran meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu hayat, Ilmu Bumi, Sejarah. Dalam prakteknya selain pelajaran tersebut diberikan juga pembelajaran lain seperti: menyanyi, menggambar, pekerjaan tangan dan olah raga.³⁵

3. Kurikulum Rentjana Pendidikan 1964

Menjelang tahun 1964 pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan Indonesia. Di penghujung era presiden Soekarno muncul kurikulum yang diberi nama Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Pada kurikulum ini fokus utamanya yakni konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif, konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan (*problem solving*). Kurikulum rencana pendidikan 1964 ini menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Pancawardhana ini berwujud lima

³⁴ <https://klasika.kompas.id/baca/mengenal-sejarah-kurikulum-era-1947-1964/> diakses pada 19 Desember 2020, pukul 20.20 WIB

³⁵ <https://www.salamyogyakarta.com/kurikulum-1947-2006/> diakses pada 19 Desember 2020, pukul 20.25 WIB

kelompok bidang studi yang terdiri dari: kelompok pengembangan moral, kelompok pengembangan kecerdasan, kelompok pengembangan emosional/artistik, kelompok pengembangan keprigelan (keterampilan), dan kelompok pengembangan jasmaniah.³⁶

4. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.³⁷

5. Kurikulum pendidikan 1975

Kurikulum ini adalah berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan integratif. Artinya, setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kurikulum 1975 juga menekankan efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Tidak heran, kelahiran kurikulum 1975 dipengaruhi konsep *management by objective* (MBO) yang saat itu terkenal. Kurikulum 1975 juga dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada *stimulus respons* (rangsang-jawab) dan latihan (*drill*).³⁸

6. Kurikulum pendidikan 1984

Kurikulum 1984 banyak dipengaruhi oleh aliran *humanistic*, yang memandang anak didiknya sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah dan meneliti lingkungannya. Pada kurikulum ini posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL). Tokoh penting dibalik lahirnya kurikulum 1984 adalah Prof. Dr. Conny R. Semiawan, kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga rektor IKIP Jakarta (Universitas Negeri Jakarta). Konsep CBSA yang elok secara teoritis

³⁶ <https://www.tintapendidikanindonesia.com/2017/01/kurikulum-rencana-pendidikan-1964.html?m=1>, diakses pada 19 Desember pukul 20.30 WIB

³⁷ <https://eurekapedidikan.com/kurikulum-pendidikan-1968>, diakses pada 19 Desember 2020, pukul 21.00

³⁸ <https://www.geogle.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2014/14/65/107915/kurikulum-pendidikan-periode-1945-1975>, diakses pada 19 Desember 2020, pukul 21.05 WIB

dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara Nasional.³⁹

7. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999

Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. “Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, antara pendekatan proses,” sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan Nasional hingga muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi.⁴⁰

8. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004

Kurikulum 2004 berbasis kompetensi maksudnya pendidikan diarahkan untuk membentuk pribadi anak sebagai individu yang mempunyai potensi, bakat yang berbeda dan bervariasi sehingga perlu perhatian yang berbeda dan pengalaman hidup anak adalah modal yang penting dalam pembelajaran. Secara sederhana, kompetensi dimaksud sebagai perangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk mengerjakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.⁴¹

9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar Nasional pendidikan: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar Nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.⁴²

10. Kurikulum 2013

Pada tahun pelajaran 2014/2015 telah mulai diberlakukan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia yang merupakan pembaharuan dan penyempurnaan Kurikulum 2006. Karakteristik dasar Kurikulum 2013 adalah terletak pada

³⁹

<http://haryatikurniawati96.blogspot.com/2015/11/kurikulum-1984-cbsa.html?m=1> diakses pada 20 Desember 2020, pukul 08.00 WIB

⁴⁰

<https://agendajaya.blogspot.com/2015/03/kurikulum-1994-dan-suplemen>....
Diakses pada 20 Desember 2020, pukul 08.05 WIB

⁴¹

Agustina, H., & Yuliani, I. I. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru matematika dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (kbk) pada sekolah menengah atas Kota Palembang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4 (7), 24-31

⁴²

Pendidikan, B. S. N. (2006). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kurikulum 2013 menekankan pendekatan saintifik pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Implementasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing bangsa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penerapan Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif inovatif dan afektif, melalui penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Puskurbuk, 2012). Untuk mencapai tujuan tersebut, kurikulum menekankan pada proses pembelajaran saintifik yang menganut paradigma konstruktivisme. Dengan demikian maka siswa diharapkan dapat memahami konsep sehingga hasil proses pembelajaran dapat masuk dalam *longterm memory* dan siswa dapat memahami esensi belajar.⁴³

I. INSPIRASI YANG DIAMBIL DARI PENDIDIKAN DI AUSTRALIA

Pendidikan budi pekerti di Australia. Mengapa Australia yang dulu nenek moyangnya berasal dari Tahanan Kriminal Inggris kini mampu masuk dalam 10 negara terbaik untuk tempat tinggal manusia dan memiliki tingkat kriminalitas terendah di dunia?

Mengapa Indonesia yang dulu nenek moyangnya berasal dari orang-orang yang santun, ramah dan berbudi pekerti luhur, kini masuk dalam kelompok Negara Gagal Dunia, dengan tingkat korupsi no 3 di dunia dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi dan moral yang sangat rendah?

Ternyata semua itu bermuara pada sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintahannya. Para pendidik dan guru di Australia lebih khawatir jika anak-anak didik mereka tidak jujur, tidak mau mengantri dengan baik, tidak memiliki rasa empati dan hormat pada orang lain dan etika moral lainnya ketimbang mereka tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Guru-guru di Australia lebih prihatin jika murid mereka memiliki perilaku moral yang kurang baik dari pada memiliki prestasi nilai akademik yang kurang baik. Mengapa? Karena menurut mereka untuk membuat anak mampu membaca menulis dan berhitung atau menaikkan nilai akademik, kita hanya perlu waktu 3-6 bulan saja secara intensif mengajarkannya. Tetapi untuk mendidik moral seorang anak, kita membutuhkan waktu lebih dari 15 tahun untuk mengajarkannya.

Mengajarkan baca tulis hitung bisa diajarkan kapan saja, bahkan jika seandainya mereka sudah dewasa dan tua sekalipun masih bisa dilakukan, sementara mengajarkan etika moral waktunya sangat terbatas, dimulai saat balita dan berakhir saat mereka kuliah, selain itu untuk mengubah perilaku moral orang dewasa yang terlanjur rusak dan buruk, hampir sebagian besar orang tidak mampu melakukannya.

⁴³ Setiadi, H. (2016). Pelaksanaan penilaian pada Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 20(2), 166-178.

J. KONSEP EVALUASI PENDIDIKAN DI AUSTRALIA

Selama bertahun-tahun sistem pendidikan Australia menggunakan sistem evaluasi eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat atau diploma. Sesudah Perang Dunia II hampir semua ujian eksternal ini dihapuskan, dan pada pendidikan dasar dan menengah, yang paling banyak dilakukan ialah kenaikan kelas siswa atas dasar usia. Hampir pada semua sistem, sekolah punya tanggung jawab melakukan ujian untuk setiap level setiap tahun kecuali pada tingkat akhir pendidikan menengah di saat ujian eksternal dilaksanakan. Pada hampir seluruh sistem sekolah, sertifikat pertama yang diterima siswa adalah pada akhir tahun pendidikan ke-10 berdasarkan penilaian internal sekolah.⁴⁴

Pemberian sertifikat yang lebih tinggi diberikan pada tahun pendidikan ke-12, pada umumnya berdasarkan ujian eksternal. Pada ACT dan Negara bagian Queensland, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan ke-12. Pemberian sertifikat yang lebih tinggi diberikan pada tahun pendidikan ke-12, pada umumnya berdasarkan ujian eksternal. Pada ACT dan negara bagian Queensland, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan ke-12.

Untuk masuk ke Universitas dan CAE pada umumnya diperlukan kualitas performasi tertentu pada tahun pendidikan ke-12, walaupun kebanyakan institusi memberikan kriteria tersendiri bagi orang-orang dewasa yang kebetulan tidak memenuhi persyaratan formal. Masuk ke TAFE dimungkinkan setelah menamatkan pendidikan 10 tahun dengan hasil yang memuaskan. Masalah yang terdapat dalam sistem ujian dan kenaikan kelas antara lain adalah mendapatkan keseimbangan antara ujian internal sekolah dan kesulitan belajar mengajar yang mungkin muncul dalam kenaikan kelas otomatis berdasarkan usia.

K. SIMPULAN

Pendidikan di Indonesia dan di Australia sama-sama di pegang oleh pemerintah, akan tetapi lamanya pendidikan pada jenjang sekolah menengah di Indonesia sama dengan di Australia yaitu sekitar 3-5 tahun, selain itu, perbedaan lainnya ada pada lamanya pendidikan di perguruan tinggi. Jika di tingkat sarjana di Indonesia, lamanya yaitu 4 tahun, di Australia selama 3 tahun, untuk pascasarjananya, di Indonesia memerlukan waktu 2 tahun untuk menyelesaikannya, akan tetapi di Australia hanya butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikan studinya, selanjutnya pada program s3, kita di Indonesia memerlukan waktu 4 tahun, sedangkan di Australia hanya 3-3,5 tahun.

⁴⁴ Isri, S. (2014). Konsep Pendidikan Jerman dan Australia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 261-286.

L. Saran

Setelah kita mempelajari tentang pendidikan di Australia, penulis memberikan saran agar kita dapat mengambil sistem pendidikan Negara Australia yang lebih menekankan pada pendidikan moral ketimbang intelektual yang hanya diukur angka. Mengingat dengan kemajuan teknologi saat ini, terjadi kemerosotan moral dan akhlak peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Priyanti, D., & Iriani, S. (2013). Sistem Informasi Data Penduduk Pada Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *IJNS-Indonesian Journal on Networking and Security*, 2(4).

<http://www.fauzinesia.com/2012/06/pengertian-sistem-pendidikan.html?m=1>

PAI, A. (1997). Pendidikan agama islam. *Jurnal*, diakses pada, 18(10), 2018.

Anwar, M. (2015). *Filsafat pendidikan*. Kencana.

Safita, R. (2013). Peranan orang tua dalam memberikan pendidikan seksual pada anak. *Jurnal Edu-Bio*, 4, 35.

Digilib.uinsby.ac.id,

Forlin, C. (2006). Inclusive education in Australia ten years after Salamanca. *European Journal of Psychology of Education*, 21(3), 265-277.

L. Ingvarson and Chadbourne, (Eds), *Valuing Teachers Work: New Direction In Teacher Appraisal*, (Melbourne: ACER, 194)

D’Cruz J and J.Langford (Eds), *Issues in Australian Education*, (Melbourne: Longman Cheshire, 1990)

Shannon Smith, dkk, *Get to know Australian Schools: Mengenal Sekolah-sekolah di Australia* (Jakarta: Kedutaan Besar Australia, Departemen Pendidikan, 2010)

Msholihukh. Files. Wordpress. Com/2012/05/bukupanduanaustralia.pdf

<https://www.scribd.com/doc/8583903/Sistem-pendidikan-australia>

Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29-39.

Negara, I. B. D. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Negara.

Mubaligh, A (2010). Relasi Bahasa dan Ideologi. *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 5 (2).

Setyowati, Rini, and S.Pd Buyung. “1. Perlunya Ideologi bagi suatu Negara a. Pengertian Ideologi.” *Pendidikan Pancasila* (2020): 22.

Hasil wawancara dengan Bu Miftaus Sa’diah dalam artikel maritulannisa. <http://maritulannisa.blogspot.com/2014/01/makalah-perbandingan-pendidikan-sistem.html?m=1> diakses pada 21Desember 2020.pukul 09.45 WIB.

Suciu, A. I., & Mata, L. (2011). Pedagogical competences the key to efficient education. *International online journal of educational sciences*, 3(2), 411-423.

Ma'arif, M. A. (2017). Analisis Konsep Kompetensi Kepribadian Guru PAI Menurut Az-Zarnuji. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 35-60.

Dudung, A. (2018). Kompetensi profesional guru. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(1), 9-19.

Cahyani, F. D., & Andriani, F. (2014). Hubungan antara Persepsi Siswa Terhadap Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, dan Kompetensi Sosial Guru dengan Motivasi Berprestasi Siswa Akselerasi di SMA Negeri I Gresik. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 3(2), 77-88.

Bsnp://bsnp-indonesia.org/standar-pendidikan-dan-tenaga kependidikan/, diakses pada 19 Desember 2020, pukul 20.00 WIB

Utami, P. (2017). *Lolos Beasiswa Unggulan ke Australia*. Bentang B first.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4737094/membandingkan-gaji-guru-ri-dengan-negara-lain-siapa-paling-besar>

Hicks, O. (2007, July). Curriculum in higher education in Australia—Hello. In *Enhancing Higher Education, Theory and Scholarship, Proceedings of the 30th HERDSA Annual Conference [CD-ROM]* (Vol. 8, No. 11).

Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara* (Bandung: Lubuk Agung Bandung, 2011)

pendidikan-1964.html?m=1

<https://eurekapedidikan.com/kurikulum-pendidikan-1968>

<https://ww.geogle.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2014/14/65/107915/kurikulum-pendidikan-periode-1945-1975>

Agustina, H., & Yuliani, I. I. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru matematika dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (kbc) pada sekolah menengah atas Kota Palembang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4 (7), 24-31

Pendidikan, B. S. N. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Setiadi, H. (2016). Pelaksanaan penilaian pada Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 20(2), 166-178.

Isri, S. (2014). Konsep Pendidikan Jerman dan Australia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 261-286

BAB X

SISTEM PENDIDIKAN DI SINGAPURA

Budi Hartono

Hartonobudi837@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Lewat media pendidikanlah kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sistem pendidikan terus dilakukan selaras dengan tuntutan kebutuhan perkembangan jaman. Salah satu bagian terpenting dari sistem pendidikan yang menjadi fokus perhatian untuk senantiasa disesuaikan dan ditingkatkan kualitasnya adalah kurikulum.

Pendidikan sejarah sebagai salah satu bagian dari kurikulum juga menjadi penting kontribusi atau peranannya. Begitu pentingnya pendidikan sejarah sehingga dapat menjadi alat legitimasi pemerintah untuk menyampaikan pesan pembangunan sekaligus ideologi politiknya. Lewat pendidikan sejarah, Soekarno presiden RI-1 menegaskan seruan ideologis “Anti imperialisme-kolonialisme-westernisme dan tegakkan nasakomisme” serta diteruskan dengan kebijakan pembangunan “Berdikari”. Tidak cukup itu, Soekarno bahkan mengingatkan masyarakat dan bangsa Indonesia dengan slogan populernya “Jasmerah” (Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah). Kemudian Soeharto, presiden RI-2 juga tidak kalah menariknya lewat seruan Ideologis “Anti-PKI dan antek-anteknya dan tegakkan Pancasilaisme”, serta diteruskan dengan slogan populernya “Pembangunanisme”. Presiden-presiden RI berikutnya pun tidak luput dari hal itu.

Baru-baru ini seiring dengan pergantian lembaga eksekutifnya, dunia pendidikan Indonesia membuat sejarah baru dengan memberlakukan dua kurikulum di tingkat sekolah dasar dan menengah. Hal ini bisa dinyatakan, Indonesia masih mencari sistem pendidikan yang tepat. Ujian Nasional (UN) sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pendidikan Nasional direspon pro dan kontra. Bahkan, UN pada akhirnya melahirkan eksese negatif berupa ketidak jujuran bagi yang “belum siap melaksanakannya.” Penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia relatif masih jauh dari harapan. Laporan monitoring global yang diterbitkan UNESCO tahun 2011 menempatkan sistem pendidikan Indonesia berada pada peringkat 10 dari 14 Negara berkembang yang berada di kawasan Asia Pasifik¹

Berbanding terbalik dengan kenyataan di Indonesia ditunjukkan oleh Negara tetangga Singapura yang penuh dengan paradok keunggulan. Singapura Negara ‘terkecil’ di Asia Tenggara dengan luas wilayah ± 697 Km² dan jumlah penduduk ± 4.987.600 jiwa dengan kepadatan penduduk 7.022/km² (Endarto,

¹ Anonim.<http://ikasp.wordpress.com/2012/12/28/faktor-faktor-penyebab-rendahnya-kualitas-pendidikan-di-indonesia/> Daiakses 18.12.2014.

2014), tetapi pembangunan ekonomi dan sosialnya menempatkan Singapura menjadi Negara maju. Singapura yang relatif muda sebagai Negara merdeka dibandingkan dengan beberapa Negara di Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia, tetapi menurut data IMF memiliki pendapatan perkapita penduduknya pada tahun 2013 masih yang terbesar di Asia Tenggara, yakni US \$ 57.238.

Diakui ketercapaian kemajuan pembangunan sebuah Negara sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Seajar dengan itu, kualitas SDM diakui sebagai indikator kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem pendidikannya²

Sistem pendidikan Singapura terunggul dibandingkan dengan Negara-Negara Asia Tenggara lainnya, bahkan beberapa Negara dunia (Sudrajat, 2014). Lulusan pendidikan di Singapura dinyatakan terbaik, sehingga mendapat penghargaan dunia. Keberhasilan ini telah menjadikan Singapura sebagai pusat pendidikan atau tujuan studi bagi 86 ribu pelajar/mahasiswa dari 120 Negara, untuk semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai Pasca Sarjana, di sekolah/perguruan tinggi swasta, negeri, dan InterNasional. Penyelenggaraan ujian Nasional di Singapura bisa tanpa pengawas Dengan kata lain, objektivitas pelaksanaan ujian sudah terbangun dalam sistem pendidikan di Singapura, termasuk oleh peserta didik. Terbentuknya karakteristik objektif atau kejujuran itu tidak terbangun dengan sendirinya. Tak dapat disangkal, bahwa peran pendidikan sangat besar, termasuk pendidikan sejarah yang menjadi bagiannya³. Tulisan ini akan mendeskripsikan sistem pendidikan dan pendidikan sejarah di Negara tetangga Singapura sebagai bahan refleksi bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, termasuk kurikulum pendidikan sejarah. Berdasarkan paparan yang telah disajikan dalam bagian pendahuluan, maka tulisan ini akan menjawab 2 (dua) pertanyaan, yakni:

1. Faktor pokok apakah yang menjadikan pendidikan Singapura mencapai keunggulan?
2. Bagaimanakah peran pendidikan sejarah di sekolah menengah dalam rangka mencapai pendidikan keunggulan tersebut?

B. SISTEM PENDIDIKAN DI SINGAPURA

1. Kebijakan, Orientasi, dan Tujuan Pendidikan

Kebijakan pendidikan Negara Singapura, terutama untuk tingkat pra sekolah sampai sekolah menengah adalah berupaya membantu anak atau peserta didik pengembangan bakat dan minatnya yang bersifat individual dan unik. Dipahami oleh pemerintah Negara Singapura, bahwa anak atau peserta didik memiliki potensinya sendiri-sendiri yang spesifik atau khas. Oleh karena itu, pendidikan di Negara Singapura diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan

² Rusman. 2012. Manajemen Kurikulum. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 1

³ Sudrajad, Ujang. 2014. "Singapura sebagai Negara dengan Sistem Pendidikan Terbaik Di Asia Tenggara."
<http://konsultasipendidikanluarnegeri.webs.com/apps/blog/show/19637400>.
Diakses 07.03.2014.

peserta didik menjadi generasi yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan demi masa depan yang lebih baik.

Dengan kebijakan tersebut, Singapura memiliki orientasi pendidikan sebagai pusat pendidikan keunggulan dan pendidikan InterNasional. Sedangkan tujuan pendidikannya mencetak peserta didik yang memiliki kemampuan inovatif dengan bertumpu pada semangat kewiraswastaan dan penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa InterNasional dan salah satu bahasa lokal, yakni bahasa Melayu, Mandarin, dan bahasa Tamil sesuai dengan latar belakang etnis peserta didik. Penguasaan bahasa lokal dimaksudkan agar peserta didik mengenal jati dirinya dan sebagai upaya melestarikan “budaya ibu” nya.

2. Lembaga dan Jenjang Pendidikan di Singapura

Dalam sistem pendidikan di Singapura dikembangkan 4 (empat) lembaga pendidikan utama, yaitu:

- a. Sekolah negeri, untuk tingkat sekolah dasar dan menengah,
- b. Sekolah swasta untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah,
- c. Sekolah asing/InterNasional dengan system luarnegeri.
- d. Universitas Lokal, Pendidikan Politeknik dan Lembaga Teknik.

a) Sekolah Negeri

Sekolah negeri tingkat dasar dan menengah di Singapura adalah sekolah yang penyelenggaraan pendidikannya di danai langsung oleh pemerintah dan independen (mitra industri).

b) Sekolah Swasta

Di Singapura juga berkembang sekolah-sekolah swasta yang turut menawarkan berbagai jenis program, menambah lengkapnya keanekaragaman dunia pendidikan di negeri ini. Terdapat sekitar 300 sekolah swasta di Singapura, dengan penjurusan seperti komersial, TI, seni rupa dan bahasa. Private Education Institutions (PEI/Lembaga Pendidikan Swasta) ini menawarkan berbagai program studi yang banyak dicari oleh siswa lokal maupun InterNasional. PEI menawarkan berbagai program studi di tingkat sertifikat, diploma, sarjana (*bachelor*) maupun pascasarjana (*post graduate*). Melalui kemitraan dengan berbagai Universitas InterNasional yang populer dari AS, Inggris, Australia dll, PEI menawarkan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan sertifikasi InterNasional dalam lingkungan yang aman dan terjangkau.

c) Sekolah sistem luar negeri/InterNasional

Singapura memiliki sejumlah sekolah sistem luar negeri/InterNasional yang terdaftar pada Ministry of Education (MOE), kementerian pendidikan Singapura. MOE inilah yang memberi ijin masuk untuk para siswa asing dan penduduk setempat. Sekolah sistem luar negeri/InterNasional ini menawarkan

kesempatan kepada siswa untuk mengikuti pendidikan yang identik aturan dan kurikulumnya dengan Negara asal.

Kriteria tiap sekolah sistem luar negeri/InterNasional ini berbeda. Beberapa diantaranya menentukan persyaratan minimum calon siswa pada saat melakukan pendaftaran, seperti kemampuan bahasa atau kewarganegaraan.

d) Universitas Lokal, Pendidikan Politeknik dan Lembaga Teknik

Selain Universitas lokal, banyak juga Universitas-universitas asing terkemuka yang telah hadir di Singapura. Universitas-universitas ini ada yang mendirikan kampusnya sendiri (institusi untuk pendidikan lanjutan) atau mempunyai program gabungan/kolaborasi dengan Universitas-universitas lokal mempunyai program kerja sama dengan lebih dari 16 institusi lainnya di seluruh dunia. Terdapat juga institusi-institusi khusus asing di Singapura, yang telah mendirikan kampusnya di sini atau bekerja sama dengan politeknik-politeknik lokal.



Gambar 10.1 Peta sebagian Universitas Singapura

Nana Sudjana mendefinisikan sistem pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan, dimana antara satu komponen dengan komponen yang lainnya saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Tiga hal yang perlu penjelasan dari definisi sistem pendidikan tersebut, yakni komponen-komponen sistem pendidikan, saling hubungan dan interaksi antara komponen dalam mencapai tujuan pendidikan, dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Komponen-komponen sistem pendidikan menurut Tirtarahardja⁴ terdiri dari tujuan pendidikan, kurikulum, tenaga kependidikan, manajemen kependidikan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan (*stakeholder*). Dalam tulisan ini komponen-komponen tersebut lebih ditegaskan pada aspek-aspek kebijakan, orientasi dan tujuan, serta lembaga dan jenjang pendidikan (Sudrajad, Loc. Cit.). Sementara saling berhubungan dan berinteraksi antar komponen sistem pendidikan

⁴ Tirtarahardja, Umar dan S. L. La Sulo. 2004. Pengantar Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. Hal 3

tersebut lebih diterjemahkan sebagai konsistensi dan konsekuensi dalam mengimplementasikannya. Sedangkan tujuan pendidikan dalam tulisan ini dikaitkan secara spesifik dengan 4 (empat) landasan filosofis Tanner dan Tanner (1980) dalam mengembangkan kurikulum, yakni: *perennialisme*, *essensialisme*, *humanisme*, dan *rekonstruksionisme*⁵

Pengembangan kurikulum berlandaskan *perennialisme* bertujuan untuk *the glorius*, yakni rasa bangga terhadap prestasi bangsa. *Essensialisme* bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual generasi muda. *Humanisme* menekankan pada tujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap menguntungkan dirinya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakatnya. Sedangkan pengembangan kurikulum berlandaskan filosofi rekonstruksi sosial bertujuan untuk menyiapkan peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini, Schubert menegaskan bahwa penggunaan landasan filosofis tersebut harus bersifat eklektik⁶.

Kurikulum pendidikan Singapura ternyata tidak berbeda jauh dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Mereka juga menyelenggarakan ujian Nasional atau yang sering disebut UN bagi semua siswa setiap akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bedanya, jenjang pendidikan di Singapura itu agak belibet.

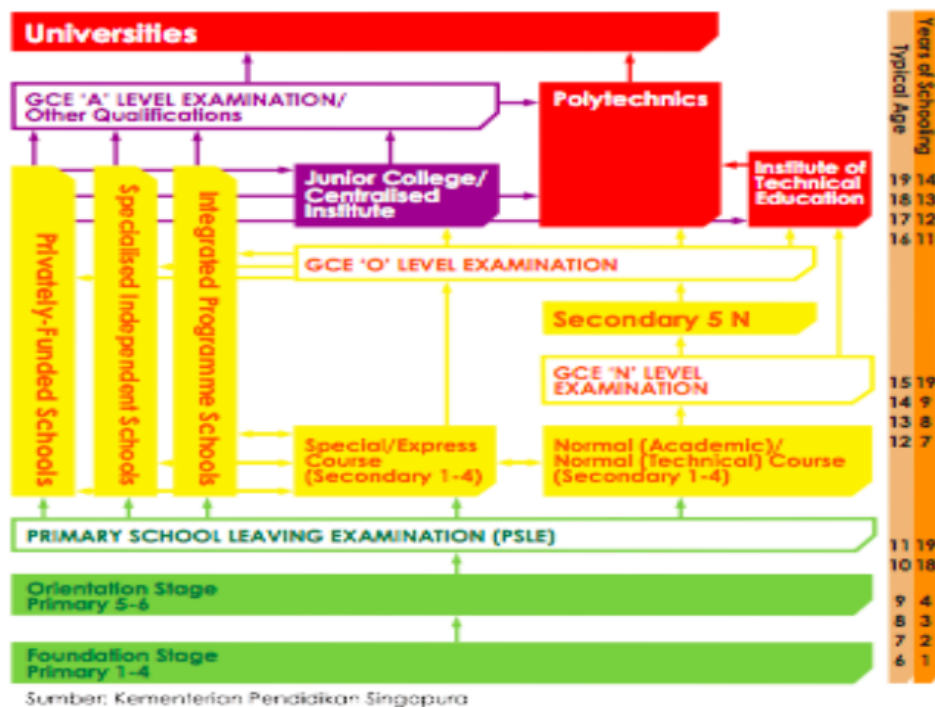
Anak-anak di Singapura masuk ke dunia pendidikan formal mulai dari tingkat TK (*Kindergarter School*) lanjut ke SD (*primary school*) selama 6 tahun. Setelah itu mereka masuk SMP-SMA (*secondary school*) selama 5 tahun, lalu ke tingkat persiapan menuju kuliah (*centralised institute atau junior colleges*) 3 tahun, baru masuk Universitas (*university*).

Akan tetapi, lama seseorang menyelesaikan pendidikan di setiap jenjang setelah SD itu berbeda-beda. Karena setiap anak dimasukkan ke kelas sesuai dengan kemampuan masing-masing, ada 3 kelas di jenjang *secondary school*, antara lain *Express*, *Normal Academic* dan *Normal Technical*.

1. *Kelas Express* merupakan tempat UNTUK siswa pintar. Bagi anak-anak kelas *Express*, mereka bisa menyelesaikan *secondary school* selama 4 tahun. Ini juga kalau mereka lulus "O" Level Test Singapura.
2. *Kelas Normal Academic*, sebelum mereka masuk ke kelas 5, pada tahun ke-4 harus mengerjakan ujian Nasional "N" level tes agar bisa naik kelas. Setelah mereka melewati kelas 5, ada ujian Nasional lagi yang namanya "O" Level Test.
3. *Kelas Normal Technical*, bisa disamakan dengan SMK. Jadi, setelah mereka lulus *secondary school*, mereka bisa melanjutkan ke *Institute of Technical Education* selama dua tahun, atau sekolah lanjutan untuk mereka yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, *Polytechnic* (untuk mendapatkan diploma), langsung kerja.

⁵ Yulaelawati, Ella. 2004. Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi, teori, dan Aplikasi. Hal 4-5

⁶ Hasan, Hamid. 2012. Pendidikan Sejarah Indonesia: Isu dalam Ide dan Pembelajaran. Bandung: Rizqi Press. Hal 9



Gambar 10.2 Pendidikan Singapura

Pelajaran yang mereka dapat juga tidak banyak berbeda di Indonesia, misalnya Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Seni, juga pelajaran yang namanya *Mother Tongue Language* atau pelajaran bahasa sesuai bahasa "ibu" mereka. Misalnya, mereka yang orang Melayu akan mempelajari bahasa Malay, bagi mereka yang Chinese bisa belajar bahasa Mandarin, mereka yang berasal dari India akan mempelajari bahasa Tamil. Hampir semua mata pelajaran itu diujikan dalam "O" Level Test atau UN versi Singapura⁷.



Gambar 10.3 Pendidikan Singapura

⁷ <http://binaizzawordpres.com/2009/0127/>

4. Ujian Nasional versi Singapura

"O" Level Test, ini nama UN untuk *secondary school*. "O" Level Test adalah kependekan dari *Ordinary Level Test*. Bedanya dengan UN kita, UN mereka tidak menentukan kelulusan seseorang karena, menurut Pemerintah Singapura, setiap orang punya kesempatan sama untuk melanjutkan pendidikan.

Jadi, untuk pelajar yang sudah duduk di kelas 4 *Express* ataupun yang di kelas 5 *Normal Academic* sudah harus mengikuti "O" Level Test untuk lulus dari *secondary school*. Dalam "O" Level Test ada tujuh pelajaran yang harus diikuti: lima mata pelajaran pokok dan dua mata pelajaran pilihan. Kelima pelajaran pokok itu adalah *English, Mother Tongue, Matematika, IPA (Biologi, Kimia, Fisika), IPS (Sejarah, Sosiologi, Geografi)*, serta dua mata pelajaran, pilihan dari *Food and Nutrition, IT, dan Design and Technology*. Semua pelajaran tersebut punya nilai minimum. Sedangkan mereka yang tidak bisa mendapatkan nilai minimum, tetap lulus. Tapi, di ijazah mereka akan ada nilai merah. Kalau mereka tidak mau di ijazahnya ada nilai merah, mereka boleh mengulang satu tahun di kelas yang sama.

Setelah *Secondary School* Masih ada satu lagi jenjang sebelum mereka masuk ke Universitas, yaitu *Centralised Institute* atau *Junior Colleges (tertiary education, persiapan menuju tingkat Universitas)*. Tapi, untuk mereka yang punya nilai bagus (poin 1 sampai 14) bisa langsung ke *Junior College* yang lamanya dua tahun.

Kalau mereka tidak mempunyai nilai dari poin yang disebutkan itu, mereka melanjutkan ke *Centralised Institute* yang waktunya lebih lama, yakni tiga tahun. Setelah itu mereka harus melewati ujian Nasional yang namanya "A" Level Test atau *Advanced Level Test*. Tes yang diberikan tentu saja lebih susah, karena akan masuk ke Universitas. Tapi, dengan banyaknya tes yang dilewati, tentulah Universitas di Singapura bisa mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas. Karena penyaringan mahasiswa secara tidak langsung dilakukan lewat sejumlah tes-tes tersebut.

For your information, soal-soal yang ada dalam setiap tes dibuat oleh Universitas Cambridge. Jadi, ijazah yang mereka dapatkan bertaraf Internasional yang bisa digunakan untuk melanjutkan kuliah di mana saja, di seluruh dunia⁸.

5. Pendidikan Sejarah

Pendidikan sejarah sebagai bagian dari kurikulum pada hakikatnya akan dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut diatas. Menurut Said Hamid Hasan, bahwa pendidikan sejarah berdasarkan perenialis mengembangkan tugas *transmission of culture*, yakni membawa siswa kepada penghargaan yang tinggi terhadap prestasi bangsa di masa lalu. Dengan penghargaan ini akan tumbuh nilai-nilai kebanggaan dan Nasionalisme bangsa pada peseta didik. *Essensialisme* memandang pendidikan sejarah adalah alat pengembangan intelektualitas historis generasi muda. Dalam konteks ini pendidikan sejarah diajarkan sebagai suatu

8

disiplin ilmu dan tidak digabungkan dengan disiplin lainnya. Perspektif *humanisme* memandang pendidikan sejarah dipelajari tidak hanya untuk pengembangan intelektualitas historis peserta didik, tetapi juga penanaman nilai-nilai kesejarahan. Sedangkan tujuan pendidikan sejarah menurut perspektif rekonstruksi sosial adalah untuk membekali peserta didik tentang cara berpikir, pemahaman konsep, nilai dan ketrampilan sejarah dalam rangka kehidupan yang lebih baik di masa sekarang dan masa akan datang⁹.

Singapura merupakan salah satu Negara termaju di kawasan Asia Tenggara dan bisa mengalahkan saudara-saudara tuanya di kawasan semenanjung Melayu. Hal tersebut terjadi karena kemajuan sistem pendidikannya. Singapura sebagai Negara yang dianggap paling maju di Asia Tenggara, hanya memiliki jarak kurang lebih 40 km dari barat ke timur. Kalau dihitung dengan jumlah penduduk maka Negara Singapura yang kurang lebih 5 juta jiwa. Jumlah penduduk yang sedikit dan jarak wilayah yang relatif kecil untuk ukuran sebuah Negara bukan menjadi alasan untuk tidak maju. Singapura memulai pembangunan kekuatan dasarnya dengan modal pendidikan. Selain hal tersebut Singapura terletak di persimpangan Asia, di tengah bisingnya kesibukan kota kosmopolitan, Singapura bukan lagi sekedar Negara tujuan wisata favorit. Perlahan tapi pasti, Singapura telah menjelma menjadi salah satu pusat pendidikan yang dapat dibanggakan di dunia, menyatukan yang terbaik hingga timur.

Saat ini, Negara berpenduduk 5 juta jiwa ini telah menjadi Negara tujuan bagi sekitar 86 ribu pelajar internasional dari 120 kebangsaan untuk menimba ilmu mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah (SMP & SMA), Diploma politeknik, sarjana, hingga program pasca sarjana dengan beragam pilihan sekolah mulai dari sekolah Negeri, sekolah swasta, hingga sekolah Internasional. Sebagai sebuah pusat pertemuan budaya, Singapura memang kota kosmopolitan yang mempertemukan tradisi barat dan timur. Dengan situasi ini, selain belajar formal di bangku sekolah, para pelajar Internasional dapat berharap memperoleh pengalaman menarik dari persentuhan mereka dengan beragam budaya dan adat istiadat¹⁰.

Sir Thomas Stamford Raffles mendirikan Institut Singapura (sekarang dikenal sebagai Institut Raffles) pada tahun 1823, yang memulai pendidikan di Singapura yang berada dibawah kekuasaan Inggris. Kemudian, terdapat tiga jenis sekolah muncul di Singapura yaitu sekolah Melayu, sekolah Tionghoa dan Tamil, dan sekolah Bahasa Inggris. Sekolah Melayu digratiskan untuk semua siswa oleh Inggris, dimana bahasa Inggris dijadikan bahasa utama dalam proses belajar mengajar. Sebagian besar sekolah Tionghoa dan Tamil mengajarkan dengan bahasa ibu masing-masing. Siswa dari sekolah Tionghoa sangat serius mengikuti perkembangan di Tiongkok, terutama saat kebangkitan Nasionalisme Tiongkok.

⁹ Umasih. 2000. "Sejarah Pendidikan di Indonesia: Sebuah Telaah Atas Perubahan Kurikulum Sejarah Indonesia Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 1975-1994." Tesis. Program Pasca Sarjana Ilmu Pengetahuan Budaya, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Hal 134

¹⁰ syahbuddin mangandaralam . 1993 . singapura Negara kembang angrek tanpa singa . bandung : PT remaja bandsung

Selama Perang Dunia II, banyak siswa di Singapura yang putus sekolah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya *backlog* siswa setelah perang. Pada tahun 1947, program pendidikan sepuluh tahun dirumuskan. Antara tahun 1950 dan 1960-an, ketika ekonomi di Singapura mulai berkembang, Singapura mengadopsi sistem pendidikan yang menyediakan tenaga kerja terampil untuk program industrialisasi serta untuk menurunkan angka pengangguran. Kebijakan *bilingualisme* di sekolah secara resmi diperkenalkan pada tahun 1960, dimulai dengan menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Negara. Pendidikan untuk anak-anak dari semua ras dan latar belakang mulai terbentuk.

Pada tahun 1980-an, perekonomian Singapura mulai makmur, membuat fokus sistem pendidikan Singapura bergeser dari kuantitas menjadi kualitas. Diferensiasi bagi siswa dengan kemampuan akademik yang berbeda mulai dilaksanakan, seperti pembenahan pendidikan kejuruan dan pembentukan Institut Teknologi baru.

Pada tahun 1997, sistem pendidikan di Singapura mulai berubah menjadi “kemampuan yang digerakkan” setelah Perdana Menteri Goh Chok Tong merumuskan visi pendidikan sebagai tempat untuk mempelajari bangsa. Kebijakan ini lebih menekankan kepada pendidikan Nasional, berpikir kreatif, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran TIK. Sekolah menjadi lebih beragam dan diberi otonomi yang lebih bebas dalam menentukan kurikulum sendiri dan potensi akademik di daerahnya. Perbedaan antara berbagai aliran akademis mulai hilang. Kementerian Pendidikan secara resmi menyatakan bahwa “kesempurnaan” tidak hanya diukur dari segi akademik, sama seperti pegunungan “kesempurnaan” yang memiliki banyak puncak.

6. Geografi Singapura

Lokasi Singapura terletak di kawasan Asia Tenggara tepatnya di antara Malaysia dan Indonesia di selatan Semenanjung Malaka. Letak Singapura sangat strategis karena terletak di jalur silang pelayaran Internasional. Letak geografis Singapura adalah 1°22’N, 103°48’E.



Gambar 10.4 Ketinggian 165 Meter Kota Singapura

Singapura terdiri dari 63 pulau dan yang terbesar adalah pulau Ujong (biasanya disebut 'pulau Singapura'). Di sebelah utara Singapura terdapat dua jembatan menuju Johor, Malaysia. Luas Singapura sekitar 697 km² dan Negara terluas ke-192 di dunia. Titik tertinggi Negara Singapura terletak di Bukit Timah Hill dengan ketinggian 166 m. Hampir dua pertiga wilayah Singapura memiliki ketinggian kurang dari 15 meter di atas permukaan laut.

Singapura berbentuk sebuah ketupat. Tanahnya rendah dan bergelombang, dengan beberapa bukit di sebelah barat laut dan daerah berawa-rawa di sebelah barat daya. Sungai-sungai kecil dan pendek mengalir dari daerah perbukitan ke pantai, kecuali di sebelah selatan. Di sebelah selatan, Singapura memiliki pelabuhan akan yang terlindung oleh dua pulau lepas pantai.

Singapura terletak kira-kira 130 km di utara garis khatulistiwa. Suhu rata-rata tercatat 26^o C, dengan pergeseran hanya sekitar 1,4^o C. meskipun demikian, negeri ini mengalami tiga musim yang berbeda satu sama lain: musim hujan yang sejuk (November-Maret) mempunyai hubungan dengan angin musim timur laut; musim kemarau yang panas (April-September) mempunyai hubungan dengan angin musim barat daya; musim pancaroba (September-November) diwarnai oleh perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak. Curah hujan rata-rata 2.500 mm per tahun.



Gambar 10.5 Peta Dunia Singapura

Pemandangan Singapura adalah salah satu Republik di Asia Tenggara dan anggota Persemakmuran, yang mencakup sekelompok pulau, dengan P. Singapura sebagai pulau terbesar. Di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Selat Johor (Malaysia), di sebelah timur dan selatan dengan Selat Singapura (Indonesia). Negara ini terletak 137 kilometer sebelah utara garis khatulistiwa. Lokasi Negara ini yang strategis, fasilitas infrastrukturnya yang berkembang pesat, kontras budayanya yang memesona, serta atraksi wisatanya, semua berkontribusi terhadap kesuksesannya menjadi daerah tujuan unggulan baik untuk bisnis maupun wisata.

7. History of the Entry of Islam in the singapore

1. Asal-Usul Singapura

Singapura (Singapore) merupakan nama modern yang digunakan sekarang untuk menyebut Negara yang terletak di selat Malaka. Penyebutan “Singapura” sering dihubungkan dengan kekuasaan Thomas Stanford Raffles yang menggagas proyek “*singapore*” pada tahun 1818 karena kekecewaannya terhadap Belanda yang merebut kembali tanah Jawa dari Inggris. Kemudian, Raffles menandatangani perjanjian dengan Temenggong Sri Maharaja untuk menguasai Pulau Singapura pada 19 Januari 1819¹¹. Maka, tahun 1819 dipandang sebagai awal penggunaan nama “Singapura” untuk menyebut daerah tersebut. Akan tetapi, asal-usul dan kemunculan istilah “Singapura” untuk pertama kalinya tetapi belum dapat dipastikan.

Menurut salah satu sumber Melayu Lama disebutkan bahwa:

Salah seorang keturunan Sang Superba dari Palembang pergi dan tinggal di pulau Bintan, dari sana ia melihat pantai putih di pulau lain. Ketika ia menanyakan tempat itu, ia mengetahui bahwa pulau itu adalah pulau Tumasik, dan ia minta untuk mengunjungi pulau tersebut. Tetapi ketika baru saja berlayar menuju pulau itu, tiba-tiba datang angin topan menerpa kapal mereka. Angin topan begitu dahsyatnya, sampai kemudian mahkota sang pangeran jatuh ke dalam air. Tanpa diduga angin topan itupun tiba-tiba berhenti dan air lautpun kembali tenang. Atas kejadian itu, mereka meyakini bahwa jatuhnya mahkota sang pangeran ke dalam air yang kemudian disertai terhentinya angin topan dan tenangnya kembali air laut, merupakan pertanda diperbolehkannya sang pangeran beserta pengikutnya untuk memasuki pulau tersebut. Ketika memasuki pulau itu, mereka melihat seekor binatang, yang anggun gerakannya, tangkas dan berani, dengan bulu bagian kepalanya yang hitam, putih di bagian lehernya dan coklat di bagian badannya. Mereka terkesan dengan binatang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian seorang tua memberitahukan kepada sang pangeran, bahwa nama binatang itu adalah “Singa”. Kemudian ia memutuskan untuk tinggal di sana dan memberi nama tempat itu dengan Singa-pura, kota-Singa. Dari cerita tersebut kemudian lahir nama Singapura¹²

Penjelasan lain diberikan berdasarkan riwayat yang dikisahkan dalam Sejarah Melayu (*the Malay Annals*), bahwa suatu ketika seorang Tamil yang merupakan putera raja, yakni Sang Nila Utama dan istrinya yang bernama Wan Sri Bini[?] (puteri Banten [?]) berangkat ke Banten bersama para pengikutnya, kemudian berlabuh terlebih dahulu di sebuah pulau di selatan Semenanjung Malaya. Ketika mereka naik ke daratan, “Sang Nila Utama melihat seekor binatang buas melintasi jalan yang akan mereka lalui; binatang itu lebih besar dari kambing, badan binatang itu berwarna cokelat, lehernya berwarna hitam, dan dadanya berwarna putih, binatang itu ternyata singa. Sang Nila Utama

¹¹ Thomas Stanford Raffles, *The History of Java*(Edisi Indonesia), (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2008), Hal. vi-viii.

¹² Ajat Sudrajat, “Perkembangan Islam di Singapura”, Kertas Kerja Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY, Yogyakarta. Hal. 8-9.

menganggap peristiwa itu merupakan pertanda baik. Maka kemudian ia memberi nama wilayah yang dimasukinya itu dengan Singapura, artinya kota singa...”¹³

Dalam buku *Islam Melayu VS Islam Jawa*, Maharsi Resi meringkaskan kisah tentang “Singapura” yang merupakan “cerita ketiga” dari Sejarah Melayu, sebagai berikut:

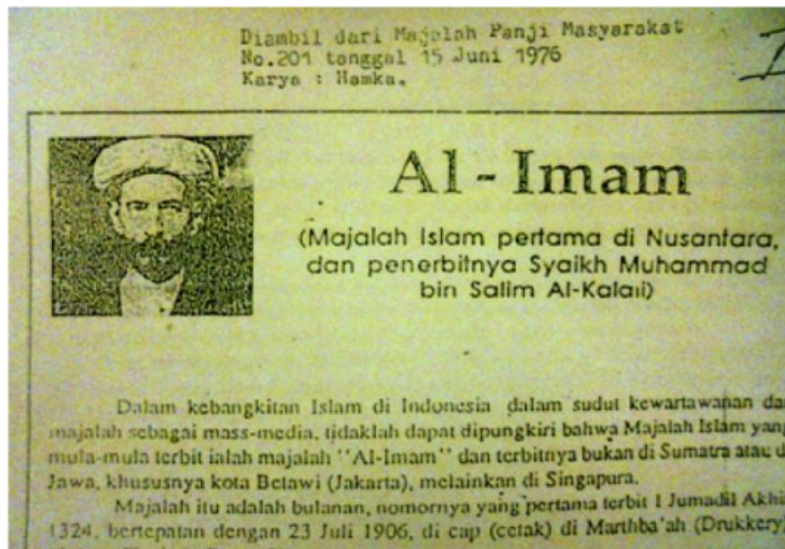
Sang Nila Utama yang beristrikan Wan Sri Beni bertempat tinggal di Bintang [?]. Pada suatu hari Nila Utama mohon diri kepada permaisuri Iskandar Syah pergi ke Tanjung Bemban untuk berburu binatang. Ketika Sang Nila Utama naik ke pegunungan daerah itu, ia melihat sebuah pantai putih yang sangat indah. Dengan mengendarai perahu, Nila Utama dan rombongan pergi ke pantai itu yang kemudian dinamakan Kuala Tumasik. Di tempat itu mereka melihat seekor binatang menyerupai singa, maka tempat itu dinamakan Singapura. Nila Utama berhasil mendirikan Kerajaan Singapura sebagai kerajaan dagang yang besar dan sangat ramai. Di Kerajaan Singapura, Nila Utama menjadi raja besar bergelar Sri Teribuana.¹⁴

Sementara itu, sama-sama bersumber dari Sejarah Melayu (*The Malay Annals*), juga disebutkan bahwa Singapura pada masa lalu bernama “Temasik” yang merupakan kota perdagangan pertama yang cukup besar di Semenanjung Malaya. Daerah ini selalu berpindah dari penguasaan satu kerajaan ke kerajaan lain. Kerajaan-kerajaan yang tercatat pernah menguasai “Te-masik” adalah Sriwijaya, Majapahit dan Melaka. Pada masa kekuasaan Malaka, sultan yang berkuasa saat itu adalah Sultan Iskandar Syah, yang dikonfirmasi juga oleh sumber berita dari Cina, Sejarah Dinasti Ming atau the Ming Annals. Berdasarkan kalkulasi masa waktu antara Sejarah Melayu dan Sejarah Ming, diperkirakan bahwa Sultan Iskandar Syah menguasai Temasik pada tahun 1395 M, sedangkan titi mangsa pendirian Kerajaan Temasik ini adadah pada 1299 M.¹⁵

¹³ Muhammad Yusuf, *Islam di Singapura: Studi Pembaharuan Pemikiran Islam*, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004, Hal. 18, dari Hsu Yun-ts'iao, “Notes on the Historical Position of Singapore,” dalam *Malayan History*, Singapore, 1962, Hlm. 226. “Sejarah dan Perkembangan Islam di Siangapura”, <http://www.segenggam-harapan.com/2012/07/sejarah-dan-per-kembangan-islam-di.html>. Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Nagara Kerta-gama*, Hml. 158. Lihat juga Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm. 376-377.

¹⁴ Maharsi Resi, *Islam Melayu vs Islam Jawa, Menelusuri Jejak Karya Sastra Sejarah Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 31.

¹⁵ John N. Miksic, “Temasek (Tumasik)”, Hlm. 1311. Lihat juga “Singapore”, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/545725/Singapore/214573/History>



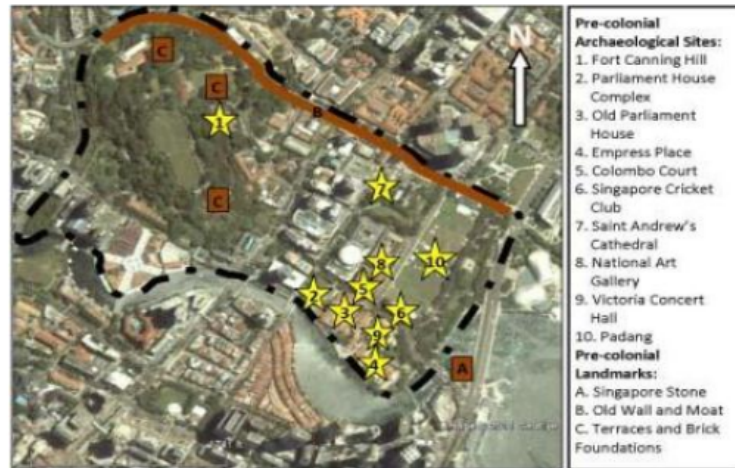
Gambar 10.6 salah satu penyebar islam di Singapura

Menurut Rose Liang, sumber lain menyebutkan bahwa Wang Dayuan, seorang pengembara dari Cina, yang berkunjung pada 1330, ke sebuah tempat yang disebut Pancur (berarti "*Spring*"), sebuah perkampungan Melayu dengan beberapa orang Cina. Demikian juga, Nagara kretagama, sebuah puisi epik Jawa menyebut Singapura sebagai Temasek ("*Sea Town*"/Kota Laut). Jejak-belas, Temasek, sebutan bagi Singapura pada masa lalu, digunakan sebagai kota pelabuhan dan pusat perdangan serta komersial untuk berbagai kepentingan. Sejarah Melayu (*Malay Annals*), sebuah kronik Melayu abad ketujuh belas mencatat bahwa pada 1299, seorang pangeran dari Sriwijaya, Sri Tri Buana, ketika melihat berpikir untuk memberi nama pulau yang dikunjunginya, ia melihat seekor singa, maka ia memberi nama Singapura (*Lion City*/Kota Singa) untuk pulau tersebut, dan menjadikannya sebagai pos perdagangan untuk Kerajaan Sriwijaya.¹⁶

Melayu juga menyebutkan bahwa menjelang akhir abad keempat belas, Parameswara, seorang Pangeran dari Palembang yang pada 1388 melarikan diri dari serangan Kerajaan Jawa, Majapahit, ia mencari perlindungan di Singapura, kemudian ia membunuh dan mengganti penguasanya, yang bisa jadi menjadi vassal Kerajaan Siam. Kerajaan Siam (*Thai*) melancarkan serangan balasan dan menghancurkan Singapura sehingga daerah ini tidak dihuni lebih dari 400 tahun. Parameswara melarikan diri ke Malaka, kemudian memeluk Islam dan berusaha mengembangkan Kesultanan Malaka, yang pengaruh kekuasaannya meliputi Singapura yang merupakan bagian dari Kesultanan Johor.¹⁷

¹⁶ Rose Liang, "Change and Continuity in the Culture of Singapore's Primary School Teachers from 1959 to 2006", A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, Department of Sociology, National University of Singapore, 2007, Hlm. 66.

¹⁷ Rose Liang, "Change and Continuity in the Culture...", Hlm. 66-67.



Gambar 10.7 lokasi situ-situs arkeologi, petunjuk-petunjuk, dan batas-batas wilayah pra-kolonial yang dapat diketahui. Sumber: Lim Tse Siang, "14th Century Singapore: The Temasek Paradigm"

Menurut asal katanya, "Singapura" berasal dari bahasa San-sakerta. Nama ini terdiri atas dua kata, yaitu "*singa*", nama binatang buas, dan "*pura*" yang berarti "kota". Dengan demikian, "Singapura" juga berarti "Kota Singa". Sebelum Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor menguasai daerah ini, diceritakan bahwa di sana pernah berdiri "Kesultanan Tumasik". Adapun sultan-sultan yang memerintah Tumasik sebelum dikuasai oleh Kesultanan Malaka adalah :

- 1) Raja I Sri Tri Buana (1299-1347);
- 2) Raja II Seri Pikrama Wira (1347-1362);
- 3) Raja III Sri Rana Wikema (1362-1375);
- 4) Raja IV Sri Maharaja (1375-1388).
- 5) Raja IV Sri Sultan Iskandar Syah, memerintah selama lima tahun di Singapura (1388-1391), kemudian di Malaka (1393-1397).¹⁸

Sampai di sini, asal usul Singapura masih simpang siur, terlebih masa-masa sebelum kedatangan Portugis pada tahun 1510 di Nusantara, yang setahun kemudian, 1511, menaklukkan Malaka. Sebagian penutup sub bagian ini, cukup kiranya dikutipkan penjelasan ringkas dalam situs Wikipedia, *the free encyclopedia*, setidaknya dapat merangkum berbagai keterangan di atas, yakni sebagai berikut ini:

Temasek ('Sea Town' in Old Javanese, spelt Tumasik) was the name of an early city on the site of modern Singapore. From the 14th century, the island has also been known as Singapura, which is derived from Sanskrit and means "Lion City". Legend has it that the name was given by Sang Nila Utama when he visited the island in 1299 and saw an unknown creature, which he mistook as a lion. While the early history of Singapore is obscured by myth and legend, some conclusions can be drawn from archaeological evidence and from written references by

¹⁸ Linehan, W. "The Kings of 14th Century Singapore", dalam T.S.D.M Sheppard (Ed.), *Singapore 150 Years*, (Singapore: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, (1982), Hlm. 60.

*travellers. Archaeology points to an urbanised settlement on the site by the 14th century. Allusions by travellers give some evidence that there may have been a city or town present as early as the 2nd century. At its height, the city boasted a large earthen city wall and moat; many of the buildings were built with stone and brick foundations. Remains of old pottery, coins, jewellery and other artifacts have been found, with many of these artifacts believed to be imported from various parts of China, India, Sri Lanka, and Indonesia. These are sometimes seen as evidence of the city's status as a regional trade centre. An aquatic route which is part of the larger Silk route, passes through Temasek. From the 7th to the 13th centuries, the island of Singapore was controlled by the Srivijaya empire based in Sumatra. By the emergence of Temasek as a fortified city and trading centre in the 14th century, the Srivijaya empire was in a long period of decline. The city was conquered by the Majapahit empire in 1401 and changed hands several times before coming under the influence of the Sultanate of Malacca in the 15th century. After the fall of Malacca to the Portuguese in 1511, the island came under the control of the Malay Sultanate of Johor.*¹⁹

2. Kedatangan Islam di Singapura

Masuknya Islam ke Singapura terkait dengan proses kedatangan Islam di Asia Tenggara. Tentang proses kedatangan Islam di Asia Tenggara, para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai kapan dan dari mana datangnya. Kajian mengenai teori kedatangan Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, baik teori-teorinya maupun tinjauan kritis atas teori-teori tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai hal ini disajikan secara ringkas berdasarkan salah satu tinjauan yang pernah ada. Berikut ini teori Islamisasi di Asia Tenggara;

- Teori pertama, "Teori Arab", menyebutkan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara langsung dari Arab, tepatnya dari Hadramaut. Menurut teori ini, Islam masuk ke Asia Tenggara sejak masa abad pertama Hijriah atau abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Proses masuknya Islam pada masa ini, ditandai dengan dominasi pedagang Arab dalam perdagangan Barat-Timur. Teori ini didukung dengan fakta dari sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang abad ke-7M, ada seorang pedagang Arab yang menjadi pemimpin pada sebuah pemukiman muslim Arab dipesisir pantai Sumatera.²⁰

Crawford mendukung teori ini, meskipun ia tetap mempertimbangkan adanya peranan kaum Muslimin yang berasal dari pantai timur India, orang-orang "Mohammedan" di India Timur. Sementara Kaijzer berpendapat bahwa Islam di Asia Tenggara memang berasal dari Timur Tengah, tetapi lebih

¹⁹ "Temasek", <http://en.wikipedia.org/wiki/Temasek>. Bandingkan dengan Nicholas Tarling (Ed.), *The Cambridge History Of Southeast Asia, Volume One, From Early Times to c.1800*, (Cambridge: Cambridge University Press 1992; Edisi Singapura, 1994), tentang "The Early Kingdoms", Hlm. 175-176.

²⁰ Dari Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah...*, h. 6 (Catatan No. 4 dalam Baharudin, "Kedatangan Islam..."). Lihat juga Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara...*, Hlm. 31.

tepatnya berasal dari Mesir, karena Muslim di Asia Tenggara khususnya di Nusantara mayoritas bermazhab Syafi'i yang sama dengan Mesir. Niemann dan de Hollander sedikit merevisi pandangan Keijzer tersebut, dengan menyatakan bahwa sumber Islam di Nusantara berasal dari Hadramaut. Sedang-kan Veth hanya menyebut "orang-orang Arab", tanpa mengungkapkan lebih dalam apakah dari Hadramaut, Mesir, atau India

Teori ini juga dipegang kuat oleh Hamka, yang mengatakan bahwa meskipun terdapat peran Persia maupun India, tetapi Islam pertamakali masuk di Asia Tenggara dibawa langsung oleh Muslim Arab. Begitu juga dengan Al-Attas yang menegaskan bahwa Islam masuk Asia Tenggara dibawa langsung oleh Muslim Arab. Hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang disebutnya sebagai "Teori umum tentang Islamisasi Nusantara", yang harus didasarkan pada sejarah literatur Islam Melayu-Indonesia dan sejarah Pandangan-Dunia Melayu sebagaimana yang terlihat pada perubahan konsep dan istilah kunci dalam literatur Melayu-Indonesia pada abad ke-10 sampai ke-11M. Menurutnya, setelah Islam datang, telah terjadi pergeseran Pandangan Dunia-Melayu. Begitu pula sebelum abad ke-17M, seluruh literatur Islam yang relevan tentang keagamaan di Asia Tenggara, justru berasal dari nama-nama Arab, bukan dari Muslim India. Bahkan nama-nama dan gelar-gelar yang dibawa oleh para pembawa Islam ke Asia Tenggara adalah Muslim Arab-Persia.

- Teori kedua, "Teori India" yang dikemukakan oleh beberapa ahli dari Belanda, diantaranya Pijnappel(1872), yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara datang dari India, tepatnya Gujarat, sehingga teori ini lebih dikenal dengan "Teori Gujarat". Menurutnya, asal mula Islam menjalin kontak dengan Asia Tenggara berangkat dari wilayah Gujarat dan Malabar. Berdasarkan terjemahan Prancis tentang catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Batuta, ia menyatakan bahwa orang-orang Arab yang bermahzab Syafi'i, setelah berimigrasi dan menetap diwilayah Gujarat dan Malabardi India, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Dalam pandangan Pijnappel, kontak paling awal tersebut adalah melalui kontak perdagangan. Iame yakni bahwa melalui perdagangan sangat dimungkinkan terjadinya hubungan antara Islam dan Asia Tenggara, bahkan menurutnya istilah-istilah Persia dari India digunakan dalam bahasa masyarakat di kota-kota pelabuhan.²¹

Teori ini dipertegas oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa ketika komunitas Muslim Arab sudah mapandi beberapa kota di pelabuhan Anak Benua India, maka mereka masuk kewilayah Melayu-Nusantara sebagai penyebar agama Islam pertama. Ia menyebut kota pelabuhan Dakka di India Selatan sebagai pembawa Islam ke Nusantara. Setelah itu barulah orang-orang Arab, terutama yang menisbahkan dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad, yaitu dengan memakai gelar Sayyid dan Syarif, yang menjalankan dan menyelesaikan proses dakwah Islam, baik sebagai ustaz

²¹ Lihat Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara...*, Hlm. 32.

maupun sebagai Sultan. Morrison, pada 1951, memastikan India sebagai tempat asal Islam di Nusantara. Pantai Koro-mandel disebutnya sebagai tempat bertolakna para pedagang Muslim menuju Nusantara.²²

- Teori ketiga, adalah “Teori Bengal”, disampaikan oleh Q. Qadarullah Fatimi yang memberikan kesimpulan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara atau Nusantara melalui Bengal (Banglades). Menurutnya, Islam datang pertama kali di sekitar abad ke-8 H (ke-14 M). Kesimpulan ini ia ambil berdasarkan keterangan Tome Pires yang menyatakan bahwa mayoritas orang terkemuka di Pasai adalah orang Bengali atau keturunan mereka. Islam muncul pertama kali pada abad ke-11 di Semenanjung Malaya adalah dari arah pantai timur, bukan barat (Malaka), yaitu melalui Kanton, Phanrang (Vietnam), Leran dan Trengganu. Selain itu, beberapa prasasti yang ditemukan di Trengganu juga lebih mirip dengan prasasti yang ada di Leran Jawa Timur.²³
- Teori keempat, “Teori Persia” menyatakan bahwa para pedagang Persialah yang membawa Islam ke Asia Tenggara. Teori ini didukung oleh data yang kuat mengenai pelayaran orang-orang Persia ke India dan melalui wilayah Asia Tenggara menuju Cina. Menurut berita Cina, Yuan-Tchao yang menulis *Tcheng-yuan-sin-ting-che-kiao-mou-lou* pada abad ke-99, mencatat bahwa sekitar 35 kapal dari Persia telah berlabuh di Palembang pada tahun 99 H (717 M).²⁴
- Teori kelima mengatakan bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara didorong oleh “pertarungan” antara Islam dan Kristen untuk mendapat pengikut atau penganut masing-masing agama. Teori ini dikemukakan oleh Schrieke. Ia berpandangan bahwa, pada kenyataannya, ekspansi yang dilakukan oleh bangsa Portugis, yang kemudian menjadi upaya kolo-nialisasi, merupakan sebuah kelanjutan dari mata rantai Perang Salib di Eropa dan Timur Tengah. Menurutnya, petualangan dan pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis ke Asia merupakan ambisi dan keinginannya untuk mencapai sebuah kehormatan yang dikombinasikan dengan semangat keagamaan. Setelah mereka mampu mengusir kaum Moors (Muslim) dari Semenanjung Iberia, lalu menaklukan beberapa wilayah disepanjang pesisir barat Afrika hingga sampai mengelilingi Tanjung Harapan, Afrika Selatan, maka kemudian mereka meneruskan kolonialisasi di Asia Tenggara.²⁵

Pendapat Schrieke diperkuat oleh Reid yang mengatakan bahwa pada paruh abad ke-15 dan ke-17 telah terjadi peningkatan dan penguatan polarisasi serta *eksklusivisme* agama, terutama agama Islam dan Kristen. Namun teori ini mendapat kritik dari Naquib Al-Attas yang cukup keras. Menurutnya, Kristen sebagai Agama, bukanlah alasan yang cukup penting untuk menunjukkan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Karena, bagi Al-Attas Kristen muncul dan mendapat pe-ngaruhnya dinusantara ketika abad ke-19. Penolakan Al-Attas ini

²² Dari Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah..., Hlm. 3

²³ Lihat Azyumardi Azra, *Renaissans Islam Asia Tenggara...*, Hlm. 32

²⁴ Syamsuddin Arif, “Islam di Nusantara: Historiografi dan Metodologi”, Hlm. 17.

²⁵ Dari Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah...,Hlm. 13

wajar, karena ia bersiteguh bahwa Islam tersebar di Asia Tenggara sejak abad ke-1 H atau abad ke-7 M.²⁶

3. Kedudukan Islam di Singapura

Singapura seperti yang diketahui umum merupakan sebuah Negara sekular yang tidak memberikan penekanan kepada agama dan bangsa sebagai terasnya, biarpun ia didominasi bangsa Cina selaku golongan mayoritas, apalagi mereka juga menganut Buddhisme sebagai agama dan kepercayaan. Dalam keadaan inilah, Islam dan Melayu terbabit sebagai sebagian dari kelompok yang membentuk identitas Singapura yang dikenal kini.

Diperlihatkan bahwa Islam sebagai *al-Din [a way of life]* bagi kaum muslimin yang merupakan golongan minoritas di Republik Singapura adalah diakui oleh kerajaan Singapura berdasarkan peruntukan dalam Perlembagaan Republik Singapura. Bagaimanapun, peruntukan tersebut dikemukakan dalam bentuk yang umum semata-mata. Tiada keterangan yang jelas mengenainya. Untuk mengetahui kedudukan Islam secara lebih mendalam, pendetailan mengenainya perlu dirujuk kepada badan atau majlis yang didirikan dengan tujuan yang spesifik, yaitu untuk mengendalikan semua urusan dan perkara berkaitan agama di Republik tersebut.

Islam diberikan pengakuan sebagai salah sebuah agama di Republik Singapura. Persoalan yang biasa ditanyakan adalah berhubung dengan aliran pemikiran yang diterima pakai dalam konteks Islam yang diamalkan itu. Di Negara-Negara lain di rantau ini seperti Malaysia, Brunei, Indonesia, Thailand, Philipina dan Vietnam, Islam versi Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah adalah begitu dominan dan berpengaruh besar serta diterima secara resmi. Apakah Singapura juga mengikuti Islam versi aliran pemikiran yang sama atau sebaliknya, sesuatu yang menarik untuk diperhatikan? Apakah juga signifikan dan dampaknya kepada masyarakat Muslim berbangsa Melayu di Singapura? Adakah mereka turut sama menerima nasib dan merasa pengalaman yang sama seperti yang lain-lain?

Dari segi kedudukan Islam, berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Majlis Agama Islam Singapura (MUIS) selaku pihak pemerintah tertinggi yang bertanggung jawab terhadap Islam dan masyarakat Muslim Melayu di Negara ini, dikatakan bahwa Islam di Singapura adalah berwajah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah [ASWJ] yang pada dasarnya telah diakui sebagai mazhab resmi bagi Republik tersebut. Ini dapat dilihat dari kenyataan berikut berdasarkan Administration of Muslim Law Act [AMLA] yang menyebutkan:

“Article 152 of the Constitution of the Republic of Singapore guarantees the rights of minority communities to their religious belief and practice. This allows for Muslims to practice their Islamic faith in Singapore. The Administration of the Muslim Law Act enacted in 1966 outlines the sphere of Muslim activities in the public and legal domain.” “Muslims in Singapore live their religious life

²⁶ Sampai dengan paragraf ini diolah dari Boharudin, “Kedatangan Islam...” dengan merujuk kembali pada Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara...*, khususnya h. 31-34 dan 36-39,

according to the Ahlus Sunnah wal Jamaah. With regards to the legal school of thought, the Syafie school is followed by the majority of Muslims. Fatwas are also mainly issued according to this school, as mentioned in the Administration of Muslims Law Act (AMLA).²⁷

Secara lebih jelas seperti dalam keterangan di atas, ASWJ yang dikuat kuasa dan diamalkan sepenuhnya di sini merujuk kepada mazhab (*madhhab*) akidah Abu al-Hasan al-Asy'ari dan mazhab Fiqh Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, sama seperti keadaannya di Malaysia. Semua aspek Islam yang difahami masyarakat Melayu Muslim di Republik ini adalah berteraskan kepada kedua-dua mazhab akidah dan fiqh tersebut, sama ada dari aspek asas dan penyebab, sumber, metode, pemikiran, penyelesaian isu dan tantangan dan sebagainya. Dengan kata-kata lain, ia merupakan mazhab yang mendominasi pemikiran masyarakat Melayu Muslim Singapura dalam segala aspek kehidupan mereka, baik fisikal, mental maupun spiritual.

Keterangan oleh MUIS tidak berbeda dengan kenyataan yang diberikan oleh badan dan pihak berkuasa agama di Negara masing-masing di rantau ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah juga kedudukan mazhab-mazhab selain ASWJ di Singapura? Adakah mereka berhadapan dengan isu dan tantangan berikutan kelainan mereka berbanding dengan mazhab yang diterima umum dan sedia ada?

Islam versi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) boleh dianggap sebagai mazhab resmi di Singapura seperti yang termaktub dalam keterangan MUIS sendiri. Bagaimana pun, seperti juga dengan Negara-Negara mayoritas muslim lain, yang menjadi ahli dan berada kepada pertubuhan OIC, terdapat berbagai mazhab lain juga ada dan bergerak seiringan dengan mazhab yang mendominasi Singapura itu sendiri. Apatah lagi dalam dunia tanpa batasan, dan dalam eraglobalisasi dengan semua penjuru dunia terpapar kepada berbagai anasir luaran.

Di antara yang dapat diketahui sepanjang kajian ini dilakukan memperlihatkan bahwa aliran pemikiran dan mazhab al-Salafiyyah al-Wahhabiyyah, merujuk kepada para pengikut aliran al-Salaf, al-Salaf al-Salih dan al-Salafiyyah, pada umumnya dianggap Muslim dan turut dikenal dan diakui sebagai para pengikut Ahlus Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) juga. Ini bererti mereka merupakan sebagian dari ASWJ dan dengan demikian, mereka dapat hidup bebas, bergerak, berfikir, beramal dan beriman tanpa adanya halangan dan hambatan. Walaupun dalam beberapa keadaan, perasaan "keberatan" kelihatan, namun ia masih dalam lingkungan yang diterima dan dibolehkan. Justru, tidak timbul sembarang isu dan tantangan berkaitan dengannya, dan pada umumnya berada dalam pengawasan.

Aliran pemikiran Syi'ah yang telah sekian lama ada di Negara tersebut juga, pada umumnya turut dianggap Muslim dan lebih dikenal sebagai sub-sekte al-

²⁷ Untuk informasi lebih lanjut mengenai AMLA, silahkan rujuk halaman website berikut:
<http://statutes.agc.gov.sg/>

Ja'fariyyah, al-Zaidiyyah dan al-Isma'iliyyah [Dawudiyyah]. Mereka diberikan kebebasan untuk mempercayai, mendakwahkan dan mengamalkan ajaran dan amalan yang mereka ikuti dalam lingkungan mereka dengan lokasi mereka diketahui. Wawancara dengan MUIS menunjukkan bahwa mereka mendapat pengakuan secara resmi sebagai salah sebuah aliran pemikiran dan mazhab dalam Islam, dan oleh yang demikian, tidak kelihatan sebarang masalah, halangan ataupun kekangan untuk mereka hidup bebas berseiringan dengan para pengikut mazhab ASWJ yang merupakan golongan Muslim Melayu mayoritas dan mazhab-mazhab lain di Republik tersebut.

Berlainan juga dengan kedudukan Qadiani, karena seperti ditegaskan oleh pihak MUIS dan pihak pemerintah di Singapura bahwa mereka dianggap sebagai Non-Muslim dan tidak termasuk dalam Islam,²⁸ Walaupun perkataan dan perbuatan yang mereka tunjukkan kelihatan seperti kaum muslimin juga. Justru, layanan dan penghormatan dari pihak kaum muslimin terhadap mereka adalah hampir sama seperti golongan bukan muslim yang lain. Walaupun dalam berbagai keadaan, golongan ini menghendaki mereka diberikan pengakuan sebagai sebagian dari kaum muslimin, namun usaha tersebut gagal dan dilarang. Kerajaan Republik Singapura sendiri yang mendapat nasehat dari MUIS dalam perkara-perkara melibatkan Islam dan Muslim, turut mengambil sikap dan tindakan seperti yang dinasehatkan. Dengan kata-kata lain, apa saja keputusan yang dibuat oleh MUIS sebagai badan pemerintah agama yang diakui kerajaan Singapura, menjadi keputusan kerajaan. Kajian ini turut mengkaji dan meneliti metode dan metodologi yang digunakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat muslim Melayu Singapura, khususnya dalam konteks mengeluarkan sesuatu fatwa dan keputusan berkaitan isu-isu keagamaan terutama yang melibatkan persoalan akidah, seperti difahamkan bahwa Jawatan kuasa syar'iyah akan berpan-dukun dasar-dasar berikut mengikut keutamaan:

- a. Al-Qur'an.
- b. Hadith.
- c. Ijma'.
- d. Qiyas.
- e. Ijtihad.

Dari segi otoritas dan pertanggung jawaban terhadap Islam dan Muslim, badan berkaitan Islam yang tertinggi di Singapura adalah MUIS [Majlis Ugama Islam Singapura]²⁹ yang berada di bawah Kementerian Dalam Negara Singapura. Badan atau Majlis ini dianggap mewakili kerajaan dan akan mengikut keperluan dan kehendak kerajaan Singapura.

Islam merupakan al-Din atau cara dan sistem hidup bagi semua manusia yang mau mengikutinya dan mengakuinya sebagai "sistem hidup dari Allah, kepada Allah dan untuk Allah." Singapura merupakan sebuah Negara Muslim

²⁸ Sumber informasi: Wawancara bersama-sama dengan Ustaz Maas, Pegawai Eksekutif (Sementara), MUIS, 10 Disember 2007 di MUIS, Singapura, Bradell Road, Toa Payoh.

²⁹ Boleh dirujuk dalam laman web MUIS.

Melayu atau Negara beragama Islam dan bermayoritas Melayu suatu masa dahulu. Kedatangan British telah mengubahkan senario secara drastik sehingga akhirnya ia berada dalam keadaan sebaliknya seperti hari ini. Dalam Negara berdasarkan sistem sekular, Islam tidak disebut dan tiada dalam peruntukan Perlembagaan Singapura sebagai salah sebuah agama, apatah lagi agama bagi Negara. Walaupun begitu, kerajaan Republik Singapura memberikan penghormatan kepada Islam dengan menyerahkan segala urusannya di bawah kendalian Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang bertindak sebagai badan penasihat kerajaan, dengan segala nasehatnya dalam hal ehwal agama diberikan perhatian dan pertimbangan. Menurut Administration of Muslim Law Act (AMLA), Islam diberikan tempat berdasarkan artikel 152, Perlembagaan Singapura dan seterusnya, mazhab Ahlal-Sunnah wa al-Jama'ah (ASWJ) diakui sebagai mazhab terbesar. Ia dijadikan pengukur dan asas pemikiran Islam di Singapura. Namun, ruang untuk mazhab-mazhab selainnya bebas diamalkan adalah terbuka luas selama mereka berada dalam Islam. Justru, kajian memperlihatkan keterbukaan terjadi selama ia tidak dilihat menjadi ancaman dalam dua isu besar, ketenteraman umum dan keselamatan Negara. Berdasarkan skenario dan situasi ini, isu dan persoalan yang muncul berkaitan Muslim Melayu adalah dalam lingkungan tersebut.

Disebabkan kedudukan Islam yang terbatas, Islam dan Muslim Melayu berhadapan dengan berbagai isu dan tantangan, dalam survivalnya terhadap ancaman dalam dan luar. Isu dan persoalan utama di Singapura dalam bidang pemikiran, usuluddin atau akidah tidak begitu berbeda dengan Negara-Negara serantau. Isu yang timbul kebanyakan berkaitan dengan sesuatu yang datang dari luar Singapura, menurut pendidikan, pendedahan, media massa dan akhirnya memberikan pengaruh dan dampak kepada pemikiran Muslim Melayu Singapura. Sesuatu yang menarik perhatian adalah kebanyakan isu berkisar dalam bidang syariah kerana tuntutan masyarakat kelihatan lebih dominan dalam bidang ini. Pengaruhnya, kebanyakan lulusan agama Singapura datang dari bidang ini dan amat sedikit lulusan dalam bidang usuluddin dan akidah dihasilkan. Kelemahan akibat kekurangan pemikir dalam bidang usuluddin akan pasti memberikan dampak negatif pada jangka panjang memandangkan dunia global tanpa batasan akan menghadapi tantangan pemikiran yang lebih besar dan lebih berat. Seperkara yang menarik juga, Muslim Melayu lebih terbuka dari segi pemikiran, tidak taksu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. <http://ikasp.wordpress.com/2012/12/28/faktor-faktor-penyebab-rendahnya-kualitas-pendidikan-di-indonesia/> Daiakses 18.12.2014.
- Rusman. 2012. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudrajad, Ujang. 2014. "Singapura sebagai Negara dengan Sistem Pendidikan Terbaik Di Asia Tenggara." <http://konsultasi-pendidikanluar-negeri.webs.com/apps/blog/show/19637400>. Diakses 07.03.2014.
- Tirtarahardja, Umar dan S. L. La Sulo. 2004. Pengantar *Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. Hal 3
- Yulaelawati, Ella. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi, teori, dan Aplikasi*.
- Hasan, Hamid. 2012. *Pendidikan Sejarah Indonesia: Isu dalam Ide dan Pembelajaran*. Bandung: Rizqi Press.
- <http://binaizzawordpres.com/2009/0127/>
- <http://Nasional.kamos.com/read/2008/08/01/05332920/pendidikan-versi-singapura>
- a
- Umasih. 2000. "Sejarah Pendidikan di Indonesia: Sebuah Telaah Atas Perubahan Kurikulum Sejarah Indonesia Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 1975-1994." Tesis. Program Pasca Sarjana Ilmu Pengetahuan Budaya, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.
- Syhabuddin mangandaralam . 1993 . *singapura Negara kembang anggrek tanpa singa* . bandung : PT remaja bandung
- Raffles Thomas Stanford , *The History of Java (Edisi Indonesia)*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2008),
- Sudrajat Ajat, "Perkembangan Islam di Singapura", *Kertas Kerja Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY*, Yogyakarta.
- Yusuf Muhamaad, *Islam di Singapura: Studi Pembaharuan Pemikiran Islam*, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, dari Hsu Yun-ts'iao, "Notes on the Historical Position of Singapore," dalam *Malayan History*, Singapore, "Sejarah dan Perkembangan Islam di Siangapura", <http://www.segenggam-harapan.com/2012/07/sejarah-dan-per-kembangan-islam-> Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Nagara Kerta-gama*. Lihat juga Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),

Resi Maharasi, *Islam Melayu vs Islam Jawa, Menelusuri Jejak Karya Sastra Sejarah Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Miksic John N., "Temasek (Tumasik)", Lihat juga "Singapore", <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/545725/Singapore/214573/History>

Liang Rose, "*Change and Continuity in the Culture of Singapore's Primary School Teachers from 1959 to 2006*", A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, Department of Sociology, National University of Singapore, 2007, Rose Liang, "Change and Continuity in the Culture...", Linehan, W. "The Kings of 14th Century Singapore", dalam T.S.D.M Sheppard (Ed.), *Singapore 150 Years*, (Singapore: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, (1982), "Temasek", <http://en.wikipedia.org/wiki/Temasek>. Bandingkan dengan Nicholas Tarling (Ed.), *The Cambridge History Of Southeast Asia, Volume One, From Early Times to c.1800*, (Cambridge: Cambridge University Press 1992; Edisi Singapura, 1994), tentang "The Early Kingdoms",

Azra Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah...*, (Catatan No. 4 dalam Baharudin, "Kedatangan Islam..."). Lihat juga Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara...*,

Syamsuddin Arif, "*Islam di Nusantara: Historiografi dan Metodologi*",

<http://statutes.agc.gov.sg/>

Sumber informasi: *Wawancara bersama-sama dengan Ustaz Maas, Pegawai Eksekutif (Sementara), MUIS, 10 Desember 2007 di MUIS, Singapura, Bradell Road, Toa Payoh.*

BAB XI

SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA PRANCIS

Dwi Ayu Khairil Barkiyah
d.ayudiyarli@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu hal yang sangatlah penting bagi umat manusia yang akan melanjutkan siklus kehidupan di dunia yang fana ini. Pendidikan pula adalah kunci keberhasilan sebuah Negara, bahkan kemajuan sebuah Negara salah satunya tergantung dengan bagaimana pemerintahan sebuah Negara memuliakan pendidikan dan pemerataannya, karena pendidikan merupakan hak asasi semua warga Negara.

Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat tanpa memandang gender, status sosial, status ekonomi, suku, etnis dan agama. Untuk memenuhi tujuan-tujuan pendidikan di atas, dan sebagai tolak ukur mutu dan keberhasilan di Negara kita, kita dapat melakukan perbandingan sistem pendidikan Negara lain, dalam hal ini salah satu Negara yang dapat kita perbandingkan sistem pendidikannya dengan Negara Indonesia adalah Negara Prancis.

Negara yang terkenal dengan Negara *Fashion* ini adalah termasuk Negara yang pendidikannya terbaik di Dunia. Apa yang bisa membuat Negara ini mendapatkan gelar tersebut? Akan kita bahas di dalam artikel ini. Dan kemudian akan kita teliti lebih lanjut, sistem yang sesuai untuk dipakai di Negara kita.

B. PEMBAHASAN

1. Falsafah Pendidikan di Negara Prancis

Pertama-tama kita lihat Universitas Paris atau apa yang dikenal sebagai Sorbonne. Universitas Paris didirikan pada tahun 1200 oleh Raja Philippe-Auguste dan didukung melalui dekrit kepausan oleh Paus Gregorius IX pada tahun 123, yang mencakup empat fakultas: teologi, hukum, kedokteran sebagai fakultas utama, dan kesenian sebagai fakultas rendah¹. Pada tahun 1257, penasihat Raja Louis IX, Robert de Sorbon, mendirikan fakultas khusus untuk para pelajar teologi yang miskin kampus inilah yang nantinya dikenal sebagai Sorbonne. Oleh karena kampus tersebut perlahan-lahan meraih posisi politik yang kuat, maka semenjak abad ke-15 keseluruhan Universitas Paris dikenal sebagai Sorbonne².

Pada masa itu, fakultas teologi di Sorbonne memegang peran politik yang kuat dengan hak untuk menyensor atas nama Raja dan Paus (Schrift 2006: 189-190). Kekuatan politik ini sebegitu efektifnya sampai-sampai

¹ Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 2, No. 2, 2011, Sistem Pendidikan dan Pemikiran Filsafat Prancis Kontemporer Martin Suryajaya, hlm 236

² Ibid

seorang filsuf sekaliber René Descartes, ketika ia menerbitkan bukunya yang dianggap sebagai tonggak kelahiran filsafat Modern, meditasi tentang Filsafat Pertama, merasa perlu untuk ‘minta restu’ dari dekan dan para doktor ‘fakultas suci Teologi di Paris’ dan mempersembahkan karyanya itu kepada mereka seraya memohon *patronase*³.

Sistem pendidikan Prancis telah lama membuat Eropa jaya. Sejak jaman kebudayaan Prancis berpengaruh luas di Eropa dalam abad ke delapan belas. Aliran-aliran pendidikan Prancis yang bermutu itu sangat berpengaruh pada falsafah bangsa Eropa. Tapi Napoleon yang telah mengorganisasi struktur pendidikan sistem Prancis menjadi sistem Nasional lycees serta dikembangkannya grades ecoles. Selama abad ke sembilan belas pengaruh luas kurikulum klasik dari lycees tersebut dan wewenang teknis daripada Grades Ecoles telah menguasai masyarakat Prancis dan membentuk kebudayaan⁴.

2. Letak Geografis Negara Prancis



Gambar 10.1 Peta Negara Prancis

Letak geografis Negara Prancis di Eropa Barat, yang berbatasan dengan Teluk Biscay dan Selat Channel, di antara wilayah Negara Belgia dan Spanyol, serta di sebelah selatan Inggris Raya. Kemudian berbatasan dengan Laut Mediterania, Italia dan Spanyol. Prancis memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Wilayah utara dan barat sebagian besar terdiri atas dataran rendah. Perbukitan dan pegunungan menjulang di wilayah sebelah timur, tengah dan bagian selatan⁵.

³ Ibid.

⁴ <https://student-activity.binus.ac.id/himpgsd/2020/06/sistem-pendidikan-negara-prancis/>

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Prancis

3. Gambaran umum Negara Perancis⁶:

1. Luas wilayah : 557.670KM².
2. Letak astronomis : 420 LU-510 LU dan 50 BB-80 BT.
3. Letak geografis : Terletak di wilayah Eropa barat.
4. Batas-batas : Utara adalah Selat Chanel, Belgia, Jerman, dan Luxemburg. Timur adalah Jerman, Swis, dan Italia. Selatan adalah Spanyol, Andora, dan Laut tengah. Barat adalah Samudera Atlantik.
5. Bentang alam : Dapat dibagi menjadi beberapa bagian.
 - a. Tanah tinggi purba.
 - b. Lipatan pegunungan muda.
 - c. Dataran rendah.
 - d. Lembah sungai Roun dan pantai Laut tengah.
6. Iklim : Laut sedang.
7. Keadaan penduduk : Pada tahun 2001, jumlah penduduknya sebesar 59.200.000 jiwa. Kepadatannya 106 jiwa/KM². Pertumbuhannya 0,4% per tahun. Sebagian besar penduduk Perancis tinggal di Kota besar seperti Paris yang merupakan kota metropolitan Perancis. Sebagian besar penduduk Perancis adalah orang Perancis, kelompok etnis lainnya adalah orang imigran yang mencari pekerjaan. Mereka datang dari Portugis, Maroko, Italia, dan Tunisia.
8. Bentuk pemerintahan : Republik, kepala Negara dijabat oleh seorang presiden dan kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri.
9. Bahasa resmi : Bahasa Perancis.
10. Nama resmi : Republique Du France.
11. Maskapai penerbangan : Air France.
12. Mata uang : Franc.
13. Lagu kebangsaan : La Marsilleaise.
14. Agama : Mayoritas Katolik roma, Sisanya adalah Protestan, Islam, Yahudi, dan Gereja Ortodok Rusia dan Yunani.

C. SEJARAH PENDIDIKAN DI NEGARA PRANCIS

Pada awal abad 19, Perancis masih didominasi oleh daerah pedalaman (*rural area*) dengan jumlah penduduk relatif besar yang aktif dan produktif di bidang pertanian. Jumlah ini menurun dari 50% dalam tahun 1900 menjadi 35% dalam tahun 1946. Prancis kemudian mengalami proses industrialisasi yang cepat dan modernisasi pertanian sehingga pada tahun 1982 hanya 8% penduduk yang masih bertani secara tradisional.

Salah satu dampak dari transformasi ini terhadap sistem pendidikan adalah berkembangnya dengan cepat pelatihan-pelatihan teknik, yang selanjutnya melahirkan sekolah-sekolah menengah tingkat atas teknik (*lycees techniques*) yang terpisah dari sekolah-sekolah menengah umum yang lebih tradisional.

⁶ <https://www.geografi.org/2017/11/negara-perancis.html>

Penurunan tajam dalam sektor primer (pertanian) menguntungkan sektor jasa (*services*). Dari tahun 1962 sampai 1975, sementara jumlah orang yang aktif di sektor pertanian menurun 47%, jumlah disektor jasa meningkat 3%, dan di sektor industri dan transportasi naik hanya 13%. Pada waktu yang sama, 75% lapangan kerja baru ada pada bidang jasa, terutama pada jajaran pemerintah dan komunitas lokal. Ini semua menuntut pendidikan⁷.

Hampir sepanjang sejarah sistem pendidikan Prancis sangat bersifat sentralistis. Reformasi yang dilakukan pada awal 1980-an memberikan otonomi kepada daerah-daerah, kementerian dan komunitas, tetapi bagaimana hasilnya belum dapat diketahui secara pasti.

Sebagaimana juga Negara-negara lain yang mempunyai sejarah panjang, Perancis memiliki sistem pendidikan yang sudah sangat melembaga dan berupaya selalu melakukan reformasi. Sejarah menceritakan kenapa Perancis sangat bersifat sentralis dan birokratis dalam bentuk pemerintahan termasuk sistem pendidikannya⁸. Dunia seperti ini telah membangunkan raksasa tidur (*sleeping giant*) J.C. Eicher (1995) karena⁹:

- (1) Pembukaan sekolah menengah dan Universitas bagi siswa-siswa baru yang mayoritas dari kelompok sosial yang dulunya tidak pernah dapat tempat,
- (2) Adanya reformasi yang terus menerus yang selama ini tidak pernah bisa diterima dengan senang hati oleh pihak-pihak penguasa. Struktur yang besar dan kaku ini sekarang menghadapi tantangan untuk dapat dijadikan sistem pendidikan yang permanen, yang sampai saat ini masih belum terpenuhi dengan baik. Menurut aturan yang berlaku, sekolah yang punya murid kurang dari 12 orang harus ditutup demi efisiensi. Antara tahun 1900 dan 1945, pertumbuhan penduduk Perancis sangat lambat, akan tetapi meningkat drastis sesudah perang Dunia II. Dampak pertamanya adalah kurang lebih 1,2 juta murid masuk sekolah dasar antara 1951 dan 1956, naik 40% dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahan demografis ini menghantam sekolah menengah dari tahun 1957 dan seterusnya, dan Universitas.

Keadaan ini kemudian menurun lagi sehingga jumlah kelompok anak umur sekolah juga menurun sehingga berakibat penutupan beberapa buah sekolah dasar kecil. Perancis juga mengalami arus urbanisasi sehingga Paris saja Kota Mega Metropolitan berpenduduk 16% dari seluruh penduduk Perancis. Komposisi etnis penduduk Perancis pada dasarnya adalah homogen Selatan dua abad menjalani pemerintahan Negara yang bersifat sentralistis, dengan bahasa resmi bahasa Perancis.

Akan tetapi kemudian ada desakan yang keras untuk mengajarkan Bahasa-bahasa daerah setempat terutama di daerah Brittany, Alsace, Basque, dan Corsica. Pengajaran bahasa ini dilakukan pada lembaga-lembaga pendidikan guru, buruh-buruh asing yang jumlahnya sangat besar (lebih dari 4 juta) juga mempengaruhi

⁷ <https://yherlanti.wordpress.com/2010/08/12/pendidikan-perancis/>

⁸ <https://id.scribd.com/doc/79926640/Sistem-Pendidikan-Prancis>

⁹ *Ibid*

kurikulum dan metodologi mengajar dengan pembukaan kelas-kelas khusus untuk anak-anak asing¹⁰.

D. SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA PRANCIS

Pada awal republik ketiga berdiri, rasa kesatuan dalam masyarakat Perancis masih sangat tipis; yang ada saat itu masih perasaan pertentangan yang sangat dalam antara pihak-pihak yang menerima Revolusi Perancis dan yang menolak dan berjuang untuk itu. Oleh karena itu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan Nasionalisme. Upaya peningkatan Nasionalisme ini dilakukan melalui sekolah dengan mempromosikan buku-buku teks yang seragam yang isinya antara lain menekankan perlunya melanjutkan Negara Perancis dan pembentukan sistem baru bersifat sentralistis yang ketat.

Pada tingkat sekolah dasar yang pendidikannya adalah gratis, wajib dan tidak membedakan aliran keagamaan, terdapat dua jenis pendidikan yang parallel, sekolah umum pemerintah, dan sekolah-sekolah menengah kecil disebut "*lycees*". Sekolah yang terakhir ini sering menampung murid-murid yang berasal dari kelas menengah *borjuis*, yang selalu keberatan mengirim anak-anaknya ke sekolah yang sama bersama anak-anak rakyat biasa. Tujuan sekolah *lycees* adalah untuk mendidik kelompok elit, dan melakukan pengajaran bahasa Yunani dan bahasa Latin karena mata pelajaran ini dianggap sangat berharga dalam pembentukan pikiran. Pada masa yang sama, sampai Perang Dunia II, tujuan lain sistem pendidikan mendidik orang-orang yang "*qualified*" mulai menjadi penekanan dalam pernyataan-pernyataan resmi¹¹.

Langkah-langkah intensif untuk memikirkan kembali sistem pendidikan di Perancis dilakukan sesudah Perang Dunia II, dan ini disimpulkan dari laporan komisi yang disebut "*Langevin-Wallon Commission*" (1947). Itulah untuk kali pertama tujuan pendidikan dinyatakan dengan jelas. Tujuan sistem sekolah harus¹²:

- a. Meningkatkan kesempatan yang sama dalam hidup bagi setiap orang;
- b. Memenuhi kebutuhan sistem yang produktif bagi orang-orang yang "*qualified*";
- c. Memberikan prioritas pada pengembangan kepribadian setiap anak.

Dalam ruang lingkup pendidikan, Negara Prancis merupakan Negara yang menggunakan sistem sentralistik yakni pendidikan yang dipusatkan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi, kementerian pendidikan biasa disebut *Ministry of National Education*, memiliki peran *urgent* dalam kemajuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan utama pendidikan Prancis pada mulanya adalah meningkatkan Nasionalisme Tujuan pendidikan yang sebenarnya ialah menciptakan warga Negara yang berguna bagi masyarakat¹³. Dari kutipan di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya tujuan pendidikan dari setiap Negara adalah menjadikan penerus bangsa sebagai orang yang berguna ke depannya. Sebagaimana tujuan pendidikan di

¹⁰ Ibid

¹¹ <https://yherlanti.wordpress.com/2010/08/12/pendidikan-perancis/>

¹² Ibid.

¹³ <https://www.slideshare.net/susiloilo2/sistem-pendidikan-prancis-indonesia>

Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan ketertiban dunia.

Membahas tentang pendidikan-pendidikan yang berada di Prancis, terdapat ke khusus tersendiri, yaitu semua peserta didik yang dapat mampu menyelesaikan pendidikannya di pendidikan rendah dengan nilai raport yang baik dan tidak terdapat nilai merah satupun, maka murid itu berhak untuk melanjutkan sekolah ke *jenjang Cycle d'observation*, terutama pada peserta didik yang sudah berusia 11-12 tahun. Rentan waktu belajar di *Cycle d'observation* adalah selama dua tahun, yaitu pada saat murid duduk di bangku kelas V dan VI. Selama kuartal pertama semua peserta didik di berikan mata pelajaran yang sama. Murid yang lulus penyeleksian pada tahapan pertama dapat maju masuk ke jurusan klasik (*Section Classique*) dan disana murid tersebut mendapatkan bahasa lain¹⁴.

Bila mereka dapat menamatkan *Cycle d'Observation* dengan baik, mereka dapat melanjutkan ke jurusan yang dikehendaki oleh orang tuanya. Jurusan-jurusan yang ada adalah¹⁵:

- 1) Jurusan Pendidikan Penutup (*L'enseignement Terminal*) dengan waktu belajarnya tiga tahun. Pendidikan ini diberikan khusus untuk peserta didik yang kemampuan inteletiknya rendah dan tidak ada kelanjutannya. Mata pelajaran difokuskan pada ketrampilan.
- 2) Jurusan Pendidikan Umum Pendek (*L'enseignement General Court*). Lama pendidikan tiga tahun. Kurikulumnya menitik beratkan kepada ilmu pasti, dua bahasa asing dan di akhiri dengan ujian. Bagi yang lulus memperoleh ijazah Pendidikan Umum (*Brevet d'Enseignement General*). Mereka dapat diterima bekerja di pekerjaan yang tidak bersifat teknis misalnya di kantor pemerintahan.
- 3) Jurusan jenis ketiga adalah Pendidikan kejuruan Pendek (*L'enseignement Professionnelle Court*) dengan lama belajar empat tahun. Pendidikan ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berbakat teknis, yaitu mereka yang tidak berbakat ke pendidikan yang bersifat umum seperti jurusan kedua diatas. Mereka dalam pendidikannya lebih banyak praktik di samping teori. Di Indonesia, pendidikan kejuruan ini seperti: SMEP, SMEA, STM.
- 4) Jurusan jenis keempat adalah Pendidikan Kejuruan Panjang (*L'enseignement Professionnelle Long*). Pendidikan dikhususkan bagi yang berkemampuan intelet atau IQ tinggi. Pada jurusan ini ada dua keahlian *Lyceum* Kejuruan (*Lycees Technique*) dan keahlian teknik atau *Technique Brevetete*. Lama pendidikan pada jurusan keahlian pertama empat tahun.
- 5) Jurusan Pendidikan Umum Panjang (*L'enseignement General Long*). Jurusan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Lama pendidikan tujuh tahun.

¹⁴ <http://aluminum-show.com/sistem-pendidikan-di-negara-eropa/>

¹⁵ Ibid.

1. Pendidikan Formal¹⁶

Hampir seluruh sistem pendidikan formal di Perancis dilaksanakan secara tersentralisasi yang ketat dan dikontrol oleh Kementrian Pendidikan. Pendidikan dasar berkembang dengan baik. Anak-anak boleh memulai pendidikannya pada umur 2 tahun. Sekitar 91% dari anak-anak usia 3 tahun sudah masuk sekolah pada tahun 1982 dibandingkan dengan hanya 42% pada tahun 1964, dan di kota-kota persentase itu mencapai 100%. Hasil penelitian membuktikan bahwa anak-anak berusia empat tahun di tingkat pendidikan dasar rata-rata hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang dicapai anak-anak berusia tiga tahun seperti dijumpai dalam “*Service d’information de Gertion et etudes Stastiques*” (SIGES 1982).

2. Pendidikan Nonformal¹⁷

Program-program pendidikan non formal sangat bervariasi dari beberapa hari sampai beberapa bulan. Orang yang terlibat dalam program-program non formal yang dibiayai oleh pemerintah atau sumbangan wajib dari majikan yang ditetapkan tahun 1970-an meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, tetapi tahun 1980-an cenderung menurun. Kira-kira 60% adalah buruh-buruh pekerja tangan, kira-kira 25% para teknisi dan kira-kira 15% eksekutif.

Pemerintah Perancis menjamin bahwa masuk sekolah mulai TK hingga perguruan tinggi adalah gratis. Gambaran umum Sistem Pendidikan di Perancis, pada dasarnya ada 4 jenjang¹⁸:

1. *Maternelle* (setara playgroup dan TK) mulai dari umur 2 tahun
 - *Toute Petite Section* (mulai umur 2)
 - *Petit Section* (3 tahun)
 - *Moyen Section* (4 tahun) TKA
 - *Grand Section* (5 tahun) TKB
2. *1ere degree* :
 - *Cours Preparatoire* (CP) – 6 tahun setara dengan SD kelas 1
 - *Cours Elementaire* (CE1) – 7 tahun setara dengan SD kelas 2
 - *Cours Elementaire* (CE2) – 8 tahun setara dengan SD kelas 3
 - *Cours Moyen 1* (CM1) – 9 tahun setara SD kelas 4
 - *Cours Moyen 2* (CM2) – 10 tahun setara SD kelas 5
3. *2eme degree* :
 - *1ere cycle 6eme* – 11 tahun setara SD kelas 6
 - *1ere cycle 5eme* – 12 tahun setara SMP kelas 1
 - *1ere cycle 4eme* – 13 tahun setara SMP kelas 2
 - *1ere cycle 3eme* – 14 tahun setara SMP kelas 3, yg lulus menyandang status *Colleges* dan Memilih ke jurusan *Baccalaureat* (jalur umum)

¹⁶ <https://yherlanti.wordpress.com/2010/08/12/pendidikan-perancis/>

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ <https://exzellenz-institut.com/sistem-pendidikan-negara-prancis/>

ataukah jurusan CAP/ BEP (jalur profesional) 1-2 tahun dan bisa langsung. Berikut adalah jalur *Baccalaureat* :

- *2eme cycle 2 eme* – 15 tahun setara SMA kelas 1
- *2eme cycle 1 ere* – 16 tahun setara SMA level 2
- Terminal – 17 tahun setara SMA level 3, yg lulus bisa menyandang gelar BAC-S (*Scientific*), BAC-ES (*Economi*) atau BAC-L (*Litteraire*) tergantung jurusan yg diambil di kelas.

4. *Superieur*, ada 3 cabang :

- IUT : *Instituts Universitaire de Technologie* jenjang 2 tahun, *diplome* : DUT / BTS
- *Universités* – 3 tahun, *diplome* : *Licence*
- 4 tahun, *diplome* : *Maitrise*
- 5 tahun, *diplome* : *DESS / DEA / DRT*
- 8 tahun, *diplome* : *doctorat*
- *Grande Ecole* :
- ENA : sekolah politik
- *Polytechnic*, *diplome* : *Ingenieur and Scientific*
- HEC – Untuk sekolah *Finance commerce*
- ENS – sekolah calon guru

E. PERSONALIA GURU

Dalam tahun 1979, jumlah guru yang ada dalam sistem pendidikan Perancis 750.000 orang. Dari jumlah itu, 10% berada di tingkat pendidikan prasekolah, 32% di tingkat pendidikan dasar, 50% di tingkat pendidikan menengah, 5,5% di pendidikan tinggi, dan sisanya memegang jabatan selain mengajar¹⁹.

Kurang lebih 16% dari guru-guru mengajar di sekolah swasta, dan jumlah guru seluruhnya bervariasi dari 98,6% pada tingkat pendidikan dasar dan 24,3% pada perguruan tinggi. Pendidikan dan pelatihan untuk guru pendidikan dasar dilaksanakan di setiap daerah pada sekolah yang disebut '*ecole normale* dan pendidikan ini selama tiga tahun. Para calon guru ini direkrut dari tamatan *baccalaureat* (tamatan sekolah menengah) dengan terlebih dahulu mengikuti ujian masuk. Pendidikan di '*ecole normale* dibina oleh dosen-dosen dari Universitas, dan kepada yang berhasil menyelesaikannya diberikan gelar Universitas. Guru-guru sekolah menengah direkrut secara Nasional setelah berhasil lulus dalam suatu seleksi yang khusus untuk itu, dan di tingkat pendidikan tinggi rekrutmen staf pengajar juga dilaksanakan secara nasional.

Pengorganisasian pendidikan guru selalu mendapat kritikan keras dari berbagai pihak, karena itu berbagai usaha perubahan terus diusahakan. Ada tiga karakteristik utama yang tercakup dalam perubahan itu²⁰:

- a) Pendidikan guru dilaksanakan Universitas;

¹⁹ <https://yherlanti.wordpress.com/2010/08/12/pendidikan-perancis/>

²⁰ *Ibid.*

- b) Fleksibilitas yang lebih besar dari guru-guru untuk pindah mengajar di pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c) Pengurangan jumlah kategori guru.

F. Gaji Guru di Negara Prancis

Pendidikan di Perancis pada umumnya ditanggung oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional (*Ministere de l'Education Nationale*). Pemerintah Perancis telah menganggarkan 23% pendapatan Negeranya untuk pendidikan yaitu adanya pendidikan gratis dari TK hingga Kuliah. Penghasilan guru di Perancis sangat menjanjikan, selain gaji bulanan yang tinggi juga diberikan fasilitas penunjang. Gaji guru baik Negeri maupun swasta seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Prancis. Bila dibandingkan dengan Indonesia, gaji guru di Perancis tergolong fantastis, untuk guru senior dan terbaik berkisar 3.000–4.000 (*euro*) atau sekitar 45-60 juta rupiah, sementara untuk guru junior sekitar 2.500 (*euro*) atau sekitar 20-30 Juta rupiah ditambah dengan berbagai fasilitas penunjang lainnya, semua sudah tersedia, rumah, kendaraan, kebutuhan hidup, jaminan kesehatan, tunjangan hari tua, semua sudah ditanggung oleh pemerintah.

Sehingga seorang guru benar-benar dapat berkonsentrasi penuh dalam mengajar dan mencerdaskan para anak didik serta dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk pengajaran. Untuk menjadi guru di sana pun tidak mudah mereka yang ingin menjadi guru harus diseleksi sesuai potensi yang dimilikinya, karena nantinya menjadi tulang punggung dalam menjamin kualitas pendidikan Bangsaanya, Maka oleh karena itu untuk pengangkatan seorang guru, termasuk osen, diadakan seleksi penerimaan yang sangat ketat dan teruji²¹.

Di Indonesia, selain ditanggung oleh pemerintah pusat yang dialokasikan 20% dalam APBN, maka pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pemerintah daerah juga wajib menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD dan membuat kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan pendidikannya²².

G. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan di Negara maju, sangatlah tertata dan terperinci, dan di Negara maju yang pendidikannya bisa disebut pendidikan terbaik di Dunia sangatlah mengedepankan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi pendidik maupun peserta didik. Dilihat dari proses perekrutan tenaga pendidik yang teruji dan ketat begitu juga gaji yang didapat oleh pendidik yang terbilang tinggi akan membuat para pendidik lebih berkonsentrasi dalam proses belajar mengajar, sehingga tidak ada hal lain yang dapat menghilangkan konsentrasi tersebut.

²¹ <https://core.ac.uk/download/pdf/188611827.pdf>

²² *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 2, No. 2, 2011, Sistem Pendidikan dan Pemikiran
Filsafat Prancis Kontemporer Martin Suryajaya

<https://student-activity.binus.ac.id/himpgsd/2020/06/sistem-pendidikan-Negara-prancis/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Prancis

<https://www.geografi.org/2017/11/Negara-perancis.html>

<https://yherlanti.wordpress.com/2010/08/12/pendidikan-perancis/>

<https://id.scribd.com/doc/79926640/Sistem-Pendidikan-Prancis>

<https://yherlanti.wordpress.com/2010/08/12/pendidikan-perancis/>

<https://www.slideshare.net/susiloilo2/sistem-pendidikan-prancis-indonesia>

<http://aluminum-show.com/sistem-pendidikan-di-Negara-eropa/>

<http://gpseducation.oecd.org/>

<https://yherlanti.wordpress.com/2010/08/12/pendidikan-perancis/>

<https://exzellenz-institut.com/sistem-pendidikan-Negara-prancis/>

<https://yherlanti.wordpress.com/2010/08/12/pendidikan-perancis/>

<https://core.ac.uk/download/pdf/188611827.pdf>

BAB XII

SISTEM PENDIDIKAN DI INGGRIS

Eva Yuliana

evayulianahendi@gmail.com

A. DASAR FALSAFAH PENDIDIKAN DI NEGARA INGGRIS

Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara (*United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*) atau sering disebut "*Inggris*" memiliki empat Negara bagian, yaitu; Inggris (*England*), Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Setiap Negara bagian memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Pengawasan pendidikan di Inggris di tingkat Nasional berada di bawah Departemen Pendidikan (*Department for Education*). Sama halnya seperti Indonesia, pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan di Daerah masing-masing. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika praktik pendidikan antara satu Negara bagian dengan Negara bagian lainnya memiliki perbedaan.

Pemerintah Inggris memberlakukan program wajib belajar Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan tahun 1996, orang tua atau wali di Negara bagian Inggris diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap anak berusia lima hingga enam belas tahun mendapatkan pendidikan. Orang tua atau wali yang tidak mengikuti peraturan ini akan mendapati sanksi seperti kurungan penjara tiga bulan dan /atau denda £1000. Usia wajib belajar ini mencakup jenjang pendidikan dasar (*primary school*) dan jenjang pendidikan menengah (*secondary school*) tingkat awal.

Perjalanan panjang menuju nalar modern yang digagas oleh filosof Inggris untuk memajukan pendidikannya dapat ditelusuri seperti dalam artikel "*Modernity versus postmodernity*", Jurgan Habermas menjelaskan istilah "moderen" adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut era baru (*New age*), yang berfungsi untuk membedakan dengan masa lalu (*the ancient*).

Artinya modern itu tidak semata-mata hanya ditandai dengan munculnya *renaissance* atau *enlightenment*, tetapi itu yang memulai, di Negara Eropa Prancis, Inggris, dan Jerman. Bertrand Russel mengungkapkan ada dua hal yang terpenting yang menandai sejarah pendidikan modern di Inggris atau di Eropa, yakni runtuhnya otoritas gereja dan menguatnya otoritas sains (rasional). Revolusi ilmiah selalu dikaitkan dengan proses sekulerisasi atau tercabutnya kekuasaan agama dalam sistem sosial politik yang memungkinkan sains lepas dari institusi agama. Di Eropa demikian juga di Inggris telah tercatat dalam sejarah pada Abad ke-16 dan 17, ketika itu era *Renaissance*, agama sebagai institusi yang sangat dominan dan hegemoni di eropa dikala itu mengalami perubahan radikal dalam posisinya sebagai pemegang otoritas penuh segala bentuk kebenaran. Tetapi lepasnya sains dari otoritas agama tidak menjadikan independensi.

Menurut William, bahwa nalar pendidikan di Inggris didasari yang bernama sistem pengetahuan *rasional*, *empirisme* dan *positivisme*. William melanjutkan dan menguraikan dari dasar filosofis epistemologis pendidikan di Inggris (Eropa),

yaitu *Empirisme*, *Bahafiorisme* (filosofis), *Empirisme* (filosofis), *Empirisme biologis*, *Pragma-tisme*, *Instrumentalisme*, *Eksperimentalisme*, *Hidonisme psikologis*, *Reinforcement*, *Relativisme Budaya*, *Demokrasi sosial*, *Subjektivisme Substansial*, *liberasionisme*, *liberalisme pendidikan*.¹

Disisi lain, dalam hal perkembangan pengetahuan sekuler dan *skeptisme* sudah menjadi landasan tradisional ilmu pengetahuan, wacana ilmu pengetahuan yang menjadi topik utama pada zaman kebangkitan pendidikan filsafat di Inggris dan secara umum di Eropa. Pada abad ke-17 topik utama adalah persoalan epistemologi. Pernyataan pokok dalam bidang epistemologi adalah bagaimana manusia memperoleh pengetahuan yang benar? serta apa yang dimaksud dengan “kebenaran itu”? untuk menjawab pernyataan-pernyataan itu, maka dalam filsafat zaman awal kemajuan Inggris yakni pada abad ke-17 munculah aliran filsafat yang memberikan jawaban berbeda, bahkan saling bertentangan. Aliran tersebut adalah aliran Empirisme dan Rasionalisme. Inggris sejak terjadinya proses pembaharuan telah mengangkat Negara tersebut menjadi nagara yang maju, hal ini tidak lain karena filsafat pendidikannya yang mendasari kemajuan itu.

B. ASPEK KURIKULUM

Terdapat dua jenjang pendidikan yang diatur di dalam Kurikulum Nasional untuk England (*National Curriculum*), yaitu: Pendidikan *Pra-Primer* dan Pendidikan *Primer* dan *Sekunder*. *Education Act 2002 Chapter 32* adalah Undang-Undang yang mendasari pengaturan ini. Di dalam undang-undang ini, Kurikulum Nasional untuk Wales pun juga diatur, tepatnya di Part 7 (26). Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada keberadaan mata pelajaran Bahasa Welsh di dalam Kurikulum Nasional untuk Wales. Tidak terdapat kurikulum yang baku untuk Pendidikan Lanjutan dan Pendidikan Tinggi. Hal ini dikarenakan beragamnya kualifikasi yang ada di jenjang pendidikan pasca 16 tahun. Setiap kualifikasi memiliki kurikulumnya masing-masing. Siswa pada tahap ini sudah dianggap cukup dewasa untuk memilih. Beberapa kualifikasi yang ada menawarkan pelatihan keterampilan praktis sehingga dapat langsung bekerja selepas itu. Beberapa menawarkan persiapan sebelum masuk ke universitas dan sebagainya. Bagian selanjutnya dari buku ini membahas secara rinci, dari sumber-sumber referensi yang tersedia, kurikulum pada setiap jenjang pendidikan di England.²

¹ <http://karyailmu99.blogspot.com/2016/02/potret-sistem-pendidikan-di-inggris.html>

² LEGISLATION.GOV.UK. Education Act 2002. [online]. 2002. Available from: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32>

	Key Stage 1	Key Stage 2	Key Stage 3	Key Stage 4
Umur (tahun)	5-7	7-11	11-14	14-16
Kelas	1-2	3-6	7-9	10-11
Mata pelajaran wajib:				
Bahasa Inggris	Y	Y	Y	Y
Matematika	Y	Y	Y	Y
Sains	Y	Y	Y	Y
Mata pelajaran pilihan:				
Seni dan Desain	Y	Y	Y	
Kewarganegaraan			Y	Y
Pemrograman	Y	Y	Y	Y
Desain Teknologi	Y	Y	Y	
Bahasa*		Y	Y	
Geografi	Y	Y	Y	
Sejarah	Y	Y	Y	
Musik	Y	Y	Y	Y
Olahraga	Y	Y	Y	Y

Gambar 12.1 Struktur Pendidikan di Negara Inggris

Di Inggris, peran pengembangan kurikulum wajib belajar berada di tangan Departemen Pendidikan (DfE). Untuk dapat bersaing secara global, beberapa mata pelajaran yang mendapatkan perhatian di dalam kurikulum ini adalah Matematika, Bahasa Inggris, Pemrograman dan Bahasa Asing.³

Dari segi kurikulum, sekolah-sekolah di Inggris menggunakan kurikulum Nasional (*National Curriculum*). Kurikulum Nasional ditentukan oleh Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah (*School Curriculum Development Council – SCDC*) khususnya untuk sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Semula dewan pengembang kurikulum masih menjadi satu dengan dewan ujian Nasional, yakni dalam satu wadah yang bernama *The School Council for Curriculum and Examinations*, namun sejak tahun 1982 lembaga tersebut dipecah menjadi dua.

Dewan Pengembang Kurikulum Sekolah tidak mudah dan seandainya saja mengganti kurikulum pendidikan. Perubahan kurikulum akan selalu melibatkan banyak pakar yang sungguh berkompeten di bidangnya. Mereka menjunjung tinggi warisan tradisi keilmuan mereka yang sangat kuat berakar. Materi pelajaran pokok yang mereka anggap bagus sejak 100 tahun lalu, akan dipertahankan sampai kapanpun. Sementara bidang-bidang baru yang ingin diajukan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum Nasional, harus melewati prosedur yang panjang.

Prosedur tersebut dimulai dari usulan Kepala Sekolah di suatu wilayah yang didukung oleh beberapa kepala sekolah lainnya, lalu bersama-sama mereka mengajukan ke *The Office for Standards in Education, Children's Services, and Skills (OFSTED)*. Kantor ini bersifat semi otonom, karena tidak dibawah oleh pemerintah melainkan berdiri mandiri di bawah penunjukan Queen Elizabeth (*Her Majesty's Chief Inspector of Schools In England-HMCI*). Selanjutnya, *OFSTED*

³ Department For Education. *National curriculum: video interviews for schools*. [online]. 2014. [Accessed 22 March 2014].

akan mengajak *School Curriculum Development Council (SCDC)* untuk mengembangkan kurikulum. Hasilnya kemudian diusulkan oleh *OFSTEAD* kepada Menteri Pendidikan. Setelah Menteri Pendidikan menerima, hal yang sama akan terjadi kembali, Menteri akan menyampaikan rencana perubahan kurikulum Nasional ke jenjang struktural di bawahnya hingga sampai ke kepala sekolah. Prosedur ini memakan waktu sekitar satu tahun. Prosedur ini ternyata sangat birokratis namun sekaligus memperlihatkan tertib organisasi yang mereka jalankan. Dengan demikian, prosedur yang mereka jalankan memperlihatkan adanya pola *bottom-up* dalam pembaharuan kurikulum di Inggris. Pembaharuan kurikulum pendidikan itu diusulkan dari akar rumput, yaitu para ujung tombak penyelenggara pendidikan.

Kurikulum Nasional yang disusun oleh *OFSTEAD* bersama dengan *SCDC* berisi 12 pelajaran. Pelajaran inti (*The core subjects*) adalah *English, Mathematics, dan Science* yang wajib dipelajari oleh semua siswa umur 5 sampai 15 tahun. Mata pelajaran lain yang wajib dipilih satu atau lebih untuk dipelajari para siswa adalah pelajaran: *Art & Design, Citizenship, Design & Technology, Geography, History, Information & Communication Technology, Modern Foreign Languages, Music,* dan terakhir adalah *Physical Education*. Seringkali beberapa sekolah masih menambah satu atau dua mata pelajaran tambahan selain yang disebutkan di atas. Adapun pelajaran yang diajarkan di sekolah tetapi tidak diatur di dalam Undang-Undang Negara adalah pelajaran: *Religious Education, Career education, dan Sex education*.⁴

Pada jenjang pendidikan tinggi terdapat program *pasca sarjana* yang dapat diikuti oleh lulusan ujian *A-Levels* atau lulus dari *Sixth Form Colleges*. Seseorang yang telah lulus tadi akan dapat dengan mudah masuk ke perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa selama waktu tiga atau empat tahun. Mereka yang masuk PT telah berumur 18 tahun. Sedangkan untuk calon mahasiswa yang berasal dari luar negeri atau mahasiswa internasional harus dapat fasih berbahasa Inggris dengan skor nilai minimal TOEFL 550 dan IELTS 6.0.

Tahun ajaran PT di Inggris dibagi dalam dua atau tiga *term*. Mahasiswa mengambil jurusan yang sesuai dengan minat yang ingin dipelajari dan dikembangkannya. Gelar sarjana akan diberikan jika mereka telah menyelesaikannya. Ada dua kelompok besar jurusan yaitu jurusan "*art*" dan "*sciences*". Program biasanya berlangsung selama tiga tahun, dimana selama itu mahasiswa menyelesaikan mata kuliah dan *tutoring* di bidang masing-masing. Mahasiswa yang akan lulus biasanya harus mengikuti ujian akhir.

Program *pasca sarjana* dapat diikuti oleh mereka yang telah lulus sarjana. Umumnya berumur diatas 21 tahun. Program *pasca sarjana* ditempuh dalam waktu 2 tahun. Mahasiswa harus menyelesaikan tugas mata kuliah, menulis tesis, dan mengikuti ujian akhir. Mahasiswa *pasca sarjana* dapat meneruskan program doktoral atau PhD.. Gelar Master atau MBA (*Master of Business Administrations*) dianugerahkan setelah usai menempuh seluruh mata kuliah, tesis, dan ujian akhir.

⁴ Arif Rohman, *Op.Cit.*, hlm. 172-174

Gelar pasca sarjana tradisional biasanya di bidang “*Arts*” dengan sebutan (MA), sedang di bidang “*Science*” dengan sebutan (MSc).⁵

Mata pelajaran wajib dan termasuk yang diujikan, antara lain: Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains. Mata pelajaran tersebut juga yang termasuk diujikan dalam ujian Nasional *General Certificate of Secondary Education* (GCSE) di akhir *Year 11*. Sebagai catatan, cakupan mata pelajaran wajib dapat beragam tergantung sekolah. Terdapat pula mata pelajaran wajib namun mungkin tidak diujikan (tergantung sekolah), antara lain:⁶

1. Pendidikan karir
2. Kewarganegaraan
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Olahraga
5. Pelajaran Agama
6. Pendidikan hubungan manusia dan seks
7. Pendidikan kerja praktek

Mata pelajaran pilihan sangat beragam dan tergantung dari sekolah yang menyediakannya. Namun setiap pendidikan di sekolah manapun harus menerapkan salah satu dari mata pelajaran seperti berikut ini:

1. Seni (termasuk Seni Desain, Musik, Tari, Drama dan Art Media)
2. Teknologi dan Desain
3. Kemanusiaan (Sejarah dan Geografi)
4. Bahasa Asing Modern

Mata pelajaran pilihan lainnya dapat termasuk: Studi Bisnis, Teknik (*Engineering*), Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Pariwisata (*leisure and tourism*), Manufaktur dan lain sebagainya.

Penerapan Kurikulum Nasional di Inggris (*National Curriculum*) terdapat 10 mata pelajaran yang wajib diajarkan disetiap sekolah, baik Negeri maupun sekolah swasta. Dalam pengalokasian waktu untuk setiap topik mata pelajaran telah ditentukan dan wajib bagi guru untuk melaksanakan setiap kurikulum yang sudah ditetapkan, walaupun dalam proses penyusunannya dia tidak dilibatkan

C. SISTEM PENDIDIKAN INGGRIS

Sistem pendidikan di Inggris dibagi berdasarkan empat Negara yang tergabung di dalamnya, yaitu England, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Setiap Negara memiliki sistem terpisah di bawah pemerintahan masing-masing: Pemerintah Inggris bertanggung jawab atas England, selanjutnya Pemerintah Skotlandia, Pemerintah Wales dan Eksekutif Irlandia Utara bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan Negara masing-masing.

⁵ BBC (2015), Types of schools, [Online], https://bbc.co.uk/schools/parents/types_of_schools/

⁶ Siti Jubaedah. *Kurikulum Pendidikan Sejarah Di Inggris*. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia: Vol. 3, No.12 Desember 2018

Secara singkat mengenai sistem pendidikan di Inggris yang umumnya dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan umur:⁷

1. Pendidikan *pra-primer* (*Pre-Primary Education*), usia 3-4 tahun
2. Pendidikan primer (*Primary Education*), usia 4-11 tahun
3. Pendidikan sekunder (*Secondary Education*), usia 11-16 tahun
4. Pendidikan lanjutan (*Further Education*), usia 16-18 tahun
5. Pendidikan tinggi (*Higher Education*), usia di atas 18 tahun

Usia	England dan Wales			Irlandia Utara			Skotlandia		
3	Nursery	Non-compulsory		Nursery	Non-compulsory		Nursery	Non-compulsory	
4-5	Reception	Foundation Stage	Primary Education	Year 1	Foundation Stage	Primary Education	Nursery	Non-compulsory	
5-6	Year 1	Key Stage 1		Year 2	Key Stage 1		P1	Primary Education	
6-7	Year 2			Year 3			Year 4		P2
7-8	Year 3	Key Stage 2		Year 4	Key Stage 2		P3		
8-9	Year 4			Year 5			Year 6		P4
9-10	Year 5			Year 6			Year 7		P5
10-11	Year 6	Key Stage 3		Year 7	Key Stage 3		P6		Secondary Education / SCE Standard Grade
11-12	Year 7			Year 8			Year 9		
12-13	Year 8			Key Stage 4/GCSE			Year 9	Key Stage 4/GCSE	S1
13-14	Year 9						Year 10		Year 11
14-15	Year 10	Key Stage 4/GCSE	Year 11	Key Stage 4/GCSE	S3				
15-16	Year 11		Year 12		Year 12	S4			
Akhir usia wajib belajar ⁸ (akan berubah mulai 2013 (5))									
16-17	Year 12	Sixth Form / A-Level, BTEC, Cambridge Pre-U, IB, dsb.	Further Education	Year 13	Sixth Form / A-Level, BTEC, Cambridge Pre-U, IB, dsb.	Further Education	S5	Further Education / SCE Higher Grade	
17-18	Year 13			Year 14			S6		
18+	Higher Education								

Gambar 11.2 Sistem Pendidikan di Negara Inggris

1. Pendidikan *pra-primer* (*Pre-Primary Education*), usia 3-4 tahun

Berdasarkan undang-undang, pendidikan *pra-primer* adalah pendidikan untuk anak-anak yang belum memasuki usia wajib belajar (anak yang belum berusia 5 tahun). Pendidikan ini dapat disediakan di sekolah, misalnya di taman kanak-kanak atau kelas *nursery* di sekolah dasar, atau di mana saja. Untuk anak-anak usia 3 bulan sampai 3 tahun, umumnya pendidikan disediakan oleh sektor swasta dan *voluntary*, dengan orang tua membayar biaya pendidikan dan tidak diwajibkan (*non-compulsory*). Untuk anak-anak berusia 3 dan 4 tahun terdapat pendidikan gratis bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya.⁸

Pendidikan *pra-dasar* diikuti oleh peserta didik berusia di bawah 5 tahun. Adapun pembelajaran dilakukan dengan cara bermain. Area pembelajaran meliputi bahasa dan komunikasi, perkembangan fisik, perkembangan pribadi, sosial dan emosional, literasi, matematika, pemahaman tentang dunia, seni dan rupa (Gov.Uk, n.d(a)). Tidak ada ujian khusus untuk menyelesaikan pendidikan ini. Pemerintah menyediakan pendidikan *pra-dasar* tanpa biaya, 15 jam

⁷ Fauzi Soelaiman. Sistem Pendidikan di Inggris. Atdikbu dlond on.com Indonesianembassy, 2014.hal 11

⁸ Fauzi Soelaiman dan M. Fauzan Adziman, *Sistem Pendidikan di Inggris*, London: Divisi Pendidikan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), 2012

perminggunya untuk anak berusia tiga tahun ke atas selama 38 minggu (Gov UK, n.d.(b)). Orang tua dapat memberikan tambahan lama waktu sekolah dengan biaya pribadi. Anak yang kedua orang tuanya memiliki penghasilan di bawah upah minimum Nasional, mendapatkan pendidikan pra-dasar tanpa bayar dari pemerintah selama 30 jam per minggu.⁹

2. Pendidikan primer (*primary education*), usia 4-11 tahun

Pendidikan dasar diikuti oleh peserta didik berusia 4–11 tahun dan berlangsung selama tujuh tahun. Ada dua *Key Stage* di tingkat ini yaitu *Key Stage 1* (untuk tahun pertama dan kedua) serta *Key Stage 2* (untuk tahun ketiga hingga kelima). *Key Stage* adalah pembagian tahapan pembelajaran sesuai dengan ketrampilan dan pengetahuan yang ingin dicapai pada akhir tiap tahapan. Pada *Key Stage 1* dan 2, peserta didik belajar matematika, bahasa Inggris, sains, desain dan teknologi, sejarah, geografi, keterampilan dan *desain*, musik, olahraga, dan komputer. Selain itu, pada *key stage 2* peserta didik juga belajar bahasa asing. Sekolah juga diwajibkan untuk menyediakan mata pelajaran agama di jenjang ini. Pelajaran agama tidak spesifik pada pendalaman satu agama saja, namun berbagai agama di dunia. Jika berkeberatan, orang tua dapat meminta peserta didik untuk tidak mengikuti pelajaran ini.

Sekolah dasar (*primary school*). Sekolah dasar ini untuk anak-anak yang berusia antara 5-11 tahun, kecuali di Scotland dimana transfer dilakukan pada usia 12 bukan 11 tahun; adakalanya, terbagi lagi dalam kelompok 5-7 tahun (*infant school*) dan kelompok 7-11 tahun (*junior school*).¹⁰

Penerimaan siswa baru sekolah-sekolah *primer* atau *sekunder* yang dibiayai pemerintah, tidak dipungut bayaran. Orang tua siswa dapat mengirimkan aplikasi untuk sekolah anaknya di mana saja. Proses penerimaan siswa diatur oleh pemerintah melalui peraturan khusus yaitu *Schools Admissions Code* dan *Schools Admission Appeals Code*. Semua sekolah yang dibiayai oleh pemerintah dan memiliki bangku kosong harus menerima aplikasi siswa tanpa syarat. Kebijakan penerimaan siswa jika jumlah bangku tidak mencukupi ditentukan oleh pemerintah Daerah atau dewan pengurus sekolah (tergantung dasar hukum sekolah bersangkutan).

Jumlah siswa di sekolah primer dalam satu kelas kelompok usia 5-7 tahun dibatasi 30 siswa. Siswa umumnya dikelompokkan dengan kemampuan beragam, meskipun banyak pengajar yang menggunakan pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa. Jumlah siswa di sekolah *primer* dalam satu kelas kelompok usia 5-7 tahun dibatasi 30 siswa. Siswa umumnya dikelompokkan dengan kemampuan beragam, meskipun banyak pengajar yang menggunakan pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa.

⁹ <http://eksis.ditpsmk.net/artikel/ikhtisar-sistem-pendidikan-di-inggris>

¹⁰ EURYDICE. National system overview on education systems in Europe . [online]. 2011. Available from: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_UK_ENG_EN.pdf

Setelah siswa menyelesaikan *Year 11*, terdapat lebih banyak lagi pilihan. Apapun jalur yang dipilih akan melibatkan proses pendidikan. Di tahap ini biasanya siswa sudah dianjurkan untuk mencari tahu karir masa depan apa yang tertarik untuk dijangki mereka.

3. Pendidikan sekunder (*secondary education*), usia 11-16 tahun

Pendidikan menengah berlangsung selama lima hingga tujuh tahun. Peserta didik pendidikan menengah tingkat pertama berusia 11–16 tahun. Ada dua *Key Stage* yaitu *Key Stage 3* (untuk tahun ketujuh hingga kesembilan) dan *Key Stage 4* (untuk tahun kesepuluh hingga kesebelas). Setelah menyelesaikan *Key Stage 4* (usia 16 tahun), peserta didik akan mengambil ujian *General Certificate of Secondary Education (GCSE)*. Setelah menyelesaikan GCSE, peserta didik dapat memilih untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atas (jalur akademik), pendidikan vokasi (vokasional), program magang (vokasional), pendidikan berkelanjutan (*further education*), atau langsung bekerja. Pendidikan berkelanjutan adalah pembelajaran pada satu institusi yang mana tingkatan pembelajaran tidak tergolong tingkatan pendidikan tinggi.

Peserta didik yang memilih untuk melanjutkan ke pendidikan menengah tingkat akhir berusia 16-18 tahun. Pada jalur ini peserta didik memiliki pilihan untuk mengambil berbagai tipe kualifikasi seperti *A-Level*, *International Baccalaureate*, *Cambridge pre-University*, atau *Foundation*.

Umumnya siswa melanjutkan dari sekolah primer ke sekolah sekunder di usia 11 tahun. Namun, ada beberapa Daerah di Inggris menggunakan 3 jenjang (*3-tier*) dan menyediakan sekolah menengah (*middle schools*) untuk siswa usia 8 atau 9 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Banyak dari sekolah sekunder setelah menyelesaikan tahap pendidikan wajib belajar juga menyediakan pendidikan tingkat lanjutan untuk siswa usia 16 sampai 18 tahun.

Sekolah harus buka selama 190 hari dalam satu tahun. Pengajar wajib berada di sekolah 5 hari lebih lama untuk tujuan kegiatan di luar waktu mengajar, seperti misalnya pengembangan profesi. Jangka waktu dan hari libur ditentukan oleh pemerintah Daerah atau dewan pengurus sekolah, tergantung dari dasar hukum sekolah bersangkutan. Tahun ajaran baru biasanya dimulai awal September dan diakhiri bulan Juli tahun berikutnya. Sekolah umumnya beroperasi lima hari seminggu (Senin sampai Jum'at). Di sekolah primer siswa umumnya diajar oleh pengajar umum, sedangkan di sekolah sekunder diajar oleh pengajar spesialis.

4. Pendidikan lanjutan (*further education*), usia 16-18 tahun

Program lanjutan (*HND* atau *Higher National Diploma*) menawarkan program teknis dan keahlian, biasanya sekitar 1-2 tahun tergantung dari jurusan dan sertifikasi yang dipilih. Kualifikasi yang diperoleh adalah *Certificate of Higher National Diploma* atau *Higher National Certificate*. Umumnya Universitas di Inggris mensyaratkan untuk pelajar lulusan SMA kelas XII dari Indonesia harus masuk program 'A' Level atau program *Pra-Universitas (Foundation)*

sebelum meneruskan ke tahun pertama di Universitas (*Undergraduate Degree*). Bagi jurusan yang sulit seperti kedokteran dan hukum, apalagi untuk *top Universitas* di Inggris, pelajar internasional diharuskan masuk ke program 'A' Level selama 2 tahun sebelum masuk program *Undergraduate*.¹¹

Setelah siswa menyelesaikan masa wajib belajar sampai dengan *Year 11* dan lulus ujian Nasional GCSE kemudian mereka dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan. Terdapat beberapa pilihan jenis sekolah di tingkat ini, antara lain: melanjutkan di sekolah yang sama, melanjutkan pendidikan ke *sixth form college*, *further education college*, atau *tertiary college*. Beberapa jenis sekolah tersebut memiliki perbedaan penekanan materi antara pendidikan akademik/umum dan pendidikan kejuruan. Umumnya siswa yang ingin melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi atau universitas memilih melanjutkan di sekolah yang sama (*Year 12*) atau melanjutkan ke *sixth form college*. Kriteria penerimaan siswa baru untuk jenjang pendidikan ini ditentukan oleh sekolah atau *college* masing-masing. Biaya pendidikan gratis diberikan bagi siswa sampai dengan usia 19 tahun. Tidak ada kurikulum wajib di jenjang pendidikan tingkat lanjutan ini. Siswa dapat memilih berbagai mata pelajaran yang ditawarkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan tingkat lanjutan berdasarkan kualifikasi yang mereka inginkan. Pengajar diberi kebebasan untuk memutuskan metode dan materi pengajaran yang dianggap sesuai.

5. Pendidikan tinggi (*higher education*), usia di atas 18 tahun

Terdapat berbagai macam tipe lembaga pendidikan tinggi termasuk diantaranya adalah universitas, perguruan tinggi (*higher education colleges*), dan *university colleges*. Lembaga pendidikan tinggi di England sangat beragam baik segi ukuran, misi dan sejarahnya. Pada tahun 2011 tercatat 165 institusi pendidikan tinggi di Inggris yang pendanaannya diatur pemerintah. Hanya terdapat satu universitas yang tergolong swasta (*independent*), yaitu *The University of Buckingham* yang didirikan pada tahun 1970. Di Inggris, berbagai universitas membentuk menjadi suatu grup yang dikenal dengan istilah '*mission group*', beberapa grup tersebut adalah: *The 1994 Group* yang terdiri dari 19 universitas yang memiliki visi, standar dan nilai yang sama. Kemudian ada juga grup *Million+*, *University Alliance*, dan *Cathedral Group*. Salah satu yang termasuk grup bergengsi dengan termasuk didalamnya 24 universitas-universitas terkemuka seperti Universitas *Cambridge*, *Imperial College London*, *London School of Economics & Political Science (LSE)*, dan Universitas *Oxford*, adalah *Russell Group*.¹²

Pendidikan tinggi diikuti oleh mahasiswa berusia di atas 18 tahun. Ada tiga jenjang yang dapat ditempuh yaitu S1 (*undergraduate*) yang berdurasi tiga tahun, S2 (*Master*) yang biasanya berdurasi satu tahun, dan S3 (*PhD.*) yang berdurasi minimal tiga tahun. Di Universitas tertentu ada beberapa program yang

¹¹ <https://www.ceseducation.org/Negara/inggris>

¹² Fauzi Soelaiman. Sistem Pendidikan di Inggris. Atdikbu dlond on.com Indonesianembassy, 2014. hal 25

mengkombinasikan jenjang S1 dan S2 dalam satu program, sehingga di akhir empat tahun pembelajaran mahasiswa langsung menerima gelar S2 (*Master*).

Lembaga pendidikan tinggi merupakan badan otonomi yang memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru dan persyaratan masuk untuk setiap programnya masing-masing. Persyaratan tersebut salah satunya dituangkan dalam bentuk sistem poin (*tariff points*) yang disebut UCAS atau *Universities and Colleges Admission Service*. Sistem UCAS memungkinkan calon mahasiswa baru yang memiliki kualifikasi berbeda untuk mendaftarkan diri ke universitas. Sistem ini menganut penyetaraan nilai. Walaupun demikian, sistem ini tidak diwajibkan untuk diadopsi oleh lembaga pendidikan tinggi dan banyak program studi di berbagai universitas yang hanya mempersyaratkan hasil mata pelajaran A-Level dengan nilai tertentu. Bahkan lembaga pendidikan tinggi juga menerima aplikasi dari pendaftar yang memiliki pengalaman kerja, namun belum memiliki kualifikasi pendidikan

D. PERSIAPAN PENDIDIKAN BAGI GURU

Mutu sebuah sekolah ditentukan oleh beberapa hal. Dua hal yang seringkali dijadikan tolak ukur adalah kualitas dari guru/staf pengajar dan kelembagaan di dalam sekolah itu sendiri. Di Inggris, khususnya England, terdapat lembaga-lembaga yang khusus menangani kontrol mutu dari guru dan kelembagaan di dalam sekolah itu, yaitu: NCTL atau *National College for Teaching and Leadership* dan *Ofsted* atau *Office for Standards in Education, Children's Services and Skills* (106, 107). Di Scotland, dua lembaga yang serupa adalah *the General Teaching Council for Scotland* atau GTCSC dan *Education Scotland*. Di Irlandia Utara, dua lembaga yang serupa adalah *the General Teaching Council for Northern Ireland* atau GTCNI dan *Education and Training Inspectorate* atau ETI. Di Wales, dua lembaga yang serupa adalah *the General Teaching Council for Wales* atau GTCW dan Estyn (108–110). Bagian ini akan membahas mengenai kontrol mutu yang dilakukan oleh *Departemen for Education* atau DfE, melalui dua lembaga yang telah disebutkan sebelumnya, terhadap guru dan kelembagaan di dalam sekolah di England. Pembahasan juga mencakup lembaga khusus kontrol mutu untuk Universitas yang bernama *The Quality Assurance Agency for Higher Education* atau disingkat QAA.¹³

Guru/Staf pengajar di England tidak tergolong pegawai Negeri sipil (*civil servants*), namun direkrut oleh pemerintah Daerah atau lembaga yang tergantung jenis sekolahnya. Guru di lembaga swasta merupakan pegawai dari lembaga tersebut. Jumlah guru yang mengajar di sekolah yang dikelola oleh pemerintah Daerah dan akademi tertanggal November 2012 adalah sebanyak 442.000, terdapat kenaikan sebesar 2,6% dari November 2011. Jika digabung dengan jumlah tenaga pengajar lainnya seperti asisten guru, staf pendukung dan tambahan di sekolah, maka jumlahnya menjadi 899.000 dan ini tersebar di 24.328 sekolah (data per

¹³ Fauzi Soelaiman. Sistem Pendidikan di Inggris. Atdikbu dlond on.com Indonesianembassy, 2014. hal 63

Januari 2013), mulai dari *nursery* hingga sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan sekunder (111). Terdapat sebutan khusus untuk tenaga kerja di sekolah ini, yaitu FTE (*Full-Time Employee*) *school workforce*.

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Guru harus memikirkan dan membuat perencanaan pembelajaran secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi peserta didiknya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Karena guru berperan sebagai pengelola pembelajaran, bertindak sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif, mengembangkan bahan pembelajaran dengan baik, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan pembelajaran demi peningkatan mutu pendidikan.¹⁴

Untuk menjadi guru di England dan Wales, seseorang diwajibkan untuk memiliki sertifikat QTS atau *Qualified Teacher Status* yang diterbitkan oleh *The National College for Teaching and Leadership* (NCTL), sebuah lembaga eksekutif DfE. Hal yang sama juga berlaku di Scotland, dengan sertifikat *Teaching Qualification* (TQ), dan Irlandia Utara (113). Hanya saja lembaga yang menerbitkan sertifikatnya berbeda. Sertifikat ini didapatkan setelah mengikuti Initial Teacher Training atau ITT yang diadakan juga oleh NCTL. Di Scotland dan Irlandia Utara, pelatihan serupa dinamakan *Initial Teacher Education* atau ITE.

Untuk mengajar di sekolah pemerintah (*maintained schools*), staf pengajar diwajibkan memiliki sertifikasi QTS yang didapatkan setelah mengikuti ujian dan ITT. Selain itu, ada beberapa persyaratan dasar terkait riwayat pendidikan para calon guru. Khusus bagi para pemegang gelar sarjana, persyaratan dasar yang dibutuhkan hanya Pass. Namun, akhir-akhir ini terdapat penekanan pada predikat dari gelar sarjana yang dimiliki. Hal ini dapat menjadi indikator kesuksesan saat mengikuti ITT dan perekrutan untuk profesi mengajar. Data statistik yang bersumber dari *Training and Development Agency for Schools* (TDA) memperlihatkan sebaran calon guru yang mendapatkan dan tidak mendapatkan QTS serta tingkat perekrutan *postgraduate secondary trained* untuk *postgraduate* berdasarkan predikat gelar sarjana yang dimiliki.

Kualifikasi	Nilai yang dibutuhkan
GCSE (atau yang setara) dalam mata pelajaran Bahasa Inggris	C
GCSE (atau yang setara) dalam mata pelajaran Matematika	C
GCSE (atau yang setara) dalam mata pelajaran sains, jika ingin mengajar di jenjang pendidikan primer atau <i>Key Stages 2/3</i>	C
Gelar Sarjana UK, jika ingin mengambil <i>postgraduate teacher training course</i>	Pass

Gambar 11.3 Kualifikasi Nilai pada Tiap-tiap Sertifikat

¹⁴ Alfian Erwinsyah. *Manajemen Pembelajaran Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Kualitas Guru*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 5, Nomor 1 : Februari 2017

Para calon guru yang ditempatkan oleh NCTL dipekerjakan oleh sekolah sebagai *unqualified teacher*. Karena dipekerjakan, maka mereka berhak untuk digaji. NCTL menyediakan pendanaan kepada sekolah untuk menutupi biaya pelatihan dan mensubsidi gaji. Terdapat tambahan waktu untuk pengalaman kerja selama 3 tahun atau lebih bagi para calon guru.

E. UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN DAN KEGURUAN

Pemerintah Inggris memberlakukan program wajib belajar Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan tahun 1996, orang tua atau wali di Negara bagian Inggris diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap anak berusia lima hingga enam belas tahun mendapatkan pendidikan. Orang tua atau wali yang tidak mengikuti peraturan ini akan mendapati sanksi seperti kurungan penjara tiga bulan dan /atau denda £1000. Usia wajib belajar ini mencakup jenjang pendidikan dasar (*primary school*) dan jenjang pendidikan menengah (*secondary school*) tingkat awal.

Pendidikan Agama (*Religious Education*) adalah mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan Negara di Inggris. Sekolah diminta untuk mengajarkan program studi agama sesuai dengan pedoman lokal dan Nasional.

Pendidikan agama di Inggris diamanatkan oleh Undang-Undang Pendidikan 1944 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Reformasi Pendidikan 1988 dan Standar Sekolah dan Kerangka Undang-Undang 1998. Pemberian Pendidikan Agama adalah wajib di semua sekolah yang didanai Negara, akan tetapi tidak wajib bagi setiap anak-anak untuk mengambil subjek (mata pelajaran). Subjek terdiri dari studi agama-agama, pemimpin agama, dan tema agama dan moral yang berbeda. Namun, kurikulum yang dipakai didominasi dari agama Kristen dalam kehidupan beragama dan karenanya agama Kristen merupakan mayoritas isi subjek. Semua orang tua memiliki hak untuk menarik anak dari pendidikan agama, yang sekolah harus menyetujui.¹⁵

Setiap yurisdiksi pemerintah di Inggris memiliki Silabus yang Disetujui Lokal yang berfungsi sebagai mandat untuk cakupan dan urutan pengajaran mata pelajaran untuk setiap Tahap Kunci, dan mungkin untuk setiap tahun sekolah; penggunaan silabus hanya diamanatkan untuk jenis sekolah tertentu, seperti sekolah Kontrol Sukarela. Sekolah dengan Bantu Sukarela dan sekolah independen bebas membuat garis besar program studi mereka sendiri; sekolah yang paling mungkin benar-benar menggunakan silabus sekolah yang dipertahankan dan sekolah *non-denominasi* dengan Bantuan Sukarela. Otoritas Kualifikasi dan Kurikulum juga telah menghasilkan Kerangka Nasional Pendidikan Agama non Undang-undang, yang memberikan pedoman untuk penyediaan ET di semua tahap kunci, dan model delapan tingkat seperti yang diterapkan dalam mata pelajaran

15

http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_education_in_primary_and_secondary_education

Kurikulum Nasional.¹⁶ Selain itu, semua sekolah diwajibkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan ibadah kolektif setiap hari, yang setidaknya 51% di antaranya harus beragama Kristen selama tahun ajaran. [2] Ini terpisah dan tidak terkait dengan pelajaran RE. Sarah Smalley, ketua pengawas, penasihat, dan konsultan Asosiasi Pendidikan Agama, menyatakan bahwa beberapa "sekolah memang mengalami masalah dalam memenuhi persyaratan untuk beribadah" karena apa yang mereka anggap sebagai "kurangnya ruang untuk mengumpulkan seluruh sekolah untuk beribadah" meskipun Smalley mencatat bahwa "sebenarnya tidak ada persyaratan untuk pertemuan seperti itu, karena kelompok yang lebih kecil diperbolehkan." [3] Persatuan Guru Nasional menyarankan pada tahun 2008 bahwa orang tua harus memiliki hak untuk memiliki sekolah khusus dalam keyakinan mereka sendiri dan bahwa imam, para rabi dan pendeta harus diundang untuk memberikan pelajaran agama kepada siswa di semua sekolah Negeri.¹⁷

Perdana Menteri Inggris sangat mewarnai kebijakan-kebijakannya termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Berikut ini adalah sekilas mengenai isu-isu pokok yang menjadi tantangan.

1. Kekurangan sumber dana; walaupun sumber-sumber baru untuk meningkatkan dana pendidikan dapat diusahakan, namun itu tidak akan mencukupi untuk mencegah menurunnya performansi murid dan kualitas pendidikan.
2. Perubahan demografis; sebagai akibat dari menurunnya angka kelahiran, dampaknya akan dirasakan oleh pendidikan menengah, pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi. Beberapa institusi pendidikan terpaksa ditutup untuk digabungkan untuk mencegah biaya tinggi karena akan sangat banyak jumlahnya Institusi kecil dengan jumlah murid yang sangat sedikit.
3. Kurikulum; dengan menurunnya jumlah murid di tingkat pendidikan menengah, sejumlah mata pelajaran *minor* terancam tidak diajarkan, seperti bahasa asing, kecuali bahasa Perancis. Kekurangan guru dalam bidang tertentu perlu segera dicari pemecahannya.
4. Ujian akhir; banyak yang kurang senang dengan semakin dominannya kurikulum yang dikaitkan dengan *public examination*. Perlu diadakan ujian yang seragam untuk anak-anak yang berusia 16 tahun.
5. Penyusutan dan reorientasi pendidikan tinggi; oleh karena perubahan demografis dan sumber dana yang makin terbatas Institusi-institusi kecil, beberapa jurusan dan beberapa mata kuliah terpaksa ditutup; rasio murid dan staf pengajar makin besar; lembaga-lembaga keuangan perlu mengambil langkah-langkah untuk menghemat dana penelitian terutama dalam ilmu – ilmu terapan dan teknik, dan lembaga-lembaga yang sudah baik (*centres of excellence*).

¹⁶ *Qualifications and Curriculum Authority (2004). "Religious Education: non-statutory framework"* National Curriculum Website. *Qualifications and Curriculum Authority.*

¹⁷ *Hannah Goff (2008-03-24). "Call to offer faith class choice"* BBC News website. *British Broadcasting Corporation.*

6. *Continuing education*; program-program baru dalam rangka pengembangan karir staf serta pendidikan yang bersifat '*refreshing*' yang mungkin dilaksanakan dengan teknik pendidikan jarak jauh (*distance-learning*) akan berjalan tersendat-sendat dan lamban oleh karena kurangnya dana dan dukungan dari pimpinan.
7. Guru-guru lanjut usia cenderung menimbulkan stagnasi dan mundurnya semangat; namun demikian mereka mungkin lebih baik dipakai karena pengalamannya, akan tetapi harus diambil kebijaksanaan untuk memperbaiki gaji serta sistem penilaian yang mampu memberikan insentif. Juga diperlukan sistem pendidikan dalam jabatan (*inservice training*) yang lebih baik yang mampu menyeleksi guru-guru yang tidak efektif sama sekali sehingga terbuka peluang untuk merekrut guru-guru muda yang baik.
8. Kebencian terhadap generasi muda; pengangguran anak-anak muda, hancurnya disiplin orang tua serta faktor-faktor lain yang mungkin menimbulkan kebencian atas budaya generasi muda. Mungkin tidak banyak yang dapat diharapkan dari sistem pendidikan, akan tetapi setidaknya pendidikan dapat menjembatani jarak antara pihak generasi muda dengan masyarakat lainnya. Untuk itu barangkali diperlukan suatu kebijakan politik untuk mendorong kohesi sosial.

Masalah lain yang dihadapi pendidikan Inggris adalah adanya tuntutan dari pihak pemimpin Islam di Inggris agar diadakan segregasi sekolah bagi anak-anak Muslim, terutama bagi anak-anak wanita. Sebegitu jauh tuntutan itu tetap tidak dapat diterima karena Inggris sudah sejak lama melaksanakan sistem pendidikan yang disebut "*co-education*", yaitu menggabungkan pendidikan bagi anak-anak pria dan wanita dalam satu kelas atau sekolah.

Isu tentang rendahnya mutu lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah secara umum mendapat kecaman dan kritikan keras cukup lama di Inggris, serta makin banyaknya anak-anak yang berhenti sekolah untuk selamanya sebelum usia 16 tahun, khususnya kategori siswa purna waktu (*full-time*). Yang terakhir ini merupakan fenomena yang tidak dijumpai pada Negara-Negara barat lainnya. Rendahnya motivasi generasi muda Inggris ini untuk melanjutkan pendidikannya karena mereka mempersepsikan bahwa usaha-usaha pendidikan tidak akan mendapat jaminan suatu pekerjaan atau profesi yang baik, Dalam bidang fisik, masalah yang dihadapi adalah kurangnya jumlah prasekolah di samping kira-kira 1/3 dari seluruh gedung pendidikan Inggris sudah tua dan tidak layak lagi untuk pelayanan pendidikan yang selalu dituntut bermutu. Pada tahun 1992, biaya pembangunan baru atau perbaikan diperkirakan sekitar 4 (empat) *miliar pound-sterling* Inggris.

Kemunduran pendidikan juga terlihat dari kurangnya guru yang berkualitas dan sulitnya merekrut calon-calon yang baik. Hal ini ada kaitannya, dengan gaji guru yang rendah. Pemerintah sedang melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kompensasi ini disamping upaya-upaya lain untuk meningkatkan status sosial atau martabat guru yang sudah lama mengalami kemerosotan. Dengan kemerosotan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pendidikan

baru yang dikenal dengan *Education Act 1988* yang dianggap sebagai suatu reformasi di bidang pendidikan yang cukup *fundamental*. Ada 4 jenis perubahan mendasar yang dicakup dalam undang-undang baru itu.

Pertama, kurikulum Nasional (*national curriculum*). Ada 10 mata pelajaran yang wajib diajarkan di seluruh sekolah, baik sekolah Negeri maupun swasta. Waktu yang dialokasikan untuk setiap topik dalam kurikulum sudah ditentukan, dan wajib bagi guru-guru untuk melaksanakan semua yang telah ditetapkan dalam kurikulum walaupun pihak guru hampir tidak dilibatkan dalam penyusunannya.

Kedua, ujian Nasional (*national student assessment*). Ujian secara Nasional ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa kurikulum Nasional terlaksana dengan baik dan dikuasai oleh siswa. Ujian ini dilakukan pada siswa usia 7, 11, 14, dan 16 tahun. Tujuan lain adalah untuk mengetahui unjuk kerja masing-masing sekolah sehingga dapat memberikan informasi kepada orang tua murid atau masyarakat.

Ketiga, hak pilih orang tua murid (*parental choice*). Aspek yang dianggap paling radikal dalam reformasi ini ialah bahwa setiap orang tua murid bebas memilih ke sekolah mana mereka akan memasukkan anaknya. Hal ini berdampak makin berkembangnya sekolah-sekolah yang baik, dan sebaliknya makin berkurangnya jumlah murid pada sekolah-sekolah yang bermutu rendah atau sekolah yang kurang diminati masyarakat, bahkan mungkin ada yang terpaksa ditutup.

Keempat, manajemen sekolah secara lokal (*local management of schools*). Sistem memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada dewan sekolah yang disebut *board of governors* terutama dalam mengatur dan mengawasi anggaran sekolah. Dalam beberapa kasus juga terdapat wakil dari siswa yang sudah berumur di atas 18 tahun.

Sebagai bagian dari Britania Raya, sistem politik dasar bagi Inggris adalah monarki konstitusional dan sistem parlementer. Inggris tidak memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1707. Berdasarkan Undang-Undang Kesatuan 1707, Inggris dan Skotlandia bersatu menjadi Kerajaan Britania Raya. Sebelum penyatuan tersebut, Inggris diperintah oleh monarki dan Parlemen Inggris. Saat ini, Inggris diatur langsung oleh Parlemen Britania Raya meskipun Negara-Negara Britania lainnya disertai pemerintahan sendiri (devolusi). Pada House of Commons yaitu Majelis Rendah dalam Parlemen Britania Raya, terdapat 532 dari total 650 anggota Parlemen (MP) yang mewakili konstituensi Inggris

Sebagai konsekuensi atas keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa, pemilu untuk menentukan siapa wakil Britania yang akan dikirim sebagai anggota Parlemen Eropa juga diselenggarakan secara regional di Inggris. Dalam pemilihan umum Parlemen Eropa 2009 hasil dari pemilu di region-region di Inggris untuk anggota Parlemen Eropa adalah sebagai berikut: 23 dari Konservatif, 10 dari Partai Kemerdekaan, 10 dari Liberal Demokratik, dua dari Partai Hijau dan dua dari Partai Nasional Britania

Dalam Undang-undang baru ini setiap sekolah tetap diawasi dan diinspeksi secara berkala oleh sebuah badan resmi yang independen yaitu Inspektorat

Pendidikan, *Her Majesty's Inspectors (HMI)*, yang melakukan inspeksi setiap tahun setahun.

Di jenjang pendidikan primer dan sekunder, pembinaan para guru adalah tanggung jawab dari masing-masing sekolah. Dalam hal ini, para guru diberikan pelatihan yang berhubungan dengan beberapa topik seperti isu kurikulum, penentuan target dan evaluasi, kebutuhan khusus, kepemimpinan, dan teknologi. Pelatihan biasanya diadakan di sekolah pada saat hari pelatihan atau di pusat pelatihan regional yang dikelola oleh pemerintah Daerah. Pembinaan guru juga dapat dilakukan antar sekolah. Terdapat 200 sekolah dengan predikat '*oustanding*' (yang diberikan oleh Ofsted, terdapat di sub bab 5.2) yang dicanangkan dan didanai oleh pemerintah sebagai *Teaching Schools*. Sekolah-sekolah ini memiliki peran utama dalam melakukan pembinaan guru di sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah di England. Model ini menekankan pada kolaborasi dalam bentuk aliansi sekolah-sekolah (146). Selain melakukan pembinaan, sekolah juga bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap performa guru-gurunya. Dalam konteks figur, hal ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan evaluasi telah diatur di dalam *The Education (School Teachers' Appraisal) (England) Regulations 2012* (147). Para guru juga didorong untuk mengikuti CPD atau *Continuing Professional Development*. CPD biasanya disediakan oleh institusi seperti IfL atau *Institute for Learning*. Gambar 10 menunjukkan hal-hal yang mendorong guru untuk mengambil CPD. Materi-materi yang diajarkan di dalam pelatihan ini mengaktualisasi keterampilan mengajar dan belajar.

F. ANGGARAN NEGARA TENTANG PENDIDIKAN DI INGGRIS

Pembiayaan pendidikan (*financing of education*) merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan pendidikan di hampir semua Negara di dunia. Negara-negara berkembang umumnya membelanjakan dananya untuk pendidikan relatif lebih rendah dibandingkan Negara-negara maju. Rendahnya pembiayaan pendidikan di Negara berkembang dibanding dengan Negara maju tersebut tidak saja pada prosentasenya akan tetapi juga nominalnya. Rendahnya pembiayaan pendidikan di Negara berkembang tersebut sudah menjadi wacana publik (*public discourse*) yang setiap saat selalu ingin dicarikan jalan keluar, namun karena rumitnya dan kompleksnya masalah ini menjadikan upaya penyelesaian masalah ini tidak tuntas. Untuk konteks Indonesia sebagian besar pembiayaan pendidikan disekolah-sekolah Negeri lebih diarahkan untuk keperluan administrasi dan tenaga pengajar. Sedangkan untuk keperluan kegiatan operasional dan pemeliharaan masih sangat terbatas. Lebih-lebih untuk kegiatan pengembangan akademik dalam rangka mencari pola-pola pembelajaran yang lebih efektif masih belum terjangkau. Sehingga secara umum disamping telah terjadi rendahnya biaya pendidikan di semua jenjang pendidikan juga telah terjadi ketimpangan distribusi/ pengelolaan pendidikan.

Belanja pendidikan dan ilmu pengetahuan tahun 1990 kurang lebih 14.1%. Jumlah ini kira-kira 4,5% dari *Gross Domestic Product (GDP)*. Pemerintah

menganggarkan sebagian besar pembiayaan pendidikan, yang dibelanjakan oleh LEAS. Sebesar 17,272 juta *Pounds Sterling* yaitu 83% : 17%. Bagian terbesar pengeluaran sekolah adalah untuk gaji guru-guru, 70% dari belanja keseluruhan. Politeknik yang sekarang menjadi Universitas serta sekolah tinggi lainnya menerima anggaran belanjanya melalui *Polytechnics and College Funding Council* (PCFC). Untuk universitas dan badan-badan penelitian disalurkan melalui *University Funding Council* (UFC). Dana untuk biaya pendidikan guru disalurkan melalui program LEA dan digunakan menurut prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Tersedia dana untuk pendidikan guru-guru yang bertugas mengajar para imigran.

Seluruh biaya Departemen Pendidikan dan LEAS dibagi sebagai berikut: Sekolah dasar dan menengah 61%, pendidikan tinggi 29%, pusat penelitian 4%, Administrasi 6%. LEAS juga menerima dana dari sumber lain, sekitar 50% dari dana itu digunakan sendiri oleh LEAS untuk pendidikan di wilayahnya.

Belanja pendidikan dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan seluruh anggaran pemerintah Inggris pada tahun 1990 kurang lebih 14.1% sama dengan presentase 10 tahun sebelumnya. Jumlah ini kira-kira 4,5% dari *Gross Domestic Product (GDP)*. Sungguh pun pemerintah menganggarkan sebagian besar sumber pembiayaan pendidikan, dana ini pada dasarnya dibelanjakan oleh LEAS. Pengeluaran oleh LEAS diperkirakan sebesar 17,272 juta *Pounds Sterling* dibandingkan dengan pengeluaran di pusat sebesar 3,647 juta *Pounds Sterling* yaitu 83% : 17%.¹⁸

Bagian terbesar pengeluaran sekolah adalah untuk gaji guru-guru dengan proporsi kurang lebih 70% dari belanja keseluruhan. Politeknik yang sekarang menjadi universitas serta sekolah tinggi lainnya menerima anggaran belanjanya melalui *Polytechnics and College Funding Council* (PCFC). Dana untuk Universitas dan badan-badan penelitian disalurkan melalui *University Funding Council* (UFC). Dana untuk biaya pendidikan guru-guru disalurkan melalui program LEA dan digunakan menurut prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Juga tersedia dana untuk pendidikan guru-guru yang bertugas mengajar para imigran. Seluruh biaya Departemen Pendidikan dan LEA dibagi sebagai berikut: untuk sekolah – 61% untuk pendidikan tinggi termasuk akademi -29%; pusat-pusat penelitian 4%; dan untuk biaya administrasi -5,7%. Pada tahun 1991, sebuah proposal diajukan untuk memberikan status lembaga sosial kepada seluruh sekolah. Ini memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mendapatkan pembebasan pajak atas asset-aset pendidikan. LEA juga menerima dana dari sumber-sumber lain, dan kira-kira 50% dari dana itu digunakan sendiri oleh LEAS untuk keperluan pendidikan dalam wilayahnya. Pengalokasian dana pendidikan disisihkan dari pendapatan Negara secara keseluruhan sebagaimana direfleksikan oleh rasio GNP dan anggaran pendidikan. Inggris dalam tahun 1990, misalnya menyisihkan 4,9%, Australia 5,3%, Amerika Serikat 5,2%, Kuba 6,6%, dan Korea Selatan 3,5%.

¹⁸ Fattah Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* Bandung: Rosda Karya, cet ke-1, 2000.

Dengan keadaan lokasi seperti itu, pendidikan Inggris masih tersiut-tersiut dan mengeluh kekurangan dana pendidikannya. Indonesia, untuk sekedar perbandingan, pada tahun 1991 mengalokasikan 1,1% dari GNP; Inggris 5,3% dan Indonesia 1,4% dalam tahun 1995. Komitmen pada pendidikan juga tergambar pada rasio anggaran pemerintah secara keseluruhan dengan anggaran pendidikan. anggaran Inggris tahun 1995 adalah 11,6% dari total anggaran pemerintah, sedangkan Indonesia 7,8% pada tahun yang sama. Saudi Arabia, Iran dan Korea Selatan melebihi Negara-Negara besar seperti Amerika Serikat, Canada, Australia, Perancis, Jepang, yaitu 17,7% (Saudi), 17,8% (Iran), dan 17,5% (Korea). Ironisnya Inggris, kata sebagian ahli pendidikan, kecaman yang sangat keras ditujukan kepada kegagalan pendidikan, tetapi dalam perjuangan anggaran pendidikan sering banyak anggota parlemen yang tidak mendukung.

Dalam hal pembiayaan pendidikan, badan yang dinamakan *The Education Funding Agency (EFA)* bertanggung jawab terhadap pendanaan untuk pendidikan usia antara 3 sampai dengan 19 tahun. Badan ini erat kaitannya dengan Departemen Pendidikan (DfE), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk pendanaan dan pengawasan pelatihan (*skills training*) dan pendidikan lanjutan (*further education*) untuk usia di atas 19 tahun, dibebankan kepada *Skills Funding Agency* yang merupakan rekan kerja Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan (BIS). Lembaga tingkat Nasional yang bertanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan tingkat tinggi (*higher education*) adalah lembaga *Higher Education Funding Council for England (HEFCE)*. Biaya langsung (*direct cost*) untuk pembiayaan riset spesifik didanai oleh *UK Research Councils*, yang menurut undang-undang berada di bawah pengawasan BIS dengan wilayah pendanaan mencakup seluruh Inggris.

Pada tahun ajaran 2009/2010 mahasiswa membayar biaya pendidikan ditetapkan pada maksimum £ 3225 per tahun. *income, with the state paying all fees for students from the poorest backgrounds*. Biaya ini akan dibayarkan setelah lulus kontinjensi pada pencapaian tingkat tertentu dari penghasilan, dengan Negara membayar semua biaya bagi siswa dari latar belakang miskin. Inggris siswa umumnya berhak untuk pinjaman mahasiswa untuk pemeliharaan biaya Pascasarjana bervariasi tetapi umumnya lebih dari biaya sarjana tergantung pada derajat dan universitas. Ada banyak beasiswa (diberikan kepada pemohon berpenghasilan rendah) untuk mengimbangi biaya sarjana, dan untuk mahasiswa pascasarjana, beasiswa penuh tersedia untuk sebagian besar mata pelajaran yang diberikan kompetitif.

Berbeda pengaturan berlaku untuk belajar bahasa Inggris belajar di Skotlandia dan Skotlandia / Welsh mahasiswa yang belajar di Inggris. Siswa dari luar Inggris atau Uni Eropa menghadiri universitas Inggris dibebankan jumlah yang berbeda, sering di wilayah sebesar £ 5000 – £ 20.000 per tahun untuk gelar sarjana dan pascasarjana. Jumlah yang sebenarnya berbeda oleh lembaga dan subyek, dengan subyek lab based jumlah yang lebih besar.

G. SEJARAH PENDIDIKAN INGGRIS

Sejarah berdirinya lembaga pendidikan di United Kingdom atau Kerajaan Inggris (selanjutnya disebut Inggris) sudah mulai tercatat sejak akhir abad ke-6, yaitu dalam periode sejarah Inggris Anglo-Saxon. Sekolah yang diperkirakan pertama berdiri di Inggris adalah sebuah *grammar school* yang didirikan pada tahun 598 di Canterbury, England. Pendidikan di Inggris menjadi rujukan pertama bagi beberapa universitas di berbagai Negara di dunia. Universitas Oxford adalah satu-satunya Universitas pertama dan tertua di Inggris, dengan dibuktikan mulai adanya pembelajaran sejak tahun 1096 dan mulai berkembang dengan pesat pada tahun 1167. Kemudian pada tahun 1209, beberapa ahli dan ilmuwan memutuskan untuk pindah dari oxford ke Cambridge yang selanjutnya menjadi cikal berdirinya Universitas Cambridge. Pada tahun 1209, beberapa orang cendekia dari Universitas Oxford memutuskan hengkang dan pindah ke Cambridge, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Cambridge.¹⁹

Imigrasi di Inggris memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap sistem pendidikan, dimana kelompok minoritas dan etnis, kebanyakan terkonsentrasi di tempat tertentu dan bagian yang sangat luas dalam kota, terutama di London. Hal ini menuntut perhatian khusus mengenai keperluan mereka terutama menyangkut bahasa dan budaya yang berbeda. Tuntutan kebahasaan ini sangat terasa di Daerah Wales dan Scotland, karena bahasa asli penduduk di Daerah itu (*Scottish English*) dan *Scottish Gaelic* atau bahasa *Celtic* masih dipakai dan diajarkan di beberapa sekolah.²⁰

Selama abad pertengahan sekolah didirikan untuk mengajarkan tata bahasa latin , sedangkan magang adalah cara utama untuk memasukkan pekerjaan praktis. Dua universitas didirikan: di universitas oxford, diikuti oleh *University of cambridge* . Sebuah sistem direformasi dari “sekolah tata bahasa bebas” didirikan pada masa pemerintahan Edward VI dari Inggris. Pada abad ke-19 gereja Inggris bertanggung jawab untuk sebagian besar sekolah sampai pembentukan gratis, pendidikan wajib menjelang akhir abad itu. *University college london* didirikan, diikuti oleh *king’s college london* , dua perguruan tinggi membentuk universitas london. Durham universitas juga didirikan pada awal abad 19. Menjelang akhir abad tersebut sebagai ” bata merah “universitas didirikan.²¹

1. Awal Periode

Di Inggris Tudor Raja Edward VI direorganisasi sekolah tata bahasa atau dilembagakan yang baru sehingga ada sistem Nasional “sekolah tata bahasa bebas” yang dalam teori terbuka untuk semua dan menawarkan biaya kuliah gratis bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya.²² Sebagian besar anak-anak miskin

¹⁹ Siti Jubaedah. *Kurikulum Pendidikan Sejarah Di Inggris*. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia: Vol. 3, No.12 Desember 2018

²⁰ Nur, Syah Agurtiar. 2001. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung.

²¹ Sejarah Inggris <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Inggris>

²² http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_education_in_England

tidak menghadiri sekolah tersebut sejak tenaga kerja mereka yang bernilai ekonomis untuk keluarga mereka.

Pada 1563, *statuta artificers* dan *apprentices* telah disahkan untuk mengatur dan melindungi sistem magang, melarang siapa pun dari praktek perdagangan atau kerajinan tanpa terlebih dahulu menjalani tahun periode 7 sebagai magang untuk menguasai (meskipun dalam praktek putra orang bebas bisa bernegosiasi istilah lebih pendek).

Sampai akhir abad kesembilan belas, kawan-kawan semua Universitas dan banyak guru sekolah yang diharapkan atau diharuskan untuk berada dalam perintah suci. *School mistresses* biasanya diajarkan tiga rs (membaca, menulis dan 'rithmetic) di sekolah *dame*, sekolah amal, atau sekolah desa informal).

2. Abad ke-18

Pada tahun-tahun awal revolusi industri pengusaha mulai menolak pembatasan dari sistem magang dan keputusan hukum menetapkan bahwa *statuta apprentices* tidak berlaku untuk perdagangan yang tidak ada saat disahkan pada 1563, sehingga banyak termasuk 18 industri abad baru. Robert Raikes memulai sekolah minggu gerakan, memiliki bisnis penerbitan mewarisi dari ayahnya dan menjadi pemilik *gloucester journal* di 1757. Gerakan ini dimulai dengan sebuah sekolah untuk anak-anak di Daerah kumuh. Raikes telah terlibat dengan mereka yang dipenjarakan di Daerah miskin hukum (bagian dari penjara pada waktu itu) dan melihat wakil yang akan lebih baik dicegah daripada diobati. Dia melihat sekolah sebagai intervensi terbaik. Waktu terbaik adalah hari minggu sebagai anak-anak sering bekerja di pabrik-pabrik lainnya enam hari. Para guru terbaik yang tersedia, adalah orang awam. Buku ini adalah al kitab, dan dimaksudkan kurikulum awalnya dimulai dengan belajar membaca dan kemudian pindah ke katekismus.²³

3. Abad ke-19

Sebelum abad ke-19, ada sekolah sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka yang ada dijalankan oleh gereja, untuk gereja, menekankan pendidikan agama. gereja Inggris menolak upaya awal bagi Negara untuk menyediakan pendidikan sekuler, dan sekolah-sekolah gereja masih merupakan bagian integral dari sistem sekolah negeri.

Pada tahun 1814, magang wajib oleh perjanjian dihapuskan. Pada 1831, sekolah minggu di Inggris adalah melayani mingguan untuk 1.250.000 anak-anak, sekitar 25% dari populasi seperti sekolah-sekolah ini mendahului Negara bagian pertama pendanaan sekolah bagi masyarakat umum, mereka kadang-kadang dilihat sebagai pelopor dengan arus sistem sekolah bahasa Inggris.

Pada 1837, para *whig* mantan Tuhan Kanselir Henry Brougham disajikan tagihan untuk pendidikan umum. Pada tahun 1839 pemerintah hibah untuk pembangunan dan pemeliharaan sekolah dialihkan ke badan sukarela, dan menjadi tergantung pada inspeksi memuaskan. Di tahun 1840 sekolah *grammar* UU

²³ <https://tristek.wordpress.com/2012/02/11/sejarah-pendidikan-negar-inggris/>

memperluas *grammar school* kurikulum dari studi klasik untuk memasukkan ilmu pengetahuan dan sastra.

4. Pertengahan pertama abad ke-20

Dari april 1900 sd lebih tinggi yang diakui, yang menyediakan pendidikan dari usia 10 sampai 15.

a. Balfour UU

Dewan sekolah dihapuskan pada tahun 1902 dan diganti dengan otoritas pendidikan lokal, yang masih digunakan sampai hari ini. *the 'balfour'* 1902 undang-undang pendidikan menciptakan otoritas pendidikan lokal (*lea*), yang mengambil alih tanggung jawab untuk sekolah papan dari sekolah papan. *Grammar schools also became funded by the lea* tindakan itu penting tertentu karena diperbolehkan untuk semua sekolah, termasuk sekolah keagamaan, yang akan didanai melalui tarif (pajak Daerah).

b. Undang-undang fisher tahun 1918

Fisher Undang-Undang pendidikan 1918 membuat pendidikan menengah wajib sampai dengan usia 14 dan memberikan tanggung jawab untuk sekolah menengah kepada Negara. Menurut undang-undang, banyak sekolah dasar yang lebih tinggi dan namun, kebanyakan anak menghadiri dasar (sd) sekolah sampai usia 14, dari pada pergi ke sekolah terpisah untuk pendidikan menengah.

c. Spens dan laporan norwood

Sebuah laporan tahun 1938 sebuah komite diketuai oleh Will Spens, mantan wakil Rektor dari Universitas Cambridge, dianjurkan masuk ke sekolah tata bahasa dan teknis didasarkan pada pengujian kecerdasan. Hal ini diikuti oleh laporan Norwood tahun 1943 yang menganjurkan "*tripartit*" divisi pendidikan sekunder yang terkandung dalam undang-undang pendidikan 1944.

d. 1944 undang-undang

Pendidikan pada 1944, berkaitan dengan Inggris dan Wales, yang ditulis oleh *rab butler* dan kadang-kadang dikenal sebagai "Undang-Undang *Butler*" ini didefinisikan perpecahan modern antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada usia 11, dan disediakan untuk meningkatkan sekolah meninggalkan usia ke 15. Undang-undang mendirikan "sistem *tripartite*". Hal ini mendefinisikan sekolah dasar sebagai tempat pendidikan untuk berbakat akademis (dengan pintu masuk ditentukan oleh ujian seleksi. Awalnya ini adalah "beasiswa" ujian, yang kemudian digantikan oleh seorang "*grading test*" yang kemudian digantikan oleh 11+ pemeriksaan dihadiri. Anak-anak yang tidak lulus seleksi ujian sekolah teknik atau sekolah modern sekunder.

5. Periode pasca-perang

Pendidikan dibuat wajib untuk usia 15 di 1947. Pada 1944 UU itu juga merekomendasikan paruh waktu wajib belajar bagi semua orang muda sampai usia

18, tetapi ketentuan ini dijatuhkan agar tidak membebani anggaran belanja perang-pasca (seperti yang terjadi sama dengan uu tahun 1918).

Sistem tripartit menjadi kontroversial di tahun pasca perang. Kritikus mengutuknya sebagai elitis dan pembela menyatakan bahwa sekolah tata bahasa memungkinkan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang baik melalui jasa dari pada melalui pendapatan keluarga. Di beberapa Daerah, terutama yang dari *london county council*, sekolah yang komprehensif telah diperkenalkan. Mereka tidak memiliki tes masuk dan terbuka untuk semua anak tinggal di Daerah tangkapan air sekolah. Namun, meskipun dukungan tentatif untuk '*multilateralisme*' di sekunder, dan keinginan untuk meningkatkan standar modern sekunder dengan lembaga swasta, dari menteri pendidikan Ellen Wilkinson, mayoritas buruh anggota parlemen lebih peduli dengan penerapan Undang-Undang 1944; nya penerus George Tomlinson melihat ini melalui, walaupun segi teknis sekunder tetap terbelakang.

6. Di bawah pemerintah konservatif 1979-1997

Setelah pemilu 1979, yang konservatif pihak kembali kekuasaan di bawah Margaret Thatcher pada periode awal itu membuat dua perubahan utama: Baru *vocationalism* diperluas (buruh telah melakukan beberapa upaya kecil terlebih dahulu, tetapi diperluas konservatif itu cukup).hal ini dipandang sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran pemuda yang tinggi, yang dianggap sebagai salah satu penyebab sporadis kerusakan pada akhir tujuh puluhan. Para pemuda peluang program adalah skema utama, yang ditawarkan kepada remaja berusia 16 sampai 18 tahun. Sudah diperkenalkan pada tahun 1978 di bawah partai buruh pemerintah James Callaghan, diperluas pada tahun 1980 di bawah konservatif pemerintah Margaret Thatcher, dan berlari sampai tahun 1983 ketika digantikan oleh pemuda pelatihan skema

H. SOSIOLOGI PENDIDIKAN DI INGGRIS

Departemen pendidikan adalah departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang memengaruhi hajat hidup orang banyak di Inggris sampai dengan usia 19 tahun, termasuk pendidikan. Sekolah-sekolah negeri dihadiri oleh sekitar 93% pelajar di Inggris. Dari jumlah tersebut terdapat minoritas sekolah-sekolah keagamaan, terutama sekolah Katolik dan Gereja Inggris. Meskipun sebagian besar Sekolah Menengah di Inggris adalah sekola komprehensif, di beberapa Daerah juga terdapat sekolah *grammar* yang selektif. Sekitar 7,2% Pelajar Inggris menghadiri sekolah swasta yang didanai oleh swasta. Standar di sekolah negeri dipantau oleh Kantor Sandar Pendidikan, sedangkan di sekolah swasta dipantau oleh Inspektorat Sekolah Independen.²⁴

Keunggulan sistem pendidikan di Inggris yaitu menganut pola *press shcematic*. Itu artinya bahwa kurikulum mata pelajaran yang diajarkan tidak terlalu banyak yang dipelajari dan siswa akan lebih terfokus dan terspesialisasi, sehingga

²⁴ Soelaiman, T. A. F. (2014). Sistem Pendidikan di Inggris (pp hal 15)

akan lebih dapat memahami dan memaknai apa yang diajarkan. Selain itu siswa-siswa dalam belajar tidak seperti banyak mendapatkan tekanan selama bersekolah. Waktu studi di sana lebih singkat daripada di Indonesia. Sekolah bagi mereka adalah tempat untuk bermain, berkreasi, dan berdiskusi. Di Inggris biaya sekolah sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Guru-guru yang ada di sana juga sangat berkompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualifikasi pendidikan di Inggris dikenal dan diakui secara internasional. Standar kualitas institusi Inggris adalah salah satu yang terbaik di dunia. Metode pengajaran yang digunakan bertujuan untuk mempersiapkan murid dengan keterampilan yang diperlukan di pasar global. Sekolah menyediakan berbagai macam jurusan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid.

Standard mutu pendidikan sangat dijamin oleh pemerintah, oleh karena itu kualifikasi Inggris dikenal dan dihargai di seluruh dunia dengan kualitas tinggi. Semua level pendidikan, terutama *Undergraduate* dan *Postgraduate Degree* harus melalui otorisasi DfES (*Department of Education & Skills*) maupun *Royal Charter of Act of Parliament*. Inggris merupakan salah satu Negara yang menjadi tujuan untuk melanjutkan studi. Baik bagi para pemburu beasiswa, maupun yang studi dengan biaya sendiri Di Inggris, terdapat lebih dari 170 institusi pendidikan dan lebih dari 500 lembaga pendidikan lanjutan yang menawarkan berbagai pilihan program kuliah dan mata kuliah yang mungkin tak ditemukan di Institusi pendidikan di Negara lainnya. Standar mutu juga telah ditetapkan untuk menjamin diperolehnya derajat pendidikan tertentu. Contohnya, semua Universitas dan kolese di Inggris yang memberikan gelar, sebelumnya harus sudah mendapatkan wewenang khusus untuk memberikan gelar oleh Pemerintah Inggris Raya. Program kuliah dan institusi juga dipantau dan dievaluasi secara teratur.²⁵

Kolese di Inggris Raya memberikan rentang tingkatan kualifikasi yang cukup beragam, cenderung lebih santai dibandingkan universitas. Kolese lebih menekankan pada pembelajaran di kelas dan praktik lapangan. Kebanyakan kolese pendidikan tinggi tidak berhak untuk memberikan gelar atas nama mereka sendiri. Oleh karena itu, lazimnya mereka bekerja sama dengan sebuah universitas yang berhak untuk memberikan gelar.

I. LETAK GEOGRAFIS INGGRIS

Secara astronomis Inggris terletak diantara 50° LU – 60° LU dan 8 BB° – 2° BT. Secara geografis terletak di sebelah barat daratan Eropa. Meninjau dari lingkup yang lebih luas lagi, letaknya sangat strategis karena berada di jalur transportasi dan perdagangan antara Eropa dan benua Amerika. Luas Inggris ±Km². Inggris merupakan Negara kepulauan yang terdiri atas wilayah England, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara, dan ditambah sejumlah kepulauan Kanal, Orkney, Skotland, dan Hebrides. Jarak dari ujung utara ke selatan sejauh 965 km dan dari timur ke barat sejauh 515km. Luas wilayah Inggris dan Irlandia Utara adalah km².

²⁵[https://edukasi.kompas.com/read/2011/07/12/08532155/Yang.Perlu.Diketahui.s
oal.Pendidikan.di.Inggris](https://edukasi.kompas.com/read/2011/07/12/08532155/Yang.Perlu.Diketahui.s
oal.Pendidikan.di.Inggris)

Dan kedudukannya dengan benua Eropa dipisahkan oleh selat Dover sejauh 31 km. Wilayah Negara Inggris merupakan Negara maritim 100% yang terletak di pinggir Timur samudra Pasifik.²⁶

Inggris merupakan pulau atau kepulauan di lepas pantai barat daratan Eropa dan juga karena letak lintangnya, maka atmosfer Inggris memiliki kondisi iklim yang dipengaruhi laut serta arus laut panas (*Gulf Stream*) yang berasal dari *equator* utara di samudera Atlantik. Dampak arus laut panas tersebut sangat kondusif bagi kehidupan di kawasan ini. Jika kita melihat peta Daerah iklim di Eropa, maka Inggris dan kawasan pantai Eropa Barat bahkan Eropa Utara memiliki iklim yang disebut Iklim Laut Pantai Barat. Ciri iklim tersebut ialah pengaruh laut dominan; musim *winter*-nya nyaman dan *summer*-nya sejuk; hujan jatuh sepanjang tahun dan pada *winter* cenderung berawan tebal dan berkabut; siang hari pada *winter* gejalanya pendek, berawan dan basah; *summer* cerah dan nyaman serta siang hari gejalanya relatif lebih panjang. Gejala seringnya hujan jatuh baik di Inggris maupun di Daerah iklim ini dibuktikan oleh tercatatnya beberapa kota sebagai berikut: London (164 hari hujan dalam satu tahun), Scotland dan Shetland (260 hari hujan setahun), Paris (188 hari hujan setahun). Secara umum, Inggris maupun kawasan pantai Barat Eropa cukup memiliki iklim yang nyaman dan kondusif bagi aktivitas kehidupan dibandingkan Negara-Negara di kawasan Eropa lainnya.

Wilayah yang saat ini bernama Inggris pertama kali dihuni oleh manusia modern selama periode Paleolitikum, namun nama England ini berasal dari kata *Angles*, yang merupakan salah satu suku Jermanik yang menetap di sana pada abad ke-5 dan ke-6. Inggris menjadi Negara yang bersatu pada tahun 927 M, dan sejak Zaman Penjelajahan yang dimulai pada abad ke-15, Inggris telah memberikan pengaruh budaya dan hukum yang signifikan ke berbagai belahan dunia. Bahasa Inggris, Gereja Anglikan, dan hukum Inggris-yang menjadi dasar sistem hukum umum bagi Negara lain di seluruh dunia-berasal dan dikembangkan di Inggris, dan sistem parlementer Negara ini juga telah banyak diadopsi oleh Negara-Negara lain. Revolusi Industri yang dimulai pada abad ke-18 menjadikan Inggris sebagai Negara industri pertama di dunia. Royal Society Inggris juga berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar sains eksperimental modern terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Inggris mempunyai kebudayaan yang sudah sangat terkenal di dunia, terutama seni musik dan seni rupa. Pusat kebudayaan terkenal terdapat di London. Di kota itu terdapat museum tua, yaitu *The Victoria and Albert Museum*.²⁷

Inggris merupakan pulau atau kepulauan di lepas pantai barat daratan Eropa dan juga karena letak lintangnya, maka atmosfer Inggris memiliki kondisi iklim yang dipengaruhi laut serta arus laut panas (*Gulf Stream*) yang berasal dari *equator* utara di samudera Atlantik. Dampak arus laut panas tersebut sangat kondusif bagi

²⁶ Farida Johan " Inggris " Letak,luas, Batas, Keadaan Alam, Iklim, Penduduk, Perekonomian, Sosial Budaya, Hubungan Dengan Negara Lain.
<https://slideplayer.info/slide/13208543/>

²⁷ Ahmad Rifa'i. https://www.academia.edu/35449223/Makalah_Negara_Inggris

kehidupan di kawasan ini. Jika kita melihat peta Daerah iklim di Eropa, maka Inggris dan kawasan pantai Eropa Barat bahkan Eropa Utara memiliki iklim yang disebut Iklim Laut Pantai Barat. Ciri iklim tersebut ialah pengaruh laut dominan; musim *winter*-nya nyaman dan *summer*-nya sejuk; hujan jatuh sepanjang tahun dan pada *winter* cenderung berawan tebal dan berkabut; siang hari pada winter gejalanya pendek, berawan dan basah; *summer* cerah dan nyaman serta siang hari gejalanya relatif lebih panjang. Gejala seringnya hujan jatuh baik di Inggris maupun di Daerah iklim ini dibuktikan oleh tercatatnya beberapa kota sebagai berikut: London (164 hari hujan dalam satu tahun), Scotland dan Shetland (260 hari hujan setahun), Paris (188 hari hujan setahun). Secara umum, Inggris maupun kawasan pantai Barat Eropa cukup memiliki iklim yang nyaman dan kondusif bagi aktivitas kehidupan dibandingkan Negara-Negara di kawasan Eropa lainnya.

Sebagian besar Inggris terdiri dari dataran rendah. Kota besar termasuk London, Birmingham, Manchester, Leeds, Sheffield, Liverpool, Bristol, Nottingham, Leicester, dan Newcastle upon Tyne berkembang di dataran rendah. Tidak ada puncak melebihi 1000 mdpl di Inggris. Di Inggris terdapat terowongan terkenal yakni terowongan Channel yang menghubungkan Britania Raya dengan Perancis.

Sebagian besar Wales bergunung-gunung, puncak tertingginya ialah Snowdon, pada ketinggian 1.085 mdpl. Di utara daratan utama ialah pulau Anglesey. Kota terbesar dan ibukotanya ialah Cardiff, terletak di selatan Wales. Wilayah metropolitan lainnya termasuk Swansea, Newport, dan Wrexham.

Fisiografi Skotlandia bervariasi, dengan dataran rendah di selatan dan timur dan dataran tinggi di utara dan barat, termasuk Ben Nevis, pegunungan tertinggi di Britania Raya (1.343m). Banyak lengan lautan dalam, *firth* dan *loch* yang dalam. Banyak pulau di utara dan barat Skotlandia yang termasuk, terutama Kepulauan Hebrida, Orkney dan Shetland, juga pulau kecil tak berpenghuni Rockall, meski pernyataan ini dipertentangkan. Kota-kota utama ialah Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, dan Dundee. Sedangkan Irlandia Utara, yang menyusun bagian timur laut Irlandia, paling berbukit. Kota-kota utamanya ialah Belfast dan Londonderry.

J. PEREKONOMIAN NEGARA INGGRIS

Berdasarkan indikator di atas pada awal pembahasan, jelas menunjukkan bahwa Inggris merupakan salah satu Negara maju di dunia. Sejak digulirkannya revolusi industri di Inggris, perekonomiannya semakin berkembang. Sektor perekonomian penting di Inggris antara lain: industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan.

Perekonomian Inggris merupakan salah satu perekonomian terbesar di dunia, dengan **PDB per kapita** rata-rata £ 22.907. Inggris menerapkan sistem ekonomi pasar campuran; yang mengadopsi sebagian besar prinsip-prinsip **pasar bebas**, tetapi tetap mempertahankan infrastruktur kesejahteraan sosial. **Mata uang resmi** di Inggris adalah **pound sterling** (**ISO 4217** GBP). Perpajakan di Inggris cukup kompetitif bila dibandingkan dengan kebanyakan Negara Eropa lainnya. Pada tahun 2009, tarif dasar pajak perseorangan adalah 20% dengan penghasilan

kena pajak mencapai £ 37.400, dan 40% bagi yang berpenghasilan di atas jumlah tersebut.²⁸

Inggris adalah salah satu yang ekonominya paling kuat, *produc domestic bruto* (PDB) berada di urutan terdepan di Negara-Negara Eropa. Inggris adalah Negara yang sangat maju dan merupakan produsen penting tekstil dan produk kimia. Sejak 1990-an, sektor jasa keuangan telah memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian Inggris dan Kota London adalah salah satu pusat terbesar di dunia keuangan. Proporsi pembuatan Inggris agak menurun dalam ekonomi Nasional, sedangkan proporsi industri jasa dan energi semakin naik, khususnya industri bisnis, industri moneter dan industri asuransi mencapai perkembangan pesat. Pada tahun 2002, ekonomi Inggris nomor 4 terbesar di dunia, adalah Negara investor nomor 2 terbesar di dunia.

Inggris pada dasarnya adalah sebuah Negara industri. Namun, sejak tahun 1970-an terjadi penurunan dalam sektor-sektor industri berat dan manufaktur dan terjadi peningkatan dalam sektor industri jasa. Sektor pariwisata juga menjadi andalan bagi perekonomian Inggris. Sektor ini menarik jutaan wisatawan manca Negara ke Inggris setiap tahunnya. Ekspor Inggris didominasi oleh obat-obatan, mobil (meskipun sebagian besar perusahaan otomotif Inggris seperti Rolls-Royce, Lotus, Jaguar dan Bentley saat ini dimiliki oleh asing), minyak mentah yang dihasilkan dari penambangan minyak di Laut Utara mesin pesawat, serta minuman beralkohol. Sektor pertanian sudah sangat intensif dan termekanisasi. Sektor ini memproduksi sekitar 60% bagi kebutuhan makanan dan menyerap sekitar 2% angkatan kerja di Inggris. Dua pertiga produksi dikhususkan untuk sektor peternakan, selebihnya untuk pertanian.

Dilihat dari sudut pandang sejarah, Inggris dikenal luas oleh publik dunia dengan statusnya yang merupakan Negara penjajah terbesar di dunia dengan menggunakan sistem pembangunan ekonomi pasar di Negara jajahannya dan berbagi keuntungan dengan Sang Penjajah. Ini sangat menggambarkan sifat kapitalisnya yang mengabdikan pasar, ini lebih dikenal dengan istilah Nekolim, Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme.

1. Perindustrian

Persebarannya:

- a) Industri berat (wilayah *black country*) berpusat di Birmingham.
- b) Industri lokomotif (*Glasgow*)
- c) Galangan (*Peasly, Greenock, New Caste, London*)
- d) Industri mobil dan pesawat terbang (*London, Birmingham, Oxford*)
 - Industri kimia (London)
 - Industri ban (Birmingham)
 - Industri elektronik, alat rumah tangga (London, Leeds, Sheffield)
 - Industri tekstil (Lancashire, Glasgow, Manchester) bahan dasar kapal diimpor dari AS, Brazil, India, Mesir, Sudan, Afrika Selatan.
 - Industri wol (Bradford, Leeds)

²⁸ "Tax in England" AdviceGuide.org.uk

- Industri Sutra tiruan (Yorkshire dan Lancashire)
2. Pertambangan
 Inggris memiliki deposit batu bara dalam jumlah besar. Pusat-pusat penambangan batu bara di Skotlandia, yaitu: Lanarkshire, Pegunungan Pennine (Pegunungan *Cumberland*, *Northumberland*, dan *Durham*) di Newcastle dan sekitarnya, *Stafford* (*Voncentry* Selatan), Pegunungan *Cambrian* Selatan (*Swansea-Rhondda*), dan *Wales* Selatan.
 Pegunungan *Cambrian* Utara menghasilkan tembaga, timah hitam, seng, dan mangan. Dari pegunungan Pennine dan *Cambrian* dihasilkan timah hitam, tembaga, biji besi, dan seng, sedangkan di Midlands terdapat tambang timah hitam, biji besi, dan tembaga.
 3. Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
 Hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang penting di Inggris:
 - a. Kentang dan sayur mayor terdapat di Lancashire
 - b. Gandum, barley, dan bit gula terdapat di Pegunungan Anglia Timur, Kent, Worcester, Devon.
 - c. Susu dan mentega terdapat di England
 - d. Ternak babi dengan ayam terdapat di Yorkshire dan Lancashire
 - e. Hasil hutan terdapat di England, Wales, Skotlandia, dan Irlandia.
 - f. Ikan haring dan cod terdapat di perairan laut utara dan Samudra Atlantik.
 4. Perdagangan
 Barang-barang ekspor Inggris adalah mesin-mesin, barang kimia, wol, tekstil, sintesis, mobil, truk, plat-plat baja, lokomotif, pesawat terbang, mesin pertanian, dan alat-alat elektronik. Sedangkan barang-barang impornya adalah minyak bumi, kapas, karet, tembakau, belerang, dan biji besi.
 5. Perhubungan dan Pariwisata
 Di Inggris, perhubungan antar benua dipusatkan di London. Perhubungan antar pulau dan antar pesisir dipusatkan di selat Calais dan Selat Saint George. Pusat stasiun kereta api London dihubungkan dengan Daerah sekitarnya oleh kereta api bawah tanah. Sedangkan dengan daratan Perancis dihubungkan oleh jalan raya bawah laut. Lapangan terbang internasional Inggris adalah Corydon dan Heathrow di London. Obyek pariwisata Inggris, baik domestik maupun luar negeri adalah P. Weight, Res Fyrod di pantai Skotlandia dan Wales.

Revolusi industri telah menimbulkan perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat Inggris. Revolusi Industri memberikan bermacam dampak positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan ilmu pengetahuan. Secara umum, dampak revolusi industri bagi kehidupan penduduk Inggris antara lain sebagai berikut.

1. Bidang Sosial

Pengaruh Revolusi dalam bidang Industri bagi Inggris terlihat dari arus urbanisasi yang semakin besar di kota-kota Industri Masyarakat di luar Inggris banyak yang tertarik untuk tinggal dan mencari nafkah di Inggris. Akibatnya pengangguran dan tindak kriminalitas banyak muncul dan meningkat.

2. Bidang Ekonomi

Pengaruh Revolusi Industri dalam bidang ekonomi ditandai dengan pembangunan Daerah-Daerah industri dilakukan secara besar-besaran. Revolusi industri juga berpengaruh terhadap munculnya kota-kota industri seperti Manchester, Liverpool, dan Birmingham. Kemunculan kota-kota industri tersebut merupakan satu keniscayaan ketika industri berkembang.

Perkembangan pesat dalam bidang industri ternyata tidak hanya bersifat kuantitas melainkan juga berpengaruh terhadap kualitas barang industri yang meningkat tajam. Revolusi industri telah banar-benar mendorong warga Inggris untuk memperbaiki segala sesuatu berhubungan dengan hasil pekerjaan mereka.

3. Bidang Politik

Pembangunan kawasan industri muncul di berbagai kota, sebagian besar masyarakat mulai menikmati dampak dari Revolusi Industri. Penduduk semakin mudah dalam memperoleh kebutuhan dan barang industri. Para pengusaha dan pemilik modal mendapatkan keuntungan yang berlimpah.

Revolusi Industri telah membawa pengaruh yang cukup baik yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup. Namun masalah timbul ketika lahan yang dipakai untuk industri semakin sempit dan semakin sulit untuk dapat menghasilkan bahan baku industri sendiri. Jumlah penduduk meningkat tajam seiring dengan semakin tingginya arus urbanisasi dari para pencari pekerjaan.

Masyarakat yang tidak memiliki keahlian menjadi pengangguran Akibatnya tidak sedikit kejahatan yang terjadi, kriminalitas meningkat. Selain dari itu juga banyak masalah yang dihadapi: upah yang rendah, jaminan sosial yang buruk, jam kerja yang tidak sesuai ditambah lagi kemudian terjadinya pencemaran lingkungan yang terus dan berkepanjangan.

Revolusi Industri menimbulkan dampak yang mendorong terjadinya revolusi sosial yaitu gerakan masyarakat yang berkeinginan mengubah kehidupan masyarakat kepada taraf yang lebih baik. Pemerintah Inggris menanggapi keadaan ini dengan cara mengeluarkan undang-undang Hak Asasi Manusia seperti *Reform Bill 1832*, *Abolition Bill 1832*, dan *Factory Bill 1833*. *Reform Bill* adalah peraturan pemerintah yang berisi tentang hak-hak yang diperoleh pekerja dalam parlemen.

Factory Bill berisi tentang larangan penggunaan tenaga kerja wanita dan anak-anak. Sementara *Abolition Bill* berisi tentang penghapusan perbudakan. Perkembangan tersebut telah mendorong Inggris menjadi kota dengan keadaan kota semakin lama semakin sempit. Para pengusaha dan pemilik modal kemudian mencoba memasuki wilayah desa dan membeli wilayah di pedesaan.

Pengambil alihan tanah di pedesaan ini menyebabkan pengaruh sosial ekonomi. Petani banyak yang kehilangan pekerjaannya sehingga mereka berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan, terbukanya lapangan kerja yang baru, mata pencaharian yang berubah dari seorang petani menjadi peternak atau buruh,

melimpahnya barang-barang kebutuhan, dan terjadi pencemaran di kawasan industri.

Revolusi Industri di Inggris membawa perubahan ekonomi secara mendasar yaitu peningkatan kesejahteraan hidup, terutama bagi golongan kapitalis. Namun di balik berbagai keuntungan yang dihasilkan, Revolusi Industri menyisakan satu permasalahan yaitu kurangnya bahan mentah industri dan melimpahnya hasil industri.

Sejak Inggris menjadi pelopor imperialisme modern, jajahan Inggris di Asia dan Afrika semakin luas dan banyak. Dapat dikatakan bahwa Inggris adalah Negara dengan imperialisme terbesar, karena jajahannya membentang dan terdapat di seluruh penjuru dunia. Dalam rangka mendukung keamanan Daerah jajahannya maka Inggris memperkuat armada lautnya.

Pada periode ini, Inggris merupakan Negara dengan armada lautnya yang tidak tertandingi. Negara-Negara lainnya yang secara geografis berada di Eropa banyak yang mencontoh keberhasilan Inggris, di antaranya Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Negara-Negara tersebut berlomba untuk mendapatkan Daerah jajahan yang potensial. Revolusi Industri telah melahirkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Namun Revolusi Industri juga telah menimbulkan munculnya sifat arogan dan serakah pada umat manusia. Tindakan bangsa yang menjajah bangsa lainnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, padahal munculnya Revolusi Industri ini berangkat dari perkembangan dan pertumbuhan Renaissance dan humanisme yang menjunjung tinggi aspek-aspek kemanusiaan.

Negara Inggris menganut ideologi Sosialisme, Inggris (*United Kingdom*) merupakan Negara kesatuan atau *unitary state* yang terdiri dari Skotlandia, Wales, Inggris, dan Irlandia Utara yang memiliki bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Inggris dikenal sebagai ibu atau pencetus sistem pemerintahan parlementer (*the mother of parliament*) sebab Inggris lah yang membuat sebuah sistem pemerintahan parlemen yang dapat diterapkan dengan baik untuk pertama kali.

Pemerintahan Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dibantu para menteri. Ratu dan Raja Inggris hanyalah kepala Negara yang berfungsi sebagai simbol kenegaraan (simbol kedaulatan, keagungan dan persatuan Negara).

Parlemen atau Dewan Perwakilan terdiri dari dua ruang (bikameral), yakni House of Commons & House of Lord. House of Commons atau disebut juga Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik. House of Lord atau Majelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. House of Commons memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada House of Lord. Negara Inggris menerapkan *Parliament Sovereignty* yang artinya kekuasaan yang sangat besar pada diri parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, (Bandung: Lubuk Agung, 2001),

Ahmad Rifa'i, https://www.academia.edu/35449223/Makalah_Negara_Ingggris

Alfian Erwinsyah. *Manajemen Pembelajaran Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Kualitas Guru*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 5, Nomor 1 : Februari 2017

Arif Rohman, *Pendidikan Komparatif: Menuju Ke Arah Metode Perbandingan Pendidikan Antar Negara*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2010),

BBC (2015), Types of schools, [Online], https://bbc.co.uk/schools/parents/types_of_schools/

Department For Education. *National curriculum: video interviews for schools*. [online]. 2014. [Accessed 22 March 2014].

EURYDICE. National system overview on education systems in Europe . [online]. 2011.

Available from: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurydice/nationalsummary_sheets/047_UK_ENG_EN.pdf

Farida Johan. "Inggris" Letak, luas, Batas, Keadaan Alam, Iklim, Penduduk, Perekonomian, Sosial Budaya, Hubungan Dengan Negara Lain. <https://slideplayer.info/slide/13208543/>

Fattah Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* Bandung: Rosda Karya, cet ke-1, 2000.

Fauzi Soelaiman dan M. Fauzan Adziman, *Sistem Pendidikan di Inggris*, London: Divisi Pendidikan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), 2012

Fauzi Soelaiman. *Sistem Pendidikan di Inggris*. Atdikbu dlond on.com Indonesianembassy, 2014.hal 11

Hannah Goff (2008-03-24). "Call to offer faith class choice" *BBC News website*. British Broadcasting Corporation.

<http://eksis.ditpsmk.net/artikel/ikhtisar-sistem-pendidikan-di-inggris>

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_education_in_England

http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_education_in_primary_and_secondary_education

<http://karyailmu99.blogspot.com/2016/02/potret-sistem-pendidikan-di-inggris.html>

<https://edukasi.kompas.com/read/2011/07/12/08532155/Yang.Perlu.Diketahui.soal.Pendidikan.di.Ingggris>

<https://tristek.wordpress.com/2012/02/11/sejarah-pendidikan-negar-inggris/>

LEGISLATION.GOV.UK. Education Act 2002. [online]. 2002. Available from: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32>

Qualifications and Curriculum Authority (2004). "Religious Education: non-statutory framework" National Curriculum Website. Qualifications and Curriculum Authority.

Sejarah Inggris <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Inggris>

Sheni Asrianti. William The Conqueror: Peranan Duke Of Normandy Di Kerajaan Inggris Tahun 1066-1087. repository.upi.edu, 2016

Siti Jubaedah. *Kurikulum Pendidikan Sejarah Di Inggris*. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia: Vol. 3, No.12 Desember 2018

BAB XIII

KERBEHASILAN PENDIDIKAN NEGARA CHINA

Ferry Kurniawan

ferrypemulutan@gmail.com

A. FALSAFAH PENDIDIKAN CINA

Sikap orang Cina yang mementingkan pendidikan di dalam kehidupannya telah melahirkan sebuah filofis orang Cina mengenai pendidikan dan pendidikan ini telah lama menjaga kekuasaan Cina begitu lama, sampai pada masuknya bangsa asing ke Cina yang akan merubah wajah sistem pendidikan kuno di Cina. Tradisi pemikiran falsafah di Cina bermula sekitar abad ke-6 SM pada masa pemerintahan Dinasti Chou di Utara. *Kon Fu Tze, Lao Tze, Meng Tze* dan *Chuang Tze* dianggap sebagai peletak dasar dan pengasas falsafah Cina. Pemikiran mereka sangat berpengaruh dan membentuk ciri-ciri khusus yang membedakannya dari falsafah India dan Yunani.

Dalam upaya melihat bahwa teori dan kehidupan praktis tidak dapat dipisahkan, kita perlu melihat bagaimana orang Cina memahami hubungan antara teori dan praktek dalam suatu pemikiran yang bersifat falsafah. Kita juga perlu mengetahui bagaimana teori dihubungkan dengan kehidupan nyata. Ada dua perkara yang harus dikaji dan ditelusuri secara mendalam: Pertama, konsep umum tentang 'kebenaran' dalam falsafah Cina; kedua, kemanusiaan yang dilaksanakan dalam kehidupan nyata dan kemanusiaan yang diajarkan para filosof Cina dalam sistem falsafah mereka. Secara umum pula pemahaman terhadap dua perkara tersebut ditafsirkan dari *Konfusianisme*, yaitu ajaran falsafah yang dikembangkan dari pemikiran *Konfusius*. *Konfusianisme* sendiri berkembang menjadi banyak aliran, di antaranya kemudian dikembangkan menjadi semacam agama, dengan kaedah dasar dari ajaran etikanya yang dirujuk pada pandangan atau ajaran *Konfusius*.¹

Sebagai ajaran falsafah pula, *Konfusianisme* telah berperan sebagai landasan falsafah pendidikan di Cina selama lebih kurang 2000 tahun lamanya. Karena itu ia benar-benar diresapi oleh bangsa Cina secara turun temurun selama ratusan generasi. *Konfusianisme* lah yang mengajarkan bahwa antara teori dan praktek tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan individu atau masyarakat. Dalam *Konfusianisme*, seperti dalam banyak falsafah Cina yang lain, pemikiran diarahkan sebagai pemecahan masalah-masalah praktis. Karena itu falsafah Cina cenderung menolak kemutalakan atau pandangan hitam putih secara berlebihan. Kebenaran harus diuji dalam peristiwa-peristiwa aktual dalam panggung kehidupan, dan baru setelah teruji ia dapat diakui sebagai kebenaran.

¹ UNESCO. 2005. *Education for All Global Monitoring Report 2005 - The Quality Imperative*, UNESCO Publishing House.

B. ASPEK KURIKULUM DI NEGARA CHINA

Untuk mengembangkan pendidikan karakter tersebut, maka *Li Lanqing* melakukan reformasi pada kurikulum, buku teks, dan sistem evaluasi dan *testing*. Kurikulum sekolah dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki anak; kurikulum diarahkan untuk memfasilitasi semua potensi yang dimiliki anak agar berkembang secara optimal, melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa melalui diskusi, mendorong pada pengembangan berfikir inovatif, dan pembelajaran yang berkualitas. China dalam sepuluh tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Diperkirakan lebih dari 6.000 mahasiswa asal Indonesia belajar di sejumlah perguruan tinggi di China. Selain kemajuan yang diraih China, alasan mahasiswa asing belajar disana adalah biaya kuliah yang lebih murah dibandingkan biaya kuliah di UK, AS, Australia maupun Singapura. Jurusan yang banyak diambil mahasiswa asing adalah bahasa Mandarin, ekonomi, manajemen dan *Chinese Medical*.

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh *Ling Lanning* (mantan Wakil PM China), berjudul *Education for 1.3 Billion (Pearson Education and China : Foreign Language Teaching & Research Press, 2005)*, China menjalankan reformasi pendidikan yang berhasil membentuk dengan karakter modern. Kebijakannya tentang reformasi pendidikan diinspirasi pengetahuan tentang bahayanya sistem pendidikan yang terlalu menekankan hapalan, *drilling*, cara mengajar yang kaku dan sistem pendidikan yang hanya berorientasi untuk lulus ujian. Ia juga terinspirasi pemikiran *Howard Gardner* tentang *multiple intelligences* dan antusias untuk menerapkannya dalam sistem pendidikan di China. Inikah yang membawa kemajuan bagi China ? Pendidikan di China gratis selama 9 tahun pertama walaupun murid tetap harus mengeluarkan uang untuk membeli buku-buku pelajaran. Selepas tingkat Junior, orang tua harus membiayai sendiri pendidikan anak-anaknya. Ini membuat banyak anak-anak pedesaan atau anak-anak tak mampu untuk bersekolah.²

Setelah tahun 1995 dan 1997, anak-anak di China belajar lima dan lima setengah hari per minggu. Tahun akademik dibagi menjadi 2 semester, yang terdiri dari 9.5 bulan dimulai pada tanggal 1 September dan Maret. Dengan libur musim panas dan bulan Juli dan Agustus dan libur musim dingin pada bulan Januari dan Februari. Semua siswa sekolah dalam berbagai tingkatan tinggal dalam asrama-asrama.

1. Pendidikan Dasar

Anak-anak China memulai pendidikan formal pada usia 3 tahun dengan masuk pra sekolah yang berlangsung selama 3 tahun. Dilanjutkan masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun. Sekolah Dasar berlangsung selama 6 tahun dengan mata pelajaran utama Bahasa China, Matematika, Sejarah, Geografi, Sains, dan

² Wang Wenjing. 2006. *New Curriculum and Teacher Professional Development*. Reference report. (in Chinese).

sebagainya. Selain itu ada juga pendidikan moral dan politik dasar. Dukungan besar juga diberikan untuk pendidikan jasmani.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah dibagi menjadi 2 bagian yaitu pendidikan menengah akademis dan pendidikan menengah kejuruan/khusus/teknik. Sekolah menengah akademis dibagi menjadi dua level, yaitu *junior* dan *senior*. *Level junior* dimulai pada usia 12 tahun dan berlangsung selama 3 tahun. Untuk masuk ke tingkat *senior*, mereka harus lulus tes yang akan menentukan apakah mereka dapat lanjut ke tingkat *senior* atau mengikuti kelas kejuruan. *Level Senior* dimulai pada usia 15 tahun berlangsung selama 2 atau 3 tahun. Di Sekolah Menengah Senior, murid-murid memilih untuk mengikuti kelas sains atau sosial. Lulusannya diarahkan untuk lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional. Olahraga dan politik juga dimasukkan ke dalam kurikulum. Sekolah kejuruan memiliki program antara 2 sampai 4 tahun dan memberikan pelatihan keahlian di bidang pertanian, manajerial, ketenagakerjaan dan teknik. Sekolah teknik menawarkan program 4 tahun untuk melatih siswanya. Sekolah jenis ini diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terlatih.

3. Pendidikan Khusus

China juga memiliki sistem pendidikan khusus untuk anak-anak dengan kemampuan khusus dan untuk anak-anak terbelakang. Anak-anak dengan kemampuan khusus akan diperbolehkan untuk melompat kelas. Anak-anak dengan kemampuan terbatas akan diarahkan untuk mencapai kemampuan standar minimum.

4. Pendidikan Tinggi

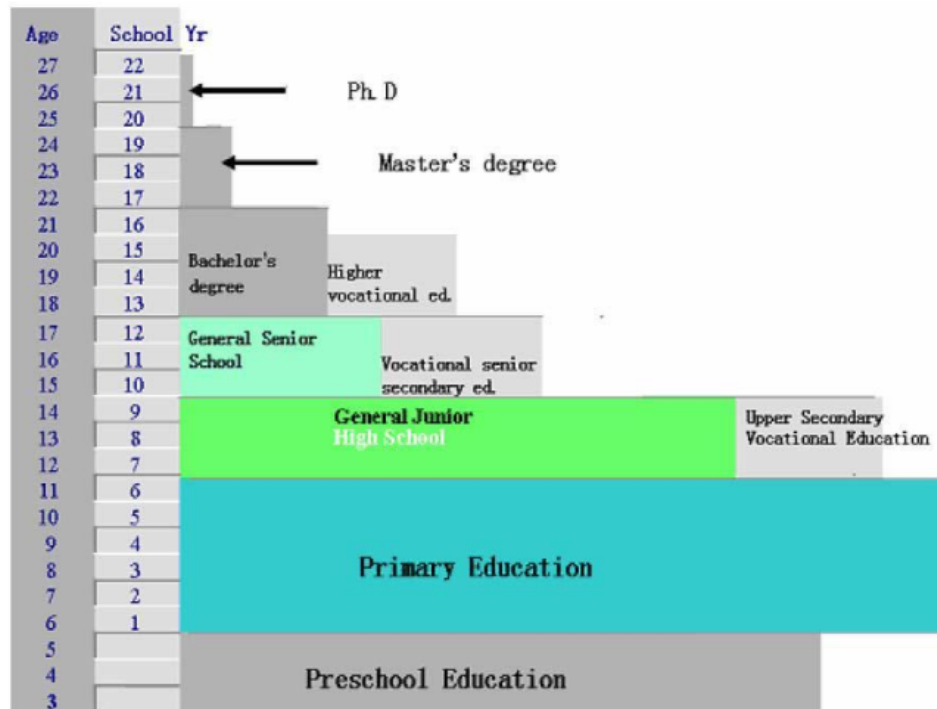
Apapun jenis pendidikan tingginya mereka harus lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional yang berlangsung pada bulan Juli dan diadakan pemisahan antara kelas sosial dan sains. Penempatan jurusan ditentukan oleh hasil tes. Siswa yang mengikuti ujian mendaftar untuk beberapa jurusan yang dipilih. Sistemnya serupa dengan UMPTN di Indonesia.

Pendidikan tinggi menawarkan program akademik dan kejuruan. Sebenarnya ada banyak Universitas dan *college* di China tetapi tingkatan dan kualitasnya sangat bervariasi. Beberapa yang terkenal misalnya *Beijing University* dan *Shanghai's University*. Umumnya siswa harus menjalankan 4-5 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk masuk tingkat *master* dan *doktoral*, mereka juga harus lulus ujian. Selain Universitas ada *college* yang menawarkan 2 atau 3 tahun dengan jenis pendidikan kejuruan yang setara dengan diploma dan dapat meningkatkan gelarnya menjadi sarjana.

Selain dari sisi pendidikan, sukses kebangkitan ekonomi China mungkin juga tak lepas dari pengaruh semangat *entrepreneurship* warganya. Masyarakat China selalu aktif dalam kegiatan ekonomi. Menjadi pegawai atau pekerja kantoran, sedapat mungkin mereka hindari. Berbeda dengan kita yang sangat

menghargai pekerjaan kantoran dan kebanyakan menganggap *entrepreneur* adalah pekerjaan beresiko tinggi.³

Berikut merupakan tingkatan Pendidikan di Negara China



Gambar 13.1 Tingkat Pendidikan di Negara Cina

C. SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA CHINA

Manajemen pendidikan di Cina ialah tersentralisasi, mulai dari *level* pusat, propinsi, kotamadya, kabupaten dan termasuk daerah otonomi setingkat kotamadya. Pendidikan di Cina terdiri atas empat sektor yaitu *basic education*, *technical* dan *vocational education*, *higher education* dan *adult education*. Di samping itu juga terdapat pendidikan prasekolah yang materinya meliputi permainan, olah raga, kegiatan kelas, observasi, pekerjaan fisik, serta aktivitas sehari-hari.⁴

Pendidikan teknik dan vokasional memperoleh tempat dalam masyarakat. Pendidikan ini merupakan indikator penting bahwa Cina mengarah pada proses modernisasi. Kemudian, pendidikan bagi orang dewasa merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan Cina. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

³ "Content Pages of the Encyclopedia of Religion and Social Science". hrr.hartsem.edu. Retrieved October 21, 2018.

⁴ Blum, N.; Fee, E. (2008). "The American Journal of Public Health (AJPH) from the American Public Health Association (APHA) publications". *American Journal of Public Health*. 98(9): 1593. doi:10.2105/ajph.2008.134577. PMC|2509595. PMID|18633073

kualitas orang-orang dalam masyarakat dan secara langsung akan menumbang pada pengembangan sosio ekonomis penduduk.

Untuk memperoleh guru-guru yang bermutu maka pemerintah mendorong lulusan sekolah menengah yang berbakat untuk memasuki lembaga pendidikan guru. Hal ini juga terdapat perbedaan persepsi dimana kalau di Indonesia, para pelajar, apalagi yang berotak cerdas, kurang terosebsi untuk menjadi guru, kecuali berlomba untuk memperoleh pendidikan di Universitas bergengsi di Pulau Jawa.

endidikan di China gratis selama 9 tahun pertama walaupun murid tetap harus mengeluarkan uang untuk membeli buku-buku pelajaran. Selepas tingkat *Junior*, orang tua harus membiayai sendiri pendidikan anak-anaknya. Ini membuat banyak anak-anak pedesaan atau anak-anak tak mampu untuk bersekolah.

Pendidikan merupakan jendela ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan setiap orang. Setiap negara memiliki sistem untuk memajukan para pelajarnya agar memiliki ilmu dan daya saing yang kuat di bidangnya. Salah satunya Negara China atau sering disebut sebagai Negeri Tirai Bambu. China dikenal sebagai Negara terbesar di Benua Asia dan terbesar ke tiga di dunia. Selain itu, Negara ini juga dikenal menjadi salah satu Negara dengan sistem pendidikan terbaik di Dunia

Pendidikan tinggi di China dimulai dengan membangun sebuah Universitas bernama *Shanghai Jiaotong University* pada tahun 1896. Universitas ini terletak di *Xujiahui*, China. Pada tahun 1949, sistem pendidikan tinggi di China berubah dan berkembang dengan sistem yang lebih modern. Sistem pendidikan modern ini dianut dari budaya Universitas Barat dengan menyamakan kurikulum mereka seperti di Negara Amerika, Inggris, Kanada, Australia, Korea Selatan, Jepang, Thailand, India, dan lain-lain. Sistem ini juga disebut sebagai sistem studi komparatif karena memiliki kesetaraan dengan sistem pendidikan Internasional. Hasilnya, sistem ini berhasil membawa para pelajar di China dari semua golongan pendidikan memiliki ilmu dan wawasan yang luas mengenai aspek kehidupan, seperti budaya dan sosial-ekonomi dunia yang dinamis.⁵

Ada sebuah hadist mengenai pendidikan, yang dalam bahasa Indonesia berbunyi: “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina”. Dalam hadist ini muncul satu Negara, yaitu Negeri Cina. Dari hadist ini timbul pertanyaan, ada apa dengan pendidikan Cina sehingga dapat dijadikan panutan untuk Negeri lain. Dalam buku Muhammad Said dan Junimar Affan (1987: 119) yang berjudul *Mendidik Dari Zaman ke Zaman* dikatakan bahwa: “Di negeri Cina pendidikan mendapat tempat yang penting sekali dalam penghidupan”. Dengan mendapatkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, membuat sistem pendidikan di Cina meningkat. Sikap orang Cina yang mementingkan pendidikan di dalam kehidupannya telah melahirkan sebuah filofis orang Cina mengenai pendidikan dan pendidikan ini telah lama menjaga kekuasaan Cina berapa lama, sampai pada

⁵ us), *Office of the Surgeon General; (us), Center for Mental Health Services; (us), National Institute of Mental Health (August 1, 2001)*. Chapter 2 Culture Counts: The Influence of Culture and Society on Mental Health Substance Abuse and Mental Health Services Administration (US).

masuknya Bangsa asing ke Cina yang akan merubah wajah sistem pendidikan kuno di China. Tetapi, pada kesempatan ini tidak menjelaskan sampai masuknya bangsa asing ke Cina. Permulaan pendidikan Cina kuno mencampai puncak dimulai pada Dinasti Han, dimana ajaran Kung fu Tse kembali lagi diangkat dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Cina, yang sebelumnya ajaran ini dibrangus oleh penguasa sebelumnya.

Masyarakat Cina yang menganggap pendidikan sejalan dengan filsafat, bahkan menjadi alat bagi filsafat, yang mengutamakan etika (Muhammad Said dan Junimar Affan, 1987: 119). Anggapan ini membuat pendidikan di Cina mengiringi kembalinya popularitas aliran filsafat *Kung Fu Tse* di dalam masyarakat Cina. Pada masa Dinasti *Han* banyak melahirkan para sarjana-sarjana yang kelak akan memimpin negara dan telah membuat Dinasti Han sebagai salah satu dinasti yang besar dalam sejarah Cina. Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh bekas pengikut-pengikut *Kung Fu Tse* ini telah melahirkan sebuah golongan yang terkenal dalam sejarah Cina dan menentukan perjalanan kekuasaan Dinasti *Han*, yaitu Kaum *Gentry*. Kaum *Gentry* merupakan suatu komunitas orang-orang terpelajar yang telah menempuh pendidikan dan sistem ujian Negara. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pihak pemerintahan pada saat itu pada awalnya bertujuan untuk mencari calon-calon pejabat pemerintahan yang beraliran konfusius. Jenjang pendidikan didasarkan atas tingkatan daerah *administrative* pemerintahan. Setiap *distrik* memiliki sekolah-sekolah, sampai pada akademi di Ibukota kerajaan. Setiap jenjang tersebut diharuskan melewati sistem ujian yang terbagi ke dalam tiga tahapan. Sistem ujian ini dinilai sangat berat, dikarenakan dari banyak orang yang ikut ujian ini hanya beberapa yang berhasil lulus. Kekaisaran dinasti han telah memberikan dasar-dasar pada sistem ujian di daratan Cina, walaupun selanjutnya ada perubahan dan penambahan. Sistem pendidikan ini juga membawa perubahan pada stratifikasi masyarakat dan pola prestise dalam masyarakat. Sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan-lulusan pelajar secara alami membentuk kelas baru, yang pada akhirnya menggeser posisi bangsawan dalam *stratifikasi* masyarakat Cina. Dan pola *prestise* dalam masyarakat, dimana masyarakat tidak lagi sepenuhnya memandang orang dari kepemilikan harta atau keturunannya, tetapi masyarakat memandang seseorang dari jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya. Disamping itu, kaum *Gentry* ini diberikan penghormatan dan penghargaan berupa hak-hak istimewa dari pemerintahan dan masyarakat.

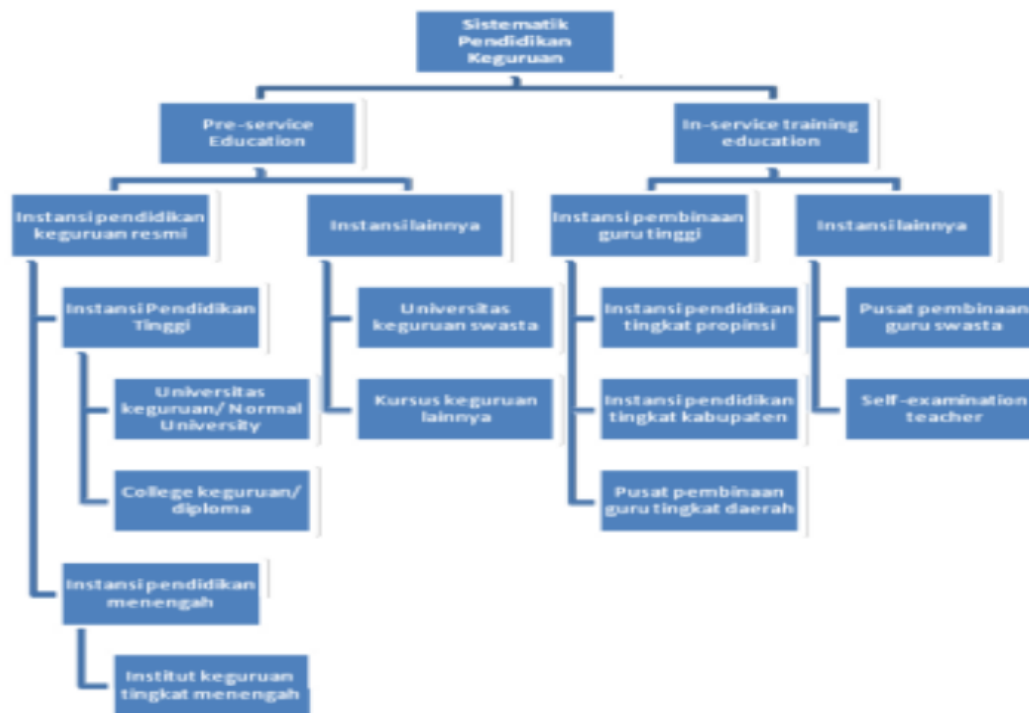
Pada masa Dinasti *Han* sudah terdapat sebuah sistem pendidikan yang ketat. Para pegikut-pengikut *konfusius* yang berada di beberapa daerah *distrik* mendirikan sekolah-sekolah yang bersifat *informal*. Disebut sekolah *informal* dikarenakan proses belajar mengajar yang dilakukan tidak terikat oleh tempat atau waktu. Dengan menggunakan gambar yang tertera dalam pembelajaran dapat diketahui metode mengajar yang digunakan para guru dalam menyampaikan bahan materi pelajaran. Jadi dari gambar dan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa metode mengajar yang digunakan oleh guru pada saat itu ialah metode ekspositori (ceramah). Penyimpulan ini dikarenakan yang dilakukakan serupa dengan metode ekspositori, dimana guru lebih aktif disini dalam mentransfer ilmu kepada para

murid. Setelah tahapan belajar mengajar, maka melangkah kepada tahapan evaluasi atau sistem ujian. Sistem ujian yang berlaku pada masa Dinasti *Han* merupakan suatu hal yang unik dalam sistem pendidikan Cina. Pada masa itu sudah berkembang suatu sistem evaluasi yang sangat kompleks. Menurut Rochiati Wiriaatmadja, A. Wildan, dan Dadan Wildan (2003: 144 – 145) mengatakan bahwa ujian ini dibagi ke dalam tiga tahap atau jenjang. Tiga tahap ujian tersebut antara lain: Ujian tingkat pertama diadakan di beberapa Ibukota *prefektur* (Kabupaten). Calon pegawai yang dapat melewati ujian tahap pertama ini diberi gelar *Hsui-Tsai*, bila diartikan yaitu “bakat yang sedang berkembang”. Selanjutnya, ujian tingkat dua yakni ujian tingkat Provinsi untuk mencapai gelar *Chu-Jen*, yakni “orang yang berhak mendapatkan pangkat”. Orang-orang yang berhak mengikuti tahapan ujian ini yaitu orang-orang yang telah mendapatkan gelar *Hsui-Tsai*. Para peserta ujian tidak langsung mengikuti ujian, tetapi mereka diharuskan mengikuti latihan di akademi *prefektur* dalam rangka menghadapi persiapan ujian *Chu Jen*. Ujian Provinsi ini diadakan tiga tahun sekali. Mereka yang dapat lulus dari ujian ini dengan nilai tertinggi akan mendapatkan tunjangan belajar. Pada tahap akhir yaitu ujian tahap tiga yang diadakan di Ibukota kerajaan. Ujian ini diadakan setiap tiga tahun sekali, dilaksanakan setahun setelah ujian provinsi. Tahapan ujian bertujuan untuk mendapatkan gelar *Chih Shih*, yakni “Sarjana naik pangkat”.

Ujian tersebut dilaksanakan di ruang dalam bangunan-bangunan yang sangat panjang dan lurus. Bangunan panjang tersebut terdiri dari kamar-kamar kecil yang disekat (dapat dilihat dalam lampiran 2 & 3). Calon pegawai tersebut tinggal di dalam kamar selama sehari untuk ujian tahap pertama, tiga hari untuk ujian tahap kedua, dan lebih lama lagi untuk ujian tahapan ketiga. *Output-output* yang dikeluarkan dari sistem pendidikan ini disalurkan menjadi pegawai-pegawai pemerintahan dan mereka yang gagal dalam mengikuti ujian ini akan menjadi tenaga-tenaga pengajar di daerah asalnya.⁶

⁶中国出台法律防止"被精神病"侵犯人权 - China published a law, guarding against the violation of human rights as mental patients are hospitalized by force (bilingual). Thinking Chinese, June 13, 2011

D. PERSIAPAN PENDIDIKAN BAGI GURU DI NEGARA CHINA



Gambar 13.2 Sistematik Pendidikan di Negara Cina

Pembinaan Profesi guru dilakukan berjenjang dan terencana dalam bentuk *Preservice* dan *Inservice Education* yang dilaksanakan oleh Universitas keguruan serta lembaga diklat. Guru walaupun berstatus bukan sebagai pegawai Negeri namun memiliki jenjang kepangkatan yang berdampak pada gaji. Perekrutan guru sangat selektif dengan mempertimbangkan pada kualifikasi guru sesuai Undang-Undang guru. Sertifikasi profesi guru dilakukan setiap 4 tahun sekali yang memungkinkan guru memperoleh perbaikan penghasilan dan perpanjangan kontrak kerja.⁷

Sistem pendidikan Cina lebih terbuka. Guru diklasifikasi berdasarkan kualitas. Siswa bebas mengevaluasi kualitas guru secara objektif. Guru dapat tambahan tunjangan kesejahteraan 10% dari gaji pokok. Ciri khas pendidikan di Beijing adalah adanya klasifikasi guru, mulai dari guru paripurna sampai guru yang tidak *qualified*. Siswa juga bebas mengevaluasi guru secara objektif.

Pada tahun 1990, Cina memiliki 13,45 juta tenaga pengajar dengan rincian 5,58 juta guru SD; 3,63 juta guru-guru Sekolah Menengah; dan 394.500 adalah guru di Perguruan Tinggi regular. Adapun standar untuk menjadi guru di Cina adalah melalui pendidikan dalam jabatan (*inservice training*) yang

⁷ Ministry of Education China. 2008. *Country Report on Teacher Development in Primary and Secondary Education in China*. (in Chinese).

diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh negara.

Cina memang menempatkan guru sebagai prioritas dalam sistem pendidikan mereka. Ini terlihat dari komitmen Pemerintah dengan ungkapan, 'Kunci keberhasilan pembangunan Nasional terletak pada pendidikan dan kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru. Selama lebih dari 100 tahun, pendidikan guru secara sistematis telah dilakukan di Cina dan telah berkontribusi pada terciptanya *Korps* guru di Negeri itu. Pendidikan guru di Cina saat ini menekankan pada perubahan pemikiran tentang pendidikan, konsep, materi dan metode pembelajaran, terutama moralitas guru. Semuanya dilakukan sebagai jawaban atas permintaan akan pentingnya mudernisasi pendidikan, orientasi global, dan masa depan.

Reformasi pendidikan dan kebutuhan realitas global mendorong pemerintah Cina untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas guru-guru baru. Pemerintah Cina menyediakan pendidikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pelayanan guru-guru sekolah, melakukan pemerataan guru hingga ke daerah-daerah terpencil, dan mendorong berkembangnya Institusi pelatihan guru. Semua dilakukan sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memajukan pendidikan di Cina.

E. UNDANG-UNDANG TENTANG KEGURUANNYA

Sejak pertengahan tahun 1980-an, telah ada hukum untuk menegaskan pelaksanaan pendidikan di China. Pemerintah menegakkan hukum ini untuk mengalokasikan dana pendidikan, perencanaan pendidikan, evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Hukum yang dimaksud, yaitu: *School Act, Educational Examination Act, Educational Investment Act, Lifelong Learning Act, Compulsory Education Law, Teacher Act, Higher Education Act, Academic Degrees Regulations, Private and Non- Governmental Education Promotion Act, National Act on Language and Scrip System* dan *Regulation on China-Foreign Joint Education Institutions and Programmes*. Beberapa peraturan perundangan merupakan hasil dari diskusi mendalam antara pemerintah pusat dengan para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, ahli, dosen dan guru.

F. ANGGARAN PENDIDIKAN YANG DI KELUARKAN OLEH NEGARA CHINA

Peningkatan anggaran pemerintah di bidang pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Baik itu dilihat dari segi APBN maupun dari segi GNP atau GDP. Peningkatan ini juga membuktikan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Cina. Walaupun jika dilihat dari segi persentasinya, jumlah ini belum memenuhi harapan dan standar di dunia, yakni 4,5%. Tetapi jika dilihat dari prospek ke depan, Cina dinilai para pakar akan dapat mencapai target tersebut dalam kurun waktu 2-3 tahun dimulai dari tahun 2010. Anggaran yang semakin meningkat juga merupakan suatu bukti bahwa

metode sentralisasi berencana yang ditetapkan oleh pemerintah pada awal tahun 1990an memang berpusat pada penambahan “biaya dalam *budget*”.⁸

Peningkatan anggaran ini juga membuktikan usaha pemerintah Cina dalam mengurangi “dana luar budget” yang biasanya menjadi beban bagi rakyat khususnya untuk rakyat yang tinggal di daerah tengah dan daerah timur Cina. Dengan semakin meningkatnya “dana dalam *budget*”, pemerintah berharap agar kesenjangan dan ketidak seimbangan antar kualitas dan mutu pendidikan di setiap daerah Cina akan dapat dikurangi dan diselesaikan.

Peningkatan yang signifikan itu juga akan mengantar Cina dari 30 Negara yang persentasi anggaran pendidikannya paling rendah di dunia (peringkat 15, dilansir pada data tahun 1994) menuju ke Negara kelas menengah untuk anggaran pendidikan dengan persentasi GDP sebagai indikator. Selain itu pemerintah akan berkonsentrasi agar aliran dana ini bisa tersebar secara seimbang, dan tidak hanya terpusat pada sekolah atau universitas yang berada di daerah maju saja.

G. SEJARAH PENDIDIKAN CHINA

Sikap orang Cina yang mementingkan pendidikan di dalam kehidupannya telah melahirkan sebuah filofis orang Cina mengenai pendidikan. Pendidikan ini telah lama menjaga kekuasaan Cina berapa lama, sampai pada masuknya Bangsa asing ke Cina yang akan merubah wajah sistem pendidikan kuno di China. Tetapi, pada kesempatan ini tidak menjelaskan sampai masuknya Bangsa asing ke Cina. Permulaan pendidikan Cina kuno mencampai puncak dimulai pada Dinasti *Han*, dimana ajaran Kung fu Tse kembali lagi diangkat dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Cina, yang sebelumnya ajaran ini dihapus oleh penguasa sebelumnya.

Masyarakat Cina yang menganggap pendidikan sejalan dengan filsafat, bahkan menjadi alat bagi filsafat, yang mengutamakan etika. Anggapan ini membuat pendidikan di Cina mengiringi kembalinya popularitas aliran filsafat *Kung Fu Tse* di dalam masyarakat Cina. Pada masa Dinasti Han banyak melahirkan para sarjana-sarjana yang kelak akan memimpin Negara dan telah membuat Dinasti *Han* sebagai salah satu dinasti yang besar dalam sejarah Cina. Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh mantan pengikut-pengikut *Kung Fu Tse* ini telah melahirkan sebuah golongan yang terkenal dalam sejarah Cina dan menentukan perjalanan kekuasaan Dinasti *Han*, yaitu Kaum Gentry. Kaum gentry merupakan suatu komunitas orang-orang terpelajar yang telah menempuh pendidikan dan sistem ujian Negara.

Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pihak pemerintahan pada saat itu pada awalnya bertujuan untuk mencari calon-calon pejabat pemerintahan yang beraliran *konfusius*. Jenjang pendidikan didasarkan atas tingkatan daerah administratif pemerintahan. Setiap *distrik* memiliki sekolah-sekolah, sampai pada akademi di Ibukota kerajaan. Setiap jenjang tersebut diharuskan melewati sistem ujian yang terbagi ke dalam tiga tahapan. Sistem ujian ini dinilai sangat berat,

⁸ Good, Byron J.; Good, Mary-Jo DelVecchio (June 2012). "Significance of the 686 Program for China and for global mental health". *Shanghai Archives of Psychiatry*. **24** (3): 175–177. doi:10.3969/j.issn.1002-0829.2012.03.008. ISSN 1002-0829. PMC 4198850. PMID 25324623.

dikarenakan dari banyak orang yang ikut ujian ini hanya beberapa yang berhasil lulus. Kekaisaran dinasti Han telah memberikan dasar-dasar pada sistem ujian di daratan Cina, walaupun selanjutnya ada perubahan dan penambahan. Sistem pendidikan ini juga membawa perubahan pada stratifikasi masyarakat dan pola *prestise* dalam masyarakat. Sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan-lulusan pelajar secara alami membentuk kelas baru, yang pada akhirnya menggeser posisi bangsawan dalam stratifikasi masyarakat Cina, dan pola *prestise* dalam masyarakat, dimana masyarakat tidak lagi sepenuhnya memandang orang dari kepemilikan harta atau keturunannya, tetapi masyarakat memandang seseorang dari jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya. Disamping itu, kaum *gentry* ini diberikan penghormatan dan penghargaan berupa hak-hak istimewa dari pemerintahan dan masyarakat.

Pada masa Dinasti Han sudah terdapat sebuah sistem pendidikan yang ketat. Para pengikut-pengikut *konfusius* yang berada di beberapa daerah *distrik* mendirikan sekolah-sekolah yang bersifat *informal*. Disebut sekolah *informal* dikarenakan proses belajar mengajar yang dilakukan tidak terikat oleh tempat atau waktu. Dengan menggunakan gambar yang tertera dalam pembelajaran dapat diketahui metode mengajar yang digunakan para guru dalam menyampaikan bahan materi pelajaran. Jadi dari gambar dan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa metode mengajar yang digunakan oleh guru pada saat itu ialah metode *ekspositori* (ceramah). Penyimpulan ini dikarenakan yang dilakukan serupa dengan metode *ekspositori*, dimana guru lebih aktif disini dalam mentransfer ilmu kepada para murid.

Setelah tahapan belajar mengajar, maka melangkah kepada tahapan evaluasi atau sistem ujian. Sistem ujian yang berlaku pada masa Dinasti Han merupakan suatu hal yang unik dalam sistem pendidikan Cina. Pada masa itu sudah berkembang suatu sistem evaluasi yang sangat kompleks. Menurut Rochiati Wiriaatmadja, mengatakan bahwa ujian ini dibagi ke dalam tiga tahap atau jenjang. Tiga tahap ujian tersebut antara lain: Ujian tingkat pertama diadakan di beberapa Ibukota. Calon pegawai yang dapat melewati ujian tahap pertama ini diberi gelar *Hsui-Tsai*, bila diartikan yaitu "bakat yang sedang berkembang". Selanjutnya, ujian tingkat dua yakni ujian tingkat provinsi untuk mencapai gelar *Chu-Jen*, yakni "orang yang berhak mendapatkan pangkat". Orang-orang yang berhak mengikuti tahapan ujian ini yaitu orang-orang yang telah mendapatkan gelar *Hsui-Tsai*.

Para peserta ujian tidak langsung mengikuti ujian, tetapi mereka diharuskan mengikuti latihan di akademi *prefektur* dalam rangka menghadapi persiapan ujian *Chu Jen*. Ujian Provinsi ini diadakan tiga tahun sekali. Mereka yang dapat lulus dari ujian ini dengan nilai tertinggi akan mendapatkan tunjangan belajar. Pada tahap akhir yaitu ujian tahap tiga yang diadakan di Ibukota kerajaan. Ujian ini diadakan setiap tiga tahun sekali, dilaksanakan setahun setelah ujian Provinsi. Tahapan ujian bertujuan untuk mendapatkan gelar Chih Shih, yakni Sarjana naik pangkat.

Pada tahun 1993, tercatat, guru memiliki gaji yang rendah dan disadari, kondisi ini akan berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalitas guru dalam

melaksanakan tugasnya. Bagaimana dapat menuntut guru melaksanakan tugas dengan optimal, kalau dirinya menghadapi masalah dengan kesejahteraan diri dan keluarganya. Pada tahun 1989, dana dari negara untuk pendidikan hanya 9,4 milyar yuan. Dengan dana sebesar itu, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengembangkan dunia pendidikan, yang harus melayani masyarakat lebih dari satu milyar orang. Li Lanqing memandang bahwa yang bertanggung jawab menyediakan pendidikan yang layak adalah pemerintah.⁹

Pendidikan dasar, khususnya untuk wajib belajar, sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah. Demikian juga dengan pembiayaan pengembangan infrastruktur untuk pendidikan keterampilan dan pendidikan tinggi, sangat bergantung pada dukungan dana dari pemerintah. Hanya permasalahannya adalah semua itu harus diatur dengan undang-undang.

Beberapa inovasi lain telah digulirkan Cina adalah, diberlakukannya wajib pendidikan dasar 9 tahun dan penghapusan buta huruf bagi anak muda dan setengah baya. Inovasi ini berhasil meningkatkan tingkat pendidikan Nasional secara berarti. Pendidikan tinggi dikembangkan secara cepat dengan beberapa perubahan awal, diantaranya pembelajaran dikembangkan dengan menekankan pada peningkatan kualitas siswa, seperti mengembangkan karakter siswa sebagaimana penguasaan pengetahuan (*kognisi*). Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan juga telah berhasil mendorong mempercepat modernisasi. Kompensasi, kesejahteraan dan status sosial guru telah banyak dikembangkan, dan membuat profesi tersebut mendapat respek dan penghormatan dari masyarakat. Pendidikan swasta berkembang dengan cepat. Hal ini ditandai dengan banyak jenis sekolah dibangun. Pertukaran pendidikan dan kerja sama dengan negara lain secara aktif dan luas telah memperkuat daya saing/kompetisi di dunia.

Pada dekade terakhir, sejumlah permasalahan besar telah terpecahkan. Total dana pendidikan nasional telah mencapai rata-rata 20% per tahun, dan mencapai 548 milyar yuan pada tahun 2002, lima kali lebih banyak dibanding tahun 1993. Di akhir abad 20, wajib pendidikan dasar 9 tahun telah mendekati universal dan remaja dan orang-orang setengah baya telah bebas dari buta huruf, sementara pendidikan menengah telah meningkat dengan sangat pesat. Sejak tahun 1999, institusi pendidikan tinggi telah mengerahkan banyak siswa setiap tahunnya hingga tahun 2002. Terdapat 16 juta siswa di jenis pendidikan tinggi yang berbeda. Berdasarkan statistik UNESCO terakhir skala pendidikan tinggi Cina adalah terbesar di dunia. Selama sepuluh tahun perubahan dan pengembangan secara keseluruhan telah menciptakan suatu pemandangan pendidikan baru di Cina.¹⁰

H. SOSIOLOGI PENDIDIKAN DI NEGARA CHINA

⁹ Yu Xing-guo. 2006. *The Status Quo of School Teachers and Teacher Education in Rural China*, a report to FAO. (in Chinese).

¹⁰ Reuters. October 26, 2012. Retrieved October 27, 2012.. Xinhua. October 25, 2012. Retrieved October 27, 2012.

Sosiologi Pendidikan Cina Pada bulan Juni 2013, pemerintah pusat Cina mengeluarkan panduan untuk seluruh Provinsi dalam mereformasi model penilaian mutu pendidikan. Ada 5 area yang jadi penilaian: • Perkembangan Moral yang diindikasikan oleh perilaku dan kebiasaan, kewarganegaraan, kepribadian dan karakter, serta ambisi dan prinsip-prinsip yang dianut. • Perkembangan Akademik yang diindikasikan oleh pengetahuan dan keahlian, pemikiran disiplin, kemampuan aplikasi serta kreativitas. • Kesehatan Jiwa dan Raga yang diindikasikan oleh kebugaran fisik, kebiasaan hidup sehat, selera artistik dan keindahan, kesehatan emosional, kemampuan mengendalikan diri serta komunikasi interpersonal. • Perkembangan Minat dan Bakat Unik yang diindikasikan oleh rasa ingin tahu, bakat dan keahlian unik, serta penemuan dan pengembangan potensi diri. • Pengurangan Beban Akademik yang diindikasikan oleh waktu belajar [mis: lamanya jam pelajaran, pekerjaan rumah, waktu untuk tidur, dll., kualitas instruksi, tingkat kesulitan pelajaran serta tekanan akademik.

Pemerintah Cina mengeluarkan dokumen lanjutan untuk mendorong daerah dan sekolah mengurangi beban akademik bagi siswa pendidikan dasar: • Penerimaan siswa yang transparan dan hanya berdasarkan domisili siswa, • Pengelompokan siswa dan guru secara seimbang dan acak, tanpa kelas-kelas khusus, • Pengajaran “titik awal nol” dengan asumsi kecakapan siswa mulai nol dan tidak ada ekspektasi akademik tinggi, • Tidak ada pekerjaan rumah tertulis, tapi boleh memberi PR “*eksperiensial*” dengan ortu dan masyarakat, • Mengurangi ujian. *Standardized test* dilarang untuk kelas 1-3 SD. Berikutnya, hanya boleh satu per semester, • Evaluasi kategorikal. Sekolah tidak boleh memberi nilai angka, tapi kategori mulai “cukup” sampai “luar biasa”, • Meminimalkan material tambahan. Hanya boleh satu material tambahan selain buku utama, • Tidak boleh ada kelas tambahan, • Kegiatan olahraga minimal satu jam. Sekolah juga harus berikan waktu istirahat dan relaksasi yang cukup, • Memperkuat dukungan pada sekolah. Otoritas pendidikan di semua tingkat pemerintahan harus melakukan inspeksi secara periodik dan mengawasi langkah nyata dalam mengurangi beban akademik siswa, serta wajib mempublikasikan temuannya.

I. ANTROPOLOGI PENDIDIKAN DI NEGARA CHINA

Menurut para sejarawan, sejarah kebudayaan Cina adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Cina telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Penemuan ini cukup membuktikan betapa Bangsa Cina telah mengalami proses kehidupan yang teramat panjang di alam dunia ini. Sebagai kebudayaan tertua di dunia, Cina memiliki perbedaan yang unik jika dibandingkan dengan kebudayaan dan peradaban dunia lain seperti Mesir dan Babilonia. Hal ini disebabkan sejarah kebudayaan Cina tidak pernah terputus selama hampir 5.000 tahun lamanya.¹¹

¹¹ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on July 30, 2011. Retrieved July 30, 2011.

Pergantian pemerintahan dari dinasti ke dinasti tidak mengakibatkan kebudayaan dan peradaban Cina mengalami kehancuran dan pergeseran yang teramat besar. Bahkan, hingga kini, peradaban bangsa Cina masih terus eksis dan bertahan, bahkan menjadi perhatian banyak orang, baik dari kalangan ilmuwan, pengamat, arkeolog, sosiolog maupun kalangan lain. Menurut keterangan, orang seperti Ibnu Batutah dan Marco Polo di masanya sangat menaruh minat yang mendalam terhadap kebudayaan Cina.

Melalui jasa kedua orang inilah, konon, dunia mengetahui kebesaran dan kemegahan kebudayaan bangsa Cina dalam segala bidang. Nabi Muhammad pun dalam satu riwayatnya pernah menyeru umat manusia untuk belajar ke Negeri Cina. Menzies dalam bukunya *1434* memberi kesimpulan yang cukup mencengangkan bahwa kemajuan materi peradaban dunia saat ini, terutama dunia Eropa, sesungguhnya mendapat sumbangsih yang cukup besar dari hasil teknologi peradaban Cina.

Kesimpulan Menzies ini sebetulnya ingin meluruskan pandangan yang mengatakan bahwa *renaisans* dilukiskan sebagai masa kelahiran kembali peradaban Eropa Klasik Yunani dan Romawi. Bagi Menzies justru percikan penularan pengetahuan intelektual Cina merupakan bukti yang tak dapat dipungkiri sebagai percikan api yang mengobarkan renaissans di Eropa hingga kini. Dalam buku setebal 430 halaman ini, Menzies memberikan banyak bukti tentang pengaruh Cina dalam kebangkitan kebudayaan Eropa sekarang ini.

Budaya dan nilai dasar orang Cina telah mendarah daging dalam setiap tubuh mereka. Hebatnya lagi, di mana pun mereka tinggal maka mereka akan terus mempercayai dan meyakini budaya leluhur. Orang Cina begitu teguh memegang budaya mereka walaupun mereka tidak lahir atau dibesarkan di tanah Cina. Cina adalah negara yang bangga dengan negaranya karena kebudayannya adalah salah satu kebudayaan tertua di dunia yang hampir setara dengan Mesopotamia dan Mesir. Tak heran jika kebudayaan itu benar-benar menempel di sanubari mereka.

Kini kita bisa melihat sejumlah orang Cina yang sukses dalam karirnya. Mereka pun memegang kendali perekonomian dunia. Pengusaha Cina banyak yang sukses karena budaya dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh mereka. Budaya dan nilai-nilai dasar Cina itu tidak terlepas pada guru-guru mereka di masa lampau, seperti *Confucius (Kong Hu Cu)*, *Lao Tzu (pendiri Tao)*, dan *Sun Tzu (strategi perang)*.

1. *Confucius (Kong Hu Cu)*

Ajaran *Konfusianisme* atau *Kong Hu Cu* adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh *Konfusius (Kong Zi)*. Beliau adalah seorang filsuf dari Negara Lu. Prihatin dengan keadaan Negerinya, ia berkelana untuk menyebarkan ajarannya yang berkisar pada masalah moral. Ada beberapa ajaran besar dari Konfusius antara lain:

- a. Sangat mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi secara baik.

- b. Penganutnya diajarkan untuk tetap mengingat nenek moyang seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini.
- c. Ajarannya merupakan susunan falsafah dan etika yang mengajarkan bagaimana manusia bertingkah laku.
- d. Bahwa semua manusia itu pada dasarnya baik. Meng Zi menyatakan bahwa semua manusia itu pada dasarnya baik. Untuk itu, yang diperlukan adalah kesadaran moral untuk membuat manusia menyadari kesalahannya. Hukum yang ketat tidak diperlukan apabila semua manusia sudah memiliki kesadaran moral yang baik.

Konfusianisme merupakan kunci relasi-relasi dalam keluarga: ayah-anak, suami-istri, adik-kakak (sistem tiga generasi) dan sistem lima generasi (ayah-anak, suami-istri, adik-kakak, kakek-cucu lelaki, dan paman-keponakan lelaki). Bagi *Konfusius*, relasi ayah-anak, suami-istri, dan adik-kakak, juga seharusnya menjadi sifat dalam relasi yang dibangun oleh aparat pemerintah (kaisar-menteri, menteri-rakyat, kaisar-rakyat).

2. *Lao Tzu (Pendiri Tao)*

Taoisme merupakan ajaran *Laozi* yang berasaskan *Daode Jing*. Pengikut *Laozi* yang terkenal adalah *Zhuangzi* yang merupakan tokoh penulis kitab yang berjudul *Zhuangzi*. *Laozi* (570-470 SM) dilahirkan di Provinsi *Ku, Chuguo*, sekarang dikenal sebagai Provinsi Henan.

Taosime berasal dari istilah “*Dao*” yang berarti “tidak berbentuk”, “tidak terlihat”, tetapi merupakan jalan atau cara munculnya semua benda hidup dan alam semesta. *Dao* mewujud dalam semua benda hidup dan kebendaan adalah *De*. Gabungan *Dao* dengan *De* diperkenalkan sebagai *Taoisme* sehingga menjadi dasar ilmiah. *Taoisme* bersifat tenang, lembut seperti air, dan abadi. Manusia akan abadi jika sudah mencapai kesadaran *Dao* dan akan menjadi dewa. Para penganut *Taoisme* mempraktekkan *Dao* untuk mencapai kesadaran *Dao* dan mendewakannya.

Taoisme juga mengenalkan teori *Yin-Yang*, dalam *Daode Jing* Bab 42: “*Dao* melahirkan sesuatu, yang dilahirkan itu melahirkan. *Yin* dan *Yang*. *Yin* dan *Yang* saling bertindak sehingga menghasilkan tenaga atau kuasa.

Dengan tenaga ini maka lahirlah jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta mengandung *Yin-Yang* yang saling bertindak untuk mencapai keseimbangan. *Yin* dan *Yang* diterjemahkan menjadi *negatif* dan *positif*. Setiap benda adalah *dualism*, positif mensyaratkan adanya negatif; tidak negatif dan tidak positif jadinya kosong, tidak ada apa-apa.

3. *Sun Tzu*

Sun Tzu merupakan tokoh yang terkenal dengan keahliannya dalam berperang dan berdagang. Dia dilahirkan pada tahun 535 SM di kota Tung-an di *Semenanjung Shantung*. Sejak kecil ia diharapkan untuk mengikuti jejak ayahnya, Jenderal *T'ien Shu*, dan dididik ketatanegaraan, taktik, dan strategi perang, teknik-teknik persekongkolan serta kegiatan mata-mata. Di

penghujung karirnya, dia menuangkan semua pengetahuan tentang berperang yang diperolehnya dari ayahnya maupun pengalaman sendiri dalam jurnal yang diberi nama *Pin Fa* (Seni Berperang).¹²

J. EKONOMI PENDIDIKAN DI CHINA

Tiongkok memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia selama lebih dari dua ribu tahun dan belasan dinasti **Kekaisaran Tiongkok** beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhan. Sejak diperkenalkannya **reformasi ekonomi** tahun 1978 oleh Presiden **Deng Xiaoping**, Tiongkok menjadi Negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Per 2013, negara ini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan **total nominal GDP** dan **PPP** serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Tiongkok adalah negara yang memiliki **senjata nuklir** dan memiliki **tentara aktif terbesar dunia** dengan **belanja militer terbesar kedua dunia**. RRT menjadi anggota **Perserikatan Bangsa-Bangsa** tahun 1971, di mana ia menggantikan Republik Tiongkok sebagai **anggota tetap Dewan Keamanan PBB**. Tiongkok juga menjadi anggota berbagai macam organisasi lain seperti **WTO**, **APEC**, **BRICS**, **Shanghai Cooperation Organization**, **BCIM** dan **G-20**. Tiongkok adalah kekuatan besar di Asia, dan menjadi negara super yang potensial menurut beberapa pengamat.

K. LETAK GEOGRAFIS NEGARA CHINA



Gambar 13.3 Peta Negara Cina

RRC merupakan Negara dengan jumlah penduduk nomor satu di bumi, karena luas wilayahnya yang sangat luas. RRC merupakan Republik Komunis yang beribukota di Beijing.¹³

¹² Wynaden, Dianne; Chapman, Rose; Orb, Angelica; McGowan, Sunita; Zeeman, Zenith; Yeak, SiewHo (June 1, 2005). "Factors that influence Asian communities' access to mental health care". *International Journal of Mental Health Nursing*. **14** (2): 88–95. doi:10.1111/j.1440-0979.2005.00364.x. PMID:15896255

1. Luas Wilayah: 9.600.000 KM².
2. Letak Astronomis: 18° LU-54° LU dan 73° BT-135° BT.
3. Letak Geografis: Asia timur menghadap ke Samudera Pasifik.
4. Batas-batas: Utara adalah Republik Rakyat Mongolia. Timur adalah L. Cina timur, dan L. Kuning. Selatan adalah Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, Vietnam. Barat adalah Pakistan dan Afganistan.
5. Bentang alam: Bentang alam Cina dapat dibagi menjadi dua yaitu Cina utara yang wilayahnya relative datar dan tanahnya berdebu, dan Cina selatan yang reliefnya relative kasar dan banyak pegunungannya.
6. Iklim: Sub Tropis, yang bagian pedalamannya dingin dan kering, tenggaranya lebih basah karena masih dipengaruhi oleh iklim laut.
7. Keadaan penduduk: Pada tahun 1998, Cina mempunyai penduduk sebesar 1.242.500.000 jiwa. Yaitu terbesar pertama di bumi. Pertumbuhan penduduk rata-rata setiap tahun 1,3%. Kepadatan penduduknya 125 jiwa per KM². Suku bangsa mayoritas di Cina adalah Cina Han (94%), sisanya adalah suku Mongol, Turki, Korea, dan Manchu.
8. Bentuk pemerintahan: Republik Komunis. Kepala Negara adalah Ketua komite pengawas badan legislative. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Namun pelaksanaan kekuasaan Cina yang efektif, terletak pada para Pemimpin Partai Komunis. Bahasa: Mandarin. gambar peta negara Cina
9. Agama: Mayoritas Kong Hu Chu, sisanya Tao, Budha, dan Islam.
10. Kegiatan Ekonomi: Pertanian, Pertambangan, Industri, dan Perdagangan.
11. Kebudayaan: Cina merupakan salah satu bangsa yang mempunyai kebudayaan tertua di bumi. Misalnya yaitu Tembok Besar Cina yang dibangun pada masa Dinasti Chin, yaitu pada tahun 210 masehi.
12. Bentuk kerjasama Cina dengan Indonesia: Hubungan kerjasama Cina dengan Indonesia pernah terputus sejak peristiwa G30S PKI. Akan tetapi sejak tanggal 8 Agustus 1990 hubungan itu dibuka kembali. Hubungan dengan Indonesia meliputi: Bidang diplomatic. Kedua Negara saling menempatkan duta besarnya.
 - a. Bidang perdagangan. Expor Cina meliputi: Mesin-mesin, barang elektronika, dan alat pertanian. Inpor Cina dari Indonesia antara lain: Kopi, semen, kayu, tembaga, dan timah
 - b. Bidang Internasional. Ikut serta dalam Forum PBB.

L. PSIKOLOGI PENDIDIKAN DI NEGARA CHINA

Kesehatan mental di China adalah masalah yang berkembang. Para ahli memperkirakan bahwa sekitar 173 juta orang yang tinggal di China menderita gangguan jiwa. Keinginan untuk berobat sebagian besar terhalang oleh norma-norma sosial Tiongkok yang ketat (dan stigma berikutnya), serta kepercayaan agama dan budaya mengenai reputasi pribadi dan harmoni

¹³ "And now the 50-minute hour: Mental health in China" *The Economist* August 18, 2007. p. 35. Retrieved August 18, 2007.

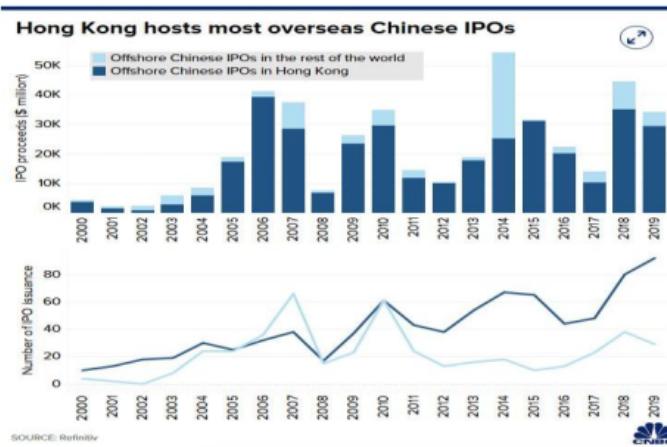
sosial. Meskipun pemerintah China berkomitmen untuk memperluas layanan dan undang-undang perawatan kesehatan mental negara tersebut berjuang dengan kurangnya profesional kesehatan mental dan akses ke spesialis di daerah pedesaan.

Institusi mental pertama China diperkenalkan sebelum tahun 1849 oleh misionaris Barat. Pada tahun 1949, negara tersebut mulai mengembangkan sumber daya kesehatan mentalnya dengan membangun rumah sakit jiwa dan fasilitas untuk melatih para profesional kesehatan mental. Namun, banyak program komunitas yang dihentikan selama Revolusi Kebudayaan

Dalam pertemuan bersama yang diadakan oleh kementerian China dan Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 1999, pemerintah China berkomitmen untuk membuat rencana tindakan kesehatan mental dan Undang-Undang kesehatan mental Nasional, di antara langkah-langkah lain untuk memperluas dan meningkatkan perawatan. Rencana aksi, yang diadopsi pada tahun 2002, menguraikan prioritas China dalam memberlakukan Undang-Undang, mendidik rakyatnya tentang penyakit mental dan sumber daya kesehatan mental, dan mengembangkan sistem perawatan yang stabil dan komprehensif.

Pada tahun 2000, Undang-undang Penelitian dan Pendidikan Disparitas Kesehatan Minoritas diberlakukan. Tindakan ini membantu meningkatkan kesadaran Nasional tentang masalah kesehatan melalui penelitian, pendidikan kesehatan, dan pengumpulan data.¹⁴

M. STATISTIK NEGARA CHINA



Gambar 13.4 Statistik Negara Cina

Tiongkok, atau nama lengkapnya **Republik Rakyat Tiongkok** atau **Republik Rakyat Cina** (*Hanzi sederhana*: 中华人民共和国; *Hanzi tradisional*: 中華人民共和國; *Pinyin*: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó; harfiah: 'Republik

¹⁴ Good, Byron J.; Good, Mary-Jo DelVecchio (June 2012) "Significance of the 686 Program for China and for global mental health" *Shanghai Archives of Psychiatry*. 24 (3): 175–177. doi:10.3969/j.issn.1002-0829.2012.03.008 ISSN 1002-0829 PMC 4198850 PMID 25324623

Rakyat **Tionghoa**, disingkat **RRT, RRC**) adalah sebuah negara yang terletak di **Asia Timur** yang beribu kota di **Beijing**. Negara ini memiliki jumlah penduduk **terbanyak di dunia** (sekitar 1,4 miliar jiwa, mayoritas merupakan **suku Han**) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya Negara **ke-3 terbesar** di dunia. Negara ini didirikan pada tahun **1949** setelah berakhirnya **Perang Saudara Tiongkok** dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah **partai tunggal**, yaitu **Partai Komunis Tiongkok** (PKT). Sekalipun sering kali dilihat sebagai **negara komunis**, kebanyakan ekonomi Republik ini telah **diswastakan** sejak tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.

Tiongkok Daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus **Hong Kong** dan **Makau** sementara nama **Republik Tiongkok** mengacu pada entitas lain yang dulu pernah menguasai **Tiongkok** sejak tahun 1912 hingga kekalahannya pada **Perang Saudara Tiongkok**. Saat ini Republik **Tiongkok** hanya menguasai **pulau Taiwan** dan tidak diakui oleh mayoritas negara di dunia. RRT mengklaim wilayah milik Republik **Tiongkok** namun tidak memerintahnya, sedangkan Republik **Tiongkok** mengklaim kedaulatan terhadap seluruh **Tiongkok** daratan yang saat ini dikuasai RRT.¹⁵

N. SASTRA NEGARA CHINA

Sastra Tionghoa atau **Sastra Tiongkok** telah berumur lebih dari 3400 tahun dimulai sejak peninggalan tertulis di **Tiongkok** ditemukan pada zaman **Dinasti Shang**. Namun sastra Tiongkok mengalami peningkatan pesat mulai pada zaman **Dinasti Zhou** tepatnya di **Zaman Musim Semi dan Gugur**. Di zaman ini, mulai banyak ditulis karya-karya sastra baik bertema **filosofis** maupun tema-tema lain berbentuk **puisi** atau **esai**.

Bangsa Tionghoa sampai tahun 1904 dipengaruhi dengan ujian kesustraan atau disebut juga **Ujian Nasional** / Ujian Kenegaraan. Berhasil lulus Ujian Nasional adalah kunci agar bisa mendapat pekerjaan yang baik dalam pemerintahan. Dalam Ujian Nasional, soal-soal ujian adalah kesusastran Tionghoa, yaitu filsafat, sejarah, sajak serta perundingan yang berat-berat. Dengan runtuhnya dinasti tradisional Tiongkok, pada tahun 1905 Ujian Nasional dihapuskan.

Menurut **Lin Yu-tang** terdapat dua jenis sastra, sastra berisi pengajaran dan sastra yang berisi hiburan. Sastra yang berisi ajaran-ajaran lebih dihargai oleh bangsa Tionghoa karena ada unsur-unsur yang dapat memajukan pikiran dan

¹⁵ Yu Xing-guo. 2006. *The Status Quo of School Teachers and Teacher Education in Rural China*, a report to FAO. (in Chinese).

akhlak rakyat. Sastra jenis ini antara lain filsafat sejarah dan sajak. Sastra golongan hiburan adalah karangan berupa novel dan cerita fiksi.¹⁶

Sejarah Sastra Tiongkok telah dimulai sejak zaman purba. Menurut sastrawan Lu Hsun sastra Tionghoa dalam bentuk paling sederhana dimulai ketika kata-kata digunakan untuk menyuarakan perasaan atau menyampaikan kejadian atau peristiwa. Kata-kata itu beredar dari mulut ke mulut sepanjang masa. Menurut Hu Huai Chen bentuk-bentuk sastra Tionghoa versi sederhana yang tidak tercatat telah ada ketika manusia belum mengenal tulisan.

O. GEOGRAFI POLITIK NEGARA CHINA

Dalam perkembangan dinamika politik Internasional, Tiongkok merupakan salah satu negara yang mulai muncul dan berperan sebagai *emerging power* serta memiliki kekuatan ekonomi yang banyak memberikan pengaruh bagi sistem ekonomi dunia. Geopolitik merupakan bentuk dari implementasi politik suatu negara dengan pengaruh keadaan geografisnya. Keadaan geografis dapat mempengaruhi kebijakan suatu Negara atas upaya mencapai kepentingannya. Untuk mewujudkan kepentingannya maka Tiongkok menggunakan geostrategi.

Perkembangan geostrategi politik Tiongkok sendiri dapat dilihat dari masa sejarah Tiongkok dimana sudah mulai adanya pertimbangan kebijakan yang menyesuaikan kondisi geografis. Dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana Tiongkok mampu memetakan jalur perdagangannya yang diperkenalkan dengan sebutan jalur sutra atau *silk road*.

Di era Tiongkok modern atau kotemporer, Tiongkok semakin berkembang menjadi Negara yang memiliki kemampuan *bargaining power* yang cukup kuat. Karena hal tersebut Tiongkok memetakan strateginya bukan hanya melihat dari aspek geografis namun juga melihat dari kondisi politik Internasional.¹⁷

P. PENDIDIKAN POLITIK DAN TUHAN DI NEGARA CHINA

a. Pendidikan Politik

Pendidikan politik di Republik Rakyat Tiongkok mengacu pada berbagai metode pendidikan, beberapa di antaranya memaksa atau tidak sukarela, yang bertujuan agar warga negara mengidentifikasi dan mendukung kebijakan Partai Komunis Tiongkok. Prosesnya mencakup pendefinisian masalah politik, mendidik masyarakat tentang kebijakan Partai, dan meyakinkan mereka tentang perlunya tindakan politik tertentu.

Intensitas pendidikan politik bervariasi tergantung pada iklim politik dan sasaran pendidikan. Yang paling mengganggu dan menyeluruh adalah "reformasi pikiran", yang secara beragam disebut sebagai "pendidikan ulang" atau "transformasi". Reformasi pemikiran sering terjadi dalam lingkungan yang

¹⁶ Gao Xia. 2006. *Comparative Research on Education Reform and Curriculum Change: Re-design of Instructional Time in Compulsory Education*. Reference report. (in Chinese).

¹⁷ "Religion Statistics and Information / GRF" globalreligiousfutures.org. Retrieved October 21, 2018.

dikontrol ketat seperti penjara atau kamp kerja paksa, dan mungkin melibatkan ancaman atau tindakan paksaan lainnya untuk meyakinkan target agar membentuk kembali identitas Ideologis atau politiknya. Bentuk pendidikan politik yang paling tidak mengganggu, namun paling banyak ditemui adalah propaganda, yang dapat disampaikan melalui media, dalam pertemuan politik, atau melalui kurikulum sekolah.

b. Pendidikan Ketuhanan

Tiongkok memiliki sejarah panjang dalam hal kepercayaan dan menjadi tempat dari asal muasal berbagai tradisi agama filsafat di dunia. Konghucu dan Tao ditambah Buddha yang disebut tiga pengajaran, memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan budaya Tionghoa. Unsur-unsur dari tiga sistem kepercayaan tersebut masuk ke dalam agama tradisional atau populer. Agama-agama Tionghoa berorientasi keluarga. Beberapa sarjana tidak menggunakan istilah "agama" untuk menyebut sistem kepercayaan di Tiongkok, dan menganggap sebutan "praktik kebudayaan", "sistem berpikir" atau "filsafat" sebagai istilah yang lebih cocok. Terdapat perdebatan mengenai apa yang harus disebut agama dan yang harus disebut beragama di Tiongkok.

Kaisar kaisar Tiongkok mengklaim Mandat Surga dan ikut dalam praktik-praktik keagamaan Tionghoa, Sejak 1949, Tiongkok diperintah oleh Partai Komunis Tiongkok yang, dalam teori, merupakan sebuah institusi ateis dan melarang para anggota partai tersebut untuk masuk sebuah agama. Pada masa pemerintahan Mao Zedong gerakan keagamaan ditentang. Dibawah pemimpin yang paling terkini, organisasi-organisasi keagamaan lebih diberi otonomi. Pada waktu yang bersamaan, Tiongkok dianggap sebagai sebuah negara dengan sejarah humanis dan sekuler yang panjang, yang dikatakan, elah ada sejak zaman Konghucu yang menekankan shisu (Hanzi ; Pinyin, shisú, "berada di dunia"). Partai secara resmi dan secara Institusional mengakui lima doktrin agama: Buddha, Tao, Islam, Protestan dan Katolik (meskipun memiliki hubungan sejarah, Partai memaksa pemisahan Gereja Katolik Tiongkok dari Gereja Katolik Roma), dan terdapat peningkatan pengakuan Institusional Konghucu dan agama asli Tionghoa.

Secara demografi, sistem agama terbesar adalah "agama Tionghoa", yang tak hanya terdiri dari ajaran Konghucu dan Taois, unsur-unsur Buddha, namun juga berbagai tradisi lainnya, dan terdiri dari persekutuan dengan shen (神), sebuah karakter yang memadukan berbagai dewa-dewa yang dapat merupakan deitas lingkungan alam atau prinsip leluhur kelompok manusia, konsep sipilitas, pahlawan budaya beberapa diantaranya menampilkan sejarah dan mitologi Tionghoa. Beberapa dewa yang menyebarkan kultus adalah Mazu (dewi laut), Huangdi (patriarkh ilahi seluruh Tiongkok, Volksgeist Negara Tiongkok), Guandi (dewa perang dan usaha), Caishen (dewa kemakmuran dan kekayaan), Pangu dan lain-lain. Tiongkok memiliki beberapa patung-patung tertinggi di dunia. Kebanyakan dari patung tersebut mewakili buddha-buddha dan dewa-dewa dan dibangun pada

2000an. Patung tertinggi di dunia adalah **Wihara Musim Semi Buddha** yang terletak di **Henan**. Saat ini, **pagoda** tertinggi di dunia juga dibangun di negara tersebut di **Wihara Tianning**, dan **stupa** tertinggi di dunia di **Wihara Famen**. **Buddha Tionghoa** telah berkembang sejak abad ke-1, dan memberikan pengaruh besar di Tiongkok modern.

Para cendekiawan menyatakan bahwa di Tiongkok tidak ada batasan yang jelas antara agama-agama, khususnya Buddha, Tao dan praktik agama asli populer lokal. Menurut **analisis demografi paling terkini** sekitar 73% populasi di Tiongkok, yang meliputi ratusan juta orang, mempraktikkan beberapa jenis agama asli **Tionghoa dan Tao**, 15% adalah **Buddha**, 11% adalah **Kristen**, dan 1% adalah **Islam**. Selain agama lokal dan tradisional suku **Tionghoa Han**, terdapat juga **kelompok etnis minoritas** yang memeluk agama yang dapat ditemukan dimana ia berada. (Agama **Taoisme** meliputi 13% dari total populasi, sementara agama Konghucu (60% dari total populasi) sebagai agama rancangan diri terkenal pada kalangan intelektual.¹⁸

Kepercayaan-kepercayaan tertentu secara khusus terikat dengan kelompok etnis tertentu yang meliputi **Buddha Tibet** dan **Islam di Tiongkok Hui** dan **Uighur**. **Ke Kristenan di Tiongkok** diperkenalkan dua kali pada abad ke-7 dan ke-15, namun tidak mengakar sampai diperkenalkan kembali pada abad ke-16 oleh **para misionaris Yesuit**.

Misi-Misi Protestan dan kemudian Misionaris-Misionaris Katolik menyebarkan agama Kristen, yang mempengaruhi **Pemberontakan Taiping** pada abad ke-19. Di bawah Komunisme, para misionaris asing diusir, sebagian besar gereja ditutup dan sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit dan panti-panti asuhan dirampas. Dan pada masa **Revolusi Kebudayaan** ada beberapa pendeta yang ditahan (dipenjara). Setelah akhir 1970-an, kebebasan beragama untuk Kristen diperlonggar.

Q. HUBUNGAN INTERNASIONAL NEGARA CHINA

China merupakan negara yang penduduknya terpadat di Dunia, sedangkan Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan China terutama dalam bidang ekonomi saat ini terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya nilai jual beli antara Indonesia dan China pada tahun 2008 yang mencapai US\$ 31 miliar.

Agar dapat menjalin hubungan kerjasama antara kedua Negara maka kedua Negara harus melakukan perdagangan Internasional. Hubungan perdagangan Internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian bagi setiap Negara yang ada di dunia. Dengan adanya perdagangan Internasional ini maka, perekonomian diberbagai negara akan saling tercipta dan terjalin antara satu negara dengan Negara lainnya.

¹⁸ **China: End Arbitrary Detention in Mental Health Institutions** Human Rights Watch, May 3, 2013

Perdagangan Internasional pada zaman yang serba cepat ini secara tidak langsung mendorong terjadinya globalisasi. Globalisasi ini terjadi seiring berkembangnya zaman ditandai dengan berkembangnya inovasi baru mengenai teknologi informasi, politik, keuangan, perdagangan serta investasi. Ini merupakan salah satu modal yang penting bagi suatu Negara untuk menarik investor agar mau masuk dan berinvestasi di negara tersebut. Hubungan kerjasama ini dapat terjalin apabila mendapat dukungan baik dari berbagai sisi baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan di dalam sebuah negara maka, bukan masalah yang besar bagi suatu negara untuk mengembangkan perekonomian Negara tersebut ke arah yang lebih baik.

“Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyepakati kerja sama pada delapan bidang. Penandatanganan nota kesepahaman bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) dilaksanakan di *Great Hall of The People* oleh para pejabat Indonesia dan Tiongkok dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden *Xi Jinping*, Kamis (26/3/2015)” kunjungan kenegaraan tersebut diagendakan sebagai kunjungan penting kenegaraan mengingat china merupakan salah satu negara yang memiliki potensi kerjasama yang besar yang dapat meningkatkan ekonomi Indonesia maupun asia. Kunjungan presiden Jokowi ke Tiongkok, untuk menyatakan kesepakatan antar Indonesia dan china mengenai kesepakatan kedua Negara untuk mengumumkan pernyataan bersama tentang hubungan kerjasama kedua Negara ke arah yang saling menguntungkan. Sementara Presiden Jokowi mengatakan, “konteks hubungan bilateral yang akan dijalin antara Indonesia dan Tiongkok yaitu Kedua pihak akan melakukan kerja sama pemberantasan korupsi, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat kedua negara”.

Terdapat 8 MoU yang ditandatangani, yakni:

1. Nota kesepahaman kerja sama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT,
2. Nota kesepahaman kerja sama Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.
3. Nota Kesepahaman kerja sama maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRT.
4. Kerja sama antara Protokol Persetujuan antara Pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua Negara.
5. Kerangka Kerja Sama Antariksa 2015-2020 antara Lapan dan Lembaga Antariksa RRT.
6. Nota kesepahaman kerja sama saling dukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan China Pembangunan.
7. Nota kesepahaman antara pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua Negara dan
8. Nota kesepahaman kerja sama bidang industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.

Menurut saya dengan adanya hubungan kerjasama yang terjalin antara dua Negara ini maka kedua negara akan saling bergantung satu sama lain baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, transportasi, telekomunikasi dll dan dapat menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua Negara.¹⁹

¹⁹ Hizi, Gil. (2017). *'Developmental' Therapy for a 'Modernised' Society: The Sociopolitical Meanings of Psychology in Urban China*" China: An International Journal. 15(2): 98-119.

Nio, Joe-lan (1966). *Sastra Tiongkok Sepintas Lalu*. Jakarta: Gunung Agung.

REFERENCES

- Xiang, Yu-Tao; Yu, Xin; Sartorius, Norman; Ungvari, Gabor S; Chiu, Helen FK (November 2012). "Mental health in China: challenges and progress". *The Lancet*. **380** (9855): 1715–1716. doi:10.1016/s0140-6736(11)60893-3 | ISSN 0140-6736 | PMID 23158236
- "Content Pages of the Encyclopedia of Religion and Social Science". *hrr.hartsem.edu*. Retrieved October 21, 2018.
- Blum, N.; Fee, E. (2008). "The American Journal of Public Health (AJPH) from the American Public Health Association (APHA) publications" *American Journal of Public Health*. **98**(9): 1593. doi:10.2105/ajph.2008.134577 | PMC 2509595 | PMID 18633073
- LIU, JIN; MA, HONG; HE, YAN-LING; XIE, BIN; XU, YI-FENG; TANG, HONG-YU; LI, MING; HAO, WEI; WANG, XIANG-DONG (October 2011). "Mental health system in China: history, recent service reform and future challenges" *World Psychiatry*. **10**(3): 210-216. doi:10.1002/j.2051-5545.2011.tb00059.x | ISSN 1723-8617 | PMC 3188776 | PMID 21991281
- Reuters. October 26, 2012. Retrieved October 27, 2012.. Xinhua. October 25, 2012. Retrieved October 27, 2012.
- China: End Arbitrary Detention in Mental Health Institutions | Human Rights Watch, May 3, 2013
- "World Health Organization Collaborating Center for Training and Research in Mental Health and the Prevention of Substance Abuse" WHO Collaborating Center at NKI. Archived from the original on February 18, 2012. Retrieved October 20, 2016.
- Phillips, Michael R; Zhang, Jingxuan; Shi, Qichang; Song, Zhiqiang; Ding, Zhijie; Pang, Shutao; Li, Xianyun; Zhang, Yali; Wang, Zhiqing (June 2009). "Prevalence, treatment, and associated disability of mental disorders in four provinces in China during 2001–05: an epidemiological survey". *The Lancet*. **373** (9680): 2041–2053. doi:10.1016/s0140-6736(09)60660-7 | ISSN 0140-6736 | PMID 19524780
- "The World Today - China launches major reform of mental health services" *abc.net.au*. Retrieved October 3, 2018.
- "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on July 30, 2011. Retrieved July 30, 2011.
- "Religion Statistics and Information | GRF" *globalreligiousfutures.org*. Retrieved October 21, 2018.
- Wynaden, Dianne; Chapman, Rose; Orb, Angelica; McGowan, Sunita; Zeeman, Zenith; Yeak, SiewHo (June 1, 2005). "Factors that influence Asian

communities' access to mental health care". *International Journal of Mental Health Nursing*. **14** (2): 88–95. doi:10.1111/j.1440-0979.2005.00364.x PMID:15896255

"And now the 50-minute hour: Mental health in China" *The Economist* August 18, 2007. p. 35. Retrieved August 18, 2007.

Huang, Hsuan-Ying. (2015). "From psychotherapy to psycho-boom: a historical overview of psychotherapy in China" *Psychoanalysis & Psychotherapy in China*. 1: 1-30.

Hizi, Gil. (2017). "Developmental' Therapy for a 'Modernised' Society: The Socio-political Meanings of Psychology in Urban China" *China: An International Journal*. 15(2): 98-119.

Nio, Joe-lan (1966). *Sastra Tiongkok Sepintas Lalu*. Jakarta: Gunung Agung.

Gao Xia. 2006. *Comparative Research on Education Reform and Curriculum Change: Re-design of Instructional Time in Compulsory Education*. Reference report. (in Chinese).

Ministry of Education China. 2008. *Country Report on Teacher Development in Primary and Secondary Education in China*. (in Chinese).

Ministry of Education China. 2004. *China 2003-2007 Action Plan for Revitalizing Education: A Learning Guidebook*. Beijing: Education Sciences Press. (in Chinese)

Ministry of Education China. *China Educational Statistic Yearbook*, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998. Beijing: The People's Education Publishing House. (in Chinese)

UNESCO. 2005. *Education for All Global Monitoring Report 2005 - The Quality Imperative*, UNESCO Publishing House.

Wang Dinghua. 2006. *The Development of Basic Education in Rural China: Issues and Problems*. A presentation to the International Forum on Contemporary Rural Development in China.

Wang Wenjing. 2006. *New Curriculum and Teacher Professional Development*. Reference report. (in Chinese).

Yu Xing-guo. 2006. *The Status Quo of School Teachers and Teacher Education in Rural China*, a report to FAO. (in C

BAB XIV SISTEM PENDIDIKAN DI SAUDI ARABIA

Heniaty

Heniatiheni03@gmail.com

A. LETAK GEOGRAFIS DI SAUDI ARABIA



Gambar 14.1 Peta Negara Saudi Arabia

Kerajaan Arab Saudi, ($15^{\circ}\text{LU} - 32^{\circ}\text{LU}$ dan antara $34^{\circ}\text{BT} - 57^{\circ}\text{BT}$) adalah sebuah Negara yang terletak di Asia Barat Daya, Negara terbesar di Jazirah Arab, berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Merah, serta utara Yaman. Garis pantai yang luas di Teluk Persia dan Laut Merah memberikan pengaruh besar pada pengiriman (terutama minyak mentah) melalui Teluk Persia dan Terusan Suez. Kerajaan ini menempati 80% dari Jazirah Arab. Sebagian besar batas Negara Arab Saudi berbatasan dengan Uni Emirat Arab (UAE), Kesultanan Oman, dan Republik Yaman (sebelumnya dua Negara terpisah: Republik Arab Yaman atau Yaman Utara, dan Republik Demokrasi Rakyat Yaman atau Yaman Selatan), luas Negara tidak terdefinisi, sehingga ukuran yang tepat dari Negara itu tetap tidak diketahui. Perkiraan pemerintah Saudi adalah di 2.217.949 kilometer persegi, sementara perkiraan terkemuka lainnya bervariasi antara 2.149.690 dan 2.240.000 km^2 . Kurang dari 1% dari total luas Negara cocok untuk budidaya, dan pada awal 1990-an, penyebaran penduduk sangat bervariasi antara kota-kota di wilayah timur dan barat pantai, daerah oasis padat penduduk, sedangkan gurun yang luas hampir kosong.

B. SEJARAH PENDIDIKAN DI SAUDI ARABIA

Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (Al-

Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz Al-Sa'ud. Arab Saudi terkenal sebagai Negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti "Tidak ada tuhan (yang pantas) untuk disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah".

Pendidikan pada masa Rasulullah saw, Sesuai dengan kondisi sosial politik pada masa itu, dapat dibagi menjadi dua periode yaitu periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah pendidikan dimulai dengan cara sembunyi-sembunyi, tahap terang-terangan dan tahapan umum. Lembaga pendidikan pada masa itu adalah rumah Arqam bin Abi Arqam dengan materi pendidikan tauhid, Al-Qur'an. Pada periode Madinah, Rasulullah saw. mulai dengan mendirikan masjid dan pembentukan Negara Madinah.

Rasulullah bersama sahabat terus mengembangkan agama Islam. Sampai Islam berkembang ke beberapa Negeri. Setelah Rasulullah wafat perjuangan dilanjutkan oleh para sahabat, sehingga Islam semakin berkembang keseluruh penjuru dunia. Selanjutnya pendidikan Islam berkembang di tanah Arab, terutama di Madinah dan Mekah, sehingga Mekah dan Madinah menjadi pusat studi dan perkembangan intelektual. Ini terbukti dengan munculnya intelektual Muslim seperti Imam Ali, Imam Abbas, Imam Jafar Sadiq dan lain-lain.

Menurut Taqi al-din al-Fasi al-Makki al-Maliky (775-832 H / 1373-1428 H), madrasah pertama yang ada di Mekkah adalah Madrasah Al-Urshufiyah hingga awal abad ke 17, setidaknya ada 19 madrasah yang didirikan di Mekkah. Sedangkan di Madinah perkembangan Madrasah tidak sebegus di Mekkah, pasalnya sumber-sumber yang berkenaan dengan sejarah Madinah pada umumnya tidak membahas hal ini. Selanjutnya pendidikan Islam terus berkembang di dua tanah suci dan seluruh pelosok Arab Saudi. Sampai saat ini sudah banyak Madrasah, sekolah serta perguruan tinggi yang jumlahnya semakin bertambah dan berkembang dengan cepat sehingga melahirkan Universitas yang ternama di Arab Saudi bahkan di luar Arab Saudi.¹

C. GAMBARAN UMUM SAUDI ARABI DAN SISTEM PEMERINTAHANYA

Arab Saudi atau Kerajaan Arab Saudi adalah Negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata Sahara.

Saudi Arabia merupakan Negara yang mencakup sebagian besar Semenanjung Arab. Dari luas Semenanjung Arab yang mencapai kurang lebih 3 juta kilo meter persegi, 2.200.000 km² merupakan daerah Saudi Arabia. Negara

¹ Yanti., *Perbandingan Pendidikan*. Rizqy Grafika, 2012. hlm 90

ini berbatasan dengan Teluk Persia, Qatar, dan negara Persatuan Emirat Arab di sebelah timur; dengan Negara Oman dan Yaman di selatan; Laut Merah dan Teluk Aqaba di sebelah barat; dan dengan Jordania, Iraq, dan Kuwait di sebelah utara. Pada tahun 2000 tercatat penduduk Saudi Arabia kurang lebih mencapai 21.504.613 jiwa, dengan 43% diantaranya berusia di bawah 15 tahun, dan 2,5% berusia di atas 65 tahun.

Kerajaan Saudi Arabia berdiri pada tahun 1920-an tetapi proklamasi terhadap Negaranya dilakukan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud. Sistem pemerintahan Saudi Arabia adalah monarki atau kerajaan, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai Undang-Undanganya. Kekuasaan Legislatif dan Yudikatif dipegang oleh dewan kabinet dan raja. Secara historis, Kerajaan Arab Saudi berdiri atas kerja sama antara Muhammad Ibnu Abdul Wahab (seorang pemikir Islam revolusioner) dengan Ibnu Saud (pemimpin kabilah). Sekarang, Saudi Arabia dipimpin oleh raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, beliau adalah raja ke-7 Dinasti Al-Saud.

Sistem pemerintahan Saudi Arabia adalah monarki atau kerajaan, dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai Undang-Undanganya. Kekuasaan Legislatif dan Yudikatif dipegang oleh dewan kabinet dan raja. Saat ini putra mahkotanya adalah Pangeran Abdullah ibn Abdul Aziz al-Sa'ud, yang merangkap sebagai Wakil Perdana Menteri dan Panglima Garda Nasional. Kerajaan Saudi Arabia memperingati hari nasionalnya setiap tahun, pada hari pertama rasi bintang Libra, yaitu tanggal 23 September, sesuai dengan tanggal didirikannya kerajaan tersebut oleh Raja Abdul Aziz al-Sa'ud. Kalender resminya adalah kalender Hijriyah, yakni berpedoman atas peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, yang bertepatan dengan tahun 622 M²

D. KONDISI DEMOGRAFI DAN POTENSI INCOME NEGARA

Kerajaan Saudi Arabia terletak di sudut Barat Daya Benua Asia, meliputi area seluas 2.4.00.000 km², menempati 4/5 atau 80 0/0 dari total wilayah Semenanjung Arabia. Di sebelah Barat berbatasan dengan Jordania, Irak, dan Kuwait; di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab; di sebelah selatan berbatasan dengan Oman dan Yaman. Populasi penduduknya lebih dari 16.900.000 jiwa (1994), dengan Riyadh sebagai ibu kotanya. Kondisi geografis Saudi Arabia tergolong spesifik: sebagian besar gurun, bukit, dan di beberapa daerah berdekatan dengan sungai atau laut.³ Secara geografis, Saudi Arabia terbagi dalam tiga lahan tanah yang terbentang jauh dari ujung utara sampai jauh ke ujung selatan. Tanah bagian timur menjadi Provinsi Timur Saudi, lahan bagian Tengah menjadi Provinsi Tengah (atau Najd); lahan bagian Barat terbagi dalam

¹Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Cet. 1 (Bandung: Lubuk Agung, 2001), hlm 39

dua Provinsi: Provinsi Barat (atau Hijaz) dan Provinsi Selatan (atau Asseer). Kecuali daerah pegunungan di Barat Daya Provinsi Asseer, Saudi Arabia pada umumnya daerah padang pasir yang kering yang mendapat hujan rata-rata 100 milimeter per tahun.

Setelah perang Dunia II, produksi minyak Saudi Arabia menjadi basis pendapatan Negara, meskipun itu baru dimulai tahun 1973 ketika terjadi revolusi harga minyak dunia. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 1977 mencapai 40 triliun USS. Tiga tahun kemudian, melonjak hingga mencapai 70 triliun USS³. Secara umum kondisi demografi dan potensi income Negara dapat digambarkan sebagai berikut:

Penduduk	: 25,6 juta jiwa (PBB 2005) termasuk 23% (5,3 juta) adalah warga asing dan 23% tinggal di Pedesaan, angka pertumbuhan penduduk sekitar 3,28%.
Etnis	: Arab 90% dan Afro-Asia 10%.
Agama	: Islam dengan 85% Sunni dan 15% Syiah.
Bahasa	: Arab
Mata Uang	: Saudi Riyal (SR).
Sumber Alam	: Minyak, gas dan mineral (emas, perak, tembaga)
GNP per Kapita	: USS 316,4 Miliar/USS 13,955.
Angkatan Kerja	: 7.242.077 (2002)
Produksi Utama	: Alfafa (makanan ternak), binatang ternak, minyak mentah, gas alam, kurma, anggur, kambing, unggas, sorghum, semangka dan gandum. Industri : Semen, penyulingan dan pengolahan minyak mentah dan gas alam, pupuk dan baja.
Ekspor Utama	: Minyak mentah, hasil-hasil penyulingan, dan gas alam ^[2]

E. SISTEM PENDIDIKAN DI SAUDI ARABIA

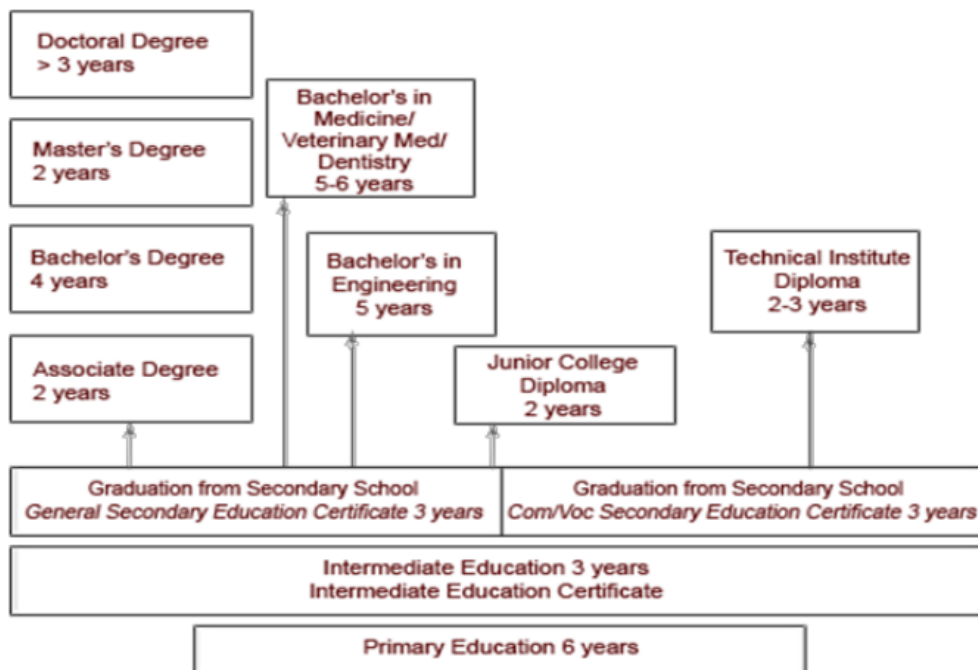
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk berkembangnya suatu Negara. Tanpa adanya sistem pendidikan yang baik, maka kemajuan suatu Negara akan terganggu. Di dunia terdapat 5 benua, yaitu Asia, Eropa, Amerika, Australia dan Afrika. Pada makalah Wawasan Pendidikan ini akan dibahas tentang sistem Pendidikan pada beberapa Negara yang disebutkan di atas. Sistem pendidikan di Negara Saudi Arabia berdasarkan sistem Islam dimana dilakukan pemisahan antara kaum Laki-Laki dengan Kaum Perempuan. Struktur pendidikannya dimulai dari *Primary Education* selama 6 tahun, *Intermediate Education* selama 3 tahun, *Secondary School* selama 3 tahun dilanjutkan dengan Jalur Akademik (*Bachelor, Master, Doctoral*) dan Jalur Spesialis (*Diploma atau Engineering*) Arab Saudi atau Kerajaan Arab Saudi adalah Negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Beriklim gurun dan

³Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20; Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 70

wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar.

Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud Memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (Al-Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi Raja pertama pada kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz Al-Sa'ud. Arab Saudi terkenal sebagai Negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti "Tidak ada tuhan (yang pantas) untuk disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah".

Struktur sistem Pendidikan di Saudi Arabia dapat digambarkan



Gambar 14.2. Struktur Sistem Pendidikan di Saudi Arabia

Madrasah modern di Saudi Arabia dulunya merupakan bagian dari pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan oleh Turki Usmani. Akan tetapi, setelah berpisah dari kekuasaan Turki Usmani, tahun 1917 lembaga pendidikan itu di transformasikan menjadi “sekolah Hasyimiyah”. Sekolah ini mengkombinasikan mata pelajaran agama dan umum, terdiri dari tiga jenjang yaitu; Pendidikan di Arab Saudi terbagi menjadi dua bagian: Pendidikan Umum yang terbagi menjadi tiga tahap

Pendidikan Umum yang terbagi menjadi tiga tahap

1. Sekolah Dasar (*Ibtida'iyah*) dengan lama studi 6 tahun

2. Sekolah Menengah Pertama (*Mutawasithah*) dengan lama studi 3 tahun
3. Sekolah Menengah Atas (*Tsanawiyah*) dengan lama studi 3 tahun

Pendidikan Tinggi yang terbagi menjadi:

1. Studi Sarjana (Bachelor)
2. Studi Magister
3. Studi Doktora

Selain sistem pendidikan di atas, juga tersedia pendidikan khusus menghafal Al- Qur'an di jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, dan juga Pendidikan Industri, Perdagangan dan Pertanian. Pendidikan Umum diawasi oleh Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Arab Saudi sementara Pendidikan Tinggi diawasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi.

Pada tahun 1424 H (2003-2004) telah keluar peraturan baru yakni mengadakan ujian kemampuan untuk seluruh siswa kelas akhir di tingkat Sekolah Menengah Atas (*Tsanawiyah*) yang diadakan di Universitas-Universitas oleh Pusat Standarisasi dan Pengembangan Arab Saudi, tes tersebut mengukur bidang kebahasaan dan keolahragaan. Selain itu, bagi para siswa yang akan melanjutkan studinya di bidang kedokteran atau teknik diwajibkan untuk mengikuti ujian prestasi dengan 5 mata pelajaran (Matematika, Kimia, Fisika, Bahasa Inggris dan Biologi). Pada tahun 1434 H (2012-2013), mata pelajaran Bahasa Inggris dihapus dari ujian prestasi tersebut. Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Arab Saudi juga membuat Program Pelayan Dua Tanah Suci untuk Beasiswa ke luar negeri, yakni program besar dan ambisius yang bertujuan untuk mengembangkan bakat Warga Negara Arab Saudi dengan mengirimkan warga Saudi ke Universitas-Universitas di berbagai belahan dunia, program ini sudah diikuti oleh 10 ribu penerima beasiswa.

Pendidikan Tinggi (*Higher Education*)

Pendidikan tinggi atau Universitas di Arab Saudi terbagi menjadi dua bagian utama yakni Pendidikan Agama dan Pendidikan Umum. Namun demikian, sekarang sudah sangat banyak Universitas yang menggabungkan keduanya. Jenis perguruan tinggi di Arab Saudi adalah Universitas, Institut untuk perempuan (*college for women*), institut administrasi publik (*institute of public administration*) dan institut keguruan (*teacher training college*). Semua Universitas berada di bawah supervisi Kementerian Pendidikan Tinggi (*Ministry of Higher Education*) kecuali Universitas Islam Madinah (*Islamic University of Madinah*), Universitas terbaik di Arab Saudi untuk pendidikan agama Islam, yang berada di bawah supervisi dewan menteri (*Council of Ministers*). Untuk memasuki perguruan tinggi di Arab Saudi, calon mahasiswa harus memenuhi tes masuk perguruan tinggi (*General Secondary Education Certificate Examination*) atau *Tawjihi*.

1. Pendidikan Tinggi Universitas

Untuk pendidikan tinggi Universitas, tingkatannya sama seperti Universitas pada umumnya, yaitu: Strata 1 (*Bachelor*), Strata 2 (*Master*), dan Strata 3 (*Doctor*). Untuk S1, waktu yang dibutuhkan adalah 4 tahun (minimal), tetapi untuk teknik, medis, dan farmasi dibutuhkan minimal 5 tahun untuk menyelesaikannya. Untuk S2 (*Master*) dibutuhkan minimal 2 tahun untuk menyelesaikannya dengan syarat harus sudah menyelesaikan S1.

Ada dua jalur untuk S2, dengan tesis (*by thesis*) atau dengan kuliah (*by course*). Apabila kita mengambil jalur tesis, maka setelah menyelesaikan mata kuliah yang sudah ditentukan, kita harus menyelesaikan tesis kurang lebih selama satu tahun (2 semester), sedangkan untuk jalur kuliah, kita hanya perlu menyelesaikan seluruh mata kuliah yang telah ditentukan, namun dengan jumlah mata kuliah yang lebih banyak.

Untuk S3, lama waktu yang dibutuhkan adalah 3 tahun setelah menyelesaikan S2. Untuk S3, kita harus menyelesaikan mata kuliah dan mengumpulkan disertasi yang merupakan hasil *riset independen* yang telah dilakukan. Selain itu, tambahan syarat kadang-kadang diperlukan, seperti: minimal mempublikasikan jurnal Internasional atau konferensi Internasional.

Sebagai tambahan, ada beberapa Universitas khusus untuk perempuan yang sebagian besar berfokus kepada ilmu pendidikan. Jenjang yang tersedia untuk Universitas khusus perempuan ini mulai dari S1 sampai S3.

Universitas besar di Arab Saudi di antaranya *King Saud University*, *King Fahd University of Petroleum and Mineral*, *King Abdul Aziz University*, *King Faisal University*, dan universitas baru *King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)*

2. Pendidikan Tinggi Non Universitas

a. Technical College

Pendidikan tinggi ini setara dengan diploma yang harus diselesaikan selama 3 tahun. Bidang-bidang yang tersedia: *control* otomatis, sistem elektrikal otomatis, otomotif, perlengkapan elektrik, instalasi elektrik, kimia industri, elektronik industri, dan teknik produksi.

b. Higher Technical Institute

Pendidikan ini seperti layaknya D1 yang dapat diselesaikan selama 1 tahun saja.

c. Higher Technical Institutes for Financial and Commercial Science

Pendidikan tinggi ini khusus untuk ilmu keuangan dan komersial. Kurikulum yang tersedia adalah: akuntansi, korespondensi komersil dan bisnis, bahasa inggris, asuransi, kebudayaan Islam, pemasaran dan periklanan, pembelian dan inventori, dan kesekretariatan. Lama pendidikan yang harus ditempuh adalah selama 2 tahun.

d. The Institute of Public Administration

Lama studi untuk jenis pendidikan tinggi ini adalah selama 2 sampai 3 tahun. Bidang-bidang yang tersedia adalah: perbankan (2 tahun), pemrosesan data

elektronik (2.5 tahun), administrasi rumah sakit (2 tahun), ilmu perpustakaan (3 tahun), ilmu personal (2 tahun), ilmu kesekretariatan (2 tahun), dan ilmu pergudangan (2 tahun).

e. Teacher Training College

Untuk pendidikan keguruan terbagi menjadi 3 jurusan: guru sekolah dasar dan menengah pertama (*primary school*), guru sekolah menengah atas (*secondary school*), dan guru pendidikan lanjut (*higher education*).

Struktur Kementerian Pendidikan di Saudi Arabia

Struktur Kementerian Pendidikan di Saudi Arabia terdiri dari 2 Kementerian dan 1 bidang Kerjasama Pelatihan Kejuruan, seperti berikut ini.

- Ministry of National Education (Secondary, Teacher Education)*
- Ministry of Higher Education (Universities)*
- Technical and Vocational Training Corporation (TVTC) (secondary, higher technical institutes, higher commercial institutes).*

TVTC secara formal disebut dengan *General Organization for Technical Education and Vocational Training (GOTEVOT)*, yang mempunyai web seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 14.3. Technical and Vocational Training Corporation

Sekitar 5 tahun yang lalu *General Organization for Technical Education and Vocational Training (GOTEVOT)*, bekerjasama dengan VEDC Malang untuk mengadakan Pelatihan Guru Kejuruan yang dilaksanakan di VEDC Malang, Jawa Timur, Indonesia. Gedung pendidikan di Saudi Arabia, hampir sama dengan model bangunan lainnya dengan model Kotak Minimalis seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 14.4 Contoh Gedung Sekolah di Saudi Arabia

F. KEBIJAKAN DI BIDANG MANAJEMEN PENDIDIKAN FORMAL

Sistem pendidikan di Saudi Arabia memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syari'at Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama:

1. Pendidikan umum untuk laki-laki
2. Pendidikan umum untuk perempuan
3. Pendidikan islam untuk laki-laki

Untuk kaum laki-laki hampir semua menggunakan jubah Muslim dengan khas sorban seperti pada gambar berikut ini.

Pendidikan umum dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu pendidikan dasar 6-12 tahun, pendidikan menengah 12-15 tahun, pendidikan sekunder 15-18 tahun dan pendidikan tinggi berupa Universitas atau Akademi. Ada juga lembaga swasta khusus laki-laki yang mulai muncul tahun 1920-an. Sejak tahun 1951, program, sekolah didanai publik, sedangkan untuk pendidikan khusus perempuan mulai didanai sejak 1961 atas prakarsa Pangeran Faisal dan istrinya, Iffat. Semua buku dan pelayanan kesehatan untuk siswa disediakan secara gratis oleh pemerintah. Pendidikan Islam tradisional bagi laki-laki difokuskan untuk membentuk calon-calon anggota dewan ulama⁴. Sebagai bentuk pembinaan pemuda, Saudi Arabia berupaya meningkatkan prestasi mereka dibidang olahraga dan kebudayaan yang ditangani oleh Badan Negara Urusan Kesejahteraan Pemuda (*General Presidency of Youth Welfare*). *Stadion Internasional Raja Fadh* di Riyadh yang diresmikan pada tahun 1408 H atau 1988 M merupakan salah satu pusat gelanggang olahraga terbesar di dunia yang dapat menampung 80.000 penonton. Masalah manajemen pendidikan formal di Saudi Arabi ditangani oleh departemen, yaitu:

⁴ Idam Mustofa, hlm. 15

1. *Wizarah al-Ma'arif wa al-Tsaqafah* (Departemen Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan) yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah, baik umum maupun khusus.
2. *Wizarah al-Ta'lim al-Alay* (Departemen Pengajaran Tinggi) yang menangani lembaga pendidikan tinggi, baik di lingkungan Perguruan Tinggi Umum (PTU) maupun Perguruan Tinggi Agama (PTA).⁵

G. DINAMIKA DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

a. Pengembangan Kurikulum

Dengan sedikit keahlian dalam pendidikan modern, sistem pendidikan di Saudi Arabia pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada Negara-Negara Arab lainnya, terutama Negara Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Kurikulum untuk sekolah-sekolah pria dan wanita pada setiap jenjang yang sama pada prakteknya sama kecuali sekolah wanita menambahkan mata pelajaran manajemen rumah tangga, sementara sekolah pria menambahkan mata pelajaran jasmani, yang tidak diajarkan pada sekolah wanita. Sekolah-sekolah swasta diharuskan oleh peraturan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada sekolah-sekolah negeri. Pengimplementasian kurikulum dimonitor melalui berbagai cara seperti melalui kepala sekolah, kunjungan oleh para inspektur dari kantor-kantor distrik, dan juga melalui sistem ujian akhir yang mencakup seluruh materi yang seharusnya diajarkan pada setiap semester.

Dengan sedikit keahlian dalam pendidikan modern, sistem pendidikan di Saudi Arabia pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada Negara-Negara Arab lainnya, terutama Negara Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Kurikulum untuk sekolah-sekolah pria dan wanita pada setiap jenjang yang sama pada prakteknya sama kecuali sekolah wanita menambahkan mata pelajaran pendidikan jasmani, yang tidak diajarkan pada sekolah wanita. Sekolah-sekolah swasta diharuskan oleh peraturan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada sekolah-sekolah negeri. Pengimplementasian kurikulum dimonitoring melalui berbagai cara seperti melalui kepala sekolah, kunjungan oleh para inspektur dari kantor-kantor distrik, dan juga melalui sistem ujian akhir yang mencakup seluruh materi yang seharusnya diajarkan pada setiap semester⁶.

b. Struktur Lembaga Pendidikan Islam dan Kurikulum di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan Negara Islam dengan kawasan gurun dan menjadi Negara yang terluas di Asia Tengah. Meskipun sebagian wilayahnya merupakan daerah gurun, dibagian barat dayanya, terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau. Arab Saudi dikenal sebagai Negara penghasil minyak yang cukup besar

⁵Agustiar Syah, *Perbandingan Sistem Pendidikan*, hlm. 39

⁶*Ibid*, hlm..., 49-50

di Dunia (International, n.d.). Kemudian, sistem Pendidikan di Arab Saudi terdiri dari pendidikan pra dasar, pendidikan dasar, pendidikan sekunder dan pendidikan tinggi yang akan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 14.1

Model Pendidikan Di Arab Saudi

Pra Sekolah	Pend. Dasar	Pend. Menengah	Pend. Sekunder
Usia 4-5 tahun Materi: bermain, bercerita, menggambar, membaca dan menulis	Usia 6-11 tahun Materi: B Arab, Seni Budaya, Geografi, Sejarah, Ekonomi Rumah (untuk siswa perempuan), matematika dan Pend. Olahraga (untuk siswa laki-laki) Mendapat Ijazah: Sertifikat "Syahadatal Madaris al Ibditida'iyah"	Usia 12-14 tahun Materi: Bahasa Arab, Seni, Geografi, Sejarah, Ekonomi Rumah (untuk siswa perempuan), studi Islam dan Sains, dan bahasa Inggris. Ijazah: Syahadat al Kafa'at al Mutawassita.	Usia 15-17 Di Saudi pendidikan sekunder ini menawarkan tiga program pendidikan yakni: pendidikan menengah umum, pendidikan menengah agama dan pendidikan menengah teknik.

Mengenai materi atau kurikulumnya pada masing-masing jenis pendidikan sekunder tersebut sebagai berikut:

Tabel 14.2

materi dan kurikulum Pendidikan di Arab Saudi

Pend Menengah Umum	Pend Menengah Agama	Pend Menengah Teknik
B Arab, Biologi, B Inggris, Geografi, Sejarah, Ekonomi Rumah (siswa Perempuan), Matematika, Olah Raga (siswa laki-laki), dan Pend. Agama	B Arab, B Inggris, Kebudayaan dan Seni, Geografi, Sejarah dan Pend Agama	Ada Tiga Jurusan: <i>Pertama</i> , Jurusan Teknik: Arsitektur, Otomotif, Elektrikal, Mekanik Mesin, Mekanik Mental, Radio, Televisi, B Inggris, B Arab, Fisika, Kimia dan Pend Agama. <i>Kedua</i> , Jurusan Komersial: B Arab, Matematika, Ekonomi, Matematika Umum, Geografi, Manajemen, Kesekretariatan, Pend Agama. <i>Ketiga</i> , Jurusan Agrikultural: Ilmu Ekonomi Agrikultur, Agronomi, Perembangbiakan Hewan, Biologi Terapan, Kimia Terapan, Fisika Terapan, Matematika Terapan, B Arab, B Inggris, Manajemen Pertanian dan Lahan, Holtikultura, Pend Agama, Pemasaran dan Nutrisi Pangan (Assegaf, 2003).

Jenjang Pendidikan Tinggi di Saudi dibagi menjadi dua bagian utama yaitu pendidikan Agama dan pendidikan Umum. Namun, saat ini di Saudi juga sudah ada beberapa perguruan tinggi yang mensinergikan keduanya (ilmu agama dan ilmu umum). Di antaranya: Institut untuk Perempuan, Institut Administrasi Publik, dan Institut Keguruan. Semua perguruan tinggi berada di bawah Supervisi Kementerian Pendidikan Tinggi (*Ministry of Higher Education*). Kecuali Universitas Islam Madinah yang berada di bawah supervise Dewan Menteri.

Berikut penulis gambarkan dalam bentuk bagan mengenai struktur lembaga pendidikan Islam di Arab Saudi:



Gambar 14.5: Jenjang Pend. Islam di Arab Saudi

Selain itu di Arab Saudi juga mengklasifikasikan mengenai jenis pendidikan tinggi. Hal tersebut sebagai bentuk pelayanan Arab Saudi kepada umat Islam baik yang ada di Saudi maupun di luar Saudi untuk bisa memilih dan mengembangkan ilmunya di Perguruan Tinggi yang ada di sana, berikut akan digambarkan mengenai jenis pendidikan tinggi tersebut:

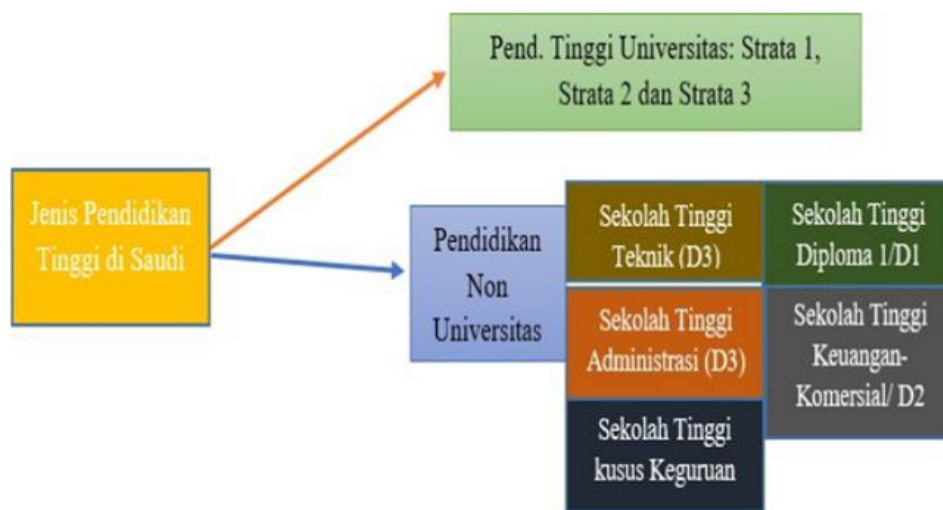
Tabel 14.3

Jenis Pendidikan Tinggi di Arab Saudi

Pendidikan Tinggi Universitas terdiri atas:	Pendidikan Tinggi Non Universitas terdiri atas:
<i>Pertama</i> , Strata Satu/S1 dengan masa studi selama 4 tahun	<i>Pertama</i> , Pendidikan Tinggi D3 dengan jurusan control otomatis, sistem elektrikal otomatis, otomotif, perlengkapan elektrik, instalasi elektrik, kimia industri, elektronik industri dan teknik produksi.
<i>Kedua</i> , Strata Dua/S2 dengan masa studi selama 2 tahun	<i>Kedua</i> , Pendidikan Tinggi D1 dengan masa studi 1 Tahun
<i>Ketiga</i> , Strata Tiga/S3 dengan masa studi 3 tahun	<i>Ketiga</i> , Pendidikan Tinggi Khusus Ilmu Keuangan dan Komersial. Dengan masa studi selama 2 tahun. Adapun jurusannya meliputi akuntansi, korespondensi komersil dan bisnis, bahasa Inggris, asuransi, kebudayaan Islam, pemasaran dan periklanan, pembelian dan inventori dan masalah-masalah kesekretariatan

	<i>Keempat</i> , Pendidikan Tinggi Ilmu Administrasi. Masa studinya selama 2-3 tahun. Adapun jurusan yang tersedia ialah; perbankan (2 tahun), pemrosesan data elektronik (2,5 tahun), administrasi rumah sakit (2 tahun), ilmu kepustakaan (3 tahun), ilmu personal (2 tahun), ilmu kesekretariatan (2 tahun) dan ilmu pergudangan (2 tahun).
	<i>Kelima</i> , Pendidikan Tinggi Keguruan yang meliputi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Menengah Pertama, Pendidikan Guru Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Guru Lanjut (Assegaf, 2003).

Berikut penulis gambarkan mengenai klasifikasi jenis Pendidikan Tinggi di Arab Saudi:



Gambar 14.6: Jenis-jenis Pend. Tinggi di Aran Saudi

H. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SAUDI ARABIA

Kecuali pada sekolah-sekolah swasta yang tergantung terutama pada pembayaran SPP atau uang sekolah oleh orang tua murid, semua sekolah di Saudi Arabia adalah gratis untuk semua murid dan siswa. Sebagian lembaga pendidikan, seperti fakultas-fakultas, institute keagamaan, dan institusi pendidikan teknik dan pendidikan khusus, bahkan juga memberikan biaya hidup bulanan bagi mahasiswanya⁷. Seperti terlihat daftar di bawah ini, pengeluaran pemerintah pada pendidikan meningkat besar sekali sesudah tahun 1960-an yang mencerminkan dua faktor yang saling berkaitan. Pertama, peningkatan pendapatan pemerintah dari hasil minyak, dan kedua, perluasan upaya-upaya kependidikan baik secara *horizontal* maupun *vertical*.

⁷ *Ibid*, hal.47

Tabel 14.4**Pengeluaran Pemerintah pada Pendidikan dalam Tahun-tahun Tertentu**

Years	Expenditure on Education (thousands of riyals)	Share of Total Budget (%)
1945	130	6.3
1949-1950	9.433	7.5
1954-1955	48.000	6.3
1959-1960	122.068	16.5
1964-1965	408.000	13.0
1969-1970	569.000	10.0
1974-1975	3.760.000	8.2
1979-1980	16.269.082	10.2
1984-1985	23.031.700	11.5
1989-1990	22.504.900	16.0

Sebuah terbitan pemerintah tahun 1979 menyatakan bahwa “suatu kalkulasi kasar menunjukkan pengeluaran pemerintah lebih dari 500 riyal per kepala penduduk Saudi untuk pendidikan, dan ini berarti 4000 riyal per anak yang terdaftar pada berbagai tingkat dan jenis pendidikan” (Kementerian Pendidikan, data Pusat Statistik 1979, dalam Al-Baadi 1995). Angka ini meningkat hampir dua kali lipat dalam tahun 1989-1990 menjadi 7,451 riyal (kira-kira US \$2000) per siswa per tahun.

Anggaran Gaji Profesi guru perbulan di Saudi Arabia

Gaji untuk: Tutor (Guru) Arab Saudi - USD 1932

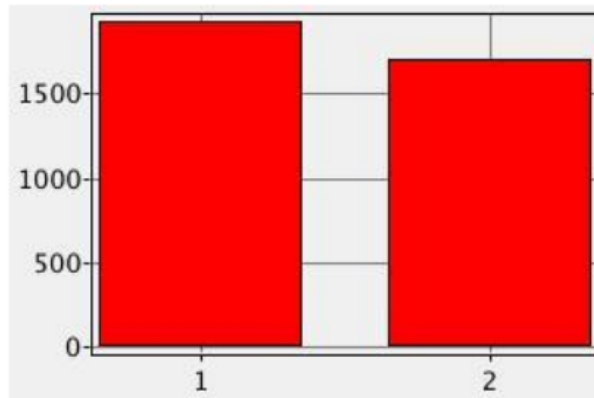
Gaji rata-rata Arab Saudi - USD 1710

Pengaruh pengalaman kerja terhadap gaji:

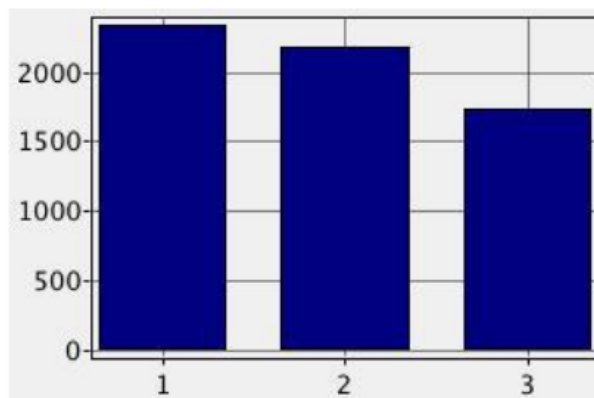
Berpengalaman: + 21%

Pertengahan karir: + 13%

Tingkat masuk: - 10%



Bagan: (1) Gaji - Tutor (Guru) (2) Gaji rata-rata - Arab Saudi



Bagan: (1) Berpengalaman (2) Pertengahan karir (3) Tingkat masuk

I. KESIMPULAN

Sistem pemerintahan Saudi Arabia adalah monarki atau kerajaan, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai undang-undangnya. Kekuasaan legislative dan yudikatif dipegang oleh dewan cabinet dan raja.

Secara georgafis, Saudi Arabia terbagi menjadi tiga lahan tanah yang terbentang jauh dari ujung utara sampai jauh keujung selatan. Tanah bagian timur menjadi Profinsi Timur Saudi, lahan bagian tengah menajadi Profinsi Tengah (atau Najd), lahan bagian barat terbagi dalam dua Provinsi: Provinsi Barat (atau Hijaz) dan Provinsi Selatan (atau Asseer)

Sistem pendidikan di Saudi Arabia pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada Negara-Negara Arab lainnya, terutama Negara Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Untuk pengembangan tenaga kependidikan pemerintah membangun lembaga pendidikan guru.

Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai syari'at Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi tiga bagian utama: pendidikan umum untuk laki-laki, pendidikan umum untuk perempuan, dan pendidikan umum Islam untuk laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assegaf, A. R. 2003. *Internasionalisasi Pendidikan Islam; Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media.
- Green, A. (Ed.). (2006). *Education, Equality and Social Cohesion: A Comparative Analysis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hayyie Abdul al-Kattani dkk. 2009. *Study in Islamic Countries: Panduan Lengkap Kuliah di Negara-Negara Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Hariyanto, H. 2012. *Islam, Iran, dan Peradaban: Peran dan Kontribusi Intelektual Iran terhadap Peradaban Islam*. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institut.
- K. Hitti, P. 2008. *History of The Arabs*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Kemendikbud. 2013. *Kurikulum 2013-Kompetensi Dasar Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA)*. Jakarta, Kemendikbud.
- Mustofa Idam. 2015. "Relasi Islam dan Kekuasaan dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia" *Urwatul Wutsqo*, Volume 4, Nomor 2.
- Maunag Binti. 2011. *Perbandingan Pendidikan Islam, Cet.1*. Yogyakarta: Teras,
Subhan Arief. 2012. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20; Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhaimin. 2012. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muskens, W., & Hanft, A. (2009). *Design of the International Comparative Studi dalam Michaela Knust, Continuing Higher Education and Lifelong Learning: An International Comparative Studi on Structures, Organisation and Provisions*. London and New York: Spinger.
- Nurhaswati. 2015. *Pendidikan Madrasah dan Prospeknya Dalam Pendidikan Nasional*. *Jurnal Potensial*, 14(1).
- Rachman Abd Assegaf. 2003. *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rahman, Imdadun, *Arus Baru Radikal Islam: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011

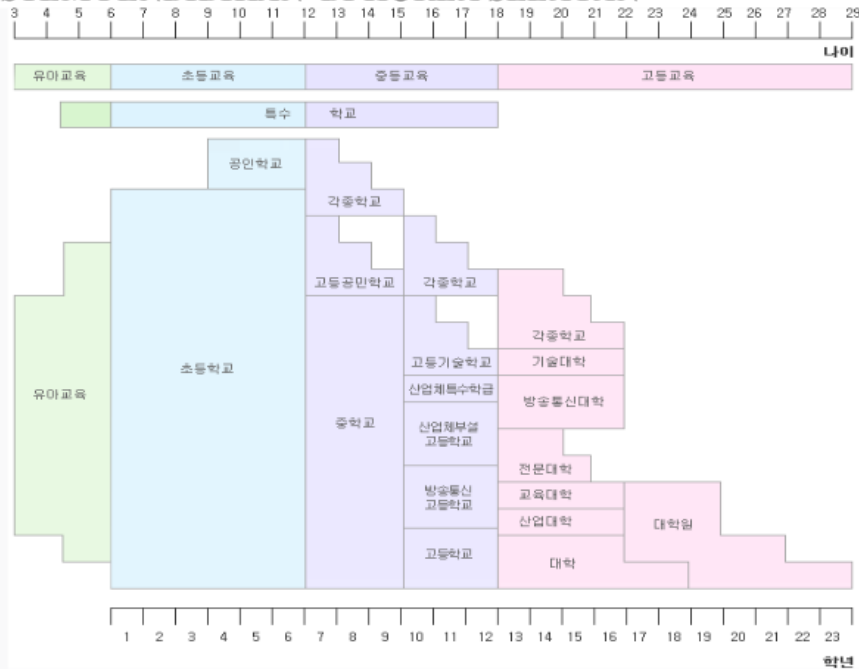
- Rahmat, R. 2014. Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sistem dan Pekembangannya Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan). Rihlah, 1(2).
- Syah Nur, Agustiar, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, Bandung: Lubuk Agung, 2001.
- Syah Agustiar. 2001. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung: Lubuk Agung Bandung.
- Shahvar, S. 2009. The Forgotten Schools; The Baha'is and Modern Education in Iran, 1899-1934.
- Stromquist, N. P. 2005. Comparative and Internasional Education. New York.

BAB XV SISTEM PENDIDIKAN DI KOREA SELATAN

Heri Purnawan

Heripurnawan488@gmail.com

A. SISTEM PENDIDIKAN DI KOREA SELATAN



Gambar 15.1 Sistem Pendidikan di Korea Selatan

Sistem Sekolah di Korea terdiri dari enam tahun Sekolah Dasar atau dasar, tiga tahun menengah Sekolah, tiga tahun Sekolah menengah, dan dua tahun *junior college* atau empat tahun kuliah atau Universitas. Anak-anak Korea harus

menghadiri kelas dari Sekolah dasar Sekolah ke Sekolah Menengah. Sekolah menengah dibagi menjadi dua jenis: umum (akademik) dan kejuruan Sekolah menengah. Institusi pendidikan tinggi dengan program sarjana empat tahun diklasifikasikan ke dalam empat kategori: (a) Perguruan Tinggi dan Universitas; (b) Perguruan Tinggi Guru dan Perguruan Tinggi Pendidikan; (c) Universitas Udara dan Korespondensi dan Terbuka Universitas; dan (d) perguruan tinggi teologi, seminari, dan lainnya.¹

B. KONSEP PENDIDIKAN DI KOREA SELATAN

Prinsip pendidikan di Korea Selatan adalah “Jika tidak jadi manusia yang unggul, kami akan mati”. Itulah prinsip yang dipegang bangsa Korea Selatan yang miskin sumber daya alam dan secara *geopolitik* dikepung empat kekuatan besar: Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Jepang.

Program Penilaian Siswa Internasional (*Program for International Student Assessment*) yang dijalankan oleh OECD baru-baru ini menempatkan pendidikan Korea Selatan di peringkat 11 Dunia. Walau siswa-siswa Sekolah Korea Selatan seringkali menempati ranking tinggi pada tes komparatif Internasional, sistem pendidikannya sering dikritik karena menerapkan cara pembelajaran yang pasif dan terlalu banyak menghafal. Sistem pendidikan Korea Selatan yang tergolong disiplin dan terstruktur adalah pengaruh *Konfusianisme* yang sudah tertanam sejak lama dalam masyarakat Korea. Siswa-siswanya jarang memiliki waktu cukup untuk bersantai karena mengalami tekanan untuk berprestasi baik untuk masuk Universitas.

C. Kurikulum dan Manajemen Pendidikan di Korea Selatan

1. Kurikulum Pendidikan di Korea Selatan

Reformasi kurikulum pendidikan di Korea, dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi, adapun yang dikerjakan oleh guru, meliputi lima langkah yaitu (1) perencanaan pengajaran, (2) Diagnosis murid (3) membimbing siswa belajar dengan berbagai program, (4) test dan menilai hasil belajar. Di Sekolah tingkat menengah tidak diadakan saringan masuk, hal ini dikarenakan adanya kebijakan "*equal accessibility*" ke Sekolah Menengah di daerahnya.

Pendidikan dilihat sebagai aspek penting bagi keberhasilan dan persaingan di Negeri Gingseng. Di Negara ini terdapat lima mata pelajaran utama, yaitu matematika sains, bahasa Korea, studi sosial, dan bahasa Inggris. Biasanya pendidikan fisik atau olahraga dianggap tidak terlalu penting, makanya banyak Sekolah yang tidak memiliki *gymnasium* yang layak. Korea Selatan adalah Negara pertama di dunia yang memberikan akses internet berkecepatan tinggi di setiap Sekolah

Korea *Institute for Curriculum and Evaluation (KICE)* mengeluarkan hasil

¹ Kim, G. J. (2002). Education policies and reform in South Korea. *Secondary education in Africa: Strategies for renewal*, 29-39.

laporan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* tahun 2011, yang diikuti 300.000 siswa kelas 4 dari 50 Negara dan 300.000 siswa kelas 8 dari 42 Negara.

Hasilnya, siswa kelas 4 Korea Selatan meraih skor rata-rata 605 dalam matematika, peringkat kedua di belakang Singapura. Dan dalam bidang sains, siswa- siswa Korea Selatan menduduki peringkat pertama dengan 587 poin. Prestasi ini pun diikuti oleh siswa kelas 8 dalam matematika dengan memperoleh nilai 613, nilai tertinggi dari 42 Negara lainnya. Sedangkan untuk sains, mereka menempati posisi ke tiga dengan nilai 560.

Seperti halnya pendidikan di Negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan dalam beberapa jenjang, yaitu jenjang pendidikan primer (*primary education*), pendidikan sekunder (*secondary education*), dan pendidikan tinggi (*high education*).

Pendidikan primer di Korea Selatan diwajibkan untuk anak-anak berusia 6 sampai 14 tahun. Pada jenjang pendidikan primer ini, prosesnya dilaksanakan di taman kanak-kanak dan Sekolah dasar.

Pendidikan sekunder di Korea selatan idealnya dilaksanakan selama 6 tahun, yaitu 3 tahun di Sekolah menengah (setara dengan SMP di Indonesia) dan Sekolah atas (setara dengan SMA di Indonesia). Pada jenjang pendidikan sekunder ini, prosesnya dilaksanakan Sekolah-Sekolah kejuruan (setara dengan SMK di Indonesia). Selain itu, pada usia-usia Sekolah menengah dan Sekolah tinggi ini, anak-anak Korea Selatan melaksanakan beberapa pendidikan tambahan, yaitu melalui kegiatan kursus-kursus tertentu.

Pendidikan tinggi di Korea Selatan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan di beberapa perguruan tinggi, baik perguruan tinggi Negeri maupun swasta yang jumlahnya sekitar 330 perguruan tinggi. Adapun beberapa perguruan tinggi yang terkemuka di Korea Selatan antara lain Universitas Korea (*Korea University*), Universitas Nasional Seoul (*Seoul National University*), Universitas Ewha (*Ewha Women's University*), dan Universitas Yonsei (*Yonsei University*).

2. Manajemen Pendidikan di Korea Selatan

Kekuasaan dan kewenangan dilimpahkan kepada menteri pendidikan. Di daerah terdapat dewan pendidikan (*board of education*). Pada setiap propinsi dan daerah khusus (Seoul dan Busan), masing-masing dewan pendidikan terdiri dari tujuh orang anggota yang dipilih oleh daerah otonom, dari lima orang dipilih dan dua orang lainnya merupakan jabatan *ex officio*, yang dipegang oleh wali kota daerah khusus atau gubernur provinsi dan *super intendent*, dewan pendidikan diketuai oleh wali kota atau gubernur.

a. Anggaran pendidikan

Sektor pendidikan Korea Selatan telah berkembang secara dramatis seiring pertumbuhan ekonominya selama beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2000, pemerintah membelanjakan lebih dari 3,5% dari PDB Sekolah dasar dan menengah, sebanding dengan tingkat di Negara-negara OECD lainnya. Meskipun

pengeluaran pemerintah cukup besar, rumah tangga juga menghabiskan sekitar jumlah yang sama untuk les privat. Kami berpendapat bahwa les privat yang lazim adalah pasar menanggapi kebijakan pendidikan pemerintah yang kaku dan seragam. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, pemerintah mendorong keras untuk Sekolah dasar universal dan pemerataan Sekolah menengah. Tuntutan pendidikan yang tidak terpenuhi oleh orang tua dan siswa dalam lingkungan pendidikan yang sangat diatur telah menghasilkan hasil yang luar biasa peningkatan les privat meskipun ada kebijakan pemerintah yang kuat untuk mengurangnya.²

Anggaran pendidikan Korea Selatan berasal dari anggaran Negara, dengan total anggaran 18,9% dari Anggaran Negara. Pada tahun 1995 ada kebijakan wajib belajar 9 tahun, sehingga porsi anggaran terbesar diperuntukan untuk ini, adapun sumber biaya pendidikan, bersumber dari, GNP untuk pendidikan, pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah, dunia industri khusus bagi pendidikan kejuruan.

b. Guru/personalia

Salah satu ciri dari sistem pendidikan guru bahasa Korea adalah SD itu dan lembaga pendidikan guru menengah terpisah dan independen masing-masing lain. Banyak Negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, dan Jepang memiliki lembaga pendidikan guru *integratif* yang mendidik guru calon untuk semua tingkat Sekolah dari Sekolah dasar sampai menengah (Park, 2002). Ini keunikan Korea dihasilkan dari latar belakang sejarahnya. Setelah Perang Korea (1950-1953), Korea memulai industrialisasi pada 1960-an dan berlanjut pada 1970-an. Saat itu jumlah anak Sekolah meningkat pesat; namun, tingkat *turnover* guru SD juga tinggi. Masyarakat Korea perlu memastikan ketersediaan guru Sekolah dasar yang berkualitas.

Menurut Im et al. (2001), sistem pendidikan guru sains dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: Sertifikasi Sarjana Berfokus Pendidikan (*FUCE*), Sertifikasi Sarjana Terbuka Pendidikan (*OUCE*), dan Post Sertifikasi Lulusan Pendidikan (*PGCE*). *FUCE* mengacu pada sistem yang ada dalam perguruan tinggi pendidikan di tingkat sarjana, yang bersifat *eksklusif* tanggung jawab untuk pendidikan guru. *OUCE* mengacu pada sistem di mana *file* program sarjana terbuka, dan seseorang bisa menjadi guru jika mengambil yang diperlukan mengajar kursus profesional untuk sertifikasi pendidikan di sarjana atau tingkat pascasarjana. *PGCE* mengacu pada sistem di mana mereka yang menyelesaikannya program sarjana dan kemudian mengambil kursus pendidikan intensif setelah lulus Sekolah dapat memperoleh sertifikasi untuk menjadi guru sains. Ini mirip dengan *OUCE* di *file* menghormati bahwa program

²Kim, S., & Lee, J. H. (2010). Private tutoring and demand for education in South Korea. *Economic development and cultural change*, 58(2), 259-296.

sarjana terbuka, tetapi berbeda dengan *PGCE* memiliki Institut terpisah untuk menjadi guru di tingkat pascasarjana.³

Terdapat dua jenis pendidikan guru, yaitu tingkat *academic* (grade 13-14) untuk guru SD, dan pendidikan guru empat tahun untuk guru Sekolah menengah. Dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah untuk pendidikan guru Negeri. Kemudian guru mendapat sertifikat yaitu: sertifikat guru pra Sekolah, guru SD, dan guru Sekolah menengah, sertifikat ini diberikan oleh kepala Sekolah dengan kategori guru magang, guru biasa dua (yang telah diselesaikan *on job training*) dan lisensi bagi guru magang dikeluarkan bagi mereka yang telah lulus ujian kualifikasi lulusan program empat tahun dalam bidang *engineering*, perikanan, perdagangan, dan pertanian. Sedangkan untuk menjadi dosen *junior college*, harus berkualifikasi master (S2) dengan pengalaman dua tahun dan untuk menjadi dosen di *senior college* harus berkualifikasi dokter (S3).

D. TUJUAN PENDIDIKAN

Komisi ke Presidenan untuk Reformasi Pendidikan Korea Selatan mendefinisikan tujuan sistem pendidikan Korea Selatan di abad ke-21 sebagai *Edutopia*, sebuah masyarakat kesejahteraan pendidikan dari pendidikan terbuka dan seumur hidup untuk memungkinkan setiap individu akses yang setara dan mudah ke pendidikan kapan saja dan tempat. Menanggapi rekomendasi Komisi, pemerintah memprakarsai Proyek Uji Coba Universitas Virtual yang dimaksudkan untuk beroperasi hingga tahun 2000. Tujuannya adalah untuk: (i) mendorong kemitraan antara Universitas dan sektor swasta, dan berbagi sumber daya yang ada; (ii) menciptakan sistem pendidikan virtual yang hemat biaya tanpa mengurangi kualitas; (iii) mengidentifikasi kebijakan dan standar yang sesuai untuk menjalankan Universitas virtual; dan (iv) berbagi pengalaman. Makalah ini membahas kebijakan pemerintah baru-baru ini dalam Pendidikan Tinggi di Korea Selatan, menganalisis perubahan, memperkenalkan Proyek Uji Coba Universitas Virtual dan membahas dampaknya pada Pendidikan Tinggi. Rekomendasi untuk perbaikan dan penelitian masa depan ditawarkan.⁴

E. KEUNGGULAN PENDIDIKAN DI KOREA SELATAN

Beberapa hal yang perlu menjadi perbandingan bagi kita dalam pengelolaan pendidikan dengan Korea Selatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Sekolah taman kanak-kanak "*Youchiwon*" dimulai usia 3 tahun hingga 6 tahun, kapan saja boleh masuk Sekolah ini asal sudah mencukupi usiannya. Sebenarnya ada juga usia 2 tahun tapi Sekolah ini berseling sehari Sekolah

³Im, S., Yoon, H. G., & Cha, J. (2016). Pre-service science teacher education system in South Korea: Prospects and challenges. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 12(7), 1863-1880.

⁴Jung, I., & Rha, I. (2001). A virtual university trial project: Its impact on higher education in South Korea. *Innovations in Education and Teaching International*, 38(1), 31-41.

dan sehari tidak, hanya beberapa jam saja ini hanya milik swasta. Pra Sekolah ada yang milik Negara dan swasta. Untuk pra Sekolah swasta pemerintah tetap membantu, mengawasi dan memperhatikan sepenuhnya pengolahan Sekolah-Sekolah TK ini.

2. Hal yang sangat mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan selain investasi pemerintah di bidang pendidikan, adalah kebijakan pemerintah terutama mengenai ekonomi yang mendukung tumbuhnya industri. Industri tersebut kemudian menjadi mesin ekonomi yang efektif karena perkembangannya disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.
3. Baik negeri dan swasta pra Sekolah memiliki program pendidikan yang sama, yaitu lebih banyak mengajarkan kemandirian, kreatifitas dan bersosialisasi dengan lingkungan. Mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari, BAB, ganti baju, sikat gigi dan lain-lain.
4. Sebelum masuk Sekolah SD biasanya untuk pra Sekolah anak-anak akan dibawa berkunjung ke SD untuk sekedar melihat-lihat Sekolah mereka selanjutnya bagaimana. Pada umumnya anak yang masuk Sekolah SD menerima surat pemberitahuan ijin masuk Sekolah pada bulan Februari dan awal maret. Lalu bisa mendaftar pada Sekolah dasar.
5. Korea sangat terobsesi dengan pendidikan. Pendidikan benar-benar ditekankan kepada siswa seperti orang gila. Seberapa keras siswa belajar? Selama tahun-tahun Sekolah mereka dan kadang-kadang bahkan selama bertahun-tahun, siswa pergi ke Sekolah dari jam 8 pagi sampai lewat tengah malam. Hal ini dikarenakan setelah selesai Sekolah, mereka harus menghadiri pendidikan khusus untuk mencoba untuk meningkatkan kinerja akademis mereka. Mereka diprioritaskan untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian masuk perguruan tinggi yang sangat ketat, yang banyak mendukung masa depan mereka. Di Korea, jika Anda masuk sebuah Universitas bergengsi, Anda akan memperoleh kesempatan yang baik untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang baik. Seorang anak memasuki Universitas yang baik tidak hanya menjamin keadaan ekonomi individunya, tetapi juga mencerminkan reputasi orang tua anak. Dalam budaya Korea, pertimbangan yang paling penting bagi seorang pimpinan bukan kepribadian atau pengalaman kerja, melainkan di Universitas apa orang tersebut belajar. Korea memiliki tingkat kelulusan SMA 97%, ini adalah yang tertinggi tercatat di Negara-negara maju. Sangat menarik untuk dicatat bahwa 80% Sekolah-Sekolah di Korea memperoleh hukuman fisik.

F. PERBANDINGAN DAN PERSAMAAN PENDIDIKAN DI KOREA SELATAN DAN INDONESIA

1. Korea Selatan

Beberapa Negara Asia Timur seperti Jepang, China dan Korea Selatan, sistem pendidikan yang dibangun banyak bersumber dari ajaran *konfusianisme*. *Konfusianisme* bukanlah satu agama tetapi lebih kepada pengajaran falsafah

untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia.

Pandangan dan ideologi tersebut kemudian menjadikan Negara-negara tersebut memandang bahwa pendidikan yang bermutu merupakan entitas kemajuan suatu bangsa. Hasil penelitian OECD tahun 2009 menempatkan Finlandia, Kanada dan Korea Selatan sebagai 3 kekuatan utama pendidikan di dunia lalu diikuti oleh tiga Negara di Asia, yaitu China, Jepang, dan Singapura.

Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa mengeluarkan biaya adalah hal penting, tetapi tidak sepenting memiliki budaya yang mendukung pendidikan. Biaya adalah ukuran yang mudah terukur, tetapi dampak yang lebih kompleks dalam mendukung kualitas pendidikan adalah perilaku masyarakat dalam memandang peranan pendidikan itu sendiri. Kesuksesan Negara-negara Asia misalnya seperti yang banyak berlaku di Jepang dan Korea Selatan merefleksikan nilai tinggi pendidikan dan pengharapan orang tua terhadap kesuksesan hasil pendidikan anak-anak mereka. Budaya kerja keras dan penegakan disiplin yang ketat merupakan kunci keberhasilan pembangunan sistem pendidikan di Jepang dan Korea Selatan. Sementara di Korea selatan, pembelajarannya menerapkan teknologi tinggi, dengan yang memberikan akses internet berkecepatan tinggi di setiap Sekolah. Masyarakat Korea menganggap guru memegang posisi yang berharga dan tinggi karena Korea menanamkan bahwa pendidikan adalah hal yang utama. Akibatnya, Korea benar-benar menjunjung tinggi para guru. Ada rotasi mutasi guru setelah lima tahun mengajar. Hal ini dilakukan agar setiap guru mendapat kesempatan yang adil untuk mengajar di berbagai Sekolah yang baik atau buruk. Para guru juga mendapat sertifikat yaitu sertifikat guru pra Sekolah, guru SD, dan guru Sekolah menengah. Sertifikat diberikan oleh kepala Sekolah dengan kategori guru magang, guru biasa dua (setelah menyelesaikan on job training). Bagi guru magang akan diberi *lisensi*, bila telah lulus ujian kualifikasi program empat tahun dalam bidang *engineering*, perikanan, perdagangan, dan pertanian.

2. Indonesia

Setelah mengetahui sistem pendidikan di Korea Selatan, ada sejumlah masalah yang dihadapi oleh Indonesia dalam hal pendidikan. Sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia ternyata tidak dapat menempa sumber daya manusia Indonesia yang memiliki potensi yang tidak kalah dibanding dengan sumber daya manusia dari Negara lain, termasuk Negara maju sekalipun. Potensi yang ada pada sumber daya manusia, tidak akan mempunyai arti yang *signifikan* dan maksimal bila penempatan atas mereka melalui sistem pendidikan tidak dilakukan secara benar.

Dalam memetakan masalah pendidikan maka perlu diperhatikan realitas pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan sebagai sebuah sub sistem yang sekaligus juga merupakan suatu sistem yang kompleks. Gambaran pendidikan sebagai sebuah sub sistem adalah kenyataan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan dengan dipengaruhi oleh berbagai aspek *eksternal* yang saling terkait satu sama lain. Aspek politik, ekonomi, sosial-

budaya, pertahanan-keamanan.

3. Indonesia

Setelah mengetahui sistem pendidikan di Korea Selatan, ada sejumlah masalah yang dihadapi oleh Indonesia dalam hal pendidikan. Sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia ternyata tidak dapat menempa sumber daya manusia Indonesia yang memiliki potensi yang tidak kalah dibanding dengan sumber daya manusia dari Negara lain, termasuk Negara maju sekalipun. Potensi yang ada pada sumber daya manusia, tidak akan mempunyai arti yang signifikan dan maksimal bila penempatan atas mereka melalui sistem pendidikan tidak dilakukan secara benar. Dalam memetakan masalah pendidikan maka perlu diperhatikan realitas pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan sebagai sebuah sub sistem yang sekaligus juga merupakan suatu sistem yang kompleks.

Sebagai salah satu sub-sistem di dalam sistem Negara/ pemerintahan, maka keterkaitan pendidikan dengan sub sistem lainnya diantaranya ditunjukkan sebagai berikut: pertama, berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah kehidupan telah membentuk paradigma pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pelayanan Negara kepada rakyatnya yang harus disertai dengan adanya sejumlah pengorbanan ekonomis (biaya) oleh rakyat kepada Negara. Kedua, berlangsungnya kehidupan sosial yang berlandaskan *sekulerisme* telah menyuburkan paradigma *hedonisme* (hura-hura), *permisivisme* (serba boleh), *materialistik* (*money oriented*), dan lainnya di dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, berlangsungnya kehidupan politik yang *oportunistik* telah membentuk karakter *politikus machiavelis* (melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan) di kalangan eksekutif dan legislatif termasuk dalam perumusan kebijakan pendidikan Indonesia.

Dalam kaitan pendidikan sebagai suatu sistem, maka permasalahan pendidikan yang saat ini tengah berkembang diantaranya tergambar dengan pemetaan sebagai berikut: (1). Keterbatasan Aksesibilitas dan Daya Tampung; (2). Pemerataan pendidikan di kota dan daerah yang masih timpang; (3). Pengelolaan dan efisiensi anggaran pendidikan yang belum maksimal; (4). Keterbatasan sarana dan prasarana; (5). Pengawasan yang lemah terhadap penyelenggara pendidikan; (6). Kinerja guru yang belum maksimal; (7). Kesejahteraan guru yang masih kurang.

4. Persamaan Pendidikan di Korea Selatan dan diIndonesia

a. *Cram school*

Mereka menghafal rumus-rumus dari yang mudah sampai yang susah sekalipun. Ujian Nasional yang berisi terlalu banyak pertanyaan dalam sedikit waktu memaksa mereka mengerjakan semua soal secepat mungkin.

Menghafal rumus adalah salah satu hal penting menuju sukses ujian Nasional. Mungkin menghafal beberapa rumus sederhana tidak menjadi masalah, namun mereka juga menghafal rumus-rumus penurunan, kebiasaan ini berlangsung sampai Universitas.

Mereka menghafalnya karena mereka tidak punya cukup waktu untuk mengerti konsep tersebut karena beban belajar mereka terlalu berat. Namun dengan menghafal, mereka tidak mengerti konsepnya sehingga ketika dihadapkan pada permasalahan lain yang konsepnya sama, mereka tidak dapat menyelesaikannya.

Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, siswa masih di berikan materi-materi hafalan tanpa diberikan ruang untuk berfikir kritis. Sehingga ketika mencapai kelas 6, 9 dan 12, para siswa banyak di *drill* dengan rumus-rumus dan cara mencapai sukses Ujian Nasional.

b. Over studying

Dengan beban belajar yang sangat banyak, muncul lah bimbingan belajar di Korea yang dalam promosinya menawarkan peningkatan kemampuan dalam waktu singkat dengan cara memberi bermacam-macam solusi cepat dan solusi tepat menghafal. Detail dari waktunya adalah:

- 1) Anak berumur 13 dan 14 tahun memulai kelas pada pukul 5:50, mengambil dua kelas 60 menit dan 70 menit. Kemudian pulang ke rumah jam 9:30. Sesampai di rumah, mereka masih harus mengerjakan PR dari Sekolah dan dari bimbinganbelajar.
- 2) Anak usia 15 tahun memulai kelas pada pukul 7:06, mengambil kelas 60 menit dan 70 menit, selesai pada pukul 10:55. Sesampai di rumah, mereka masih harus mengerjakan PR dari Sekolah dan dari bimbingan belajar.
- 3) Ada kelas Sabtu, dan ini dilakukan walaupun beberapa Sekolah memberlakukan setengah hari masuk untuk siswa. Hal yang baik adalah, hampir semua orang tua sebenarnya tidak suka mengirim anak-anak SMP sampai larut malam, namun mereka dipaksa oleh tuntutan dari sistem pendidikan Nasional yang terus meningkat.

c. Stereotipe Bidang Studi /Jurusan

Sama seperti di Indonesia, orang tua anak Korea biasanya mendorong anak-anak mereka untuk menjadi seorang Dokter atau Insinyur dari kecil. Status sosial dan uang biasanya menjadi alasannya. Di Korea hal ini sudah sangat lazim dan terkadang mereka tidak merasa bahwa hal ini adalah sesuatu yang aneh dan seharusnya tidak terjadi. Mereka juga akan mendorong anak-anaknya untuk mengambil bidang-bidang yang berstatus sosial tinggi dan menghasilkan banyak uang.

Kerja keras mereka ini tak lain adalah untuk lulus dan masuk ke perguruan tinggi terbaik. Walaupun capek dan tertekan, pelajar tetap semangat demi menggapai impian mereka. Tidak heran kalau mereka termasuk siswa dengan nilai tertinggi di dunia dan termasuk siswa yang paling sering diterima di Universitas-universitas Amerika. Program Penilaian Siswa Internasional (*Program for International Student Assessment*) yang dijalankan oleh OECD baru-baru ini menempatkan pendidikan Korea Selatan di peringkat 11 dunia.

G. STRUKTUR SISTEM PENDIDIKAN KOREASELATAN

Struktur pendidikan di Korea Selatan berformasi sama dengan yang ada di Indonesia, yakni:

1. 6 tahun untuk Sekolah Dasar (SD)
2. 3 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. 3 tahun untuk Sekolah menengah atas (SMA)
4. dan (meneruskan) Universitas

Sedangkan untuk tahun pelajaran di bagi menjadi dua semester:

1. Semester I : awal Maret – pertengahan Juli
2. Liburan musim panas : pertengahan Juli – akhir Agustus
3. Semester II : akhir Agustus – pertengahan Februari

Adapun penilaian dalam memasuki Universitas ialah kombinasi dari pencapaian selama masa SMA digabungkan dengan nilai ketika tes skolastik secara Nasional (*Su- Neung*), agak berbeda dengan Negara kita yang menilai hanya dari hasil SNMPTN saja. Rapor ketika SMA menyumbang 40% dalam penentuan kelulusan. Akan tetapi, karena ujian di Sekolah juga sama pentingnya dengan ujian untuk memasuki Universitas, maka pelajar di sana tidak memiliki waktu untuk bersantai. Menurut statistik, pelajar di Korea harus menghafal 60 hingga 100 halaman setiap kali tes untuk bisa mendapat nilai bagus.

Tes untuk masuk Universitas sangatlah penting karena menentukan masa depan siswa tersebut. Ketika masa-masa mendekati ujian perkantoran buka jam 10 pagi untuk mengakomodasi para orang tua yang menemani anaknya belajar hingga malam. Pada sore harinya, tempat-tempat rekreasi seperti klub tenis juga tutup lebih awal agar siswa dapat belajar di sore harinya.

Pada hari ujian, polisi-polisi tak segan untuk membantu mengantar pelajar yang terlambat untuk mengikuti ujian dan adik-adik kelas sengaja datang untuk mendukung dan memberi semangat kakak-kakak kelas mereka yang ikut ujian.

Mereka yang tidak tahan melihat anak-anaknya ditekan oleh sistem pengajaran di Sekolah, akan mengirim istri dan anaknya ke luar Negeri dan sang suami akan tetap di Korea untuk bekerja mencari uang. Untuk beberapa orang yang kaya, akan pindah kerja ke luar Negeri untuk menyekolahkan anaknya.

Mereka biasanya memilih Amerika karena memiliki sistem pendidikan yang membebaskan anak bersekolah sesuai bakat mereka. Jumlah siswa pra Perguruan Tinggi dari Korea Selatan yang belajar di luar Negeri tiap tahun semakin meningkat.

a. Taman Kanak-kanak (TK)

Di Korea Selatan, TK bukanlah program publik / formal tetapi merupakan lembaga swasta yang mengajarkan bahasa Korea dan Inggris. Usia anak-anak yang memasuki TK berkisar antara 3-7 tahun. Nah, di TK ini satu kelas bisa berisi anak-anak dengan rentang umur yang berbeda (4 tahun).

b. Sekolah Dasar (*Chodeunghakgyo*)

Sekolah dasar terdiri dari kelas 1 – 6 dengan rentan usia 7 – 13 tahun. Siswa kelas 1 dan 2 mempelajari bahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial,

seni, dan bahasa Inggris, sedangkan kelas 3 hingga 6 ditambah PE, pendidikan moral, seni praktis, dan musik.

Biasanya, guru kelas (wali kelas) yang mengajar sebagian besar mata pelajaran, kecuali bahasa asing dan olahraga. Mereka yang ingin menjadi seorang guru Sekolah dasar harus memiliki kemampuan utama dalam pendidikan dasar, yang secara khusus dirancang untuk menumbuhkan guru Sekolah dasar. Di Korea, sebagian besar guru SD bekerja untuk Sekolah dasar negeri.

H. Orientasi Pengembangan Pendidikan di Indonesia Berdasarkan Refleksi Sistem Pendidikan Korea Selatan

Bila menilik berbagai kelemahan sistem pendidikan di Indonesia, kesimpulan yang dapat diambil adalah diperlukan pembenahan yang bersifat fundamental. Pembenahan tidak bisa sepotong-sepotong (*piece meal*) sehingga dapat memberikan dampak tidak dalam satu, lima atau sepuluh tahun mendatang tetapi pada satu, dua bahkan generasi-generasi berikut bagi sumber daya manusia Indonesia.

Berdasarkan kajian tentang sistem pendidikan di Korea Selatan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia, diantaranya:

1. Perlunya menumbuh kembangkan ideologi pancasila dan nilai-nilai kebudayaan lokal dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia, hal ini bertujuan agar sistem pendidikan di Indonesia memiliki pijakan kuat dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di tataran yang lebih rendah. Seperti halnya dengan beberapa Negara Asia Timur seperti China, Korea Selatan dan Jepang, kentalnya Ideologi *Konfusianisme* memberikan efek positif terhadap daya juang siswa dalam kompetisi yang semakin ketat. Budaya kerja keras dan penegakan disiplin yang ketat merupakan kunci keberhasilan pembangunan di berbagai Negara Asia Timur tersebut. Sementara nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan dapat kita contoh dari sistem pendidikan di Negara-negara barat.
2. Perlunya upaya penyadaran masyarakat tentang nilai penting pendidikan, pendidikan harus dijadikan wadah bagi pengembangan pembangunan seperti halnya Negara-negara asia timur.
3. Peningkatan mutu tenaga pendidik yang berkualitas selama *pre-service education* (melalui LPTK) maupun *in-service education* (melalui *training* dan magang). Guru di Indonesia haruslah ditempatkan pada posisi tertinggi dalam sistem pendidikan. Hal ini dapat kita tiru dari Negara Finlandia yang menetapkan kualitas dan standar yang tinggi untuk menjadi seorang guru dengan pendidikan minimal magister (S2).
4. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang baik, terlebih lagi dengan penyediaan perangkat teknologi tinggi seperti yang dilakukan Negara Singapura, Australia, Jepang dan Korea Selatan.

Dalam pemberian sertifikasi kepada guru, perlu ditata ulang. Pemberian

sertifikasi guru seperti yang dilakukan Finlandia, Jepang dan Korea Selatan perlu dipertimbangkan. Guru yang berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi adalah guru-guru yang benar-benar kompeten, bertanggung jawab dan memiliki kualifikasi akademik yang tinggi. Sertifikasi yang berlaku juga tidak selamanya, evaluasi terhadap kinerja guru menentukan layak atau tidaknya sertifikasi tersebut di berikan

I. KESIMPULAN

Di Korea selatan, sistem pendidikan yang dibangun banyak bersumber dari ajaran *konfusianisme*. *Konfusianisme* bukanlah satu agama tetapi lebih kepada pengajaran falsafah untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang baik, terlebih lagi dengan penyediaan perangkat teknologi tinggi seperti yang dilakukan Negara Korea Selatan.

Pengelolaan sistem pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pengelolaan tersebut membutuhkan *political will dan dinstmiks social* yang baik dari semua warga Negara. Dari gambaran umum Republik Korea Selatan didirikan pada tahun 1948 terletak di Asia Timur. Luas wilayah 99.678 km². Jumlah penduduk 50,19 juta jiwa. Sistem dan pengelolaan pendidikan bersifat sentralistik, sementara di daerah otonom dewan pendidikan banyak memberi kontribusi perkembangan pendidikan di Negara ini. Sehingga pendidikan sangat maju dan menjadi terbaik di Asia.

Sistem pengelolaan pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan dan kewenangan dilimpahkan kepada menteri pendidikan. Kebijakan Menteri dilaksanakan hingga di Daerah otonom. Pemerintah menganggarkan dana 20% dari APBN untuk biaya pendidikan. Korea Selatan ada tiga jenjang pendidikan yaitu pendidikan *primer* sederajat SD, pendidikan sekunder sederajat dengan SMP dan SLTA, dan pendidikan tinggi. Pada perguruan tinggi dibedakan 2 jenis mempelajari keilmuan dan keahlian.

Kurikulum mengedepankan penguasaan kompetensi praktis pada penguasaan iptek dan memberi bekal keahlian untuk dunia kerja. Disusun oleh dewan pendidikan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan Sekolah. Sekolah diberi keleluasaan mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik budaya lokal. Peserta didik di Korea Selatan paling tidak bahagia dalam belajar. Mereka belajar dari jam 08.00 pagi hingga malam. Beban belajar anak sangat tinggi dan pembatasan anak merupakan terburuk didunia.

Kualifikasi pendidik di Korea Selatan untuk jenjang pendidikan primer minimal S1, sementara di jenjang sekunder minimal S2/S3. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru ada sertifikasi dan intensif dari pemerintah. Reformasi pendidikan di Korea Selatan terus dilakukan lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil kebijakan kurikulum. Pemerintah mengganti kebijakan pendidikan tinggi yang tadinya fokus ke masalah pendanaan Sekolah menjadi berorientasi untuk menciptakan lingkungan intelektual yang mendukung tumbuhnya inovasi

DAFTAR PUSTAKA

Agustiar Syah Nur, (2001), *Perbandingan sistem pendidikan*, Bandung : Lubuk Agung. Nanag Fattah. (1996). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT

Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1996. *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*. Bangil- Jatim: Al-Izzah

Ngalim Purwanto. (1993). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Badung: CV Remaja Karya.

PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Remaja Persada Karya. NIER, (1999). *An International Comparative Study of School Curriculum*. Tokyo, Japan.

Supriadi, Iman (1988), *Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan*. Jakarta, P2LPTK Undap, Andy PP (1988). *Pola Kepemimpinan dan profesionalisasi. Tenaga*

Kependidikan. (Disertasi) Bandung; Program Pascasarjana UPI.

UU No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

https://serambimata.wordpress.com/2014/10/06/inilah-rahasia-pendidikan-korea-selatan-menjadi-yang-terbaik-didunia/
https://annisafitriany1.wordpress.com/2013/05/21/san-dan-sistem-pendidikan-di-korea-selatan/
http://galihbzhari.blogspot.com/2014/03/kajian-kurikulum-sistem-pendidikan.html
http://konsultanpendidikan.com/2013/07/22/mengenal-lebih-dalam-tentang-negeri-ginseng-sistem-pendidikan-korea-selatan-part-1/
http://internasional.kompas.com/read/2014/11/04/1730590/Anak-anak-Korea.Selatan.Paling.Tidak.Bahagia.di.Dunia
http://smp.alazhar-palu.sch.id/informasi/berita/84-melihat-dan-bercermin-dari-sistem-pendidikan-negeri-ginseng.html

BAB XVI

SISTEM PENDIDIKAN DI BRUNEI DARUSSALAM

Heru Nugroho

Herun04@gmail.com

A. GAMBARAN UMUM BRUNEI DARUSSALAM

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Brunei Darussalam yang merupakan anggota ke-6 ASEAN ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang Sultan yang sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri). Kendatipun wewenang serta kekuasaan Sultan yang diberikan Konstitusi begitu besar, namun sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis. Tetapi dalam hal cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekrutmen tertutup. Sistem ini tidak menyerap personil dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan kepala pemerintahan berada di tangan sultan.

Tercatat dua pertiga jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa (Han) yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting: bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warga negara Britania dan Australia. Islam ialah agama resmi Brunei, dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha (terutamanya oleh orang Tiong Hoa), agama Kristen, serta agama-agama orang asli (dalam komunitas-komunitas yang amat kecil). Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran keusahawanan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung.

B. FALSAFAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Sebagai sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan sistem beraja dan salah sebuah negara tertua di dunia, dan juga di kepulauan Borneo, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yakin bahwa sistem ini masih relevan dan boleh terus dipertahankan bagi mengekalkan status Brunei sebagai sebuah negara MIB (Melayu Islam Beraja), sebagaimana yang telah dititahkan pada 27 Rabiulawal 1404 Hijriah, bersamaan 1 Januari 1984 Masehi, seperti yang terkandung dalam Titah Pengisytiharan Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam.

Cara hidup MIB (Melayu Islam Beraja) adalah penentu dan penjamin survival negara Brunei Darussalam pada masa akan datang melalui pelaksanaan sistem pendidikan, sama ada formal atau tidak formal. Dengan mengekalkan identitas negara ini sebagai sebuah negara Melayu Islam Beraja, peluang bangsa

Brunei untuk menyerlah dan cemerlang dalam semua bidang akan terbuka luas, khususnya dalam era globalisasi yang penuh dengan persaingan. Oleh itu, Melayu Islam Beraja sebagai kesinambungan sejarah bangsa Brunei adalah asas perpaduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi kejayaan ke arah Wawasan Negara 2035.

C. SEJARAH PENDIDIKAN DI BRUNEI DARUSSALAM

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang sangat makmur. Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan yang sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berakhlak, beragama dan menguasai teknologi. Pendidikan formal di Brunei dimulai tahun 1912 dengan mulai dibukanya Sekolah Melayu di Bandar Brunei (Bandar Seri Begawan sekarang). Kemudian diikuti dengan pembukaan sekolah-sekolah lainnya di wilayah Brunei Muara, Kuala Belait dan Tutong. Sebelumnya pada 1916, masyarakat Tionghoa telah mendirikan sekolah sendiri di Bandar Seri Begawan.

Pada tahun 1966, sekolah Melayu pada tingkat pendidikan menengah dibuka di Belait. Tahun 1979 pendidikan TK yang merupakan bagian tingkat dasar mulai diterapkan di Brunei. Sedangkan University Brunei Darussalam didirikan pada tahun 1985 sebagai lembaga tertinggi di bidang pendidikan. Sejak tahun 1984 kurikulum pendidikan nasional mewajibkan para siswa untuk menguasai dwi bahasa yaitu bahasa Melayu dan Inggris. Bahasa Melayu digunakan untuk mengajar mata pelajaran bahasa Melayu, pengetahuan Agama Islam, pendidikan jasmani, lukisan dan pertukangan tangan. Sedangkan bahasa Inggris digunakan untuk mengajar mata pelajaran seperti Sains, Matematika, Geografi, Sejarah dan Bahasa Inggris itu sendiri.¹

Dengan demikian pemerintah Brunei Darussalam merumuskan model pendidikan yang objektif yaitu pendidikan sebagai wadah untuk melahirkan rakyat yang taat beragama dimana mereka akan menjadi pelita umat yang mempunyai pemahaman dan pegangan yang benar. Kearah itulah, maka pemerintahan Brunei Darussalam turut berharap supaya manusia yang dirancang dan akan lahir yaitu menjadi manusia Brunei yang berilmu, mahir dan beramal salih.

D. ASPEK KURIKULUM NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Kurikulum di negara Brunei Darussalam tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Tetapi, Brunei Darussalam menggunakan konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolahnya dan tujuan utamanya adalah membentuk dan menguasai teknologi. Sistem pendidikannya pun memiliki banyak kesamaan dengan negara "*commonwealth*" seperti Inggris, Malaysia, Singapura, dan yang lainnya.

¹ Haji Awang Mohd. Jamil al-Sufri, Tarsilah Brunei: Sejarah Awal dan Perkembangan Islam (Brunei Darussalam: Kementerian Kebudayaan, 2001), hlm. 3. Binti Ma'unah, Perbandingan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2011).

Berbeda dengan Indonesia, negara Brunei sudah menerapkan atau telah melakukan transisi kepada sistem Pendidikan baru yang disebut sebagai SPN21 (Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21). Sistem ini dirancang untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi para siswa untuk mencapai status Pendidikan yang tinggi sesuai dengan kemampuan akademik mereka masing-masing, dengan begitu siswa dapat mengembangkan bakatnya.

Kurikulum SPN21 memfokuskan bidang pembelajaran yang luas bagi pelajar mendapat pengetahuan dan kepehaman, kemahiran dasar serta sikap dan nilai untuk memastikan perkembangan menyeluruh yang bersesuaian dengan konteks abad ke-21. Pemerintah Brunei Darussalam telah menetapkan pendidikan agama Islam dalam SPN21 dengan meletakkannya sebagai *core subject* atau mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh setiap pelajar sebagaimana juga mata pelajaran Bahasa Melayu, Inggeris, Matematika, Sains dan MIB.

Kurikulum SPN21 adalah meliputi bidang pembelajaran yang ditempatkan sebagai subjek dasar yaitu Bahasa, Matematik, Sains, Sains Sosial dan Kemanusiaan, Kesenian dan Kebudayaan, Teknologi, Pendidikan Agama.

Selain itu, kurikulum SPN21 juga menekankan beberapa keahlian yang relevan untuk mencapai Wawasan 2035 antaranya; kemahiran berkomunikasi, kemahiran Sains dan ICT, kemahiran berfikir dan kreativiti, kemahiran bekerja dan belajar, kemahiran pengurusan diri dan berdaya saing, kemahiran berinteraksi, kemahiran fisika, kemahiran estetika dan lain-lain kemahiran abad-21.

Di samping kemahiran tersebut, nilai-nilai dasar dan juga sikap perlu diterapkan seperti keyakinan dan harga diri, menghargai dan memahami perasaan orang lain, toleransi dan hormat menghormati, penyayang, prihatin dan sensitif, integritas, cinta negara, bertakwa, berdaya saing serta siap siaga.

E. SISTEM PENDIDIKAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Pemerintah Brunei menetapkan tiga bidang utama dalam pendidikan, yaitu: sistem dwi bahasa di sekolah, konsep Melayu Islam Beraja dalam kurikulum sekolah dan peningkatan sumber daya manusia termasuk pendidikan kejuruan dan teknik. Sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara *commonwealth* lainnya, seperti Inggris, Malaysia dan Singapura. Sistem ini menggunakan pola A7-3-2-2 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan, seperti 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas, dan 2 tahun pra universitas.

Untuk tingkat dasar dan menengah pertama, sistem pendidikan Brunei tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar bagi murid-murid dalam menulis, membaca, dan berhitung disamping membina dan mengembangkan karakter pribadi. Setiap anak berumur 5 tahun diwajibkan memasuki TK selama setahun sebelum diterima di SD kelas 1. Kenaikan tingkat dari TK ke SD dilakukan secara otomatis. Di tingkat SD, mulai dari kelas 1 dan seterusnya setiap murid akan mengikuti ujian akhir tahun dan hanya murid yang berprestasi saja yang dapat melanjutkan ke kelas berikutnya.

Sementara yang gagal harus tinggal kelas dan sesudah itu baru mendapat kenaikan kelas otomatis. Setelah mengikuti pendidikan dasar 7 tahun, murid yang lulus ujian akhir dapat melanjutkan pendidikannya ke SLTP selama 3 tahun. Selanjutnya mengikuti ujian pada tahun ke tiga. Bagi siswa yang lulus ujian akhir SLTP akan memiliki pilihan, yaitu: ²

1. Dapat meneruskan ke tingkat SLTA; bagi siswa SLTA, di tahun ke-2 siswa akan menjalani ujian penentuan tingkat yang dikenal BCGCE (*Brunei Cambridge General Certificate of Education*) yang terdiri dari 2 tingkat yaitu tingkat AO dan AN. Bagi siswa yang berprestasi baik akan mendapat ijazah tingkat AO artinya siswa dapat meneruskan pelajaran langsung ke pra-universitas selama 2 tahun untuk mendapatkan ijazah *Brunei Cambridge Advanced Level Certificate* tingkat AA. Sementara itu, siswa tingkat AN harus melanjutkan studinya selama setahun lagi dan kemudian baru dapat mengikuti ujian bagi mendapatkan ijazah tingkat AO.
2. Dapat meneruskan sekolah kejuruan bagi siswa tamatan SLTP yang tidak ingin melanjutkan pelajarannya ke universitas dapat memilih sekolah kejuruan seperti perawat kesehatan, kejuruan teknik dan seni, kursus-kursus atau dapat terjun langsung ke dunia kerja.

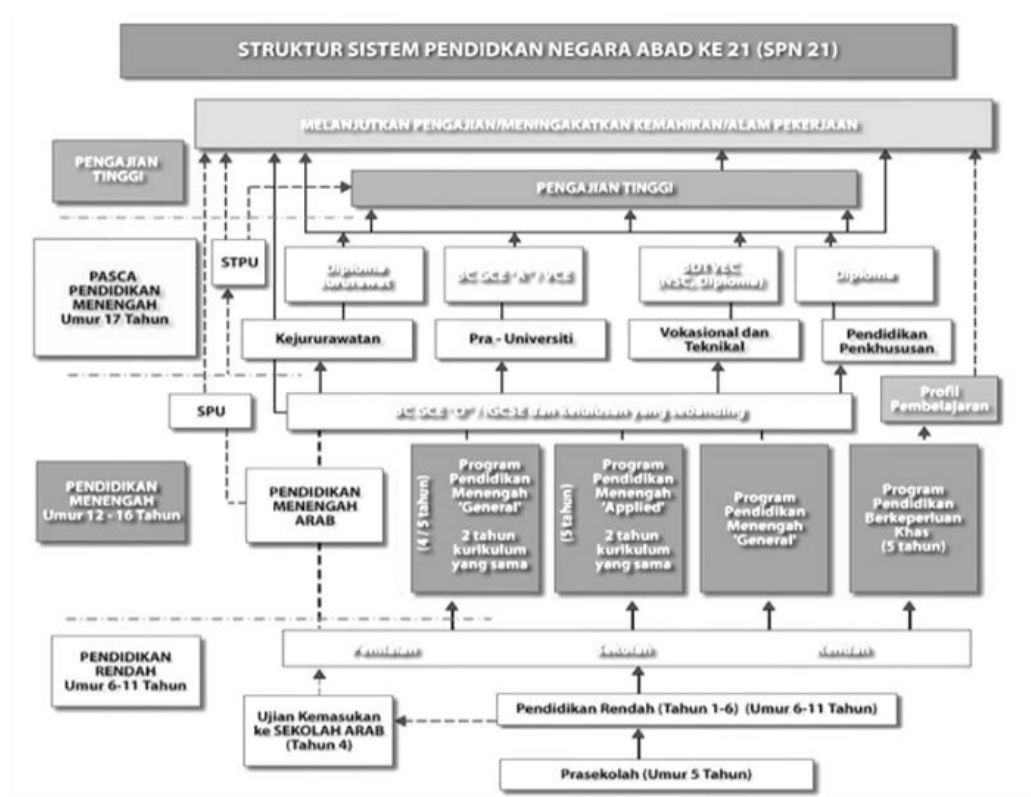
Diantara pendidikan yang paling penting bagi setiap manusia adalah pendidikan Islam. Pihak kerajaan Brunei sangat mengutamakan pendidikan Islam. Pendidikan Agama Islam mulai diberikan kepada anak-anak sejak mereka belum sekolah sampai ke perguruan tinggi. Karena pendidikan Islam merupakan pendidikan yang melatih kepekaan para peserta didik untuk bersikap berdasarkan spiritual Islam. Sistem pendidikan umum Brunei memiliki banyak kesamaan dengan negara *Commonwealth* lainnya seperti Inggris, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Sistem ini dikenal dengan pola A7-3-2-2" yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan seperti: 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas dan 2 tahun pra-universitas.

Untuk tingkat dasar dan menengah pertama, sistem pendidikan Brunei tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar bagi murid-murid dalam menulis, membaca, dan berhitung disamping membina dan mengembangkan karakter pribadi. Pendidikan TK yang merupakan bagian tingkat dasar mulai diterapkan di Brunei tahun 1979 dan sejak itu setiap anak berumur 5 tahun diwajibkan memasuki TK selama setahun sebelum diterima di SD kelas 1. Kenaikan tingkat dari TK ke SD dilakukan secara otomatis. Di tingkat SD, mulai dari kelas 1 dan seterusnya setiap murid akan mengikuti ujian akhir tahun dan hanya murid yang berprestasi saja yang dapat melanjutkan ke kelas berikutnya. Sementara yang gagal harus tinggal kelas dan sesudah itu baru mendapat kenaikan kelas otomatis.

Setelah mengikuti pendidikan dasar 7 tahun, murid yang lulus ujian akhir dapat melanjutkan pendidikannya ke SLTP selama 3 tahun. Bagi siswa yang lulus

²<https://core.ac.uk/download/pdf/291324086.pdf>

ujian akhir SLTP akan memiliki pilihan yaitu: Dapat meneruskan pelajaran ke tingkat SLTA. Di tahun ke-2, siswa akan menjalani ujian penentuan tingkat yang dikenal BCGCE (*Brunei Cambridge General Certificate of Education*) yang terdiri dari 2 tingkat yaitu tingkat AO dan AN. Bagi siswa yang berprestasi baik akan mendapat ijazah tingkat AO artinya siswa dapat meneruskan pelajaran langsung ke pra-universitas selama 2 tahun untuk mendapatkan ijazah *Brunei Cambridge Advanced Level Certificate* tingkat AA. Sementara itu, siswa tingkat AN harus melanjutkan studinya selama setahun lagi dan kemudian baru dapat mengikuti ujian bagi mendapatkan ijazah tingkat AO. Bagi siswa tamatan SLTP yang tidak ingin melanjutkan pelajarannya ke universitas dapat memilih sekolah kejuruan seperti perawat kesehatan, kejuruan teknik dan seni, kursus-kursus atau dapat terjun langsung ke dunia kerja.



Gambar 15.1 Struktur Pendidikan di Brunei Darussalam (Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam)

F. SISTEM PENDIDIKAN NEGARA ABAD KE-21 (SPN21)

Sistem Pendidikan Negara abad ke-21 merupakan sistem pendidikan di negara Brunei Darussalam yang telah pun diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam. Sistem ini diperkenalkan sebagai salah satu anjakan paradigma bagi membolehkan negara Brunei sebagai sebuah 'Negara Melayu Islam Beraja' menerusi konsep Negara Zikir untuk mencapai Wawasan

2035 yang memfokuskan tiga perkara utama; pertama rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya kedua, kehidupan rakyat yang berkualiti; dan ketiga ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Dasar SPN21 adalah merujuk kepada beberapa sistem yang pernah diterap dan digunapakai sebelum ini seperti Sistem Dwibahasa 84, yang masih mengutamakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu cuma dalam SPN21 tumpuan dan fokus utama diberikan kepada pelajar yaitu memusatkan pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar-pelajar *student centered learning* sebagai satu pendekatan.

Pendekatan memusatkan pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar-pelajar dalam SPN21 adalah berbeza dengan sistem lama yang menggunakan pendekatan *examination oriented*. Pendekatan *examination oriented* memberi dampak kepada guru-guru untuk mengulang pembelajaran menggunakan kertas soalan yang diberikan sebanding dengan memahami konsep-konsep tertentu yang lebih penting untuk diperjelas dan difahami kepada pelajar.³

Tujuan SPN21 adalah untuk:

- 1) Memenuhi keperluan-keperluan dan cabang-cabang perkembangan pembangunan ekonomi dan sosial abad ke-21.
- 2) Merealisasikan visi dan misi Kementerian Pendidikan yaitu: Visi: “Pendidikan Berkualiti ke arah Negara yang Membangun, Aman dan Sejahtera”. Misi: “Untuk Memberikan Pendidikan yang Holistik (sempurna) bagi Mencapai Potensi yang Penuh Bagi Semua”.
- 3) Menyediakan kemahiran-kemahiran abad ke-21.
- 4) Memenuhi tema-tema strategik berdasarkan Pelan Strategi Kementerian Pendidikan (2007-2011).
- 5) Meningkatkan kadar jumlah penuntut di peringkat pendidikan tinggi dari kadar 14 peratus yang sedia ada masa kini ke tahap 30 peratus dalam jangka waktu lima tahun akan datang.
- 6) Mencapai matlamat untuk membolehkan sekurang-kurangnya 50 peratus jumlah penuntut lepasan sekolah menengah termasuk lepasan sekolah vokasional dapat meneruskan pelajaran di peringkat tertinggi.
- 7) Terus berusaha ke arah meningkatkan lagi kualiti kehidupan di negara ini melalui penyediaan dan pembaharuan sistem pendidikan yang lebih berupaya dan berdaya saing untuk meningkatkan kecekapan rakyat dan penduduk Brunei.
- 8) Mencapai wawasan Brunei 2035.

Dasar SPN21 adalah merujuk kepada beberapa sistem yang pernah diterap dan diguna pakai sebelum ini seperti Sistem Dwibahasa 84, yang masih mengutamakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu cuma dalam SPN21 tumpuan dan fokus utama diberikan kepada pelajar yaitu memusatkan pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar- pelajar *student centered learning* sebagai satu

³ Norliah Md Zain, “SPN21 Berdasarkan *Student Centred Learning* Bukan *Examination Oriented*,” *Pelita Brunei*, 18 March 2013.

pendekatan.⁴

Social studies di Brunei memiliki tujuan untuk menjadikan menyatukan kekuatan masyarakat dan membuat masyarakat bersama-sama berubah kearah yang lebih baik. Konten mata pelajaran ini mencakup sejarah bangsa, kesadaran akan hubungan manusia dan saling ketergantungan satu sama lain, ekonomi dan sumber daya, dan pemahaman tentang isu global seperti yang kita lihat terjadi di seluruh dunia, dan bagaimana kejadian ini mempengaruhi pandangan peserta didik terhadap dunia. Selain itu, melalui *social studies* dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang konsep untuk membantu mereka memahami diri mereka dan lingkungan tempat tinggal mereka dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk bertahan hidup secara efektif. Konsep dasar yang dikembangkan pada peserta didik memungkinkan mereka belajar tentang masyarakat dan berpartisipasi dalam komunitas lokal dan nasional mereka sebagai warga negara yang terinformasi, percaya diri dan bertanggung jawab.⁵ Pengajaran dan pembelajaran sosial harus dirancang dengan baik, sehingga siswa akan memiliki keterampilan berpikir kritis terkait dengan hal-hal global yang cenderung untuk lebih ditandai oleh pluralisme, saling ketergantungan, dan transformasi. (SPN21, 2013) (Sapriya, 2014:54)

G. METODE PEMBELAJARAN DAN PROSES ASSESMENT BRUNEI DARUSSALAM

Kurikulum *social studies* di Brunei dikembangkan dengan memperhatikan kandungan yang paling sesuai dengan jenjang pendidikan dan kemampuan peserta didik. Kurikulumnya mengadopsi pendekatan tematik yang berfokus pada konten yang penting dari empat tema yang dikunjungi, yaitu: warisan negara, Sumber daya negara, komunikasi, tempat dan lokasi kami. Model pembelajaran yang sering digunakan adalah "*Spiral Developmental Approach*" Model ini berasal dari model spiral yang terkenal yang berkembang secara progresif dari tahun ke tahun. Pendekatan ini dinamakan sebagai 'pendekatan perkembangan spiral', seperti dalam semua studi selama tiga tahun, peserta didik akan melihat 4 tema yang berkembang secara progresif dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pada saat yang sama, tiga tujuan 'pengetahuan', 'keterampilan', dan 'sikap dan nilai' sangat penting dalam mengembangkan isi semua tema. Pendekatan yang memberi kesempatan untuk pengembangan bertahap dari satu tahun ke tahun berikutnya akan membantu peserta didik memahami bagaimana sebuah gagasan atau konsep baru terkait dengan gagasan atau konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya. Dengan cara ini, pemahaman peserta didik tentang ide atau konsep tertentu dapat diperkuat. (Mundia, 2010: 123-127).⁶

⁴ Eddy Iswandy Haji Ismail, "Integrasikan Pendidikan Teknik dan Vokasional," *Pelita Brunei*, 18 March 2013.

⁵ Norliah Md Zain, "SPN21 Berdasarkan *Student Centred Learning* Bukan *Examination Oriented*," *Pelita Brunei*, 18 March 2013. Hlm 76

- 1) Pengetahuan: memahami interaksi orang dengan tempat dan hubungan antara orang, tempat dan lingkungannya. Mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana keadaan di masa lalu dan bagaimana segala sesuatu berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu, menghargai bahwa sumber daya terbatas dan penting untuk membuat pilihan yang bijaksana dan tepat tentang penggunaan sumber daya, dan menghargai cara hidup multikultur di Brunei Darussalam dan untuk mengenali daya tarik unik negara ini.
- 2) Keterampilan: kemampuan untuk mengungkapkan dan menyajikan informasi dan gagasan secara lisan, visual dan tertulis, mampu bekerja secara efektif dalam kelompok, kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan yang efektif. Sikap yang harus dikembangkan dalam kurikulum *social studies* ini adalah memiliki pemikiran tentang masalah sosial, kejadian, dll. Hal ini juga mengajarkan apa yang harus dinilai peserta didik saat mereka menyelesaikan program sehingga peserta didik dapat mengevaluasi gagasan dan keyakinan yang dihadapi warga masyarakat modern dan toleran. (Mundia, 2012: 4-9)
- 3) Sikap dan nilai: mengembangkan pemahaman dan komitmen terhadap Monarki Islam Melayu (MIB), mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, negara dan lingkungan, mengembangkan pemahaman dan tanggung jawab terhadap harmoni sosial, mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran seumur hidup. mengembangkan kemampuan berpikir yang fleksibel dengan mengenali kebutuhan akan perubahan. Hasil pembelajaran yang diharapkan agar peserta didik memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan peserta didik kembangkan pada akhir setiap pelajaran. Ini berkaitan dengan pertanyaan tentang pengetahuan apa yang harus kita berikan kepada peserta didik kita dari topik ini yaitu, apa yang seharusnya peserta didik ketahui saat menyelesaikan program sehingga peserta didik dapat mengatur, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi tentang Ilmu Sosial. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan keterampilan apa yang harus dikembangkan-yaitu, apa yang harus dilakukan peserta didik saat menyelesaikan program sehingga peserta didik memahami keterampilan/kemampuan yang diperlukan dalam mengorganisir, menafsirkan dan mengkomunikasikan informasi studi sosial.

Departemen Pendidikan Brunei dalam kurikulum SPN21 menggunakan sistem *Brunei Common Assessment Tasks* (BCAT) sebagai assessment dalam pembelajaran (Haji Botty, 2015:24) namun ada beberapa assessment lagi seperti

- 1) Penilaian Kendalian Sekolah/*School-based Assessment* (SBA),
- 2) *Brunei Cambridge General Certificate Examination 'O' Level* (BC GCE'O' Level),
- 3) *International General Certificate of Secondary Examination* (IGCSE). (SPN21, 2013).⁷

⁷ Jurnal, Perbandingan Kurikulum *Social Studies* di Korea selatan dan Brunei Darussalam, (Novidya Yulanda) hlm. 10

H. PROSES REKRUTMEN TENAGA PENDIDIK DI BRUNEI DARUSSALAM

Untuk persiapan atau rekrutmen tenaga pendidik di negara Brunei Darussalam, proses rekrutmen tidak terbuka seperti halnya di Indonesia, dikarenakan proses rekrutmen di Negara Brunei Darussalam yang ditetapkan oleh pemerintahnya bahwa guru atau tenaga pendidik di Brunei menerapkan sistem kontrak dalam beberapa tahun, siapa saja boleh menjadi tenaga pendidik di negara Brunei Darussalam sesuai dengan kualitas Pendidikan yang ia miliki. Jadi yang akan membayar gaji tenaga pendidik adalah pemerintah atau pihak kesultanan. Jadi banyak akademisi-akademisi dari luar negeri yang mendaftar untuk menjadi tenaga pendidik di negara Brunei Darussalam

Seorang guru di negara Brunei Darussalam sangat dihargai dan buktinya gaji guru di negara ini bisa mencapai 1.000 BND perbulan atau setara dengan Rp 9.695.150. Itu untuk gaji guru paling kecil saja, sedangkan rata-ratanya gaji guru di Brunei Darussalam bisa mencapai 2.500 BND per bulan atau Rp 24.237.875. dari data ini membuktikan bahwa guru di negara Brunei Darussalam kehidupannya sangat makmur.

I. SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM

Sebuah Negara dilihat dari sisi sejarahnya, maka tidak terlepas dari kedatangan agama di Negara tersebut, seperti halnya dengan Negara Brunei Darussalam. Sebelum kedatangan agama Islam, dalam sejarahnya manusia dalam beragama tidak terlepas dari agama animisme dan dinamisme, tetapi sejak adanya kedatangan agama Islam, maka agama tersebut mengalami perpaduan antara Islam dan agama lama atau disebut agama sinkretik. Disatu sisi masyarakat sudah beralih kepada ajaran agama Islam tetapi disisi lain, masih tetap menjalankan agama ajaran nenek moyang tersebut. Diantara perpaduan ajaran agama ini memberikan warna bagi pendidikan disetiap negara termasuk negara Brunei Darussalam. Sejak agama Islam datang ke Brunei, apalagi peran dari Kesultanan raja Brunei yang beragama Islam sehingga pendidikan agama Islam sangat menonjol dari negara ini. Pendidikan agama Islam pertama kali dilakukan seperti di rumah, masjid, surau, istana kerajaan dan tempat-tempat lainnya yang masih dianggap tradisional. Tenaga pengajarnya terdiri dari mubaligh, pedagang Islam, Imam, pembesar-pembesar negara dan orang alim di daerah yang bersangkutan.⁸

Sekitar abad ke 17-20 M, ulama Brunei dikenal dengan Catip atau khatib yang pengajiannya dilakukan di balai. Tujuan dari Balai ini adalah untuk menggantikan ulama-ulama nantinya sehingga sistem pengajiannya mempunyai dua kategori; *Pertama*, pengajian umum yang tidak mementingkan masalah menulis dan membaca jawi tetapi pengajiannya hanya berbentuk dzikir Brunei, Ratib Saman, mengaji al-Qur'an dan hadrah sekaligus belajar mengenal ibadah sembahyang dan perkara lainnya. *Kedua*, pengajian yang menerapkan kepandaian dalam membaca dan menulis huruf jawi yang terdiri dari ilmu Fiqh, Faraidh,

⁸<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/709772>

Babun Nikah, Nahu dan Qawaid, Tasawuf dan Akhlak. Sistem kurikulum pendidikan Islam tidak bertahan dengan lama ketika Inggris datang ke Brunei. Pendidikan ala barat dari kedatangan Inggris di Brunei tersebut sudah mulai dilaksanakan pada tahun 1911. Pada awalnya, tulisan yang diperkenalkan oleh tokoh pendidik Islam di Brunei adalah huruf jawi, tetapi kedatangan Inggris tulisan tersebut digantikan dengan huruf rumi, sehingga kehadiran tulisan ini dari pendidikan yang diberikan oleh Inggris membuat bangsa Brunei tidak bisa menulis dan membaca dari huruf rumi ini (Nurudin, 2012).

Sejak kehadiran bangsa Inggris di Brunei yang bukan hanya mengambil kekayaan di Brunei tetapi membawa pengaruh bagi pendidikan agama Islam di Brunei. Perpaduan antara pola pendidikan Inggris dengan Brunei membawa dualisme pendidikan, yang mana pendidikan antara Brunei dengan Inggris, masih tetap saja berjalan. Akan tetapi, agama Islam yang menjadi agama bagi mayoritas terbesar Suku Melayu sehingga peran agama Islam tidak dengan mudah terpengaruh dari bangsa Inggris sejak kedatangan Inggris maupun setelah Brunei mendapatkan kemerdekaannya. Apalagi, Inggris memberikan kekuasaan yang penuh dalam hal pendidikan yang terlihat dari kepedulian Inggris untuk meningkatkan pendidikannya yang nantinya akan dibiayai oleh Inggris jika Pendidikan tersebut berhasil, karena pada sebelumnya dari tahun 1906-1924 dibawah kerajaan Sultan Muhammad Jamalul Alam tidak dapat meningkatkan pendidikan secara besar-besaran di Brunei. Bahkan pada saat pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950) kurang juga berhasil dalam hal pendidikan, karena sikap kehati-hatian pihak *British* terhadap kemauan kerajaan Brunei. *British* lebih memperhatikan kekayaan alam minyak bumi di Brunei dibandingkan pendidikannya (Suryani, 2014).

Negara Brunei Darussalam yang telah memperoleh kemerdekaan dari Inggris, maka pendidikan masih mengalami dualisme tetapi hukum Islam masih tetap saja berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal agama Islam, Brunei mengamalkan falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) dengan menekankan pendidikan ajaran-ajaran Islam yang tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk melahirkan anak didik yang seimbang dari intelektual, rohani, emosi dan jasmani. (Lubis & Aspar, 2005, hlm. 142) Filsafah ini secara resmi telah diberlakukan sejak pada tanggal 27 Rabiulawal 1404 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Januari 1984 M. Isi dari kandungan falsafah Melayu Islam Beraja adalah "... Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahli Sunnah wal Jama'ah...". (Klasik, t.t., hlm. 1). Ketetapan ini telah diberlakukan sejak raja ke 24, Sultan Abdul Momin (1852-1885). Apa lagi, kekuasaan yang penuh dimiliki oleh raja, sehingga masyarakat Brunei sangat hati-hati terhadap pengaruh dari luar. Bahkan, pada tahun 1991 disaat perayaan Isra' Mi'raj, Sultan telah mengeluarkan dekret yang isinya melarang pergerakan Al-Arqam yang larangan itu sangat dihormati oleh masyarakat Brunei (Bani, 2008). Selain itu juga, raja Brunei melarang menjual

minuman keras, berkhawat (hubungan intim yang tidak sampai melakukan perbuatan zina), melakukan razia makanan yang tidak halal disetiap restoran dan juga memberikan batasan terhadap agama lain, seperti kristen, Budha, Hindu untuk menyebarkan agamanya secara bebas (Natalia, 2015). Ajaran agama Islam di Brunei semakin menyebar di berbagai daerah wilayah Brunei, tetapi ajaran agama selain Islam tidak diberikan pergerakan yang seluas-luasnya atas perintah kesultanan Brunei. Masyarakat Brunei juga taat terhadap ajaran agama Islam yang terlihat dari ketaatannya terhadap pemimpinnya.⁹

Falsafah dari Melayu Islam Beraja (MIB) di Brunei lebih cenderung menganut Mazhab Syafi'i dan Mazhab *Ahl Sunnah wal Jamaah*, walaupun raja Brunei membebaskan rakyatnya untuk menganut mazhab lain selain syafi'i. Mazhab ini dilator belakangi sekitar abad ke 17 sampai 20 M, dengan standar kurikulum sistem kesultanan menggunakan kajian kitab Sabilah Muhtadin (karya Daud Fatani), al-Mukhtasar dan Siratal Mustaqim karya ar-Raniry, Ghayatut Taqrib fil Irthi wat-Tas'shib dan lain-lain. Selain itu juga, kepedulian raja Brunei terhadap rakyatnya terhadap agama Islam, terlihat dari keinginan raja agar semua rakyatnya bisa membaca al-Qur'an. Atas kebijakan ini sehingga raja Brunei menghabiskan uang yang begitu banyak untuk menerbitkan al-Qur'an dengan tulisan tangan yang ditulis oleh orang-orang khusus yang lebih memahami al-Qur'an. Bahkan, perusahaan yang besar di Mesir telah menerbitkan 150.000 exsampler ke sekolah-sekolah yang ada di Brunei. Raja Brunei juga menekankan pengajaran bahasa Melayu dengan huruf Jawi dan aksara rumi, sebagai tujuan untuk memperkuat hubungan antara negara Melayu dengan warisan budaya Islam (Bani, 2008). Dilihat dari sistem pengajaran Negara Brunei dari segi bahasa, maka Brunei juga sudah menggunakan sistem pendidikan ala barat yang berarti Brunei disatu sisi mengajarkan pendidikan Islam, tetapi disisi lain mengajarkan sistem pendidikan ala barat dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Inggris masih tetap saja berjalan walaupun Brunei telah memperoleh kemerdekaan.¹⁰

Pada tahun 1913-1941, sekolah yang ada di Brunei berjumlah 32 buah sekolah, yang terdiri dari 24 sekolah Melayu, 3 sekolah swasta Inggris dan 5 sekolah Cina. Sistem pendidikan khusus untuk siswa laki-laki juga didirikan pada tahun 1918, dengan usia 7-14. Kehadiran sekolah ala barat di Brunei kurang mendapat sambutan hangat dari rakyat Brunei. Oleh karena itu, agar rakyat Brunei merasa perlu untuk menyekolahkan anaknya sehingga raja Brunei mengadakan sosialisasi dan mengadakan sistem pembelajaran di masjid dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat awam Brunei bahwa sekolah ala barat tidak bertentangan dengan agama. Namun, strategi tersebut tidak juga berhasil, sehingga raja Brunei membuat peraturan yang disebut dengan "*The School Attendance Enactment 1929* yang mewajibkan" orang tua untuk menyekolahkan anaknya ketika sudah memasuki umur 7-14 tahun dan denda antara 50 *sen* sampai

⁹<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/ji/article/view/448/388>

¹⁰ Mohammad Huzaiman bin Haji Kassim, "Adakah Spn21 Itu Mendukung Visi Dan Misi Jabatan Pengajian Islam?" (makalah, Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 2009).

seratus dolar. Strategi ini juga tidak secara menyeluruh berhasil di wilayah-wilayah Brunei, karena sebagian orang tua Brunei beranggapan bahwa pendidikan ala barat tersebut adalah ajaran dari agama kristen yang nantinya akan mempengaruhi agama Islam yang dimiliki masyarakat Brunei dari Suku Melayu. (Suryani, 2014) Selain itu juga, pendidikan agama yang diajarkan di sekolah tidak dimasukkan dalam ujian yang berkisar pada tahun 1930-1964 (Daulay, 2009).

Dengan demikian, pendidikan agama Islam yang tidak masuk dalam kategori ujian, dianggap sebagai ajaran yang telah diajarkan sejak masa anak-anak sampai ke jenjang pendidikan selanjutnya sehingga mata pelajaran ini tidak dianggap begitu penting bagi pendidikan pada jenjang formal tetapi sangat ditekankan sistem ajarannya untuk membentuk tingkah laku anak didik di tingkat pendidikan anak-anak masing-masing.

Pendidikan di Brunei masih belum dianggap berhasil pada tahun 1958 sekaligus pada tahun itu juga, Brunei mengambil alih pentabdiran Residen British. Ketidak berhasilan tersebut terlihat dengan jelas bahwa Negara Brunei meminta bantuan kepada warga asing untuk memegang jabatan di kerajaan. Sebelumnya, pada saat Sultan Omar Ali Saifuddien III memerintah kerajaan Brunei pada tahun 1950, yang mana kerajaan Brunei yang kaya raya tetapi mengalami kemunduran di berbagai aspek, sehingga pada tahun 1953, raja Brunei memperkenalkan Rancangan Kemajuan Negeri (RKN) Brunei. Pada tahun sebelumnya juga (1945-1953) telah juga diselenggarakan program perbaikan di Brunei setelah Brunei dijajah oleh Jepang dan dampak penjajahan tersebut tahun 1941-1945. Akan tetapi usaha raja Brunei yang menjabat waktu itu adalah Sultan Ahmad Tajuddin untuk memperbaiki hal tersebut tidak mendapatkan apresiasi oleh Residen British sehingga ia meminta bantuan kepada London kerajaan Britain mengenai keadaan masa depan Brunei nantinya. Namun, usahanya tidak terlaksana karena ia telah meninggal terlebih dahulu di Singapura dan digantikan oleh Sultan Omar Ali Saifuddien III. Pemerintahan kesultanan yang baru ini meneruskan kembali semangat dan cita-cita raja sebelumnya, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, pembekalan air, pembesaran jalan raya, pembinaan jembatan, bangunan infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi yang telah disetujui oleh Majelis Mesyuarat Negeri pada tanggal 29 Juli 1953 (Suryani, 2014). Ketercapaian kemajuan dalam hal pendidikan maupun kemajuan lainnya dilanjutkan kembali oleh sistem pemerintahan seterusnya, yakni Sultan Omar Ali Saifuddien III.

Pengaruh kemerdekaan dari Inggris memberikan nuansa bagi mata pelajaran di Brunei yang mana bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling ditekankan. Pada awalnya, pendidikan Inggris belum ada sama sekali di Brunei di tahun 1950. Setelah sekolah yang didirikan oleh Inggris dan diperkenalkan di Brunei pada tahun 1951 baru pendidikan Inggris diperkenalkan. Pendidikan telah diwajibkan dari tingkat TK dengan umur 5 tahun. Setelah pada tingkat TK, maka secara otomatis sudah pada tingkat SD, tetapi untuk ke tingkat selanjutnya hanya kepada siswa tertentu, jika masih belum mampu maka akan tinggal di kelas satu. Tujuan dari pendidikan dasar adalah untuk memberi kemampuan dasar bagi siswa dalam hal menulis, membaca, berhitung (Calistung). Sekolah yang didirikan dari

tingkat dasar kemudian didirikan juga tingkat menengah pada tahun 1966. Sekolah tidak hanya didirikan sekolah umum tetapi didirikan juga sekolah Islam yang memprioritaskan bahasa arab pada tahun 1970 yang tujuannya untuk melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar University Kairo tetapi hanya untuk siswa yang memenuhi kriteria. Sementara, untuk mempersiapkan guru-guru agama telah didirikan sekolah guru agama yang didirikan pada tahun 1972. Antusias pendidikan bagi rakyat Brunei sejak tahun 1962-1967. Semenjak Brunei dijajah oleh Inggris dengan memberikan corak kurikulum pendidikan yang berbeda dengan kurikulum pendidikan Brunei sebelumnya sehingga antusias masyarakat Brunei untuk menyekolahkan anaknya tidak seantusias kaum Inggris mendirikan sekolah-sekolah Brunei.

Pada tahun 1984, kurikulum pendidikan di Brunei mengalami perubahan dengan mewajibkan bagi peserta didik untuk menguasai bahasa Melayu dan Inggris dan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di University Brunei Darussalam yang didirikan pada tahun 1985. Sistem pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk rakyat Brunei terdiri dari tiga bagian, yakni sistem dwi bahasa di semua sekolah, konsep Melayu Beraja (MIB) dan pendidikan kejuruan. Bahasa Melayu digunakan untuk mengajar mata pelajaran bahasa Melayu, agama Islam, pendidikan jasmani, lukisan dan pertukangan tangan, sementara bahasa Inggris digunakan untuk mengajar mata pelajaran seperti sains, matematika, geografi, sejarah dan bahasa Inggris tersebut. Pendidikan lebih ditekankan kepada keahlian teknikal, kejuruan, perdagangan, pertukangan kayu dan mekanik. Masa pendidikan di Brunei pada tingkat dasar selama 7 tahun, tingkat menengah pertama selama 3 tahun, tingkat atas selama 2 dan 2 tahun pra universitas. Lamanya masa studi dikenal dengan pola A7-3-2-2. Kerajaan Brunei juga telah menggalakan pendidikan, dengan menyediakan asrama dan pengangkutan bagi siswa secara gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Antusias raja Brunei untuk memberikan pendidikan kepada rakyatnya sangat antusias sekali, yang mana pendidikan diberikan secara gratis tanpa pandang bulu, baik mempunyai intelektual yang tinggi maupun rendah mempunyai layanan yang sama dalam hal pendidikan.

Pendidikan di Brunei lebih banyak mengalami persamaan seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, tetapi juga memiliki perbedaan pada tingkat menengah atas yang lebih menekankan pada bahasa Inggris. (Abduh, 2016, hlm. 2-3) Kemudian perbedaan lainnya adalah siswa yang lulus pada tingkat SLTP, maka akan memiliki beberapa pilihan, diantaranya; Pertama, meneruskan ke jenjang SLTA. Di tahun ke dua, setiap siswa akan menjalani ujian penentuan tingkat yang dikenal dengan BCGCE (*Brunei Cambridge General Certificate of Education*) yang mempunyai dua tingkatan yakni AO dan AN. Siswa yang berprestasi baik maka akan mendapatkan ijazah AO sekaligus dapat meneruskan pra-universitas selama dua tahun dan akan mendapatkan ijazah Brunei Cambridge Advanced Level Certificate tingkat AA, sementara siswa yang tidak berhasil, maka akan mendapatkan ijazah AN dan terpaksa melanjutkan setahun lagi untuk mendapatkan ijazah AO. Kedua,

melanjutkan ke sekolah kejuruan seperti perawat kesehatan, kejuruan teknik dan seni, kursus yang bisa langsung ke dunia kerja (Abduh, 2016).

Dengan demikian, layanan khusus untuk intelektual yang khusus maka diberikan semacam ujian untuk melanjutkan kejenjang yang tinggi tanpa menyelesaikan sekolah pada waktu yang telah ditentukan, tetapi diberi keringanan berupa program khusus, sementara yang tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh raja Brunei maka akan melanjutkan kembali sesuai dengan waktu jenjang sekolah yang telah ditentukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Eddy Iswandy Haji Ismail, “*Integrasikan Pendidikan Teknik dan Vokasional,*” *Pelita Brunei*, 18 March 2013.

Haji Awang Mohd. Jamil al-Sufri, *Tarsilah Brunei: Sejarah Awal dan Perkembangan Islam (Brunei Darussalam: Kementrian Kebudayaan, 2001)*. Binti Ma'unah, *Perbandingan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011).

<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/709772>

<https://core.ac.uk/download/pdf/291324086.pdf>

<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/ji/article/view/448/388>

Jurnal, *Perbandingan Kurikulum Social Studies di Korea selatan dan Brunei Darussalam*, (Novidya Yulanda).

Mohammad Huzaiman bin Haji Kassim, “Adakah Spn21 Itu Mendukung Visi Dan Misi Jabatan Pengajian Islam?” (makalah, Fakulti Usuluddin, Kolej University Perguruan Ugama Seri Begawan, 2009).

Norliah Md Zain, “SPN21 Berdasarkan *Student Centred Learning* Bukan *Examination Oriented*,” *Pelita Brunei*, 18 March 2013.

Norliah Md Zain, “SPN21 Berdasarkan *Student Centred Learning* Bukan *Examination Oriented*,” *Pelita Brunei*, 18 March 2013.

Perbandingan Kurikulum Studi Sosial di Korea Selatan dan Brunei Darussalam, *Research and Development Journal Of Education* Vol. 5 No. 2 April 2019

Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 SPN21, 2008.

Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Perbandingan Pendidikan Islam* (Yogyakarta, Teras, 2011).

Teks Perdana dalam *Konvensyen Pendidikan Islam 2011* (Brunei: Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, 2011).

BAB XVII

SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA BELANDA

Imam Ma'ruf

imam.maruf0996@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kunci keberhasilan sebuah Negara, bahkan kemajuan sebuah Negara salah satunya tergantung dengan bagaimana pemerintahan sebuah Negara memuliakan pendidikan dan pemerataannya, karena pendidikan merupakan hak asasi sebuah warga Negara. Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat tanpa memandang gender, status sosial, status ekonomi, suku, etnis dan agama. Untuk memenuhi tujuan-tujuan pendidikan di atas, dan sebagai tolak ukur mutu dan keberhasilan di Negara kita, kita dapat melakukan perbandingan sistem pendidikan Negara lain, dalam hal ini salah satu Negara yang dapat kita perbandingkan sistem pendidikannya dengan Negara Indonesia adalah Negara Belanda.

Pendidikan merupakan indikator kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa yang memiliki system pendidikan yang baik tentunya akan mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun negeri. Ada Negara besar yang terpuruk karena system pendidikannya buruk, namun adapula Negara dengan sumber daya terbatas namun mempunyai system pendidikan yang baik mampu menjadi Negara yang maju baik dari segi ekonomi maupun teknologi.

Komparasi dapat diartikan membandingkan sesuatu hal. Dalam kajian pendidikan komparatif, dibahas mengenai perbandingan praktek dan pelaksanaan pendidikan di berbagai Negara. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa kebutuhan akan pengetahuan mengenai pendidikan di Negara lain sangat dibutuhkan. Selain menjadi pembanding untuk negeri sendiri, juga sebagai acuan pengembangan pendidikan.

Belanda hanyalah sebuah Negara kecil di Eropa bagian barat laut. Belanda memiliki daerah kira-kira luasnya 42.000 km² (16,216 mil persegi). Posisi geografisnya dan keadaan tanahnya menyebabkan perdagangan, perkapalan, pertanian dan peternakan menjadi dasar perekonomian Belanda sejak lama. Negara belanda terbagi menjadi 12 propinsi. Sebagian besar penduduknya tinggal di tiga propinsi barat (Belanda Utara, Belanda Selatan dan Utrecht). Negeri Belanda berada dibawah permukaan laut dan umumnya datar, yang merupakan daerah delta Sungai Rhine, Sungai Mass, Sungai Schedt batas disebelah utara dan barat dengan laut utara, di selatan berbatas dengan Belgia dan di timur berbatas dengan Republik Jerman. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Belanda, tetapi dibagian utara propinsi Friesland dalam interaksi lisan menggunakan bahasa Frisia.

Walaupun kecil Negara ini bisa menjadi perhatian dunia. Banyak kelebihan-kelebihan yang dimilikinya seperti pada bidang ekonomi, budaya, prestasi olahraga dunia, dan yang terkhusus dalam bidang pendidikan. Pendidikan di Belanda sangat ditekankan dan menjadi salah satu masalah prioritas pemerintah, mulai dari tingkat

pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi/universitas. Maka tidak aneh mulai dari system pendidikan dasar di Belanda hingga pendidikan tinggi/universitas itu berkualitas. Dunia sendiri mengakui akan prestasi Belanda didunia pendidikan, terbukti 11 dari universitas di Belanda masuk ranking 200 universitas terbaik didunia. Pada tahun 2009 Belanda masuk sebagai negara paling maju dan sukses dalam sistem pendidikannya versi CIEB. Penelitian juga menunjukkan bahwa mereka yang pernah studi di universitas atau institusi pendidikan tinggi Belanda memiliki kinerja yang sangat baik di manapun mereka berada.

Sistem pendidikan di Belanda sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Asia, Amerika, bahkan di sebagian besar wilayah Eropa. Adapun beberapa negara yang menerapkan pendidikan yang hampir sama dengan Belanda adalah Jerman dan Swedia.

Untuk Negara kecil seperti Belanda, orientasi internasional, termasuk pendidikan dan pelatihan merupakan keharusan untuk dapat bertahan di tengah arus Dunia yang semakin internasional. Karena terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan deficit anggaran yang cukup besar maka terjadilah pemotongan anggaran pendidikan yang cukup besar terjadi pada tahun 1983, sebagian melanda gaji pegawai (dari keseluruhan anggaran pendidikan, 82% adalah untuk gaji). Kementerian Pendidikan dan Ilmu pengetahuan terpaksa mengurangi pengeluarannya sampai f 1,000 juta (gulden) pada tahun 1986.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Negara Belanda

Di bawah pemerintahan **Karel V** (kaisar Romawi Suci, dan raja **Spanyol**) kawasan ini (kini Belanda) merupakan salah satu dari 17 **daerah** Belanda, yaitu daerah yang meliputi sebagian besar kawasan yang dikenal hari ini sebagai **Belgia**, **Luxemburg** dan Utara **Prancis**. Selepas mendapat kemerdekaan dari **Phillip II** (anak lelaki Karel V) pada 1648, Belanda menjadi sebuah Negara **Republik** yang dinamakan Republik Tujuh Provinsi (*Republiek der Zeven Provinciën*). Republik ini menjadi penguasa **ekonomi** dan penjelajah laut yang mahir pada abad ke 17. Zaman ini dikenal sebagai Zaman Keemasan Belanda. Antara perusahaan-perusahaan internasional yang berawal di sini termasuk **VOC**¹

Belanda pernah mempunyai beberapa koloni, salah satu yang paling ternama adalah **Nederlands-Indië** (yakni **Indonesia**), dan **Suriname** yang ditukar dengan **Nieuw Amsterdam** atau sekarang dikenal dengan **New York** oleh Kerajaan Inggris. Koloni ini pertama diadministrasi oleh *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (**VOC**), dan *West-Indische Compagnie* (**WIC** atau resminya adalah *Geoctroyeerde West-Indische Compagnie*) (**GWIC**)), keduanya adalah dua perusahaan milik pribadi. Tiga abad kemudian, perusahaan ini mendapat kesulitan finansial, dan teritori di mana mereka beroperasi diambil alih oleh pemerintahan

¹ Boekholt. *Geschiedenis van de School in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot aan de Huidige Tijd*, (Assen/Maastricht: Van Gorcum. 1987)

Belanda (pada tahun 1815, dan 1791). Pada saat inilah daerah tersebut menjadi koloni resmi pemerintahan Belanda.²

Belanda masuk ke dalam **Kekaisaran Prancis** oleh **Napoleon Bonaparte** yang kemudian dibebaskan selepas kekalahannya. Selepas itu, Kerajaan Belanda didirikan pada 1815 dengan meliputi kawasan yang dikenali pada hari ini sebagai **Belgia** dan **Luxemburg**. Belgia mendapat kemerdekaan pada 1830, sedangkan Luxemburg berpisah selepas kematian Raja **Willem III**. Pada **abad ke-19** Belanda sudah menjadi sebuah Negara industri yang sebanding dengan Negara-Negara tetangganya.

Pada abad ke-19, Belanda dapat dikategorikan 'lamban' dalam proses industrialisasi jika dibandingkan oleh Negara tetangganya, terutama karena ketergantungannya terhadap infrastruktur air, dan kekuatan angin. Belanda bersifat netral semasa **Perang Dunia I** dan **Perang Dunia II**. Belanda ditaklukkan oleh **Nazi** pada Mei 1940 pada saat perang dunia ke II, dan memaksanya untuk menjadi pendukung negara-negara Poros (Axis). Belanda secara sekejap dalam masa itu untuk didominasi oleh Nazi. Lebih dari 100000 Yahudi-Belanda dibunuh semasa itu. Group Tentara ke-21 Sekutu melaksanakan operasi militer yang bertujuan untuk membebaskan Belanda setelah pendaratan di Normandy oleh Inggris, Kanada, Polandia, dan Amerika yang bertempur di Belanda mulai dari tahun 1944 sampai Belanda dibebaskan tahun 1945. Selepas perang, ekonomi Belanda menjadi semakin maju dengan Belanda menjadi anggota **Benelux** dan **Komunitas Eropa**. Belanda juga menjadi anggota **NATO**.

Belanda merupakan negara perintis **Uni Eropa** saat pendirian organisasi itu pada 1992. Belanda secara geografis merupakan Negara berpermukaan rendah, dengan kira-kira 20% wilayahnya dan 21% populasinya berada di bawah permukaan laut, dan 50% tanahnya kurang dari satu meter di atas **permukaan laut**. Kenyataan yang unik ini terabadikan dalam namanya: *Nederland* (bahasa Belanda) yang artinya "Negeri-Negeri berdaratan rendah". Nama ini pun digunakan dengan beberapa variasi dalam bahasa Eropa lainnya. Sebagian besar daratan yang berada di bawah permukaan laut adalah hasil campur tangan manusia, ini disebabkan oleh ekstraksi **gambut** yang meluas dan kurang terkontrol selama berabad-abad dan merendahkan permukaan setinggi beberapa meter. Bahkan di wilayah banjir ekstraksi **gambut** tersebut dilanjutkan melalui pengerukan. Sejak akhir abad ke-16 **reklamasi daratan** dimulai, kemudian wilayah **polder** yang luas kini dilestarikan dengan mengelaborasi sistem drainase yang melibatkan beberapa **tanggul** terusan, dan stasiun pompa. Sebagian besar wilayah Belanda dibentuk oleh **estuaria** tiga sungai penting Eropa, yang secara bersama-sama dengan anak-anak sungainya membentuk **delta Rhein-Maas-Schelde**. Sebagian besar wilayah Negara ini sangatlah datar, dengan perkecualian

² Closset F. *Inleiding tot de Didactiek van de Levende Talen*, (Amsterdam: Meulenhoff, 1960)

di kaki-kaki bukit di tenggara-jauh dan beberapa deret perbukitan di bagian tengah.³

Belanda diperkirakan berpenduduk sebanyak 16.785.403 jiwa pada tanggal 30 April 2013. Belanda merupakan Negara berpenduduk terbanyak ke-10 di Eropa dan **terbanyak ke-61** di dunia. Antara tahun 1900 dan 1950, populasi negara ini hampir menjadi dua kali lipat semula dari 5,1 juta menjadi 10,0 juta jiwa. Dari tahun 1950 sampai 2000, populasinya kemudian bertambah lagi dari 10,0 juta menjadi 15,9 juta jiwa, tetapi laju **pertumbuhan penduduk** lebih kecil daripada lima puluh tahun lampau. Laju pertumbuhan taksiran pada tahun 2013 adalah sebesar 0,44%.

Belanda telah menjadi **monarki konstitusional** sejak tahun 1815 dan **demokrasi parlementer** sejak tahun 1848. Belanda digambarkan sebagai **negara konsosiasional**. Politik dan pemerintahan Belanda disifatkan oleh suatu usaha untuk mencapai kemufakatan yang luas mengenai urusan-urusan yang penting, dalam komunitas politik maupun masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 2010, **The Economist** menempatkan Belanda sebagai **Negara paling demokratis** ke-10 di dunia. Raja Belanda adalah kepala negara. Menurut konstitusi Belanda, kedudukan kepala Negara diperlengkapi oleh kuasa yang terbatas. Kepala negara dapat menggunakan pengaruhnya ketika **kabinet baru** hendak dibentuk, di mana pengaruh itu akan berperan sebagai penengah yang netral di antara partai-partai politik. Selain itu, raja (gelar ratu tidak memiliki keberartian konstitusional) berhak untuk diajak rapat dan konsultasi. Bergantung kepada kepribadian dan hubungan raja dengan dewan menteri, raja bisa saja berpengaruh melebihi kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi.⁴

Ideologi Belanda mengenal apa yang disebut demokrasi parlementer. Sedangkan bentuk Negaranya adalah monarki konstitusional. Tweede Kamer atau majelis rendah inilah yang merupakan jantung demokrasi Belanda, lebih penting perannya dalam kehidupan politik di Belanda katimbang Eerste Kamer atau majelis tinggi. Koalisi yang mendukung pemerintah ini menyusun perjanjian pemerintahan namun ini tidak berarti partai koalisi selalu harus mendukung pemerintah. Belanda mengenal sistem dualisme.. Relatif stabil. Demokrasi Belanda ini memang menyebabkan negara ini mendapat sistem politik yang relatif stabil, hampir tidak ada perubahan drastis.

Salah satu bentuk yang menarik di Belanda ialah permukaan tanahnya sangat rata. Hampir separuh daripada Negara Belanda berada kurang 1 meter dari permukaan laut. Walaupun demikian, provinsi Limburg, yang berada di bagian tenggara negeri Belanda, sedikit berbukit. Permukaan tertinggi ialah Vaalserberg, yang berada di provinsi Limburg, mempunyai ketinggian 321 m. Permukaan yang terendah ialah Nieuwerkerk aan den IJssel, yang berada 6.76 di bawah permukaan laut.

³ Frijhoff, W. *Nederlandse Cultuur in Europese Context. 1650 Bevochten Eendracht*. (Den Haag: Sdu uitgevers. 1650)

⁴ Grasé, J.C.G. *Directe Methode en Phonetisch Schrift als Grondslagen van Taalonderwijs*. (Groningen, The Netherlands: J.B. Wolters. 1896)

Banyak tanah rendah dikawal oleh *dijk*, dan dinding laut. Sebagian kawasan di Belanda, misalnya daerah Flevoland, mesti direklamasi. Kawasan yang direklamasi itu disebut *polder*.

Salah satu konstruksi yang terkenal ialah *Afsluitdijk* (Penutup Tanggul), yang memisahkan danau IJssel (IJsselmeer, dulunya disebut laut Zuider atau Zuiderzee) dengan laut Wadden (Waddenzee). Panjang dari tanggul ini 32 km, dan lebarnya 90 m. Negara ini dibagi menjadi dua bagian utama oleh sungai Rhine (*Rijn*), Waal, dan Maas. Arah angin yang utama di Belanda ialah barat daya, yang menyebabkan iklim kepulauan yang sederhana, dengan musim panas yang dingin, dan musim sejuk yang sederhana.



Gambar 17.1 Peta Dunia Negara Belanda

2. Sistem Pendidikan di Belanda

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang berarti “cara, strategi”. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti “system, susunan, jaringan, cara”. Sistem juga diartikan “suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir.” Definisi tradisional menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, mobil adalah suatu sistem, yang meliputi komponen-komponen seperti roda, rem, kemudi, mesin dan sebagainya. Dalam artian yang luas, mobil sebenarnya adalah suatu subsistem atau komponen dalam sistem transportasi, di samping alat-alat transportasi lainnya, seperti sepeda, motor, pesawat terbang, dan sebagainya.

Dalam Undang-undang sistem pendidikan Nasional (Pasal 1 UU RI No. 20 th. 2003) dinyatakan bahwa sistem pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.⁵

Pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali. Untuk itu diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem. Selanjutnya secara total bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang memiliki kegiatan yang cukup kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Jika menginginkan pendidikan terlaksana secara teratur, berbagai elemen (komponen) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali terlebih dahulu. Untuk itu diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem yang dapat dilihat secara mikro dan makro.

Secara mikro pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Adapun secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama pelakunya.

3. Otorita

System pendidikan di Belanda didasarkan pada statute yang kuat dan berfungsi sebagai dasar peraturan-peraturan yang lebih rinci dalam bidang-bidang tertentu. Peraturan ini dibuat menurut urutan atau hierarki. Parlemen dapat menentukan bahwa hasil pembicaraan di dewan pendidikan harus lebih dahulu disampaikan ke parlemen sebelum peraturan itu dilaksanakan. Peraturan atau undang-undang itu berkaitan terutama terutama dengan pendanaan dan organisasi pendidikan.

Bentuk sistem pendidikan Belanda ialah sentralisasi. Tanggungjawab pemerintah pusat terletak pada hal-hal yang berhubungan dengan organisasi, pendanaan (termasuk status hukum kepegawaian), inspeksi, ujian, dan inovasi promosi. Pejabat-pejabat propinsi bertanggung jawab terutama atas tugas-tugas pengawasan serta mempunyai peran juga dalam hal pelaksanaan pendidikan orang dewasa, dan akhir-akhir ini juga lebih banyak dilibatkan dalam tugas-tugas perencanaan dan penasihat. Manajemen dan pengadministrasian diatur pada tingkat lokal. Pejabat-pejabat eksekutif kota praja bertanggung jawab atas sekolah-sekolah negeri dan yayasan atau organisasi yang punya fungsi yang sama pada sekolah-sekolah swasta. Mereka juga melaksanakan berbagai tugas terhadap

⁵ Horn, M. *Berichten en Mededeelingen van de Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs* 7,

semua sekolah seperti pengawasan pelaksanaan peraturan wajib belajar. Mereka juga membayar biaya-biaya pasilitas baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.⁶

Kementerian pendidikan dan ilmu pengetahuan dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggungjawab mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Menteri dibantu oleh seorang sekretaris Negara dengan tanggung jawab khusus atas pendidikan dasar dan menengah. Pengawasan pendidikan adalah tanggung jawab menteri pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan dilaksanakan oleh inspektorat pendidikan. Ini merupakan badan yang bersifat desentralistis. Pada tahun 1990, inspektorat pendidikan mempunyai 14 kantor ditingkat regional dengan 500 orang tetap, 237 orang diantaranya adalah inspektur. Tugas kantor inspektorat adalah mengawasi pembangunan, menjaga bahwa semua peraturan berjalan sebagaimana mestinya, meningkatkan pembangunan pendidikan, dan melaporkan kepada menteri, baik diminta atau atas inisiatif sendiri. Inspektorat pendidikan tinggi, disamping tugas-tugas tersebut, juga bertanggung jawab menyusun dan memberikan dukungan terhadap tim evaluasi universitas disaat melakukan evaluasi diri. Inspektorat juga bertanggungjawab menyampaikan laporannya yang independen tentang keadaan pendidikan diparlemen.

4. Pendanaan

Pendidikan formal dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan ilmu Pengetahuan kecuali pendidikan pertanian yang dibiayai oleh Kementerian pertanian: dana ini bersumber dari penghasilan pajak dan dalam jumlah yang sangat terbatas, dari sekolah, khusus, dan uang sekolah. Lembaga pendidikan tinggi dapat mengumpulkan uang dari pengajaran atau penelitian yang dilaksanakan atas dasar kontrak. Pendidikan yang tidak didanai oleh pemerintah juga merupakan sector yang cukup besar, yang dananya seluruhnya dibayar oleh peserta pendidikan, atau orang tua, atau majikan yang menyekolahkan stafnya. Dana pemerintah dialokasikan untuk pendidikan sesuai persyaratan tertentu.⁷

Peraturan yang terpisah mengatur pendanaan untuk staf, untuk investasi, untuk biasa operasional. Aspek-aspek pendanaan pendidikan mencakup jumlah murid pada sekolah tertentu, lamanya waktu pendidikan, besarnya kelas (jumlah murid perkelas), dan skala gaji guru-guru.

Peraturan tentang “kelebihan pengeluaran” (*overspend*) menetapkan bahwa njika dalam satu tahun ajaran kotapraja mengeluarkan biaya untuk sekolah-sekolah negeri lebih dari yang telah ditetapkan, maka kotapraja yang

⁶ Howatt, A.P.R. *A History of English Language Teaching*. (Groningen, the Netherlands: Uitgeverij Passage. 2004)

⁷ van Oostrom, F. *Wereld in Woorden: Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur*. (Amsterdam: Bert Bakker. 2013)

bersangkutan harus mengeluarkan dana yang jumlahnya sama besarnya dengan kelebihan itu kepada sekolah-sekolah swasta setempat.

Peraturan ini bersumber dari persamaan keuangan antara sekolah negeri dan swasta sesuai ketentuan substitusi. Dalam tahun 1987, pemerintah setempat mengeluarkan kira-kira 680 juta DfI. (US\$340 juta) untuk fasilitas pendidikan. Negara Belanda merupakan salah satu anggota OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) yang menggunakan persentase tertinggi dari GNP-nya untuk pendidikan (*Gross National Products*). Antara tahun 1976 dan 1987 pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terus meningkat. Kalau persentasenya di hitung dari jumlah pendapatan nasional, jumlahnya lebih kurang 7%, 6% pada tahun 1990, dan 5,2%, pada tahun 1995 (*UNESCO Statistical Year-book 1999*) tetapi apabila di hitung dari anggaran nasional jelas sekali penyusutannya antara tahun 1975-83, sesudah itu menjadi mantap pada 15%, dan pada tahun 1995 menurun kembali menjadi 8,7%.

5. Personalia

Pendidikan guru adalah bagian dari pendidikan tinggi. Guru-guru sekolah dasar dididik pada perguruan tinggi profesional atau fakultas-fakultas yang khusus untuk pendidikan guru sekolah dasar (PABO's). kuliah berlangsung selama 4 tahun dan memprogramkan agar guru-guru yang mengajar di sekolah dasar mampu mengajarkan semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Mahasiswa yang mendaftarkan pada lembaga keguruan ini meningkat dengan cepat (1987:3,000-4,00 orang; 1990:6,000) setelah menurun sebelum 1987. jumlah tamatan juga meningkat (1987:1,700 orang; 1989:2,600 orang).

Guru-guru sekolah menengah harus memiliki kualifikasi "Grade" satu atau kualifikasi "Grade" 2. guru yang berkualifikasi "Grade"2 boleh mengajar pada level tiga tahun pertama di VWO dan HAVO, dan di sekolah-sekolah MAVO, VBO, dan MBO. Guru-guru berkualifikasi "Grade" 1 boleh mengajar pada semua kelompok umur pada semua jenis sekolah menengah. Kuliah penuh untuk pendidikan guru-guru "Grade"2 dalam mata pelajaran umum, diselenggarakan pada perguruan tinggi profesional selama 4 tahun. Mahasiswa mengambil spesialisasi dalam satu mata pelajaran atau bidang studi dan hanya boleh mengajar, selain bidang keahliannya, mata pelajaran pendukung pada level tertentu.

Semenjak tahun 1979, diadakan kuliah eksperimen dalam mata pelajaran teknik yang berlangsung selama 5 tahun. Jumlah mahasiswa pada program ini

meningkat (1987:3,148 orang; 1990:4,427 orang), walaupun jumlah lulusannya menurun (1987:2,254 orang; 1989:1,755 orang).⁸

6. Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran

Kebebasan pendidikan yang di gariskan dalam undang-undang memerlukan standar yang perlu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Standar ini mencangkup mata pelajaran yang diwajibkan untuk jenis sekolah tertentu, dan peraturan-peraturan yang mengikat lainnya mengenai isi ujian-ujian akhir sekolah. Mengenai target pencapaian pendidikan masih belum ditetapkan bagi semua jenis sekolah. Kementerian ilmu pendidikan dan Ilmu pengetahuan dalam hubungan ini berpendapat bahwa berdasarkan prinsip kebebasan ideology dan kurikulum, hasil serta penilaian materi pengajaran seharusnya tidak diatur secara sentral. Dewan pendidikan setempat atau "school board" seyogianya bertanggung jawab untuk hal itu.

Pada tingkat sekolah dasar rencana kerja merupakan instrument utama bagi "school board". Organisasi dan isi program pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya sekali dua tahun dalam bentuk proposal dari guru-guru. Ini berisi pilihan materi pelajaran, metode mengajar, cara atau teknik bagaimana hasil belajar anak di ukur, dinilai dan dilaporkan. Tiap tahun dirancang program kegiatan guru dan kegiatan murid untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Rencana kerja (Workplan) sekolah dibahas oleh inspektorat, dan semua rencana kegiatan harus disampaikan untuk diserahkan kepada inspektorat.

Pada tingkat sekolah menengah, staf pengajar menyusun silabus dan rancangan pelajaran yang juga direviu oleh inspektorat. Informasi yang lengkap dan rinci perlu disiapkan yang mencangkup mata pelajaran, waktu, pengorganisasian kelompok, dan keterangan bagaimana mengenai sekolah menghadapi siswa yang hidup dalam masyarakat multicultural. Sudah ada ketentuan minimal dan maksimal waktu untuk setiap mata pelajaran dari kementerian pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.

Mulai dari tahun 1993 ke atas, siswa pada semua jenis pendidikan menengah mendapat pelajaran dalam 15 mata pelajaran dari "kurikulum inti" (core-curriculum) yang berbobot sama dengan 3,000 jam pelajaran setiap tahun pelajaran. Kira-kira 20% dari kurikulum sekolah dapat dipilih dan ditentukan oleh "school board".

Pengembangan kurikulum baru terorganisasi secara sistematis semenjak tahun 1960-an. Lembaga Nasional Pengembangan Kurikulum (Nasional Institute for Curriculum Development, SLO) dibentuk tahun 1975. tugas utama SLO adalah menyusun proposal kurikulum. Asosiasi sekolah menetapkan proposal mana yang akan dipakai, dan "school board" membuat keputusan atas dasar implementasinya. Disamping SLO, beberapa pusat penelitian dan pengembangan universitas juga menyusun kurikulum melalui berbagai eksperimen.

⁸ Wilhelm, F.A. *Five Hundred Years of Foreign Language Teaching in the Netherlands*, (Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU. 1993)

7. Ujian Kenaikan Kelas dan Sertifikasi

Pada hampir semua sekolah di Belanda, murid-murid naik secara otomatis dari satu "Grade" ke "Grade" yang lebih tinggi. Umumnya, sertifikat atau ijazah pertama diperoleh murid pada usia 12 tahun berdasarkan tes yang disusun oleh sebuah lembaga tes pusat, (CITO). Dalam tahun 1990, 58% sekolah dasar di Belanda menggunakan tes ini. Ujian-ujian eksternal hamper tidak pernah dilakukan lagi.

Pada tingkat pendidikan menengah, ujian akhir sekolah terdiri dari dua bagian: ujian sekolah, dan ujian yang bersifat nasional. Kedua ujian ini dilaksanakan pada tahun terakhir, dengan penjadwalan ujian sekolah mendahului ujian nasional. Ujian nasional dilaksanakan serentak pada waktu yang sama untuk setiap jenis sekolah. Pada sekolah menengah kejurusan tingkat pertama, ujian dilakukan empat tingkat yang berbeda. Dua ujian yang paling sulit ditentukan oleh menteri pendidikan. Pada sekolah menengah kejurusan tingkat atas, program ujian ditetapkan oleh menteri pendidikan bersamaan dengan dilaksanakannya ujian nasional. Dalam banyak hal, sekolah menetapkan ujiannya masing-masing yang materinya berkaitan dengan sasaran pelajaran yang telah ditetapkan.

Pada tingkat pendidikan tinggi, dilakukan ujian pada akhir tahun pertama yang dinamakan "propaedeutic examination" untuk menentukan apakah seorang mahasiswa dapat mengikuti kuliah-kuliah tiga tahun berikutnya. Pada akhir program, yaitu setelah 4 tahun, mahasiswa harus mengambil ujian akhir. "school board" atau dewan sekolah (pada HBO) atau dewan dosen (pada universitas) bertanggungjawab atas pengolahan dan kualitas ujian. Biasanya, setiap fakultas atau jurusan membentuk panitia ujian sendiri.⁹

8. Evaluasi dan Penelitian Pendidikan

Penelitian pendidikan berupa investigasi atas pendidikan yang diberikan dan tingkat keberhasilan dapat membantu kegiatan mengontrol kualitas. Di tingkat sekolah dasar setiap mata pelajaran di evaluasi sekali dalam 8 tahun, dan hasilnya dapat membuat pemerintah melakukan suatu intervensi. Sekolah juga dapat membandingkan hasil penilaian itu dengan angka-angka penilaian nasional dan berdasarkan itu sekolah melakukan perbaikan atau penyesuaian sendiri.

Penelitian mengenai sebab-sebab kenaikan jumlah murid pada sekolah-sekolah khusus (sekolah bagi anak-anak cacat) mengumngkapkan sejumlah alasan, antara lain: kurikulum yang tidak fleksibel pada sekolah dasar; guru kurang motifasi dalam mengajar, kenyataan bahwa sekolah khusus kehilangan rasa malunya; kenyataan bahwa terdapat ketidak seimbangan antara potensi anak-

⁹ Ruijsendaal, E. *Letterkonst. Het klassieke grammaticamodel en de oudste Nederlandse grammatica 's.* (Amsterdam: VU Uitgeverij. Diss. Universiteit van Amsterdam. 1991)

anak dan kemampuannya; harapan tuntutan yang di hadapi murid-murid sekolah dasar dan dukungan yang mereka peroleh dirumah dan di sekolah terganggu. Kenaikan itu bukan karena kesulitan dan belajar semakin meningkat di antara anak-anak, tetapi lebih banyak karena proses sosial masyarakat.

Pada waktu yang sama, karena semakin meningkatnya otonomi pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi, pemerintah juga lebih menekankan pada mutu pengajaran dan penelitian. Langkah-langkah kearah control kualitas yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab perguruan tinggi sendiri, juga telah disusun. Inspektorat saat ini makin berkurang perannya sehingga tugas utamanya adalah untuk mendorong terlaksananya control kualitas.

9. Jenjang Pendidikan

Secara umum, sistem pendidikan di Belanda dapat dikategorikan segai berikut:

1. Pendidikan Tingkat Dasar dan Lanjutan (*Primary and Secondary Education*)
2. Pendidikan Tingkat Menengah Kejuruan (*Senior Secondary Vocational Education and Training*)
3. Pendidikan Tingkat Tinggi (*Higher Education*)

Berikut keterangan dari masing-masing sistem pendidikan tersebut:

1. Pendidikan Tingkat Dasar dan lanjutan (*Primary and Secondary Education*)

Pendidikan Tingkat Dasar

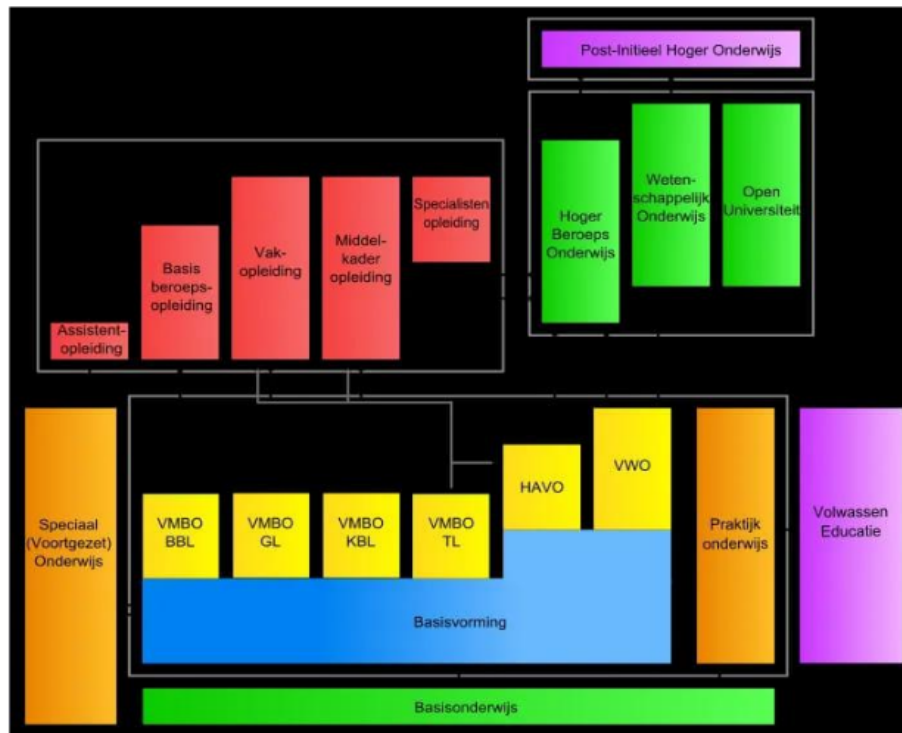
- Wajib sejak berumur 5 tahun
- Berlangsung selama kurang lebih 8 tahun
- Di tahun terakhir para siswa sudah dianjurkan untuk memilih pendidikan lanjut yang akan mereka jalani

Pendidikan Lanjutan

- Dimulai sejak siswa berumur 12 tahun, dan diwajibkan sampai umur 16 tahun
- Beberapa Tingkatan Pendidikan Lanjutan
- VMBO (Program 4 tahun) (setara SMP) memberikan pendidikan yang merupakan gabungan dari pendidikan umum dan kejuruan (*Senior Secondary Vocational and Training*)
- HAVO (5 tahun) (setara SMK) dan VWO (6 tahun) (setara SMA) merupakan pendidikan selektif. Dua jenis pendidikan yang memberikan akses langsung ke sistem pendidikan tingkat tinggi (*Higher Education*).

Lulusan VWO Bisa mengakses langsung ke Universitas. Lulusan HAVO Bisa mengakses langsung ke HBO (*Hogeschool/Universities of Profesional Education*). Dua tahun terakhir di HAVO atau 3 tahun terakhir di VWO merupakan tahun pengelompokkan untuk memilih bidang pilihan mereka. Dalam jurusan ini, mereka dapat memilih satu diantara empat jurusan sebagai berikut :

- Science and Technology (Ilmu Teknologi/Fisika)
 - Science and Health (Ilmu Kesehatan)
 - Economic and Society (Sosial Ekonomi)
 - Culture and Society (Sosial Budaya)
2. Pendidikan Tingkat Menengah Kejuruan (*Senior Secondary Vocational Educational and Training*) (MBO) – 4 tahun
Memiliki beberapa jurusan, yakni ekonomi, teknik, kesehatan, perawatan diri, kesejahteraan dan pertanian. Program MBO diberikan dalam 4 tingkatan (1-4 tahun) dan hanya lulusan dari tingkatan 4 MBO saja yang bisa memiliki akses ke HBO (*Hogeschool*).
3. Pendidikan Tingkat Tinggi (*Higher Education*)
Belanda merupakan Negara non bahasa inggris pertama yang menawarkan program studi berbahasa inggris. Lebih dari 1000 program studi internasional dalam berbagai bidang ditawarkan oleh mereka. Kurikulumnya intensif dan memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan Negara lain. Berorientasi pada praktek dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai harapan mahasiswa yang mencari pengetahuan khusus. Program-program studi ini menggantikan teori dengan praktek di dunia kerja yang sebenarnya atau situasi simulasi kerja. Bentuk sekolah tingkat tinggi adalah sebagai berikut:
- MBO, sekolah vokasi, di Indonesia setara D3
 - HBO, universitas ilmu terapan. Fokus pada ilmu terapan dan aplikasi praktis. Tahun terakhir berupa magang dan tesis.
 - WO, universitas riset. Fokus pada bidang akademis dan riset.



Gambar 17. 2 Sistem Pendidikan di Belanda

10. Kurikulum

Kebebasan pendidikan yang tercantum dalam undang-undang perlu adanya standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Sains. Standar ini mencakup mata pelajaran yang diwajibkan untuk jenis sekolah tertentu, dan peraturan-peraturan yang mengikat lainnya mengenai isi ujian-ujian akhir sekolah. Sedangkan mengenai target pencapaian pendidikan masih belum ditetapkan bagi semua jenis sekolah. Kementerian ilmu pendidikan dan Sains dalam hubungan ini berpendapat bahwa berdasarkan prinsip kebebasan ideologi dan kurikulum, hasil serta penilaian materi pengajaran seharusnya tidak diatur secara sentral. Dewan pendidikan (school board) setempat seharusnya bertanggung jawab untuk hal itu.¹⁰

Pada tingkat sekolah dasar rencana kerja merupakan instrument utama bagi dewan pendidikan. Organisasi dan isi program pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya sekali dua tahun dalam bentuk proposal dari guru-guru. Didalamnya berisi pilihan materi pelajaran, metode mengajar, cara atau teknik bagaimana hasil belajar anak di ukur, dinilai dan dilaporkan. Tiap tahun dirancang program kegiatan guru dan kegiatan murid untuk pelajaran-pelajaran

¹⁰ Riemens, K.J. 1919. *Esquisse historique de l'enseignement du français en Hollande*. PhD diss., Université de Paris. Leiden: Sijthoff.

tertentu. Rencana kerja (Workplan) sekolah dibahas oleh inspektorat, dan semua rencana kegiatan harus disampaikan untuk diserahkan kepada inspektorat.

Raport siswa di Basisschool memuat 44 butir pendidikan. Banyaknya items yang harus dinilai oleh Basisschool membuat pihak sekolah betul-betul dapat mengenali bakat, mentalitas dan budaya para siswanya. Basis school bertugas menstimulir bakat, menggembleng mentalitas dan mengembangkan budaya para siswanya dalam suasana demokratis dan sportif, sehingga tercipta generasi penerus Belanda yang bukan cuma pandai, tapi juga berakhlak luhur. 44 butir pendidikan di Basis school adalah:

Bahasa Belanda (11 butir)

1. Teknik membaca
2. Pemahaman teks
3. Entusiasme saat membaca
4. Perbendaharaan kata
5. Teknik mengeja
6. Tata Bahasa
7. Pekerjaan Rumah
8. Mengarang
9. Kemampuan berargumentasi
10. Kemahiran mengucap/berbicara
11. Menulis tebal tipis.

Presentasi (4 butir)

12. Referensi Buku
13. Guntingan Koran
14. Bercerita di depan kelas
15. Membuat skripsi kecil

World Orientation (5 butir)

16. Ilmu Bumi
17. Pengetahuan Sumber Daya Alam
18. Ilmu Sejarah
19. Ilmu Alam
20. UU Lalu Lintas

Mentalitas Siswa (7 butir)

21. Konsentrasi dalam kelas
22. Kecepatan bekerja
23. Ketelitian bekerja
24. Upaya untuk mencapai prestasi
25. Kemandirian dalam bekerja
26. Kerjasama dengan sesama siswa
27. Penampilan


Ekspresi Siswa (4 butir)

28. Melukis
29. Pekerjaan tangan

30. Musik
31. Sandiwara
- Olahraga** (2 butir)
32. Permainan
33. Gerak badan
- Kelakuan siswa** (3 butir)
34. Kelakuan di kelompok sesama siswa
35. Kelakuan di luar kelas sesama siswa
36. Kelakuan terhadap pengajar
- Pekerjaan Rumah** (2 butir)
37. Belajar sendiri
38. Membuat tugas
- Katekese** (1 butir)
39. Partisipasi
- Berhitung** (5 butir)
40. Berhitung umum
41. Berhitung di luar kepala
42. Latihan berhitung
43. Menghitung
44. Penguasaan hitungan

Butir penilaian yang ada di dalam Raport setiap siswa Basis school di atas masih ditambah dua materi ekstra kurikuler, yaitu **Berenang** dan **Bersepeda**.

Belanda adalah Negara di bawah permukaan air laut, di mana-mana ditemukan air, maka seminggu sekali siswa-siswa Basisschool menuju kolam renang terdekat dengan sekolah mereka. Semua biaya renang dibayar oleh Departemen Pendidikan Belanda. Akan ada ujian renang resmi dan setiap siswa wajib menggondol diploma renang level terendah.

Bersepeda adalah hidup rakyat Belanda. Di Belanda ada 18 juta sepeda dibanding 16,4 juta penduduknya, alias setiap warga Belanda rata-rata memiliki 1,1 sepeda. Siswa Basis school wajib belajar mengendarai sepeda dan belajar Peraturan Lalu Lintas. Akan ada ujian Lalu Lintas Bersepeda teori dan praktek yang diselenggarakan oleh Korps Kepolisian setempat. Siswa yang lulus menerima Diploma Lalu Lintas resmi dari Korps Kepolisian. Semua biaya kursus bersepeda dan uji  dibayar oleh Departemen Pendidikan Belanda.

Pada tingkat sekolah menengah, staf pengajar menyusun silabus dan rancangan pelajaran yang juga direview oleh inspektorat. Informasi yang lengkap dan rinci perlu disiapkan yang mencakup mata pelajaran, waktu, pengorganisasian kelompok, dan keterangan bagaimana mengenai sekolah menghadapi siswa yang hidup dalam masyarakat multicultural. Sudah ada

ketentuan minimal dan maksimal waktu untuk setiap mata pelajaran dari kementerian pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.¹¹

Di Sekolah Menengah kegiatan seni, musik, olahraga masih digeluti oleh siswa, selain mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Sejarah, Ilmu Bumi, Bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Latin dan Yunani. Meski tak ada kurikulum khusus “mengganyang korupsi”, sistem pendidikan Dasar dan Menengah di Belanda ini terbukti mampu memproduksi generasi penerus Belanda yang bersih korupsi. Di mana persis letak rahasianya? Hal itu pasti telah dipelajari oleh bu Yulita dkk. yang dikirim oleh Neso/Nuffic ke Belanda memakai beasiswa yang disediakan oleh Departemen Luar Negeri Belanda.

Mulai dari tahun 1993 ke atas, siswa pada semua jenis pendidikan menengah mendapat pelajaran dalam 15 mata pelajaran dari kurikulum inti (core-curriculum) yang berbobot sama dengan 3,000 jam pelajaran setiap tahun pelajaran. Kira-kira 20% dari kurikulum sekolah dapat dipilih dan ditentukan oleh dewan pendidikan.

Pengembangan kurikulum baru terorganisasi secara sistematis semenjak tahun 1960-an. Lembaga Nasional Pengembangan Kurikulum (Nasional Institute for Curriculum Development, SLO) dibentuk tahun 1975. tugas utama SLO adalah menyusun proposal kurikulum. Asosiasi sekolah menetapkan proposal mana yang akan dipakai, dan dewan pendidikan membuat keputusan atas dasar implementasinya. Disamping SLO, beberapa pusat penelitian dan pengembangan universitas juga menyusun kurikulum melalui berbagai eksperimen.

11. Peserta Didik

Sistem pendidikan di belanda terdiri dari dua model peserta didik yaitu peserta didik formal dan pendidikan orang tua non formal.

1. Pendidikan formal (dasar, menengah, khusus dan tinggi)

Pendidikan dasar diatur dengan undang-undang tahun 1920, dan undang-undang tentang taman kanak-kanak ditetapkan tahun 1955. parlemen menyetujui undang-undang baru tentang Pendidikan Dasar pada tahun 1981, dan berlaku mulai tahun 1985 dan pada saat inilah Taman Kanak-kanak dan sekolah Dasar digabungkan menjadi satu sehingga merupakan satu format pendidikan dasar baru bagi anak-anak mulai usia 4 tahun sampai 12 tahun. Pendidikan adalah wajib mulai usia 5 sampai 17 tahun yang ditetapkan dengan undang-undang Wajib Belajar tahun 1975.

Di Belanda pendidikan khusus tercatat 20 macam, mulai dari sekolah anak-anak yang mengalami ketidak mampuan belajar sampai pada anak-anak dengan cacat ganda. Pendidikan khusus ini melayani anak-anak dari usia 3

¹¹ Netherlands Eurydice Unit. *The Education System in the Netherlands 2009*. (The Hague: Ministry of Education, Culture and Science. 2010)

tahun yang membutuhkan pertolongan lebih banyak dari anak-anak biasa, baik yang berada di sekolah dasar maupun disekolah menengah.

Pendidikan menengah kejuruan tingkat pertama (VBO) menyelenggarakan pendidikan selama 4 tahun sebagai pendidikan pravokasional. Program singkat MBO (2-3 tahun) dirancang bagi tamatan VBO dan MAVO (dengan sertifikat) yang tidak mendapatkan pendidikan yang cocok di MBO atau pada program pemagangan. Pelajaran disini memberikan kesempatan latihan kepada anak-anak usia 16 tahun ke atas untuk jabatan-jabatan atau pekerjaan yunior. Pada pendidikan ini, kerja praktek, baik di dalam maupun diluar sekolah, merupakan elemen penting.

Pendidikan tinggi terdiri dari tiga jenis: sekolah tinggi propesional, universitas, dan universitas terbuka. Sekolah tinggi propesional (HBO) memberikan pendidikan teori dan praktek untuk pekerjaan yang menuntut kualifikasi keterampilan yang tinggi. Sekolah ini menerima lulusan dari berbagai sekolah menengah tingkat atas (HAVO, VWO, dan MBO). Dalam tahun-tahun 1960-an dan 1970-an, sekolah tinggi propesional yang diatur dengan undang-undang Pendidikan Sekolah Menengah, makin dianggap sebagai bentuk pendidikan tinggi. Statusnya seperti itu diakui pada tahun 1986, dan pada tahun 1992 dengan undang-undang pendidikan.

2. Pendidikan Orang Dewasa

Pendidikan orang dewasa disediakan bagi orang-orang yang berusia 18 tahun ke atas, dan terdiri dari: pendidikan dasar orang dewasa, pendidikan menengah orang dewasa khusus kejuruan atau vokasional, dan pendidikan orang dewasa nonformal. Pendidikan dasar orang dewasa merupakan rangkaian kegiatan yang memungkinkan mereka mendapat ilmu dan keterampilan yang diperlukan yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi dan untuk kepentingan masyarakat. Program khusus juga diadakan untuk kelompok etnis minoritas yang diajar dalam konteks budaya mereka masing-masing, misalnya, dengan menggunakan bahasa mereka sendiri sebagai bahasa pengantar. Tetapi, tujuan utamanya adalah agar para peserta dapat menggunakan cara mereka sendiri dalam kehidupan masyarakat Belanda. Waktu belajar malam atau siang hari tersedia pada MAVO, HAVO, dan sekolah-sekolah menengah komersial (MEAO).

Sekolah-sekolah ini memberikan diploma, walaupun dalam sistem ini dimungkinkan bagi peserta untuk mengambil hanya satu mata pelajaran pada satu priode. Persyaratan minimal untuk masuk di sekolah-sekolah ini adalah telah menyelesaikan pendidikan wajib (wajib belajar).

Pendidikan kejuruan orang dewasa dimaksudkan untuk mempersiapkan mereka dengan kualifikasi agar mereka memperoleh pekerjaan. Orang-orang dewasa boleh melamar untuk mendapatkan pendidikan ini atas inisiatif sendiri, atau atas saran dari pihak ketiga, misalnya, kantor tenaga kerja setempat.

Universitas terbuka, yang dimulai tahun 1984, melayani pendidikan jarak jauh tingkat universitas. Tidak ada persyaratan untuk masuk pada

universitas terbuka ini kecuali syarat umur yaitu telah berumur 18 tahun. Terdapat 18 pusat belajar diseluruh negeri Belanda.

Mahasiswa universitas terbuka pada dasarnya bebas mengatur program studinya dan dapat belajar dirumah dengan jadwal dan kecepatan masing-masing. Pengajaran terutama dilakukan dengan korespondensi. Kualifikasi universitas atau HBO dapat diperoleh dalam berbagai bidang studi. Dalam tahun 1990, 53.000 orang terdaftar dalam satu atau lebih diantara 150 program yang tersedia. Jumlah mahasiswa pria melebihi jumlah mahasiswa wanita pada universitas terbuka Belanda yaitu 60% berbanding 40%. Jumlah mahasiswa yang telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi sangat besar, dan mayoritas telah memperoleh pekerjaan. Pada periode 1988-90 jumlah itu terus bertambah menjadi lebih dari 25%.

12. Pendidik

Pendidikan guru adalah bagian dari pendidikan tinggi. Guru-guru sekolah dasar dididik pada perguruan tinggi profesional atau fakultas-fakultas yang khusus untuk pendidikan guru sekolah dasar (PABO's). kuliah berlangsung selama 4 tahun dan menprogramkan agar guru-guru yang mengajar di sekolah dasar mampu mengajarkan semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Mahasiswa yang mendaftarkan pada lembaga keguruan ini meningkat dengan cepat (1987:3,000-4,00 orang; 1990:6,000) setelah menurun sebelum 1987. jumlah tamatanjuga meningkat (1987:1,700 orang; 1989:2,600 orang).

Guru-guru sekolah menengah harus memiliki kualifikasi Grade satu atau kualifikasi Grade dua. Guru yang berkualifikasi Grade dua boleh mengajar pada level tiga tahun pertama di VWO dan HAVO, dan di sekolah-sekolah MAVO, VBO, dan MBO. Guru-guru berkualifikasi Grade satu boleh mengajar pada semua kelompok umur pada semua jenis sekolah menengah. Kuliah penuh untuk pendidikan guru-guru Grade dua dalam mata pelajaran umum diselenggarakan pada perguruan tinggi profesional selama 4 tahun. Mahasiswa mengambil spesialisasi dalam satu mata pelajaran atau bidang studi dan hanya boleh mengajar selain bidang keahliannya, mata pelajaran pendukung pada level tertentu. Semenjak tahun 1979, diadakan kuliah eksperimen dalam mata pelajaran teknik yang berlangsung selama 5 tahun. Jumlah mahasiswa pada program ini meningkat (1987:3,148 orang; 1990:4,427 orang), walaupun jumlah lulusannya menurun (1987:2,254 orang; 1989:1,755 orang).

Untuk mendapatkan guru-guru yang berkualifikasi Grade Satu, mahasiswa yang telah menyelesaikan satu program gelar non kependidikan di universitas, perlu mengikuti pendidikan satu tahun di perguruan tinggi keguruan. Pendidikan guru yang terdiri dari dua lapis pada pendidikan tinggi sepenuhnya didanai oleh pemerintah. Untuk mengajar pada pendidikan khusus diperlukan mengambil pendidikan dua tahun setelah mendapatkan kualifikasi mengajar HBO. Kuliah paruh waktu juga disediakan pada perguruan tinggi profesional untuk program kualifikasi Grade Satu dan Grade Dua.

Guru-guru sekolah dasar normalnya bekerja 40 jam seminggu. Pada sekolah menengah, standar beban mengajar guru adalah 29 jam pelajaran. Tugas guru mencakup mengajar dan tugas lainnya (nonteaching). Guru-guru yang dibebani tugas-tugas ekstra, dibebaskan sebagian dari tugas mengajar. Dosen-dosen perguruan tinggi diatur dengan satu bentuk peraturan sendiri didasarkan pada peraturan pegawai negeri, tetapi dimodifikasi sesuai keadaan di Universitas.

Tabel 17.1
Gaji masing-masing profesi

No	Profesi	Gaji per bulan	Gaji per jam	Gaji minimum	Gaji maximal
1.	Guru SD	€ 3.227	€ 24,41	€ 1.922	€ 4.894
2.	Kepala Sekolah	€ 5.117	€ 29,54	€ 2.877	€ 6.960
3.	Guru TK	€ 2.284	€ 13,19	€ 1.671	€ 3.254
4.	Dosen	€ 2.731	€ 15,77	€ 1.938	€ 6.614

13. Pembaharuan Pendidikan

Pada tahun 1985 di Belanda diperkenalkan sekolah dasar dengan bentuk baru, sistem ini, dalam prosesnya harus mampu menghindari terganggunya perkembangan anak-anak. Banyak upaya yang dilakukan pihak pendidikan khusus untuk mendorong anak-anak agar dapat pindah dari sekolah khusus ke sekolah biasa. Jenis sekolah khusus makin bertambah jumlahnya.

Pada tahun 1975 Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan memperkenalkan sistem pendidikan komprehensif (middenscholer), bentuk sekolah untuk anak yang berusia antara 12 dan 16 tahun. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada anak-anak ditangani dalam perlakuan didalam kelas. Setelah dilakukan debat dan diskusi yang cukup hebat, akhirnya dilaksanakan 15 buah percobaan middenscholer ini. Sampai tahun 1986 terjadi kemandekan dan pada saat itu pula penasehat kebijakan pemerintah menerbitkan sebuah laporan mengenai basic education (basisvorming). Laporan ini mengalihkan persoalan dari struktur pendidikan ke isi pendidikan. Oleh karena pilihan siswa atas mata pelajaran di sekolah menengah menimbulkan masalah ditingkat pendidikan yang lebih tinggi. siswa didorong untuk mengambil mata pelajaran matematika dan sains. Siswa diwajibkan mengambil dua mata pelajaran bahasa asing, dan pada sekolah menengah umum tingkat atas dan pra universitas diwajibkan mengambil pelajaran matematika. Basic education akhirnya dijalankan disekolah menengah mulai tahun 1993.

Anak-anak pada sekolah menengah harus mengambil satu mata pelajaran tambahan yang juga salah satu mata ujian. Filsafat dan ilmu-ilmu sosial dijadikan mata pelajaran ujian baru dalam rangka upaya mencari keseimbangan dalam mata pelajaran ujian. Komputer dan teknologi informasi juga diajarkan secara sukarela, sementara beberapa proyek percobaan dilakukan untuk menentukan apakah dua mata pelajaran baru itu perlu diajarkan satu atau dua jam seminggu di tingkat sekolah menengah atas.

Pada era 1980-an struktur pendidikan tinggi juga mengalami perubahan. Masa belajar di tingkat sarjana, S1 (undergraduate) dipersingkat menjadi 4 tahun dan pada level ini mahasiswa mengikuti kuliah-kuliah secara umum. Otonomi yang lebih besar juga diberikan kepada lembaga pendidikan tinggi. System dua lapis diperguruan tinggi (undergraduate-graduate) dijalankan, dan pendidikan profesional (diploma) kelihatannya lebih banyak diminati sehingga lebih laris. Penggabungan berbagai sekolah juga dilakukan dengan pertimbangan efisiensi. Sebanyak 350 buah lembaga pendidikan yang selama ini ada digabungkan menjadi 51 buah yang besar dan bersifat multisektoral, sementara 34 yang lainnya tetap independent. Kebanyakan yang digabungkan ini adalah lembaga pendidikan guru sekolah dasar. Penggabungan atau merger ini dianggap perlu untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dan untuk keperluan inovasi-inovasi serta perbaikan kurikulum. Saat ini setiap lembaga harus memiliki setidaknya 600 orang mahasiswa.

Antara tahun 1982 dan 1986 terjadi dua pembaharuan ditingkat pendidikan universitas. Yang pertama dimaksudkan untuk memotong anggaran belanja sebesar 317 juta guilders (US\$158 juta), sementara pada waktu yang sama dilakukan pula peninjauan kembali tugas-tugas pengajaran dan penelitian, dan bagaimana keduanya diselenggarakan antara universitas. Sebagai hasilnya, sebanyak 53 buah program studi di tutup, jumlah fakultas kedokteran gigi dikerucutkan dari 3 menjadi 1 buah, 2 buah fakultas farmasi dan 4 buah jurusan filsafat ditutup, dan juga terjadi pengkerucutan pada lembaga ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan kedokteran. Enam puluh juta guilders (US\$30 juta) harus disediakan untuk inovasi. Reformasi yang kedua terjadi tahun 1986. Menteri pendidikan dan Ilmu Pengetahuan terpaksa melakukan tekanan karena universitas masih tidak memasukan proposalnya. Jumlah uang yang harus dihemat adalah 129 juta guilders (US\$64 juta) yang 70 juta guilders (US\$35 juta) harus disalurkan kembali ke Universitas untuk keperluan inovasi.

C. KESIMPULAN

Belanda merupakan negara berpermukaan rendah yang rata-rata tanahnya hasil reklamasi laut yang diubah menjadi daratan. Dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya tentu saja dibutuhkan tenaga ahli untuk mensiasati Negara Belanda layak huni bagi penduduk yang tinggal di negara tersebut. Negara Belanda yang berbentuk monarki konstitusional mengharuskan sistem Politik dan pemerintahan Belanda berusaha untuk mencapai kemufakatan yang luas mengenai urusan-urusan yang penting termasuk urusan pendidikan.

Bentuk sistem pendidikan Belanda ialah sentralisasi. Tanggung jawab pemerintah pusat terletak pada hal-hal yang berhubungan dengan organisasi, pendanaan (termasuk status hukum kepegawaian), inspeksi, ujian, dan inovasi promosi. Namun demikian sekolah diberikan otonomi untuk mengelola lembaganya. Sekolah bertanggung jawab penuh atas organisasi belajar mengajar, personil dan bahan. Anggaran tahunan diterima sebagai dana block grant. Sekolah bebas untuk memutuskan bagaimana anggaran dihabiskan dan bertanggung jawab

atas kualitas pendidikan yang diberikan. Inspektorat memonitor kapasitas sekolah untuk menjamin dan meningkatkan kualitas. Jika sekolah terbukti mampu memantau dan meningkatkan kualitas sendiri.

Jenjang pendidikan di Belanda dikategorikan menjadi 3 jenjang. Pendidikan tingkat dasar dan lanjutan, Pendidikan Tingkat Menengah Kejuruan (*Senior Secondary Vocational Education and Training*) dan Pendidikan Tingkat Tinggi (*Higher Education*). Penjenjangan ini bertujuan agar anak punya spesifikasi yang linear terhadap mata pelajaran tertentu ketika anak berada di sekolah dasar sampai umur 12 tahun hingga sampai ke tahap selanjutnya bahkan ke tingkat pendidikan tinggi.

Pendidikan tingkat tinggi di Belanda terdiri dari pendidikan universitas riset dan universitas ilmu terapan yang pesertanya berasal dari lulusan dari sekolah pendidikan menengah yang sejajar dengan pendidikan tinggi yang diambil. Tidak ada kurikulum yg pasti di Belanda namun Otonomi yang diberikan pemerintah Belanda kepada institusi pendidikan memberikan kebebasan kepada masing-masing lembaga untuk menerapkan kurikulum sesuai keinginan lembaga, berdasarkan masing-masing tingkatan pendidikan.

Tingkat dasar; Organisasi dan isi program pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya sekali dua tahun dalam bentuk proposal dari para pendidik yg berisi pilihan materi pelajaran, metode mengajar, cara atau teknik bagaimana hasil belajar anak diukur, dinilai dan dilaporkan. Tiap tahun dirancang program kegiatan guru dan kegiatan murid untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Tingkat menengah; staf pengajar menyusun silabus dan rancangan pelajaran yg berisi Informasi yang lengkap dan rinci mencakup mata pelajaran, waktu, pengorganisasian kelompok, dan keterangan bagaimana mengenai sekolah menghadapi siswa yang hidup dalam masyarakat multicultural.

Peserta didik di Belanda terdiri dari peserta didik kanak-kanak sampai menengah dan peserta didik dewasa. Pendidikan dasar di Belanda terdiri dari pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang mana digabung menjadi satu masa studi selama 8 tahun. Pendidikan wajib bagi anak-anak usia 5-17 tahun setelah ada ketetapan undang-undang tahun 1975 Terdapat pendidikan khusus yang menangani orang cacat atau keterbelakangan bahkan semenjak anak usia 3 tahun ataupun yang berada di sekolah dasar maupun menengah. Bagi anak yang telah berusia 16 tahun biasanya telah memasuki pendidikan di MBO, VWO, HAVO.

Peserta didik yang telah lulus dari HAVO, VWO, dan MBO bisa meneruskan ke pendidikan tinggi atau setara dengan universitas. Bagi yang telah berusia 18 tahun ke atas dapat mengambil studi yang mengajarkan serangkaian kegiatan yg memungkinkan mereka mendapat ilmu dan keterampilan yang diperlukan yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi dan untuk kepentingan masyarakat. Atau mengambil studi kejuruan yang kualifikasinya agar mereka memperoleh pekerjaan. Selain itu usia 18 th ke atas boleh mendaftar kuliah di universitas terbuka.

Pendidikan menengah dan tinggi orang dewasa tak lebih merupakan wahana pendidikan untuk kesetaraan pendidikan di Belanda.

Pendidik atau guru di Belanda merupakan pengajar yang telah benar-benar lulus grade 1 atau grade 2 dari jurusan keguruan, hal demikian karena agar mendapatkan pendidik yang kompeten di bidangnya. Bentuk sekolah untuk anak yang berusia antara 12 dan 16 tahun diperkenalkan tahun 1975 yaitu pendidikan komprehensif dan kemudian digantikan dengan sistem basic education yang akhirnya dijalankan disekolah menengah mulai tahun 1993.

Pada era 1980-an struktur pendidikan tinggi juga mengalami perubahan. Masa belajar di tingkat sarjana, S1 (undergraduate) dipersingkat menjadi 4 tahun. System dua lapis diperguruan tinggi (undergraduate-graduate) dijalankan, dan pendidikan profesional (diploma) Penggabungan berbagai sekolah juga dilakukan dengan pertimbangan efisiensi anggaran. Penggabungan atau merjer ini dianggap perlu untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dan untuk keperluan inovasi-inovasi serta perbaikan kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Boekholt, P.T.F.M. and E.P. de Booy. 1987. *Geschiedenis van de School in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot aan de Huidige Tijd*. Assen/Maastricht: Van Gorcum.
- Closset, F. 1960. *Inleiding tot de Didactiek van de Levende Talen*. Amsterdam: Meulenhoff.
- Frijhoff, W. and M. Spies. 1999. *Nederlandse Cultuur in Europese Context. 1650 Bevochten Eendracht*. Den Haag: Sdu uitgevers.
- Grasé, J.C.G. 1896. *Directe Methode en Phonetisch Schrift als Grondslagen van Taalonderwijs*. Groningen, The Netherlands: J.B. Wolters.
- Horn, M. 1894. Het onderwijs in de nieuwe talen aan onze Hoogere Burgerscholen kan slechts dan geheel aan zijn doel beantwoorden, wanneer het volgens de directe methode wordt gegeven. *Berichten en Mededeelingen van de Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs* 7, 1893–1896: 243–256.
- Howatt, A.P.R. and H.G. Widdowson. 2004. *A History of English Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
- Hulshof, H., E. Kwakernaak and F. Wilhelm. 2015. *Geschiedenis van het Talenonderwijs in Nederland. Onderwijs in de Moderne Talen van 1500 tot Heden*. Groningen, the Netherlands: Uitgeverij Passage.
- Kuiper, W. 1961. Historisch-didactische aspecten van het onderwijs in het Duits. Beschouwingen over de ontwikkeling van het Hoogduits als leervak op de Nederlandse scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. PhD diss., Universiteit van Amsterdam. Groningen: Wolters.
- Loonen, P.L.M. 1991. For to learne to buye and sell: learning English in the Low Dutch area between 1500 and 1800. PhD diss., Katholieke Universiteit Nijmegen. Amsterdam/Maarssen: APA-Holland University Press.
- van Oostrom, F. 2013. *Wereld in Woorden: Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur 1300–1400*. Amsterdam: Bert Bakker.
- Vlaanderen, H. Th. 1964. 'Vertaal in goed Nederlands'. Een historische, vergelijkende en empirische studie van het onderwijs in het Frans bij het V.H.M.O. PhD diss., Universiteit van Amsterdam. Groningen, The Netherlands: Wolters.

- Wilhelm, F.A. 1993. Training foreign language teachers in the Netherlands (1795–1970). An historical outline. In *Five Hundred Years of Foreign Language Teaching in the Netherlands 1450–1950*, ed. J. Noordegraaf and F. Vonk, 67–87. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU.
- Wilhelm, F.A. 2005. *English in the Netherlands. A history of foreign language teaching 1800–1920*. With a bibliography of textbooks. PhD diss., Radboud Universiteit Nijmegen. Utrecht: Gopher Publishers.
- Ruijsendaal, E. 1991. *Letterkonst. Het klassieke grammaticamodel en de oudste Nederlandse grammatica's*. Amsterdam: VU Uitgeverij. Diss. Universiteit van Amsterdam.
- Riemens, K.J. 1919. *Esquisse historique de l'enseignement du français en Hollande*. PhD diss., Université de Paris. Leiden: Sijthoff.
- Christ, H. 1993. Pour et contre la méthode directe: les débats au sein de l'association allemande des professeurs de langues vivantes entre 1886 et 1914. *Études de Linguistique Appliquée. Revue de Didactologie des Langues-Cultures* 90: 9–22.
- Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistics Netherlands), 2012. *Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 (Yearbook education in figures 2012)*.
- Ministry of Education, Culture and Science, 2011. *Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 'Geletterdheid in Nederland' (Actionplan illiteracy 2012-2015 'Literacy in the Netherlands')*.
- Ministry of Education, Culture and Science, 2013. *Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2013 (Dutch National Reformprogram 2013)*.
- Netherlands Eurydice Unit, 2010. *The Education System in the Netherlands 2009*. The Hague: Ministry of Education, Culture and Science.

BAB XVIII

SISTEM PENDIDIKAN DI AMERIKA SERIKAT

Indra Wandaka

indrawandaka23@gmail.com

A. PRELIMINARY

Pendidikan di Amerika Serikat sudah dirintis pada masa Amerika Serikat belum terbentuk. Negara ini malah belum memproklamasikan kemerdekaannya ketika perguruan tinggi sebagai dasar pendidikan Amerika didirikan oleh pemerintah kolonial. Pada masa-masa awal, rakyat di seluruh koloni sudah sadar bahwa yang paling penting untuk masa depan adalah dasar-dasar pendidikan dan budaya Amerika. Hal ini terus berlanjut pada masa kolonial, diteruskan dan semakin disempurnakan pada masa-masa berikutnya sampai sekarang. Amerika Serikat yang sudah berumur ratusan tahun sejak kemerdekaannya tentunya memiliki banyak pengalaman dalam mencari format pendidikan yang cocok.

Pada tahun 1636 di *Cambridge, Massa chussetts* telah didirikan *Harvard College*. Akhir abad XVII didirikan *College of William* dan *College of Mary* di Virginia. Beberapa tahun kemudian didirikan *College School of Connecicut*, yang kemudian menjadi *Yale College*. Dan pada awal perkembangannya banyak juga sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh golongan keagamaan. Seperti diketahui sekolah-sekolah tersebut di atas pada kenyataannya tetap eksis sampai sekarang. Bagaimana dan seperti apa kebijakan pendidikan di AS tentunya sangat bisa menjadi wacana bagi pemerhati masalah-masalah pendidikan. Sebuah negara yang maju tentunya mempunyai sistem pendidikan yang baik pula.¹

Sekolah dasar dan menengah adalah wajib bagi seluruh siswa di Amerika Serikat, akan tetap jenjang usia siswa berbeda-beda di setiap Negara bagian. Siswa di Amerika Serikat memulai pendidikannya dari jenjang (usia 5 sampai 6 tahun) hingga menyelesaikan pendidikan menengah pada kelas 12 (usia 18 tahun). Terdapat 14.000 sekolah di Amerika Serikat dan setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana pendidikan sebesar \$500 triliun untuk digunakan keperluan sekolah dasar dan menengah.

B. DISCUSSION

1. Overview of the United States of America

Profil Negara Amerika Serikat (United States of Amerika)-Amerika Serikat adalah sebuah negara Republik Konstitusional Federal yang terletak di Benua Amerika Utara. Negara yang biasanya disebut dengan United States of Amerika atau USA dalam bahasa Inggris ini memiliki luas wilayah sebesar 9.833.517 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 326.625.791 jiwa (2017). Luas Wilayah yang besar dan Jumlah penduduk yang tersebut menjadikan Amerika Serikat sebagai Negara terbesar ketiga di Dunia dan Negara dengan jumlah

¹ Richard. Schroeder. *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*. (Deplu AS. 2000.) hlm

penduduk ketiga di Dunia. Secara Geografis, Amerika Serikat berbatasan darat dengan Kanada di sebelah utaranya dan Meksiko di sebelah selatannya. Sedangkan di sebelah Timur adalah Samudera Atlantik dan sebelah baratnya adalah Samudera Pasifik. Ada dua Negara bagian yang terpisah dengan Amerika Serikat yaitu bagian Alaska yang terletak di sebelah ujung laut benua Amerika Utara dan berada sangat dekat dengan bagian barat Rusia. Jarak Alaska dan Rusia yang terdekat adalah 82 km dan koleksi oleh selat Bering. Sedangkan negara bagian Hawaii berada di Samudera Pasifik. Ibukota Amerika Serikat adalah Washington, DC.²



Gambar 18.1 Peta Dunia Amerika Serikat

2. Demographics of the United States of America

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat adalah Republik Konstitusional Federal yaitu sistem pemerintahan yang kepala Negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang Presiden yang dipilih setiap 4 tahun sekali dan dapat dipilih kembali dengan maksimal 2 kali periode. Presiden juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Nasional Amerika Serikat. Sejak mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776 hingga saat ini, Amerika Serikat telah dipimpin oleh 45 Presiden. Daftar nama 45 Presiden yang pernah memimpin Amerika Serikat ini dapat dibaca di artikel: Daftar Nama Presiden Amerika Serikat. Sedangkan sebagai Negara yang berbentuk Federal, Amerika Serikat memiliki 50 Negara Bagian dan 1 wilayah Distrik. Setiap Negara Bagian yang dipimpin oleh Gubernur yang ditunjuk sebagai Kepala Negara Bagian dan Kepala Pemerintahan Negara Bagian.

Amerika Serikat tergolong sebagai Negara dengan perekonomian termaju di dunia, beberapa merek-merek terkenal di teknologi dunia berasal dari negara yang memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar US \$ 19,39 triliun.

² Abdul Rauf, Imam Feisal. *Seruan Azan dari Puing WTC*. Bandung: MIZAN, 2007.

Merek-merek tersebut seperti Microsoft, Apple, Google, Amazon, Twitter, Facebook, dan banyak lagi. Selain terdepan telekomunikasi di produk-produk teknologi, dan produk-produk elektronik, Amerika Serikat juga merupakan produsen pesawat terbang, minyak dan gas serta produk-produk agrikultur seperti kacang kedelai, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, gandum, produk susu dan daging. Pendapatan perkapita Amerika Serikat berdasarkan Paritas Daya Beli (PPP) adalah sebesar US \$ 59.500, - dan urutan ke-12 tertinggi di Dunia.

Di bidang Kemiliteran, Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara pemenang perang dunia kedua ini menjadi negara pertama yang mengembangkan senjata nuklir dan juga sebagai salah satu dari 5 Negara yang memiliki senjata nuklir saat ini. Pengeluaran Militer Amerika Serikat merupakan yang terbesar di Dunia, yaitu sebesar US \$ 596,02 miliar pada tahun 2015. Setelah selesainya Perang Dunia kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang kedua-duanya merupakan Negara adidaya pemenang perang Dunia kedua ini saling berebut kekuasaan dan pengaruh di dunia yang pada saat itu dikenal dengan istilah Perang Dingin. Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet dan akhirnya perang dingin pada tahun 1990-an, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara Adidaya di Dunia.³

Hubungan Luar Negeri, Amerika Serikat merupakan anggota PBB yang berubah sebagai Dewan Keamanan PBB dan memiliki Hak Veto, yaitu Hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi di PBB. Amerika Serikat juga merupakan anggota dari lembaga-lembaga lainnya yang berada di bawah PBB serta anggota dari NATO, APEC, G7, G8, G20 dan OECD. Profil Negara Amerika Serikat (Amerika Serikat) Berikut ini adalah profil Negara Amerika Serikat (United States of America):

Nama Lengkap: Amerika Serikat (United States of America)

Bentuk Pemerintahan: Republik Konstitusional Federal

Kepala Negara: Presiden Donald J. TRUMP (sejak 20 Januari 2017)

Kepala Pemerintahan: Presiden Donald J. TRUMP (sejak 20 Januari 2017)

Ibukota: Washington, DC

Luas Wilayah: 9.833.517 km²

Pembagian Wilayah Administrasi: 50 Negara Bagian dan 1 Wilayah Distrik

Jumlah Penduduk: 326.625.791 jiwa (2017)

Pertumbuhan Penduduk: 0.81% (2017)

Angka Kelahiran: 12,5 bayi per 1000 penduduk (2017)

Suku Bangsa / Etnis: Putih 72,4%, Hitam 12,6%, Asia 4,8%, India Amerika dan Alaska 0,9%, etnis asli Hawaii dan kepulauan pasific 0,2%, Etnis lainnya 6,2% (tahun 2010).

Bahasa Resmi: Inggris (pada sastra, tidak ada bahasa resmi di Amerika Serikat namun bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa resmi oleh 31 negara bagian, bahasa Hawaii adalah bahasa resmi di Negara bagian Hawaii. Agama:

³ Abdullah, Aslam dan Gaser Hathout. *The American Muslim Identity, Speaking for Ourselves*. Los Angeles: Multimedia Vera International, 2003.

Kristen Protestan 46,5%, Katolik Roma 20,8%, Mormon 1,6%, Yahudi 1,9%, Islam 0,9%, Buddha 0,7%, Hindu 0,7% dan Agama-Agama lainnya (gempa 2014)

Mata Uang: Dolar Amerika Serikat (USD)

Hari Nasional: 4 Juli 1776 (Hari Kemerdekaan)

Lagu Kebangsaan: “The Star-Spangled Banner”

Kode Domain Internet: .us

Kode Telepon: 1

Pendapatan Per Kapita: US \$ 59.500, - (2017)

Pendapatan Domestik Bruto Nominal: US \$ 19,39 triliun (2017)

Lokasi: Benua Amerika Utara⁴



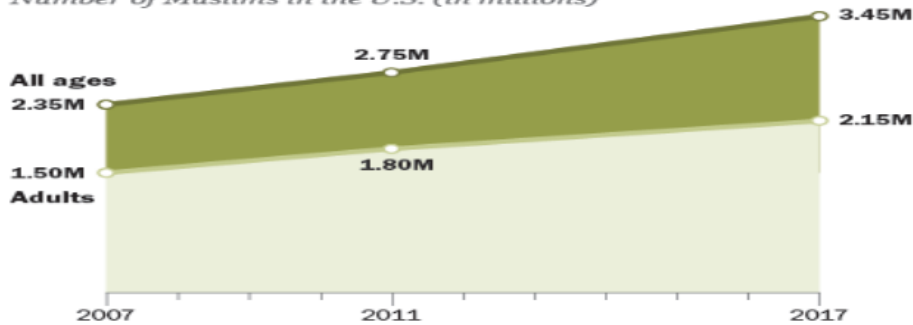
Gambar 18.2 Peta Amerika Serikat

Perdebatan politik terbaru mengenai imigrasi Muslim dan isu yang berkaitan dengannya telah mendorong banyak orang untuk bertanya berapa banyak Muslim yang tinggal di Amerika Serikat. Namun hal ini tidak mudah dijawab. Hal ini salah satunya disebabkan karena Biro Sensus AS tidak mengajukan pertanyaan tentang agama, yang berarti tidak ada hitungan resmi dari pemerintah AS tentang jumlah populasi Muslim AS. Namun, berdasarkan survei dan penelitian demografis dari Pew Research Center, serta sumber dari luar, diperkirakan ada sekitar 3,45 juta Muslim dari semua kelompok umur tinggal di AS pada tahun 2017, dan bahwa populasi Muslim menyumbang sekitar 1,1% dari total populasi AS.

⁴ Amin, Surahmin. “Islam di Amerika; Potret Perkembangan Dakwah Islam Pasca Tragedi 9 September 2001”, Tasamuh, Vol. 4, No. 1 (2012).

Number of Muslims in the U.S. continues to grow

Number of Muslims in the U.S. (in millions)



Note: U.S. Muslim population estimates reflect a correction made on Nov. 9, 2017. Source: Pew Research Center estimates based on analysis of surveys of Muslim Americans in 2007, 2011, and 2017 combined with U.S. Census data.

"U.S. Muslims Concerned About Their Place in Society, but Continue to Believe in the American Dream"

PEW RESEARCH CENTER

Gambar 18.3 Populasi Muslim di Amerika Serikat

Sebaran umat Muslim yang tinggal di Amerika masih belum merata. Beberapa daerah metropolitan, seperti Washington, D.C., memiliki komunitas Muslim yang cukup besar. Demikian juga, beberapa negara bagian, seperti New Jersey, akan tetapi ada juga Negara bagian dan wilayah dengan jumlah Muslim yang jauh lebih sedikit.

Berdasarkan data di atas, jumlah Muslim AS telah berkembang pesat, meskipun hanya memiliki basis demografi yang relatif rendah. Pada tahun 2007, Pew Research Center memperkirakan bahwa ada 2,35 juta Muslim dari segala usia (termasuk 1,5 juta orang dewasa) di AS. Pada tahun 2011, jumlah Muslim telah berkembang menjadi 2,75 juta (termasuk 1,8 juta orang muslim berusia dewasa). Sejak saat itu, populasi Muslim terus tumbuh pada percepatan kira-kira 100.000 jiwa per tahun, didorong oleh tingkat kesuburan yang lebih tinggi di kalangan Muslim Amerika dan juga migrasi orang-orang Muslim yang terus berlanjut ke AS. Data terakhir bahwa jumlah Muslim di Amerika pada tahun 2017 berjumlah 3,45 Juta (termasuk 2,15 Juta orang muslim berusia dewasa).⁵

3. History of the Entry of Islam in the United States

Sesungguhnya Islam sudah sejak lama telah masuk di tanah Amerika, jauh sebelum Christopher Columbus mengklaim menemukan benua tersebut. Ada beberapa tulisan yang pada umumnya bersumber dari para sejarawan Islam terkemuka, seperti Al-Mas'udi (871-957 M) dalam bukunya Muruj al-Dzahab wa Ma'adin al-Jawhar yang menyebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Abdullah bin Muhammad (888-912 M) di Andalusia, ada seorang pemuda Muslim bernama Khasykhasy bin Said bin Aswad asal Cordova, memimpin pelayaran dari pantai Delba (Palos) pada tahun 889 menyeberangi samudera Atlantik hingga mencapai

⁵ Elhady, Aminullah. "Perkembangan Islam di Amerika Sebelum dan Setelah Tragedi 11 September 2001", Jurnal Al-Hikmah, Vol. 13, No. 1 (2015).

daratan yang belum dikenal (ardh majhulah) dan kemudian pulang kembali dengan membawa harta benda yang menakjubkan. Dalam pendaratannya itu ia sempat kontak dengan penduduk setempat. Dalam peta yang dibuat oleh Al-Mas'udi daratan Ardh Majhulah itu adalah Amerika.

Fakta lainnya tentang kehadiran Islam di Amerika jauh sebelum Columbus datang juga diungkapkan Dr. Barry Fell, seorang arkeolog dan ahli bahasa dari Universitas Harvard. Dalam karyanya berjudul *Saga America*, Fell menyebutkan bahwa umat Islam tak hanya tiba sebelum Columbus di Amerika, akan tetapi, umat Islam juga telah membangun sebuah peradaban di benua itu. Fell juga menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Menurut dia, bahasa yang digunakan orang Pima di Barat Daya dan bahasa Algonquina, perbendaharaannya banyak yang berasal dari bahasa Arab. Arkeolog dan ahli bahasa itu juga menemukan teks, diagram, serta peta yang dipahat di batu yang digunakan untuk kepentingan sekolah. Temuan itu ditemukan antara tahun 700 hingga 800 M. Teks serta diagram itu berisi mata pelajaran matematika, sejarah, geografi, astronomi, dan navigasi laut. Bahasa pengajaran yang ditemukan menggunakan tulisan Arab Kufi dari Afrika Utara.⁶

Sejarawan seni berkebangsaan Jerman, Alexander Von Wuthenau, juga menemukan bukti dan fakta keberadaan Islam di Amerika pada tahun 800 M hingga 900 M. Wuthenau menemukan ukiran kepala yang menggambarkan seperti bangsa Moor. Itu berarti, Islam telah bersemi di Amerika sekitar separuh milenium sebelum Columbus lahir. Dia juga menemukan ukiran serupa bertarih 900 M hingga 1500 M. Artefak yang ditemukan itu mirip foto orang tua yang biasa ditemui di Mesir. Youssef Mroueh dalam tulisannya *Muslim in The Americas Before Columbus* memaparkan penuturan Mahir 'Abd. al-Razzaq El, orang Amerika asli yang menganut agama Islam. Mahir berasal dari suku Cherokee yang dikenal sebagai *Eagle Sun Walker*. Mahir memaparkan, para penjelajah Muslim telah datang ke tanah kelahiran suku Cherokee hampir lebih dari 1.000 tahun lalu. Yang lebih penting lagi dari sekedar pengakuan itu, kehadiran Islam di Amerika, khususnya pada suku Cherokee adalah dengan ditemukannya perundang-undangan, risalah dan resolusi yang menunjukkan fakta bahwa umat Islam di benua itu begitu aktif.

Salah satu fakta yang membuktikan bahwa suku asli Amerika menganut Islam dapat dilacak di Arsip Nasional atau Perpustakaan Kongres. Kesepakatan 1987 atau Treat of 1987 mencantumkan bahwa orang Amerika asli menganut sistem Islam dalam bidang perdagangan, kelautan, dan pemerintahan. Arsip negara bagian Carolina menerapkan perundang-undangan seperti yang diterapkan bangsa Moor. Selain itu ada juga pelayaran lain yang dilakukan oleh Ibn Farrukh dari Granada pada bulan Februari 999 di masa pemerintahan Hisyam III (976-1009). Ibn Farrukh berlayar dari Cadesh menyeberangi Atlantik dan mendarat di Gando kepulauan Canary. Sementara itu Columbus baru melakukan pelayaran

⁶ Khalik, Subehan. "Sejarah Perkembangan Islam di Amerika", Jurnal al-daulah, vol.4 no.2 (2018).

dari Delba (Palos) dan mendarat di kepulauan Bahama pada 12 Oktober 1492 di sebuah kampung yang oleh masyarakat setempat disebut Guanahani. Nama Guanahani itu berasal dari suku Mandinka. Muslim dari kata “ikhwana” dan “Hani”. Jadi kata Guanahani sesungguhnya berarti Bani Hani.⁷ Ada beberapa dokumen yang ditemukan di Brazil dan Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa sejumlah suku Mandinka Muslim adalah orang-orang yang mula-mula datang di Amerika. Namun terlepas dari fakta sejarah keberadaan orang Muslim di Amerika sebelum negeri itu sendiri lahir, yang perlu diketahui adalah bagaimana Islam datang dan berkembang di Amerika. Kalau asal-usul kedatangan Islam di Amerika itu masih spekulatif, namun keberadaan pemukiman orang-orang Muslim keturunan Afrika di Amerika Utara pada abad ke-16 hingga abad ke-18 adalah sesuatu yang sudah pasti. Keberadaan orang-orang Muslim keturunan Afrika di Amerika itu menyusul jatuhnya negeri Andalusia ke tangan bangsa Eropa, sebab bermula mereka menjadi tawanan orang-orang Spanyol yang kemudian dikapalkan ke Amerika untuk dipasok sebagai tenaga kerja atau dijual sebagai budak. Sebagai budak mereka tidak dapat mempertahankan Agama dan kebudayaan mereka apalagi mengembangkannya.

4. Islamic Religious Education in America

Pendidikan di Amerika Serikat sudah dirintis pada masa Amerika Serikat belum terbentuk. Negara ini malah belum memproklamasikan kemerdekaannya ketika College-college sebagai dasar pendidikan Amerika didirikan oleh pemerintah kolonial. Pada masa-masa awal, rakyat di seluruh koloni sudah sadar bahwa yang paling penting untuk masa depan adalah dasar-dasar pendidikan dan budaya Amerika. Hal ini terus berlanjut pada masa kolonial, diteruskan dan semakin disempurnakan pada masa-masa berikutnya sampai sekarang. Amerika Serikat yang sudah berumur ratusan tahun sejak kemerdekaannya tentunya memiliki banyak pengalaman dalam mencari format pendidikan yang cocok. Pada tahun 1636 di Cambridge, Massachusetts telah didirikan Harvard College. Akhir abad XVII didirikan College of William dan College of Mary di Virginia. Beberapa tahun kemudian didirikan College School of Connecticut, yang kemudian menjadi Yale College. Pada awal perkembangannya banyak juga sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh golongan keagamaan. Seperti diketahui sekolah-sekolah tersebut di atas pada kenyataannya tetap eksis sampai sekarang. Di Negara-Negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasi intervensi pemerintah pada sektor pendidikan itu ditandai dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan (pengaturan) sektor pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu Negara pelopor demokrasi. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian (*State*) dan Pemerintah Daerah (Distrik). Sebelumnya, Pemerintah Pusat memang mengintervensi kebijakan pendidikan, sebagaimana yang terjadi sejak tahun 1872, dimana Pemerintah Pusat AS mengintervensi

⁷ Mulyana, Dedy. *Islam di Amerika*. Bandung: Penerbit Pustaka, 2015

kebijakan pendidikan dengan cara memberikan tanah Negara kepada Negara Bagian untuk pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik, membantu sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian, menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan, menyediakan pinjaman bagi mahasiswa, menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya, serta memberikan bantuan tidak langsung (karena menurut ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat pemerintah dilarang memberikan bantuan langsung) kepada sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium.⁸

Namun semenjak masa Pemerintahan Presiden Ronald Reagan, intervensi Pemerintah Pusat AS terhadap pendidikan mulai dikurangi. Hal ini terungkap dalam kepercayaan Reagan bahwa pemerintah terlalu mencampuri kehidupan masyarakat. Ia ingin mengurangi program-program yang menurutnya tidak dibutuhkan rakyat dengan menghapus "pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan." Selanjutnya tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dan 15.358 distrik. Jadi sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan. Sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa karakteristik utama politik sistem pendidikan Amerika Serikat adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik).

Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Sebagaimana yang ditunjukkan Profesor Allan Bloom dari Universitas of Chicago dalam *Closing of the American Mind*, setiap rezim politik membentuk warga negaranya sesuai dengan yang paling dia perlukan. Dalam beberapa bangsa, tujuannya adalah manusia yang shaleh, dalam beberapa bangsa lain tujuannya adalah manusia yang siap perang, namun di beberapa bangsa lain tujuannya adalah manusia yang suka bekerja keras. Tujuan sistem pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman.
2. Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi;
3. Untuk membantu pengembangan individu;
4. Untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat; dan
5. Untuk mempercepat kemajuan nasional.

⁸ Richard Hofstadter, dkk. *Garis Besar Sejarah Amerika Serikat*. Deplu AS 2004

Diluar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi. Dalam seminar International yang digagas oleh mahasiswa jurusan perbandingan agama angkatan 2014 UIN Alaudin Makasar pada tanggal 25 April 2017, peneliti dari Universitas of South California, Connie Ge yang juga menjadi pembicara pada seminar tersebut menyatakan bahwa pelajaran Agama tidak diajarkan pada sekolah-sekolah umum di Amerika. Pelajar di Amerika akan mulai mengenal pelajaran spesifik tentang agama ketika di College atau Universitas. Pengajaran agama hanya ditemukan pada sekolah-sekolah swasta yang berbasis agama. Agama di Amerika lebih beragam karena masyarakatnya juga mengakui agama-agama lain seperti Taoisme, Quaker, Yahudi dan lain-lain. Connie Ge juga mengungkapkan bahwa pasca kejadian 11 September di Amerika, semua siswa diwajibkan untuk sumpah setia kepada Negara dan tidak diajarkan pelajaran Agama kepada mereka.⁹

Pernyataan yang diungkapkan oleh Connie Ge tersebut juga dikuatkan dalam sebuah blog yang tulis oleh Pena Pera ketika melakukan perjalanan ke Amerika dan khusus menyoroti sistem pendidikan di sana. Hasil penjakannya ditemukan bahwa berdasarkan pengelolannya, sekolah dasar di Amerika terdiri atas tiga jenis sekolah yaitu:

a. Sekolah Negeri

Sekolah Negeri di Amerika, seperti juga sekolah negeri di Indonesia. Pengelolannya oleh pihak pemerintah. Bedanya, sekolah negeri di Amerika tidak boleh mengajarkan pendidikan agama di sekolah. Pendidikan Agama diserahkan kepada keluarga masing-masing, ataupun kelompok. Orang tua. Pada sekolah yang dominan ditinggali suku bangsa tertentu, bahasa bangsanya tetap diberikan sebagai kelas tambahan. Misalnya, bahasa Arab di kota Detroit.

b. Sekolah Berbasis Agama

Meski sekuler pemerintah Amerika tetap mengizinkan adanya sekolah yang berbasis Agama. Sekolah agama Kristen, Islam, dan lain-lain. Namun Negara tidak akan mengucurkan biaya bantuan apapun kepada sekolah tersebut. Mendirikan sekolah berbasis Agama harus menerima konsekuensi menjadi sekolah yang mandiri dalam hal pembiayaan. Terkait masalah kurikulum pun sekolah ini bebas untuk mengatur kurikulumnya sendiri.

c. Sekolah Individual

Di Amerika juga ada dengan istilah sekolah individual akan tetapi konsepnya berbeda dengan sekolah swasta yang ada di Indonesia. Sekolah Individual tidak dikelola oleh pemerintah maupun bukan sekolah berbasis Agama dan dalam pelaksanaannya juga tidak boleh mengajarkan pendidikan Agama. Sekolah Individual adalah sekolah yang didirikan oleh masyarakat dan bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah namun konsep

⁹ S. Prada, Juhaya. *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam*. Tasikmalaya: Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, 2014

pendidikannya tidak diharuskan mengikuti panduan (kurikulum) dari pemerintah. Seperti Randolp School di Huntsville Alabama adalah sekolah yang memastikan siswanya dapat menjadi pemimpin yang handal. Salah satu program yang menarik dari jenis sekolah ini adalah *civiv Challenge* yaitu anak tingkat SMA praktek menjadi *City Leader* (pemimpin kota) di Gedung Walikota Huntsville. Mereka selama sebulan menjalankan aktifitas sebagaimana para pejabat public tersebut bertugas sehari-hari.¹⁰ Dari simulasi tersebut, mereka membuat paper penelitian yang menjadi masukan kepada pihak pemerintah. Salah satu sekolah berbasis Islam yang ada di Amerika adalah As- Salam Day School. Sekolah yang dipimpin oleh Abdul Mun'in Jitmound yang berasal dari Thailand ini merupakan sekolah Islam kelima di Amerika Serikat yang memiliki akreditasi ganda dari lembaga pendidikan Islam dan Non-Islam. Sekolah yang telah berdiri selama dua puluh lima tahun ini menjadi satu- satunya sekolah di bagian Missouri yang memegang tiga akreditasi sekaligus, yaitu dari negara bagian Missouri, badan pendidikan Islam di Amerika Utara (CISNA) dan lembaga akreditasi nasional.

Menurut Abdul Mun'im untuk memperoleh akreditasi dari CISNA, sebuah sekolah harus mengimplementasikan dan mempromosikan ajaran Islam dalam sistem pendidikannya. Akreditasi ini memberikan validasi bagi sekolah yang telah mengajarkan Qur'an, bahasa Arab, studi Islam dan pengetahuan lain berbasis Islam terutama bagi para orang tua dan siswanya. Sekolah dengan murid berjumlah tiga ratus siswa yang tersebar dari TK hingga kelas 11 ini memiliki empat puluh sembilan orang staff dan pengajar, di antaranya seorang guru asal Indonesia, Rita Pritarini yang mengajar Al-Qur'an, bahasa Arab, dan studi Islam.

As-Salam Day School menyelenggarakan pendidikan sebagai berikut :

1. The Early Childhood Center

Sekolah Anak Usia dini Al-Salam Day School yang memiliki misi untuk membantu setiap anak mencapai potensi penuh di semua bidang dalam kehidupan anak ini bermula dari sebuah ruangan di lantai dasar bangunan As-Salam Day School yang sekarang digunakan sebagai ruang penyimpanan. Kemudian pada tahun 2014, dengan dukungan penuh dari masyarakat yang terus menerus, bangunan seluas 8200 kaki persegi yang terletak di 1400 Wyncrest ini dibeli kemudian direnovasi dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan semua anak-anak mulai usia 6 minggu hingga Kindergarten (TK). The Early Childhood Center dalam pengajarannya berusaha mengembangkan potensi anak secara keseluruhan yang meliputi kecerdasan emosional, sosial, intelektual, fisik dan spiritual Program kami dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan setiap anak di setiap tingkat kelas. Mulai di tempat penitipan anak dari usia 6 minggu hingga 18 bulan dan 18 bulan hingga 2 tahun, tiga kelas prasekolah yang terdiri dari usia 3 sampai

¹⁰ M. Barrett, Paul. *American Islam Upaya Ke arah Esensi sebuah Agama*. Jakarta: Lentera, 2008.

5 dan terakhir dua kelas TK yang dipenuhi dengan peserta didik yang bersemangat, usia 5 dan 6. Tujuan lain dari The Early Childhood Center adalah untuk membina anak-anak yang bahagia, cerdas, yang tidak hanya menyerap ajaran Islam dan akademis, tetapi juga dapat mempraktekannya di dunia luar sekolah.

Dengan tujuan untuk menciptakan fondasi Islam yang kuat, dan menghasilkan umat yang hebat, anak-anak di ECC belajar:

- a. Untuk memiliki pemahaman dan cinta kepada Allah (SWT)
- b. Untuk mengetahui siapa Nabi Muhammad (SAW) melalui kegiatan mendongeng dan bermain
- c. Untuk mencintai Alquran sebagai kitab Allah
- d. wudhu (sholat) dan sholat (sholat) dan mempraktikkannya
- e. Dasar-dasar bahasa Arab melalui permainan, teka-teki, kegiatan, gerakan
- f. Untuk mengenali huruf-huruf alfabet Arab
- g. Untuk menghafal kosakata seperti warna, angka, hewan, bagian tubuh, dll.
- h. Untuk mendengarkan dan membaca *nasheeds* Arab yang menambah kosakata dalam bahasa Arab
- i. Untuk membaca dunia Islam dalam bahasa Arab
- j. Untuk menikmati dan menghafal lagu-lagu Islami yang mengembangkan karakter dan mempromosikan kebanggaan menjadi seorang muslim.

2. Elementary (Dasar)

Pada jenjang pendidikan dasar, Al-Salam Day School berkomitmen untuk memberikan setiap anak pengalaman pendidikan terbaik. Kurikulum di Elementary ADS yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik untuk setiap anak yang terdaftar. Kelas khusus seperti seni, komputer, dan pendidikan jasmani adalah bagian yang sangat penting dari program pendidikan di Al-Salam Day School. Kelas tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan spiritual siswa.¹¹

3. Secondary School

Sekolah menengah Al-Salam Day School mengajarkan berbagai pelajaran yang mencakup Sains, Model UN, Matematika, ACT Prep, Studi Sosial, pendidikan karir dan teknis, Pendidikan Jasmani, Seni Rupa, dan Lainnya. Juga tersedia pilihan untuk program honoris dan kursus advanced placement (AP). Setelah menyelesaikan sekolah menengah, siswa dijamin dapat bersaing di bangku kuliah dan dalam karir yang akan digelutinya.

Salah satu sekolah Islam yang terkenal di Amerika adalah Sekolah Noor-Ul-Iman di kampus Brunswick Selatan. Negara bagian Maryland yang tak jauh dari Virginia dan Washington D.C. juga ada sekolah Islam yang berkembang cukup pesat. Sekolah tersebut adalah Al-Huda School Darus Salam berlokasi di 5301 Edgelwood Road, College Park, Maryland, 20740. Sekolah Al-Huda

¹¹ Taat Wulandari, 2008, *Kebijakan Pendidikan Di Amerika Serikat*, ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah.

sendiri didirikan tahun 1995 dengan maksud untuk memberikan pendidikan kepada anak didik agar ajaran Islam yang dipeluk tidak musnah ditelan situasi. Pelajaran akhlak sangat ditekankan, guna mengantisipasi kebrutalan anak remaja seperti terjadi di AS dalam penembakan terhadap guru atau teman sekolahnya. Bahasa Arab diperkenalkan dengan penggunaan langsung dalam kehidupan sekolah. Metode pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua sama dengan cara yang dipakai dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Pada prinsipnya kurikulum yang dipakai adalah standar yang diberlakukan di Montgomery, ditambah dengan bahasa Arab, Alquran, dan pelajaran keislaman lainnya. Orang tua murid tidak mutlak harus beragama Islam. Ada murid yang salah satu orang tuanya muslim, tetapi yang lainnya masih belum menerima ajaran Islam sebagai suatu kebenaran. Meski jumlah murid tidak banyak, namun hasil yang dicapai memuaskan. Ada seorang anak kelas 6 yang dapat berdakwah mengajak orang tuanya masuk Islam, dan berangan-angan kakek dan neneknya mau masuk Islam.¹²

Menurut Ajid Thohir ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa orang Amerika tertarik terhadap Islam. *Pertama*, kehampaan hidup di antara warga Amerika walaupun mereka hidup dengan harta yang berlimpah. *Kedua*, Islam dianggap satu-satunya agama yang tidak membedakan ras, warna kulit, pekerjaan dan lain sebagainya. *Ketiga*, Islam dianggap sebagai agama yang dapat memberi kehormatan, gairah hidup, harga diri, semangat kerja baru dan menanamkan persaudaraan. *Keempat*, tidak sedikit mereka tertarik dengan keteladanan hidup yang dilakukan umat Islam yang ditunjukkan dalam bentuk kerahmatamahan, kesederhanaan, keikhlasan dan lain sebagainya. *Kelima*, ajaran Islam dinilai oleh mereka lebih rasional. *Keenam*, Islam dapat memberikan solusi kehidupan ketika IPTEK yang sudah akrab dengan kehidupan mereka tidak mampu menjawabnya.

5. Comparison of Islamic Education in America and Indonesia

Sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa karakteristik utama sistem pendidikan di Amerika adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Demikian pula gagasan tentang Desentralisasi pendidikan di Indonesia menguat bersamaan dengan gagasan reformasi dalam sektor pendidikan sehingga Undang-Undang no. 22 tahun 1999 yang mengatur kewenangan pemerintah daerah, memasukkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan. Menurut Armansyah Putra, kondisi ini sebenarnya sedikit berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia yang mana masalah sepenuhnya bersifat sentralistik tanpa memberi kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan proses pendidikan, yang walaupun saat ini

¹² Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Indonesia sudah masuk dalam era desentralisasi tapi proses pengolahan pendidikan khususnya aspek anggaran daerah masih belum menaruh perhatian penuh terhadap pendidikan.

Ada beberapa hal lain yang membedakan pendidikan di Amerika dengan di Indonesia yaitu terkait kebijakan Ujian Nasional (UN). Sebagaimana halnya dengan di Indonesia, Amerika juga punya, namun pemerintah federal tetap memberikan wilayah kebebasan kepada pihak pemerintah untuk merumuskan kurikulum dan Ujian Nasional-nya. Akan tetapi pola Ujian Nasional yang dianut oleh lembaga pendidikan di masing-masing Negara bagian menyebabkan antara Negara Bagian sulit menerima siswa yang berpindah sekolah. Berkaitan dengan tenaga pendidikan, sebagaimana halnya dengan di Indonesia, Guru di Amerika Serikat haruslah memiliki sertifikat mengajar dari pemerintah atau pendidikan tinggi untuk bisa mengajar baik di *preschool* atau di sekolah menengah. Sertifikat itu adalah seperti *Postgraduate Certificate in Education*, *Profesional Graduate Diploma* dan *Bachelor of Education*. Kalau membandingkan pendidikan Islam di Amerika dengan pendidikan Islam di Indonesia jelas akan terlihat jelas perbedaan antara keduanya. Karena Indonesia yang dianggap sebagai Negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, pola pendidikan Islam-nya sudah sangat kuat dan mengakar bahkan bisa dikatakan bahwa ajaran Islam sudah “terasimilasi” dengan budaya masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, kalau melihat semakin pesatnya pertumbuhan jumlah umat Islam di Amerika hal ini juga menandakan bahwa peran lembaga pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan berbasis Islam di sana sangat berkontribusi secara nyata.¹³

6. Education System in the United States

Sistem pendidikan di Amerika Serikat (AS) mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan di sana yaitu *federal* dengan *desentralisasi* melalui pemerintahan negara-negara bagian (*states*). Penanggung jawab utama sistem pendidikan di sana adalah departemen pendidikan pemerintah federal di Washington D.C, namun kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintah setiap Negara bagian yang kemudian mendelegasikannya lagi kepada Kantor Pendidikan Distrik (*Public School District*), dan kepada badan-badan penyantun college dan universitas.

Sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa karakteristik utama politik sistem pendidikan Amerika Serikat adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan sistem pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman.

¹³ Mroueh, Yousuf. *Muslim in the Americas Before Columbus*, (EBook).

- b. Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi.
- c. Untuk membantu pengembangan individu.
- d. Untuk memperbaiki kondisi social masyarakat.
- e. Untuk mempercepat kemajuan nasional.¹⁴

Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi.

7. Primary Education in the United States

Pendidikan dasar di Amerika Serikat berjenjang dari Kindergarten hingga Fifth grade (Kelas 5), tetapi terkadang juga berjenjang hingga Fourth grade (kelas 4), Sixth grade (kelas 6) atau eighth grade (kelas 8) tergantung sistem kurikulum pada school district tersebut. Kurikulum pembelajaran dipilih oleh school district mengacu pada standar pembelajaran di Negara bagian tersebut. Standar pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh School district yang harus mengacu pada AYP (*Adequate yearly program*).¹⁵

Suasana pembelajaran pada sekolah dasar di Amerika Serikat berbeda dengan pembelajaran pada sekolah di Indonesia. Satu kelas terdiri dari dua puluh hingga tiga puluh siswa. Guru Sekolah dasar di Amerika Serikat dibekali pendidikan lanjutan mengenai perkembangan *cognitive* and *psychological* development. Guru-guru di Amerika Serikat telah menyelesaikan pendidikan lanjutan Sarjana dan atau Pasca Sarjana (*Bachelors and/or Masters degree*) dalam bidang *Early Childhood and Elementary Education*.

8. Secondary Education in the United States

Jenjang pendidikan menengah di Amerika Serikat dibagi menjadi dua tahap (middle school atau junior high) mulai pada jenjang sixth, seventh, eighth and ninth, grade (kelas 6, 7, 8, 9). Jenjang pendidikan pada middle school atau junior high (grade/kelas) di tentukan oleh faktor demografi seperti jumlah usia siswa sekolah menengah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan populasi siswa sekolah yang stabil. Pada jenjang ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang dikehendaki dan menggunakan system kelas berpindah (*moving class*).

Senior High (kelas 9,10,11,12) adalah jenjang lanjutan setelah middle school atau junior high, biasanya Jenjang ini dimulai dari ninth grade (freshman), tenth grade (sophomores), eleventh grade (Juniors), twelfth grade (seniors). Perlu diketahui bahwa jenjang middle school atau Junior high dan Senior high berbeda-beda di setiap Negara bagian, mengacu pada demografi usia siswa di Negara bagian tersebut. Pendidikan menengah memiliki struktur kurikulum yang berbeda dengan di Indonesia. Pada jenjang ini, siswa diwajibkan mengambil sejumlah mata

¹⁴ Richard Hofstadter, dkk. *Garis Besar Sejarah Amerika Serikat*. (Deplu AS. (2004). hlm. 417- 418

¹⁵ Richard N. Current. *American History: A Survey*. (New York: Alfred A. Knopft. 1965.) hlm 36.

pelajaran wajib (mandatory subjects) dan memilih mata pelajaran pilihan (electives).¹⁶

Mata pelajaran wajib (mandatory subjects) meliputi :

1. Science (Ilmu pengetahuan alam) meliputi Biologi, Kimia dan Fisika
2. Mathematics (Matematika) meliputi aljabar, geometri, pre-calculus dan statistika
3. English (pelajaran bahasa inggris) meliputi sastra, humaniora, mengarang dan verbal (praktek)
4. Physical education (Olahraga)

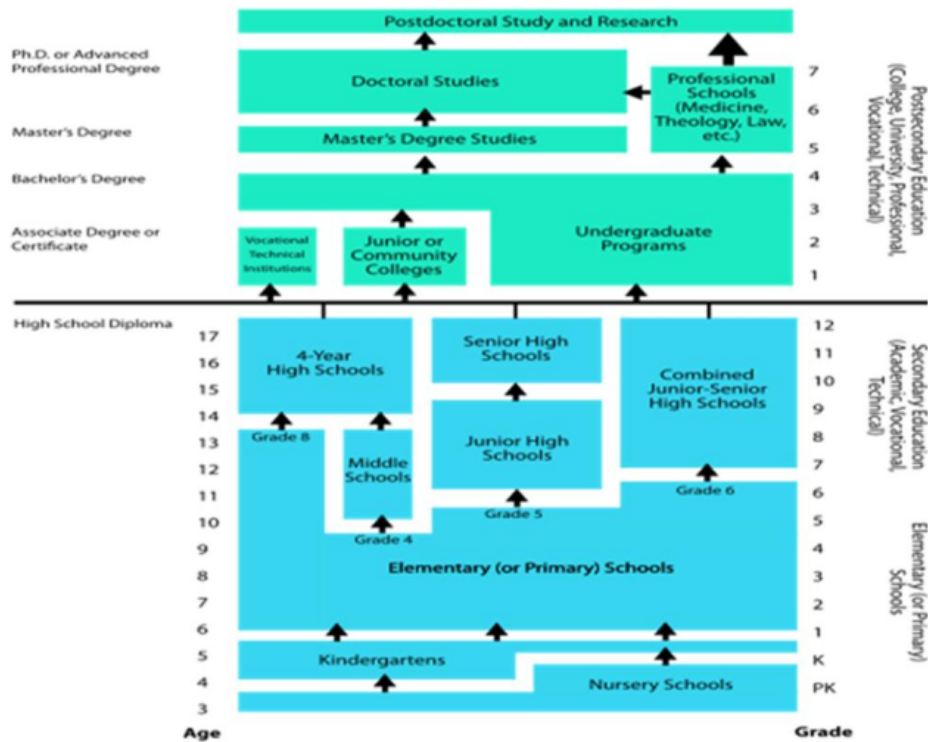
Mata pelajaran pilihan (electives) meliputi:

1. Athletics meliputi cross country, football, basketball, track and field, swimming, tennis, gymnastics, waterpolo, soccer, softball, wrestling, cheerleading, volleyball, lacrosse, ice hockey, fieldhockey, crew, boxing, skiing/snowboarding, golf, mountain biking, marching band
2. Career and Technical Education meliputi agriculture atau agriscience, Business/Marketing, Family and Consumer Science, Health occupations
3. Computer word processing meliputi programing and design
4. Foreign languages meliputi bahasa Spanyol dan Perancis (umum) Bahasa Cina, Latin, Yunani, Jerman, itali dan Jepang (tidak umum)
5. Performing Arts atau Visual Arts meliputi, paduan suara, band, orchestra, drama, seni rupa, fotografi, ceramics dan dance
6. Publishing meliputi Journalisme atau Koran siswa, buku tahunan dan majala siswa¹⁷

Skema Pendidikan Dasar, Menengah dan Lanjutan di Amerika Serikat

¹⁶ L. Esposito, John. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, vol. 3 (New York: Oxford University, 1995).

¹⁷ Barboza, Stevern. *American Jihad*, terj. Bandung: MIZAN, 1995.



Gambar 18.4 Sekema pendidikan di Amerika Serikat.

9. Education System in the United States in General

AS memiliki sistem pendidikan yang paling beragam di dunia, dengan sekolah-sekolah negeri dan swasta ('sekolah' biasanya merujuk pada segala hal mulai dari taman kanak-kanak hingga universitas) di semua tingkatan yang berkembang bersama satu sama lain. Sekitar 90% siswa di Amerika Serikat menyelesaikan sekolah menengah atas dan AS juga memiliki persentase lulusan perguruan tinggi yang lebih tinggi (lebih dari 50%) daripada banyak negara. Banyak universitas Amerika dan lembaga pendidikan tinggi lainnya terkenal secara internasional (AS bisa dibilang memiliki sistem pendidikan sarjana terbaik di dunia) dan badan mahasiswanya mencakup ribuan mahasiswa asing dari seluruh penjuru dunia.

Pendidikan penuh waktu adalah wajib di semua negara bagian dan termasuk anak-anak warga negara asing secara permanen atau sementara tinggal di AS selama minimal satu tahun. Semua anak, terlepas dari status hukum orang tua mereka, memiliki hak untuk mendaftar di sekolah di AS. Sekolah wajib biasanya dimulai pada usia enam dan berlanjut sampai antara 14 dan 18 tergantung pada negara. Orang Amerika yang khas menerima pendidikan 12 tahun (dikenal sebagai K-12), meskipun rata-rata lebih rendah di daerah pedesaan dan kota kecil (terpisah dari kota universitas), dan lebih tinggi di daerah metropolitan. Maxbet.

1. Sekolah Negeri dan Swasta di AS

Tidak ada sistem pendidikan federal di AS, di mana pendidikan adalah tanggung jawab masing-masing negara bagian dan distrik. Akibatnya, standar dan persyaratan pendidikan sangat bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian dan distrik ke distrik lainnya. Karena sekolah sangat bergantung pada pajak properti untuk pendanaan, biasanya kabupaten berpendapatan tinggi memiliki sekolah yang lebih baik. Tidak ada biaya yang dibayarkan di sekolah dasar dan menengah negeri (negara bagian), yang dihadiri oleh sekitar 90 persen anak-anak (anak sekolah dari segala usia biasanya disebut sebagai siswa). Sepuluh persen lainnya bersekolah di sekolah-sekolah swasta yang membayar biaya sekolah, yang sebagian besar merupakan sekolah paroki yang disponsori gereja (seringkali Katolik Roma). Jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta telah menurun selama dua dekade terakhir.¹⁸

2. Tingkat pendidikan

Pendidikan formal terdiri dari tiga tingkatan: dasar, menengah dan lebih tinggi. Sekolah menengah biasanya terdiri dari sekolah menengah (kelas 6-8) dan sekolah menengah (kelas 9-12). Pelatihan kejuruan, pendidikan orang dewasa, dan sekolah atau kelas khusus juga merupakan bagian dari program pendidikan di sebagian besar negara bagian. Banyak Negara bagian dan masyarakat menyediakan sekolah atau kelas khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus, termasuk yang memiliki masalah emosional dan perilaku, kesulitan belajar sedang dan berat, masalah komunikasi, pendengaran parsial atau cacat fisik. Ada juga sekolah swasta yang melayani anak-anak berbakat dan berbakat, dan sebagian besar sekolah negeri memiliki program-program berbakat dan berbakat.

3. Pemisahan negara dan agama

Konstitusi AS mensyaratkan pemisahan negara dan agama dan melarang ketaatan beragama di sekolah-sekolah umum (meskipun ada rencana untuk mengembalikan doa sekolah di beberapa daerah), tetapi anak-anak masih diharapkan untuk berpartisipasi dalam ritual pagi janji kesetiaan kepada bendera Amerika di banyak sekolah. Dengan pengecualian beberapa sekolah swasta, seragam sekolah jarang ditemukan, meskipun seragam itu menjadi lebih populer di sekolah charter, terutama di kota-kota besar.

Aspek unik dari sistem pendidikan AS adalah tingkat keterlibatan orang tua yang tinggi. 'Kekuatan orang tua' tidak hanya diterima, tetapi disambut dan didorong melalui Asosiasi Guru Orangtua (PTA) lokal dan Asosiasi Rumah dan Sekolah (HSA) yang melekat pada setiap sekolah. PTA dan HSA bertemu secara teratur dan menyibukkan diri dengan banyak aspek urusan sekolah termasuk kurikulum, fasilitas, jam sekolah dan kegiatan serta program setelah sekolah.

¹⁸ Taat Wulandari, *Kebijakan Pendidikan Di Amerika Serikat*, Jakarta : ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 2008.

Orang tua didorong untuk menghadiri pertemuan dan menunjukkan minat pada sekolah dan pendidikan anak-anak mereka (itu juga cara yang baik bagi pendatang baru untuk berteman). Sekolah mengatur hari tua, 'kembali ke sekolah' malam dan konferensi orang tua-guru, di mana orang tua dapat bertemu guru dan memeriksa jadwal sekolah anak mereka.¹⁹

4. Standar pendidikan di AS

Dalam dekade terakhir ini, telah terjadi perdebatan luas mengenai standar yang menurun dan prestasi rendah siswa Amerika, terutama jika dibandingkan dengan siswa di negara-negara industri terkemuka lainnya seperti Jerman dan Jepang. Dalam tes yang diberikan kepada siswa Amerika dan asing, AS memiliki penampilan yang buruk. Siswa dan lulusan sekolah menengah Amerika (dari sekolah negeri dan swasta) menempati peringkat ke-31 di seluruh dunia dalam bidang matematika, sains, dan membaca. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah federal telah memperkenalkan pengujian standar di sekolah-sekolah untuk mengukur pencapaian dan mendistribusikan dana yang sesuai. Orang tua dapat melihat skor rata-rata sekolah pada tes-tes ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana mereka membandingkan.²⁰

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang tua yang khawatir tentang penurunan pendidikan publik telah beralih ke sekolah swasta. Meskipun biaya pendidikan swasta tinggi, banyak orang tua Amerika menganggapnya sebagai harga yang dapat diterima untuk membayar, terutama jika hasilnya adalah gelar sarjana atau master dari universitas bergengsi, dengan nilai uang yang dihasilkan di pasar kerja. Pendidikan untuk kepentingannya sendiri atau cinta belajar jarang terjadi di AS, di mana pendidikan dan kualifikasi dinilai terutama berdasarkan kekuatan penghasilan mereka (khususnya MBA). Keluarga-keluarga asing yang tinggal di AS untuk waktu yang singkat mungkin lebih suka mengirim anak-anak mereka ke sekolah internasional swasta, di mana mereka akan kurang tenggelam dalam cara-cara Amerika. Organisasi dan kurikulum sebagian besar sekolah dan perguruan tinggi swasta serupa dengan sekolah negeri, walaupun administrasi berbeda.

5. Jam dan ketentuan sekolah

Tahun sekolah biasanya berlangsung dari awal September hingga Mei atau Juni (sembilan bulan) dan dibagi menjadi 'kuartal' atau semester (semester). Sebagian besar sekolah menggunakan sistem semester yang terdiri dari dua sesi: musim gugur (September hingga Desember) dan musim semi (Januari hingga Mei). Beberapa sekolah menggunakan sistem kuartal, yang terdiri dari tiga sesi:

¹⁹ Abdulla, Aslam dan Gaser Hathout. *Identitas Muslim Amerika, Berbicara untuk Diri Sendiri*. Los Angeles: Multimedia Vera International, 2003. hlm 21

²⁰ Harianto, 2021. *Education Systems In The United States Of America*, Surabaya: researchgate.net.

musim gugur (September hingga Desember), musim dingin (Januari hingga Maret) dan musim semi (Maret hingga Mei atau Juni).

Tanggal liburan sekolah diterbitkan oleh sekolah jauh sebelumnya, sehingga memungkinkan orang tua banyak waktu untuk menjadwalkan liburan keluarga. Biasanya, orang tua tidak diizinkan untuk menarik anak-anak dari kelas, kecuali untuk kunjungan ke dokter atau dokter gigi, ketika guru harus diberitahu terlebih dahulu jika memungkinkan. Hari sekolah di sekolah dasar dan menengah dapat bervariasi tetapi biasanya berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore atau jam 3:30 siang, dengan satu jam untuk makan siang. Di sekolah menengah, siswa mengambil enam kelas satu jam atau empat kelas 90 menit (dengan istirahat sepuluh menit di antara kelas). Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga dijadwalkan setelah jam sekolah.²¹

10. Understanding the American Education System

Sistem pendidikan Amerika menawarkan banyak pilihan untuk mahasiswa internasional. Ketika Anda memulai pencarian, mahasiswa dapat kewalahan dalam memilih universitas yang akan dituju, program apa yang dipilih, serta lokasi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengenal sistem pendidikan di Amerika. Pemahaman sistem ini akan membantu Anda untuk mempersempit pilihan studi serta membangun rencana studi Anda.

a. Sekolah Primer Dan Sekunder

Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pelajar Amerika memasuki sekolah primer dan sekunder dalam waktu 12 tahun. Tahun-tahun ini disebut sebagai grade (kelas) 1 sampai 12. Sekitar umur 6 tahun, anak-anak A.S. memulai sekolah primer, yang disebut sebagai "elementary school (sekolah dasar)." Mereka memasuki sekolah dasar selama lima atau enam tahun dan kemudian dilanjutkan dengan sekolah sekunder. Sekolah sekunder terdiri dari dua program: program pertama adalah "middle school (sekolah menengah)" atau "junior high school (sekolah menengah pertama)" dan program kedua adalah "high school (sekolah menengah atas)." Pelajar mendapatkan diploma atau sertifikat setelah lulus dari high school. Setelah lulus high school (grade 12), pelajar A.S. dapat melanjutkan ke college (perguruan tinggi 2-tahun) atau universitas. College atau universitas dikenal sebagai "higher education (pendidikan tinggi)."

b. Sistem Penilaian

Seperti layaknya pelajar Amerika, Anda harus mengirimkan transkrip akademik sebagai bagian dari pendaftaran untuk penerimaan masuk ke universitas atau college. Transkrip akademik yang memenuhi syarat adalah pernyataan resmi dari nilai akademik Anda. Di A.S., transkrip akademik termasuk "grade (nilai)" dan "Grade Point Average (GPA)/Index Prestasi Kumulatif (IPK), yang merupakan ukuran dari pencapaian akademik Anda. Mata pelajaran biasanya

²¹ Amin, Surahmin. "Islam di Amerika; Potret Perkembangan Dakwah Islam Pasca Tragedi 9 September 2001 ", Tasamuh, Vol. 4, No. 1 (2012).

dinilai dengan menggunakan persentase, yang nantinya akan diubah ke dalam penilaian huruf.

Sistem penilaian dan GPA di A.S. bisa membingungkan, khususnya untuk mahasiswa internasional. Interpretasi penilaian mempunyai banyak variasi. Sebagai contoh, dua pelajar yang memasuki sekolah yang berbeda mengirimkan transkrip mereka ke universitas yang sama. Mereka sama-sama mempunyai GPA 3,5, tetapi pelajar pertama memasuki high school yang biasa-biasa saja, sedangkan pelajar kedua memasuki sekolah yang berprestasi. Universitas dapat menginterpretasi nilai GPA mereka secara berbeda karena kedua sekolah mempunyai perbedaan standar yang dramatis.²²

11. The U.S. Higher Education System

1. Tingkat Pertama: *Undergraduate* (S1)

Mahasiswa yang memasuki college atau universitas dan tidak memperoleh gelar bachelor (S1), menempuh pendidikan di tingkat undergraduate. Diperlukan waktu rata-rata empat tahun untuk memperoleh gelar bachelor. Anda dapat memulai pendidikan untuk mengejar gelar bachelor di community college (perguruan tinggi 2-tahun) atau di universitas atau college bermasa studi 4-tahun. Dalam dua tahun pertama, Anda akan diwajibkan untuk mengambil kelas-kelas dalam mata kuliah yang berbeda, yang dikenal sebagai mata kuliah prasyarat: literatur, sains, ilmu sosial, seni, sejarah, dan lain sebagainya. Ini akan membantu Anda dalam mendapatkan pengetahuan secara umum, sebagai dasar untuk mengkhususkan diri dalam bidang studi yang lebih spesifik.²³

Banyak mahasiswa yang memilih community college untuk melengkapi dua tahun pertama mata kuliah prasyarat. Mereka akan memperoleh gelar transfer Associate of Arts (AA) dan kemudian dapat mentransfer ke universitas atau college bermasa studi 4-tahun. "Major (jurusan)" adalah bidang studi spesifik dimana pendidikan Anda akan lebih diarahkan. Sebagai contoh, jika major seseorang adalah jurnalisme, mereka akan memperoleh gelar Bachelor of Arts in Journalism (Sarjana Seni di Jurnalisme). Anda akan diwajibkan untuk mengambil beberapa mata kuliah dalam bidang ini dalam memenuhi persyaratan memperoleh gelar di major tersebut. Anda harus memilih major Anda pada permulaan tahun ke-3.

Sistem pendidikan Amerika mempunyai karakter yang sangat unik yaitu Anda dapat merubah major Anda lebih dari satu kali. Sangatlah wajar untuk mahasiswa Amerika untuk mengganti major karena mereka lebih unggul atau lebih berminat dalam bidang tertentu pada suatu waktu dalam studi undergraduate mereka. Meskipun sistem pendidikan Amerika sangat fleksibel, perlu diperhatikan

²² C. Schroeder, Richard. *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*. New York: Badan Informasi Amerika Serikat, 1992. hlm 98

²³ Masunah, *Concepts And Practice Of Multicultural Education In The United States Of America And Indonesia*. Jilid 18, Nomor 4, Februari 2011, Bandung 40154 VOL 17, NO 4 2011.

bahwa dalam penggantian major mereka bisa saja harus mengambil mata kuliah lagi, yang berarti akan memakan waktu dan biaya yang lebih banyak.

2. Tingkat kedua *Graduate* (Pascasarjana) untuk mengejar Gelar Master (S2)

Saat ini, college atau lulusan universitas dengan gelar bachelor harus berpikir secara serius tentang pendidikan graduate untuk memasuki profesi khusus atau untuk meningkatkan karir mereka. Gelar ini biasanya merupakan mandatori untuk posisi yang lebih tinggi dalam ilmu perpustakaan, teknik mesin, behavioral health (kesehatan perilaku) dan pendidikan. Selanjutnya, mahasiswa internasional dari beberapa negara hanya diijinkan untuk menempuh pendidikan di luar negeri dalam tingkat graduate. Anda harus menyelidiki kebutuhan-kebutuhan kredensial untuk mendapatkan pekerjaan di negara Anda sebelum mendaftar ke universitas postgraduate (S3) di A.S.²⁴

Program graduate biasanya divisi dari universitas atau college. Untuk menambah kesempatan dalam penerimaan masuk, Anda perlu mengambil GRE (Pengujian Nilai Pascasarjana). Beberapa program master mewajibkan nilai tertentu, seperti LSAT untuk hukum, GRE atau GMAT untuk bisnis, dan MCAT untuk kedokteran. Program graduate untuk mengejar gelar master pada umumnya memakan waktu satu atau dua tahun. Sebagai contoh, MBA (Master Bisnis) adalah program yang sangat populer yang dapat memakan waktu dua tahun. Program-program master lainnya seperti jurnalisme, hanya memakan waktu satu tahun. Sebagian besar program-program master diajarkan di ruang kelas dan mahasiswa graduate harus mempersiapkan karangan yang cukup panjang yang dinamakan "master's thesis (tesis master)" atau melengkapi "master's project (proyek master)."

3. Tingkat Ketiga: *Graduate* (Pascasarjana) untuk mengejar Gelar Doctorate (Doktoral/S3)

Pencapaian gelar master merupakan langkah pertama untuk memperoleh gelar PhD (doctoral). Di beberapa perguruan tinggi, mahasiswa bisa memasuki jenjang doktoral tanpa memperoleh gelar master. Gelar PhD bisa diperoleh dalam waktu tiga tahun atau lebih. Untuk mahasiswa internasional, bisa memakan waktu lima atau enam tahun. Dalam dua tahun pertama, sebagian besar kandidat doktoral mendaftar untuk kelas-kelas dan seminar. Setidaknya untuk satu tahun dihabiskan untuk penelitian dan menulis tesis atau disertasi yang terdiri dari pandangan, rencana, atau penelitian yang belum pernah dipublikasikan.

Disertasi doktoral adalah diskusi dan kesimpulan dari topik yang diberikan. Sebagian besar universitas yang mempunyai program doktoral juga mewajibkan kandidat mereka untuk mempunyai kemampuan membaca dalam dua bahasa asing, untuk menghabiskan waktu yang diwajibkan "in residence (dalam kediaman),"

²⁴ Khalik, Subehan. "Sejarah Perkembangan Islam di Amerika", Jurnal al-daulah, vol.4 no.2 2018.

untuk lulus dalam tes yang diberikan kepada kandidat ke program PhD, dan untuk melewati tes oral dalam topik yang sama dengan disertasi.²⁵

12. Characteristics of the U.S. Higher Education System

1. Ruang Kelas

Salah satu tantangan adalah cara Anda untuk mendaftar ke kelas-kelas dan membangun rencana akademik. Saya tadinya tidak tahu apa yang akan dipelajari karena saya dapat memilih banyak program. Saya bertemu dengan Angela Khoo (Penasihat Akademik) tentang kelas-kelas yang dapat saya ambil, dan semuanya menjadi lebih mudah untuk saya." Kelas-kelas berkisar dari kelas yang besar yang diikuti oleh beberapa ratus mahasiswa sampai dengan kelas-kelas yang lebih kecil dan seminar (diskusi) yang diikuti oleh beberapa mahasiswa saja. Ruang kelas di universitas Amerika mempunyai atmosfir yang dinamis. Anda diharapkan untuk berbagi dan mempertahankan pendapat Anda, berpartisipasi dalam diskusi kelas dan memberikan presentasi.²⁶

Mahasiswa internasional menganggap ini sebagai salah satu aspek yang mengejutkan dalam sistem pendidikan Amerika. Setiap minggu, profesor memberikan buku teks dan bahan untuk dibaca. Anda diharapkan untuk selalu up-to-date sehingga Anda dapat berpartisipasi dalam diskusi-diskusi di dalam kelas dan mengerti tentang pelajaran yang diberikan. Beberapa program tertentu juga mewajibkan mahasiswa untuk menghabiskan waktu di laboratorium. Para profesor memberikan nilai-nilai untuk setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah. Nilai-nilai ini biasanya berdasarkan pada:

Setiap profesor mempunyai persyaratan partisipasi kelas yang berbeda, tetapi mahasiswa diharapkan untuk berpartisipasi dalam diskusi, khususnya di dalam kelas seminar. Seringkali ini merupakan faktor yang sangat penting dalam penentuan nilai. Ujian pertengahan semester biasanya diberikan dalam jam kuliah. Salah satu dari beberapa penelitian atau laporan laboratorium harus dikirim untuk evaluasi. Ujian singkat atau kuis. Sekali waktu profesor akan memberikan "ujian mendadak." Ujian mendadak ini tidak berpengaruh besar dalam perhitungan nilai, tetapi bertujuan untuk menginspirasi mahasiswa untuk tidak ketinggalan dalam tugas-tugas yang diberikan dan kehadiran mereka. Ujian final akan diadakan setelah pertemuan kelas terakhir.²⁷

2. Kredit

Setiap mata kuliah mempunyai nilai-nilai kredit tertentu. Angka ini mempunyai kesamaan dengan jumlah waktu yang dihabiskan di dalam kelas untuk mata kuliah tersebut setiap minggunya. Mata kuliah biasanya mempunyai tiga sampai lima nilai kredit. Program penuh-waktu di kebanyakan perguruan tinggi

²⁵ Taat Wulandari, *Kebijakan Pendidikan Di Amerika Serikat*, Jakarta: ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah. 2008.

²⁶ Amerika Serikat". *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka. 1990

²⁷ Elhady, Aminullah. "Perkembangan Islam di Amerika Sebelum dan Setelah Tragedi 11 September 2001", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 13, No. 1 2015.

berjumlah 12 atau 15 kredit (empat atau lima mata kuliah per term) dan beberapa mata kuliah tertentu harus diambil sebagai persyaratan untuk lulus.

3. Transfer

Jika mahasiswa mendaftar ke universitas baru sebelum mendapatkan gelar, setiap kredit yang didapat bisa digunakan untuk memperoleh gelar di universitas baru. Ini berarti mahasiswa dapat mentransfer ke universitas lainnya dan lulus dalam waktu yang sama.

13. Type of American Higher Education

1. Universitas atau Perguruan Tinggi Negeri

Perguruan tinggi negeri didukung dan dijalankan oleh negara bagian atau pemerintah lokal. Setiap 50 negara bagian A.S. mempunyai paling sedikit satu universitas negeri dan beberapa college negeri. Banyak dari perguruan tinggi negeri ini mempunyai nama dari negara bagian, atau kata "state (negara bagian)" di dalam nama perguruan tinggi mereka: sebagai contoh, Washington State University dan University of Michigan.²⁸

2. Universitas atau Perguruan Tinggi Swasta

Perguruan tinggi ini dijalankan secara swasta. Biaya kuliah biasanya lebih tinggi dari perguruan tinggi negeri. Seringkali, universitas dan perguruan tinggi swasta A.S. lebih kecil daripada perguruan tinggi negeri. Universitas dan college yang berhubungan dengan agama adalah college swasta. Perguruan tinggi ini menerima mahasiswa yang berbeda agama dan kepercayaan. Tetapi ada sebagian kecil perguruan tinggi yang lebih mengharapkan untuk menerima mahasiswa yang berkeyakinan sama.

3. *Community College* (Perguruan Tinggi Dua Tahun)

Community college adalah perguruan tinggi dua-tahun yang memberikan gelar associate (diploma) yang dapat ditransfer, dan juga sertifikasi. Ada banyak jenis gelar associate, tetapi faktor yang membedakan adalah apakah gelar tersebut dapat ditransfer atau tidak. Biasanya, ada dua jalur gelar primer: satu untuk transfer akademik dan yang lainnya untuk mempersiapkan mahasiswa mendapatkan pekerjaan secara langsung. Gelar universitas yang dapat ditransfer umumnya associate of arts (diploma seni) atau associate of science (diploma sains). Yang tidak dapat ditransfer adalah gelar associate of applied science (diploma sains aplikasi) dan certificates of completion (sertifikat kelulusan).

Lulusan community college pada umumnya mentransfer ke college bermasa studi 4-tahun atau universitas untuk memperoleh gelar. Karena mereka dapat mentransfer kredit-kredit yang telah diselesaikan di community college, mereka dapat melengkapi program bachelor dalam waktu dua tahun atau lebih. Banyak juga yang menawarkan ESL atau program Bahasa Inggris intensif, dimana akan mempersiapkan mahasiswa untuk mata kuliah tingkat universitas. Jika Anda tidak berencana untuk memperoleh gelar yang lebih tinggi dari associate, Anda harus

²⁸ Husin, *Islamic Religious Education In The United States Of America (Islamic Education Institution)*, Jurnal Ilmiah AL-MADRASAH, vol 2 no. 2 januari-juni 2018.

menemukan apakah gelar associate akan berguna untuk menemukan pekerjaan di negara asal Anda.²⁹

4. Institute of Technology (Lembaga Teknologi)

Institute of Technology adalah perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan sains dan teknologi selama paling sedikit empat tahun. Beberapa mempunyai program graduate, yang lainnya menawarkan mata kuliah jangka pendek.³⁰

US Curriculum

Siswa diwajibkan mengambil sejumlah mata pelajaran wajib (mandatory subjects) dan memilih mata pelajaran pilihan (electives) adalah: Pertama, Mata Pelajaran Wajib (mandatory subjects) meliputi: (1) Science (Ilmu pengetahuan alam) meliputi: Biologi, Kimia dan Fisika. (2) Mathematics (Matematika) meliputi: aljabar, geometri, pre-calculus dan statistika. (3) English (pelajaran bahasa inggris) meliputi: sastra, humaniora, mengarang dan verbal (praktek). (4) Physical education (Olahraga). Kedua, Mata Pelajaran Pilihan (electives) meliputi: (1) Athletics meliputi: cross country, football, basketball, track and field, swimming, tennis, gymnastics, waterpolo, soccer, softball, wrestling, cheerleading, volleyball, lacrosse, ice hockey, fieldhockey, crew, boxing, skiing/snowboarding, golf, mountain biking dan marching band. (2) Career and Technical Education meliputi: agriculture (agriscience), Business (Marketing), Family and Consumer Science, Health languages. (3) Computer word processing meliputi: Languages and design. (4) Foreign Languages meliputi: bahasa Spanyol dan Perancis (umum), Cina, Latin, Yunani, Jerman, itali dan Jepang (tidak umum). (5) Performing Arts (Visual Arts) meliputi: paduan suara, band, orchestra, drama, seni rupa, fotografi, ceramics dan dance. (6) Publishing meliputi: Journalisme (Koran siswa), buku tahunan dan majala siswa.

Guru/ Tenaga Kependidikan AS

Satu kelas terdiri dari 20-30 siswa. Guru Sekolah dasar di Amerika Serikat dibekali pendidikan lanjutan mengenai perkembangan cognitive and psychological development. Guruguru di Amerika Serikat telah menyelesaikan pendidikan lanjutan Sarjana dan atau Pasca Sarjana (Bachelors and/or Masters degree) dalam bidang Early Childhood and Elementary Education.

Manajemen AS

Manajemen pendidikan di AS dikembangkan berdasarkan “aspirasi dan kebutuhan masyarakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah setempat”. Hal ini dilakukan mengingat AS adalah Negara dengan sistem desentralisasi. Di tingkat nasional (federal/pusat) dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal.

²⁹ Nugroho, Garin. “Pemerintah tanpa Strategi Kebudayaan mengungkapka Potret Pendidikan Amerika Serikata”

<https://meilanikasim.wordpress.com/2009/05/27/98>. Nur, Agustiar Syah. 2001.

Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung: Lubuk Agung.

³⁰ Jujun Masnah, *Konsep Dan Praktik Pendidikan Multikultural Di Amerika Serikat Dan Indonesia* Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 17, Nomor 4, Februari 2011, Bandung 40154 VOL 17, NO 4 2011.

Jadi meski dalam sistem pendidikan di Amerika, sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal, Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika (Deplu AS, 2000: 62-63). Departemen ini dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet. Tugas departemen ini adalah melaksanakan semua kebijakan pemerintah federal dalam sektor pendidikan di semua tingkatan pemerintahan dan untuk semua jenjang pendidikan. Otoritas Pendidikan Lebih dalam lagi pemahaman manajemen dapat dijelaskan dengan melihat “Otoritas Pendidikan” sebagai berikut: Dalam sejarah pendidikan Amerika Serikat, pendidikan sudah lama menjadi tanggung jawab pemerintah Negara bagian (State) dan masyarakat setempat. Pemerintah Federal (Pusat)

Sejak 1872 Pemerintah Federal (Pemerintah Pusat) telah ikut campur tangan mulai dengan memberikan adalah:

1. Tanah Negara kepada Negara bagian guna pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik. Perguruan tinggi ini lazim disebut “land-grant college”.
2. Pemerintah federal membantu sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian, menyediakan dana bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk pendidikan lanjutan, dan menyediakan pinjaman bagi mahasiswa.
3. Pemerintah federal juga menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing serta berbagai kebutuhan mahasiswa yang lainnya.

Walaupun bantuan langsung kepada sekolah-sekolah agama dilarang oleh undang-undang, tetapi secara tidak langsung bantuan itu diberikan dalam bentuk buku-buku teks dan berbagai laboratorium. Semejak tahun 1979, dibentuklah Departemen Pendidikan Federal yang dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet dengan mengemban tugas melaksanakan semua kebijakan pemerintah mengenai pendidikan.

Tujuan Sistem Pendidikan AS

Tujuan sistem pendidikan Amerika secara umum dirumuskan sebagai berikut: (1) Untuk mencapai kesatuan dalam kebinekaan. (2) Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. (3) Untuk membantu pengembangan individu; (4) Untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, dan (5) Untuk mempercepat kemajuan nasional. Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi. Landasan Filosofis Pendidikan “Transcendentalisme” dan “Pragmatisme” Iwan Sunarya Panjaitan (2013: 4) mengatakan bahwa berdasarkan letak geografi, pembentukan lahirnya Amerika dari bangsa-bangsa asing yang mendiaminya, paham kapitalis, dan nilai karakter orang Amerika, maka dapat mempengaruhi lahirnya filsafat pendidikan yang dirumuskannya. Ada dua aliran filsafat “Transcendentalisme” dan “Pragmatisme” yang mempengaruhi filsafat pendidikan di Amerika. Pertama, Transcendentalisme. Transcendentalisme mengekspresikan hal-hal yang berkenaan

dengan kebudayaan, yang hidup, dinamis dan progresif. Pendidikan Amerika berpijak pada landasan kependidikan yang berupa: pemikiran kefilsafatan, keilmuan dan wawasan-wawasan lain (Dimiyati, 1988). Kedua, Filsafat Pendidikan Pragmatisme. Tokoh yang mengembangkan filsafat pragmatisme adalah John Dewey. Pragmatisme merupakan doktrin bahwa tes akhir dari sesuatu baik bergantung pada apakah sesuatu itu bekerja dan bermanfaat atau tidak. Terdapat dua pandangan mengenai tujuan pendidikan dari aliran pragmatisme, yaitu: konsep sosial dan konsep kreatif.

Dewey berpendapat bahwa pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian maka sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik (Simanjuntak, 2013: 30). Penanggung Jawab Sistem Pendidikan Sistem pendidikan di Amerika Serikat mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan, yaitu “federal dengan desentralisasi” melalui pemerintahan negara-negara bagian (states). Penanggung jawab utama sistem pendidikan di sana adalah departemen pendidikan Pemerintah Federal di Washington D.C, tetapi kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintah setiap Negara bagian yang kemudian mendelegasikannya lagi kepada Kantor Pendidikan Distrik (Public School District), dan kepada badan-badan penyantun college dan universitas (Wulandari: 2008). Karena desentralisasi maka Pemerintah Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional.

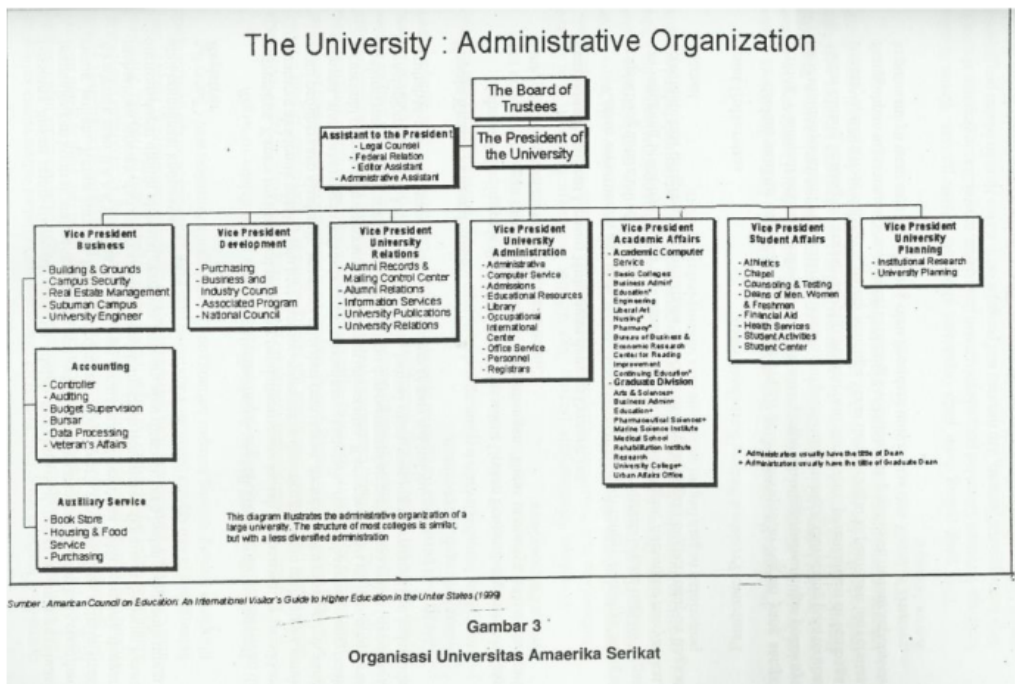
Akreditasi AS

Akreditasi bukan dilaksanakan oleh Pemerintah melainkan otonom yang mencakup adalah: sukarelawan, non-pemerintah dan independen. Bagian Pendidikan Pemerintah Amerika Serikat tidak bertanggung jawab dalam hal akreditasi, pengontrolan mutu atau standar pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak menteri pendidikan di Negara-negara lain. Proses akreditasi dikoordinasikan oleh badan akreditasi pendidikan tinggi (Council for Higher Education Accreditation, CHEA). CHEA membantu menjaga kemandirian serta otonomi proses akreditasi regional, komisi pendidikan tinggi, dan kelompok-kelompok bidang studi yang mengakreditasi bidang profesi tertentu. Tetapi, karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada Negara Bagian dan Pemerintah Daerah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja (Wulandari: 2008). Jenis-jenis akreditasi sebagai berikut:

(1) Akreditasi institusional. Akreditasi ini disepakati oleh komisi akreditasi regional dan nasional untuk sekolah dan perguruan tinggi yang secara bersama-sama melayani hampir seluruh lembaga baik yang swasta maupun negeri di Amerika Serikat. Sungguhpun akreditasi pada umumnya diberikan untuk waktu

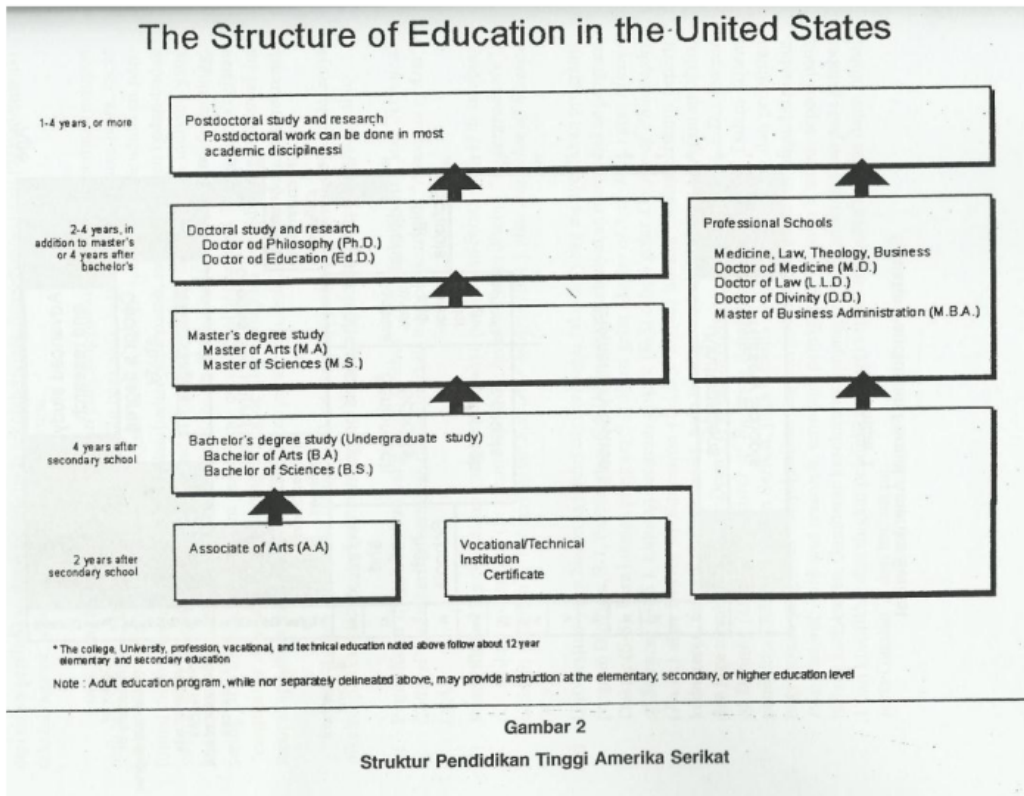
tertentu, biasanya 10 tahun, badan akreditasi boleh melakukan pemeriksaan atas institusi anggota ataupun program kapan saja. Akreditasi institusional, walaupun sifatnya sukarela penting artinya bagi kelangsungan hidup lembaga. Ini berguna bagi orang tua, calon mahasiswa, dan konselor untuk mempertimbangkan perguruan tinggi mana yang sebaiknya dimasuki.

(2) Akreditasi bidang studi. Akreditasi ini disepakati komisi yang menetapkan oleh organisasi profesi secara nasional untuk mendapatkan jaminan atas kesiapan program studi tertentu. Badan akreditasi ini memiliki kewenangan, kriteria akreditasi serta prosedur pelaksanaannya. Banyak yang beranggapan bahwa permintaan untuk diakreditasi hanya datang dari program-program yang telah berafiliasi dengan institusi yang telah memiliki status terakreditasi. Tetapi banyak badan-badan yang melakukan akreditasi oleh program studi tertentupada perguruan tinggi-perguruan tinggi independent. Oleh karena akreditasi ini sering dipakai oleh pihak pemerintah dalam hal pemberian izin-izin, maka tamat dari program studi yang terakreditasi menjadi sangat penting. Khususnya bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan izin-izin praktek, seperti mahasiswa arsitektur, mahasiswa kedokteran gigi, mahasiswa kedokteran, perawat dan sebagainya.

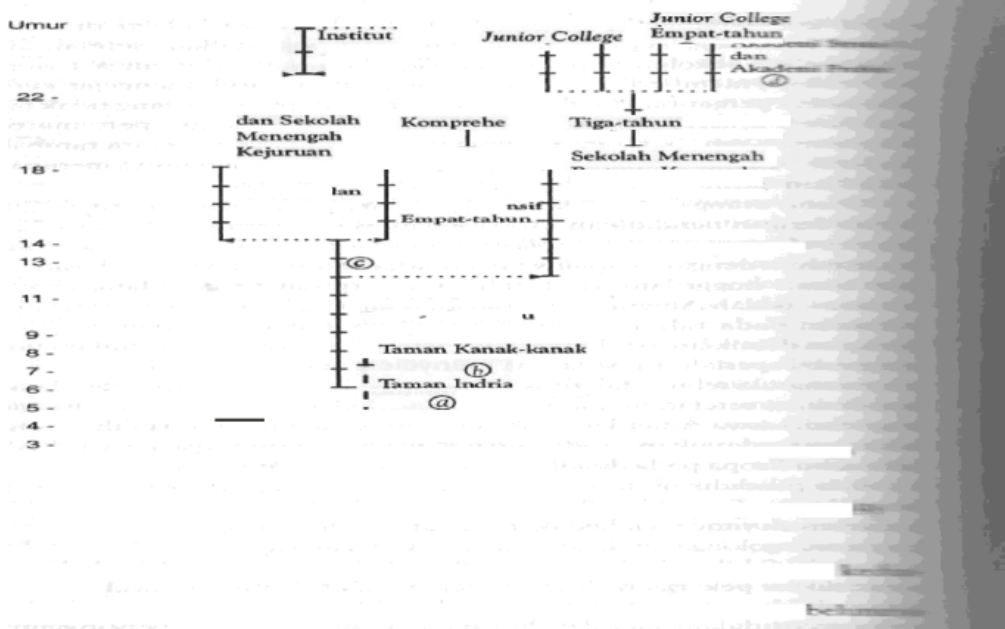


Gambar 18.5 Skema Struktur Organisasi Universitas di Amerika

“The Structure of Education in the United States”



Skema Institusi Pendidikan Amerika



B. CLOSING

Amerika yang kita kenal sebagai Negara *super power* dan dianggap paling manusiawi dan beradab, ternyata menyimpan sejarah yang sangat memilukan pada masa lalunya. Praktek perbudakan yang dilakukan di benua Amerika terhadap warga kulit hitam, tentunya menjadi sejarah kelam dari sisi kemanusiaan. Akan tetapi, dari sejarah kelam tersebut juga menyimpan sejarah cikal bakal tumbuh dan menyebarnya agama Islam hingga sekarang. Berdasarkan gambaran tentang sistem pendidikan di Amerika tersebut di atas, tentunya ada beberapa kajian maupun kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Amerika yang juga dapat diambil sisi positifnya oleh para mahasiswa, pendidik maupun pemangku kebijakan dalam hal penerapannya di Indonesia. Sudah menjadi kultur budaya bagi keluarga dan masyarakat di sana bahwa pendidikan Islam maupun pendidikan secara umum adalah menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pendidikan di masing-masing Negara bagian memiliki karakteristik pendidikan yang berbeda dengan Negara Bagian lainnya. Mereka menganggap bahwa tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Negara Bagian berbeda-beda sehingga perlu memiliki kebijakan tentang sistem pendidikan yang berbeda pula.

Akan tetapi sistem pendidikan seperti ini jelas banyak memiliki kendala dalam penerapannya, akan tetapi sebagai sebuah Negara yang besar dan sudah tua, Amerika sudah sangat berpengalaman dalam memberikan respon yang cepat dan tepat dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Masa kini pendidikan Amerika dilanda isu yang begitu kuat sebagai berikut: Sebagian hasil emansipasi yang sejak lama diperjuangkan di Amerika, hampir semua wanita sudah mendapat pendidikan yang sama dengan Pria, dan selanjutnya kebanyakan wanita sudah mendapat tempat yang sangat luas dalam lapangan kerja, baik bagi mereka yang belum berkeluarga maupun yang sudah. Masyarakat Amerika Serikat saat ini dihadapkan pula pada masalah tingkat perceraian keluarga yang sangat tinggi. Akibatnya adalah makin banyak anak-anak yang hidup atau tinggal dengan satu orang tua (umumnya dengan ibu), yang mau tidak harus bekerja untuk hidup mereka. Banyak di antara ibu-ibu yang berprofesi rendah atau kasar.

Ada yang berpenghasilan sedikit di atas garis batas kemiskinan, dan bahkan ada yang harus mendapat bantuan dari pihak pemerintah. Masalah imigran ikut memperberat persoalan karena kebanyakan mereka itu berlatar pendidikan yang sangat minim, dan sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga masalah pendidikan anak-anak mereka sering tak teratasi. Sementara itu, jumlah imigran yang datang ke Amerika Serikat terus bertambah, umumnya dari Afrika, Amerika Latin, Amerika Tengah dan Asia. Dampak lebih jauh adalah pendidikan bagi anak-anak imigran yang berbeda bahasa dan budayanya di samping lapangan kerja untuk menampung para imigran ini.

Sistem pendidikan Amerika Serikat memiliki berbagai badan-badan resmi yang berfungsi sebagai instrument monitoring dan evaluasi pendidikan. Badan-badan itu antara lain: The National Assessment of Educational Progress

(NAEP), The Office of Educational Research and Improvement (OERI), The National Center for Educational Statistics (NCES), The Office for Programs for Improvement of Practice (OPIP) dan The Office of Library Programs (OLP). Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang dikumpulkan diketahui bahwa kualitas pendidikan Amerika Serikat mengalami kemunduran yang cukup serius. Kondisi ini telah menjadi isu yang sangat hangat yang dipublikasikan oleh berbagai media masa semenjak tahun 1980-an hingga sekarang. Di antara temuan-temuan ini yang paling sangat besar pengaruhnya adalah yang dilaporkan oleh The National Commission on Excellence in Education yang berjudul "A Nation at Risk" bahwa pendidikan Amerika Serikat sedang menghadapi krisis yang berat: sebagian besar siswa dan mahasiswa tidak berusaha belajar di luar sekolah kecuali di saat-saat akan menghadapi ulangan atau teks yang lebih menarik bagi mereka adalah kegiatan di akhir pekan (week-end). Penelitian yang dilakukan oleh "Twentieth Century Fund Task Force on Federal Education Policy" dan oleh The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching menyimpulkan bahwa hasil yang dicapai oleh siswa-siswa Amerika Serikat sangat mengecewakan dalam perbandingan internasional, terutama dalam ujian mata pelajaran matematika, sains, dan geografi. Laporan ini mengungkapkan meningkatnya kekerasan dan makin meningkatnya jumlah anak-anak putus sekolah (drop-outs) di kota-kota berhubungan dengan sistem pendidikan. Kondisi ini diperlukan reformasi pendidikan yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rauf, Imam Feisal. 2007. *Seruan Azan dari Puing WTC*. Bandung: MIZAN.
- Abdullah, Aslam dan Gaser Hathout. 2003. *The American Muslim Identity, Speaking for Ourselves*. Los Angeles: Multimedia Vera International.
- Amin, Surahmin. "Islam di Amerika; Potret Perkembangan Dakwah Islam Pasca Tragedi 9 September 2001", Tasamuh, Vol. 4, No. 1 (2012).
- Barboza, Stevern. 1995, *American Jihad*, terj. Bandung: MIZAN.
- Schroeder, Richard. 1992 *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*. New York: Badan Informasi Amerika Serikat.
- Elhady, Aminullah. "Perkembangan Islam di Amerika Sebelum dan Setelah Tragedi 11 September 2001", Jurnal Al-Hikmah, Vol. 13, No. 1 2015
- Jujun Masnah, *Konsep Dan Praktik Pendidikan Multikultural Di Amerika Serikat Dan Indonesia* Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 17, Nomor 4, Februari 2011, Bandung 40154 VOL 17, NO 4 2011.
- Khalik, Subehan. " Sejarah Perkembangan Islam di Amerika", Jurnal al-daulah, vol.4 no.2 (2018).
- L. Esposito, John. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, vol. 3 (New York: Oxford University, 1995).
- M. Barrett, Paul. 2008. *American Islam Upaya Ke arah Esensi sebuah Agama*. Jakarta: Lentera.
- Mroueh, Yousuf. 2015. *Muslim in the Americas Before Columbus*, (EBook). Mulyana, Dedy. *Islam di Amerika*. Bandung: PenerbitPustaka,
- Richard. Schroeder. 2000. *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*. Deplu AS.
- Richard Hofstadter, dkk. 2004. *Garis Besar Sejarah Amerika Serikat*. Deplu AS.
- Richard N. Current. 1965. *American History: A Survey*. New York: Alfred A. Knopf.
- S. Prada, Juhaya. 2014. *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam*. Tasikmalaya: Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah.
- Thohir, Ajid. 2004. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Taat Wulandari, 2008. *Kebijakan Pendidikan Di Amerika Serikat*, Jakarta: ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah.
- Masunah, *Concepts And Practice Of Multicultural Education In The United States Of America And Indonesia*. Jilid 18, Nomor 4, Februari 2011, Bandung 40154 VOL 17, NO 4 2011.
- Husin, *Islamic Religious Education In The United States Of America (Islamic Education Institution)*, Jurnal Ilmiah AL-MADRASAH, vol 2 no. 2 januari-juni 2018.
- Hariato, 2021. *Education Systems In The United States Of America*, Surabaya: researchgate.net.
- Amerika Serikat". 1990. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- Nugroho, Garin. "*Pemerintah tanpa Strategi Kebudayaan mengungkapka Potret Pendidikan Amerika Serikata*"
<https://meilankasim.wordpress.com/2009/05/27/98>. Nur, Agustiar Syah. 2001. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung.

BAB XIX

SISTEM PENDIDIKAN DI JEPANG

Junaidi

junaiandesgub@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Setiap negara mengembangkan sistem pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan penduduk. Keyakinan akan pentingnya pendidikan yang dapat mengubah peradapan manusia kepada pembentukan sistem pendidikan dirasa dapat menjadi sarana untuk usaha pencapaian tujuan – tujuan pendidikan. Saat ini jika dilihat dari berbagai sistem pendidikan di dunia terdapat kesamaan dalam hal prinsip pendidikan meskipun terdapat perbedaan di berbagai tingkatan dan teknis pelaksanaan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai negara dengan tingkat perkembangan yang berbeda secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di masing - masing negara. Diperlukan sebuah kesadaran untuk melakukan studi komparatif terhadap sistem pendidikan berbagai negara sebagai upaya untuk membandingkan sistem pendidikan yang ada dengan sistem pendidikan yang lainnya. Dengan adanya studi komparatif maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perbaikan pendidikan di Indonesia yang lebih baik.

B. PEMBAHASAN

1. Letak Geografis Negara Jepang



Gambar 19.1 Peta Negara Jepang

Benua Asia Kawasan Asia Timur dan letak astronomis berada pada Koordinat 36°LU 138°BT Koordinat: 36°LU 138°BT Wilayah Peringkat ke-62 $377.923,14 \text{ km}^2$ ($145.916,9 \text{ mil}^2$) 99,18% daratan 0,82% perairan Titik tertinggi

Gunung Fuji 3.776 m Titik terendah Hachirogata -4 m Sungai terpanjang 73 Sungai Shinano 367 km Danau terbesar Danau Biwa 670 km² Jepang adalah negara kepulauan di Asia Timur. Kepulauan Jepang terdiri dari pulau-pulau stratovolcano, empat pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang berada 36°sebelah utara khatulistiwa dan 138°sebelah timur meridian utama. Jepang berada di utara timur laut Cina dan Taiwan (dipisahkan oleh Laut Cina Timur), sebelah timur Korea (dipisahkan oleh Laut Jepang), dan sebelah selatan Rusia Timur Jauh. Selain 4 pulau utama, terdapat 3.000 pulau-pulau berukuran lebih kecil, termasuk Okinawa serta pulau-pulau kecil yang berpenghuni atau tidak berpenghuni. Pada tahun 2006, total luas wilayah Jepang adalah 377.923,1 km², di antaranya 374.834 km² adalah daratan dan 3.091 km² perairan. Sekitar 73% wilayah Jepang adalah daerah pegunungan. Total luas wilayah Jepang kira-kira 85% luas Pulau Sumatra, namun lebih besar dari luas wilayah Jerman, Malaysia, Selandia Baru, dan Britania Raya. Jepang salah satu negara maju yang berada di Kawasan Asia Timur, secara geografis Jepang memiliki luas daratan sekitar 378.000 Km². Secara morfologi tiga perempat negara Jepang bergunung-gunung, dengan daratan dan cekungan. Negara Jepang terdiri dari serangkaian pulau yang membentang sepanjang 3.000 Km dari utara ke selatan.

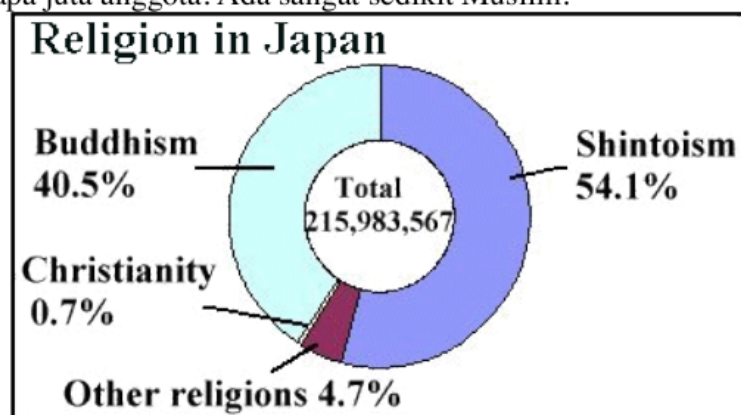
Negara Jepang dikelilingi oleh laut, arus hangat dan dingin mengalir melalui laut di sekitarnya sehingga menciptakan kekayaan spesies ikan. Sebagian besar Negara Jepang berada di Zona Temperatur Utara di Bumi dan memiliki iklim musim lembab, dengan angin tenggara bertiup dari Samudra Pasifik selama musim panas dan angin barat laut bertiup dari benua Eurasia di musim dingin. Kondisi ini membuat negara Jepang memiliki empat musim 74 yaitu: musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dengan teknologi yang maju membuat negara Jepang membuat prediksi laporan cuaca dengan berbasis peta. Sebelah utara dan selatan negara Jepang memiliki iklim yang sangat berbeda. Negara Jepang memiliki wilayah yang rawan bencana alam seperti topan, letusan gunung berapi, dan gempa bumi. Meskipun bencana ini merenggut banyak korban, negara Jepang berusaha untuk meminimalisir terjadinya bencana dengan teknologi canggih untuk merancang struktur tahan gempa dan melacak badai. Faktor-faktor inilah yang membuat negara Jepang menjadi negara yang kuat.¹

Dan Jepang secara intrinsik bukanlah tempat yang sangat religius. Praktik keagamaan sering dipandang lebih sebagai tugas, tradisi dan adat istiadat daripada hal-hal yang memiliki makna spiritual bagi orang yang mempraktikkannya. Seperti orang Tionghoa, orang Jepang menyembah dewa Buddha dan dewa rakyat serta roh leluhur mereka dengan harapan dapat menenangkan semua orang dan dengan demikian memastikan keberuntungan. Konfusianisme (filosofi yang menggabungkan pemujaan leluhur) telah dimasukkan ke dalam kode sosial dan etika Jepang. Shintoisme, yang berarti "jalan para Dewa", adalah animisme

¹Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UPI Angkatan 2019, Kumpulan Artikel Pendidikan Guru di Dunia (Jakarta ; 2020) Pdf hlm 74-75

informal, agama pemuja alam yang menghormati leluhur, memberi penghormatan kepada kamis, atau roh, dan secara tradisional memiliki ikatan yang kuat dengan negara, kaisar, dan budaya Jepang. Secara harfiah ada jutaan kamis, yang sebagian besar dikaitkan dengan langit atau benda-benda alam di bumi seperti pohon dan gunung. Salah satu dewa terpenting adalah Amaterasu-omikami, dewi matahari, yang menurut legenda merupakan nenek moyang Kaisar Jepang. Sebagian besar orang Jepang mempraktikkan beberapa bentuk Buddhisme dan Shinto, tetapi hanya sedikit yang menjadi pengikut yang taat. Menurut satu hitungan, Shinto memiliki 107 juta pengikut (85 persen dari populasi) dan Buddha memiliki sekitar 93 juta pengikut (75 persen).

Ada sekitar 1,7 juta orang Kristen (sekitar 1½ persen dari populasi) dan mereka terbagi kurang lebih sama di antara Katolik dan Protestan. Ada juga banyak sekte religius. Banyak yang memiliki hubungan dengan Buddhisme dan beberapa memiliki beberapa juta anggota. Ada sangat sedikit Muslim.²



Gambar 19.2 Presentase Masyarakat Penganut Masing-Masing Agama

2. Sistem pendidikan di Jepang

Jepang termasuk negara dengan Pendidikan terbaik dunia hingga saat ini. Bahkan Jepang menjadi salah satu negara di Asia dengan system Pendidikan terbaik. Majunya bidang Pendidikan di Jepang terjadi setelah perombakan terhadap system Pendidikan melalui Restorasi Meiji.

² <http://factsanddetails.com/japan/cat16/sub182/item592.html> diakses pada tanggal 10 Desember 2020 jam 20:15.

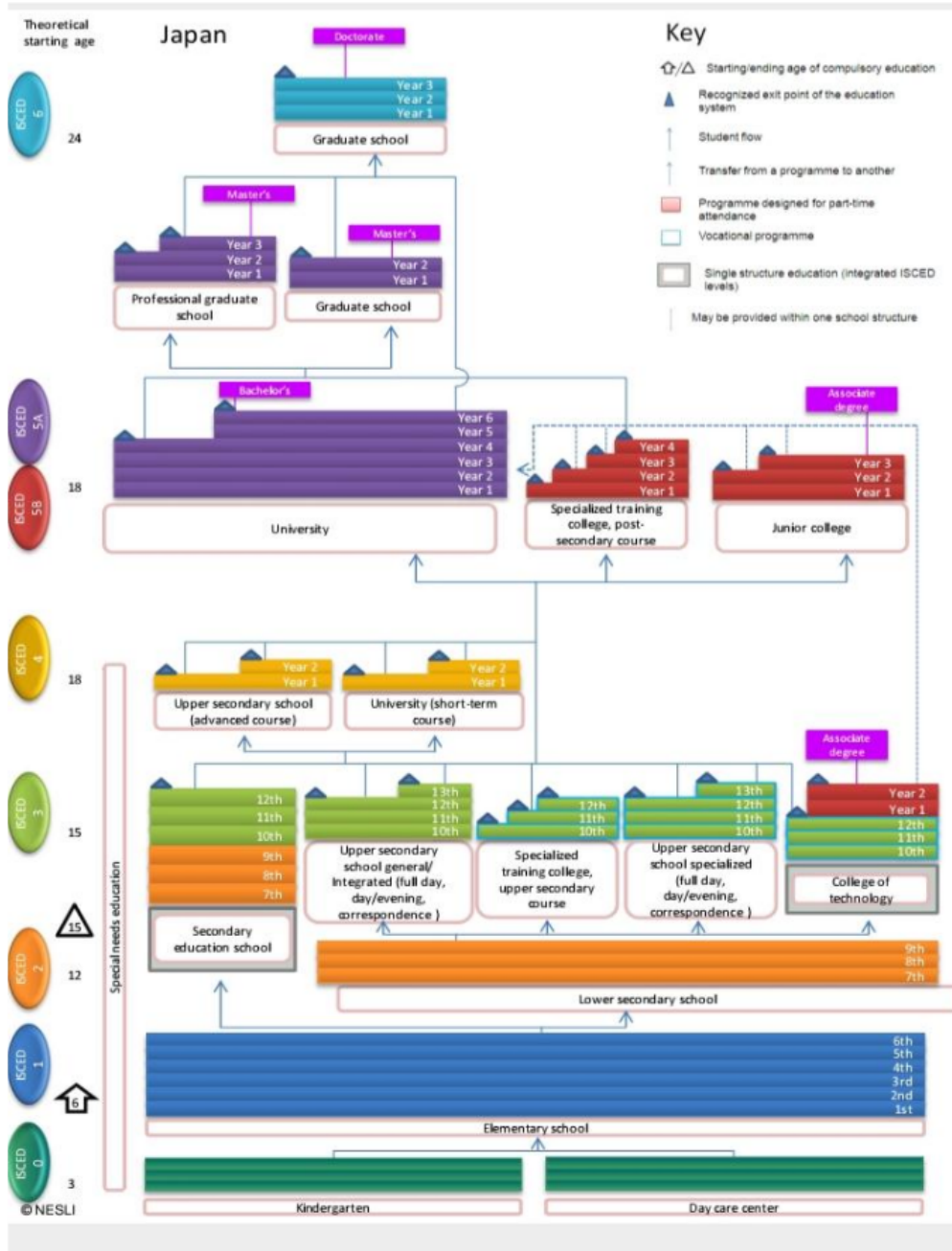


Gambar 19.3 Restorasi Meiji

Restorasi Meiji sekaligus menandai pealihan dari kepemimpinan rezim Tokugawa yang merupakan zaman kegelapan. Sejak saat itu, Jepang bangkit dengan Restorasi Meiji yang dipelopori oleh Kaisar Mutsuhito atau Meiji. Pada bulan Maret 1947, Peraturan Pendidikan Nasional Jepang (School Education Law) juga menetapkan susunan Pendidikan dasar.³ Structure of Japan's Education System⁴

³Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UPI Angkatan 2019, Kumpulan Artikel Pendidikan Guru di Dunia (Jakarta ; 2020) Pdf hlm 74-75.

⁴OECD 2012-13, Japan: overview of the education system'', OECD GPS, http://gpseducation.oecd.org/content/mapOfEducationSystem/JPN/JPN_1997EN.pdf diakses pada tanggal 20 Januari 2021 jam 22:10



Gambar 19.4 Sistem Pendidikan di Negara Jepang

Konstitusi Jepang menetapkan kebijakan pendidikan dasar nasional, sebagai berikut: "All people shall have the right to receive an equal education corresponding to their ability, as provided by law. The people shall be o

bligated to have all boys and girls under their protection receive ordinary education as provided for by law. Such compulsory education shall be free.". Dasar UU Pendidikan, yang diundangkan dan diberlakukan Maret 1947, menetapkan secara lebih rinci tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan sesuai dengan semangat

Konstitusi. Di dalamnya ditetapkan prinsip-prinsip tertentu nasional pendidikan: kesempatan yang sama, wajib belajar, pendidikan sekolah, pendidikan sosial, larangan pendidikan politik partisan, larangan pendidikan agama untuk agama tertentu di sekolah-sekolah umum nasional dan lokal dan larangan kontrol yang tidak tepat pendidikan.

Namun demikian, keadaan sekitar pendidikan telah banyak berubah dalam hal seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi canggih, internasionalisasi, penuaan masyarakat dengan jatuhnya angka kelahiran, dan gaya hidup keluarga. Pada saat yang sama, lingkungan sekitar anak-anak telah berubah secara signifikan, dan berbagai masalah telah. Mengingat keadaan seperti itu, Undang-Undang Dasar Pendidikan yang ada benar-benar direvisi dan revisi UU disahkan pada tanggal 15 Desember 2006. Revisi undang-undang jelas mengatur prinsip-prinsip pendidikan yang dianggap sangat penting saat ini sementara pada saat yang sama mewarisi prinsip-prinsip universal yang diatur dalam undang-undang sebelumnya.⁵

1) Kehidupan sekolah

Sekolah umum di Jepang memiliki kelas lima hari seminggu, dari Senin hingga Jumat. Ada juga sekolah yang mengadakan kelas pada hari Sabtu. Di sekolah menengah pertama dan atas, ada enam jam pelajaran setiap hari, biasanya berlangsung selama 50 menit. Setelah kelas selesai, siswa membersihkan ruang kelas secara bergiliran dan kemudian memulai kegiatan klub mereka. Ada berbagai klub seperti klub budaya dan olahraga.

2) Kalender akademik

Pada prinsipnya, tahun ajaran dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Maret tahun berikutnya. Sebagian besar sekolah menerapkan sistem tiga semester, dengan semester pertama dari April sampai Agustus, semester kedua dari September sampai Desember, dan semester ketiga dari Januari sampai Maret. Ada juga liburan musim panas (dari akhir Juli hingga akhir Agustus), liburan musim dingin (dari akhir Desember hingga awal Januari), dan liburan musim semi (dari akhir Maret hingga awal April).⁶

⁵Citra Kurniawan Wawasan Pendidikan : Studi Komparatif Sistem Pendidikan Di Beberapa Negara Maju (Korea Selatan dan Jepang) pdf hlm 12-13.

https://www.researchgate.net/publication/326119730_Wawasan_Pendidikan_Studi_Komparatif_Sistem_Pendidikan_di_Beberapa_Negara_Maju_Korea_Selatan_dan_Jepang

⁶ <https://education.jnto.go.jp/en/school-exchanges/japanese-education-system/#:~:text=The%20Japanese%20school%20system%20primarily,elementary%20and%20junior%20high%20school.>

An Example of Academic Calendar

	April	May	June	July	August	September
Two Semester System	- Matriculation Ceremony - Opening Ceremony - Orientation for new students - Health Check-Up	- School Field Trip	- Sports Day - Midterm Test for first semester		- Summer Break - Extracurricular Camp - Camp	- Final Test for first semester
Three Semester System	- Matriculation Ceremony - Opening Ceremony - Orientation for new students - Health Check-Up	- School Field Trip - Midterm Test for first semester	- Sports Day	- Final Test for first semester - Closing Ceremony for first semester	- Summer Break - Extracurricular Camp - Camp	- Opening Ceremony for second semester - Cultural Festival

	October	November	December	January	February	March
Two Semester System	- Autumn Break - Opening Ceremony for second semester - School Excursion		- Midterm Test for second semester		- Entrance Exams for private high schools	- Entrance Exams for private high schools - Graduation Ceremony
Three Semester System	- Midterm Test for second semester - School Excursion		- Final Test for second semester - Closing Ceremony for second semester	- Opening Ceremony for third semester	- Entrance Exams for private high schools	- Entrance Exams for private high schools - Graduation Ceremony

Gambar 19.5 Kalender Pendidikan Negara Cina

3. Jenjang Pendidikan

1) Pendidikan Sebelum bersekolah

Sebelum masuk SD, untuk itu anak yang belum masuk SD diberikan pendidikan taman kanak-kanak. Untuk taman kanak-kanak, anak yang berusia dari 3 tahun sampai berusia akan masuk SD. Ada sekolah TK swasta, negeri dan sekolah umum/public, TK private yang dilaksanakan menurut sistem pemerintah daerah, dan TK yang pelaksanaannya oleh instansi pendidikan. Tergantung dari TK swasta kemungkinan anak TK akan dapat bantuan subsidi dari pemerintah.

Identifikasi Taman Perawatan Pendidikan Anak Tempat TK dan Taman inderia (tempat penitipan anak) keduanya berfungsi sebagai, yang orang tuanya bekerja atau tidaknya memasukkan anaknya ke TK dan taman inderia. Dan dapat menerima konsultasi tentang perawatan anak untuk semua anggota keluarga. Di taman perawatan pendidikan anak ada 4 tipe/jenis seperti, taman perawatan pendidikan anak perhari, tipe Taman kanak-kanak, tipe taman inderia/penitipan anak dan tipe fasilitas izin perawatan pendidikan lainnya, setiap tipe masing-masing perlengkapan dan cara pelaksanaannya berbeda, sangat penting untuk mengetahui isi dan artinya.⁷

2) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

⁷<https://bukuonlinestore.com/sistem-pendidikan-di-jepang/Pdf>

Di Jepang kewajiban untuk menerima pendidikan adalah SD (6 tahun) dan SMP (3 tahun). Kehidupan di sekolah Jepang kegiatan dan belajarnya ada ketetapannya atau peraturannya. Untuk itu harap dimengerti dan agar merasa aman dan senang untuk melaksanakan kehidupan disekolah.

3) Usia Bersekolah

Usia bersekolah adalah usia yang cocok untuk masuk sekolah. Usia yang tepat masuk SD adalah berusia 6 tahun, untuk SMP berusia 12 tahun. Di sekolah Jepang ditentukan atau sesuai dengan umur untuk masuk sekolah.

Apabila anak yang berkewargaegaraan asing pindah sekolah ke Jepang tingkatan kelasnya disesuaikan dengan umur anak tersebut.

4) Biaya

Pada sekolah negeri dan sekolah negeri umum SD dan SMP biaya masuk sekolah, biaya pengajaran dan biaya buku cetak itu gratis, selain dari itu biaya yang ditanggung sendiri seperti; biaya bahan pengajaran, biaya peralatan sekolah, biaya makan siang disekolah, biaya piknik dan biaya seragam sekolah, pada sekolah swasta biaya yang ditanggung sendiri seperti; biaya masuk sekolah, biaya pengajaran dan lain sebagainya.

5) Proses Masuk Sekolah

Bila ingin memasukkan anak Anda ke sekolah negeri dan SMP negeri (daerah), pergilah ke kantor kelurahan di daerah tempat tinggal Anda bagian Lembaga Departemen Pendidikan, sampaikanlah keinginan Anda untuk memasukkan anak Anda ke sekolah Jepang, selanjutnya akan diberikan formulir pendaftaran sekolah (nyugaku shinsei sho), dan tulislah formulir tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan keluarkanlah atau berikan ke petugas yang menangani hal tersebut.

Untuk pendaftaran, diperlukan Kartu Penduduk (Zairyu Kado) atau Surat Keterangan Penduduk Permanen Khusus baik orang tua/wali maupun anak. Proses pendaftarannya dilakukan kapan saja. Bila ingin masuk ke sekolah Internasional, sekolah negeri atau swasta, daftarlh langsung ke sekolah tersebut. Bagi orang tua/wali yang telah mendaftarkan Kartu Registrasi Penduduk (Jumin Hyo) dan mempunyai anak yang umurnya sudah cukup untuk masuk SD pada tahun berikutnya, akan dikirim surat pengantar untuk masuk sekolah.

Di dalam surat pengantar tertulis tanggal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum masuk sekolah (syugaku mae kenko shindan). Apabila surat pengantar mulai bersekolah tidak datang, dan anak Anda akan menanjak usia 6 tahun, segerah hubungi pihak kantor kelurahan setempat di bagian Lembaga Departemen Pendidikan.

6) Proses Pendaftaran Pindah Sekolah (masuk Dipertengahan) Apabila ingin pindah sekolah SD dan SMP negeri, proses pindahannya melalui kantor kelurahan setempat. Setelah itu, ditentukan hari datangnya dan bersekolahlh ke sekolah yang telah ditentukan.

Pemasukkan sekolah atau kelasnya menurut usia anak tersebut, dan bila dalam keadaan kurangnya kecakapan berbahasa Jepang dapat juga belajar bahasa Jepang di kelas bawah, ketika ada kekhawatiran silahkan konsultasikanlah dan hubungi pihak kantor kelurahan bagian Lembaga Departemen Pendidikan.

Dan juga, apabila menginginkan untuk masuk ke sekolah Internasional negeri atau swasta, silahkan datang langsung ke sekolah tersebut.

- 7) Dikehidupan Sekolah (Apabila Anak Tidak Dapat Berbahasa Jepang)
Pada pengajarannya menggunakan bahasa Jepang. Di sana, banyak SD dan SMP yang membimbing pengajaran bahasa Jepang untuk anak yang kurang berbahasa Jepang. Agar dapat anak segera dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang berbahasa Jepang, menyelenggarakan pelaksanaan bantuan penasehat mengenai bantuan pengajaran bahasa Jepang dan tentang kehidupan sekolah, dan untuk itu apabila ada rasa kekhawatiran segeralah berkonsultasi kepada guru di sekolah.
- 8) Dikehidupan Sekolah (Kegiatannya)
Di sekolah terdapat bermacam kegiatan sekolah. Akan ada pemberitahuan sebelumnya mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Untuk segera dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah Jepang marilah mengikuti kegiatan di sekolah.
Kegiatan sekolah akan dijelaskan seperti berikut:
 - Festifal Olahraga (Undokai): Kegiatan beramah tamah lewat kegiatan olahraga yang dilaksanakan pada musim semi atau musim gugur pada hari libur. Tujuannya untuk keluarga dan anak.
 - Piknik (enshoku): Perjalanan pendek yang di tangani oleh guru yang dilaksanakan dengan cara pulang pergi dalam sehari.
 - Darma wisata (syugaku ryoko): Di utamakan untuk kelas yang tinggi, semua anak murid berwisata dengan menginap.
- 9) PTA
Di sekolah ada (PTA) atau POMG, perkumpulan antara orang tua dan guru. Berunding tentang masalah kegiatan sekolah untuk anak-anak antara orang tua dan para guru'
- 10) Penitipan Anak murid Setelah Pulang Sekolah (Club Anak Murid Sekolah, Club Anak-anak)
Untuk anak murid SD yang kelas rendah (kelas 1 - kelas 3) yang disiang hari di rumahnya tidak ada orang tuanya, ada tempat kehidupan setelah selesai sekolah, bermain dengan permainan yang pantas, aman dan ada juga club anak-anak (gakudo) untuk meningkatkan pendidikan.
- 11) Setelah Lulus SMP
Setelah lulus dari SMP untuk melanjutkan pendidikannya ada bermacam caranya seperti, masuk SMA, masuk sekolah menengah kejuruan atas, masuk sekolah kejuruan, atau masuk sekolah untuk mendapatkan pekerjaan seperti sekolah keterampilan dan pendidikan keahlian, atau juga sambil belajar di SMA dapat berkerja dengan sistem perwaktu dan belajar lewat pos.

12) Sekolah Menengah Atas

Sekolah tingkat atas biasanya disebut Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian sekitar 90% orang Jepang masuk Sekolah Menengah Atas. Sama halnya dengan SD dan SMP, ada 3 jenis sekolah yaitu, sekolah nasional (negeri) yang pelaksanaannya diatur oleh pemerintah, sekolah (negeri) umum/publik yang pelaksanaannya diatur oleh kabupaten Provinsi kantor kelurahan, dan sekolah swasta yang pelaksanaannya diatur oleh Lembaga Hukum Swasta.

- Masuk SMA negeri tergantung dari daerah tempat tinggalnya masuk sekolah yang di inginkan ada batasnya. dan selanjutnya, SMA adalah bukan tanggung jawab pendidikan wajib, biaya masuk, biaya pengajaran, biaya buku cetak dan lain-lain ditanggung sendiri.
- Untuk masuk SMA harus lulus dari ujian masuk SMA yang di inginkannya. Ada SMA yang dari wawancara masuk sekolah sistemnya mendapatkan rekomendasi agar dapat masuk sekolah yaitu, dilihat dari nilai angka terbaik murid atau mempunyai suatu keahlian tersendiri. Dan juga ada SMA yang mempunyai keistimewaan untuk orang asing dapat masuk sekolah, silahkan menghubungi pihak sekolah yang diinginkannya.
- Ijazah Di Jepang anak-anak mengharapkan untuk lulus SMP, dan juga, lulus SMP Jepang sama halnya dengan mempunyai pendidikan bersekolah, dan dapat ikut ujian masuk SMA. Dan bila mempunyai Ijazah lulus SMP di luar negeri sangat diperlukan.

Ujian Terakhir untuk SMP (cyugako sotsugyou teido nintei shiken) Ujian terakhir di SMP dari pemerintah untuk mengetahui kepandaian ilmunya ada atau tidaknya, bila orang yang lulus akan mendapatkan izin masuk SMA (ujian masuk). Orang yang berkewarganegaraan asing juga dapat mengikuti ujian masuk SMA (juken) tetapi dilihat dari usia sampai 31 Maret berumur 15 tahun keatas.

- Jenis SMA Berkonsultasilah dan memutuskan antara anak murid dan guru di SMP, tentang SMA mana yang dapat masuk dan bagian pelajaran yang mana dapat masuk.

Mata Pelajaran Beberapa perkumpulan mata pelajaran terbagi menjadi; mata pelajaran yang biasa, mata pelajaran kejuruan seperti (bagian tehnik mesin, bagian bisnis perdagangan, bagian industri pertanian,dll)

Kurikulum Tergantung dari bentuk waktu pengajaran, sistem waktu penuh, sistem waktu tertentu/part time dan sistim lewat pos. Sistim waktu penuh Belajar di siang hari. Jumlah penuntutan ilmu 3 tahun Sistim waktu tertentu Sambil bekerja, belajar pada waktu siang hari atau malam hari. Jumlah penuntutan ilmu 3 tahun dan Sistim lewat pos Belajar di rumah (setiap sebulan 2 kali ada screenings/pertemuan belajar).

13) Sekolah Lainnya

Selain sekolah menengah atas, ada jenis sekolah untuk menempuh pendidikan seperti; sekolah kejuruan yang pendidikannya untuk menjadi ahli tehnik, dan pendidikan yang dengan secara praktis mendapatkan pekerjaan,

pendidikan yang secara kursus kejuruan keteknikan yaitu sekolah kejuruan yang mengajarkan tentang desain baju Jepang dan barat, pembukuan, perhitungan dengan sipoa, maintenance/perengkapan mobil, ahli masak dan ahli gizi, salon kecantikan, perawatan kecantikan, komputer, percakapan bahasa Inggris, Industri dan lain sebagainya.

14) Universitas dan Kuliah Jangka Pendek

Untuk orang yang telah lulus SMA atau yang mempunyai kepandaian yang sama dengan SMA, dapat masuk universitas dan kuliah jangka pendek.

Arti dari Universitas dan Kuliah

Singkat Perguruan tinggi/universitas dan kuliah jangka pendek, perguruan tinggi negeri yang pelaksanaannya diatur oleh pemerintah, universitas umum/public yang pelaksanaannya diatur oleh daerah provinsi dan selanjutnya Universitas swasta yang diatur oleh instansi koorperasian. Dan ada juga sekolah yang di atur oleh perusahaan perseroan. Kuliah jangka waktu pendek secara umum disebut kuliah kursus atau “Tandai”. Menempuh pendidikan belajar untuk universitas selama 4 tahun dan untuk kuliah jangka pendek 2 tahun lamanya.

Untuk Masuk Universitas Harus mengikuti ujian masuk universitas baik Universitas ataupun kuliah jangka pendek, ada juga yang menggunakan sistem rekomendasi. Dan juga, biaya sekolah dan persyaratan masuk Universitas tergantung dari setiap universitas tersebut, untuk itu hubungilah langsung ke tempat universitas yang Anda inginkan.

Ijasah Secara dasarnya, siapa saja dapat mengikuti ujian masuk universitas, seperti persyaratan yang dibawah ini. : Lulus dari SMA Jepang atau SMA luar negeri Telah lulus ujian akhir di SMA (lulus ujian koto gakko sotsugyo teido nintei shiken), Mempunyai ijasah lulusan Diploma dll, dan sampai pada saat masuk sekolah 1 April tepat berumur 18 tahun.

Ujian masuk Universitas negeri dan nasional/umum, semuanya harus mengikuti ujian dengan 2 tahap yaitu tahap 1 (ujian dari pusat) senta shiken dan tahap 2 ujian yang dilakukan di masing-masing universitas 2 ji shiken. Di universitas swasta ujian masuknya dilaksanakan di masing-masing universitas, ujiannya berupa kurikulum mata kuliah dan acara harian.

Ujian Masuk Universitas Jepang untuk Orang Asing Ujian masuk kuliah di Jepang atau (nihon ryugaku shiken), ujian kecakapan berbahasa Jepang atau ujian untuk mengetahui sebagaimana kepandaian yang dimilikinya dan ujian ini dibutuhkan untuk orang asing yang ingin masuk universitas di Jepang. Untuk orang asing yang ingin mengikuti ujian masuk universitas dapat dilihat di home page JASSO (Japan Student Services Organization)

badan organisasi pelayanan mahasiswa Jepang/asing. Untuk lebih jelasnya hubungi JASSO.

15) Sekolah Internasional

Di Jepang terdapat sekolah yang pengajarannya memakai bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Korea Utara dan orang asing dapat masuk sekolah tersebut. Banyaknya sekolah Internasional di Jepang di dalam mata pelajarannya diharuskan mempelajari bahasa Jepang, karena setelah lulus dari sekolah Internasional dan ingin masuk ke universitas Jepang ada universitas yang tidak mau menerima lulusan dari sekolah Internasional. Tetapi tergantung dari sekolah Internasional tersebut bila lulus dari sekolah dapat mengikuti ujian masuk universitas dan post graduate course, tanyakanlah dan hubungi di masing-masing sekolah Internasioanal tersebut.

4. Bantuan Sokongan

Di Jepang ada sistem mendapatkan beasiswa sekolah dan bantuan kelonggaran biaya sekolah untuk anak di mana di keluarganya perekonomiannya mengalami kesusahan.

1) Bantuan Kelonggaran Biaya Sekolah

Bantuan bersekolah untuk siswa SD Orang tua yang mempunyai anak di SD dan SMP, dan kesulitan untuk menyekolahkan anaknya, ada sistem bantuan untuk biaya bersekolah. Biaya sekolah lainnya adalah ongkos transportasi kesekolah, biaya study tour, biaya darma wisata, biaya makan siang di sekolah dan biaya kesulitan lainnya, berkonsultasilah ke Lembaga Departemen Pendidikan. Tetapi bila ingin mendapatkannya harus memperlihatkan income Anda dan ada batasnya. Dan juga, bila anak bersekolah di sekolah Internasional dan orang tuanya berkewarganegaran asing, ada juga yang mendapatkan bantuan subsidi. Untuk mengetagui lebih lanjut hubungi ke Kantor Kelurahan kota/kecamatan/desa tempat tinggal Anda.

Sistem bantuan bersekolah/beasiswa untuk bersekolah di sekolah tinggi dan lain-lain untuk siswa SMA Akan mendapatkan bantuan dari negeri sebagai bantuan beasiswa untuk bersekolah di sekolah tinggi dan lain lain untuk biaya pelajaran, untuk sekolah negeri/umun/swasta (ada persyaratan untuk mendapatkan beasiswa). Dan juga, jika bersekolah di sekolah swasta, ada tambahan sesuai dengan pendapatan/income. Tidak perlu mengembalikan beasiswa tersebut. Akan dibagikan formulir untuk pendaftaran dari sekolah. Pemberian beasiswa untuk siswa SMA dan lain-lain Sistem untuk rumah tangga yang kurang mampu dan membantu biaya sekolah selain biaya pelajaran (biaya buku pelajaran, biaya bahan/materi pelajaran, biaya untuk barang-barang yang diperlukan di sekolah dan lain-lain). Tidak perlu mengembalikan beasiswa tersebut. Prosesnya mengajukan permohonan di kantor prefektur masing-masing. Selanjutnya silahkan hubungi ke kantor

prefektur tempat tinggal Anda, karena detail untuk sistemnya berbeda-beda, tergantung tempatnya.

2) Beasiswa

Beasiswa untuk murid SMA Untuk murid yang bersekolah di SMA dan di sekolah menengah kejuruan atas, dan mempunyai minat untuk bersekolah akan tetapi karena kesulitan dalam perekonomian ada sistim penerimaan beasiswa dari pemerintahan daerah provinsi. Untuk mendapatkan beasiswa ada persyaratannya ,jumlah penerimaannya, penjelasan secara konkrit tentang beasiswa dan semua ini tergantung dari pemerintah daerah propinsi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut sebaiknya hubungi tempat Anda bersekolah.

Beasiswa untuk Mahasiswa Universitas, Kuliah Jangka pendek, Sekolah Kejuruan dll. Sistem penerimaan beasiswa untuk mahasiswa universitas, kuliah jangka pendek, dan sekolah kejuruan adalah dari instansi bantuan untuk mahasiswa Jepang atau JASSO. Jumlah penerimaan beasiswanya tergantung dari persyaratan setiap mahasiswa. Ada 2 jenis beasiswa yaitu; tidak ada bunganya/risi dan ada risinya. Untuk mengetahui lebih lanjut hubungi sekolah anda di loket bagian beasiswa.

Beasiswa untuk Mahasiswa Asing Sistem penerimaan beasiswa untuk mahasiswa asing adalah dari pemerintahan Jepang (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), beasiswa dari JASSO, beasiswa dari pemerintah daerah provinsi dan organisasi perkumpulan pertukaran Internasional dan lain-lain. Sistem tersebut dapat dilihat di pangflet/brosur untuk beasiswa mahasiswa yang diterbitkan oleh JASSO.⁸

5. Pendidikan Agama di Jepang

Di Jepang pendidikan Agama biasanya dibagi menjadi tiga kategori: pendidikan tentang pengetahuan tentang Agama atau pengetahuan Agama; penanaman sentimen religius; dan pendidikan pengakuan. Pendidikan tentang ilmu agama bisa diajarkan di sekolah umum, sedangkan pendidikan pengakuan dilarang. Ada diskusi ekstensif tentang penanaman sentimen Agama sejak periode pasca perang. Beberapa bersikeras bahwa itu harus diajarkan bahkan di dalam sekolah umum. Yang lain sangat menentang pandangan ini terutama karena konsekuensi negatif yang dirasakan dari penerapan Shinto negara selama periode sebelum perang ketika Negara dan Agama (Kuil Shinto) terikat erat. Undang-Undang Dasar Pendidikan direvisi pada Desember 2006, segera setelah pelantikan kabinet Abe Shinzo. Artikel tentang pendidikan agama dimoderasi sedikit dengan 'pembelajaran umum tentang Agama' ditambahkan ke bahasa undang-undang. Namun, karena masyarakat Jepang cenderung menghindari diskusi mengenai pendidikan

⁸ http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/brochure.html diakses pada tanggal 20 januari 2021 jam 23:12.

Agama di masa pasca perang, kemungkinan akan cukup sulit untuk membuat rencana pendidikan baru berdasarkan posisi yang sudah mengakar, terutama yang berkaitan dengan penanaman sentimen agama. Ide tentang 'pendidikan budaya religius' telah diperkenalkan baru-baru ini sebagai cara yang mungkin untuk mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya Agama Jepang dan Asing⁹.

6. Tujuan-tujuan yang menjadi target yang ingin dicapai pendidikan Jepang yaitu :

- 1) Mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh.
- 2) Berusaha keras mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik pikiran maupun jasmani.
- 3) Mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran.
- 4) Setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya.
- 5) Setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja.
- 6) Pengembangan sikap bertanggungjawab terhadap setiap pembebanan pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing.
- 7) Meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun Negara dan menjaga perdamaian dunia.

Namun tujuan pendidikan Jepang lebih mengarah pada pengembangan kepribadian individu secara utuh, menanamkan jiwa yang bebas dan bertanggungjawab, bertoleransi untuk menghargai antar individu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip pendidikan yang ada di Negara Jepang lebih bersifat humanis berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan ilmunya benar-benar real dapat diaplikasikan dan dibutuhkan di kehidupan nyata

7. Faktor Berhasilnya Sistem Pendidikan di Jepang

Pendidikan di Jepang adalah wajib di tingkat dasar dan menengah pertama. Sebagian besar siswa bersekolah di sekolah negeri sampai tingkat menengah pertama, tetapi pendidikan swasta populer di tingkat menengah atas dan universitas. Pendidikan sebelum sekolah dasar disediakan di taman kanak-kanak dan pusat penitipan anak. Program untuk anak usia 3–5 tahun mirip dengan program di taman kanak-kanak. Pendekatan pendidikan di taman kanak-kanak sangat bervariasi dari lingkungan tidak terstruktur yang menekankan pada permainan hingga lingkungan yang sangat terstruktur yang berfokus agar anak lulus ujian masuk di sekolah dasar swasta. Tahun ajaran dimulai dari April dan

⁹ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1749-8171.2009.00159.x> diakses pada tanggal 24 januari 2021 jam 21: 03

berakhir pada Maret, libur musim panas pada Agustus dan liburan musim dingin pada akhir Desember hingga awal Januari.

Siswa Jepang secara konsisten mendapat peringkat tinggi di antara siswa OECD dalam hal kualitas dan kinerja dalam literasi membaca, matematika, dan sains. Ini adalah salah satu negara OECD dengan kinerja terbaik dalam literasi membaca, matematika dan sains pada tes Program for International Student Assessment dengan nilai siswa rata-rata 528,7, dibandingkan dengan rata-rata OECD 493, menempatkannya ketiga di dunia pada peringkat 2015. Penduduk Jepang berpendidikan tinggi dan masyarakatnya sangat menghargai pendidikan sebagai platform untuk mobilitas sosial ekonomi dan untuk mendapatkan pekerjaan di ekonomi teknologi tinggi Negara tersebut. Kumpulan besar individu yang berpendidikan tinggi dan terampil di Negara ini sebagian besar bertanggungjawab untuk mengantarkan pertumbuhan ekonomi Jepang pasca perang. Orang dewasa berpendidikan tersier di Jepang, terutama lulusan sains dan teknik, mendapatkan keuntungan ekonomi dan sosial dari pendidikan dan keterampilan mereka dalam ekonomi teknologi tinggi Negara itu kemudian pengeluaran untuk pendidikan sebagai proporsi dari PDB adalah 4,1 persen, di bawah rata-rata OECD sebesar 5 persen. Meskipun pengeluaran per siswa relatif tinggi di Jepang, total pengeluaran relatif terhadap PDB tetap kecil. Pada tahun 2017, Negara ini menduduki peringkat ketiga untuk persentase usia 25 hingga 64 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dengan 51 persen. Selain itu, 60,4 persen orang Jepang berusia 25 hingga 34 tahun telah memperoleh pendidikan tersier dan gelar sarjana dimiliki oleh 30,2 persen orang Jepang berusia 25 hingga 64 tahun, yang terbanyak kedua di OECD setelah Korea Selatan. Karena ekonomi Jepang sebagian besar berbasis sains dan teknologi, pasar tenaga kerja menuntut orang-orang yang telah mencapai pendidikan tinggi, terutama yang terkait dengan sains dan teknik untuk mendapatkan keunggulan kompetitif saat mencari peluang kerja. Menurut MEXT, persentase orang Jepang yang melanjutkan ke institusi pendidikan tinggi mana pun dalam kelompok berusia delapan belas tahun adalah 80,6 persen, dengan 52,6 persen siswa melanjutkan ke universitas, 4,7 persen ke perguruan tinggi junior, 0,9 persen ke perguruan tinggi teknologi dan 22,4 persen sisanya menghadiri sekolah korespondensi, University of the Air atau perguruan tinggi pelatihan khusus. Sistem pendidikan Jepang memainkan peran sentral dalam pemulihan Jepang dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade setelah berakhirnya Perang Dunia II¹⁰.

Jepang merupakan Negara yang saat ini sudah mencapai kesuksesan. Negara maju tepatnya. Pendidikan yang baik menjadi salah satu penyebab dari kesuksesan ini. Maka dari itu, pemerintah sangat memperhatikan perkembangan pendidikan di Jepang dan rutinitas para pelajar sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Mengenai pilihan SD dan SMP tidak dipilih secara pribadi. Para orang

¹⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Japan diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pada jam 23 : 13

tua hanya bertugas mendaftarkan nama anak-anak mereka ke Balai Kota setempat. Selanjutnya, pemerintah akan mempertimbangkan ke sekolah terdekat untuk si anak. Dengan begini, sekolah yang mendapat status favorit tidak ada. Mungkin pemilihan sekolah dari pemerintah inilah yang paling membedakan antara sekolah di Jepang dengan sekolah di Indonesia.

Sistem pendidikan di Jepang tidak mengharuskan siswanya mengadakan upacara bendera tiap pekan. Namun hal ini tidak mengurangi rasa nasionalisme para siswa di Negeri Sakura tersebut. Kendaraan yang biasa mereka pakai untuk pulang-pergi sekolah biasanya adalah sepeda bahkan sebagian juga ada yang berjalan kaki. Jepang tidak memperbolehkan mereka menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Jarak jauh yang mereka tempuh menuju sekolah tidak menjadi alasan bagi mereka untuk bermalas-malasan, asalkan sekolah bagus (untuk SMA dan perguruan tinggi), prestasi juga oke. Bel sekolah dibunyikan pukul 08.00 atau bahkan hampir menginjak pukul 09.00 sebagai waktu untuk berangkat menuju sekolah. Tidak heran, beberapa dari mereka tertidur saat jam pelajaran karena perjalanan panjang.

Kendaraan umum seperti bus dan kereta api dapat menjadi solusi atas jauhnya jarak tempuh itu. Menaiki kendaraan umum tidak selalu rugi yang didapatkan. Mereka dapat berkomunikasi dengan siswa dari sekolah lain, berbagi pengalaman, dan banyak belajar dari komunikasi singkat tersebut.

Dalam sistem pembelajaran, ada pula festival budaya atau disebut juga sebagai Bunkasai yang merupakan festival yang cukup terkenal. Bunkasai diadakan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk waktu penyelenggaraan, umumnya disesuaikan dengan hari jadi sekolah yang bersangkutan. Bunkasai diadakan dengan tujuan agar para siswa dapat menampilkan kemampuan mereka dalam berkreatifitas. Dalam acara Bunkasai, para siswa bebas menentukan apa yang akan mereka tampilkan atau jual. Yang sering ada dalam festival rutin tahunan ini antara lain Rumah Hantu, Rumah Peramal, Cafe Maid, dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Awalnya, festival budaya atau Bunkasai ditujukan sebagai media pembelajaran, namun lama-kelamaan berubah menjadi tempat rekreasi. Meskipun begitu, tujuan utama tidak hilang begitu saja, karena para siswa mendapatkan pembelajaran ketika membuat suatu kegiatan bersama teman-teman sekelasnya.

Jepang terkenal sebagai negara dengan teknologi canggih. Namun, saat kegiatan belajar-mengajar berlangsung, pendidikan di Jepang melarang keras para siswanya untuk memainkan gadget yang mereka miliki. Peraturan itu dibuat untuk kefokusannya dalam kegiatan belajar-mengajar, presentase kecurangan siswa saat menjalani ujian sekolah juga dapat menurun. Bukan hanya itu, peraturan itu juga meniadakan kelas sosial antara yang kaya dengan yang berkecukupan. Dengan begitu, mereka dapat percaya diri dalam bergaul dan berkomunikasi baik dengan siapapun.

Faktor lain majunya Negara Jepang adalah waktu belajar yang gilagilaan. Rata-rata kegiatan belajar-mengajar di Jepang memakan waktu sekitar

tujuh jam, dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Selepas selesai sekolah, masih banyak siswa yang mengikuti kursus tambahan. Bahkan beberapa dari mereka melakukan pekerjaan paruh waktu. Ditambah pula pekerjaan rumah yang harus mereka tuntaskan. Maka dari itu, tidak heran banyak dari mereka baru tidur pukul 11 malam atau bahkan lebih dari itu dan harus bangun pukul 5 pagi, bersiap-siap, dan berangkat sekolah lagi pukul 6 pagi atau lebih.

Para siswa disana juga tertib. Walaupun waktu terus bergulir, mereka tetap patuh akan budaya. Sebagai contoh, sebelum masuk kelas, mereka melepas sepatu yang dikenakan dari rumah sampai ke sekolah, menaruhnya di loker yang tersedia, dan memakai sepatu khusus untuk di dalam kelas. Mereka juga memberi salam dan membungkuk kepada guru di depan sebelum pelajaran dimulai.

Mengenai kebersihan sekolah, mereka juga memperhatikannya. Sekolah-sekolah dari beberapa negara seperti Indonesia pada umumnya memiliki petugas kebersihan masing-masing. Namun tidak pada Jepang. Para siswa-lah yang bertanggung-jawab atas kebersihan sekolah tersebut dengan membagi jadwal piket. Para guru dan semua pihak sekolah juga ikut turun tangan. Dengan begitu, akan menumbuhkan kerja sama tim yang kompak dan juga hubungan baik sesama warga sekolah.

Makanan bergizi. Hal itu juga perlu diperhatikan. Karena dengan makanan bergizi, akan berpengaruh dengan kecerdasan anak. Sangat jarang siswa di Jepang membeli makanan di luar. Kebanyakan dari mereka membawa bekal dari rumah. Bahkan di beberapa sekolah menyediakan menu makanan dengan standar gizi yang baik¹¹

Para siswa di Jepang biasanya mengikuti ujian ketika sudah masuk kelas 4 SD. Pada tiga tahun pertama masuk sekolah, anak-anak difokuskan belajar tata krama, sikap menghormati orang lain, kejujuran, berbicara sopan, dan keadilan terhadap sesama. Pada saat itu, tidak ada penilaian dari ilmu pengetahuan yang mereka miliki.¹²

Sekarang Jepang sudah menjadi negara maju. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) tidak membatasi ruang gerak masyarakat Jepang untuk membangun bangsa. Artinya, para pemimpin dan para elit di Jepang telah mengawali untuk menumbuhkan kesadaran masyarakatnya akan arti penting kualitas sumber daya manusia sebagai modal sosial bangsa untuk membangun Negara yang maju.

Suatu bangsa yang mempunyai keterbatasan SDA dan kondisi SDM yang belum baik, namun karena mempunyai jiwa dan karakter tertentu akan mampu menjadi bangsa yang unggul.

Secara umum, Jepang telah membuktikan secara nyata. Masyarakat Jepang sangat menyadari akan pentingnya landasan dan pendidikan karakter yang baik bagi manusia dan masyarakat. Sehingga hasil dari pendidikan di

¹¹ <https://bukuonlinestore.com/sistem-pendidikan-di-jepang/> Pdf

¹² Ibid

Jepang adalah keunggulan karakter karakter yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.¹³

Pola Budaya Pendidikan di Jepang Dalam budaya pendidikan di Jepang dikenal dengan istilah Kyoiku Mama (Ibu Pendidik), artinya seorang Ibu tidak akan pernah berhenti mendorong anak - anaknya untuk belajar sekaligus menciptakan keseimbangan pendidikan yang baik dalam hal fisik, emosional, maupun sosial. Istilah Ryosai Kentro (istri yang baik dan ibu yang arif) menggambarkan suatu kebijakan budaya yang memposisikan kaum wanita sebagai 'penguasa rumah' yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi di rumah. Mulai dari pekerjaan - pekerjaan rumah tangga, masalah keuangan, dan pendidikan anak.

Intinya menyerukan bahwa peran terhormat wanita adalah sebagai istri yang baik dan bijaksana, pembagian peran alami sesuai fitrah antara perempuan dan laki laki. Orang-orang Jepang sejak berada di sekolah sudah ditanamkan nilai-nilai yang membuat mereka melakukan hal baik sejak dini. Masyarakat Jepang sangat menyadari akan pentingnya landasan dan pendidikan karakter yang baik bagi manusia dan masyarakat. Sehingga hasil dari pendidikan di Jepang adalah keunggulan karakterkarakter yang tidak dimiliki oleh bangsa lain¹⁴.

Pola budaya pendidikan di lingkungan keluarga ini menjadi basis sistem budaya pendidikan di Jepang. Mengapa hasil anak didik dari hasil pendidikan di Jepang memiliki karakter yang kuat, karena sistem pendidikan di Jepang berbasis pada budaya pendidikan keluarga, bisa disebut "The Education System in Japan based on family education" Pendidikan di Jepang menjunjung tinggi pendidikan moral yang berakar dari budaya leluhur masyarakat Jepang yang sarat dengan nilai-nilai kecintaan dengan sesama. Masyarakat Jepang sangat menyadari akan pentingnya landasan dan pendidikan karakter yang baik bagi manusia dan masyarakat¹⁵.

Belajar sopan santun sejak masih kecil lebih penting daripada belajar nilai pengetahuan Di berbagai Negara, seringkali mereka berlomba-lomba untuk mendidik siswa mereka (bahkan sejak kelas 1 SD).

8. Peran Guru Dalam Sistem Pendidikan di Jepang

Guru Jepang bertugas lima hari seminggu, sama dengan guru Indonesia. Namun dalam banyak kasus, mereka sering pergi ke sekolah selama liburan musim panas, musim dingin dan musim semi. Hak cuti hanya diambil beberapa hari jika mereka bisa. Mereka mengajar lebih sedikit daripada guru Amerika, tetapi menghabiskan lebih banyak waktu untuk urusan administrasi dan urusan ekstrakurikuler. Sebagian besar guru melaporkan bahwa mereka kelelahan karena beban kerja yang berat.

¹³ <http://yana.staf.upi.edu/2017/01/06/mengena-l-sistem-pendidikan-jepang/>

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

Rata-rata guru Jepang bekerja 55 jam seminggu, 11 jam lebih banyak dari yang dibutuhkan 44. Rata-rata, guru menghabiskan 10 jam dan 36 menit sehari di sekolah, tiba di sekolah pukul 7:49 pagi dan pulang pada 16:25 sore.

Soal kesibukan, lebih dari 90 persen guru Jepang melaporkan bahwa mereka “sibuk” atau “sangat sibuk.” Guru sekolah dasar dan menengah menghabiskan banyak waktu untuk urusan administrasi, acara sekolah, pertemuan, dan klub ekstrakurikuler. Banyak guru berpikir bahwa mengajar membutuhkan pengorbanan diri, dedikasi dan semuanya menimbulkan tekanan (stres). Mereka juga merasa bahwa mereka layak mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan rasa hormat dari masyarakat. Namun di atas itu semua, mayoritas guru Jepang menyatakan bahwa mereka senang menghabiskan waktu bersama anak-anak.

Para guru di Jepang sangat sibuk mempersiapkan pelajaran, menilai ujian, dan mengawasi kegiatan ekstrakurikuler. Satu survei menemukan bahwa beban pekerjaan guru Jepang lebih besar daripada guru di Negara lain. Sebaliknya guru-guru di Finlandia lebih banyak menghabiskan waktu “berkomunikasi dengan orang tua” dan “memberikan pelajaran tambahan setelah” sekolah.

Dalam banyak sekolah, guru melakukan kunjungan pribadi ke rumah masing-masing siswa untuk hanya sekedar mengobrol dan mengenal orang tua. Saat liburan dimanfaatkan guru menghadiri seminar-seminar atau mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan umum dan keterampilan profesional mereka. Peningkatan kualitas dan sertifikasi menjadi penting karena undang-undang pendidikan baru yang disahkan pada Juni 2007 mengharuskan guru untuk memperbaharui lisensi mereka setiap 10 tahun. Lisensi diperoleh setelah lulus tes tertulis dan mengikuti 30 jam pelatihan. Sistem ini mulai berlaku pada tahun 2009. Lisensi guru berlaku seumur hidup.

Di Jepang usia pensiun guru adalah 60 tahun. Uang pensiun mereka besar, sekitar USD 62.000 (setara Rp 868 juta) per tahun, lebih tinggi di banding guru pensiunan di Amerika yang menerima USD 53.000 (Rp 742 juta).

Terlepas dari semua ini, nilai tes global yang sangat penting itu telah tergelincir: Jepang menduduki peringkat matematika di seluruh dunia pada tahun 2000, tetapi turun ke urutan ke-6 pada tahun 2006: masih jauh lebih unggul daripada AS yang berada di nomor 25.

Apa yang tidak berubah di Jepang adalah nilai yang diberikan pada pendidikan yang disimpulkan oleh pepatah Jepang: Ada peribahasa kuno Jepang yang mengatakan: “Sehari diajar guru hebat lebih baik daripada ribuan hari belajar sendiri.” Guru mendapat tempat terhormat dalam peradaban Jepang. Sejak zaman dulu sampai sekarang.

Hal pertama yang dilakukan anak-anak Jepang di pagi hari ketika di sekolah adalah menundukkan diri pada guru-guru mereka. Ini gerakan kecil yang mengatakan banyak hal. Penghormatan kepada guru ditanam kuat dari generasi ke generasi.

Di sini rasa hormat bukan sekadar *lip services* atau hanya jadi jargon. Penghormatan kepada guru benar-benar nyata di masyarakat Jepang. Penghormatan kepada guru adalah tulang punggung sistem sekolah Jepang, yang selama beberapa dekade telah menduduki peringkat atas dunia. Padahal rasio anggaran pendidikannya terbilang rendah dibanding negara-negara demokrasi lain; hanya 3,3 persen dari produk domestik bruto.

Bagaimana mereka melakukan begitu banyak hal dengan sedikit anggaran? Dengan berinvestasi untuk menghasilkan guru-guru berkualitas dan hebat.

Para guru dan administrator sekolah sangat dihargai di Jepang. Profesi guru mendapat penghargaan besar, setara dengan profesor dan dokter. Penghasilan guru benar-benar dijamin negara, bahkan lebih tinggi nilainya dibanding posisi yang setara di sektor swasta dan layanan sipil (pegawai negara sipil). Singkat kata pekerjaan mengajar di Negeri ini menjamin penghasilan seumur hidup dan mendapat prestise yang tinggi masyarakatnya.

Guru-guru di Jepang diperlakukan dengan lebih hormat dibanding negara-negara lain. Mereka disapa dengan “*sensei*”, artinya kehormatan, sebuah istilah yang juga digunakan ketika berbicara kepada dokter atau kepada anggota parlemen.

Mayoritas guru Jepang adalah sarjana lulusan perguruan tinggi dengan gelar sarjana. Dan jumlah guru dengan gelar magister belakangan makin meningkat.

Guru mendapat respek yang sangat baik. Itu karena di pundak mereka diharapkan mengabdikan seluruh hidup mereka. Seluruh sistem diatur untuk menekankan pengembangan guru. Guru ditugasi mengubah anak-anak menjadi warga Negara teladan. Jika seorang siswa ketahuan mengutil, misalnya, si guru lebih dulu kena peringatan sebelum orang tuanya. Guru lebih dulu bertanggungjawab atas ulah anak didiknya. Para guru sangat dihormati sehingga mereka sering dihubungi pertama kali oleh polisi jika ada seorang siswa bermasalah dengan hukum. Baru kemudian polisi menghubungi orang tua siswa tersebut.

Di dalam kelas, anak-anak belajar tanggungjawab. Membuka sepatu dan mengganti sandal di pintu masuk kelas, membersihkan gedung sendiri. Saat makan siang, anak-anak bergiliran membagikan makanan kepada teman sekelas dan gurunya. Tidak ada yang mengunyah lebih dulu sampai semua orang dilayani.

Satu guru di Jepang mengajar hampir semuanya, mulai dari tata krama meja hingga trigonometri, membutuhkan waktu. Semuanya dicatat untuk kemudian diperbandingkan satu guru dengan lainnya secara periodik. Meja mereka bahkan dikelompokkan bersama dalam satu ruangan. Pendidik di sana 60 persen waktunya dihabiskan dengan siswa dan 40 persen diisi dengan

interaksi bersama guru-guru lain, utamanya menambah pengetahuan dan teknik bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.¹⁶

Kualifikasi Guru Guru-guru sekolah dasar dan sekolah menengah di Jepang dididik dan dilatih oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi, seperti universitas (daigaku) dan junior college (junior daigaku) yang dipilih oleh kementerian Pendidikan. Untuk menjadi pengajar sekolah dasar atau sekolah menengah negeri seorang calon harus mengikuti sistem rekrutmen.

Pengangkatan dilakukan oleh dewan pendidikan distrik. Pengangkatan dilakukan atas dasar rekomendasi superinden distrik berdasarkan hasil ujian rekrutmen. Sertifikat mengajar untuk sekolah dasar hanya membolehkan guru mengajar pada sekolah dasar untuk seluruh mata pelajaran. Demikian juga guru yang memperoleh sertifikat mengajar untuk sekolah menengah hanya boleh mengajar di sekolah menengah dan membolehkan mereka mengajar hanya pada satu mata pelajaran saja. Untuk mendapatkan tugas tambahan seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah harus mengikuti serangkaian ujian dan menyelesaikan "inservice training" khusus. Guru-guru di Jepang memiliki tingkat profesional yang lebih baik di dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Guru-guru di Jepang dapat diberikan sanksi oleh sesama rekan profesi jika tidak menjalankan profesinya dengan baik Sejalan dengan kualitas dan profesionalitas yang tinggi. Gaji guru di Jepang sangat memadai, sehingga guru guru di Jepang sangat dihormati dan mendapat tempat. Guru guru di Jepang mendapatkan gaji 1,77 kali gaji pegawai perusahaan dan merupakan gaji tertinggi di negara asia. Data yang dikutip dari buku Education at a Glance-nya OECD (Japan) menyebutkan bahwa seorang guru yang baru mengajar akan memperoleh 156,500 yen per bulan atau sekita 12 juta rupiah. Guru yang telah bekerja selama 20 tahun akan memperoleh gaji sebesar 362,900 yen atau setara dengan Rp 27,324,555 rupiah per bulan. Selain medapatkan gaji bulanan guru juga memperoleh pendapatan tambahan (adjsument allowance) sebesar 4% gaji bulanan. Bonus juga akan didapatkan 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember sebesar 4.65% gaji bulanan. Sehingga guru yang bekerja selama 20 tahun akan menerima total penghasilan per bulan sebesar 362,900 plus $(362,900 \times 4\%) = 377,416$ yen. Dan akan menerima gaji per tahun sebesar $362,900 \times 12$ ditambah $(362,900 \times 4\% \times 12)$ dan bonus $(363,900 \times 4.65\% \times 2)$ sehingga total pendapatan 4,562,741.7 yen atau sekitar Rp342.205.627.500. Dengan gaji sebesar itu guru di Jepang tidak diperbolehkan melakukan kerja sambilan.¹⁷

¹⁶<https://www.sahabatguru.com/2020/09/05/jepang-unggul-karena-menghargai-guru/>
diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pada jam 13 : 25

¹⁷https://d1wqtxtslxzle7.cloudfront.net/62211396/PENDIDIKAN_GURU_DI_JEPANG_siti_logayah-dikonversi20200226-21821-18dsto8.pdf?1582789521=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPENDIDIKAN_GURU_DI_JEPANG Diakses pada tanggal 14 november 2020 pada jam 20:46.

C. SIMPULAN

Keberhasilan Jepang dalam dunia pendidikan telah mengantarkannya kedalam kesuksesan di dunia internasional dan diakui sebagai negara yang maju. Di Jepang sangat terkenal dengan kecanggihan teknologinya namun hebatnya mereka tidak menggunakan teknologi tersebut ketika mereka sedang belajar, dan yang lebih menarik disini adalah sistem pendidikannya lebih mengutamakan dan menghormati adab dan perilaku yang baik daripada nilai-nilai lainnya. Fokus mengajarkan adab kepada anak-anak di kelas bawah lebih penting daripada menguji kemampuan akademis. Walaupun di Jepang tidak ada kurikulum pendidikan agama. Landasan pandangannya, bahwa di jenjang sekolah dasar, khususnya tiga tahun pertama tidak sampai menilai pengetahuan tetapi untuk membangun perilaku yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UPI Angkatan 2019, Kumpulan Artikel Pendidikan Guru di Dunia (Jakarta; 2020) Pdf

<http://factsanddetails.com/japan/cat16/sub182/item592.html>

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UPI Angkatan 2019, Kumpulan Artikel Pendidikan Guru di Dunia (Jakarta; 2020) Pdf

OECD 2012-13, Japan: overview of the education system'', OECD GPS, <http://gpseducation.oecd.org/content/mapOfEducationSystem/JPN/JPN1997EN.pdf>

Citra Kurniawan Wawasan Pendidikan: Studi Komparatif Sistem Pendidikan Di Beberapa Negara Maju (Korea Selatan dan Jepang) pdf

https://www.researchgate.net/publication/326119730_Wawasan_Pendidikan_Studi_Komparatif_Sistem_Pendidikan_di_Beberapa_Negara_Maju_Korea_Selatan_dan_Jepang

<https://education.jinto.go.jp/en/school-exchanges/japanese-education-system/#:~:text=The%20Japanese%20school%20system%20primarily,elementary%20and%20junior%20high%20school>

<https://bukuonlinestore.com/sistem-pendidikan-di-jepang/>

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/brochure.html

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1749-8171.2009.00159.x>

https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Japan

<http://yana.staf.upi.edu/2017/01/06/mengenal-sistem-pendidikan-jepang/>

<https://www.sahabatguru.com/2020/09/05/jepang-unggul-karena-menghargai-guru/>

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62211396/PENDIDIKAN_GURU_DI_JEPANG_siti_logayah-dikonversi20200226-21821-18dsto8.pdf?1582789521=&responsecontentdisposition=inline%3B+filename%3BPENDIDIKAN_GURU_DI_JEPANG

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Finnish Local and Regional Authorities, Education, Culture and Well-being, <http://www.localfinland.fi/en/authorities/education-culture-wellbeing/Pages/default.aspx>.
- Berry, J., and P. Sahlberg. 2006. *Accountability affects the use of small group learning in school mathematics*. Nordic Studies in Mathematics Education 11
- Assegaf, Abd.Rachman. 2003. *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media
- Aisyah. 2014. *Nasionalisme dan Pembentukan Negara Islam Pakistan*, *Jurnal Politik Profetik*, Volume. 4, No. 2, Makassar: UIN Alauddin
- Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam MeLacak Akar-Akar Sejarah Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Amin Valliani Teaching Islamiyat, akses <http://www.dawn.com> pada tanggal 23 Januari 2021.
- Anonim. <http://ikasp.wordpress.com/2012/12/28/faktor-faktor-penyebab-rendahnya-kualitas-pendidikan-di-indonesia/> Daiakses 18.12.2014.
- "Archived copy" (PDF). Archived from [the original](#) (PDF) on July 30, 2011. Retrieved July 30, 2011.
- "And now the 50-minute hour: Mental health in China" [The Economist](#) August 18, 2007. p. 35. Retrieved August 18, 2007.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assegaf, A. R. 2003. *Internasionalisasi Pendidikan Islam; Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media.
- Agustiar Syah Nur, (2001), *Perbandingan sistem pendidikan*, Bandung : Lubuk Agung.
- Abdul Rauf, Imam Feisal. 2007. *Seruan Azan dari Puing WTC*. Bandung: MIZAN.
- Abdullah, dkk. 2003. *The American Muslim Identity, Speaking for Ourselves*. Los Angeles: Multimedia Vera International.
- Amin, Surahmin. "Islam di Amerika; Potret Perkembangan Dakwah Islam Pasca Tragedi 9 September 2001 ", *Tasamuh*, Vol. 4, No. 1

Amin Valliani Teaching Islamiyat, akses <http://www.dawn.com> pada tanggal 23 Januari

Binti Maunah, 2011. *Perbandingan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras

Busse, R. (2018). *Health System Review*. April

Blum, N.; Fee, E. 2008. "The American Journal of Public Health (AJPH) from the American Public Health Association (APHA) publications" *American Journal of Public Health*. **98**(9): 1593. doi:10.2105/ajph.2008.134577 PMC 2509595 PMID 18633073

China: End Arbitrary Detention in Mental Health Institutions Human Rights Watch, May 3, 2013.

Chantra Tantipongsanuruk .2013. "Personal Communication"

Eddy Iswandy Haji Ismail, *Integrasikan Pendidikan Teknik dan Vokasional*, Pelita Brunei, 18 March 2013.

Citra Kurniawan Wawasan Pendidikan : *Studi Komparatif Sistem Pendidikan Di Beberapa Negara Maju (Korea Selatan dan Jepang)* pdf

Centraal Bureau voor de Statistiek.2012. *Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 (Yearbook education in figures 2012)*.

Elhady, Aminullah. 2015. "Perkembangan Islam di Amerika Sebelum dan Setelah Tragedi 11 September 2001", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 13, No. 1

European Agency for Development in Special Needs Education (2012), *Special needs*

education within the education system – Finland, European Agency for Development in Special Needs Education, Odense, <http://www.european-agency.org/country-information/finland/national-overview/special-needs-education-within-the-education-system>.

European Agency for Development in Special Needs Education (n.d.), *Country information for Finland*, European Agency for Development in Special Needs Education, Odense, <http://www.european-agency.org/country-information/finland>.

European Commission (2013), Eurypedia, European Encyclopedia on National Education Systems, "Finland– Overview", <https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Overview>.

European Commission (2013), Eurypedia, European Encyclopedia on National Education Systems, —Finland: Specific Ongoing Reforms and Policy Developments at National Level, <https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/>

mwikis/eurydice/index.php/Finland:

Specific_Ongoing_

Reforms_and_Policy_Developments_at_National_Level.

Finland:Specific_Ongoing_Reforms_and_Policy_Developments_at_National_Level.
1.

Finnish National Board of Education (2001), "Core Curriculum Guidelines, Core Curriculum for Pre-School Education 2000", Helsinki,

Finnish National Board of Education (2001), "Core Curriculum Guidelines, Core Curriculum for Pre-School Education 2000", Helsinki, http://www.oph.fi/english/sources_of_information/core_curricula_and_qualification_requirements/pre-school_education.

Finnish National Board of Education, "Preparatory Instruction and Guidance for Vocational Education and Training (Ammattistartti)", Helsinki, http://www.oph.fi/download/132290_brochure_preparatory_instruction_and_guidance.pdf.

Finnish National Board of Education. 2008. *Education in Finland*, Helsinki,

Farish A. Noor, dkk. 2007. *The Madrasah in Asia Political Activism and Transnational Linkages*, Amsterdam: University Press.

Green, 2006. *Education, Equality and Social Cohesion: A Comparative Analysis*. New York: Palgrave Macmillan.

Hayyie Abdul al-Kattani dkk. 2009. *Study in Islamic Countries: Panduan Lengkap Kuliah di Negara-negara Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Hariyanto, H. 2012. *Islam, Iran, dan Peradaban: Peran dan Kontribusi Intelektual Iran terhadap Peradaban Islam*. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institut.

<http://galihbzhari.blogspot.com/2014/03/kajian-kurikulum-sistem-pendidikan.html> <http://konsultanpendidikan.com/2013/07/22/mengenal-lebih-dalam-tentang-negeri-ginseng-sistem-pendidikan-korea-selatan-part-1/>

Hasan, Hamid. 2012. *Pendidikan Sejarah Indonesia: Isu dalam Ide dan Pembelajaran*. Bandung: Rizqi Press.

Habe, H., & Ahiruddin, A. 2017. Sistem Pendidikan Nasional. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24967/ekombis.V2i1.48>

Hammar, F. 2002. History Of Modern Genetics In Germany. *Advances In Biochemical Engineering/Biotechnology*. <https://doi.org/10.1007/3-540->

44604-4_1

Hippach-Schneider, U., Krause, M., & Woll, C. (2007). *Vet In Germany*. European: Luxembourg: Office For Official Publications Of The European Communities.

Huang, Hsuan-Ying. (2015). "*From psychotherapy to psycho-boom: a historical overview of psychotherapy in China*" *Psychoanalysis & Psychotherapy in China*. 1: 1-30.

Hizi, Gil. (2017). "*Developmental' Therapy for a 'Modernised' Society: The Sociopolitical Meanings of Psychology in Urban China*" *China: An International Journal*. 15(2): 98-119.

Nio, Joe-lan (1966). *Sastra Tiongkok Sepintas Lalu*. Jakarta: Gunung Agung.

<http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/> akses tanggal 15 Januari 2021.

<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-> inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia. Diakses tanggal 11 Januari 2021.

<http://unesco.org.pk/education/teachereducation/lessonplan.html>
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149679_eng

<https://kaltim.idntimes.com/news/indonesia/rosa-folia/ini-5-negara-yang-pertama-mengakui->

<https://kumparan.com/potongan-nostalgia/pembangunan-terusan-suez-sebagai-jalan-pintas-perdagangan-global-1sq8gAFhEYJ/full>

<https://www.geografi.org/2017/08/geografi-negara-mesir.html>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/pvwj31313/sistem-gaji-di-masa-peradaban-islam>

https://www.researchgate.net/publication/326119730_Wawasan_Pendidikan_Studi_Komparatif_Sistem_Pendidikan_di_Beberapa_Negara_Maju_Korea_Selatan_dan_Jepang

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/brochure.html

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1749-8171.2009.00159.x>

https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Japan

Husin, *Islamic Religious Education In The United States Of America (Islamic Education Institution)*, Jurnal Ilmiah AL-MADRASAH, vol 2 no. 2 januari-juni 2018.

- Harianto, 2021. *Education Systems In The United States Of America*, Surabaya: researchgate.net.
- Ida Mustofa. 2015. *Relasi Islam dan Kekuasaan dalam Konteks Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal: Urwatul Wutsqo, Vol. 4, No.2 Nganjutk: STAI Darussalam
- Jujun Masnah, *Konsep Dan Praktik Pendidikan Multikultural Di Amerika Serikat Dan Indonesia* Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 17, Nomor 4, Februari 2011, Bandung 40154 VOL 17, NO 4 2011.
- Khalik, Subehan. “ Sejarah Perkembangan Islam di Amerika”, Jurnal al-daulah, vol.4 no.2 (2018).
- L. Esposito, John. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, vol. 3 (New York: Oxford University, 1995).
- Kuiper, W. 1961. Historisch-didactische aspecten van het onderwijs in het Duits. Beschouwingen over de ontwikkeling van het Hoogduits als leervak op de Nederlandse scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. PhD diss., Universiteit van Amsterdam. Groningen: Wolters.
- Loonen, P.L.M. 1991. For to learne to buye and sell: learning English in the Low Dutch area between 1500 and 1800. PhD diss., Katholieke Universiteit Nijmegen. Amsterdam/Maarsse: APA-Holland University Press.
- M. Barrett, Paul. 2008. *American Islam Upaya Ke arah Esensi sebuah Agama*. Jakarta: Lentera.
- Mroueh, Yousuf. 2015. *Muslim in the Americas Before Columbus*, (EBook). Mulyana, Dedy. *Islam di Amerika*. Bandung: PenerbitPustaka,
- Masunah, *Concepts And Practice Of Multicultural Education In The United States Of America And Indonesia*. Jilid 18, Nomor 4, Februari 2011, Bandung 40154 VOL 17, NO 4 2011.
- Mohammad Huzaiman bin Haji Kassim, “Adakah Spn21 Itu Mendukung Visi Dan Misi Jabatan Pengajian Islam” makalah, Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 2009.
- Mustofa Idam. 2015. “*Relasi Islam dan Kekuasaan dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*” Urwatul Wutsqo, Volume 4, Nomor 2.
- Maunag Binti. 2011. *Perbandingan Pendidikan Islam, Cet.1*. Yogyakarta: Teras, Subhan Arief. 2012. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20; Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhaimin. 2012. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Muskens, W., & Hanft, A. (2009). *Design of the International Comparative Studi dalam Michaela Knust, Continuing Higher Education and Lifelong Learning: An International Comparative Studi on Structures, Organisation and Provisions*. London and New York: Springer.
- Nurhaswati. 2015. Pendidikan Madrasah dan Prospeknya Dalam Pendidikan Nasional. *Jurnal Potensial*, 14
- Norliah Md Zain, "SPN21 Berdasarkan Student Centred Learning Bukan Examination Oriented," *Pelita Brunei*, 18 March 2013.69
- Perbandingan Kurikulum Studi Sosial di Korea Selatan dan Brunei Darussalam, *Research and Development Journal Of Education* Vol. 5 No. 2 April 2019
- Rachman Abd Assegaf. 2003. *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rahman, Imdadun. 2011. *Arus Baru Radikal Islam: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011
- Rahmat, R. 2014. Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sistem dan Pekembangannya Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan). *Rihlah*, 1(2).
- Syah Nur, Agustiar, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, Bandung: Lubuk Agung, 2001.
- Syah Agustiar. 2001. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung Bandung.
- Shahvar, S. 2009. *The Forgotten Schools; The Baha'is and Modern Education in Iran, 1899-1934*.
- Stromquist, N. P. 2005. *Comparative and Internasional Education*. New York.
- Richard Hofstadter, dkk. 2004. *Garis Besar Sejarah Amerika Serikat*. Deplu AS.
- Richard N. Current. 1965. *American History: A Survey*. New York: Alfred A. Knopft.
- S. Prada, Juhaya. 2014. *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam*. Tasikmalaya: Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah.
- Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, Perbandingan Pendidikan Islam. Yogyakarta, Teras,
- Soebahar, Abd. 2013. Halim. *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordanasi guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: Rajawali Pres, cet-1

- Teks Perdana dalam Konvensyen Pendidikan Islam. 2011. Brunei: Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas.
- Thohir, Ajid. 2004. Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taat Wulandari, 2008. Kebijakan Pendidikan Di Amerika Serikat, Jakarta: ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah.
- Yunus, Mahmud.2007. *Perbandingan Pendidikan Modern di Negara Islam dan Intisari Pendidikan*
- Yunus, Mahmud.2008. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Mahmud Yunus Wadzurriyyah

PROFIL PENULIS

<p>Nama: Heru Nugroho T.t.l: Palembang, 12 Maret 1996 Anak ke berapa dari berapa saudara : anak ke 1 dari 3 bersaudara Nama ayah: Untung Purnomo Nama ibu: Tukinem Alamat: Jl. Sukarela Lr. Batu Jajar Gg. Jaya Rt. 20 Rw. 07 Palembang 30152 Motto hidup: Sukses itu penting namun bersyukur jauh lebih sukses</p>	<p>Nama: Achmad Zulfi T.t.l: Karang Tanding, 3 Desember 1995 Anak ke 1 dari 4 saudara Nama ayah: Sapri Nama ibu: Sunarya Alamat: Dusun 1 Desa Karang Tanding, Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Motto hidup: Kejujuran Kunci Kesuksesan</p>
<p>Nama: Junaidi T.t.l: gunung batu 26 08 1994 Anak ke berapa dari berapa saudara? Anak ke 3 dari 4 saudara Nama ayah: ibrahim Nama ibu: aisah Alamat: gunung batu oku timur Motto hidup: hiduplah dimana tanah dipijak disitu langit di jinjing.</p>	<p>Nama: Ferry kurniawan T.t.l: 17 maret 1996 Anak ke berapa dari berapa saudara? Anak ke 1 dr 2 saudara Nama ayah: Dainuri Nama ibu: Kordiah Nama Istri : Hanny Oktaviani Alamat: desa pemulutan ulu kabupaten Ogan ilir Motto hidup: sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain.</p>
<p>Nama: Indra Wandaka T.t.l: 3 Agustus 1995 Anak ke berapa dari berapa saudara? 1 dari 2 Nama ayah: Marsum Nama ibu: Suginem Alamat: V. Surodadi Motto hidup: <i>"The key to realizing dreams is not to focus on success but on meaning. Even small steps and small victories along your journey can have a greater meaning."</i></p>	<p>Nama: Budi Hartono T.t.l: Rimba Samak 10 oktober 1995 Anak ke berapa dari berapa saudara?: anak ke dua dari dua saudara Nama ayah: Muslim Nama ibu: Baiti Alamat: Ds. Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. Oki Motto hidup: "Jangan menunggu. Takkan pernah ada waktu yang tepat."</p>
<p>Nama: Arman T.t.l: Bunglai, 1 Januari 1988 Istri: Nur Azizzah Rotul Jannah Anak ke berapa dari berapa saudara? anak ke 3 dari 9 saudara Nama ayah: Rozali</p>	<p>Nama: heri purnawan, S.Pd.I T.t.l: cahaya mas, 27 juli 1993 Anak ke 3 dari 4 saudara Nama ayah: supani Nama ibu: roliyah Alamat: desa nusa agung rt.003/rw.001</p>

<p>Nama ibu: Heriyati Alamat: Blok H, Pondok Asri Marta Jaya Lubuk Raja.OKU Motto hidup: Sabar, ikhtiar, Tawakal, untuk kesuksesan.</p>	<p>kec. Belitang III kab. OKU Timur prv. SUMSEL Motto hidup: Berbagi dan mempermudah urusan orang lain dengan setulus hati, karena yang kita punya sesungguhnya adalah yang kita berikan bukan yang ada saat ini.</p>
<p>Dicky fitriansyah Palembang 23 02 1995 Anak ke 4 dari 5 saudara Suryadi Munwatini Jalan tembok baru perumahan metric garden no 6 plaju Motto hidup: jangan memermasalahkan yang bukan masalah sehingga timbul masalah maka disituh masalahnya</p>	<p>Nama : ALMIRTA TTL : Tanjung Batu, 24 Mei 1974 Anak Ke : 1 dari 5 bersaudara Nama Ayah : Ahmad Zaini Nama Ibu : Nurlela Nama Istri : Rahmayana Alamat: Jl/ Letkol Adriandz Suka Bangun 2 Komp. Puri Impian 2 Blok B.12 Rt. 092 Rw.01 Kel. Sukajaya kec. Sukarami Palembang Motto : Bermanfaat dan Menginspirasi</p>
<p>Nama: Bayu Sugara T.t.l: Ds. Saugnaga 07 Juni 1996 Anak ke berapa dari berapa saudara? Anak Ke 1 dari 3 Bersaudara Nama ayah: Ahrawi Nama ibu: Liswati Alamat: Ds. Saugnaga, Kec. Peninjauan, Kab. Baturaja OKU Induk Motto hidup: The Winner Never Stop Traying</p>	<p>Nama: Imam Ma'ruf T.t.l: Baturaja, 29-09-1996 Anak ke 1 dari 2 bersaudara Nama ayah: Suprayitno Nama ibu: Supriati Alamat: KRUJON RT. 04/02 KEC. Semendawai suku iii kab. Oku timur Motto hidup: Lakukan apa yang menjadi keinginanmu sekarang, nikmati hal-hal kecil dalam hidup dan perlakukan setiap hari seolah itu hari terakhirmu</p>
<p>Nama: Dwi Ayu Khairil Barkiyah T.t.l: Bingin Teluk (Muratara) Anak ke: 2 dari 5 saudara Nama ayah: Diyarliy Nama ibu: Mursidah Alamat: Bingin Teluk, Rawas Ilir, Muratara Motto hidup: عش كريما أو مت شهيدا</p>	<p>Nama: ayu rizki amaliah T.t.l: Palembang 12 November 1996 Anak ke berapa dari berapa saudara? Anak ke 3 dr 4 saudara Nama ayah: rozali Nama ibu: misnayati Alamat: pemulutan ogan ilir Sumatra selatan Motto hidup: sebaik-baik manusia adalah yg bermanfaat bagi manusia lainnya</p>

<p>Nama: Alisa Merliana T.t.l: Palembang 13 Oktober 1995 Anak ke berapa dari berapa saudara? Anak ke 2 dari 5 saudara Nama ayah: Aliyan Abdul Rozak Nama ibu: Meriyati Alamat: Desa Payakabung Indralaya Utara Motto hidup: "Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu."</p>	<p>Nama: Heniati T.t.l: Banyuasin,03 Agustus 1996 Anak ke berapa dari berapa saudara? Anak ke 11 dari 11 saudara Nama ayah: M.Syarifudin Nama ibu: Sawati Alamat: Jl. Masjid Lama Dusun 01 Desa Terusan Tengah Motto hidup: "Sebaik-Sebaik Manusia ialah Manusia yang bermanfaat Bagi orang Lain"</p>
<p>Nama: Aryatti Lasiyah T.t.l: Bangun Rejo, 20 November 1996 Anak ke berapa dari berapa saudara? Anak ke 1 dari 2 saudara Nama ayah: Paryono Nama ibu: Suti Mubarokah Alamat: Lr Swadaya, Ilir Barat 1, Palembang Motto hidup: "Utamakan Allah, maka kamu akan diutamakan oleh Nya."</p>	

Nama : Dr. Abdurrahmansyah. M.Ag
NIP : 197307131998031003
Ttgl : Cambai-bangka, 13 Juli 1973
Alamat lengkap : Jalan Macan Kumbang Raya RT 49 RW 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang.
Jabatan fungsional : Lektor Kepala dan Ketua Prodi S2 Stuy Islam di Univesitas Uin Raden Fatah Palembang
Gmail : abdurrahmansyah73@radenfatah.ac.id

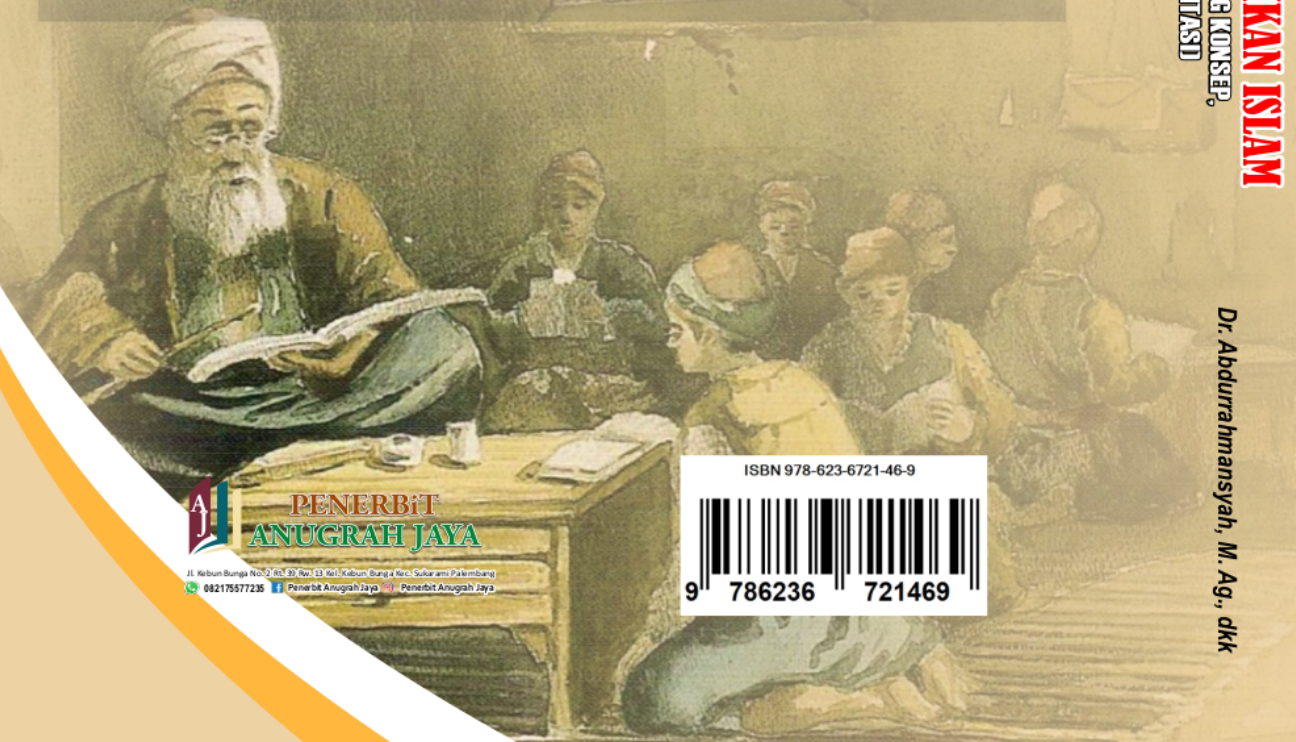
PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM



Studi perbandingan pendidikan sampai saat ini terus mengalami perkembangan baik dari aspek konten, cakupan studinya maupun aspek metodologi. Kajian perbandingan sudah sangat berkembang melalui pendekatan multidisipliner terutama pada 50 tahun terakhir. Dengan demikian dari sisi scope atau wilayah konten kajian ini sangat berkembang dan semakin banyak menarik minat pada ilmuwan di seluruh dunia (Cowen & Kazamias, 2009). Menariknya studi perbandingan pendidikan karena, sangat berpotensi untuk memahami berbagai persoalan dan kondisi nyata dari fenomena pendidikan di berbagai negara dalam berbagai isu dan aspek pendidikan. Bahkan studi perbandingan pendidikan dapat membongkar semua aspek pendidikan di sebuah negara mulai dari sejarah awal sampai masa kontemporer. Seorang ilmuwan bidang *comparative education*, Boadfoot T (1978), justru menegaskan bahwa kajian perbandingan pendidikan dapat menjadi pertimbangan bagi sebuah negara untuk melakukan reproduksi pendidikan, sosial, dan budaya.

PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM
ISU-ISU KONTEMPORER TENTANG KONSEP,
KEBAJAKAN, DAN IMPLEMENTASIN

Dr. Abdurrahmansyah, M. Ag., dkk



**PENERBIT
ANUGRAH JAYA**
Jl. Kebun Bunga No.2, Gg. 39, RW. 03, Kel. Yabon, Sungalaya, Sukaraja Palembang
082175577235 Penerbit Anugrah Jaya Penerbit Anugrah Jaya

ISBN 978-623-6721-46-9



9 786236 721469

PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM (Isu-Isu Kontemporer Tentang Konsep, Kebijakan Dan Implementasi)

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ rifnihayati97.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On